SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 164);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025.
(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:
   a. bab I berisi Pendahuluan;
   b. bab II berisi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
   c. bab III berisi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V berisi Penutup.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PENJABARAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

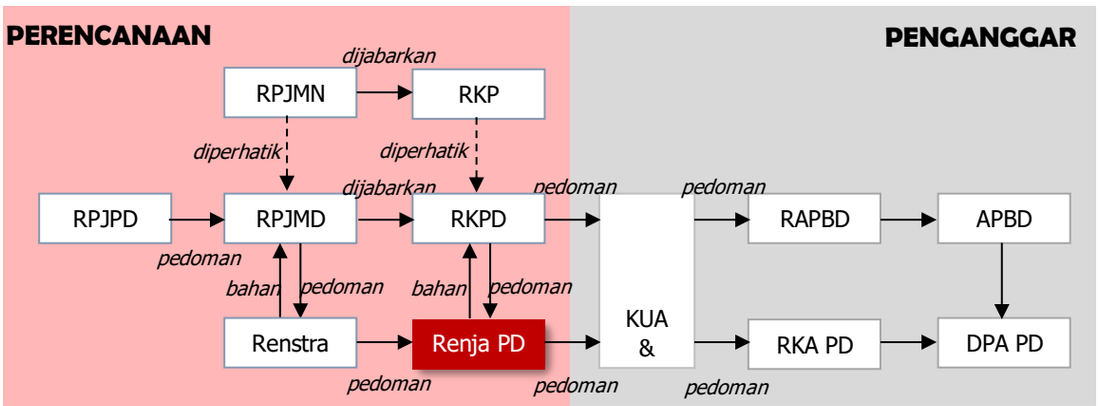

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian anggaran karena adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (3) perubahan kebijakan di Pusat yang berimbas pada belanja kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2021-2026;

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lan

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%	1 Dokumen	16,67%
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	7 laporan	5 laporan	2 laporan	40%	2 laporan	40%
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	0	0%	0	0%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6429 orang/bulan	5667 Orang/bulan	5667 Orang/bulan	100%	5667 Orang/bulan	100%
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 dokumen	2 Dokumen	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	1 laporan	1 Laporan	0	0%	0	0%
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	0	0%	0	0%
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0%	0	0%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	2 paket	2 paket	1 paket	50%	1 paket	50%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	3 laporan	25%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.600 Orang	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	4 dokumen	4 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	10 unit	10 unit	5 unit	50%	5 unit	50%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	2 laporan	50%
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	12 laporan	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	8 laporan	8 laporan	4 laporan	50%	4 laporan	50%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	6 unit	6 unit	3 unit	50%	3 unit	50%
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	124 Unit	125 unit	127 unit	60 unit	48%	60 unit	48%
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	7 unit	4 unit	1 unit	25%	1 unit	25%
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	3 unit	3 unit	1 unit	33,30%	1 unit	33,30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	16 unit	16 unit	8 unit	50%	8 unit	50%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65%	105,59 %	115.63%	105,59 %	91,32%	105,59 %	91,32%
		APK PAUD 5-6 tahun	86.39%	97,57%	86.21 %	97,57%	113,18 %	97,57%	113,18%
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	10 Lembaga	12 lembaga	10 Lembaga	83,33%	10 Lembaga	83,33%
		APK SD/MI	111.75%	103,12 %	111.73 %	103,12 %	92,29%	103,12 %	92,29%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	1 unit	1 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	1 ruang	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	2 ruang	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	15 unit	15 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Ruang	2 ruang	2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	3 ruang	2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	186 Unit	61 paket	16 paket	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		11171 peserta didik	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	42 Lomba	5000 peserta didik	5000 peserta didik	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Kegiatan	1600 orang	1600 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2 Kegiatan	502 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	100%	508 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	88.951 Siswa	508 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	100%	502 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	499 orang	508 orang	508 orang	100%	508 orang	100%
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		5555 paket	4500 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		25 ruang	20 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		13 unit	15 unit	7 unit	47%	7 unit	47%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		502 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	508 satuan pendidikan	100%	508 satuan pendidikan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		144 Ruan	85 Ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Subkeg baru		134.000 Peserta Didik	134.000 Peserta Didik	100%	134.000 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	1 unit	2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	2 ruang	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1 ruang	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	5 ruang	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1 unit	2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	329 Ruang	97 ruang	50 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	4 unit	4 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Sekolah	8 paket	7 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		5333 peserta didik	4568 Peserta Didik	4568 Peserta Didik	100%	4568 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Sekolah	4 paket	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Lomba	2240 peserta didik	2500 Peserta Didik	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Kegiatan	900 orang	900 Orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	2 Kegiatan	190 satuan pendidikan	230 Satuan Pendidikan	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33615 Siswa	194 satuan pendidikan	230 Satuan Pendidikan	230 Satuan Pendidikan	100%	230 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	190 orang	190 Orang	190 Orang	100%	190 Orang	100%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		224 satuan pendidikan	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	100%	250 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		37 ruang	30 Ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		28 paket	46 Paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		-	2 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	22 Unit	2 unit	2 unit	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	1 unit	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	3 unit	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	13 Unit	5 paket	1 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	88 Sekolah	2 paket	2 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12.749 Siswa	2125 peserta didik	2458 Peserta Didik	2458 Peserta Didik	100%	2458 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	88 Sekolah	3 paket	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5 Kegiatan	39569 peserta didik	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Kegiatan	5 orang	5 orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Kegiatan	250 satuan pendidikan	260 satuan pendidikan	260 satuan pendidikan	100%	260 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	295.230 Siswa	1102 satuan pendidikan	689 satuan pendidikan	689 satuan pendidikan	100%	689 satuan pendidikan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		4 unit	1 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		11 paket	10 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	4 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		-	2 Paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		-	42563 Satuan Pendidikan	42563 Satuan Pendidikan	100%	42563 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	6 Ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		1 unit	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3 Kegiatan	4325 peserta didik	3450 peserta didik	3450 peserta didik	100%	3450 peserta didik	100%
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Satpen	1 paket	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Kegiatan	50 orang	50 orang	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Kegiatan	50 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21.090 Siswa	32 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	100%	40 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		3450 peserta didik	3450 peserta didik	3450 peserta didik	100%	3450 peserta didik	100%
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		1 unit	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	1 paket	0	0%	0	0%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	30 Kegiatan	-	4 Dokumen	-	-	-	-
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6 Kegiatan	63606 buku	6585 Buku	0	0%	0	0%
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	30 Kegiatan	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	100%
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		-	4 Dokumen	-	-	-	-
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	5 Kegiatan	4 dokumen	4 dokume	0	0%	0	0%
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia		0	4500 Buku	0	0%	0	0%
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		6 dokumen	6 dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.70%	85,02%	90,29%	85,02%	94,16%	85,02%	94,16%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		18 dokumen	18 dokumen	8 dokumen	44,50%	8 dokumen	44,50%
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Kegiatan	7 Laporan	7 Laporan	0	0%	0	0%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	95%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24 Sekolah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6 Sekolah	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang D iselenggarakan oleh Masyarakat	1740 Lembaga	100 dokumen	15 Dokumen	7 dokumen	47%	7 dokumen	47%
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1200 Lembaga	100 dokumen	15 Dokumen	10 dokumen	67%	10 dokumen	67%
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Kegiatan	100 dokumen	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 ada beberapa sub kegiatan yang telah tercapai (100%) diantaranya adalah “Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik”, “Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar”, “Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama”.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran diantaranya adalah: “Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD”, “Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya”, “Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya”, “Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SD, SMP, PAUD”, “Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jenjang SD”, “Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah jenjang SD”, “Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah jenjang SMP”, “Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jenjang SMP”, “Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD”, “Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PNF”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta dana transfer dari APBN. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.359.071.377.612,77	579.077.951.709,00	42,61%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	925.194.310.994,10	418.444.455.115,00	45,23%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.754.600,00	8.299.000,00	5,26%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.039.000,00	998.000,00	1,81%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.336.000,00	0,00	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.908.800,00	0,00	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.336.000,00	0,00	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.908.800,00	0,00	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.744.000,00	3.375.000,00	50,04%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.482.000,00	3.926.000,00	41,40%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	897.504.935.520,00	406.844.579.509,00	45,33%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	890.982.610.480,00	403.648.454.099,00	45,30%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.514.778.640,00	3.193.350.410,00	49,02%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.546.400,00	2.775.000,00	36,77%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.548.400,00	8.025.000,00	3,41%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	235.548.400,00	8.025.000,00	3,41%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.812.398.237,10	497.470.074,00	27,45%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000,00	29.450.000,00	34,65%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	195.000.000,00	73.878.500,00	37,89%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.373.000,00	82.961.500,00	48,41%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.000.000,00	31.892.110,00	25,51%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	6.524.900,00	10,04%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575.304.431,00	272.763.064,00	47,41%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	595.720.806,10	0,00	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.366.240,00	159.250.000,00	41,65%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	382.366.240,00	159.250.000,00	41,65%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.053.402.259,00	10.024.595.170,00	45,46%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.255.600.000,00	9.799.495.670,00	46,10%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	797.802.259,00	225.099.500,00	28,21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.905.738,00	902.236.362,00	29,60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.036.296,00	87.453.030,00	43,29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.092.871,00	289.824.482,00	35,13%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.516.100.000,00	288.770.200,00	19,05%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.676.571,00	196.239.400,00	46,21%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	39.949.250,00	49,94%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	363.164.459.391,67	133.033.304.443,00	36,63%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	195.933.570.956,67	65.454.161.643,00	33,41%
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.997.960.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.943.880.000,00	0,00	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	493.880.000,00	0,00	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	695.250.000,00	0,00	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.868.784.068,00	0,00	0,00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.010.479.120,00	5.845.000,00	0,58%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	445.208.086,67	44.962.500,00	10,10%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	805.796.300,00	750.000.000,00	93,08%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.969.950.000,00	49.350.290.968,00	41,48%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	251.826.240,00	118.432.000,00	47,03%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.252.499.932,00	0,00	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	22.843.283.984,00	0,00	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.043.880.000,00	1.499.961.000,00	49,28%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.156.336.815,00	317.827.250,00	27,49%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.581.671.440,00	103.637.925,00	0,82%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	17.572.884.971,00	13.263.205.000,00	75,48%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	124.247.358.055,00	46.377.910.680,00	37,33%
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	8.099.320.000,00	6.658.420,00	0,08%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	999.320.000,00	0,00	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.069.320.000,00	6.890.200,00	0,10%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.499.320.000,00	442.060.396,00	17,69%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	44.267.920,00	0,00	0,00%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16.994.363.640,00	13.291.322.000,00	78,21%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.042.551.875,00	185.160.500,00	17,76%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	132.002.970,00	21.100.000,00	15,98%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.500.000,00	5.028.640,00	12,73%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	69.886.880.000,00	31.601.349.874,00	45,22%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	221.419.610,00	105.332.000,00	47,57%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.319.356.540,00	176.568.750,00	13,38%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.965.445.000,00	401.389.900,00	2,68%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	418.390.500,00	0,00	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	515.900.000,00	135.050.000,00	26,18%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.090.281.050,00	17.464.441.970,00	49,77%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.197.280.000,00	199.114.020,00	9,06%
Pengadaan Mebel PAUD	5.000.000,00	0,00	0,00%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	482.280.000,00	111.010.000,00	23,02%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.041.847.540,00	2.746.960.300,00	90,31%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	96.312.640,00	51.653.000,00	53,63%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	262.702.360,00	141.808.000,00	53,98%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.012.920.000,00	13.642.841.350,00	50,50%
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	247.280.000,00	370.000,00	0,15%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	268.008.000,00	64.389.300,00	24,03%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	624.320.000,00	0,00	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	10.000.000,00	0,00	0,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	804.330.510,00	506.296.000,00	62,95%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	38.000.000,00	0,00	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.893.249.330,00	3.736.790.150,00	47,34%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.550.000,00	10.275.000,00	33,63%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	82.455.040,00	5.850.000,00	7,09%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32.159.600,00	0,00	0,00%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.412.170.000,00	3.628.915.150,00	48,96%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	39.000.000,00	35.615.000,00	91,32%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	73.274.690,00	56.135.000,00	76,61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	223.640.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	121.798.620,00	23.005.500,00	18,89%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	58.500.000,00	23.005.500,00	39,33%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.000,00	0,00	0,00%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	48.500.000,00	23.005.500,00	47,43%
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	63.298.620,00	0,00	0,00%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	14.574.310,00	0,00	0,00%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	0,00	0,00%
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	48.724.310,00	0,00	0,00%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	70.457.815.687,00	27.482.793.551,00	39,01%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70.457.815.687,00	27.482.793.551,00	39,01%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.529.015.687,00	26.704.676.051,00	40,75%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.928.800.000,00	778.117.500,00	15,79%
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	132.992.920,00	94.393.100,00	70,98%
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	18.175.000,00	4.938.100,00	27,17%
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.000.000,00	4.938.100,00	98,76%
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.175.000,00	0,00	0,00%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114.817.920,00	89.455.000,00	77,91%
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	21.817.920,00	11.250.000,00	51,56%
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	93.000.000,00	78.205.000,00	84,09%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 anggaran digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp 1.359.071.377.612,77. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 579.077.951.709,00 (42,61%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 779.993.425.903,77 (57,39%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,42	103,44	103,46	103,47	103,48	103,49	103,42	98,24	106,05	102,9	102,9	-	103,48
Sasaran :														
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,37	76,15	77,15	78,25	80	80,35	72,37	77,21	77,80	78,80	78,80	-	80
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	78,64	79,2	80,15	81,78	83,92	85,03	78,64	69,40	86,65	88,10	88,10	-	83,92
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,55	86,61	86,73	87,20	87.6	88,20	86,55	79,98	91,29	95,58	95,58	-	87.6

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka Partisipasi Kasar (APK)” dengan target sebesar 103,48%, dengan realisasi sebesar 102,9 % (capaian 99,44 %);
b. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yairu “Nilai AKIP” dengan target sebesar 80 belum dapat tercapai melampaui target dengan realisasi sebesar 78,8 (capaian 98,5%); Sasaran 2 “Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas” memiliki 2 indikator, sebagai berikut: 1) Indikator “Angka Partisipasi Murni (APM)” dengan target sebesar 83,92 %, dengan realisasi sebesar 88,1% (capaian sebesar 104,98%); 2) Indikator “Angka Partisipasi Sekolah (APS)” sudah dapat mencapai target sebesar 87,60 %, dengan realisasi sebesar 95,58% (capaian sebesar 109,11%);

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan pendidikan;
b. Penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas;

- Kinerja Sektor Pendidikan
  Meskipun RLS Kota Semarang sudah mencapai 10,53 tahun 2024 namun dalam konteks pelaksanaan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kewajiban pemerintah kota masih belum terpenuhi. Pemerintah kota masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai tingkat SMA/MA/sederajat (Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal).
- Sarana Prasarana
  Kuantitas dan kualitas sarana - prasarana yang terstandar secara tidak langsung ikut menunjang naiknya capaian bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kota Semarang yang mana belum mencapai 100%,terutama pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.
- Tenaga Pendidik
  Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia baik pegawai maupun guru untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Keterbatasan jumlah guru ASN;
   - Kurangnya kompetensi guru terkait teknologi informasi;
   - Pencapaian Rapor Pendidikan;
b. Peluang:
   - Mengangkat tenaga guru non ASN;

- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, bimbingan teknis, *In House Training* (IHT) dan pendampingan pelaksanaan program terkait;
- Menyiapkan guru dengan membentuk tim Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya penanganan menurunnya karakter dan psikososial;
- Sosialisasi dan pendampingan dalam pencapaian Rapor Pendidikan;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas meliputi :
   - Peningkatan kinerja sektor pendidikan;
   - Tenaga pendidik;
   - Sarana dan prasarana pendidikan.
b. Pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan dan kurikulum adaptasi yang dikembangkan karena situasi pandemi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN				1.317.440.364.831,74	DINAS PENDIDIKAN				1.317.440.364.831,74	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.317.440.364.831,74	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.317.440.364.831,74	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.317.440.364.831,74	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.317.440.364.831,74	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	892.866.392.729,64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	892.866.392.729,64	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Pelaporan	100%	162.302.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Pelaporan	100%	162.302.400,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	205.039.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	205.039.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.336.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.336.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.908.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.908.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.244.800,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.244.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.908.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.908.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.744.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.744.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.482.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.482.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	689.546.156.520,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	689.546.156.520,00	
			Administrasi Keuangan SKPD	100%				Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	858.864.262.053,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	858.864.262.053,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	6.516.878.640,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	6.516.878.640,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.546.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.546.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	250.023.400,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	250.023.400,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	274.158.915,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	274.158.915,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	2.554.556.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	2.554.556.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	195.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	195.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.618.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.618.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.576.241,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.576.241,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	704.038.431,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	704.038.431,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	382.366.240,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	382.366.240,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	188.564.977,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	188.564.977,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	22.762.463.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	22.762.463.800,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	21.255.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	21.255.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	2.054.656.789,64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	2.054.656.789,64	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	3.260.100.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	3.260.100.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	202.036.296,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	202.036.296,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	825.092.871,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	825.092.871,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	485.460.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	485.460.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	454.039.716,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	454.039.716,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	80.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	354.125.064.875,10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	354.125.064.875,10	
		Kota Semarang	APK SD/MI	111.73%			Kota Semarang	APK SD/MI	111.73%		
		Kota Semarang	APK SMP/MTs	115.65%			Kota Semarang	APK SMP/MTs	115.65%		
		Kota Semarang	APK PAUD 5-6 tahun	86.21%			Kota Semarang	APK PAUD 5-6 tahun	86.21%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	63.576.782.110,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	63.576.782.110,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	400.000.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	400.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	853.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	853.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	6.359.684.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	6.359.684.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	5000 Peserta Didik	1.010.479.120,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	5000 Peserta Didik	1.010.479.120,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Akademik dan Non Akademik					Akademik dan Non Akademik			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	995.208.087,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	995.208.087,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508 Satuan Pendidikan	805.796.300,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508 Satuan Pendidikan	805.796.300,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	508 Satuan Pendidikan	116.441.190.918,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	508 Satuan Pendidikan	116.441.190.918,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508 Orang	251.826.240,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508 Orang	251.826.240,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	1.252.499.932,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	1.252.499.932,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	15.089.283.984,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	15.089.283.984,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	4.352.999.997,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	4.352.999.997,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	508 Satuan Pendidikan	1.206.336.815,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	508 Satuan Pendidikan	1.206.336.815,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	32.907.880.400,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	32.907.880.400,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	134000 Peserta Didik	13.709.784.971,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	134000 Peserta Didik	13.709.784.971,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	37.819.975.080,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	37.819.975.080,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.099.320.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.099.320.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	5.546.570.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	5.546.570.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2.502.156.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2.502.156.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	100.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	100.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568 Peserta Didik	14.509.463.640,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568 Peserta Didik	14.509.463.640,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	1.102.289.875,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	1.102.289.875,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	382.002.970,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	382.002.970,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	39.500.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	39.500.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	230 Satuan Pendidikan	72.591.502.446,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	230 Satuan Pendidikan	72.591.502.446,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	221.419.610,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	221.419.610,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	1.319.356.540,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	1.319.356.540,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	13.606.820.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	13.606.820.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	263.172.431,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	263.172.431,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	515.900.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	515.900.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Semarang	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	8.651.768.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Semarang	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	8.651.768.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2.828.280.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2.828.280.000,00	
	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	215.000.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	215.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	656.280.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	656.280.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458 Peserta Didik	3.115.847.540,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458 Peserta Didik	3.115.847.540,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	281.250.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	281.250.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	246.312.640,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	246.312.640,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	262.702.360,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	262.702.360,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	689 Satuan Pendidikan	27.012.920.000,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	689 Satuan Pendidikan	27.012.920.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	75.000.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	75.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	71.139.299,10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	71.139.299,10	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	830.320.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	830.320.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	10.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	10.000.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563 Satuan Pendidikan	1.204.330.510,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563 Satuan Pendidikan	1.204.330.510,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	261.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	261.000.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	727.640.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	727.640.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	30.550.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	30.550.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	50 Orang	82.455.040,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	50 Orang	82.455.040,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	32.159.600,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	32.159.600,00	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	41 Satuan Pendidikan	7.412.170.000,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	41 Satuan Pendidikan	7.412.170.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	39.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	39.000.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	73.274.690,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	73.274.690,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	223.640.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	223.640.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	122.098.620,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	122.098.620,00	
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	300.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	300.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	100.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	100.000,00	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585 Buku	10.000.000,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585 Buku	10.000.000,00	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	48.500.000,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	48.500.000,00	
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	100.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	100.000,00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	385.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	385.000.000,00	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	14.574.310,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	14.574.310,00	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	4500 Buku	100.000,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	4500 Buku	100.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia			Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Nonformal yang Tersedia			
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	48.724.310,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	48.724.310,00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	70.193.815.687,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	70.193.815.687,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	70.928.106.640,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	70.928.106.640,00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	65.529.015.687,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	65.529.015.687,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	4.664.800.000,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	4.664.800.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	132.992.920,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	132.992.920,00	
		Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%			Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%		
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	150.000.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	150.000.000,00	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	5.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	5.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	13.175.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	13.175.000,00	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	100%	250.000.000,00	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal	100%	250.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Diselenggarakan oleh Masyarakat		Diselenggarakan oleh Masyarakat			Diselenggarakan oleh Masyarakat		yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	21.817.920,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	21.817.920,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	93.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	93.000.000,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu

“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;

3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.
5)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul"

dengan indikator tujuan "Angka Partisipasi Kasar (APK)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu "1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah, 2. Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Nilai AKIP;
b. Angka Partisipasi Sekolah (APS);
c. Angka Partisipasi Murni (APM).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)		103,48
	a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80
	b. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	83,92
		Angka Partisipasi Murni (APM)	87.6

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 Perubahan Kedua Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah” dan indikator sasaran “Indeks Pencapaian SPM Pendidikan, Nilai AKIP Dinas Pendidikan, Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan,”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PENDIDIKAN					913.670.396.824,00	916.296.330.510,00	1.317.440.364.831,74	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					913.670.396.824,00	916.296.330.510,00	1.317.440.364.831,74	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					913.670.396.824,00	916.296.330.510,00	1.317.440.364.831,74	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %	100 %	722.458.568.800,00	718.917.968.760,00	892.866.392.729,64	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %				
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100 %	100 %	100 %	162.302.400,00	162.302.400,00	162.302.400,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %				
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	57.525.400,00	57.525.400,00	205.039.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.745.900,00	9.745.900,00	9.336.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.418.200,00	9.418.200,00	8.908.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.745.900,00	9.745.900,00	1.244.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.418.200,00	9.418.200,00	8.908.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.855.400,00	6.855.400,00	6.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	9.593.400,00	9.593.400,00	9.482.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	693.086.756.560,00	689.546.156.520,00	689.546.156.520,00	
		Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %				
1.01.01.2.020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	5667 Orang/bulan	5667 Orang/bulan	687.197.217.000,00	683.001.470.480,00	858.864.262.053,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
1.01.01.2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.859.632.160,00	6.514.778.640,00	6.516.878.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.932.800,00	9.932.800,00	7.546.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.974.600,00	19.974.600,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	250.023.400,00	250.023.400,00	250.023.400,00	
1.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.023.400,00	250.023.400,00	274.158.915,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	100 %	100 %	2.554.556.400,00	2.554.556.400,00	2.554.556.400,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	135.000.000,00	135.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	196.618.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	52.576.241,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.023.636.400,00	1.023.636.400,00	704.038.431,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	595.920.000,00	595.920.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	382.366.240,00	382.366.240,00	382.366.240,00	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	382.366.240,00	382.366.240,00	188.564.977,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	22.762.463.800,00	22.762.463.800,00	22.762.463.800,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21.255.600.000,00	21.255.600.000,00	21.255.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.506.863.800,00	1.506.863.800,00	2.054.656.789,64	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	100 %	3.260.100.000,00	3.260.100.000,00	3.260.100.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	214.000.000,00	214.000.000,00	202.036.296,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	127 Unit	127 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	825.092.871,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.516.100.000,00	1.516.100.000,00	485.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	454.039.716,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI APK SMP/MTs Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan APK PAUD 5-6 tahun	111.73 115.65 12 86.21 % % lembaga %	111.73 115.65 12 86.21 % % lembaga %	111.73 115.65 12 86.21 % % lembaga %	122.739.321.424,00	125.365.255.110,00	354.125.064.875,10	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	100 %	63.150.348.424,00	63.576.782.110,00	63.576.782.110,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.997.960.000,00	5.997.960.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.943.880.000,00	1.943.880.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	493.880.000,00	493.880.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	695.250.000,00	695.250.000,00	853.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket	1.259.987.000,00	572.487.068,00	6.359.684.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
1.01.02.2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.010.479.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	740.000.000,00	775.000.000,00	995.208.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	900.000.000,00	805.796.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	-	508 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	116.441.190.918,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
1.01.02.2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508 Orang	508 Orang	508 Orang	290.000.000,00	290.000.000,00	251.826.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	4500 Paket	4500 Paket	565.000.000,00	1.252.499.932,00	1.252.499.932,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	20 Ruang	15.093.283.984,00	15.093.283.984,00	15.089.283.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1.01.02.2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	15 Unit	15 Unit	3.043.880.000,00	3.043.880.000,00	4.352.999.997,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	1.238.056.000,00	1.238.056.000,00	1.206.336.815,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85 Ruang	85 Ruang	12.581.671.440,00	12.581.671.440,00	32.907.880.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1.01.02.2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134000 Peserta Didik	134000 Peserta Didik	134000 Peserta Didik	17.257.500.000,00	17.648.933.686,00	13.709.784.971,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	50.225.565.000,00	52.409.065.000,00	52.409.065.000,00	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.099.320.000,00	8.099.320.000,00	106.938.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	999.320.000,00	999.320.000,00	1.099.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	50 Ruang	50 Ruang	4.569.320.000,00	4.569.320.000,00	5.546.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.499.320.000,00	2.499.320.000,00	2.502.156.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	7 Paket	199.320.000,00	45.929.500,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568 Peserta Didik	4568 Peserta Didik	4568 Peserta Didik	15.844.200.000,00	17.027.700.000,00	14.509.463.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.102.289.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	900 Orang	900 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	382.002.970,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	230 Satuan Pendidikan	230 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	39.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	-	230 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	72.591.502.446,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	190 Orang	190 Orang	315.000.000,00	315.000.000,00	221.419.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	1.319.356.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	30 Ruang	30 Ruang	14.965.445.000,00	14.965.445.000,00	13.606.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	46 Paket	46 Paket	265.000.000,00	418.390.500,00	263.172.431,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	299.320.000,00	299.320.000,00	515.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	100 %	8.635.768.000,00	8.651.768.000,00	8.651.768.000,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.197.280.000,00	2.197.280.000,00	2.828.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD								
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD								
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	482.280.000,00	482.280.000,00	656.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458 Peserta Didik	2458 Peserta Didik	2458 Peserta Didik	3.228.600.000,00	3.279.600.000,00	3.115.847.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	246.312.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	370.000.000,00	262.702.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	689 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	27.012.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	247.280.000,00	247.280.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	10 Paket	69.368.000,00	268.008.000,00	71.139.299,10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	624.320.000,00	624.320.000,00	830.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	208.640.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563 Satuan Pendidikan	42563 Satuan Pendidikan	42563 Satuan Pendidikan	1.035.000.000,00	930.000.000,00	1.204.330.510,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	38.000.000,00	38.000.000,00	261.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	100 %	100 %	727.640.000,00	727.640.000,00	727.640.000,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000,00	40.000.000,00	30.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	3450 Peserta Didik	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	82.455.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	32.159.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	40 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	7.412.170.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	175.000.000,00	175.000.000,00	73.274.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	223.640.000,00	223.640.000,00	223.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	100 %	100 %	685.000.000,00	685.000.000,00	122.098.620,00	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	100 %	100 %				
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585 Buku	6585 Buku	6585 Buku	150.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	14.574.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500 Buku	4500 Buku	4500 Buku	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	48.724.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	90.29 %	90.29 %	67.387.506.600,00	70.928.106.640,00	70.193.815.687,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	100 %	67.387.506.600,00	70.928.106.640,00	70.928.106.640,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	62.303.506.600,00	65.844.106.640,00	65.529.015.687,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5.084.000.000,00	5.084.000.000,00	4.664.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100 %	100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	132.992.920,00	
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	100 %	100 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05.2.010002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	13.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	21.817.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	93.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						913.670.396.824,00	916.296.330.510,00	1.317.440.364.831,74	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-1317 Tahun 2023. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang;
   3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

2. DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

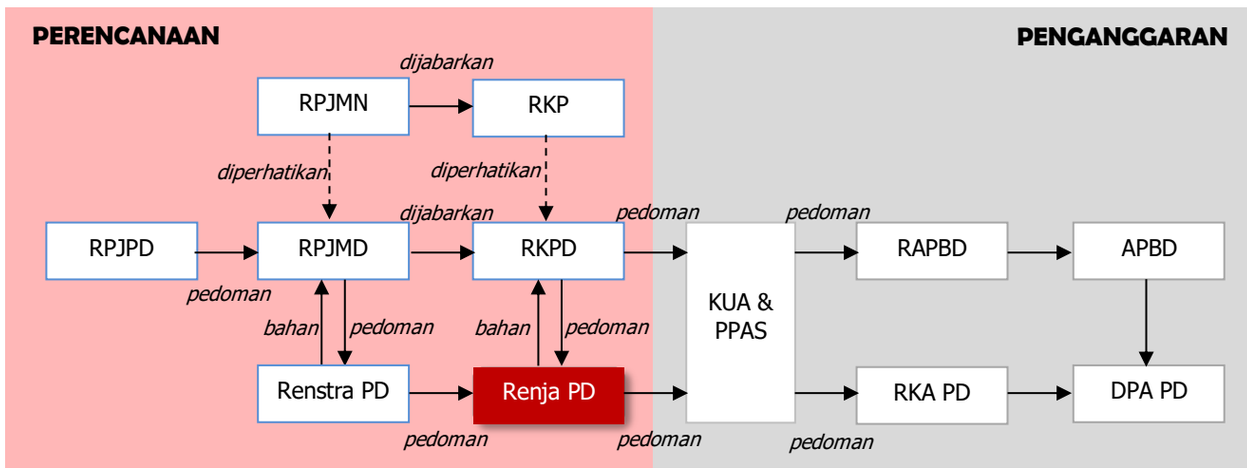

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 Dok	100%	10 Dok	5 Dok	50%	5 Dok	50%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	4 dok	4 dok	2 dok	50%	2 dok	75%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	12 dok	12 Dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	12 dok	12 Dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	12 dok	12 Dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dok	1 dok	1 Dok	1 dok	100%	1 dok	100%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	8 laporan	8 Dok	2 dok	25%	2 dok	65%
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dok	0 dok	0%	0 dok	0%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	100%	4 Dok	2 dok	50%	2 dok	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1750 orang	2000 orang	2000 orang	100%	2000 orang	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 laporan	1 Dok	1 dok	100%	1 dok	100%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dok	1 laporan	2 Dok	1 dok	50%	1 dok	50%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 dok	1 Dok	0 dok	0%	0 dok	0%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	16 paket	2 paket	1 paket	50%	1 paket	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	23 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	15 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	12 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 laporan	115 laporan	60 laporan	62%	60 laporan	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 unit	4 dok	5 dok	2 dok	40%	2 dok	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	6 unit	10 paket	0 paket	0%	0 paket	0%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 unit	134 unit	150 unit	150 unit	100%	150 unit	100%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	15 unit	788 unit	788 unit	100%	788 unit	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	28 unit	28 unit	10 unit	35%	10 unit	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	4 unit	4 unit	2 unit	50%	2 unit	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	90%	100%	89%	89%	100%	89%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karngdoro	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas mnayaran	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srondol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srondol	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudakpayung	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	100%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	3 unit	3 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	100%	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	1 Unit	10 Unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	80 unit	6 paket	6 paket	3 paket	50%	3 paket	50%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	18.192 orang	18.192 orang	9443 orang	51%	9443 orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	17.236 orang	17.236 orang	8432 orang	48%	8432 orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.047 orang	20.047 orang	13423 orang	65%	13423 orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	66.570 orang	66.570 orang	38762 orang	57%	38762 orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	224.808 orang	224.808 orang	54368 orang	24%	54368 orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	1.114.865 orang	1.726 orang	62446 orang		62446 orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	188.374 orang	188.374 orang	104344 orang	55%	104344 orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	288.750 orang	160 orang	74 orang	46%	74 orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	34.561 orang	160 orang	68 orang	42%	68 orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	4.233 orang	90 orang	27 orang	30%	27 orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	31.901 orang	38.490 orang	23688 orang	60%	23688 orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	27.245 orang	540.000 orang	142668 orang	26%	142668 orang	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanGizi Masyarakat		10 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	83 fasyankes	5 dok	5 dok	2 dok	40%	2 dok	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	95%	4 dok	4 dok	2 dok	50%	2 dok	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	37 Puskesmas	4 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	70%	60 dok	5 dok	2 dok	40%	2 dok	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	10 orang	120 orang	84 orang	70%	84 orang	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	79 dok	100 dok	67 dok	67%	67 dok	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	69 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 paket	1 paket	100%	1 paket	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100%	9 dok	1 dok	0 dok	0%	0 dok	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	15 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	37 Puskesmas	25 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 orang	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100%	3 dok	2 dok	1 dok	50%	1 dok	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6.748 orang	6.527 orang	3829 orang	58%	3829 orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		580 orang	1307 orang	921 orang	70%	9221 orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		40 orang	45 orang	14 orang	31%	14 orang	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibudan anak		1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50 %	50%	50 %	50%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	12 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	100%	100%	50%	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100%	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	umlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	70%	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	90%	9 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.11 per 1000 penduduk	2 dok	2 dok	1 dok	50%	1 dok	50%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100%	100 orang	100 orang	60 orang	60%	60 orang	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	90 dok	90 dok	50 dok	55%	50 dok	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 kegiatan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	92%	97%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	12 dok.	12 dok.	6 dok	50%	6 dok	50%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	12 dok.	12 dok	6 dok	50%	6 dok	50%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100%	100 unit	100 unit	48 unit	48%	48 unit	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome),Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					TargetRenja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	54 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	90%	10 dok	10 dok	5 dok	50%	5 dok	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 belum ada yang mencapai kegiatan 100% dikarenakan masih berjalannya kegiatan di masing-masing sub kegiatan.

Untuk sub kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih dalam proses pengadaan. Prosesnya berbeda dengan yang lain karena masih dalam kegiatan pendampingan KPK atau yang biasa disebut MCSP.

Kegiatan skrining kesehatan disekolah banyak dilakukan di awal tahun ajaran di bulan Juli sehingga dalam kegiatannya banyak dilakukan di semester II tahun berjalan. Untuk rata-rata realisasi di subkegiatannya sudah mencapai 50% dari 100% yang dijadikan target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**380.180.551.530**	**198.737.343.164**	**52,3%**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.259.950**	**10.680.700**	**10,0%**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.703.400	797.400	1,6%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	7.468.800	-	0,0%
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	8.908.800	-	0,0%
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	3.501.600	2.728.100	77,9%
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	2.969.600	-	0,0%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.758.000	5.405.200	69,7%
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	27.949.750	1.750.000	6,3%
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**263.038.891.093**	**142.696.035.671**	**54,2%**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	262.418.762.693	142.349.527.271	54,2%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	604.670.000	337.550.000	55,8%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	5.040.400	1.790.400	35,5%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	5.152.800	5.152.800	100,0%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.265.200	2.015.200	38,3%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.621.638.473**	**128.409.194**	**5,2%**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	50.012.600	18.892.462	37,8%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.573.660	-	0,0%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	53.961.560	2.706.140	5,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	2.232.000	58,1%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	855.638.212	104.578.592	14,7%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	1.615.612.441	-	0,0%
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.472.924.718**	**-**	**0,0%**
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6.472.924.718	-	0,0%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.772.843.873**	**1.060.244.497**	**41,2%**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	-	0,0%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	955.139.501	403.393.368	42,2%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.817.504.372	656.851.129	40,5%
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.846.044.928**	**1.572.877.529**	**32,5%**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.915.000	67.533.336	35,0%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.238.102.000	827.499.322	37,0%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	695.630.134	94.619.650	13,6%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.665.819.994	567.932.021	34,1%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	53.577.800	15.293.200	28,5%
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100.664.561.086**	**53.269.095.573**	**52,9%**
1.02.01.2.10.0001	Peningkatan Pelayanan BLUD puskesmas	100.664.561.086	53.269.095.573	52,9%
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**248.447.075.199**	**76.707.077.350**	**30,8%**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota**	**100.548.411.738**	**8.378.071.397**	**8,4%**
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	21.577.853.245	297.690.900	1,4%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	2.075.000.000	140.000	0,0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.556.146.399	3.527.537.000	7,3%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	28.339.412.094	4.552.703.497	16,1%
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**144.812.681.407**	**67.318.498.796**	**46,3%**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.400.000	28.800.000	83,7%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.500.000	9.000.000	78,3%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.900.000	10.900.000	100,0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.900.000	-	0,0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	48.800.000	48.000.000	98,4%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	64.777.115	20.275.000	27,6%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19.900.000	5.200.000	26,1%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.966.000	-	0,0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.966.000	-	0,0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4.373.000	1.050.000	24,0%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87.243.419	70.900.000	81,3%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	74.581.519	21.509.210	28,8%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.964.860.109	1.151.644.550	29,0%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	79.205.270	6.000.000	7,6%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	178.176.957	52.037.754	29,2%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	502.489.625	94.603.000	18,8%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	31.334.925	14.200.000	45,3%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	222.088.000	48.410.000	21,8%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	6.653.969	300.000	4,5%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	667.918.440	411.897.328	69,0%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	60.081.141.485	28.450.312.707	47,4%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	572.454.000	-	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	30.911.892.518	18.780.685.400	60,8%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	13.941.412.578	3.983.372.244	27,1%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk plamongansari)	381.137.960	198.037.500	52,0%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk. bulusan)	426.776.610	178.225.604	41,8%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi)	1.463.951.586	522.300.283	35,7%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	63.959.100	-	0,0%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	7.600.000	-	0,0%
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	24.910.141	19.565.000	78,5%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	5.955.461.845	2.541.040.062	42,7%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	18.093.000	7.375.000	40,8%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	31.307.542	20.950.000	66,9%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	20.632.000	13.925.000	67,5%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	282.361.694	57.439.000	20,3%
	BOK Puskesmas UKM	24.600.555.000	11.506.546.541	46,8%
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**1.876.467.038**	**529.127.560**	**28,2%**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.876.467.038	529.127.560	28,2%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**1.209.515.016**	**481.379.597**	**39,8%**
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	18.500.000	10.050.000	54,3%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	959.017.831	390.852.340	40,8%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	231.997.185	80.477.257	34,7%
01.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1.969.926.893**	**717.836.103**	**36,4%**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota**	**249.290.620**	**43.921.559**	**17,6%**
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.300.000	-	0,0%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	67.912.520	25.231.559	37,2%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	168.078.100	18.690.000	11,1%
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**1.720.636.273**	**673.914.544**	**39,2%**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1.720.636.273	673.914.544	39,2%
01.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**620.980.734**	**322.413.200**	**58,6%**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)**	**31.088.564**	**22.400.000**	**72,1%**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	31.088.564	22.400.000	72,1%
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**	**418.023.200**	**177.572.500**	**51,2%**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	418.023.200	177.572.500	**51,2%**
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**171.868.970**	**122.440.700**	**71,2%**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	171.868.970	122.440.700	**71,2%**
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**714.470.492**	**158.771.000**	**22,2%**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**84.751.592**	**28.872.000**	**34,1%**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	84.751.592	28.872.000	**34,1%**
1.02.05.2.03	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**629.718.900**	**129.899.000**	**20,6%**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	392.076.900	58.890.000	**15,0%**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Puskesmas)	237.642.000	129.899.000	**54,7%**
JUMLAH		**632.276.617.440**	**276.643.440.817**	**43,8%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 18 kegiatan dan 80 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebesar Rp 632.276.617.440 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 276.643.440.817 (43,8%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 355.633.176.623.

Realisasi DKK dibawah 50% dikarenakan kegiatan pembangunan Puskesmas belum bisa di SPJ kan dikarenakan belum memenuhi syarat kontrak untuk pembayaran,

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan														
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]	77,51	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,51	77,44	77,69	78,24	78,24	-	77,59
Sasaran														
Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	6,09	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	6,09	6,08	6,97	7,99	6,99	-	6,05
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]	71,35	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30	71,35	71,34	71,97	80,44	82,89	-	71,31
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,75	12,71	12,70	12,69	12,68	12,67	12,75	11,71	12,51	12,69	12,64	-	12,68
Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,43	1,31	1,31	1,72	7,57	6,21	-	1,43
	Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	20%	30%	40%	50%	60%	70%	20%	45%	45%	50%	40%	-	60%
Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	46,33 %	46,89 %	48,59 %	49,72 %	50,85 %	51,98 %	46,33 %	47,46 %	47,46 %	66,67	66,67	-	50,85%
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,20	72,40	72,45	72,50	72,55	72,60	72,20	72,40	74,00	79,70	79,70	-	72,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka Harapan Hidup [2025]”, target 2025 sebesar 77,59, dengan realisasi triwulan II 2025 sebesar 78,24;
b. Sasaran “Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH] target di tahun 2025 adalah 6.05 per 1.000KH sedangkan realisasi triwulan II sebesar 6,99 per 1.000KH.
    2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2025 adalah 71,31 sedangkan realisasi triwulan II 82,89.
    3) Indikator Morbiditas [per 1.000 penduduk] target di tahun 2025 adalah 12,68 sedangkan realisasi triwulan II 12,64
c. Sasaran Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk] target 2025 sebesar 1,43, dan realisasi triwulan II sebesar 6,21.
    2) Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar persentase] target 2025 sebesar 60%, dan realisasi triwulan II sebesar 40%.
d. Sasaran Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri target 2023 sebesar 48,85% dan realisasi triwulan II 66,67%.
e. Sasaran Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah memiliki satu indikator yaitu nilai AKIP targetnya 2025 sebesar 72,55 dan realisasinya triwulan II juga 79,70.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gizi Masyarakat;
2. Angka Kematian Ibu dan Anak;
3. Kesehatan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan diantaranya :

1. Belum optimalnya Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya kebutuhan gizi untuk kesehatan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
2. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya persiapan calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan KUA dalam mendampingi calon pengantin untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.
3. Perubahan iklim global yang berubah secara drastis.
   Hal ini antara lain disebabkan jumlah populasi yang terus meningkat sehingga ruang terbuka hijau menjadi berkurang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan adaptasi infrastruktur kesehatan dengan meningkatkan ketahanan fasilitas kesehatan seperti mencukupi tenaga kesehatan dan stok obat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Masih adanya balita kekurangan gizi dan ibu hamil KEK.
   2) Masih adanya kematian Ibu hamil dan bayi baru lahir.
   3) Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan di Kota Semarang yang belum sesuai standar.
b. Peluang
   1) Adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menangani permasalahan gizi ibu hamil;
   2) Adanya anggaran yang mengakomodir dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
b. Optimalisasi Pelayanan BLUD 39 Puskesmas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.02	DINAS KESEHATAN				632.276.617.440	DINAS KESEHATAN				632.276.617.440	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	380.180.551.530	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	380.180.551.530	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 dok	107.259.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 dok	107.259.950	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	48.703.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	48.703.400	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	7.468.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	7.468.800	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.908.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.908.800	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	3.501.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	3.501.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.969.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.969.600	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	7.758.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	7.758.000	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	27.949.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	27.949.750	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dok	**263.038.891.093**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dok	**263.038.891.093**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.000 Org/bulan	262.418.762.693	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.000 Org/bulan	262.418.762.693	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	604.670.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	604.670.000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.040.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.040.400	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	5.152.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	5.152.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5.265.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5.265.200	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	**2.621.638.473**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	**2.621.638.473**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.012.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.012.600	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.573.660	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.573.660	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.961.560	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.961.560	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.840.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	855.638.212	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	855.638.212	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	1.615.612.441	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	1.615.612.441	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	6.472.924.718	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	6.472.924.718	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6.472.924.718	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6.472.924.718	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.772.843.873	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.772.843.873	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	955.139.501	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	955.139.501	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.817.504.372	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.817.504.372	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.846.044.928	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.846.044.928	
1.02.01.2.09.00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	192.915.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	192.915.000	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	150 Unit	2.238.102.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	150 Unit	2.238.102.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	695.630.134	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	695.630.134	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	1.665.819.994	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	1.665.819.994	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	53.577.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	53.577.800	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	89%	100.664.561.086	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	89%	100.664.561.086	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	39 Unit Kerja	100.664.561.086	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	39 Unit Kerja	100.664.561.086	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	248.447.075.199	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	248.447.075.199	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100.548.411.738	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100.548.411.738	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	21.577.853.245	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	21.577.853.245	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2.075.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2.075.000.000	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	48.556.146.399	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	48.556.146.399	
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	6 paket	28.339.412.094	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Semarang	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	6 paket	28.339.412.094	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	**144.812.681.407**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	**144.812.681.407**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.192 orang	34.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.192 orang	34.400.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.236 orang	11.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.236 orang	11.500.000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 orang	10.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 orang	10.900.000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.570 orang	3.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.570 orang	3.900.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224.808 orang	48.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224.808 orang	48.800.000	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.726 orang	64.777.115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.726 orang	64.777.115	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188.374 orang	19.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188.374 orang	19.900.000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	7.966.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	7.966.000	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	7.966.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	7.966.000	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 orang	4.373.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 orang	4.373.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38.490 orang	87.243.419	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38.490 orang	87.243.419	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	540.000 orang	74.581.519	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	540.000 orang	74.581.519	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dok	3.964.860.109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dok	3.964.860.109	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dok	79.205.270	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dok	79.205.270	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dok	178.176.957	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dok	178.176.957	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dok	502.489.625	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dok	502.489.625	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dok	31.334.925	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dok	31.334.925	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 dok	222.088.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 dok	222.088.000	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 orang	6.653.969	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 orang	6.653.969	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 dok	667.918.440	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 dok	667.918.440	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dok	60.081.141.485	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dok	60.081.141.485	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	572.454.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	572.454.000	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dok	30.911.892.518	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dok	30.911.892.518	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	13.941.412.578	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	13.941.412.578	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk plamongansari)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	381.137.960	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	381.137.960	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk. bulusan)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	426.776.610	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	426.776.610	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1.463.951.586	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1.463.951.586	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 unit	63.959.100	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 unit	63.959.100	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	2 laporan	7.600.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	7.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemberian Obat Massal)								
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 dok	24.910.141	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 dok	24.910.141	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	5.955.461.845	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	5.955.461.845	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527 orang	18.093.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527 orang	18.093.000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307 orang	31.307.542	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307 orang	31.307.542	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 orang	20.632.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 orang	20.632.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dok	282.361.694	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dok	282.361.694	
	BOK Puskesmas UKM				24.600.555.000					24.600.555.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi	100 %	1.876.467.038	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem	100 %	1.876.467.038	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan sesuai standar					Informasi Kesehatan sesuai standar			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	1.876.467.038	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	1.876.467.038	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	1.209.515.016	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	1.209.515.016	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	18.500.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	18.500.000	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	39 Unit	959.017.831	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	39 Unit	959.017.831	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dok	231.997.185	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dok	231.997.185	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	1.969.926.893	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	1.969.926.893	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	249.290.620	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	249.290.620	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	13.300.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	13.300.000	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Org	67.912.520	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Org	67.912.520	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	168.078.100	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	168.078.100	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	1.720.636.273	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	1.720.636.273	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Org	1.720.636.273	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Org	1.720.636.273	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96% persen	620.980.734	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96% persen	620.980.734	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	31.088.564	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	31.088.564	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dok	31.088.564	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dok	31.088.564	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	418.023.200	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	418.023.200	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dok	418.023.200	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dok	418.023.200	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	171.868.970	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	171.868.970	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	171.868.970	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	171.868.970	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100% persen	714.470.492	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100% persen	714.470.492	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	84.751.592	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	84.751.592	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	84.751.592	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	84.751.592	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	629.718.900	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	629.718.900	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10Dok	392.076.900	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10Dok	392.076.900	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan				237.642.000					237.642.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) puskesmas										

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;

b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	Capaian Angka Harapan Hidup
Kota Semarang	77,59
Prov. Jateng	74,65
Pusat	71,88

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas realisasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan. Angka Harapan Hidup.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dok perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kesehatan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Pemerataan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Semarang yang Semakin Hebat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Angka Harapan Hidup Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkazzztnya upaya Kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Rendahnya Angka Kematian Bayi, Ibu, dan Morbiditas".

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk dan Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar”.
3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan.
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri”.
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengzan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kesehatan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup [tahun]	Tahun	77,44
SASARAN				
	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	per 1.000 KH	6,05
		Angka Kematian Ibu[per 100.000 KH]	per 100.000 KH	71,31
		Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	10,21
	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadapjumlah penduduk [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	1,40
		Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatkan keberdayaan(mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	%	23,73%
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Pemerataan kualitas pada fasilitas kesehatan" dan indikator sasaran "Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	100 %	100 %			380.180.551.530		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 dok	10 dok	10 dok			107.259.950		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok			48.703.400	APBD	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok			7.468.800	APBD	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok			8.908.800	APBD	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok			3.501.600	APBD	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok			2.969.600	APBD	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan			7.758.000	APBD	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok			27.949.750	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dok	4 dok	4 dok			**263.038.891.093**		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.000 Org/bulan	2.000 Org/bulan	2.000 Org/bulan			262.418.762.693	APBD	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok			604.670.000	APBD	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			5.040.400	APBD	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			5.152.800	APBD	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok			5.265.200	APBD	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %			**2.621.638.473**		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket			50.012.600	APBD	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			42.573.660	APBD	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			53.961.560	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok			3.840.000	APBD	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan			855.638.212	APBD	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	5 Dok	5 Dok			1.615.612.441	APBD	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %			6.472.924.718		
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit			6.472.924.718	APBD	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %			2.772.843.873		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			200.000	APBD	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			955.139.501	APBD	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			1.817.504.372	APBD	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	100 %	100 %			4.846.044.928		
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	6 Unit	6 Unit			192.915.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	150 Unit	150 Unit			2.238.102.000	APBD	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	788 Unit	788 Unit			695.630.134	APBD	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	28 Unit			1.665.819.994	APBD	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit			53.577.800	APBD	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	89%	89%	89%			100.664.561.086		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	39 Unit Kerja	39 Unit Kerja	39 Unit Kerja			100.664.561.086	APBD	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %			248.447.075.199		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %			100.548.411.738		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	3 unit	3 unit			21.577.853.245	APBD	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	1 Unit	1 Unit	1 Unit			2.075.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pemeliharaan Oleh Puskesmas								
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit			48.556.146.399	APBD	
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	6 paket	6 paket	6 paket			28.339.412.094	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	100 %	100 %			**144.812.681.407**		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.192 orang	18.192 orang	18.192 orang			34.400.000	APBD	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.236 orang	17.236 orang	17.236 orang			11.500.000	APBD	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 orang	20.047 orang	20.047 orang			10.900.000	APBD	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.570 orang	66.570 orang	66.570 orang			3.900.000	APBD	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224.808 orang	224.808 orang	224.808 orang			48.800.000	APBD	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.726 orang	1.726 orang	1.726 orang			64.777.115	APBD	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188.374 orang	188.374 orang	188.374 orang			19.900.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	160 orang	160 orang			7.966.000	APBD	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	160 orang	160 orang			7.966.000	APBD	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 orang	90 orang	90 orang			4.373.000	APBD	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38.490 orang	38.490 orang	38.490 orang			87.243.419	APBD	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	540.000 orang	540.000 orang	540.000 orang			74.581.519	APBD	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dok	12 dok	12 dok			3.964.860.109	APBD & DAK NF	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dok	1 dok	1 dok			79.205.270	APBD	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dok	5 dok	5 dok			178.176.957	APBD	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dok	4 dok	4 dok			502.489.625	APBD	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dok	12 dok	12 dok			31.334.925	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 dok	5 dok	5 dok			222.088.000	APBD & DAK NF	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 orang	120 orang	120 orang			6.653.969	APBD	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 dok	100 dok	100 dok			667.918.440	APBD & DAK NF	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dok	12 dok	12 dok			60.081.141.485	APBD	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	1 paket	1 paket			572.454.000	APBD	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dok	1 dok	1 dok			30.911.892.518	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1 dok	1 dok			13.941.412.578	APBD & DAK NF	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk plamongansari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1 dok	1 dok			381.137.960	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pusk. bulusan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1 dok	1 dok			426.776.610	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dok	1 dok	1 dok			1.463.951.586	APBD	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 unit	39 unit	39 unit			63.959.100	APBD	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	2 laporan	2 laporan	2 laporan			7.600.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 dok	2 dok	2 dok			24.910.141	APBD	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	1 unit			5.955.461.845	APBD	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527 orang	6.527 orang	6.527 orang			18.093.000	APBD	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307 orang	1307 orang	1307 orang			31.307.542	APBD	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 orang	45 orang	45 orang			20.632.000	APBD	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dok	1 dok	1 dok			282.361.694	APBD & DAK NF	
	BOK Puskesmas UKM							24.600.555.000	DAK NF	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %			1.876.467.038		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok			1.876.467.038	APBD	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan	100 %	100 %	100 %			1.209.515.016		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang								
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit			18.500.000	APBD	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	39 Unit	39 Unit	39 Unit			959.017.831	APBD	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dok	12 Dok	12 Dok			231.997.185	APBD	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	100% persen	100% persen			1.969.926.893		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	100% persen	100% persen			249.290.620		
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	2 Dok	2 Dok			13.300.000	APBD	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Org	100 Org	100 Org			67.912.520	APBD	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	90 Dok	90 Dok			168.078.100	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	100 %	100 %			1.720.636.273		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Org	2 Org	2 Org			1.720.636.273	APBD	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96% persen	96% persen	96% persen			620.980.734		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	100 %	100 %			31.088.564		
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dok	12 Dok	12 Dok			31.088.564	APBD & DAK NF	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %			418.023.200		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	12 Dok	12 Dok	12 Dok			418.023.200	APBD & DAK NF	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %			171.868.970		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit	100 Unit			171.868.970	APBD & DAK NF	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100% persen	100% persen	100% persen			714.470.492		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	100% persen	100% persen			84.751.592		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	12 Dok	12 Dok			84.751.592	APBD	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	100% persen	100% persen			629.718.900		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10Dok	10Dok	10Dok			392.076.900	APBD & DAK NF	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) puskesmas							237.642.000	DAK NF	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
JUMLAH								632.276.617.440		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dok Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

3. RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

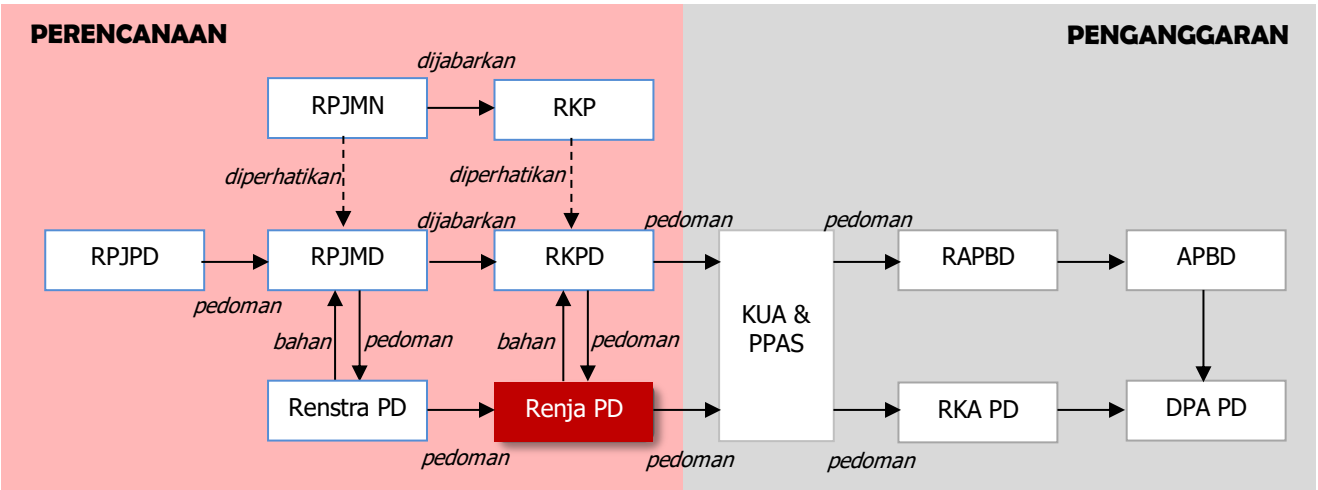

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penambahan DBHCHT untuk pemenuhan bed patient. (2) Penyesuaian anggaran ssuai Perpres 1 tahun 2025 tentang evisiensi sehingga penysuaian belanja untuk APBD. (3) Penambahan untuk tenaga ahli untuk membantu visi misi wali kota.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
w. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Nomor 888 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja		2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-	-	-
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	-	-
1.02.01 .2.01.0007	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	-	-
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan	595 Orang / Bulan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		dan Penunjang Pelayanan							
1.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Pengembangan Sraana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 .02.02.2.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	2 Unit	100%	2 Unit	0	0	0	0

Sumber: Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

Sub kegiatan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 595 orang/bulan sampai dengan bulan Juni sudah terealisasi. Sub kegiatan yang belum terealisasi sampai triwulan II yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan penyusunan dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah karena belum mulai dilaksanakan. Selain itu kegiatan yang realisasinya masih rendah yaitu pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah gedung unit layanan kanker tahap II dan gedung rawat inap 12 lantai tahap III.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
OPD : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	484.361.166.349	157.062.572.255	32,43%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	432.896.864.749	156.856.568.465	36,23%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.390.720	31.640.716	24,08%
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	-	-
b. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	81.390.720	31.640.716	38,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.595.016.280	39.075.065.074	50,36%
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.595.016.280	39.075.065.074	50,36%
Peningkatan Pelayanan BLUD	355.170.457.749	117.749.862.675	33,15%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	355.170.457.749	117.749.862.675	33,15%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.464.301.600	206.003.790	0,40%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.464.301.600	206.003.790	0,40%
a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	51.464.051.600	206.003.790	0,40%
b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000	-	-

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang adalah sebesar Rp 484.361.166.349,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 157.062.572.255,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 327.298.594.094,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 123 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw 2	2026	2025
Sasaran :														
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	95,90	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	96,11	96,98	97,35	97,50	97,60		98,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	83,00	83,50	84,00	86,50	86,55	87,50	71,85	87,50	86,37	83,79	83,79		86,55
Meningkatkan sarana dan prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasrana RS tipe B Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial" memiliki indikator kinerja yaitu "persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang", telah dapat melebihi target, dimana realisainya sebesar 100% dari target sebesar 100%;
b. Sasaran "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 97,60 dari target sebesar 97,45
    2) Indikator "Nilai Kinerja BLUD Baik" belum dapat mencapai target sebesar 86,50, dengan realisasi sebesar 83,79.
    3) Indikator "Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tipe B Pendidikan" sudah terealisasi sebesar 94,00 % dari target sebesar 100 %

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelayanan, termasuk sarana, prasarana, alat kesehatan, serta SDM sesuai Keputusan Kementerian Kesehatan terkait Pelayanan Unggulan untuk RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
3. Meninjau standar prosedur operasional, sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk pelayanan rumah sakit.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan:

1. Keterbatasan sumber daya manusia.
2. Keterbatasan dana.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   - Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS Primaya, RS Gigi dan Mulut Unimus, RS Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.
   - Teknologi yang terus berkembang semakin cepat. Teknologi alat kesehatan serta teknologi informasi (IT) semakin berkembang dan canggih membuat RSD K.R.M.T. Wongsonegoro harus megikuti perkembangan tersebut.
   - Rencana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menginisiasi transformasi besar dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam sistem rujukan rumah sakit. Regulasi yang sebelumnya mewajibkan sistem berjenjang di mana pasien harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes 1) sebelum dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan akan diubah menjadi sistem pelayanan berbasis kompetensi. Dalam sistem rumah sakit berbasis kompetensi, rujukan tidak lagi bergantung pada tingkatan fasilitas, melainkan pada kemampuan dan kesiapan layanan medis yang dimiliki oleh rumah sakit. Artinya, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan medisnya, tanpa harus melalui tahapan berjenjang yang berpotensi memperlambat penanganan.

b. Peluang
   - Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk penerapan BLUD.
     Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan setiap tahun.
   - Lokasi RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang strategis. Akses ke Rumah Sakit mudah dicapai dari berbagai arah dan sudah dilewati oleh angkutan umum.
   - Dengan ditunjuknya rumah sakit sebagai pelayanan prioritas, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menjadi rujukan fasilitas kesehatan oleh jaminan kesehatan.
   - Tersedianya pelayanan-pelayanan yang jarang ditemui di Rumah Sakit lain, seperti Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang menjadi inovasi RSD K.R.M.T Wongsonegoro untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Semarang.
   - Tersedianya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang canggih, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Semarang.
   - Sistem pembayaran layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan tengah mengalami perubahan signifikan. Pemerintah merencanakan peralihan dari sistem tarif INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups) ke sistem baru, yaitu IDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups). Meskipun langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan keadilan pembayaran layanan

kesehatan, namun hingga kini regulasi dan struktur grouping IDRG belum sepenuhnya jelas dan operasional.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variabel indikator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.
2. Melakukan penyesuaian terhadap pelayanan unggulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan ditunjuknya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai pengampu pelayanan unggulan Kanker, Stroke, Jantung, Uronefrologi (KJSU), Kesehatan Ibu, dan Anak (KIA), perlu dilakukan pengembangan terhadap sarana prasarana, serta SDM sehingga mampu untuk melakukan pelayanan tersebut dengan optimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang			484.361.166.349,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang			523.649.189.977,93	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	432.897.114.749,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	470.724.273.377,93	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja			2 Dokumen	131.390.720,00	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja			2 Dokumen	126.120.441,40	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	41.063.200,00	
1.02.01 .2.01.0007	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	81.390.720,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	85.057.241,40	
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	77.595.016.280,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	76.633.815.910,53	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima	595 Orang / Bulan	77.595.016.280,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	595 Orang / Bulan	76.633.815.910,53	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			gaji dan tunjangan ASN								
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	355.170.457.749,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	393.964.337.026,00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	355.170.457.749,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	393.964.337.026,00	
1.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	51.464.301.600,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.924.916.600,00	
			Pengembangan Sraana dan Prasarana Rumah Sakit	100%				Pengembangan Sraana dan Prasarana Rumah Sakit	100%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	51.464.301.600,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.924.916.600,00	
								Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	51.464.051.600,00	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100%	51.464.051.600,00	
								Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	2 Unit		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang	0 Unit	250.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang	25 Unit	1.460.865.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
					484.361.166.349,00					523.649.189.977,93	

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 - 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Dearah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 –

2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial"

dengan indikator tujuan "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yaitu Meningkatkan Kinerja RS BLUD, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
c. Nilai Kinerja BLUD Baik

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	98,00
	Nilai Kinerja BLUD Baik	85,00

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Namun secara khusus, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima” dan indikator sasaran “Meningkatkan Kinerja RS BLUD”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO					485.569.456.399,00	484.361.166.349,00	523.649.189.977,93		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100%	100%	100%	432.897.114.749,00	432.896.864.749,00	470.724.273.377,93		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	131.390.720,00	126.120.441,40	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	41.063.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	81.390.720,00	85.057.241,40	Pendapatan Asli	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							Daerah (PAD)	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	77.626.657.000,00	77.595.016.280,00	76.633.815.910,53		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	632 Orang/ bulan	595 Orang/ bulan	595 Orang/ bulan	77.626.657.000,00	77.595.016.280,00	76.633.815.910,53		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100 %	100 %	100 %	355.170.457.749,00	355.170.457.749,00	393.964.337.026,00	Pendapatan Dari BLUD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	355.170.457.749,00	355.170.457.749,00	393.964.337.026,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 %	100 %	100 %	52.672.341.650,00	51.464.301.600,00	52.924.916.600,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	52.672.341.650,00	51.464.301.600,00	52.924.916.600,00		
1.02.02.2.01 .0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	2 Unit	2 Unit	51.464.051.600,00	51.464.051.600,00	51.464.051.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.02.02.2.01 .0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	0 Unit	25 Unit	25 Unit	1.208.290.050,00	250.000,00	1.460.865.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCHT	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kesehatan yang Disediakan								
	Jumlah					485.569.456.399,00	484.361.166.349,00	523.649.189.977,93		

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

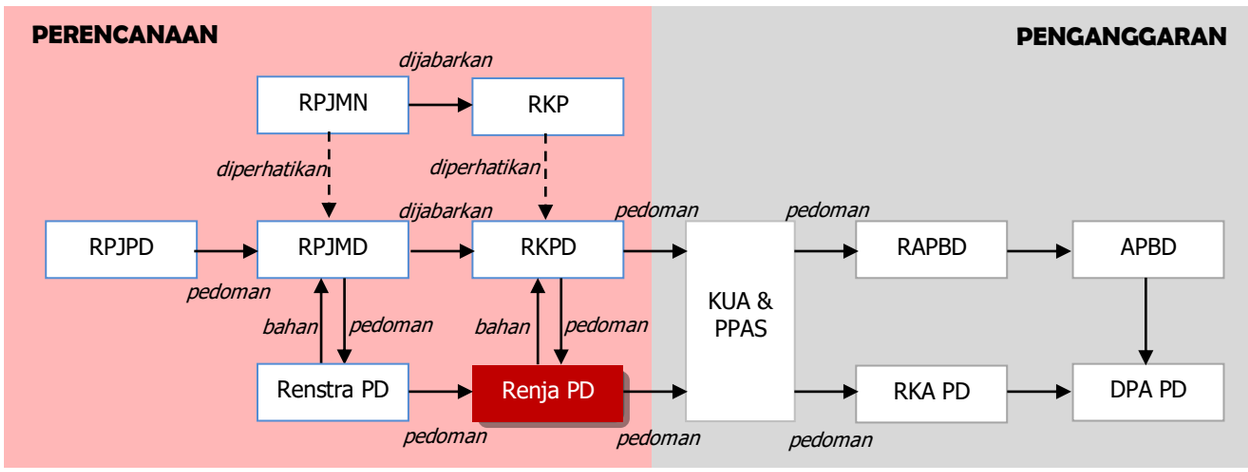

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD sebelumnya; (2) Kebutuhan untuk menyesuaikan arah kebijakan, visi, misi, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih periode 2025–2030, termasuk program nasional Asta Cita; (3) Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan perlunya penyesuaian target dan sasaran pembangunan; serta (4) Ketidaksesuaian antara asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang tercantum dalam APBD 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	4	66	4	66
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1	0	0	0	0
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450	450	450	225	50	225	50
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	2	80	2	80
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	40	40	40	40
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	6	2	33	2	33
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	2	50	2	50
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	15	10	70	10	70
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	100
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2	2	2	2	100	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Undangan yang Disediakan							
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	48	48	25	60	25	60
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	24	15	60	15	60
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	8	8	5	70	5	70
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101	101	101	0	0	0	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	6	50	6	50
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	100	100	50	50	50	50
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	121	121	65	60	65	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031	1031	1031	625	58	625	58
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422	422	422	230	60	230	60
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	5	100	5	100
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5	5	5	5	100	5	100
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,75	98,44	98,44	98,44	100	98,44	100
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	98,24	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13	13	13	13	100	13	100
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4	4	4	0	0	0	0
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	5	5	5	100	5	100
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85	85	85	85	100	85	100
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	100	100	100	100	100	100
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	4	4	4	3	70	3	70

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Lainnya	Lainnya yang Disusun							
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	86,80	85,50	85,50	85,50	100	85,50	100
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	68,00	67,00	67,00	67,00	100	67,00	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	100,00	99,59	99,59	99,59	100	99,59	100
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4	4	4	0	0	0	0
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208	208	208	208	100	208	100
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12	12	12	8	0,66	8	0,66
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan	4	4	4	4	100	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Terpelihara							
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	4	4	4	100	4	100
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,75	75,30	75,30	75,30		75,30	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,98	88,48	88,48	88,48		88,48	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2	2	2	2	100	2	100
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11	11	11	8	70	8	70
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	2	2	0	0	0	0
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2	2	2	0	0	0	0
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	5	5	5	100	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	5	5	5	100	5	100
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2	2	2	2	100	2	100
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	5	5	5	100	5	100
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	2	2	2	100	2	100
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	2	2	0	0	0	0
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6	6	6	6	100	6	100
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4	4	4	4	100	4	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	5	5	5	100	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	5	5	5	100	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	5	5	5	100	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	5	5	5	100	5	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu anggaran Sub Kegiatan yang terkait Belanja Modal (Penyediaan peralatan dan Periengkapan Kantor, Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir, Pembangunan Jalan, Normalisasi/Restorasi sungai, Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Alat Tulis Kantor, belanja Makanan dan Minuman, Belanja Percetakan dan Souvenir, Belanja Jasa Konsultan dan Honorarium Narasumber dengan jumlah total anggaran yang di-hold sebesar Rp. 132.254.904.579

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 setelah realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
DINAS PEKERJAAN UMUM		386.371.902.047	40.262.752.273	10,42
1.3.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.338.670.939	25.633.566.225	34,02
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.921.600	-	0,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.171.600	-	0,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.764.900	-	0,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.370.900	-	0,00
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.964.100	-	0,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.370.900	-	0,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.698.200	-	0,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.581.000	-	0,00
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.553.995.260	12.211.366.628	28,04
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.571.633.560	12.133.856.628	28,50
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	973.375.700	77.510.000	7,96
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.359.400	-	0,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.706.200	-	0,00
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.920.400	-	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.554.200	-	0,00
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.459.400	-	0,00
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.094.800	-	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.434.200	-	0,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.954.200	-	0,00
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.480.000	-	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.825.641.646	194.211.705	6,87
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	23.429.000	11,71
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.219.295.872	-	0,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	34.979.200	46,64
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	277.133.551	70.495.060	25,44
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	0,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	166.832.351	40.924.400	24,53
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.379.872	24.384.045	7,23
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	545.000.000	-	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.571.203	-	0,00
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	221.571.203	-	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.855.707.882	12.267.402.050	51,42
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.283.000	4.000.000	20,74
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.058.247.394	4.043.382.314	57,29
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.778.177.488	8.220.019.736	48,99
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.762.844.948	960.585.842	20,17
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.549.231.478	740.960.962	29,07

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	75.000.000	45.750.000	61,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.548.470	93.559.000	39,06
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	899.065.000	24.661.000	2,74
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1.000.000.000	55.654.880	5,57
1.3.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	53.374.016.868	4.679.016.899	8,77
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	44.230.246.254	3.955.301.174	8,94
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	148.502.962	7,43
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	23.300.675.000	-	0,00
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.000.000.000	416.341.280	41,63
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	15.310.681.739	3.000.862.904	19,60
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	720.225.715	293.547.948	40,76
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.482.106.800	-	0,00
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	416.557.000	96.046.080	23,06
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.143.770.614	723.715.725	7,91
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.043.770.614	723.715.725	8,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000	-	0,00
1.3.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	117.427.297.500	2.332.384.594	1,99
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	117.427.297.500	2.332.384.594	1,99
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	100.129.422.500	-	0,00
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	15.638.000.000	2.234.137.384	14,29
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	140.231.916.741	7.617.784.555	5,43
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	140.231.916.741	7.617.784.555	5,43

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	455.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.516.730.574	2.900.000	0,19
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	9.764.315.990	3.526.923.060	36,12
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	42.610.850.395	-	0,00
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.210.169.782	81.452.700	6,73
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	17.200.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	7.692.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	575.317.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	41.867.533.000	-	0,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.340.000.000	4.006.508.795	30,03
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I		1.499.015.297	689.213.800	45,98
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.499.015.297	689.213.800	45,98
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.499.015.297	689.213.800	45,98
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.499.015.297	689.213.800	45,98
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV		1.500.000.000	458.937.700	30,60
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.500.000.000	458.937.700	30,60
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000	458.937.700	30,60
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	458.937.700	30,60
UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum		20.394.829.938	10.333.015.216	50,66
1.3.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.394.829.938	10.333.015.216	50,66
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.394.829.938	10.333.015.216	50,66
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	20.394.829.938	10.333.015.216	50,66

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II		3.704.927.104	641.768.940	17,32
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.704.927.104	641.768.940	17,32
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.704.927.104	641.768.940	17,32
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.704.927.104	641.768.940	17,32
UPTD Peralatan dan Perbengkelan		9.410.000.000	3.901.630.590	41,46
1.3.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.410.000.000	3.901.630.590	41,46
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.410.000.000	3.901.630.590	41,46
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	9.410.000.000	3.901.630.590	41,46
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III		2.206.920.664	524.501.250	23,77
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.206.920.664	524.501.250	23,77
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.206.920.664	524.501.250	23,77
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.206.920.664	524.501.250	23,77
JUMLAH		425.087.595.050	56.811.819.769	13,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 12 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebesar Rp Rp. 425.087.595.050 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp56.811.819.769,00 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 363.870.414.872

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
TUJUAN													
Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan	Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu	97,30	97,57	97,86	98,15	98,44	98,75	97,30	98,26	97,86	98,33	98,64	98,44
SASARAN													
Meningkatnya Kinerja Sarana Dan Prasarana Pengendali Banjir Dan Rob	Pesentase Kawasan Banjir	3,40	3,02	2,64	2,26	1,88	1,50	3,40	2,37	2,34	2,23	1,73	1,88
	Persentase Kawasan Rob	2,00	1,85	1,65	1,45	1,25	1,00	2,00	1,11	1,09	1,06	0,98	1,25
TUJUAN													
Terwujudnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Tingkat Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	73,95	74,13	74,50	74,90	75,30	75,75	73,95	89,49	74,50	92,58	74,50	75,30
SASARAN													
Meningkatnya Fungsi Dan Manfaat Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	92,38	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	92,38	92,52	93,00	93,27	93,00	94,00
	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	55,51	55,75	56,00	56,30	56,60	57,00	NA	86,45	86,00	91,90	92,44	56,60
SASARAN													
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Opd	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)	74,27	74,50	74,80	75,10	75,40	75,70	NA	96,91	77,05	77,35	77,36	75,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan. Realisasi pencapaian indikator ini hingga Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target Renstra tahun 2025. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu;
b. Sasaran Meningkatnya Kinerja Sarana Dan Prasarana Pengendali Banjir Dan Rob. Realisasi persentase kawasan banjir

hingga Triwulan II tahun 2025 berada di bawah target Renstra tahun 2025. Ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian banjir telah efektif mengurangi luasan kawasan banjir, bahkan melampaui ekspektasi. Serupa dengan kawasan banjir, realisasi persentase kawasan rob juga berada di bawah target Renstra tahun 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pengendalian rob;

c. Tujuan Terwujudnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Mantap. Realisasi pencapaian indikator ini hingga Triwulan II tahun 2025 masih sedikit di bawah target Renstra tahun 2025. Meskipun demikian, angka 74,50 menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan dan jembatan berada pada level yang baik, namun perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target penuh;
d. Sasaran Meningkatnya Fungsi Dan Manfaat Infrastruktur Jalan Dan Jembatan. Realisasi persentase jalan dalam kondisi mantap hingga Triwulan II tahun 2025 sedikit di bawah target Renstra tahun 2025. Perluasan upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat membantu mencapai target ini. Realisasi persentase jembatan dalam kondisi baik telah secara signifikan melampaui target Renstra tahun 2025. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
e. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD. Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hingga Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target Renstra tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif dalam akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Sangat Baik: Realisasi telah melampaui target, menunjukkan efektivitas program pengelolaan sumber daya air.
2) Pengendalian Banjir dan Rob Berkinerja Unggul: Persentase kawasan banjir dan rob yang lebih rendah dari target mengindikasikan keberhasilan upaya mitigasi bencana.
3) Kualitas Infrastruktur Jalan Membutuhkan Perhatian Lebih: Meskipun dalam kondisi baik, realisasi masih sedikit di bawah target, menunjukkan ruang untuk perbaikan.
4) Pemeliharaan Jembatan Sangat Memuaskan: Realisasi persentase jembatan dalam kondisi baik jauh melampaui target, menandakan kinerja luar biasa.
5) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Meningkat: Nilai AKIP yang melampaui target menunjukkan peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban.

6) Ketersediaan Data Historis (Sebelum 2025) untuk Jembatan dan AKIP Perlu Ditingkatkan: Ketiadaan data pada tahun-tahun sebelumnya menyulitkan analisis tren jangka panjang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

BIDANG SEKRETARIAT		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas	a. Banyak pegawai yang sudah purna tugas; b. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan; c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Pengelolaan barang milik daerah	Mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal, efisien, akuntabel dan ekonomis.	a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum optimal, akuntabel dan terdefinisi dengan jelas; b. Pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang belum optimal; c. Pengamanan barang milik daerah yang belum sesuai ketentuan yang berlaku; d. Adanya hambatan saat menginventarisasi barang milik daerah terutama untuk barang dengan tahun perolehan di atas 5 periode anggaran sebelumnya; e. Masih kurangnya sarpras untuk mendukung pengarsipan dokumen pelaporan barang milik daerah; f. Kurangnya kepatuhan pegawai dalam menaati aturan penggunaan barang milik daerah yang berlaku.
BIDANG REKAYASA TEKNIS		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai;	Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas	a. Banyak pegawai yang sudah purna tugas; b. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan; c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	Sarpras yang sebagian besar sudah tua, baik itu sarpras kantor maupun kendaraan dinas.
BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan	Kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	a. Kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi masih ada yang rusak; b. Sarana penunjang kegiatan operasi

irigasi belum optimal		dan pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang memadai; c. Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai.
2. Kondisi sarana dan prasarana sungai di Kota Semarang	Belum optimalnya kinerja sarpras sungai	a. Banyaknya jumlah sarpras sungai yang rusak; b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan DAS; c. Kurangnya SDM pengelola sarpras sungai karena banyaknya yang purna tugas; d. Kurangnya pengetahuan dari SDM tentang pengelolaan sarpras sungai.
3. Daerah genangan banjir dan rob	Belum optimalnya kinerja sarpras pengendalian banjir dan rob	a. Luasnya daerah genangan banjir dan rob; b. Banyaknya jumlah sarpras pengendalian banjir dan rob yang rusak; c. Kurangnya bangunan prasarana pengendali banjir dan rob; d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan.
4. Pemenuhan kebutuhan air baku belum optimal	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	a. Sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air baku masih kurang; b. Kondisi sarana dan prasarana air baku yang rusak; c. Pemanfaatan aset dalam mendukung kerjasama pengelolaan SDA masih kurang.
BIDANG BINA MARGA		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	1. Masih ada jalan Kota yang belum memenuhi standar jalan kolektor	a. Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m; b. Masih terdapat ruas jalan yang MST kurang dari 8 Ton; c. Terdapat perlintasan Sebidang; d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan berkaitan jalan.
	2. Terdapat ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.	Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah).
2. Masih terdapat potensi kerusakan jembatan pada titik tertentu	Masih ada jembatan kota semarang yang belum memenuhi standar	a. Perlunya pemeriksaaan secara berkala menggunakan BMS *(Bridge Management System)*; b. Masih terdapat jembatan yang mempunyai lebar kurang dari 3 meter; c. Banyaknya SDM yang purna tugas.

3. Masih terdapat pedestrian yang belum memenuhi standar pedestrian jalur hijau.		

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021-2026

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perubahan iklim membuat potensi banjir dan rob menjadi hampir tidak terprediksi sehingga masih ada di beberapa daerah masih tergenang air. Maka diperlukan pemanfaatan surplus aair tersebut menjadi potensi yang berguna bagi masyarakat.
   2) Dengan maraknya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan teknologi untuk mengubah energi potensial terbarukan sebagai sumber energi .
   3) Semarang merupakan kota yang berpotensi banjir dan rob diperlukan sebuah sistem untuk mempercepat penanganan masalah tersebut dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.
   4) Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.
   5) Masih kurangnya peran serta / kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
   6) Perkembangan kota semarang yang semakin pesat memerlukan kapasitas jalan dan jembatan yang besar pula, maka dimungkinkan Pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan khususnya untuk kawasan strategis;
   7) Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.
b. Peluang
   1) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air;
   2) Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat dan Provinsi berupa DAK dan Banprov;
   3) Meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur kota serta utilitas yang memadai;

4) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya air yang layak dan memadai;
5) Meningkatnya pembangunan infrastruktur kota di kawasan strategis;
6) Adanya peluang untuk mengubah masalah banjir dan rob menjadi potensi *(Water as Leverage);*
7) Perkembangan teknologi menjadikan peluang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud smart infrastruktur.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob.
2) Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
3) Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
4) Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
5) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
6) Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
7) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.
8) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
9) Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
10) Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
11) Pembangunan infrastruktur kota dan utlitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
12) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Semarang				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 Persen	75.140.389.102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 Persen	75.140.389.102	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	106.921.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	106.921.600	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30.171.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30.171.600	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	4.764.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.764.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	4.370.900	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.964.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.964.100	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	4.370.900	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.698.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.698.200	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.581.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.581.000	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	35.811.635.537	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	35.811.635.537	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/ bulan	34.829.333.837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/ bulan	34.829.333.837	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	973.315.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	973.315.700	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.359.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.359.400	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	3.706.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.706.200	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.920.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.920.400	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.554.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.554.200	
1.03.01.	Penyusunan Perencanaan	Kota	Jumlah Rencana	1	1.459.400	Penyusunan	Kota	Jumlah Rencana	1	1.459.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.03.0001	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semarang	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semarang	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3.094.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3.094.800	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	7.434.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	7.434.200	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.954.200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.954.200	
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	4.480.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	4.480.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	1.872.401.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	1.872.401.106	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	277.061.224	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	277.061.224	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	408.581.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	408.581.700	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	277.133.551	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	277.133.551	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	29.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	29.000	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	187.814.351	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	187.814.351	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	407.379.872	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	407.379.872	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	239.401.408	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	239.401.408	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	29.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	29.000	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	29.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	29.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	28.025.074.048	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	28.025.074.048	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.283.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.283.000	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.767.099.241	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.767.099.241	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.238.691.807	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.238.691.807	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	9.312.339.411	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	9.312.339.411	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.876.642.019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.876.642.019	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	75.000.000	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	331.417.392	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	331.417.392	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.498.057.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.498.057.000	
1.03.01.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota	Luas Tanah yang	5 Ha	4.531.223.000	Pemeliharaan/Rehabilita	Kota	Luas Tanah yang	5 Ha	4.531.223.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.09.0012	Tanah	Semarang	Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			si Tanah	Semarang	Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	57.920.001.459	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	57.920.001.459	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97.42 Persen	48.576.230.845	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97.42 Persen	48.576.230.845	
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	2.000.000.000	
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	23.300.675.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	23.300.675.000	
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	989.236.374	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	989.236.374	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	20.198.383.285	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	20.198.383.285	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	720.225.715	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	720.225.715	
1.03.02.2.01.00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Semarang	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direst	0,5 KM	857.106.800	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Semarang	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstora	0,5 KM	857.106.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
93			orasi					si			
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	510.603.670	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	510.603.670	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85.50 Persen	9.343.770.614	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85.50 Persen	9.343.770.614	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara.	2,3 KM	9.043.770.614	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara.	2,3 KM	9.043.770.614	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	98.527.829.620	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	98.527.829.620	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur	99.59 Persen	98.527.829.620	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	99.59 Persen	98.527.829.620	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kabupaten/Kota		pengaman pantai			Daerah Kabupaten/Kota		pantai			
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	30.662.200.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	30.662.200.000	
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	9.170.825.140	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	9.170.825.140	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	2.959.875.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	2.959.875.000	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	24.198.435.920	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	24.198.435.920	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	31.536.493.560			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	31.536.493.560	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	152.490.770.789	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	152.490.770.789	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.48 Persen	152.490.770.789	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.48 Persen	152.490.770.789	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	325.055.316	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	325.055.316	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	11 Dokumen	2.482.380.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	11 Dokumen	2.482.380.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	3.500.000.000	Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	3.500.000.000	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	9.341.534.924	Rekonstruksi Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	9.341.534.924	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	71.891.672.313	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	71.891.672.313	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	2.996.045.402			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	2.996.045.402	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Semarang	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	999.259.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Semarang	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	999.259.000	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	900.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	900.000.000	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	11.600.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	11.600.000.000	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	5.500.000.000	Pembangunan Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	5.500.000.000	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	572.211.664	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	572.211.664	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	13.751.083.000	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	13.751.083.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	16.572.965.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	16.572.965.000	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	2.241.196.255			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	2.241.196.255	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	2.289.038.319			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	2.289.038.319	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	4.414.472.583			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	4.414.472.583	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	3.113.857.013			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	3.113.857.013	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan

Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

1) "Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan"
   Memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu".
2) "Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap"
   Memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu:

1) Terwujudnya sasaran strategis "Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob", dengan Indikator "Persentase wilayah bebas banjir" dan Indikator "Persentase wilayah bebas rob".
2) Terwujudnya sasaran strategis "Meningkatnya fungsi dan manfaat infratruktur jalan dan jembatan", dengan Indikator "Persentase jalan dalam kondisi mantap" dan Indikator "Persentase jembatan dalam kondisi baik".
3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD, dengan Indikator "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan	Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu	%	98,44
SASARAN			
Meningkatnya Kinerja Sarana Dan Prasarana Pengendali Banjir Dan Rob	Pesentase Kawasan Banjir	%	1,88

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase Kawasan Rob	%	1,25
TUJUAN			
Terwujudnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Tingkat Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	%	75,30
SASARAN			
Meningkatnya Fungsi Dan Manfaat Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	94,00
	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	56,60
SASARAN			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	75,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum DPU bertugas mendukung pencapaian misi ketiga Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.928.469.338	75.928.469.338	75.928.469.338		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	137.589.200	137.589.200	137.589.200		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	54.712.400	54.712.400	54.712.400		
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.764.900	4.764.900	4.764.900		
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900		
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.964.100	4.964.100	4.964.100		
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	DPA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.406.000	9.406.000	9.406.000		
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	49.172.282.100	49.172.282.100	49.172.282.100		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	450 Orang/bulan	450 Orang/bulan	48.188.684.000	48.188.684.000	48.188.684.000		
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	973.375.700	973.375.700	973.375.700		
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.359.400	2.359.400	2.359.400		
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.942.600	4.942.600	4.942.600		
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.920.400	2.920.400	2.920.400		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Anggaran	Anggaran								
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.037.000	6.037.000	6.037.000		
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.942.200	2.942.200	2.942.200		
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.094.800	3.094.800	3.094.800		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.255.637.445	3.255.637.445	3.255.637.445		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1.255.478.043	1.255.478.043	1.255.478.043		
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	277.133.551	277.133.551	277.133.551		
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan								
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	203.625.851	203.625.851	203.625.851		
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	694.400.000	694.400.000	694.400.000		
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	545.000.000	545.000.000	545.000.000		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	221.571.203	221.571.203	221.571.203		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Paket	101 Paket	101 Paket	221.571.203	221.571.203	221.571.203		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18.352.507.442	18.352.507.442	18.352.507.442		
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.283.000	19.283.000	19.283.000		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.058.247.394	7.058.247.394	7.058.247.394		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.274.977.048	11.274.977.048	11.274.977.048		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.762.844.948	4.762.844.948	4.762.844.948		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	121 Unit	121 Unit	121 Unit	2.549.231.478	2.549.231.478	2.549.231.478		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya								
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	1031 Unit	1031 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000		
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	422 Unit	422 Unit	239.548.470	239.548.470	239.548.470		
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	899.065.000	899.065.000	899.065.000		
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	5 Ha	5 Ha	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44 Persen	98,44 Persen	98,44 Persen	51.772.839.454	51.772.839.454	51.772.839.454		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97,42 Persen	97,42 Persen	97,42 Persen	49.072.839.454	49.072.839.454	49.072.839.454		
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	28.100.675.000	28.100.675.000	28.100.675.000		
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	85 Unit	85 Unit	15.310.681.739	15.310.681.739	15.310.681.739		
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	720.225.715	720.225.715	720.225.715		
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5 KM	0,5 KM	0,5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	441.257.000	441.257.000	441.257.000		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85,50 Persen	85,50 Persen	85,50 Persen	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3 KM	2,3 KM	2,3 KM	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000		
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00 Persen	67,00 Persen	67,00 Persen	144.200.329.938	144.200.329.938	144.200.329.938		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99,59 Persen	99,59 Persen	99,59 Persen	144.200.329.938	144.200.329.938	144.200.329.938		
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	97.400.000.000	97.400.000.000	97.400.000.000		
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	208 Unit	208 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.617.500.000	1.617.500.000	1.617.500.000		
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	12.588.000.000	12.588.000.000	12.588.000.000		
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	23.594.829.938	23.594.829.938	23.594.829.938		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,30 Persen	75,30 Persen	75,30 Persen	109.048.612.911	109.048.612.911	109.048.612.911		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,48 Persen	88,48 Persen	88,48 Persen	109.048.612.911	109.048.612.911	109.048.612.911		
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	455.000.000	455.000.000	455.000.000		
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.476.426.000	1.476.426.000	1.476.426.000		
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	2 KM	2 KM	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000		
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	2 KM	2 KM	6.074.424.280	6.074.424.280	6.074.424.280		
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	10.167.653.229	10.167.653.229	10.167.653.229		
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi	2 KM	2 KM	2 KM	1.360.871.738	1.360.871.738	1.360.871.738		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyelenggaraannya								
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	5 Jembatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000		
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	8.492.000.000	8.492.000.000	8.492.000.000		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	6 KM	6 KM	575.317.000	575.317.000	575.317.000		
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	1 KM	35.500.000.000	35.500.000.000	35.500.000.000		
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM	6.640.000.000	6.640.000.000	6.640.000.000		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	5 KM	1.406.920.664	1.406.920.664	1.406.920.664		
JUMLAH										

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

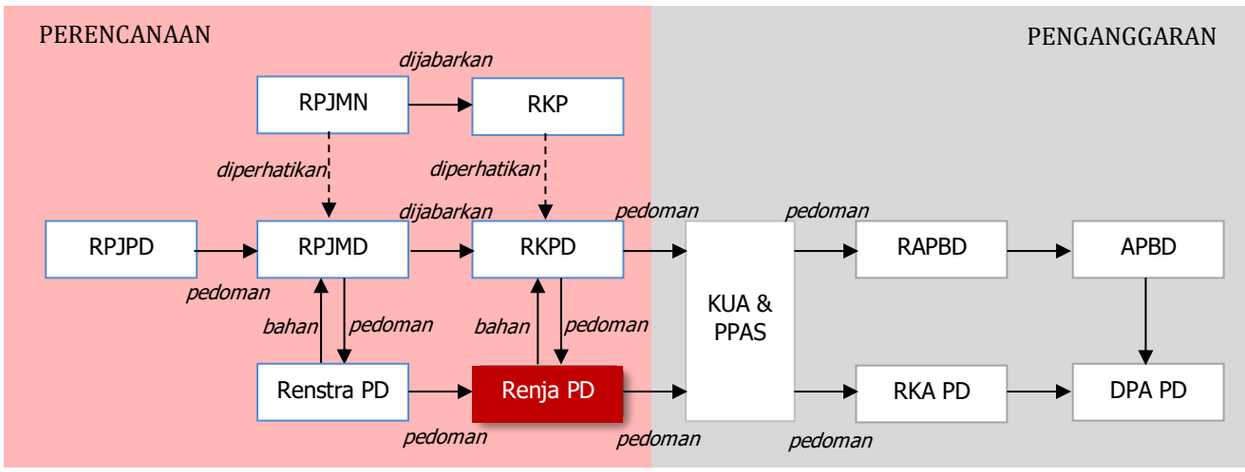

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025,

dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh:

1) Adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024.
2) Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja yaitu kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
3) Adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan Renja 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk:

1) Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi;
2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan;
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor;
4) Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional; serta
5) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
aa. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
bb. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; dan
cc. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

   Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan kualitas SDM**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	14 Dokumen	140%
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	4 Dokumen	80%
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	-	0%	9 Dokumen	180%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	13 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50%	16 Dokumen	160%
1.03.01.2.01.0008	Penyusunan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	-	0%		
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440 orang/bulan	256 orang/bulan	170 orang/bulan	173 orang/bulan	101%	429 Dokumen	97%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	163 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	163 Dokumen	40%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	11 Laporan	1 Laporan	-	0%	11 Laporan	44%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	32 Laporan	1 Laporan	-	0%	32 Laporan	64%
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50 Dokumen	24 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	24 Dokumen	48%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	120 Dokumen	72 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	72 Dokumen	60%
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000 orang	600 Orang	240 orang	100 orang	41%	700 orang	70%
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	60 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	61 Paket	61%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket	206 Paket	1 Paket	-	0%	206 Paket	41%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400 Paket	240 Paket	2 Paket	6 Paket	300%	246 Paket	61%
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	300 Paket	7 Paket	1 Paket	14%	301 Paket	60%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	150 Paket	3 Paket	-	0%	150 Paket	60%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	90 Dokumen	4 Dokumen	-	0%	90 Paket	60%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500 Laporan	1.500 Laporan	85 Laporan	20 Laporan	23%	1.520 Laporan	61%
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	250 Dokumen	150 Dokumen	1 Dokumen	-	-	150 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**			
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000 Laporan	3.600 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	3.606 Laporan	60%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	375 Laporan	225 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	231 Laporan	61%
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Laporan	300 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	306 Laporan	61%
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	80%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	270 Unit	161 Unit	56 Unit	19 Unit	33,93%	180 Unit	66,67%
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	9 Unit	45%
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Tertatanya Bangunan Gedung**	**100%**	**100&**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**100%**	**100&**	**100%**	**50%**	**50%**		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	150 Unit	154 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	-	0%	154 Bangunan Gedung Cagar Budaya	102%
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Pengelola	35 Orang	150 Pengelola	-			
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	180 Unit	112 Unit	3 bangunan Gedung				
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	400 Unit	238 Unit	3 Unit				
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	25 Dokumen	15 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	15 Dokumen	60%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 Bantuan Teknis	3 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	-	0%	3 Bantuan Teknis	60%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	590 Dokumen	242 Dokumen	8 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			600 Orang	204 Orang	34%	204 Orang	34%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	25 Dokumen	33 Dokumen	2.400 Dokumen	1.386 Dokumen	57,75%	1.419 Dokumen	567,6%
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**Persentase reklame yang berizin**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**		
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 Dokumen	17 Dokumen	3 Dokumen	-	0%	17 Dokumen	170%
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Tersedianya tenaga terampil konstruksi**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	2.200 orang	1420 orang	50 orang	96 Orang	192%	1.516 Orang	68,9%
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.850 orang	1.160 lembaga	60 lembaga	-	0%	1.160 Lembaga	62,7%
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau	10 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	12 Dokumen	120%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya							
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	750 orang	500 Orang	50 orang	96 Orang	192%	596 Orang	79,46%
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	-	0%	7 Dokumen	140%
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang			1 Publikasi	-	0%	0 Publiaksi	0%
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar			2 Peta	-	0%	0 Peta	0%
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			40 Orang	-	0%	0 Orang	0%
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			1 Kegiatan	-	0%	0 Kegiatan	0%
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			1 Dokumen	-	0%	0 Dokumen	0%
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	25 Dokumen	15 Dokumen	3 Sistem informasi	-i	0%	15 Sistem Informas	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	8 Laporan	80%
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			1 Laporan	-	0%	0 Laporan	0%
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang**	**90,70%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1(satu) Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			24 Berita Acara	12 Berita Acara	50%	12 Berita Acara	50%
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30 Dokumen	14 Dokumen	46,67%	14 Dokumen	46,67%
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**66,67%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	50%	8 Laporan	80%
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH**	**terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**							
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	10 Laporan	66,67%
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)	15 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	10 Laporan	66,67%
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.08.2.01	**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**terselesiakannya permasalahan tanah kosong**	**4 lokasi**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	7 Laporam	1 Laporan	-	0%	7 Laporan	70%
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	80%
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**terselesaikannya penatagunaan tanah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	-	0%	3 Laporan	60%

Catatan : Perbedaan warna menandakan perubahan nomenklatur/indikator akibat pemuktahiran

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “(sebutkan sub kegiatan yang sudah tercapai 100%)” dan “(sebutkan sub kegiatan yang sudah tercapai 100%)”,

Ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena mengalami refocusing anggaran dan penyesuaian atas perubahan kegiatan dedicated. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan penganggaran antara lain:

1. “(sebutkan sub kegiatan yang revisi refocusing)”
2. “(sebutkan sub kegiatan yang revisi refocusing)”
3. “(sebutkan sub kegiatan yang revisi refocusing)”

Kedua sub kegiatan ini pedukung dari indikator sasaran RPJMD Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berupa Indeks Risiko Bencana. Dengan terefocusing nya 2 sub kegiatan tersebut maka Indeks Risiko Bencana Kota Semarang tidak akan mencapai target yang di tentukan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “(sebutkan sub kegiatan yang revisi anggaran)”, “Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota”, “(sebutkan sub kegiatan yang revisi anggaran)”,” dan “(sebutkan sub kegiatan yang revisi anggaran)”,”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27,408,812,510.24	9,405,118,396.00	34.31%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127,241,301.43	18,128,905.00	14.25%
KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,418,000.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,518,000.00	0.00	0.00%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,456,000.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7,590,000.00	7,499,160.00	98.80%
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,569,301.43	0.00	0.00%
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,372,000.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,068,000.00	10,629,745.00	88.08%
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	49,250,000.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,660,819,568.00	9,024,109,890.00	36.59%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,678,149,160.00	7,492,358,813.00	33.04%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,979,550,640.00	1,531,751,077.00	77.38%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,075,782.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,075,782.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	968,204.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101,938,969.00	36,000,000.00	35.32%
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3,599,269.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	98,339,700.00	36,000,000.00	36.61%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,434,249,151.00	88,355,829.00	6.16%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	49,996,476.00	18,578,070.00	37.16%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,999,314.00	0.00	0.00%
KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138,261,425.00	27,618,816.00	19.98%
1.03.01.2.06.0004	Belanja Bahan Logistik Kantor	42,509,448.00	2,735,595.00	6.44%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,167,253.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,359,404.00	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236,662,697.00	8,359,348.00	3.53%
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	927,293,134.00	31,064,000.00	3.35%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423,421,337.00	50,054,358.00	11.82%
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,498,000.00	500,000.00	7.69%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,494,552.00	10,752,158.00	17.48%
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355,428,785.00	38,802,200.00	10.92%
1.03.01.2.09	Pemelliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	661,142,183.81	188,469,414.00	28.51%
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,955,000.00	11,802,828.00	32.83%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	553,470,000.00	161,923,594.00	29.26%
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71,717,183.81	14,742,992.00	20.56%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	107,467,376,064.58	10,447,484,868.00	9.72%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	107,467,376,064.58	10,447,484,868.00	9.72%
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13,524,296.40	4,116,060.00	30.43%
KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	74,416,204,392.00	10,004,794,500.00	13.44%
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4,991,373,102.49	1,432,000.00	0.03%
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	424,190,048.30	3,573,160.00	0.84%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	13,508,738.20	1,936,600.00	14.34%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25,952,548,898.00	13,286,500.00	0.05%
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	47,732,457.10	19,010,658.00	39.83%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1,482,547,856.70	391,521,890.00	26.41%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA	467,990,351.70	30,750,300.00	6.57%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	467,990,351.70	30,750,300.00	6.57%
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	467,990,351.70	30,750,300.00	6.57%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	329,340,261.58	148,529,800.00	45.10%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	329,340,261.58	148,529,800.00	45.10%
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	25,168,358.92	5,125,000.00	20.36%
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	27,290,950.00	0.00	0.00%
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	97,409,747.80	0.00	0.00%
KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	179,471,204.86	143,404,800.00	79.90%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,493,685,587.78	125,925,207.00	8.43%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	408,080,873.81	21,729,200.00	5.32%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	402,633,915.63	17,726,800.00	4.40%
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	5,446,958.18	4,002,400.00	73.48%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	514,261,448.88	17,170,249.00	3.34%
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	191,602,989.00	5,635,700.00	2.94%
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Tata Ruang	200,000,000.00	0.00	0.00%
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	122,658,459.88	11,534,549.00	9.40%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	335,844,688.68	24,838,300.00	7.40%
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	140,398,304.20	22,453,300.00	15.99%
1.03.12.2.03.0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	195,446,384.48	2,385,000.00	1.22%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	235,498,576.41	62,187,458.00	26.41%
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	141,588,970.20	31,723,008.00	22.40%
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	93,909,606.21	30,464,450.00	32.44%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	209,338,096.00	190,521,300.00	91.01%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	209,338,096.00	190,521,300.00	91.01%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105,673,500.00	95,382,300.00	90.26%
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103,664,596.00	95,139,000.00	91.78%
KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	405,543,898.10	28,079,300.00	6.92%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405,543,898.10	28,079,300.00	6.92%
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405,543,898.10	28,079,300.00	6.92%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	124,654,785.00	48,450,696.00	38.87%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	124,654,785.00	48,450,696.00	38.87%
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	116,145,161.00	44,854,696.00	38.62%
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8,509,624.00	3,596,000.00	42.26%
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	122,355,006.00	103,552,100.00	84.63%
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	8,439,457.00	3,908,200.00	46.31%
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,439,457.00	3,908,200.00	46.31%

KODE REKENING	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	113,915,549.00	99,643,900.00	87.47%
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	113,915,549.00	99,643,900.00	87.47%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	8,973,215.00	3,832,200.00	42.71%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	8,973,215.00	3,832,200.00	42.71%
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	8,973,215.00	3,832,200.00	42.71%
	TOTAL	138,038,069,775.98	20,532,244,167.00	14.87%

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 10 program, dan 19 kegiatan dan 60 sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebesar Rp 138.038.069.775.98

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.532.244.167,00 atau 14,87%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 117,505,825,608.98

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertayanagan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada SK Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7279/050/XII/2022 tentang

Penetapan IKU Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU (%)						REALISASI				PROYEKSI (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
Tujuan :												
Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	59,47	60,49	62,76	64,77	67,68	70,55	60,49	65,63	70,60	65,80	67,68
Sasaran :												
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	97,7	97,0	97,5	97,6	97,7	97,8	97,0	98,67	98,19	87,54	97,7
Sasaran :												
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	26,3	27,2	28,5	29,4	33,0	36,5	27,2	36,14	42,40	37,19	33,03
Sasaran :												
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,4	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	57,3	62,09	71,21	72,69	72,30

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan "Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

Pada Tahun 2025 Triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 65,80% dari target sebesar 67,68% (capaian 97,23%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

1) Sasaran Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW; Pada tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 87,54% dari target sebesar 97,7% (capaian 89,60%), dengan perhitungan berdasarkan target triwulan II, sebagai berikut : *((Jumlah KRK yang dikeluarkan-KRK tidak boleh dibangun) /Jumlah KRK yang dikeluarkan)) x100% = (1138/ 1300) x100% = 87,54%.*
2) Sasaran Persentase bangunan berijin. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 37,19% dari target sebesar 33,03% (capaian 112,58%), dengan perhitungan berdasarkan target triwulan II sebagai berikut:

(Jumlah rekomtek PBG pada tahun berjalan / Jumlah penambahan bangunan pada tahun berjalan) x100% = (1351/3633) x100% = 37,19%.

3) Sasaran Persentase tertib Administrasi Pertanahan. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 72,69% dari target sebesar 65,0% (capaian 99,95%), dengan perhitungan berdasarkan target triwulan II sebagai berikut :
(Jumlah tanah bersertifikat/Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x100% = (437.868/602.395) x100% = 72,69%.
4) Sasaran Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang". Pada tahun 2025, Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang adalah sebesar 80,05 dari target sebesar 80,09 (capaian 99,99%).

Capaian Kinerja Dinas Penataan Ruang terhadap Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Semarang, sampai dengan kondisi triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Rasio kepatuhan PBG kab/kota dari target 66,9% , terealisasi 83,5% (capaian 100%)
2. Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dari target 58%, terealisasi 100% (capaian 100%)
3. Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan target 60% terealisasi 99,29% (capaian 100%)
4. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dengan target 45,64% terealisasi 44,82% (capaian 98,20%)
5. Kesesuaian tata ruang dengan target 100% berhasil dicapai 100%

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang yang mengarah pada *main core* tupoksi OPD, yaitu pelayanan publik berupa mengeluarkan dokumen KRK dan PBG mempengaruhi indikator kinerja daerah yaitu rasio kepatuhan PBG kab/kota. Semakin banyak masyarakat yang mengajukan KRK maupun PBG, menunjukkan makin tingginya kepatuhan masyarakat dalam mengajukan perijinan bangunan gedung.
2. Semakin tingginya indikator persentase administrasi pertanahan maka makin tingginya data dan informasi terkait penetapan tanah untuk fasilitas umum dan ketersediaan tanah untuk masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang bidang penataan ruang dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1) Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Semarang, hal ini lebih disebabkan luasan wilayah yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil Dinas Penataan Ruang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan penambahan personil OPD, dengan melakukan kajian kebutuhan personil. Selain itu diusulkan juga kemungkinan adanya pendelegasian kewenangan kepada pemangku wilayah untuk menjadi perpanjangan tangan atau membantu Dinas Penataan Ruang dalam melakukan pengawasan tata ruang dan perizinan bangunan gedung
2) Belum optimalnya perizinan PBG
   Hal ini antara lain disebabkan adanya penerapan single system, sehingga apabila ada kendala pada sistem tersebut, maka proses perijinan terhenti.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai pengelola SIMBG untuk kemudahan teknis operasional penerbitan rekomtek PBG dan SLF. Selain itu berkoordinasi mengenai kemungkinan adanya sistem pendamping sehingga apabila ada kendala dengan system utama, proses perijinan tidak sampai terhenti namun masih bisa berproses melalui system pendamping
3) Masih rendahnya ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perizinan bangunan
   Hal ini antara lain disebabkan masih awamnya masyarakat terkait administrasi persetujuan bangunan gedung.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain melakukan sosialisasi/fgd/seminar terkait optimalisasi perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan Gedung secara Gedung, baik kepada pemangku wilayah maupun kepada pelaku usaha
4) Belum optimalnya database yang valid terkait kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan bangunan Gedung di Kota Semarang
   Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan SDM dengan laju pertumbuhan bangunan dan perubahan tata guna lahan yang cepat.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain melakukan updating data bangunan Gedung secara parsial. Sementara itu pendekatan data eksisting dilakukan dengan menggunakan database PBB bekerjasama dengan Bappeda Kota Semarang.
5) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan urusan Pertanahan karena lebih pada pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang.
   Hal ini antara lain disebabkan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun digitalisasi data pertanahan masih tergantung pada Kantor Pertanahan, sedangkan kebijakan Satu Peta menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai walidata geospasial, sehingga perlu adanya sinkronisasi data pertanahan antara peta

bidang tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan dengan Peta Dasar Kota Semarang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait sharing data pertanahan, dengan harapan kebijakan Satu Peta akan terwujud yang secara umum akan berdampak pada keberhasilan Reforma Agraria dan redistribusi tanah.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Perubahan Iklim
Kota Semarang, sebagai kota pesisir di utara pulau Jawa, kini menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya suhu udara yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim global. Dampak pemanasan global di Semarang, sangat nyata dan beragam. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan laut telah menyebabkan sejumlah dampak yang signifikan seperti risiko banjir rob, infrastruktur kota, seperti jalan raya, saluran air, dan bangunan, dapat menjadi lebih rentan terhadap kerusakan.

2) Pengarusutamaan Gender
Belum optimalnya fasilitas public yang responsive gender, terutama pada bagunan gedung negara dan fasilitas pelayanan public. Gender mensyaratkan pemerintah daerah memfasilitasi kaum marjinal dan berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, orang tua/jompo dan kaum difabel. Dengan kata lain, gender berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan mereka dalam rencana teknis yang seharusnya diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Satu Peta
- Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan Pembangunan berbasis spasial
- Pemerintah Daerah agar berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tumpeng tindih pemanfaatan lahan di lapangan
- Kepala Daerah agar melakukan upaya percepatan penetapan Batas Kelurahan dan agar mengoordinasikan teknis pemetaannya dengan BIG
- Pemerintah Daerah agar melengkapi peta tematik yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Reforma Agraria
- Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan tanah yang akan dijadikan objek reforma agraria. Terutama,

dalam kawasan hutan, di mana pengelolaan bersama perlu diperhatikan agar tidak mengabaikan aspek sektoral.

- Penyelesaian Konflik: Konflik terkait kepemilikan tanah sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang cermat dan keberanian untuk menyelesaikan sengketa tanah.
- Ego Sektoral: Tantangan lainnya adalah ego sektoral. Dalam menjalankan program reforma agraria, pemerintah harus mengatasi kepentingan sektoral dan memastikan keberlanjutan program tanpa mengabaikan aspek lain.
- Penguatan Kelembagaan: Reforma agraria memerlukan kelembagaan yang kuat untuk mengelola prosesnya. Penguatan kelembagaan menjadi tantangan yang harus diatasi.
- Percepatan Penataan Aset dan Akses: Proses penataan aset dan akses tanah juga menjadi bagian penting dari reforma agraria. Percepatan dalam hal ini akan mempercepat pencapaian tujuan reforma agraria

b. Peluang

1) Pengembangan Kembali Tata Ruang: Menerapkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan untuk meminimalkan kerugian lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Desain Bangunan Hijau: Mendorong pembangunan dan renovasi bangunan yang ramah lingkungan dan berenergi efisien. Kota Semarang semakin panas, tetapi dengan tindakan yang tepat, kota ini dapat menjadi contoh bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Mengatasi tantangan pemanasan global memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat, Semarang dapat menjadi contoh kota yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.
2) Strategi pengarusutamaan gender di Kota Semarang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai Perda ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja OPD yang dilakukan melalui Analisis Gender.
3) Pemerintah melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres 23 Tahun 2021 menetapkan adanya 158 peta tematik yang melibatkan 24 Kementerian/Lembaga (K/L) di 34 provinsi meliputi peta kemaritiman, kebencanaan, pertanahan, perekonomian, keuangan, dan peta perizinan. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta

percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan

4) Peluang Reforma Agraria antara lain :
   - Adanya Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka reforma agraria.
   - Terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas menyelesaikan berbagai sengketa tanah di Jawa Tengah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah memastikan akses perbankan bagi pemilik tanah yang memiliki sertifikat, sehingga aset tanah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
   - Peluang Miliki Rumah Murah melalui Reforma Agraria: Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia. Melalui reforma agraria, ada peluang untuk memiliki rumah murah dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanah.
   - Redistribusi Tanah: Reforma agraria juga mencakup redistribusi tanah. Di Jawa Tengah, terdapat rencana redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, termasuk tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut:

a. Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perijinan tata guna lahan dan persetujuan bangunan gedung dalam rangka meminimalisir resiko bencana banjir dan longsor.
b. Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.
c. Pemenuhan fasilitas umum (bangunan gedung negara untuk pelayanan publik) yang berbasis gender terutama upaya pemenuhan sarana prasarana berbasis pengarusutamaan gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan

RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DINAS PENATAAN RUANG				138.038.069.776	DINAS PENATAAN RUANG				124.773.028.469	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				137.167.204.776	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				123.218.481.769	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	107.467.376.065	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	91.179.549.977	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	107.467.376.065	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	91.179.549.977	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	125.746.275	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	125.746.275	Penambahan Pekerjaan Non Fisik berupa Kajian

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150 Orang	13.524.296	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150 Orang	13.524.296	Penambahan Pekerjaan Non Fisik berupa Kajian
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	74.416.204.392	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	27 Bangunan Gedung	54.960.460.318	Penambahan Pokok Pikiran DPRD dan Hibah
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	4.991.373.102	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	20 Bangunan Gedung	16.469.271.821	Penambahan pemeliharaan bangunan gedung strategis daerah
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	424.190.048	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	9 Dokumen	1.070.656.493	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	13.508.738	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	13.508.738	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	25.952.548.898	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	17.112.923.610	Penambahan Pekerjaan Fisik penyelesaian Program RPJMD
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	47.732.457	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	47.732.457	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) , Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	1.482.547.857	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) , Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	1.365.725.967	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	467.990.352	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	467.990.352	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	467.990.352	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	467.990.352	
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	467.990.352	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	467.990.352	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Masyarakat Kota Semarang	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%	329.340.262	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Masyarakat Kota Semarang	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%	329.340.262	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	329.340.262	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	329.340.262	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	25.168.359	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	25.168.359	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	27.290.950	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	27.290.950	
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	97.409.748	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	97.409.748	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	179.471.205	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	179.471.205	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Kota Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	1.493.685.588	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Kota Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	2.234.853.688	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	408.080.874	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	930.701.774	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	402.633.916	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	925.254.816	
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	5.446.958	Penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	5.446.958	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	514.261.449	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	456.558.699	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	191.602.989	Penyusunan Peta Dasar	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	191.602.989	
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pernataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	200.000.000	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pernataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	122.658.460	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	64.955.710	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	335.844.669	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	435.844.689	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	140.398.304	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	240.398.304	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	195.446.384	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	195.446.385	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	235.498.576	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	411.748.526	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	141.588.970	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	341.588.970	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	93.909.606	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	70.159.556	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	27.408.812.510	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	29.006.747.491	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	127.241.301	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	227.167.101	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.418.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.418.000	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.518.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.518.000	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.456.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.456.000	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.590.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.590.000	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.569.301	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.569.301	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.372.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.372.000	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.068.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.625.000	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	49.250.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	149.175.800	Sub kegiatan baru
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	24.660.819.568	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	21.588.430.161	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	22.678.149.160	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/bulan	19.420.376.843	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.979.550.640	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.164.933.550	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.075.782	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.075.782	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.075.782	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.075.782	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	968.204	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	968.204	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	101.938.969	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	101.938.969	
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.599.269	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.599.269	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	98.339.700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240 Orang	98.339.700	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.434.249.151	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	6.026.460.525	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.996.476	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.996.476	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.314	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	874.845.269	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	138.261.425	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	138.261.425	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	42.509.448	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	56.125.539	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.167.253	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.167.253	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.359.404	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.554.884	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	236.662.697	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	306.644.697	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	927.293.134	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.578.864.982	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	423.421.337	Penyediaan Jasa Penunjang	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	401.608.551	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.498.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.498.000	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.494.552	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.494.552	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355.428.785	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333.615.999	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	661.142.184	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	661.142.184	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	553.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	553.470.000	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.717.184	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.717.184	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				870.865.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.554.546.700	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	209.338.096	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	309.338.096	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	209.338.096	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	309.338.096	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	105.673.500	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	105.673.500	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	103.664.596	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Dokumen	203.664.596	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	405.543.898	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	405.543.898	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	405.543.898	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	405.543.898	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	405.543.898	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	405.543.898	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Semarang	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	124.654.785	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Semarang	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	278.336.485	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	124.654.785	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	278.336.485	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	116.145.161	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169.826.861	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.506.624	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.509.624	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	122.355.006	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	50.094.000	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	8.439.457	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	8.439.457	
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	8.439.457	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	8.439.457	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	113.915.549	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	113.915.549	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	113.915.549	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	113.915.549	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	8.973.215	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	438.973.215	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	8.973.215	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	438.973.215	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.973.215	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	438.973.215	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENATAAN RUANG
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung

dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang B/7279/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Penataan Ruang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan"

Dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, dengan Indikator "Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW".
2. Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin, dengan Indikator "Persentase bangunan berijin".
3. Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan, dengan Indikator "Persentase tertib Administrasi Pertanahan".
4. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang, dengan Indikator "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan		Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	67,68
1	*Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW*	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	97,7
2	*Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin*	Persentase bangunan berijin	%	33,0
3	*Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan*	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	72,3

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
2. Mempedomani Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Penataan Ruang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
						DINAS PENATAAN RUANG					163.063.575.574,00	154.263.575.574,00	124.773.028.468,63		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					161.980.528.580,00	153.080.528.580,00	123.218.481.768,53		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					161.980.528.580,00	153.080.528.580,00	123.218.481.768,53		
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	27.463.538.375,00	28.063.538.375,00	29.006.747.490,85		
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	189.146.400,00	189.146.400,00	189.146.400,00		Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	88.859.600,00	88.859.600,00	50.418.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.900,00	7.800.900,00	1.518.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.900,00	7.490.900,00	1.456.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.900,00	7.800.900,00	7.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.900,00	7.490.900,00	1.569.301,43	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.078.200,00	7.078.200,00	3.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	12.625.000,00	12.625.000,00	12.068.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	149.175.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	24.672.543.386,00	24.672.543.386,00	24.672.543.386,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	170 Orang/bulan	158 Orang/bulan	24.001.875.000,00	22.678.149.160,00	19.420.376.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
														Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	655.824.800,00	1.979.550.640,00	2.164.933.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.114.214,00	5.114.214,00	1.075.782,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.114.214,00	5.114.214,00	1.075.782,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.615.158,00	4.615.158,00	968.204,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	100 %	100 %	109.420.000,00	191.829.100,00	191.829.100,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.599.269,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	240 Orang	99.420.000,00	181.829.100,00	98.339.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	1.332.382.253,00	1.849.973.153,00	1.849.973.153,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.996.476,00	49.996.476,00	49.996.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10 Paket	19.999.314,00	19.999.314,00	874.845.269,01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	138.261.425,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	83.893.357,00	83.893.357,00	56.125.539,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	16.167.253,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.359.404,00	3.359.404,00	5.554.884,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	50 Laporan	519.533.208,00	519.533.208,00	306.644.697,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	440.600.494,00	958.191.394,00	4.578.864.981,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	429.737.237,00	429.737.237,00	429.737.237,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.498.000,00	6.498.000,00	6.498.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	61.494.552,00	61.494.552,00	61.494.552,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	361.744.685,00	361.744.685,00	333.615.999,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	730.309.099,00	730.309.099,00	730.309.099,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.603.603,00	39.603.603,00	35.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	56 Unit	56 Unit	640.705.496,00	640.705.496,00	553.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	71.717.183,81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
2	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	130.952.208.013,00	121.452.208.013,00	91.179.549.976,62		
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %	100 %	130.952.208.013,00	121.452.208.013,00	121.452.208.013,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	451.955.000,00	451.955.000,00	125.746.275,39	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150 Orang	150 Orang	150 Orang	112.000.000,00	112.000.000,00	13.524.296,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	27 Bangunan Gedung	84.381.436.295,00	74.481.436.295,00	54.960.460.318,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	20 Bangunan Gedung	17.812.651.982,00	17.812.651.982,00	16.469.271.821,41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	434.027.504,00	434.027.504,00	1.070.656.493,30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	13.508.738,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	21 Dokumen	25.857.626.870,00	26.257.626.870,00	17.112.923.610,12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Daerah 3
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	600 Orang	600 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	47.732.457,10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2400 Dokumen	1.777.510.362,00	1.777.510.362,00	1.365.725.966,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
3	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	616.483.389,00	616.483.389,00	467.990.351,70		
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	616.483.389,00	616.483.389,00	616.483.389,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	616.483.389,00	616.483.389,00	467.990.351,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
4	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	537.183.946,00	537.183.946,00	329.340.261,58		
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	100 %	100 %	537.183.946,00	537.183.946,00	537.183.946,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	56.846.725,00	56.846.725,00	25.168.358,92	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	54.980.719,00	54.980.719,00	27.290.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	118.934.781,00	118.934.781,00	97.409.747,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	50 Orang	50 Orang	306.421.721,00	306.421.721,00	179.471.204,86	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
5	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.411.114.857,00	2.411.114.857,00	2.234.853.687,78		
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	925.254.815,63	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang									
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi	1 Publikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	5.446.958,18	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar									
							Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	2 Peta	2 Peta	200.000.000,00	200.000.000,00	191.602.989,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang									
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	64.955.709,88	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	409.597.652,00	409.597.652,00	409.597.652,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	240.398.304,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	209.597.652,00	209.597.652,00	195.446.384,48	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	301.517.205,00	301.517.205,00	301.517.205,00		Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	341.588.970,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	101.517.205,00	101.517.205,00	70.159.556,21	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.083.046.994,00	1.183.046.994,00	1.554.546.700,10		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.083.046.994,00	1.183.046.994,00	1.554.546.700,10		
6	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	327.300.000,00	327.300.000,00	309.338.096,00		
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	100 %	100 %	327.300.000,00	327.300.000,00	327.300.000,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	24 Berita Acara	24 Berita Acara	211.950.000,00	211.950.000,00	105.673.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	115.350.000,00	115.350.000,00	203.664.596,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	448.553.274,00	448.553.274,00	405.543.898,10		
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	100 %	448.553.274,00	448.553.274,00	448.553.274,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	448.553.274,00	448.553.274,00	405.543.898,10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
8	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	240.130.720,00	240.130.720,00	278.336.485,00		
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100 %	100 %	240.130.720,00	240.130.720,00	240.130.720,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.630.720,00	223.630.720,00	169.826.861,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	108.509.624,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
9	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.094.000,00	150.094.000,00	122.355.006,00		
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	100 %	100 %	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	8.439.457,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 persen	100 persen	100 persen	33.594.000,00	133.594.000,00	133.594.000,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.594.000,00	133.594.000,00	113.915.549,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
10	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	16.969.000,00	16.969.000,00	438.973.215,00		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
								RENJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	100 %	100 %	16.969.000,00	16.969.000,00	16.969.000,00		Prioritas Daerah 3
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	16.969.000,00	16.969.000,00	438.973.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3
J U M L A H											**163.063.575.574,00**	**154.263.575.574,00**	**124.773.028.468,63**		

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Rincian kegiatan dedicated Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, antara lain:

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,063,538,375.00	29,006,747,490.50	1,597,934,980.26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*189,146,400.00*	*227,167,101.43*	*99,925,800.00*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*88,859,600.00*	*50,418,000.00*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*7,800,900.00*	*1,518,000.00*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*7,490,900.00*	*1,456,000.00*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*7,800,900.00*	*7,590,000.00*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*7,490,900.00*	*1,569,301.43*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*7,078,200.00*	*3,372,000.00*	*0.00*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*12,625,000.00*	*12,068,000.00*	*0.00*
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*50,000,000.00*	*149,175,800.00*	*99,925,800.00*
Inventarisasi Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai dengan Peruntukannya	*0.00*	*99,925,800.00*	*99,925,800.00*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*24,672,543,386.00*	*21,588,430,160.65*	*(3,072,389,407.35)*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*22,678,149,160.00*	*19,420,376,842.65*	*(3,257,772,317.35)*
Efisiensi Belanja Pegawai	*22,678,149,160.00*	*19,420,376,842.65*	*(3,257,772,317.35)*
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*1,979,550,640.00*	*2,164,933,550.00*	*185,382,910.00*
Gaji Pokok Alihdaya	*1,407,984,000.00*	*1,578,172,000.00*	*170,188,000.00*
Jaminan Kesehatan Alihdaya	*55,750,720.00*	*63,126,880.00*	*7,376,160.00*
JKK Alihdaya	*3,345,200.00*	*3,787,790.00*	*442,590.00*
JKM Alihdaya	*4,181,304.00*	*4,734,516.00*	*553,212.00*
JHT Alihdaya	*51,569,416.00*	*58,392,364.00*	*6,822,948.00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*5,114,214.00*	*1,075,782.00*	*0.00*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*5,114,214.00*	*1,075,782.00*	*0.00*
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*4,615,158.00*	*968,204.00*	*0.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*191,829,100.00*	*101,938,969.00*	*0.00*
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*10,000,000.00*	*3,599,269.00*	*0.00*
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*181,829,100.00*	*98,339,700.00*	*0.00*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*1,849,973,153.00*	*6,026,460,524.61*	*4,592,211,373.61*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	*49,996,476.00*	*49,996,476.00*	*0.00*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*19,999,314.00*	*874,845,269.01*	*854,845,955.01*
[-] Meteran Roll Stang Roda	*1,209,756.00*	*1,209,756.00*	*0.00*
[-] Jangka Sorong Digital	*1,154,400.00*	*1,154,400.00*	*0.00*
[-] AC Split 2 PK	*10,966,800.00*	*10,966,800.00*	*0.00*
GPS Geodetic Comnav T300 GNSS RTK	*0.00*	*565,339,816.50*	*565,339,816.50*
Bluetooth Wireless Scanner (NLS FFR4)	*0.00*	*4,329,000.00*	*4,329,000.00*
Bluetooth Wireless Scanner (Kasen)	*0.00*	*2,952,600.00*	*2,952,600.00*
Lidar	*0.00*	*259,957,483.41*	*259,957,483.41*
Microphone camera		*6,213,780.00*	*6,213,780.00*
LCD Proyektor		*8,549,675.10*	*8,549,675.10*
Layar Proyektor Motorize 84"		*7,503,600.00*	*7,503,600.00*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*140,000,000.00*	*138,261,425.00*	*0.00*
Belanja Bahan Logistik Kantor	*83,893,357.00*	*56,125,539.00*	*13,616,091.00*
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	*82,767,817.00*	*55,000,000.00*	*13,616,091.00*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*75,000,000.00*	*16,167,253.00*	*0.00*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*3,359,404.00*	*5,554,884.00*	*2,195,480.00*
Belanja Modal Buku Umum (Buku Peraturan Perundang-undangan)	*3,359,404.00*	*5,554,884.00*	*2,195,480.00*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*519,533,208.00*	*306,644,697.00*	*69,982,000.00*
Tambahan SPPD Perubahan	*0.00*	*69,982,000.00*	*69,982,000.00*
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*958,191,394.00*	*4,578,864,981.60*	*3,651,571,847.60*
PC AIO	*0.00*	*243,869,664.00*	*243,869,664.00*
Komputer Tablet android/IOS	*0.00*	*107,456,436.00*	*107,456,436.00*
[-] Hammer Test	*17,614,623.00*	*17,614,623.00*	*0.00*
[-] Scanner ADF	*45,053,668.00*	*45,053,668.00*	*0.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Sistem Geospasial Terintegrasi untuk Pengembangan Kawasan	*0.00*	*3,000,000,000.00*	*3,000,000,000.00*
Assestment dan sertifikasi IT administrasi perkantoran tingkat lanjut	*0.00*	*85,294,000.00*	*85,294,000.00*
kajian penghapusan piutang retribusi krk/imb/pbg/reklame	*0.00*	*99,925,800.00*	*99,925,800.00*
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		*100,378,260.00*	*15,033,751.00*
Manajemen Virtual Office			*99,992,196.60*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*429,737,237.00*	*401,608,551.00*	*(21,812,786.00)*
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*6,498,000.00*	*6,498,000.00*	*0.00*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*61,494,552.00*	*61,494,552.00*	*0.00*
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*361,744,685.00*	*333,615,999.00*	*(21,812,786.00)*
Pemeliharaan Gergaji Besi	*5,604,640.00*	*0.00*	*(5,604,640.00)*
Pemeliharaan UPS	*7,568,147.00*	*0.00*	*(7,568,147.00)*
Belanja Pemeliharaan Electric Generating Set	*8,639,999.00*	*0.00*	*(8,639,999.00)*
Pemelliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*730,309,099.00*	*661,142,183.81*	*0.00*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*39,603,603.00*	*35,955,000.00*	*0.00*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*640,705,496.00*	*553,470,000.00*	*0.00*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*50,000,000.00*	*71,717,183.81*	*0.00*
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	121,452,208,013.00	91,179,549,976.62	(16,287,826,087.96)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	121,452,208,013.00	91,179,549,976.62	(16,287,826,087.96)
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*451,955,000.00*	*125,746,275.39*	*(0.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*112,000,000.00*	*13,524,296.40*	*0.00*
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*74,481,436,295.00*	*54,960,460,318.00*	*(19,455,744,074.00)*
[-] Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	*2,891,260,028.00*	*0.00*	*(2,891,260,028.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	2,471,359.00	*0.00*	*(2,471,359.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Lembur/ Rapat Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	5,772,000.00	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Belanja Modal Materai Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	110,000.00	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	386,613.00	*0.00*	*(386,613.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan Kuliner Batan Selatan	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitasi Publik 1	*12,500,000.00*	*0.00*	*(12,500,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitas Publik 1	*17,500,000.00*	*0.00*	*(17,500,000.00)*
[-] Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitas Publik 1	*145,968,797.00*	*0.00*	*(145,968,797.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 1	*1,675,201.00*	*0.00*	*(1,675,201.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat/ Lembur Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 1	*1,443,000.00*	*0.00*	*(1,443,000.00)*
[-] Belanja Modal Materai Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 1	*55,000.00*	*0.00*	*(55,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitasi Publik 2	*12,500,000.00*	*0.00*	*(12,500,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitas Publik 2	*17,500,000.00*	*0.00*	*(17,500,000.00)*
[-] Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Kota/ Fasilitas Publik 2	*145,659,717.00*	*0.00*	*(145,659,717.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 2	*1,675,201.00*	*0.00*	*(1,675,201.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat/ Lembur Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 2	*1,443,000.00*	*0.00*	*(1,443,000.00)*
[-] Belanja Modal Materai Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik 2	*55,000.00*	*0.00*	*(55,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Olahraga di Kota Semarang 3 (Pokir) SC Mangkang Wetan	*216,125,000.00*	*0.00*	*(216,125,000.00)*
[-] Rehabilitasi Fasilitas Olahraga di Kota Semarang 3 (Pokir) SC Mangkang Wetan	*9,183,875,000.00*	*0.00*	*(9,183,875,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Kompleks Perdagangan Dargo (Pasar Dargo/ Eks Yogya Department Store)	*216,125,000.00*	*100,000,000.00*	*(116,125,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangun Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 3 (Pokir)	*1,384,394,158.00*	*0.00*	*(1,384,394,158.00)*
[#] Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Masyarakat di Kota Semarang 2 (Pokir)	*1,030,000,000.00*	*0.00*	*(1,030,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Masyarakat di Kota Semarang 3 (Pokir)	*1,000,000,000.00*	*0.00*	*(1,000,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Masyarakat di Kota Semarang 4 (Pokir)	*1,200,000,000.00*	*0.00*	*(1,200,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangun Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 1 (Pokir)	*800,000,000.00*	*450,000,000.00*	*(350,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangun Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 2 (Pokir)	*1,400,000,000.00*	*557,500,000.00*	*(842,500,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangunan/ Pos Sarana Masyarakat di Kota Semarang (Pokir)	*600,000,000.00*	*360,000,000.00*	*(240,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Masyarakat di Kota Semarang 1 (Pokir)	*1,300,000,000.00*	*545,000,000.00*	*(755,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Fasilitas Olahraga di Kota Semarang 2 (Pokir)	*1,400,000,000.00*	*1,375,000,000.00*	*(25,000,000.00)*
[#] Rehabilitasi Gedung B Balaikota Semarang	*400,000,000.00*	*225,000,000.00*	*(175,000,000.00)*
[-] Review DED Pengembangan Pasar Ikan Rejomulyo (Pasar Kobong)	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Review DED Gedung DPRD Kota Semarang	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Semarang	*359,750,000.00*	*100,000,000.00*	*(259,750,000.00)*
Ruang pamer Gedung Outdetrap	*0.00*	*240,000,000.00*	*240,000,000.00*
Peremajaan Kampung Pelangi	*0.00*	*200,000,000.00*	*200,000,000.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Hibah Barang DED Rehab Aula Kajari	*0.00*	*20,000,000.00*	*20,000,000.00*
Hibah Barang Pengawasan Rehab Kajari	*0.00*	*20,000,000.00*	*20,000,000.00*
Hibah Barang Rehab Aula Kajari	*0.00*	*200,000,000.00*	*200,000,000.00*
Hibah Barang DED Rehabilitasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*17,812,651,982.00*	*16,469,271,821.41*	*11,477,898,718.92*
Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota/ Fasilitas Publik (Perubahan)	*0.00*	*2,500,000,000.00*	*2,500,000,000.00*
Pemeliharan Bangunan Gedung Negara (Perubahan)		*8,977,898,718.92*	*8,977,898,718.92*
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*434,027,504.00*	*1,070,656,493.30*	*647,263,475.00*
Kajian Pendataan Bangunan Gedung	*70,042,968.00*	*0.00*	*(70,042,968.00)*
Kajian Petunjuk Teknis Persetujuan Bangunan Gedung	*54,020,562.00*	*0.00*	*(54,020,562.00)*
Pendampingan Penyusunan Raperda Reklame	*53,201,265.00*	*0.00*	*(53,201,265.00)*
Peningkatan Kapasitas TPT, Penilik dan Tenaga Teknis PBG dan SLF (3 Kegiatan)	*0.00*	*125,000,000.00*	*125,000,000.00*
Reviu RTBL Penataan Semarang Lama	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
Reviu Masterplan Penataan Semarang Lama	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
DED Penataan Semarang Lama	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
Kajian pemanfaatan lahan untuk pembangunan Museum Maritim	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
FS pembangunan Museum Maritim	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
Masterplan kawasan Museum Maritim	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
DED pembangunan Museum Maritim	*0.00*	*99,932,610.00*	*99,932,610.00*
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	*25,000,000.00*	*13,508,738.20*	*0.00*
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*26,257,626,870.00*	*17,112,923,610.12*	*(9,041,038,008.58)*
Pembayaran penyelesaian pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	*0.00*	*424,976,977.02*	*424,976,977.02*
Reviu DED Pembangunan SC Tlogomulyo Kec Pedurungan	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
FS dan DED Joging track embung Mulawarman Kec. Banyumanik	*0.00*	*200,000,000.00*	*200,000,000.00*
DED Rehab kantor Kelurahan Gisikdrono Kec Semarang Barat	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
DED Balai Kelurahan Mlatibaru Kec Semarang Timur	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
FS, Reviu DED Tetenger, dan koordinasi perijinan dengan BPPJN	*0.00*	*212,500,000.00*	*212,500,000.00*
DED Rehab Gedung kantor Kelurahan Tandang Kec Tembalang	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
DED Bangunan Publik 3 lokus	*0.00*	*300,000,000.00*	*300,000,000.00*
Masterplan dan DED Rumdin Walikota Manyaran	*0.00*	*500,000,000.00*	*500,000,000.00*
DED lanjutan pembangunan masjid Baiturrohim	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Reviu DED Penataan Simpang Lima	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Masterplan/DED Tonggak Boom Lama	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Masterplan/DED Tonggak Kampung Pelangi	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Masterplan Penataan PGN Syah Bandar	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Tenaga Ahli Dinas Penataan Ruang	*0.00*	*30,000,000.00*	*30,000,000.00*
Penyusunan DED MPP dan Kantor DPM-PTSP	*0.00*	*200,000,000.00*	*200,000,000.00*
Lomba Mural	*0.00*	*288,194,714.40*	*288,194,714.40*
[-] Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*1,091,235,453.00*	*0.00*	*(1,091,235,453.00)*
[-] Pengadaan Baterai Rooftop Solar Panel Gedung C	*400,000,000.00*	*0.00*	*(400,000,000.00)*
[-] Review DED Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Supervisi Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*2,495,934.00*	*0.00*	*(2,495,934.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat / Lembur Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*5,772,000.00*	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Belanja Modal Meterai Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Pembangunan Rooftop Solar Panel Gedung C	*386,613.00*	*0.00*	*(386,613.00)*
[-] Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Genuk	*2,193,246,853.00*	*0.00*	*(2,193,246,853.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
[-] Review DED Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Genuk	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Supervisi Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Genuk	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor damkar genuk	*2,495,934.00*	*0.00*	*(2,495,934.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan damkar genuk	*386,613.00*	*0.00*	*(386,613.00)*
[-] Belanja Modal Materai damkar genuk	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum damkar genuk	*5,772,000.00*	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*2,162,808,753.00*	*0.00*	*(2,162,808,753.00)*
[-] Review DED Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*50,000,000.00*	*0.00*	*(50,000,000.00)*
[-] Supervisi Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Belanja Modal Materai Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*2,495,934.00*	*0.00*	*(2,495,934.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat / Lembur Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*5,772,000.00*	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Tembalang	*386,613.00*	*0.00*	*(386,613.00)*
Penyusunan DED 1	*80,000,000.00*	*0.00*	*(80,000,000.00)*
Penyusunan DED 2	*80,000,000.00*	*0.00*	*(80,000,000.00)*
Penyusunan DED 3	*80,000,000.00*	*0.00*	*(80,000,000.00)*
Penyusunan DED MPP dan Kantor DPM-PTSP	*200,000,000.00*	*0.00*	*(200,000,000.00)*
[-] Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*3,158,235,453.00*	*0.00*	*(3,158,235,453.00)*
[-] Pengawasan Supervisi Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*5,772,000.00*	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*2,495,934.00*	*0.00*	*(2,495,934.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
[-] Belanja Modal Materai Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Pembangunan Tribun Sepakbola Lapangan Sigotro	*386,613.00*	*0.00*	*(386,613.00)*
[-] Jasa Konsultansi Kajian AMDAL Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*788,043,952.00*	*0.00*	*(788,043,952.00)*
[-] Jasa Konsultansi Kajian ANDALALIN Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Review DED Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*100,000,000.00*	*0.00*	*(100,000,000.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Jasa Konsultansi Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*3,461,712.00*	*0.00*	*(3,461,712.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat / Lembur Jasa Konsultansi Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*7,603,500.00*	*0.00*	*(7,603,500.00)*
[-] Belanja Modal Materai Jasa Konsultansi Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Jasa Konsultansi Grassing Zone (Ex-Kandang Sapi)	*780,836.00*	*0.00*	*(780,836.00)*
[-] Pembangunan Hutan Kota Ex-Wonderia	*911,235,453.00*	*0.00*	*(911,235,453.00)*
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pembangunan Hutan Kota Ex Wonderia	*2,495,934.00*	*0.00*	*(2,495,934.00)*
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat / Lembur Pembangunan Hutan Kota Ex Wonderia	*5,772,000.00*	*0.00*	*(5,772,000.00)*
[-] Belanja Modal Materai Pembangunan Hutan Kota Ex Wonderia	*110,000.00*	*0.00*	*(110,000.00)*
[-] Belanja Modal Penggandaan Pembangunan Hutan Kota Ex Wonderia	*386,613.00*	*0.00*	*(386,613.00)*
[-] Pengawasan Supervisi Pembangunan Hutan Kota Ex-Wonderia	*80,000,000.00*	*0.00*	*(80,000,000.00)*
[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Workshop Revitalisasi Kawasan Kampung Batik Rejomulyo	*216,125,000.00*	*100,000,000.00*	*(116,125,000.00)*
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*100,000,000.00*	*47,732,457.10*	*0.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*1,777,510,362.00*	*1,365,725,966.70*	*(116,826,650.00)*
Belanja Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Outsourcing)	*236,860,000*	*127,540,000.00*	*(109,320,000.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	*8,745,600*	*5,101,600.00*	*(3,644,000.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	*524,760*	*306,110.00*	*(218,650.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	*655,920*	*382,620.00*	*(273,300.00)*
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	*8,089,680*	*4,718,980.00*	*(3,370,700.00)*
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA	*616,483,389.00*	*467,990,351.70*	*0.00*
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*616,483,389.00*	*467,990,351.70*	*0.00*
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	*616,483,389.00*	*467,990,351.70*	*0.00*
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	*537,183,946.00*	*329,340,261.58*	*0.00*
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	*537,183,946.00*	*329,340,261.58*	*0.00*
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*56,846,725.00*	*25,168,358.92*	*0.00*
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	*54,980,719.00*	*27,290,950.00*	*0.00*
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*118,934,781.00*	*97,409,747.80*	*0.00*
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*306,421,721.00*	*179,471,204.86*	*0.00*
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	*2,411,114,857.00*	*2,234,853,687.78*	*741,168,100.00*
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*1,000,000,000.00*	*930,701,773.81*	*522,620,900.00*
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	*900,000,000.00*	*925,254,815.63*	*522,620,900.00*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Pekerjaan Sinkronisasi dan Paduserasi Rancangan Peraturan Walikota per BWK dalam rangka Penyusunan RDTR seluruh wilayah Kota	*0.00*	*98,700,000.00*	*98,700,000.00*
Pekerjaan Proses Persetujuan Substansi RDTR Kota Semarang	*423,920,900.00*	*423,920,900.00*	*423,920,900.00*
Belanja Makan dan Minum Rapat	*18,000,000.00*	*18,000,000.00*	*0.00*
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	*100,000,000.00*	*5,446,958.18*	*0.00*
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*700,000,000.00*	*456,558,698.88*	*(57,702,750.00)*
Penyusunan Peta Dasar	*200,000,000.00*	*191,602,989.00*	*0.00*
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Tata Ruang	*200,000,000.00*	*200,000,000.00*	*0.00*
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	*300,000,000.00*	*64,955,709.88*	*(57,702,750.00)*
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	*0.00*	*31,986,000.00*	*(53,310,000.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	*0.00*	*1,279,440.00*	*(2,132,400.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	*0.00*	*76,770.00*	*(127,950.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	*0.00*	*95,958.00*	*(159,930.00)*
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	*0.00*	*1,183,482.00*	*(1,972,470.00)*
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*409,597,652.00*	*435,844,688.68*	*100,000,000.00*
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*200,000,000.00*	*240,398,304.20*	*100,000,000.00*
Penyusunan Materi Teknis Pelayanan Keterangan Rencana Kota Dengan Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Negara	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	*209,597,652.00*	*195,446,384.48*	*(0.00)*
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*301,517,205.00*	*411,748,526.41*	*176,249,950.00*
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*200,000,000.00*	*341,588,970.20*	*200,000,000.00*
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	*101,517,205.00*	*70,159,556.21*	*(23,750,050.00)*
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	*48,152,000.00*	*25,928,000.00*	*(22,224,000.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	*1,777,920.00*	*1,037,120.00*	*(740,800.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	*106,680.00*	*62,230.00*	*(44,450.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	*133,344.00*	*77,784.00*	*(55,560.00)*
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	*1,644,576.00*	*959,336.00*	*(685,240.00)*
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	*327,300,000.00*	*309,338,096.00*	*100,000,000.00*
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*327,300,000.00*	*309,338,096.00*	*100,000,000.00*
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*211,950,000.00*	*105,673,500.00*	*0.00*
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*115,350,000.00*	*203,664,596.00*	*100,000,000.00*
Konsultasi Publik Raperwal Penatanusahaan Penguasaan Bidang Tanah untuk Pendaftaran Tanah	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	*448,553,274.00*	*405,543,898.10*	*0.00*
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*448,553,274.00*	*405,543,898.10*	*0.00*
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*448,553,274.00*	*405,543,898.10*	*0.00*
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	*240,130,720.00*	*278,336,485.00*	*153,681,700.00*
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*240,130,720.00*	*278,336,485.00*	*153,681,700.00*
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	*223,630,720.00*	*169,826,861.00*	*53,681,700.00*
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	*94,354,000*	*50,806,000*	*(43,548,000.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	*3,483,840*	*2,032,240*	*(1,451,600.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	*209,040*	*121,940*	*(87,100.00)*
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	*261,288*	*152,418*	*(108,870.00)*
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	*3,222,552*	*1,879,822*	*(1,342,730.00)*

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Tambah / Kurang
	DPA	Perubahan	(Rp)
	30 Dec 2024		
2	4	6	7 = 6 - 5
Kajian Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	*0.00*	*100,220,000.00*	*100,220,000.00*
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*16,500,000.00*	*108,509,624.00*	*100,000,000.00*
Survei Pemetaan Rencana Tanah Objek Akses Reforma Agraria di Kota Semarang	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	*150,094,000.00*	*122,355,006.00*	*0.00*
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*16,500,000.00*	*8,439,457.00*	*0.00*
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*16,500,000.00*	*8,439,457.00*	*0.00*
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*133,594,000.00*	*113,915,549.00*	*0.00*
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*133,594,000.00*	*113,915,549.00*	*0.00*
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*16,969,000.00*	*438,973,215.00*	*430,000,000.00*
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	*16,969,000.00*	*438,973,215.00*	*430,000,000.00*
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	*16,969,000.00*	*438,973,215.00*	*430,000,000.00*
Bimtek Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	*0.00*	*230,000,000.00*	*230,000,000.00*
Kajian Ex. Asrama Kodam Kota Lama sebagai Tempat/Lapangan/Gedung Parkir	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
Kajian Identifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang rencana Pembangunan Museum Maritim	*0.00*	*100,000,000.00*	*100,000,000.00*
TOTAL	154,263,575,574.00	124,773,028,468.28	(13,265,041,307.70)

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

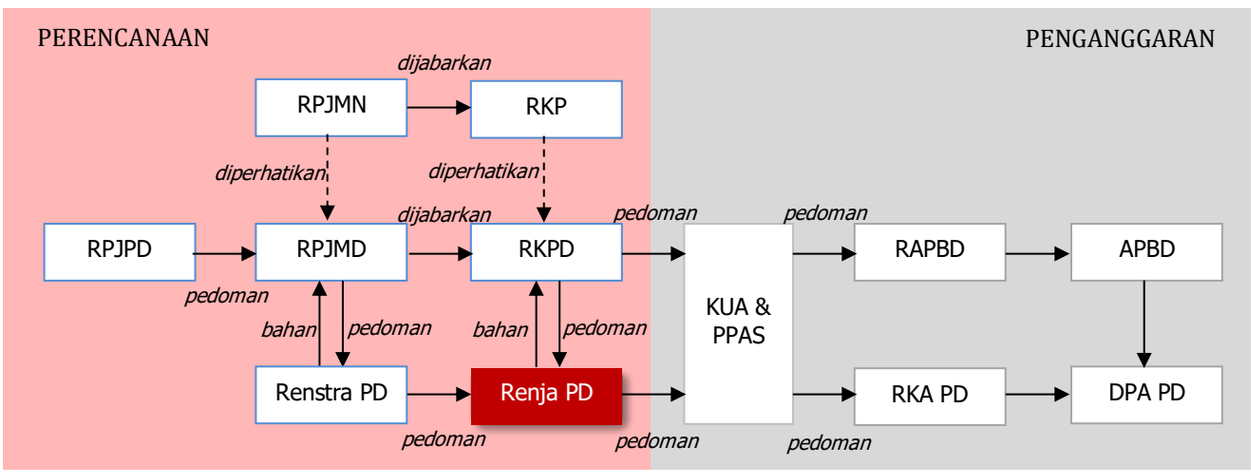

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah kebijakan efisiensi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak		99.8	57,86	99,80	172,49%		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan		100	100,00		0,00%		
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 Unit	11	20		-		
01.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM		100	100,00	50,00	50,00%		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Sistem Penyediaan Air Minum								
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		600	50,00		-		
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/Detik	50					
01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		99.10	92,72	99,10	106,88%		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100	100,00		-		
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 M^3/Hari	2			#DIV/0!		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Terpusat Skala Perkotaan	Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun							
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M^3/Hari	75					
01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani		81.22					
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100					
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	261					
01.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pemanfaatan Hunian yang Tertata		100	100,00	50,00	50,00%		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata		100	100,00		-		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8					
01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim		100	100,00	50,00	50,00%		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim		100	100,00	50,00	50,00%		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim		100	100,00	50,00	50,00%		
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim		100	100,00	50,00	50,00%		
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100,00		-		
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	4,00		-		
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	1,00		-		
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1,00		-		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	1,00		-		
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	1,00		-		
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	1,00		-		
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	2,00		-		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangaan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		100	100,00		-		
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		156					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1					
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2	1.200,00		-		
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2					
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18	18,00		-		
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6	2,00		-		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur		100					
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2					
1.04.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12					
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60					
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20					
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran		100					
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		10	10,00		-		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan							
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40	25,00		-		
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	25,00		-		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30					
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10	10,00		-		
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	100,00		-		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12					
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		160					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2					
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah		100					
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		11	-				
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		2					
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	50,00				
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100					
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	100,00		-		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12					
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12					
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12					
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100					
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		270	100,00		-		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		110	100,00		-		
1.04.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar				100,00		-		
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		614	100,00		-		
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	100,00		-		
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		300	100,00		-		
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan		100	100,00	50,00	50,00%		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		100	100		-		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	24	16,00		-		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik		100	100		-		
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4					
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100	100		-		
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama	1 Laporan	1					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum							
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni		99.30	99,70	99,43	99,73%		
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		100					
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	3					
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani		100					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 Unit Rumah	1729					
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU			100,00	50.00			
		Persentase Ruang Terbuka Hijau			44,41	44,73	100,72%		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman		100					
		Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian		100	100,00				
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	16					
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	16 Laporan	16					

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target RenjaTahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							
1.04.05.2 .01.0007	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 Lokasi	16					
1.04.05.2 .01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 Lokasi	177					
1.04.05.2 .01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	10					

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

Awal tahun 2025 muncul kebijakan efisiensi anggaran dengan dikeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri nomor 900/833/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Wali Kota Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025. Efisiensi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.310.689.048,- pada belanja barang jasa serta penyesuaian Satuan Harga Standar (SHS). Selain kebijakan efisiensi anggaran terdapat kebijakan hold anggaran pada belanja modal sebesar Rp. 4.305.937.937.40,-.Kebijakan tersebut mempengaruhi rencana kerja tahun 2025 yang telah disusun.

Sampai dengan triwulan kedua, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan pergeseran anggaran pertama karena penetapan dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus pada sub kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman sebesar Rp. 2.489.440.000,- untuk belanja Pembangunan tangki septik skala individu dan pembelian 1 (satu) unit mobil tangki sedot tinja serta pergeseran anggaran internal pada beberapa akun belanja pada sub kegiatan yang sama.Pergeseran anggaran kedua dilakukan karena mendapat tambahan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Rp. 14.001.000.000,- untuk Retrovit lampu Penerangan Jalan Umum, Pengadaan dan pemasangan lampu jalan umum serta perbaikan drainase dan perbaikan jalan serta penyesuaian belanja untuk menyesuaikan perubahan SHS.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, efisiensi anggaran, penyesuaian SHS serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	452,080,788.00	-	0.00%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	452,080,788.00	-	0.00%
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	452,080,788.00	-	0.00%
01.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	634,811,650.00	-	0.00%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	634,811,650.00	-	0.00%
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	602,721,750.00	-	0.00%
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	18,244,950.00	-	0.00%
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	13,844,950.00	-	0.00%
01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,057,942,173.00	354,998,310.00	8.75%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,057,942,173.00	354,998,310.00	8.75%
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	364,525,113.00	-	0.00%
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2,639,440,000.00	149,334,610.00	5.66%
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	13,273,700.00	-	0.00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	905,729,660.00	205,663,700.00	22.71%
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	125,000,000.00	-	0.00%
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,973,700.00	-	0.00%
01.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	854,608,437.00	258,457,000.00	30.24%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	854,608,437.00	258,457,000.00	30.24%
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	854,608,437.00	258,457,000.00	30.24%
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	51,354,206,401.63	18,840,626,936.00	36.69%
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114,584,798.00	11,865,009.00	10.35%
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,276,704.00	239,000.00	0.55%
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,684,980.00	-	0.00%
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,992,950.00	959,600.00	24.03%
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,076,002.00	2,942,055.00	95.65%
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,977,020.00	-	0.00%
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,569,600.00	1,817,600.00	50.92%
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,007,542.00	5,906,754.00	98.32%
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50,000,000.00	-	0.00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangaan Perangkat Daerah	26,303,854,270.63	11,283,334,099.00	42.90%
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,710,889,953.63	11,155,174,099.00	43.39%
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	588,330,000.00	128,160,000.00	21.78%
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,016,000.00	-	0.00%
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,082,452.00	-	0.00%
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,453,413.00	-	0.00%
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,082,452.00	-	0.00%
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,038,820.00	118,275,000.00	41.64%
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	83,318,820.00	-	0.00%
1.04.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	600,000.00	600,000.00	100.00%
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	176,650,000.00	100,875,000.00	57.10%
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23,470,000.00	16,800,000.00	71.58%
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,871,053.90	83,529,025.00	16.58%
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62,928,000.00	-	0.00%
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,528,964.20	-	0.00%
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	233,250,779.70	39,149,700.00	16.78%
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,334,932.00	14,531,425.00	32.05%
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,193,946.00	-	0.00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000.00	2,059,500.00	25.74%
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51,913,455.00	27,788,400.00	53.53%
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,720,977.00	-	0.00%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,950,930,040.00	-	0.00%
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	6,950,930,040.00	-	0.00%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,613,554,240.00	2,593,373,509.00	56.21%
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,020,000.00	7,500,000.00	37.46%
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	852,614,040.00	393,900,093.00	46.20%
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,740,920,200.00	2,191,973,416.00	58.59%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,583,373,179.10	4,750,250,294.00	37.75%
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,835,468,724.00	572,056,200.00	31.17%
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,468,478,625.00	2,988,495,314.00	35.29%
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4,035,960.00	-	0.00%
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,759,968,785.10	1,066,111,380.00	60.58%
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	515,421,085.00	123,587,400.00	23.98%
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	6,595,848,092.00	2,443,104,049.00	37.04%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	697,570,000.00	-	0.00%
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	697,570,000.00	-	0.00%
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5,334,628,229.00	2,443,104,049.00	45.80%
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5,334,628,229.00	2,443,104,049.00	45.80%
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	563,649,863.00	-	0.00%
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	563,649,863.00	-	0.00%
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	23,323,664,220.00	7,290,000.00	0.03%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	23,323,664,220.00	7,290,000.00	0.03%
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	23,323,664,220.00	7,290,000.00	0.03%
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	353,088,483,226.60	138,721,267,026.41	39.29%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	353,088,483,226.60	138,721,267,026.41	39.29%
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6,326,400,853.00	298,294,826.00	4.72%
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	83,856,398,768.00	6,564,262,546.00	7.83%
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	31,231,413,284.80	14,294,376,690.17	45.77%
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	134,884,360,285.00	62,754,451,616.00	46.52%
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	95,290,214,147.80	54,024,032,983.24	56.69%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1,499,695,888.00	785,848,365.00	52.40%
JUMLAH		440,361,644,988.23	160,625,743,321.41	36.48%

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebesar Rp 381.548.533.172,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.292.502.177. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 4.939.542.915.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
Mewujudkan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	100 persen	97.00 persen	97.50 persen	98.00 persen	99.00 persen	100.00 persen	96.77 persen	98.78 persen	98.78 persen	99.91 persen	99.91 persen	99.00 persen
Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	72	72.5	73	73.5	74	-	72.91	72.91	77.85	80	73.5
Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	75.32 persen	76.53 persen	77.53 persen	78.53 persen	79.53 persen	80.53 persen	75.93	80.25 persen	80.25 persen	81.59 persen	81.68 persen	79.53 persen
Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan	Persentase luasan kawasan kumuh	-	75.00 persen	60.00 persen	40.00 persen	20.00 persen	0.00 persen	-	76.62 persen	76.62 persen	18.78 persen	32.18 persen	20.00 persen
Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	-	44.26 persen	44.31 persen	44.36 persen	44.41 persen	44.46 persen	-	44.36 persen	44.36 persen	44.6 persen	44.73 persen	

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan 99,10 %;
b. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan capaian pada indikator :
    1. Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan sebesar 81,86 %;
    2. Persentase luasan Kawasan kumuh sebesar 32,18 %;
    3. Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 44,73 %.
c. Sasaran Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tercapai 77,85.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana prasarana Permukiman yang berkualitas masih perlu ditingkatkan;
2. Perlunya upaya peningkatan pencapaian sanitasi aman;
3. Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua;
4. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu ditingkatkan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kuantitas dan kualitas jalan, drainase dan talud di lingkungan permukiman masih perlu ditingkatkan ;
2. Pengelolaan limbah dan sanitasi belum optimal;
3. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan;
4. Penyediaan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Pengelolaan rumah susun belum optimal;
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau untuk *public space* dan penunjang fungsi ekologis masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan

pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perubahan iklim yang beresiko terhadap munculnya rob dan banjir di lingkungan permukiman;
   2) Pencapaian target sanitasi aman masih rendah ;
   3) Pembatasan pengambilan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum;
b. Peluang
   1) Perhatian dan dukungan pendanaan infrastruktur yang cukup besar untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan utilitas permukiman dari APBD, APBD Provinsi dan APBN;
   2) Rencana Pembangunan SPALDT skala perkotaan di Banjardowo dapat mendorong peningkatan pengelolaan limbah dan sanitasi;
   3) Pembangunan SPAM oleh badan usaha milik daerah dapat meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras dasar permukiman;
2. Peningkatan penyediaan kebutuhan dasar berupa perumahan, sanitasi dan air minum aman ;
3. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp440,361,644,988.23						
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp5,999,443,048.00						
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 %	Rp452,080,788.00						
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	Rp452,080,788.00						
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	Rp452,080,788.00						
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	Rp634,811,650.00						
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	Rp634,811,650.00						
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 Unit	Rp602,721,750.00						
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	Rp18,244,950.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	Rp13,844,950.00						
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92.72 %	Rp4,057,942,173.00						
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Rp4,057,942,173.00						
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 m^3/Hari	Rp364,525,113.00						
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 Unit	Rp2,639,440,000.00						
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 Penyelenggara	Rp13,273,700.00						
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 m^3/Hari	Rp905,729,660.00						
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rp125,000,000.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	Rp9,973,700.00						
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	Rp854,608,437.00						
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	Rp854,608,437.00						
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp854,608,437.00						
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				Rp434,362,201,940.23						
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	Rp51,354,206,401.63						
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp114,584,798.00						
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp43,276,704.00						
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1,684,980.00						
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Rp3,992,950.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp3,076,002.00						
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp2,977,020.00						
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp3,569,600.00						
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp6,007,542.00						
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp50,000,000.00						
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Rp26,303,854,270.63						
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/bulan	Rp25,710,889,953.63						
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	Rp588,330,000.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	Rp1,016,000.00						
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1,082,452.00						
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp1,453,413.00						
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Rp1,082,452.00						
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	Rp284,038,820.00						
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	Rp83,318,820.00						
1.04.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp600,000.00						
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	176650000.00 -						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Rp23,470,000.00						
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	Rp503,871,053.90						
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp62,928,000.00						
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Rp84,528,964.20						
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Rp233,250,779.70						
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Rp45,334,932.00						
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Rp10,193,946.00						
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp8,000,000.00						
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp51,913,455.00						
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp7,720,977.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp6,950,930,040.00						
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	Rp6,950,930,040.00						
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp4,613,554,240.00						
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp20,020,000.00						
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp852,614,040.00						
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp3,740,920,200.00						
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp12,583,373,179.10						
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp1,835,468,724.00						
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp8,468,478,625.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp4,035,960.00						
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp1,759,968,785.10						
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp515,421,085.00						
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan		Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	Rp6,595,848,092.00						
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Rp697,570,000.00						
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 Unit Rumah	Rp697,570,000.00						
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	Rp5,334,628,229.00						
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 Laporan	Rp5,334,628,229.00						
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	Rp563,649,863.00						
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan	1 Laporan	Rp563,649,863.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum								
1.04.03	Program Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Layak Huni	99.70%	Rp23,323,664,220.00						
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	Rp23,323,664,220.00						
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 Unit Rumah	Rp23,323,664,220.00						
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	Rp353,088,483,226.60						
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41%							
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	Rp353,088,483,226.60						
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Rp6,326,400,853.00						
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	Rp83,856,398,768.00						
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	Rp31,231,413,284.80						
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	Rp134,884,360,285.00						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	Rp95,290,214,147.80						
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Rp1,499,695,888.00						

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktivitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktivitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 –

2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Mewujudkan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas"

dengan indikator tujuan "Persentase lingkungan permukiman sehat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan;
2. Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan;
2. Persentase luasan Kawasan kumuh;
3. Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	%	99
Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	%	81.7
	Persentase luasan Kawasan kumuh	%	8.78
	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	%	44.75
Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	78

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase lingkungan permukiman sehat" dan indikator sasaran Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan, Persentase luasan Kawasan kumuh,Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					358.368.782.220,00	368.368.782.220,00	440,361,644,988.23		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					4.383.910.060,00	4.383.910.060,00	5,999,443,048.00		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 %	57.86 %	57.86 %	1.257.150.000,00	607.900.000,00	452,080,788.00		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100%	100%	1.257.150.000,00	607.900.000,00	452,080,788.00		
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	5 Titik	5 Titik	1.257.150.000,00	607.900.000,00	452,080,788.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	100%	100%	292.850.000,00	942.100.000,00	634,811,650.00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	50 SR	292.850.000,00	942.100.000,00	634,811,650.00		
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	849.250.000,00	602,721,750.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	49.175.000,00	49.175.000,00	18,244,950.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	43.675.000,00	43.675.000,00	13,844,950.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92.72 %	92.72 %	92.72 %	1.641.710.060,00	1.641.710.060,00	4,057,942,173.00		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	1.641.710.060,00	1.641.710.060,00	4,057,942,173.00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 m^3/Hari	11 m^3/Hari	11 m^3/Hari	646.600.000,00	646.600.000,00	364,525,113.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	2,639,440,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN DAK FISIK-BIDANG SANITASI-LAYANAN DASAR	
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 Penyelenggara	50 Penyelenggara	50 Penyelenggara	41.100.000,00	41.100.000,00	13,273,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 m^3/Hari	1 m^3/Hari	1 m^3/Hari	641.710.060,00	641.710.060,00	905,729,660.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	125,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	37.300.000,00	37.300.000,00	9,973,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	100%	100%	1.192.200.000,00	1.192.200.000,00	854,608,437.00		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	100%	100%	1.192.200.000,00	1.192.200.000,00	854,608,437.00		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.192.200.000,00	1.192.200.000,00	854,608,437.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					353.984.872.160,00	363.984.872.160,00	434,362,201,940.23		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	100%	100%	50.960.922.329,00	50.960.922.329,00	51,354,206,401.63		
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	208.821.026,00	208.821.026,00	114,584,798.00		
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	78.301.315,00	78.301.315,00	43,276,704.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.254.849,00	7.254.849,00	1,684,980.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.503.599,00	8.503.599,00	3,992,950.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.296.349,00	21.296.349,00	3,076,002.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.503.599,00	8.503.599,00	2,977,020.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.237.868,00	5.237.868,00	3,569,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29.723.447,00	29.723.447,00	6,007,542.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangaan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	32.329.289.782,00	30.298.152.982,00	26,303,854,270.63		
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/bulan	269 Orang/bulan	269 Orang/bulan	31.527.649.000,00	29.496.512.200,00	25,710,889,953.63	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	783.648.000,00	783.648.000,00	588,330,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	1,016,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.615.158,00	4.615.158,00	1,082,452.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	4.862.466,00	4.862.466,00	1,453,413.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.615.158,00	4.615.158,00	1,082,452.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	518.382.400,00	518.382.400,00	284,038,820.00		
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	400 Paket	400 Paket	130.536.000,00	130.536.000,00	83,318,820.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00	600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	346.621.400,00	346.621.400,00	176,650,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	33.125.000,00	33.125.000,00	23,470,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	1.108.685.988,00	1.108.685.988,00	503,871,053.90		
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	42.928.000,00	42.928.000,00	62,928,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	549.313.281,00	549.313.281,00	84,528,964.20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	213.250.780,00	213.250.780,00	233,250,779.70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	81.058.664,00	81.058.664,00	45,334,932.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	83.792.309,00	83.792.309,00	10,193,946.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.750.000,00	27.750.000,00	8,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	95.151.000,00	95.151.000,00	51,913,455.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.441.954,00	15.441.954,00	7,720,977.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	0	0	6,950,930,040.00		
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0	0	6,950,930,040.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2.042.624.200,00	4.073.761.000,00	4,613,554,240.00		
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	20,020,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	872.398.800,00	872.398.800,00	852,614,040.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.153.725.400,00	3.184.862.200,00	3,740,920,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	14.753.118.933,00	14.753.118.933,00	12,583,373,179.10		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.113.674.392,00	2.113.674.392,00	1,835,468,724.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.260.752.725,00	8.260.752.725,00	8,468,478,625.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.853.096,00	50.853.096,00	4,035,960.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.748.435.814,00	3.748.435.814,00	1,759,968,785.10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	579.402.906,00	579.402.906,00	515,421,085.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	6.571.686.600,00	6.571.686.600,00	6,595,848,092.00		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	697,570,000.00		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	400.000.000,00	400.000.000,00	697,570,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	4.616.636.600,00	4.616.636.600,00	5,334,628,229.00		
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	4.616.636.600,00	4.616.636.600,00	5,334,628,229.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	1.555.050.000,00	1.555.050.000,00	563,649,863.00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.555.050.000,00	1.555.050.000,00	563,649,863.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	99.70%	99.70%	99.70%	17.346.090.000,00	17.346.090.000,00	23,323,664,220.00		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	100%	100%	17.346.090.000,00	17.346.090.000,00	23,323,664,220.00		
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	17.346.090.000,00	17.346.090.000,00	23,323,664,220.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	100%	100%	279.106.173.231,00	289.106.173.231,00	353,088,483,226.60		
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41%	44.41%	44.41%					
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	100%	100%	279.106.173.231,00	289.106.173.231,00	353,088,483,226.60		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.319.200.000,00	5.319.200.000,00	6,326,400,853.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	100 Lokasi	100 Lokasi	53.397.577.599,00	57.397.577.599,00	83,856,398,768.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	31.117.344.200,00	31.117.344.200,00	31,231,413,284.80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	133.428.195.164,00	133.428.195.164,00	134,884,360,285.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	54.661.855.252,00	60.661.855.252,00	95,290,214,147.80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.182.001.016,00	1.182.001.016,00	1,499,695,888.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
JUMLAH						358.368.782.220,00	368.368.782.220,00	440,361,644,988.23		

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan kepada setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam Proses Pelaksanaan kegiatan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan sebuah rencana yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan kinerja yang diharapkan menjadi sebuah pola rencana kerja yang akuntabel dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka kedudukan Satpol PP pada mata rantai penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin jelas dan terarah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Satpol PP Kota Semarang sebagai perangkat daerah mewajibkan untuk menyusun Renja Perubahan Satpol PP Kota Semarang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada P-RKPD dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal P-RKPD.

Sesuai visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika". Visi tersebut bermakna bahwa Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah

dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah longsor dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

SEMAKIN HEBAT, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan *misi 3 yaitu* Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah,

Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan dengan indikatornya Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
3. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan RPJPD :

1. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi;
2. Penguatan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kapasitas hukum dan HAM.

Sedangkan isu strategis terkait pelaksanaan tugas Satpol PP berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada misi 3 adalah belum optimalnya konsistensi dan komitmen aparatur dalam penegakan perda dan perkada.

Untuk melaksanakan Misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan, maka ditetapkan strategi yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan. Adapun arah kebijakannya adalah :

1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturanperundang-undangan
2. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.

dan dituangkan dalam program :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan program prioritas RPJMD pada : Pengendalian

dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; diseusaikan masing-masing opd
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD).

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada P-RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

d. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Satpol PP Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja , program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Satpol PP Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam peyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 OPD melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 37.000.629.527 Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaiakan seluruhnya dengan realisasi anggaran Sampai dengan bulan Juni Rp.16.747.419.142 atau sebesar 45,26 %

Pada Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melaksanakan 2 Program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KOTA SEMARANG	ANGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSEN TASE (%)
Belanja Tidak Langsung	15.987.548.600	8.203.185.395	51,31 %
Belanja Langsung	21.013.080.927	8.544.233.747	40,66 %
JUMLAH	37.000.629.527	16.747.419.142	45,26 %

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Didalam program ini terdapat 7 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Dengan total anggaran Rp. 20.122.131.717,- dan sampai pada bulan juni 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.520.434.359,- atau persentase realisasi anggarannya

57,25 % . Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dimana capaiannya 100%. Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang ditargetkan 100% dari 7 kegiatan bisa terlaksana semua.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatanyang telah dilaksanakan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Program ini terdapat 3 kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat dan Bidang. Total anggaran Rp. 16.878.497.810,- dan sampai pada bulan juni 2024 dapat terealisasi sebesar Rp 6.684.172.720,- atau persentase realisasi anggarannya 39,60 %. Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah terpenuhinya Persentase penurunan pelanggaran Perda, dimana capaiannya %. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Satpol PP Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.1.05.05	Satuan Polisi Pamong Praja									
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 % (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	130 Orang/bulan	100 %	60 %
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	12 Dokumen	100 %	60 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	100 %	1 Laporan (20%)	1 Laporan	1 Laporan (20%)	100 %	1 Laporan	100 %	60 %
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	12 Laporan	100 %	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	100 %	60 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	100 %	16 Kegiatan (20%)	14 Kegiatan	14 Kegiatan (20%)	100 %	9 Kegiatan	9 Kegiatan	60 %
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bintek	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	7 Orang	7 Orang	60 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 %	15 Jenis (20%)	15 Jenis	15 Jenis (20%)	100 %	16 jenis	16 jenis	60 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	28 Jenis (20%)	28 Jenis	28 Jenis (20%)	100 %	24 Jenis	24 Jenis	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
012	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	100 %	60 Jenis (20%)	60 Jenis	60 Jenis (20%)	100 %	60 Jenis	60 Jenis	60 %
014	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase jumlah barang cetak yang disediakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase jumlah tamu yang berkunjung	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
006	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase jumlah barang yang mendukung system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan saran dan prasarana aparatur	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan	100 %							60 %
017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang disediakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
022	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
023	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase honorarium TPHL dan tenaga kebersihan yang dibayarakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05 1.1.05.01 18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	100 %	1 Unit (20%)	1 Unit	1 Unit (20%)	100 %	1 Unit	1 Unit	60 %
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	45 Unit (20%)	45 Unit	45 Unit (20%)	100%	50 Unit	50 Unit	60 %
004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	100	2 unit (20%)	2 Unit	2 Unit (20%)	100 %	1 Unit	1 Unit	60 %
007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor	100 %	60 unit (20%)	60 unit	60 unit (20%)	100 %	180 unit	180 unit (20%)	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan pelanggaran perda	100 %	10 % (20%)	10 %	10 % (20%)	10 %	10 %	10 % (20%)	60 %
	Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat terselesaikan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
010	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan pelanggaran dan pengaduan trentibum yang ditangani	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban,ketrentaman,keindahan)	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
1.05 1.1.05.01 19	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
001	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 %	177 Orang (20%)	175 Orang	175 Orang (20%)	100 %	177 Orang	177 Orang (20%)	60 %
004	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	100 %	3 Kali (20%)	3 Kali	3 Kali (20%)	100 %	3 Kali	3 Kali (20%)	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
007	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	100 %	1 Kali (20%)	1Kali	1Kali (20%)	100 %	2 Kali	2 Kali (20%)	60 %
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
008	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Presentase jumlah penduduk yang memeperoleh pelayanan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	100 %	10 Kali (20%)	10 Kali	10 Kali (20%)	100 %	12 Kali	12 Kali (20%)	60 %
1.05 1.1.05.01 20	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang dilakukan oleh PPNS	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pembinaan PPNS yang dilaksanakan	100 %	1 Kali (20%)	1 Kali	1 Kali (20%)	100 %	2 Kali	2 Kali (20%)	60 %

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.2
REALISASI KEUANGAN SATPOL PP KOTA SEMARANG
TRIWULAN II TAHUN 2025

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	29.234.684.662	11.285.344.195	38.60%
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.119.710	16.524.800	15.15%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.844.900	3.094.600	9.42%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.588.120	-	-
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.229.940	-	-
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.926.220	410.200	21.30%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.740.840		
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.041.960	11.250.000	38.74%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.420.420	1.770.000	40.04%
01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	34.327.310		
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.855.346.400	9.449.627.596	36.55%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.613.644.000	9.366.057.596	36.57%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	236.290.000	82.470.000	34.90%
02.05	Koordinasi dan Penyusu nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.212.400	1.100.000	90.73%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.400.000	-	-
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	800.000	-	-
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	623.986.137	550.091.100	88.16%
05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	9.850.000	98.50%
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	325.085.145	323.125.000	99.40%
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285.067.192	213.516.100	74.90%
05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.833.800	3.600.000	93.90%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.469.978	324.115.487	75.29%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.819.572	6.796.850	62.82%
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.557.540	17.231.950	49.86%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.582.550	13.219.850	90.66%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.990.820	13.322.500	78.41%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.200.000	36.305.000	61.33%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.938.828	50.239.337	46.98%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	187.380.668	187.000.000	99.80%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	524.532.078	96.475.000	18.39%
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.826.004	45.000.000	10.85%
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	109.706.074	51.475.000	46.92%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2.08	Penyediaan dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	595.141.080	255.761.896	42.98%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.141.080	105.761.896	44.98%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000	150.000.000	41.67%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.089.279	592.748.316	54.08%
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	25.730.000	71.56%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	855.729.000	405.899.500	47.43%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.201.049	56.970.000	59.84%
09.09	Pemeliharaan/Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.477.830	99.788.816	99.31%
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.726.400	4.360.000	49.96%
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.630.292.576	6.953.635.039	55.06%
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.960.261.042	6.792.903.939	56.97%
01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyu luhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	111.092.670	67.881.000	61.10%
01.02	Penindakan atas Gangguan Ketente raman dan Ketertiban Umum Bedasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	153.009.499	120.847.000	78.98%
01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ktertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	706.500.733	402.508.056	56.97%
01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.799.968.980	6.117.662.689	56.65%
01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	77.231.540	49.732.500	64.39%
01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.503.392	33.772.750	45.33%
01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	29.820.401	500.000	1.68%
01.017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.133.827		
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	597.315.650	160.731.100	26.91%
02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	21.601.160	10.431.000	48.29%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	136.102.099	88.619.100	65.11%
03.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Walikota	439.612.391	61.681.000	14.03%
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	72.715.884	-	-
03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	72.715.884	-	-

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah sebesar Rp 41.864.977.238 anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 18.354.828.034 dengan sisa sebesar Rp 23.150.149.204 (43.84%) dengan uraian berikut :

a. Belanja Operasional, anggaran sebesar Rp. 41.075.281.688 realisasi Sebesar Rp. 18.068.103.034 (43.98%) dan sisa anggaran sebesar Rp 23.007.178.654 (56.01%)
b. Belanja Modal: anggaran sebesar Rp. 789.695.550 Dengan realisasi sebesar Rp. 286.725.000 (36.30%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 502.970.550 (63.69%).

Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Refocusing anggaran adanya penggunaan anggaran untuk kegiatan penting pemerintahan guna menunjang visi misi Wali Kota terpilih.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kota Semarang relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan bencana di Kota Semarang.

Tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitik beratkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan serta menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijkaan daerah dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2025

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Satpol PP sebagaimana tabel berikut.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban ”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 5% dari target sebesar 5% (Capaian sebesar 100%);
b. Sasaran “Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “ Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%)
   2. Indikator “ Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat” sudah mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

      Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat juga sudah terbilang memenuhi target karena sudah mencapai target indikator yang sudah ditentukan.

Adapun indikator kinerja daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja KotaSemarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Peride RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir Periode RPJMD2026	Definisi Ooperasional
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%		100	100	100	100	100	100	100	Jumlah gangguan tantibum yang ditangani / jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan x 100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	62	62	64	66	68	70	72	72	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
3.	Angka Kriminalitas	%	1330	1300	1300	1290	1251	1213	1176	1176	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
4.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban			11.47	11.14	10.52	9.90	9.28	8.85	8.85	Jumlah Pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban tahun berjalan dibandinglkan jumlah pelanggaran kemanan dan ketertiban tahun lalu

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PamongPraja Kota Semarang

1. Peningkatan kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan tidak akan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat jika situasi keamanan dan ketentraman tidak terwujud. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kriminalitas dan gangguan ketentraman ketertiban umum menjadi mutlak dibutuhkan jika ingin proses- proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.

Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat dapat secara langsung memantau dan menginformasikan adanya gangguan ketentraman ketertiban umum, hal tersebut merupakan wujud peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian. Disamping itu penanaman pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sejalan dengan kondisi perkotaan dan aturan yang dinamis.

Disamping itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pelayanan dasar pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimana pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial

ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi linmas dan juga Kader Siaga Trantib (KST).

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
c. Berkurangnya petugas perlindungan masyarakat pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sumber daya manusia dan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
d. Pada tahun 2023 & 2024 dengan adanya beberapa bencana yang terjadi di Kota Semarang, sehingga dilaksanakan reffocusing anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan bantuan bencana yang terjadi selama ini di Kota Semarang.

4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk

menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

a) Menurunkan angka gangguan trantibum;

b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah;

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

a) Memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan nonformal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar.

b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang;

c) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas;

d) Pemenuhan atau penambahan anggota linmas serta sarana bertugas yaitu seragam untuk seluruh petugas perlindungan masyarakat

6. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 :

a) Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme.

b) Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Sesuai tahapan RKPD tahun 2025, tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangungan RPJMD tahun 2021-2026. Dimana tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD. RKPD tahun 2025 dilaksanakan dengan tema "Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Berkesinambungan." Dengan lima prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
b. Prioritas Daerah 2 : Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
c. Priritas daerah 3 : Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
d. Prioritas daerah 4 : Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
e. Prioritas Daerah 5 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis,

Dari prioritas tersebut, telah ditetapkan rumusan sasaran dan target yang harus dicapai pada urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi 9,90 persen. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pada prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dengan rumusan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan ketertiban wilayah.

RKPD juga disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dalam Renja dijabarkan potret dan rencana kegiatan pembangunan, yang memuat Nilai strategis, Proyeksi Anggaran, dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakanselama satu tahun disertai dengan indikator kinerja.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dimaksudkan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan mengedepankan upaya persuasif melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan dengan mempersiapkan SDM yang profesional selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

rencana kerja yang telah disusun memuat keseluruhan pelayanan dasar dimaksud dan dijabarkan menjadi 2 Program dan 10 Kegiatan serta 44 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	32.794.101.015,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	32.794.101.015,-
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%	

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	78.668.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	78.668.700,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.328.800,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.328.800,-
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	5.240.840,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	5.240.840,-
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.240.840,-	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.240.840,-
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	48.039.760,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	48.039.760,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.120.420,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.120.420,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	28.476.018.160,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	28.476.018.160,-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	28.229.502.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	28.229.502.000,-
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.620.000,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.620.000,-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.512.400,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.512.400,-
d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	9.071.360,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	9.071.360,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	1.312.400,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	1.312.400,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	481.972.598	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	481.972.598
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	47.542.400,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	47.542.400,-
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	427.896.398,-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	427.896.398,-
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	490,864,050.00,-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	490,864,050.00,-
d	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.533.800,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.533.800,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	517.569.587	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	517.569.587

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	21.898.550,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	21.898.550,-
d	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.072.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.072.000,-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.350.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.350.000,-
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	123.189.105,-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	123.189.105,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	595.183.523,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	595.183.523,
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			67.319.519,-	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			67.319.519,-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			527.864.004,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			527.864.004,-
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	24 Laporan	360.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	24 Laporan	360.000.000,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Disediakan					Disediakan		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.458.683.317	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.458.683.317
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603,-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.061.558.530,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.061.558.530,-
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.411.350,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.411.350,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.908.785,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.908.785,-
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	8.892.805.415,-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	8.892.805.415,-
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	16% 100%	8.250.215.653,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	16% 100%	8.250.215.653,-
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	80 Laporan	204.034.100,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	80 Laporan	204.034.100,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	337.525.166,-	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	337.525.166,-
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331.000.000,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331.000.000,-
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6.922.220.000,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177 Dokumen	6.922.220.000,-
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	189.790.000,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	189.790.000,--

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870,-	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870,-
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	46.755.690,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	46.755.690,-
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.133.827,-	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		8.133.827,-
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	521.190.344,-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	521.190.344,-
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/	4 Laporan	101.514.755,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	4 Laporan	101.514.755,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Usaha/		
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	279.995.133,-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	279.995.133,-
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	139.680.456,-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	139.680.456,-
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	121.399.418,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	121.399.418,-
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta	1 Laporan	121.399.418,-	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	1 Laporan	121.399.418,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penegakan Perda dan Perkada					Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1) pendekatan perencanaan teknokratik
2) pendekatan perencanaan politik
3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III
TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Target tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Tema pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Secara Berkesinambungan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
   produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menggunakan tema pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pada prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian di tahun 2024 serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan.", dengan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada :
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.

c. Penataan kawasan strategis perkotaan
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d.Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategi OPD

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025.
2. Merupakan acuan pelaksanaan kinerja tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 dalam mendukung prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kota Semarang.

Sedangkan sasaran dan penyusunan rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di tahun 2025 adalah :

a. Terciptanya kondisi aman dan tertib di Kota Semarang dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah;
b. Terciptanya kondisi yang aman dan tertib di Kota Semarang sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
e. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam menunjang penyelenggaraan tugas memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
g. Meningkatnya sarana prasarana dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	%	5,00

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	%	100,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	74,00

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2023 yaitu :
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   - Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   - Peningkatan Perlindungan Masyarakat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan rutin dan 12 (dua belas) kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
30	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
33	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan
34	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
35	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
36	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
37	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
38	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
39	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
40	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota
41	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
42	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota
43	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
44	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam Tim Yustisi Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, dan masyarakat (Linmas/Kader Siaga Trantib/Forum Komunitas) dan para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

Biaya guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada perubahan Renja tahun 2025 mencapai *Rp. 38.779.797.893,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)*. Tabel rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagaimana lampiran berikut ini.

Tabel 3.2.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	29.234.684.662,-	APBD Kota Semarang
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	109.119.710,-	APBD Kota Semarang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.844.900,-	APBD Kota Semarang
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.588.120,-	APBD Kota Semarang
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	2.229.940,-	APBD Kota Semarang
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.926.220,-	APBD Kota Semarang
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.740.840,-	APBD Kota Semarang
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29.041.960,-	APBD Kota Semarang
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	34.420.420,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	34.327.310,-	APBD Kota Semarang
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	25.855.346.400,-	APBD Kota Semarang
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	22.208.493001,-	APBD Kota Semarang
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.350.000,-	APBD Kota Semarang
10	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.100.000,-	APBD Kota Semarang
11	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.400.000,-	APBD Kota Semarang
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	800.000.-	APBD Kota Semarang
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	623.986.137,-	APBD Kota Semarang
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	10.000.000,-	APBD Kota Semarang
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	551.768.901,-	APBD Kota Semarang
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	325.067.192,-	APBD Kota Semarang
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	3.600.000,-	APBD Kota Semarang
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	430.469.978,-	APBD Kota Semarang
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-	APBD Kota Semarang
18	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	31.467.289,-	APBD Kota Semarang
20	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	23.140.820,-	APBD Kota Semarang
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	59.200.000,-	APBD Kota Semarang
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.938.828,-	APBD Kota Semarang
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	201.078.434,-	APBD Kota Semarang
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	524.532.078,-	APBD Kota Semarang
24	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	127.130.000,-	APBD Kota Semarang
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	178.271.528,-	APBD Kota Semarang
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-	APBD Kota Semarang
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-	APBD Kota Semarang
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	436.937.000,-	APBD Kota Semarang
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.096.089.279,-	APBD Kota Semarang
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,-	APBD Kota Semarang
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	855.729.000,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Lapangan					
30	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-	APBD Kota Semarang
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.477.830,-	APBD Kota Semarang
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.636.594,-	APBD Kota Semarang
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	12.630.292.576,-	APBD Kota Semarang
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan	16%	11.960.261.042,-	APBD Kota Semarang
			Presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
33	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	80 Laporan	121.602.480,-	APBD Kota Semarang
34	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	153.009.490,-	APBD Kota Semarang
35	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.179.337.517,-	APBD Kota Semarang
36	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil	177 Dokumen	10.118.379.876,-	APBD Kota

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Semarang
37	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	77.231.540,-	APBD Kota Semarang
38	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	74.503.392,-	APBD Kota Semarang
39	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	29.820.401,-	APBD Kota Semarang
40	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1.471.827,-	APBD Kota Semarang
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	597.315.650,-	APBD Kota Semarang
41	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	4 Laporan	11.091.350,-	APBD Kota Semarang
42	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	136.102.099,-	APBD Kota Semarang
43	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	509.151.658,-	APBD Kota Semarang
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	72.715.884,-	APBD Kota Semarang
44	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	1 Laporan	72.715.884,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Satpol PP Kota Semarang bertugas dan bertanggung jawab pada pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Satpol PP memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategi Satpol PP Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 1 program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 41.864.977.238,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp.29.234.684.662,- untuk program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Rp.12.630.292.576,- untuk program dan kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	29.234.684.662,-	APBD Kota Semarang
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	109.119.710,-	APBD Kota Semarang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.844.900,-	APBD Kota Semarang
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.588.120,-	APBD Kota Semarang
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	2.229.940,-	APBD Kota Semarang
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.926.220,-	APBD Kota Semarang
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.740.840,-	APBD Kota Semarang
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29.041.960,-	APBD Kota Semarang
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	34.420.420,-	APBD Kota Semarang
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	34.327.310,-	APBD Kota Semarang
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	25.855.346.400,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	22.208.493001,-	APBD Kota Semarang
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.350.000,-	APBD Kota Semarang
10	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.100.000,-	APBD Kota Semarang
11	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.400.000,-	APBD Kota Semarang
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	800.000.-	APBD Kota Semarang
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	623.986.137,-	APBD Kota Semarang
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	10.000.000,-	APBD Kota Semarang
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	551.768.901,-	APBD Kota Semarang
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	325.067.192,-	APBD Kota Semarang
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	3.600.000,-	APBD Kota Semarang
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	430.469.978,-	APBD Kota Semarang
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-	APBD Kota Semarang
18	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-	APBD Kota Semarang
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	31.467.289,-	APBD Kota Semarang
20	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	23.140.820,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	59.200.000,-	APBD Kota Semarang
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.938.828,-	APBD Kota Semarang
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	201.078.434,-	APBD Kota Semarang
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	524.532.078,-	APBD Kota Semarang
24	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	127.130.000,-	APBD Kota Semarang
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	178.271.528,-	APBD Kota Semarang
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-	APBD Kota Semarang
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-	APBD Kota Semarang
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	436.937.000,-	APBD Kota Semarang
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.096.089.279,-	APBD Kota Semarang
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,-	APBD Kota Semarang
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	855.729.000,-	APBD Kota Semarang
30	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-	APBD Kota Semarang
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.477.830,-	APBD Kota Semarang
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.636.594,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Lainnya					
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	12.630.292.576,-	APBD Kota Semarang
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan	16%	11.960.261.042,-	APBD Kota Semarang
			Presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
33	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	80 Laporan	121.602.480,-	APBD Kota Semarang
34	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	153.009.490,-	APBD Kota Semarang
35	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.179.337.517,-	APBD Kota Semarang
36	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177 Dokumen	10.118.379.876,-	APBD Kota Semarang
37	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	77.231.540,-	APBD Kota Semarang
38	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	2	74.503.392,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Pencegahan Kejahatan	Dokumen		
39	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	29.820.401,-	APBD Kota Semarang
40	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1.471.827,-	APBD Kota Semarang
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	597.315.650,-	APBD Kota Semarang
41	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	4 Laporan	11.091.350,-	APBD Kota Semarang
42	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	136.102.099,-	APBD Kota Semarang
43	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	509.151.658,-	APBD Kota Semarang
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	72.715.884,-	APBD Kota Semarang
44	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	72.715.884,-	APBD Kota Semarang

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

1. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
2. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
4. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan memperhatikan peran dari semua bidang yang ada dan stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang dan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja.
4. Peran masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Penegasan Rencana Kerja Perangkat Daerah / Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dalam pelaksanaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat/stakeholder yang ada di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

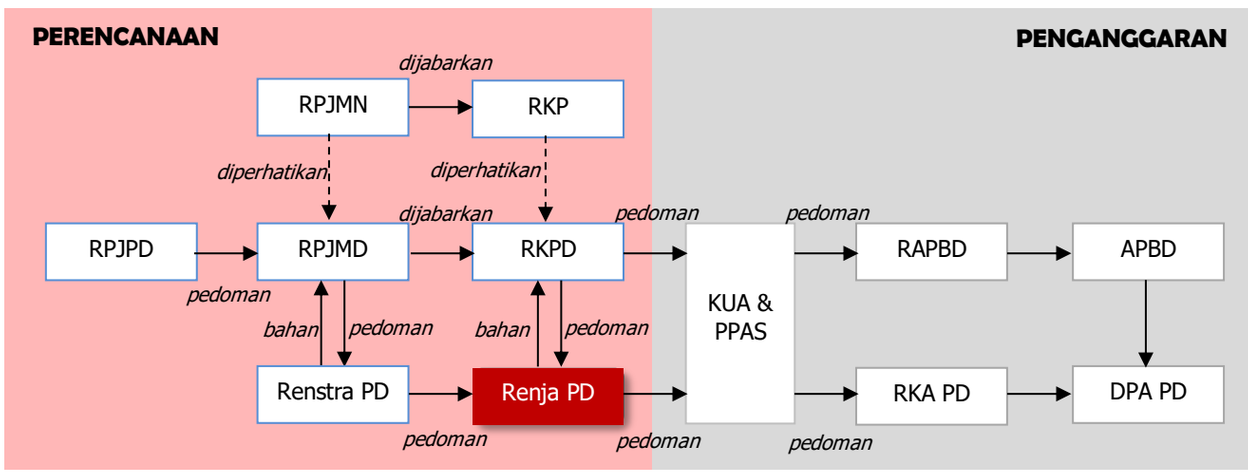

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah." Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Perubahan Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

p. Peraturan Daerah Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	59.45%	100%	52.32%	52.32%	70.47%	70.47%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	62.50%	100%	15.83%	15.83%	71.25%	71.25%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	63.74%	100%	20.30%	20.30%	70.56%	70.56%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	62.50%	100%	15.83%	15.83%	71.25%	71.25%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	10 dokumen	8 dokumen (80%)	5 dokumen	3 dokumen	60%	11 dokumen	110%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	5 Laporan (50%)	2 laporan	0 laporan	0%	5 laporan	50%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	13 Laporan (130%)	6 laporan	4 laporan	66.67%	17 laporan	170.00%
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	0 dokumen (0%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0.00%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	58.34%	100%	56.97%	56.97%	71.41%	71.41%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	901 orang/ bulan	421 (46.73)	294 orang/ bulan	311 orang/ bulan	105.78%	732	81.24%
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	3 dokumen (60%)	1 laporan	1 laporan	100%	4 laporan	80%
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 laporan	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60 laporan	36 laporan (60%)	12 laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	60%	100%	33.33%	33.33%	66.67%	66.67%
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	36 Dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	60%	100%	66.67%	66.67%	73.33%	73.33%
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	80%
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42 dokumen	70%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	65%	100%	33.33%	33.33%	75%	75%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	7 paket (70%)	3 paket	2 paket	66.67%	9 paket	90%
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	3 dokumen (60%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	61.25%	100%	14.07%	14.07%	66.25%	66.25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	3 paket (60%)	1 paket	0 paket	0%	3 paket	60%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	9 paket (90%)	6 paket	0 paket	0%	9 paket	90%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1 paket (20%)	1 paket	0 paket	0%	1 paket	20%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	7 paket (70%)	8 paket	1 paket	12.5%	8 paket	80%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	4 paket (80%)	2 paket	1 paket	50%	5 paket	100%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	42 laporan (70%)	75 laporan	2 laporan	2.67%	44 laporan	73.33%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	36 laporan (60%)	12 laporan	4 laporan	33.33%	40 laporan	66.67%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 dokumen (40%)	0 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen	40%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	36.67%	100%	0%	0%	36.67%	36.67%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	113.33%	100%	0%	0%	113.33%	113.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit (33.33%)	0 unit	0 unit	0%	1 unit	33.33%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	2 unit (40%)	1 unit	0 unit	0%	2 unit	40%
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	12 unit (40%)	42 unit	0 unit	0%	12 unit	40%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	32 unit (128%)	195 unit	0 unit	0%	32 unit	128%
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 unit	8 unit (32%)	0 unit	0 unit	0%	8 unit	32%
1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 unit	0 unit (0%)	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	3 unit (60%)	1 unit	0 unit	0%	3 unit	60%
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	63 unit (420%)	11 unit	0 unit	0%	63 unit	420%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	36 laporan (60%)	12 laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	36 laporan (60%)	12 laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	32.93%	100%	3.23%	3.23%	33.58%	33.58%
		Terpeliharanya kendaraan dinas, operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	57.67%	100%	43.62%	43.62%	66.93%	66.93%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	3 unit (60%)	1 unit	0 unit	0%	3 unit	60%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	217 unit	114 unit (52.53%)	47 unit	41 unit	87.23%	155 unit	71.43%
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	0%	25 unit	0 unit	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	26 unit (60.47%)	31 unit	4 unit	12.90%	30 unit	66.67%
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 unit	19 unit (54.29)	5 unit	0 unit	0%	19 unit	54.29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	281 unit	125 unit (44.5)	83 unit	11 unit	13.25%	136 unit	48.4%
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	132%	100%	50% (12,5%)	50%	144.5%	144.5%
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	26.3%	100%	16,95% (3,39%)	16,95%	29,69%	29,69%
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%	60%	100%	22,48% (4,5)	22,48%	64,5%	64,5%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	60%	100%	0%	0%	60%	60%
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	87%	100%	98,31%	98,31%	92,66%	92,66%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	171,54%	100%	0%	0%	171,54%	171,54%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	107%	100%	29,4%	29,4%	136,65%	136,65%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	60%	100%	0%	0%	60%	60%
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 dokumen	14 dokumen (280%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	20 dokumen	400%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2000 laporan	988 laporan (49.4)	300 laporan	118 laporan	39.33%	1106 laporan	55.3%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 dokumen	56 laporan (2.60)	390 laporan	867 laporan	222.31%	923 laporan	42.93%
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	18 dokumen (150%)	20 dokumen	0 dokumen	0%	18 dokumen	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	25 dokumen	7 dokumen (28%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	7 dokumen	28%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	87 orang (145%)	0	0	0	87 orang	145%
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	60 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan (15%)	7 desa/kelurahan	7 desa/kelurahan	100%	16 desa/kelurahan	26.67%
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	200 unit	602 unit (301%)	173 unit	0 unit	0%	602 unit	301%
~~1.05.04.2.01.0009~~ 1.05.04.2.01.0018 (Pemutakiran satuan jenis ke unit dan nomenklatur)	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	25 dokumen	15 dokumen (60%)	5 dokumen	0	0%	15 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	(60%)	100%	50%	50%	70%	70%
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60 dokumen	36 Dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42	70%
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 dokumen	36 dokumen (60%)	12 dokumen	6 dokumen	50%	42	70%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	4.85%	100%	24%	24%	5.45%	5.45%
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	2000 dokumen	97 dokumen (4.85)	50 dokumen	12 dokumen	24%	109	5.45%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	70.01%	100%	19.45%	19.45%	75.86%	75.86%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 orang	2940 orang (55.37%)	2400 orang	400 orang	16.67%	3340 orang	62.90%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	150 desa/ kelurahan	102 desa/Kelurahan (68%)	36 desa/ kelurahan	15 desa/ Kelurahan (149 orang)	41.67% desa/ kelurahan	117 desa/Kelurahan	78%
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	15 dokumen	13 dokumen (86.67%)	1 dokumen	0	0%	13	86.67%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	1259.29%	100%	0%	0%	1259.29%	1259.29%
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 laporan	3276 laporan (4680%)	0 laporan	0 laporan	0%	3276 Laporan	4680%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	25 dokumen	7 dokumen (28%)	1 dokumen	0	0%	7 dokumen	28%
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 laporan	0%	1 Laporan	0	0%	0 laporan	0%
1.05.04.2.05.0005 (Pemutakiran satuan jenis ke unit dan nomenklatur)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 unit	79 unit (329.17%)	0 unit	0 unit	0%	79 Unit	329.17%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
4. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Sub kegiatan yang tidak tercapai tahun 2025 karena mengalami *hold* anggaran dan *refocusing* anggaran khususnya pada Belanja Modal dan pada sub kegiatan yang masih rendah realisasinya dikarenakan target pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.

Pada beberapa Sub kegiatan tingkat capaian melampaui target pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2021-2026 diantaranya :

a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
c. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
d. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia; dan
g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Dilihat dari hasil capaian Sub Kegiatan yang melampaui target tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang perlu melakukan evaluasi target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2021-2026.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Murni Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	32.259.987.341	10.009.043.476	31,02
I.1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.064.700	1.798.900	1,44
1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.768.000	455.000	0,88
2	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.001.900	0	0
3	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.936.900	0	0
4	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.155.900	763.900	18,38
5	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.480.900	0	0
6	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.835.700	0	0
7	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.885.400	580.000	20,10
8	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	0
I.2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.466.912.210	8.834.268.000	34,69
9	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.170.583.600	8.693.181.000	34,53
10	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.168.000	139.320.000	48,68
11	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	949,680	837.000	88,13
12	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.967.690	675.000	22,75
13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.236.400	0	0
14	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.459.840	150.000	10,28
15	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.685.600	105.000	3,91
16	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	861.400	0	0
I.3	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.886.540	971.000	24,98
17	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	761.720	275.000	36,10
18	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.044.320	431.000	41,27
19	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.080.500	265.000	12,74

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
I.4	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.345.790	285.000	12,15
20	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	441.720	285.000	64,52
21	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	563.440	0	0
22	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.340.630	0	0
I.5	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	331.614.652	8.203.000	2,47
23	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	322.167.632	8.203.000	2,55
24	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.447.020	0	0
I.6	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.959.412	85.897.028	7,21
25	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	17.533.771	0	0
26	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	746.166.689	0	0
27	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.218.364	4.880.000	6,85
28	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.082.548	420.000	2,20
29	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.955.000	2.055.000	4,57
30	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.003.040	78.542.028	26,81
I.7	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.538.164.276	117.408.026	7,63
31	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	529.869.600	0	0
32	0005	Pengadaan Mebel	182.856.128	0	0
33	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.674.535	17.945.000	72,73
34	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.826.800	99.463.026	71,13
35	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	660.937.213	0	0
I.8	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.642.200	259.294.675	42,68
36	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.202.000	187.216.483	44,98
37	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.440.200	72.078.192	37,65
I.9	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.992.397.561	700.917.847	23,42
38	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	6.478.000	14,74
39	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.469.787.943	666.960.390	27,00
40	0005	Pemeliharaan Mebel	1.818.000	0	0

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
41	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.775.223	1.200.000	3,45
42	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.757.550	0	0
43	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.298.846	26.279.457	31,55
II	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.068.069.749	4.466.742.705	49,26
II.1	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6.985.019.342	3.977.573.999	56,94
44	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	275.672.630	68,92
45	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.591.859.398	3.627.386.969	79,00
46	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	83.489.940	64.751.500	77,56
47	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.765	0	0
48	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	73.957.320	0	0
49	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	13.661.410	8.200.000	60,02
50	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.791.411.882	1.002.900	0,06
51	0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.516.627	560.000	2,19
II.2	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	461.200.000	123.156.406	26,70
52	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	13.305.268	2.983.680	22,42
53	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	447.894.732	120.172.726	26,83
II.3	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	7.650.960	1.350.000	17,64
54	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	7.650.960	1.350.000	17,64
II.4	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.335.166.642	364.662.300	27,31
55	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	348.400.697	25.097.600	7,20

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
		melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
56	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	305.460.625	93.624.000	30,65
57	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	681.305.320	245.940.700	36,10
II.5	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	279.032.805	0	0
58	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	832.805	0	0
59	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	278.200.000	0	0
		Total	41.328.057.090	14.475.786.181	35,03

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 14 kegiatan dan 59 sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp. 41.328.057.090. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.14.475.786.181 (35,03%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 26.852.270.909 (64,97%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan: Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	-	100%
Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	88%	100%	100%	100%	100%	100%	77,04%	98,02%	100%	88,64	98,31%		99,94%
Sasaran 2: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	73,27%	73,27%	73,27%	73,27%	73,27%	73,63%	74,05%	78,5%	78,65%	79,1	-	79,1%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran" memiliki indikator kinerja yaitu "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran", dengan realisasi sebesar 100% (capaian 100%);
b. Sasaran "Meningkatnya tingkat waktu tanggap *response time rate*/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran" memiliki indikator kinerja yaitu "Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran", dari kejadian kebakaran dalam triwulan II tahun 2025 sebanyak 118 kejadian, yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap *response time rate* oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 113 kejadian (capaian sebesar 95,76%), dan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebanyak 3 kejadian kebakaran (capaian sebesar 2,54%);
c. Sasaran "Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran" memiliki indikator kinerja yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan realisasi penilaian tahun 2025 pada Triwulan II sebesar 79,1 (BB), nilai dapat dicek di https://penilaian.e-sakip.semarangkota.go.id/score.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dengan terealisasi sebesar 100% (capaian 100%);
2. Sasaran 1 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu meningkatnya tingkat waktu tanggap *response time rate*/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran terealisasi sebesar 98,3% dengan rincian yang layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak sebesar 95,76% dan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebesar 2,54%.
3. Sasaran 2 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” tercapai 79,1 (BB), dalam hal ini nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 0,45.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum terpenuhi:
    a. berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2018 diamanatkan untuk kebutuhan pos pemadam kebakaran di setiap wilayah kecamatan kabupaten/kota. Namun di Kota Semarang hanya memiliki 6 pos sektor dan satu pos induk, oelh sebab itu masih terdapat kekurangan 9 pos sektor di wilayah manajemen kebakaran Kota Semarang;
    b. Mobil tangga tidak dimiliki sementara jumlah bangunan tinggi selalu bertambah;
    c. Sumber air seperti hidran, sumur pemadam, bak tandon kurang dan belum menyebar di tiap kelurahan;
    d. Alat pelindung diri untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum memenuhi untuk 1 orang 1 peralatan.
2. Personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang:
    a. Personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang berjumlah 334. Terdiri dari Pegawai ASN berjumlah 288 orang (51 orang PNS, 237 orang PPPK) dan 46 orang yang berstatus penyedia jasa layanan perorangan;

b. Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran belum semua bersertifikasi, petugas investigasi dan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran gedung tidak bersertifikasi;
c. Dibutuhkan personil di pos sektor pemadam kebakaran (tingkat kecamatan) sebanyak 48 orang dengan 2 unit armada untuk *stand by* 24 jam di pos, saat ini terdapat 24 orang dengan 1 unit armada di tiap pos sektor;

3. Rendahnya partisipasi relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Belum ada NSPK seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau manajemen pemadaman kebakaran tingkat kota, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), Peraturan Daerah tentang penanggulangan kebakaran sejak tahun 1994 belum disesuaikan dengan peraturan terbaru;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Mendukung visi dan misi kepala daerah dengan keterbatasan sumber daya sarana prasarana, personil, NSPK dan pengurangan anggaran;
   2) Layanan penunjang yaitu penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia menunjukkan grafik kenaikan jumlah setiap tahun, tahun 2021 sebanyak 679 kejadian, tahun 2022 sebanyak 810 kejadian, tahun 2023 sebanyak 1103 kejadian, tahun 2024 sebanyak 1389 kejadian dan sampai pada bulan Juni tahun 2025 sebanyak 867 kejadian. Rata-rata kenaikan layanan per tahun sebesar 27%;
   3) Pemberian layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada bangunan tinggi tanpa memiliki mobil tangga.
b. Peluang
   1) Bantuan dari perangkat daerah, instansi, pelaku usaha, dan kabupaten sekitar dalam membantu suplai air, konsumsi, pemadaman kebakaran, dan peningkatan kapasitas sangat membantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
   2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang disusun oleh Bappeda sangat membantu dalam pencapaian visi misi walikota khususnya pelayanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi di masa yang akan datang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana prasarana pemadaman kebakaran dalam rangka mendukung misi mewujudkan infrastruktur berkualitas menuju peningkatan *response time rate* dan penurunan indeks kekumuhan kota.
2. Risiko bencana dan perubahan iklim yang berdampak kekeringan, banjir, dan tanah longsor meningkatkan jumlah kebakaran dan warga yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi;
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibutuhkan guna peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara terpadu termasuk area yang membutuhkan perhatian khusus seperti tempat pemrosesan akhir sampah;
4. Peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam rangka melaksanakan Good Governance demi kepuasan masyarakat penerima layanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				34.028.331.906,66	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				34.028.331.906,66	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100% 100%	26.981.270.757,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100% 100%	26.981.270.757,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	105.034.700,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	105.034.700,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.538.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.538.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	5.926.900,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	5.926.900,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			RKA SKPD					RKA SKPD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.886.900,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.886.900,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.105.900,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.105.900,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.430.900,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.430.900,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.485.700,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.485.700,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.660.400,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.660.400,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan	100%	21.992.668.106,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan	100,00%	21.992.668.106,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			keuangan Dinas Pemadam Kebakaran					keuangan Dinas Pemadam Kebakaran			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan	21.992.668.106,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan	21.992.668.106,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	274.528.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	274.528.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	949.680	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	949.680	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.492.690,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.492.690,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	511.400,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	511.400,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.259.840,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.259.840,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.685.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.685.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	311.400,00	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	311.400,00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.336.540,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.336.540,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	611.720,00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	611.720,00	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	844.320,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	844.320,00	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	880.500,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	880.500,00	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.700.790,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.700.790,00	
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	416.720,00	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	416.720,00	
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	563.440,00	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	563.440,00	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	720.630,00	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	720.630,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	322.313.642,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	322.313.642,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	322.167.632,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	322.167.632,00	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	146.010,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	146.010,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	289.919.954,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	289.919.954,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.533.771,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.533.771,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.591.732,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.591.732,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	54.611.420,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	54.611.420,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.512.405,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.512.405,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32 Laporan	15.385.586,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32 Laporan	15.385.586,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.285.040,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.285.040,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	1.143.779.865,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	1.143.779.865,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	529.869.600,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	529.869.600,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	9.630.360,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	9.630.360,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	24.674.535,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	24.674.535,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105.646.470,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105.646.470,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	473.958.900,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	473.958.900,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	633.270.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	633.270.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	441.942.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	441.942.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	191.328.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	191.328.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	2.208.508.550,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	2.208.508.550,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	1.680.191.860,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	1.680.191.860,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	218.160,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	218.160,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	34.775.223,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	34.775.223,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	383.757.550,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	383.757.550,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	83 Unit	69.655.707,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	83 Unit	69.655.707,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100% 100% 100%	7.047.061.149,66	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas	100% 100% 100%	7.047.061.149,66	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
				100%				Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100%	5.919.491.990,66	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100%	5.919.491.990,66	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	16 Dokumen	276.103.450,00	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	276.103.450,00	
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	4.934.776.949,66	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	4.934.776.949,66	
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	390 Dokumen	80.354.440,00	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	390 Dokumen	80.354.440,00	
	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.645.470,00	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.645.470,00	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan	1 Dokumen	73.957.320,00	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	73.957.320,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Semarang	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	12.606.929,00	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Semarang	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	12.606.929,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	21 Unit	526.185.305,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	21 Unit	526.185.305,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	13.862.127,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	13.862.127,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelamatan Non Kebakaran					Penyelamatan Non Kebakaran					
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	206.579.332,00	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	206.579.332,00	
	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	3.029.641,00	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	3.029.641,00	
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	13 Dokumen	203.549.691,00	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	13 Dokumen	203.549.691,00	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	3.100.000,00	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	3.100.000,00	
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	50 Dokumen	3.100.000,00	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	50 Dokumen	3.100.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	777.957.022,00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	777.957.022,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang	1.920 Orang	286.480.297,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang	1.920 Orang	286.480.297,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	225.397.325,00	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	225.397.325,00	
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	266.079.400,00	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	266.079.400,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Semarang	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100% 100%	139.932.805,00	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Semarang	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100% 100%	139.932.805,00	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	832.805,00	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	832.805,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	139.100.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	139.100.000,00	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Peran Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Gen Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode 1,5–3,5
2. Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 15.000–15.400
3. Cadangan Devisa (US$ miliar) 149,5–153,7
4. Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,1–6,1
5. Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,4)–(0,2)
6. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 19,9–20,0
7. Kontribusi PDB Pariwisata (%) 4,60
8. Nilai Devisa Pariwisata (miliar US$) 22,10

9. Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,70–11,20
10. Keseimbangan Primer (% PDB) 0,00–0,00
11. Surplus/Defisit APBN (% PDB) 2,45)–(2,80)
12. Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,78–39,98
13. Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,5–7,8
14. Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.868,2–1.905,6
15. ilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 805,5–842,2

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan", dengan prioritas yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata, yang dilakukan antara lain melalui pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, penyelesaian ijasah yang tertahan, pembangunan Rumah Inspirasi, Kartu BRT Gratis untuk pelajar dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang, penambahan kuota Universal Health Coverage (UHC), pemilahan dan pengolahan sampah, sampai dengan penyelesaian permasalahan infrastruktur yang mendesak, terutama di wilayah-wilayah pengembangan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021–2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021–2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

" Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran"

dengan indikator tujuan "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran dengan indikator Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021–2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	%	100,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam	%	89,45
SASARAN 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	78,66

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran" dan indikator sasaran "Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					41.471.652.700,00	41.328.057.090,00	34.028.331.906,66		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					41.471.652.700,00	41.328.057.090,00	34.028.331.906,66		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	26.028.426.755	32.259.987.341,00	26.981.270.757,00	PAD	
		b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	80.565.933,00	125.064.700,00	105.034.700,00	PAD	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	33.759.880,00	51.768.000,00	32.538.000,00	PAD	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.651.570,00	6.001.900,00	5.926.900,00	PAD	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.295.070,00	4.936.900,00	4.886.900,00	PAD	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.946.900,00	4.155.900,00	4.105.900,00	PAD	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.396.900,00	3.480.900,00	3.430.900,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.241.590,00	1.835.700,00	1.485.700,00	PAD	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.736.590,00	2.885.400,00	2.660.400,00	PAD	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	17.323.275.041,00	25.466.912.210,00	22.274.406.716,00	PAD dan DAU	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	107 orang/ bulan	107 orang/ bulan	107 orang/ bulan	17.000.000.000,00	25.170.583.600,00	21.992.668.106,00	DAU	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	312.726.375,00	286.168.000,00	274.528.000,00	PAD	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	969.390,00	949.680,00	949.680,00	PAD	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.326.151,00	2.967.690,00	1.492.690,00	PAD	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.492.200,00	1.236.400,00	511.400,00	PAD	
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.568.050,00	1.459.840,00	1.259.840,00	PAD	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.223.800,00	2.685.600,00	2.685.600,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	969.075,00	861.400,00	311.400,00	PAD	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	4.301.302,00	3.886.540,00	2.336.540,00	PAD	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	837.892,00	761.720,00	611.720,00	PAD	
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.174.860,00	1.044.320,00	844.320,00	PAD	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.288.550,00	2.080.500,00	880.500,00	PAD	
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	2.629.585,00	2.345.790,00	1.700.790,00	PAD	
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	496.935,00	441.720,00	416.720,00	PAD	
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	624.450,00	563.440,00	563.440,00	PAD	
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.508.200,00	1.340.630,00	720.630,00	PAD	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	323.000.000,00	331.614.652,00	322.313.642,00	PAD	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	312.000.000,00	322.167.632,00	322.167.632,00	PAD	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	11.000.000,00	9.447.020,00	146.010,00	PAD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	653.731.943,00	1.191.959.412,00	289.919.954,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.677.683,00	17.533.771,00	17.533.771,00	PAD	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	1 Paket	349.126.000,00	746.166.689,00	21.591.732,00	PAD	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	2.250.000,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8 Paket	7 Paket	100.832.000,00	71.218.364,00	54.611.420,00	PAD	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	19.747.000,00	19.082.548,00	9.512.405,00	PAD	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	75 Laporan	32 Laporan	45.450.000,00	44.955.000,00	15.385.586,00	PAD	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.649.260,00	293.003.040,00	171.285.040,00	PAD	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakara b. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	100% 100%	100% 100%	5.365.241.232,00	1.538.164.276,00	1.143.779.865,00	PAD	
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			650.000.000,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.500.000.000,00	529.869.600,00	529.869.600,00	PAD	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	42 Unit	0 Unit	14.071.110,00	182.856.128,00	9.630.360,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	195 Unit	195 Unit	9.974.016,00	24.674.535,00	24.674.535,00	PAD	
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	5.582.656	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	139.826.800,00	105.646.470,00	PAD	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	38 Unit	185.613.450,00	660.937.213,00	473.958.900,00	PAD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	599.818.320,00	607.642.200,00	633.270.000,00	PAD	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	412.623.450,00	416.202.000,00	441.942.000,00	PAD	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	187.194.870,00	191.440.200,00	191.328.000,00	PAD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1.675.863.399,00	2.992.397.561,00	2.208.508.550,00	PAD	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.898.806,00	43.959.999,00	39.910.050,00	PAD	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	42 Unit	1.208.332.551,00	2.469.787.943,00	1.680.191.860,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit	0 Unit	1.500.000,0	1.818.000,00	218.160,00	PAD	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	35.652.092,00	34.775.223,00	34.775.223,00	PAD	
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3 Unit	270.545.290,00	358.757.550,00	383.757.550,00	PAD	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	101 Unit	101 Unit	101 Unit	114.934.660,00	83.298.846,00	69.655.707,00	PAD	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayak an manusia b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran c. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran d. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran e. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	15.443.225.945,00	9.068.069.749,00	7.047.061.149,66	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	100%					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	a. Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri b. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	11.601.397.258,00	6.985.019.342,00	5.919.491.990,66	PAD	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	154.000.000,00	400.000.000,00	276.103.450,00	PAD	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	9.284.659.616,00	4.591.859.398,00	4.934.776.949,66	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	390 Dokumen	390 Dokumen	10.000.000,00	83.489.940,00	80.354.440,00	PAD	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.122.765,00	1.645.470,00	PAD	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.005.561,00	73.957.320,00	73.957.320,00	PAD	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	PAD	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	89.517.599,00	13.661.410,00	12.606.929,00	PAD	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100 Unit	173 Unit	21 unit	2.000.000.000,00	1.791.411.882,00	526.185.305,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	37.214.482,00	25.516.627,00	13.862.127,00	PAD	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	100%	100%	1.624.081.261,00	461.200.000,00	206.579.332,00	PAD	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	13.305.268,00	3.029.641,00	PAD	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.613.081.261,00	447.894.732,00	203.549.691,00	PAD	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	100%	100%	28.451.715,00	7.650.960,00	3.100.000,00	PAD	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	70 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	28.451.715,00	7.650.960,00	3.100.000,00	PAD	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	100%	100%	859.126.330,00	1.335.166.642,00	777.957.022,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	2400 Orang	1920 Orang	325.624.500,00	348.400.697,00	286.480.297,00	PAD	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan	291.323.329,00	305.460.625,00	225.397.325,00	PAD	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242.178.501,00	681.305.320,00	266.079.400,00	PAD	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	a. Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi b. Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1.330.169.381,00	279.032.805,00	139.932.805,00	PAD	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	80.548.069,00	0,00	0,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.621.312,00	832.805,00	832.805,00	PAD	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	40 Orang	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	278.200.000,00	139.100.000,00	PAD	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	0 Unit	0 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	PAD	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini

adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

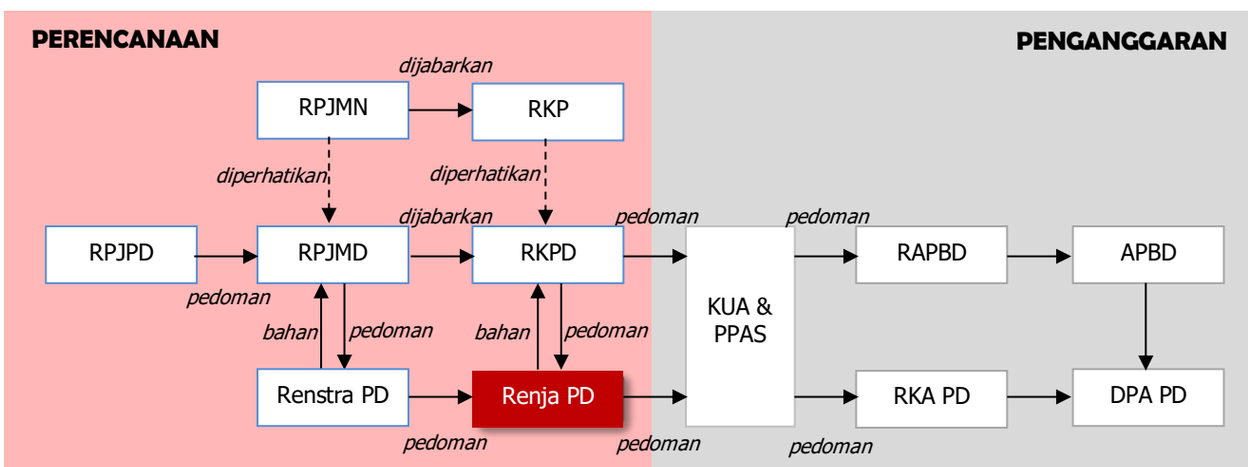

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2025 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	62,5%	62,5		
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	-			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	60%	60%		
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	-	100.00 Persen				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100 persen		62,5		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	5 Dokumen	3	60	6 dokumen	100
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1	100	3 dokumen	100
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1	100	2 dokumen	100
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	-	1 Dokumen		0	0	100
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	2 Laporan	2 laporan	100	3 laporan	100
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 Dokumen	-	0	0	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100 persen		62,5		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	100	70 orang/ bulan	100
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6	50	18 dokumen	100
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1 laporan	100
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	2 dokumen	100
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100 persen		60,42		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	2 Paket	2	100	7 paket	100
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 paket	2 Paket	1	50	4 paket	100
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 paket	6 Paket	4	66,67	7 paket	100
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	12 paket	3 Paket	2	66,67	14 paket	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	12 Paket	6	50	12 paket	100
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	12 Laporan	6	50	12 laporan	100
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1000 Laporan	12 Laporan	6	50	12 laporan	100
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4 dokumen	1 Dokumen		0	5 dokumen	100
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	-	-	100 %				
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0 Unit	0	0		0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100 persen		66,67		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	1 Laporan	1	100	1000 laporan	100
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	18 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	18 laporan	100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100 %		50,79		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	21 Unit	11 unit	52,38	21 unit	100
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	20 Unit	10	50	20 unit	100
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	60 Unit	30	50	40 unit	100
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 Unit	0	0	1 unit	100
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	27%	20%	20.00 persen				
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan	-	-	0				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	500 orang				
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0	0	1 dokumen	100
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	6 dokumen	3 dokumen	5 jenis				
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	4 unit	4 unit	5 Unit	5 unit	100	9 unit	100
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 kawasan	4 kawasan	2 Kawasan	2 kawasan	100	6 kawasan	100
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada	5 dokumen	5 dokumen	2 laporan	2 laporan	100	7 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		di kawasan tempat tinggalnya							
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	600 orang	900 orang	2 Kawasan	2 kawasan	100	2 kawasan	100
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 dokumen	12 dokumen	1000 Orang	2.156 orang	215	2.156	100
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 orang	1000 orang	1000 Orang	2.156 orang	215	2.156	100
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	500 orang	200 orang	100 orang				
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	500 orang	12 kegiatan	100 orang	100 orang	100	100 orang	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 dokumen	-	1 Dokumen	1 dokumen	100	12 dokumen	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota”,

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing yaitu “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor”, “Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota”. Kedua sub kegiatan ini pedukung dari indikator sasaran RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berupa Indeks Risiko Bencana. Dengan terefocusing nya 2 sub kegiatan tersebut maka Indeks Risiko Bencana Kota Semarang tidak akan mencapai target yang di tentukan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan”, “Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota”, “Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota” dan “Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 3.543.688.423,56	1.386.772.574	39,1%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/ kota	Rp. 155.590.236,00	66.233.700	42,6%
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana kabupaten/ kota	Rp. 155.590.236,00	66.233.700	42,6%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 979.006.313,00	298.070.677	30,4%
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Rp. 81.027.586,00	70.841.000	87,4%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 580.397.684,00	101.230.000	17,4%
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Rp. 23.503.672,00	8.947.289	38,1%
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/ kota	Rp. 294.077.371,00	117.052.388	39,8%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 1.003.556.034,56	687.837.247	68,5%
6	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/ kota	Rp. 737.679.020,75	485.858.097	65,9%
7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/ kota	Rp. 265.877.013,81	201.979.150	76,0%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 1.405.535.840,00	334.630.950	23,8%
8	Koordinasi penanganan Pascabencana kabupaten/ kota	Rp. 1.334.910.789,00	320.278.000	24,0%
9	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Rp. 70.625.051,00	14.352.950	20,3%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp10.322.794.269,99	4.384.348.593	39,6%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.039.041,67	570.000	1,3%
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.963.280,67		0,0%
11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 214.490,00		0,0%
12	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 440.000,00	440.000	100%
13	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 200.512,00		0,0%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 137.274,00	130.000	94,7%
15	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp. 27.083.485,00	0	0,0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.878.429.600,40	3.544.768.549	39,2%
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.691.187.070,40	3.451.228.549	39,0%
17	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 187.080.000,00	93.540.000	44,5%
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 81.265,00	0	0,0%
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 81.265,00	0	0,0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 149.079.780,50	49.792.515	31,0%
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 19.922.816,00	11.595.450	58,2%
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.151,00	0	0,0%
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 43.713.238,00	10.284.000	23,5%
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.260.877,00	750.000	4,9%
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 7.083.373,00	3.050.000	43,1%
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 6.665.885,00	3.075.000	46,1%
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 51.137.440,50	21.038.065	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 296.000,00	0	0,0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp-	0	0,0%
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp-	0	0,0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 974.064.309,42	398.813.229	46,3%
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.927.000,00	2.000.000	50,9%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 270.913.659,42	117.298.979	49,4%
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 699.223.650,00	279.514.250	45,1%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.277.181.538,00	390.404.300	42,6%
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 310.032.000,00	158.607.800	51,2%
33	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan"	Rp. 615.101.617,00	220.012.500	48,6%
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 55.022.664,00	11.784.000	21,4%
35	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"	Rp. 297.025.257,00	0	0,0%
JUMLAH		Rp. 13.866.482.693,55	Rp. 6.343.651.203,00	44,8%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 13.866.482.693,55 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 6.343.651.203. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 7.522.831.490,55.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana														
	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115.52	113	111	109	107	105	115.52	108.63	101.79	99.41	94.31	-	93
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana														
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,78 %	100%	100%	100%	-	100
Sasaran 2: Meningkatnya upaya penanganan saat bencana														
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	-	100
Sasaran 3: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah														
	Nilai SAKIP	73.96	71	72	73	74	75	73.96	71,61	72,1	72.5	0	-	73.5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang". Pada Tahun 2025 triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 94,31% dari target sebesar 107% (capaian 109,65%).;
b. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, dengan Indikator sebagai berikut:
      a. "Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal". Pada tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

b. “Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana”. Pada tahun 2025, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

2) Meningkatnya upaya penanganan saat bencana, dengan Indikator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”. Pada tahun 2025, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

c. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Indikator “Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. Pada tahun 2025, Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 72,7% dari target sebesar 73,5 %

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap aliran sungai di Kota Semarang terdapat perangkat Early Warning System pada hilir dan hulu;
2. Seluruh Kelurahan di Kota Semarang menjadi KATANA;
3. Seluruh warga Kota Semarang siap menghadapi bencana;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
2. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kota Semarang;
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perubahan cuaca yang tidak bisa dipresiksi.
   2) Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana;
   3) Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholders belum maksimal;
   4) Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas;
   5) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengurangan risiko bencana;
b. Peluang
   1) Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana
   2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana;
   3) Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
   4) Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1) Meningkatnya ancaman bencana yang pengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
2) Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				13.866.482.693,55	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				23.290.358.658	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	10.322.794.269,99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	11.588.432.658	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	32.257.771,17	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	32.257.771,17	
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	15.593.280,67	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	15.593.280,67	
1.05.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	214.490,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	214.490,00	
1.05.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	440.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	440.000,00	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	200.512,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		200.512,00	
1.05.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	137.274,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 laporan	137.274,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	15.672.214,50	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	15.672.214,50	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	7.878.429.600,40	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	7.878.429.600,40	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	7.691.187.070,40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	7.691.187.070,40	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	187.080.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	187.080.000,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	81.265,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	81.265,00	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	81.265,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	81.265,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	160.761.051,60	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	160.761.051,60	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19.922.816,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19.922.816,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.000.151,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.000.151,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.713.238,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.713.238,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	18.723.597,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	18.723.597,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	8.735.684,10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	8.735.684,10	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	6.665.885,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	6.665.885,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	51.137.440,50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	51.137.440,50	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	6.862.240,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	6.862.240,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	100.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	100.000	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	100.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	100.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	974.064.309,42	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	974.064.309,42	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	3.927.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	3.927.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	270.913.659,42	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	270.913.659,42	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	699.223.650,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	699.223.650,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.277.181.538,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.277.181.538,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	310.032.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	310.032.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	615.101.617,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	615.101.617,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	55.022.664,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	55.022.664,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	297.025.257,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	297.025.257,00	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	3.543.688.423,56	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	3.543.688.423,56	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	500 orang	155.590.236,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	500 orang	155.590.236,00	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	155.590.236,00	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	155.590.236,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	979.006.313,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	979.006.313,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	14 kawasan	81.027.586,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	14 kawasan	81.027.586,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	580.397.684,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	580.397.684,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	23.503.672,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	23.503.672,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	294.077.371,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	294.077.371,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.003.556.034,56	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.003.556.034,56	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	737.679.020,75	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	737.679.020,75	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	265.877.013,81	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	265.877.013,81	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	1.405.535.840,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	1.405.535.840,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	1.334.910.789,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	1.334.910.789,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	70.625.051,00	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	70.625.051,00	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana"

dengan indikator tujuan "Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana;
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan danmitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	nilai	107
SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
SASARAN 2 : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	nilai	73,5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Resiko Bencana" dan indikator sasaran "Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	11.838.913.390	11.838.913.390	10.322.794.270,59	11.838.913.390	11.838.913.390	10.322.794.270,59	APBD	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	103.408.000	103.408.000	32.257.771,17	103.408.000	103.408.000	32.257.771,17	APBD	
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.404.400	50.404.400	15.593.280,67	50.404.400	50.404.400	15.593.280,67	APBD	
1.05.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	890.000	890.000	214.490,00	890.000	890.000	214.490,00	APBD	
1.05.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	712.000	712.000	440.000,00	712.000	712.000	440.000,00	APBD	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	832.000	832.000	200.512,00	832.000	832.000	200.512,00	APBD	
1.05.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	569,600	569,600	137.274,00	569,600	569,600	137.274,00	APBD	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000	15.672.214,50	50.000.000	50.000.000	15.672.214,50	APBD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	9.529.312.400	9.529.312.400	7.878.429.600,40	9.529.312.400	9.529.312.400	7.878.429.600,40	APBD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9,318,270,000	9,318,270,000	7.691.187.070,40	9,318,270,000	9,318,270,000	7.691.187.070,40	APBD	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210,368,000	210,368,000	187.080.000,00	210,368,000	210,368,000	187.080.000,00	APBD	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.200	337.200	81.265,00	337.200	337.200	81.265,00	APBD	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	337.200	337.200	81.265,00	337.200	337.200	81.265,00	APBD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	326.668.875	326.668.875	160.761.051,60	326.668.875	326.668.875	160.761.051,60	APBD	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19.927.150	19.927.150	19.922.816,00	19.927.150	19.927.150	19.922.816,00	APBD	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25.693.246	25.693.246	5.000.151,00	25.693.246	25.693.246	5.000.151,00	APBD	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43.713.531	43.713.531	43.713.238,00	43.713.531	43.713.531	43.713.238,00	APBD	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29.000.000	29.000.000	18.723.597,00	29.000.000	29.000.000	18.723.597,00	APBD	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24.562.760	24.562.760	8.735.684,10	24.562.760	24.562.760	8.735.684,10	APBD	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.200.000	13.200.000	6.665.885,00	13.200.000	13.200.000	6.665.885,00	APBD	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.509.720	149.509.720	51.137.440,50	149.509.720	149.509.720	51.137.440,50	APBD	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.062.468	21.062.468	6.862.240,00	21.062.468	21.062.468	6.862.240,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	42.135.600	42.135.600	100.000,00	42.135.600	42.135.600	100.000,00	APBD	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	42.135.600	42.135.600	100.000,00	42.135.600	42.135.600	100.000,00	APBD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	861.818.400	861.818.400	974.064.309,42	861.818.400	861.818.400	974.064.309,42	APBD	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.927.000	3.927.000	3.927.000,00	3.927.000	3.927.000	3.927.000,00	APBD	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	237.575.000	237.575.000	270.913.659,42	237.575.000	237.575.000	270.913.659,42	APBD	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	620.316.400	620.316.400	699.223.650,00	620.316.400	620.316.400	699.223.650,00	APBD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	975.570.115	975.570.115	1.277.181.538,00	975.570.115	975.570.115	1.277.181.538,00	APBD	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	352.799.985	352.799.985	310.032.000,00	352.799.985	352.799.985	310.032.000,00	APBD	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	467.747.466	467.747.466	615.101.617,00	467.747.466	467.747.466	615.101.617,00	APBD	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55.022.664	55.022.664	55.022.664,00	55.022.664	55.022.664	55.022.664,00	APBD	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.000.000	100.000.000	297.025.257,00	100.000.000	100.000.000	297.025.257,00	APBD	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	2.241.392.170	2.241.392.170	3.543.688.423,64	2.241.392.170	2.241.392.170	3.543.688.423,64	APBD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	70.000.000	70.000.000	155.590.236,00	70.000.000	70.000.000	155.590.236,00	APBD	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	70.000.000	70.000.000	155.590.236,00	70.000.000	70.000.000	155.590.236,00	APBD	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	947.982.220	947.982.220	979.006.313,08	947.982.220	947.982.220	979.006.313,08	APBD	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	150.000.000	150.000.000	81.027.586,00	150.000.000	150.000.000	81.027.586,00	APBD	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	643.940.410	643.940.410	580.397.684,00	643.940.410	643.940.410	580.397.684,00	APBD	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	52.000.000	52.000.000	23.503.672,08	52.000.000	52.000.000	23.503.672,08	APBD	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	102.041.810	102.041.810	294.077.371,00	102.041.810	102.041.810	294.077.371,00	APBD	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	661.409.950	661.409.950	1.003.556.034,56	661.409.950	661.409.950	1.003.556.034,56	APBD	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	397.545.130	397.545.130	737.679.020,75	397.545.130	397.545.130	737.679.020,75	APBD	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	263.864.820	263.864.820	265.877.013,81	263.864.820	263.864.820	265.877.013,81	APBD	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	562.000.000	562.000.000	1.405.535.840,00	562.000.000	562.000.000	1.405.535.840,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	410.000.000	410.000.000	1.334.910.789,00	410.000.000	410.000.000	1.334.910.789,00	APBD	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	152.000.000	152.000.000	70.625.051,00	152.000.000	152.000.000	70.625.051,00	APBD	
JUMLAH						14.080.305.560	14.080.305.560	13.866.482.694,23		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

10. DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

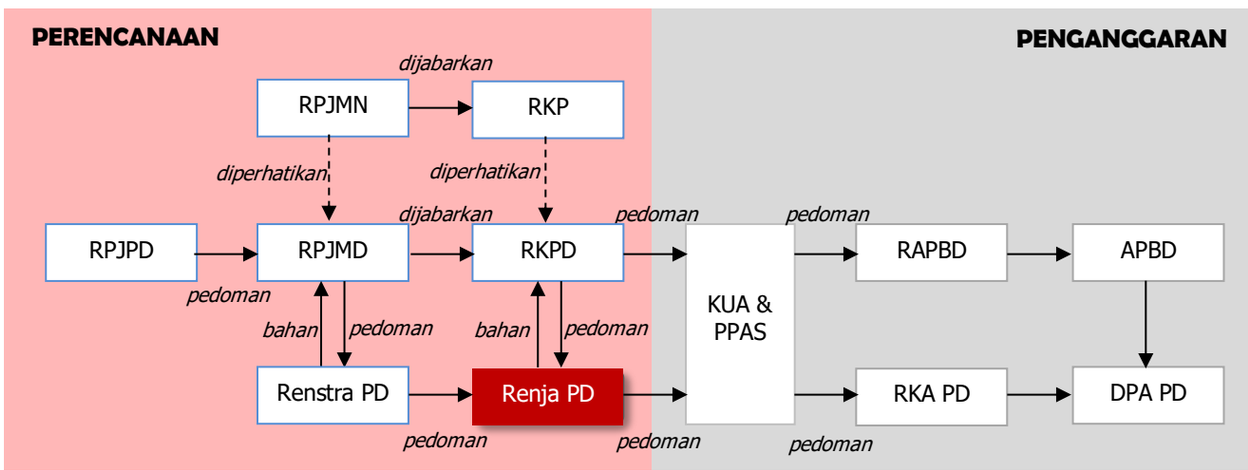

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah akibat efisiensi kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Sosial Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);

p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, review terhadap Perubahan

RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	100%	100%	100%	48,21%	48,21%	48,21%	48,21%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	0%
1.06.01.2.01.02 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	4 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	0%
1.06.01.2.01.03 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	0%
1.06.01.2.01.04 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	4 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	0%
1.06.01.2.01.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	8 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06.01.2.01.06 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.01.07 (Pemustakhiran)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 laporan	2 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0%
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	48,21%	48,21%	48,21%	48,21%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	67%	67%	67%	67%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100%	100 orang/bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	50%
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50%	4 dokumen	50%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	6 laporan	6 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.07 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	-	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	7 dokumen	1 laporan	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasaran perkantoran Dinas Sosial	100%	100%	100%	48,21%	48,21%	48,21%	48,21%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	89%	89%	89%	89%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	7 paket	7 paket	1 paket	14%	1 paket	14%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 paket	25 paket	2 paket	8%	2 paket	8%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	51 paket	12 paket	6 paket	50%	6 paket	50%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	190 paket	50 paket	13 paket	26%	13 paket	26%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.05 (Pemustakhiran)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1309 paket	15 paket	7 paket	47%	7 paket	47%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	36 dokumen	36 dokumen	18 dokumen	50%	18 dokumen	50%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2.000 dos	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.08 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	64 laporan	74 laporan	43 laporan	58%	43 laporan	58%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.09 (Pemustakhiran)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	82 laporan	100 laporan	53 laporan	53%	53 laporan	53%
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	2 jenis	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.11 (Pemustakhiran)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	8 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1 06 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 01 2.07.05 (Pemustakhiran)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	5 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-
1 06 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	-	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.07.10 (Pemustakhiran)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	44%	44%	44%	44%
1 06 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.08.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	36 laporan	36 laporan	16 laporan	44%	16 laporan	44%
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	49 unit	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	38 unit	48 unit	24 unit	50%	24 unit	50%
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 01 2.09.05 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	125 unit	10 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 bangunan	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.09 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	2 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 jenis	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.10 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	1 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.11 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	144 unit	136 unit	83 unit	61%	83 unit	61%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 06 01 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	4 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 02 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	100%	89%	59%	66%	59%	59%
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	-	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 01 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	260 orang	260 orang	260 orang	100%	260 orang	100%
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 02 2.03 02 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	100%
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 03 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 keluarga	4 keluarga	2 keluarga	50%	2 keluarga	50%
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ko	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	8 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 04 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 lembaga	50 lembaga	14 lembaga	28%	14 lembaga	28%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 05 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	-	12 sertifikat	12 sertifikat	2 sertifikat	17%	2 sertifikat	17%
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	23%	23%	23%	23%
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	23%	23%	23%	23%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	20 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 03 2.01 01 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 orang	13 orang	3 orang	23%	3 orang	23%
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,99%	100%	99,93%	85,12%	85,18%	85,12%	85,13%
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	91,67%	91,67%	91,67%	91,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	415 orang/hari	85 orang	85 orang	100%	85 orang	100%
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	190 orang/hari	85 orang	85 orang	100%	85 orang	100%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	-	-	-	-		-	
1 06 04 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 04 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	11 orang	100 orang	50 orang	50%	50 orang	50%
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	-	,	-	-	-	-
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100%	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	292 orang	85 orang	45 orang	52,94%	45 orang	52,94%
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,	8 kegiatan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis							
1 06 04 2.01 06 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	62 orang	90 orang	60 orang	66,67%	60 orang	66,67%
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 07 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 orang	11 orang	2 orang	18%	2 orang	18%
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	130 orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar							
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	232 orang	85 orang	60 orang	70,58%	60 orang	70,58%
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 09 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	381 orang	100 orang	60 orang	60%	60 orang	60%
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	200 orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		usia terlantar dan gepeng yang dijangkau							
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	165 orang	100 orang	50 orang	50%	50 orang	50%
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	87 orang	30 orang	18 orang	60%	18 orang	60%
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	34 orang	30 orang	25 orang	83%	25 orang	83%
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	100%	100%	100%	78,57%	78,57%	78,57%	78,57%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial							
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	-	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 01 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	300 orang	300 orang	155 orang	52%	155 orang	52%
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	100 orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau							
1 06 04 2.02 02 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	100 orang	33 orang	33%	33 orang	33%
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	5.000 orang	-	-	-	-	-	-
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejateraan Sosial Non	265 orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan							
1 06 04 2.02 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5163 orang	5265 orang	6418 orang	122%	6418 orang	122%
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	48 orang	48 orang	47 orang	98%	47 orang	98%
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	65 orang	15 orang	10 orang	67%	10 orang	67%
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 04 2.02 06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	175 orang	100 orang	28 orang	28%	28 orang	28%
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 07 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	184 orang	100 orang	30 orang	30%	30 orang	30%
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	87 orang	50 orang	45 orang	90%	45 orang	90%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 09 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 orang,	5 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	189 orang	100 orang	40 orang	40%	40 orang	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	124 orang	80 orang	35 orang	43,75%	35 orang	43,75%
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	109 orang	80 orang	21 orang	26,25%	21 orang	26,25%
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 13 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 orang	12 orang	7 orang	58%	7 orang	58%
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang	-					
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 14 (Pemustakhiran)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	4 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,96%	100%	71,25%	26,19%	52,5%	26,19%	36,4%
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	43%	43%	43%	43%
1 06 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	20 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.01 (Pemustakhiran)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	9 orang	10 orang	6 orang	60%	6 orang	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	20 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.02 (Pemustakhiran)	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	9 orang	10 orang	4 orang	40%	4 orang	40%
1 06 05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	4 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.03 (Pemustakhiran)	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 orang	10 orang	3 orang	30%	3 orang	30%
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14,90%	9,38	14,15%	9,38%	66%	9,38%	63%
1 06 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 05.2.02.01 (Pemustakhiran)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	-	248.795 orang	150.000 orang	75,000 orang	50%	75,000 orang	50%
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.02 (Pemustakhiran)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	1676 keluarga	1.500 keluarga	398 keluarga	27%	398 keluarga	27%
1 06 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1.413 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.03 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	66.656 keluarga	50.000 keluarga	39.140 keluarga	78%	39.140 keluarga	78%
1 06 05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.04 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	50 orang	23 orang	46%	23 orang	46%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	35%	35%	35%	35%
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	31%	31%	31%	31%
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	928 orang	373 orang	209 orang	56,03%	209 orang	56,03%
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	283 orang	373 orang	0 orang	0,00%	0 orang	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 unit	5 unit	1 unit	20%	1 unit	20%
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 04 (Pemustakhiran)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	80 orang	75 orang	18 orang	24%	18 orang	24%
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	18 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	8 orang	280 orang	150 orang	54%	150 orang	54%
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	38%	38%	38%	38%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 kampung	3 kampung	1 kampung	33%	1 kampung	33%
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-
1 06 06 2.02 02 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	115 orang	60 orang	25 orang	42%	25 orang	42%

Sumber: Dinas Sosial *Kota Semarang, 2025*

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Permakanan, dan Penyediaan Sandang.

Hampir semua sub kegiatan di Triwulan II Tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran terutama yang terdapat item belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Modal, Perjalanan Dinas dan Makan Minum.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.202.276.761	5.659.483.620	37,23
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.331.469	2.454.900	1,56
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.473.679	1.309.000	1,67
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.225.400	0	-
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.883.600	421.800	22,39
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.491.800	389.900	26,14
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.883.600	0	-
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.567.600	334.200	21,32
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.805.790	0	-
8	Peyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	-
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.681.414.840	4.950.008.387	42,38
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.336.817.440	4.795.271.227	42,30
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	338.779.600	154.440.360	45,59
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	779.800	99.000	12,70
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.230.400	0	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.576.200	197.800	7,68
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.231.400	0	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.922.193	145.670.329	22,59
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	1.101.600	18,36
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.539.854	1.000.000	1,74
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	3.283.000	46,90
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.656.500	3.365.650	10,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.400.000	3.488.600	10,77
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	3.600.000	62,50
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	23.292.500	29,12
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	106.538.979	42,62
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	172.565.839	0	-
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	593.558.570	0	-
1	Pengadaan Mebel	63.688.970	0	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	529.869.600	0	
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.860.980	59.390.694	41,87
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.860.980	59.390.694	41,87
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.934.432	389.921.910	24,88
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.603.603	14.878.000	37,57
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	635.180.155	276.266.710	43,49
3	Pemeliharaan Mebel	32.292.250	0	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.000.000	21.338.800	2,88
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	34.496.000	68,99
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.858.424	42.942.400	61,47
G	Kegiatan Penataan Organisasi	416.254.277	112.037.400	26,92
1	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	416.254.277	112.037.400	26,92
	Program Pemberdayaan Sosial	6.665.795.861	2.480.183.200	37,21
H	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.991.280	67.977.780	61,25
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	110.991.280	67.977.780	61,25
I	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	6.554.804.581	2.412.205.420	36,80

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.128.491.280	2.055.616.250	40,08
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	370.000.000	156.542.400	42,31
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65.746.381	33.275.000	50,61
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	344.556.920	142.544.770	41,37
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	646.010.000	24.227.000	3,75
	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	30.320.774	13.431.760	44,30
J	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.320.774	13.431.760	44,30
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.320.774	13.431.760	44,30
	Program Rehabilitasi Sosial	8.635.386.089	3.752.827.901	43,46
K	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.465.486.480	1.182.513.684	47,96
1	Penyediaan Permakanan	1.380.000.000	650.384.612	47,13
2	Penyediaan Sandang	58.569.800	35.277.050	60,23
3	Penyediaan Alat Bantu	418.130	0	-
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.950.000	8.602.000	25,34
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	627.792.220	312.772.172	49,82
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	28.773.000	18.143.500	63,06
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.686.000	3.118.800	46,65
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.222.330	4.634.050	74,47
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000.000	41.763.000	41,76
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	163.225.000	68.613.500	42,04
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	29.925.000	17.150.000	57,31
12	Pemberian Layanan Rujukan	29.925.000	22.055.000	73,70
L	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.169.899.609	2.570.314.217	41,66

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	557.144.680	304.350.810	54,63
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	36.840.905	6.540.000	17,75
3	Penyediaan Permakanan	4.620.000.000	1.846.891.605	39,98
4	Penyediaan Sandang	19.008.000	18.225.000	95,88
5	Penyediaan Alat Bantu	130.000.000	98118500	75,48
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	390.928.000	108.533.852	27,76
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	32.931.424	13.100.000	39,78
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49.855.000	27.750.000	55,66
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	45.000.000	33.700.000	74,89
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	33.491.600	5.001.500	14,93
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.900.000	1.500.000	10,07
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.900.000	4.111.000	27,59
13	Pemberian Layanan Rujukan	14.900.000	3.455.000	23,19
14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	210.000.000	99.036.950	47,16
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.521.245.063	2.874.591.775	52,06
M	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	182.324.125	78.474.490	43,04
1	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	118.947.935	65.615.930	55,16
2	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	33.334.960	7.213.560	21,64
3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	30.041.230	5.645.000	18,79
N	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.338.920.938	2.796.117.285	52,37
1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	412.787.640	158.902.580	38,49
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.324.872.048	230.944.480	17,43
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.176.261.250	2.304.850.805	72,56
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	425.000.000	101.419.420	23,86
	Program Penanganan Bencana	973.108.567	314.672.000	32,34
O	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	604.311.327	187.133.180	30,97
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	179.498.067	91.155.500	50,78
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	80.008.000	0	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.250.000	1.950.000	6,45
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	74.052.000	2.839.240	3,83
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	240.503.260	91.188.440	37,92
P	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	368.797.240	127.538.820	34,58
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	231.673.019	98.623.820	42,57
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	137.124.221	28.915.000	21,09
JUMLAH		37.028.133.115	15.095.190.256	41

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 16 kegiatan dan 81 sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebesar Rp 37.028.133.115,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.095.190.256. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.932.942.859.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	16,45 %	16,10 %	15,80 %	15,50 %	15,20 %	14,90 %	24,23 %	11,06 %	9,68%	9,38%	9,38%	-	9,38%
Sasaran:														

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	-	0,05%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	-	0,30%	0,30%	0,30%	-	0,30%
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	98%	99,75 %	99,81 %	99,87 %	99,93 %	99,99 %	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Penduduk Miskin, telah dapat melampaui target, Dimana realisasinya sebesar 9,38% dari target sebesar 15,20%, di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih kecil dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin ;
b. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 0,3% dari target sebesar 0,3% (capaian sebesar 100%), di indikator kinerja ini dengan realisasi sama dengan target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
c. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti telah dapat memenuhi target, Dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota telah dapat memenuhi target, Dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
3) Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 99,93% (capaian sebesar 100,07%)

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal;
    a. Kewenanganan di bidang kesejahteraan sosial
    b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
    c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
    d. Tersedianya jaringan system informasi yang ada
    e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan
2. Lingkungan Eksternal;
    a. Letak Kota Semarang yang strategis.
    b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
    c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
    d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
    e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya Fakir Miskin.
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.

3. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/ kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
5. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
6. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin;
   2) Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada;
   3) Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.
b. Peluang
   a) Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin;
   b) Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
   c) Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberian rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
   d) Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
   e) Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal;

f) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial;
2. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional;
3. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
4. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Sosial Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.906.154.796,55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.906.154.796,55	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	100%	13.398.273.193,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	100%	13.398.273.193,55	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	63.740.774,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	63.740.774,00	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	32.220.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	32.220.100,00	-
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	612.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	612.700,00	-
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	672.440,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	672.440,00	-
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	561.492,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	561.492,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	672.440,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	672.440,00	-
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	550.907,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	550.907,00	-
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.375.945,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.375.945,00	-
8	Peyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.074.750,00	Peyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.074.750,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	10.519.241.576,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	10.519.241.576,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	10.176.976.824,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	10.176.976.824,00	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	340.083.642,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	340.083.642,00	-
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	389.900,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	389.900,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	469.642,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	469.642,00	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	880.538,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	880.538,00	-
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	441.030,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	441.030,00	-
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	299.570.902,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	299.570.902,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	6.000.000,00	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	7.688.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	7.688.100,00	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	7.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	7.000.000,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	13.462.500,50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	13.462.500,50	-
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	7.037.701,50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	7.037.701,50	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.000.000,00	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	39.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	39.500.000,00	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	210.757.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	210.757.000,00	-
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	125.600,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	125.600,00	-
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100%	224.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100%	224.400,00	
1	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	112.200,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	112.200,00	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	112.200,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	112.200,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	126.296.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	126.296.000,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	126.296.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	126.296.000,00	-
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	1.653.110.588,72	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	1.653.110.588,72	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	559.755.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	559.755.000,00	-
3	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	32.292.250,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	32.292.250,00	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	840.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	840.000.000,00	-
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	136 Unit	135.108.338,72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	136 Unit	135.108.338,72	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
G	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	736.088.952,83	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	736.088.952,83	
1	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	736.088.952,83	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	736.088.952,83	-
	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	6.823.219.531,00	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	6.823.219.531,00	
H	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	76.040.450,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	76.040.450,00	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	76.040.450,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	76.040.450,00	-
I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	6.747.179.081,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	6.747.179.081,00	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	4.940.523.780,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	4.940.523.780,00	-
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	16 Orang	351.272.400,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	16 Orang	351.272.400,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	41.715.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	41.715.000,00	-
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	279.638.270,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	279.638.270,00	-
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	1.134.029.631,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	1.134.029.631,00	-
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	16.790.559,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	16.790.559,00	
J	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	16.790.559,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	16.790.559,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	16.790.559,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	16.790.559,00	-
	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,93	9.062.392.417,00	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,93	9.062.392.417,00	
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.263.719.874,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.263.719.874,00	
1	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	1.352.470.000,00	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	1.352.470.000,00	-
2	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	85 Orang	58.569.800,00	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	58.569.800,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota								
3	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	418.130,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	418.130,00	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.537.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.537.000,00	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	572.182.087,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	572.182.087,00	-
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	21.202.643,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	21.202.643,00	-
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	11 Orang	4.968.844,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	4.968.844,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota								
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	6.222.330,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	6.222.330,00	-
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	68.167.540,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	68.167.540,00	-
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	118.232.500,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	118.232.500,00	-
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	21.294.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	21.294.000,00	-
12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	23.455.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	23.455.000,00	-
L	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	100%	6.798.672.543,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100%	6.798.672.543,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial			NAPZA di Luar Panti Sosial		yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial			
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	377.130.340,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	377.130.340,00	-
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	17.215.000,00	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	17.215.000,00	-
3	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	4.819.470.000,00	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	4.819.470.000,00	-
4	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	19.008.000,00	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	19.008.000,00	-
5	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	113.235.400,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	113.235.400,00	-
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	100 Orang	386.816.000,00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	100 Orang	386.816.000,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	19.414.475,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	19.414.475,00	-
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	144.760.905,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	144.760.905,00	-
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	37.950.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	37.950.000,00	-
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	693.734.523,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	693.734.523,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	6.590.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	6.590.000,00	-
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	7.860.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	7.860.000,00	-
13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	7.440.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	7.440.000,00	-
14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	148.047.900,00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	148.047.900,00	-
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,25%	4.862.312.094,00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,25%	4.862.312.094,00	
M	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	118.888.572,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	118.888.572,00	
1	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	10 Orang	80.812.150,00	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang	10 Orang	80.812.150,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.553.110,00	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.553.110,00	-
3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.523.312,00	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.523.312,00	-
N	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14.15 %	4.743.423.522,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14.15 %	4.743.423.522,00	
1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	271.462.657,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	271.462.657,00	-
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1.249.897.889,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1.249.897.889,00	-
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	2.964.367.797,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	2.964.367.797,00	-
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 Orang	257.695.179,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	257.695.179,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	743.167.002,00	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	743.167.002,00	
O	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	494.224.872,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	494.224.872,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	162.214.307,00	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	162.214.307,00	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	79.712.237,00	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	79.712.237,00	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	28.766.825,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	28.766.825,00	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	52.878.534,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	52.878.534,00	-
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	170.652.969,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	170.652.969,00	-
P	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	248.942.130,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	248.942.130,00	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	178.566.223,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	178.566.223,00	-
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	70.375.907,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	70.375.907,00	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan

dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

a. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (Indikator Tujuan: Persentase Penduduk Miskin)
b. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Indkator Tujuan: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
c. Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas (Indikator Tujuan: Persentase Penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang yaitu:

1. Menurunnya Angka Kemiskinan;
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya angka DTKS;
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani;
3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;
5. Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi;
6. Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial;
7. Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan :			
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	15,20
Sasaran:			

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,30
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	99,93

Sumber : Dinas Sosial, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Sosial memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase Penduduk Miskin" dan indikator sasaran "Persentase penduduk Miskin yang dientaskan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota, dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.796,55		
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	100%	100%	100%	157.331.469	157.331.469	63.740.774,00		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	157.331.469	157.331.469	63.740.774,00		
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	78.473.679	78.473.679	32.220.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.225.400	1.225.400	612.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.883.600	1.883.600	672.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.491.800	1.491.800	561.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.883.600	1.883.600	672.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.567.600	1.567.600	550.907,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	20.805.790	20.805.790	1.375.945,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.074.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	12.273.063.400	11.681.414.840	10.519.241.576		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	12.273.063.400	11.681.414.840	10.519.241.576		
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	11.928.466.000	11.336.817.440	10.176.976.824,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1.06.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	338.779.600	338.779.600	340.083.642,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	779.800	779.800	389.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1.230.400	1.230.400	469.642,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.576.200	2.576.200	880.538,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.231.400	1.231.400	441.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasaran perkantoran Dinas Sosial	100%	100%	100%	607.595.202	644.922.193,20	299.570.902,00		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	100%	100%	607.595.202	644.922.193,20	299.570.902,00		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	25 paket	25 paket	57.539.854	57.539.854	7.688.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	33.656.500	33.656.500	13.462.500,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	32.400.000	32.400.000	7.037.701,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.760.000	5.760.000	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	80.000.000	80.000.000	39.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	250.000.000	250.000.000	210.757.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	135.238.848	172.565.839,20	125.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100%	100%	100%	593.558.570	593.558.570	224.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	63.688.970	63.688.970	112.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	529.869.600	529.869.600	112.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	141.860.980	141.860.980	126.296.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	141.860.980	141.860.980	126.296.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Air dan Listrik yang Disediakan								
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	100%	100%	1.566.934.432	1.566.934.432	1.653.110.588,72	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	48 Unit	635.180.155	635.180.155	559.755.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	32.292.250	32.292.250	32.292.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	740.000.000	740.000.000	840.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	136 Unit	136 Unit	69.858.424	69.858.424	135.108.338,72	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	100%	100%	316.254.277	416.254.277	736.088.952,83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 01 2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	316.254.277	416.254.277	736.088.952,83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	6.472.822.021	6.665.795.861	6.823.219.531,00		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	60.000.000	110.991.280	76.040.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.02 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	110.991.280	76.040.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	89.00 %	89.00 %	6.412.822.021	6.554.804.581	6.747.179.081,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	260 Orang	5.077.500.000	5.128.491.280	4.940.523.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	350.000.000	370.000.000	351.272.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	4 Keluarga	45.746.381	65.746.381	41.715.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 06 02 2.03 04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	293.565.640	344.556.920	279.638.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	12 Sertifikat	12 Sertifikat	646.010.000	646.010.000	1.134.029.631,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	30.320.774	30.320.774	16.790.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	30.320.774	30.320.774	16.790.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang	13 Orang	30.320.774	30.320.774	16.790.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,93	99,93	99,93	8.301.760.849	8.635.386.089	9.062.392.417,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	2.192.079.680	2.465.486.480	2.263.719.874,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	1.200.000.000	1.380.000.000	1.352.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- Insentif Fiskal	
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	58.569.800	58.569.800	58.569.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	1 Orang	418.130	418.130	418.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.950.000	33.950.000	16.537.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	534.385.420	627.792.220	572.182.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	90 Orang	90 Orang	28.773.000	28.773.000	21.202.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	11 Orang	6.686.000	6.686.000	4.968.844,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	6.222.330	6.222.330	6.222.330,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	68.167.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	163.225.000	163.225.000	118.232.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	29.925.000	29.925.000	21.294.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	29.925.000	29.925.000	23.455.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	6.109.681.169	6.169.899.609	6.798.672.543,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	416.926.240	557.144.680	377.130.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	36.840.905	36.840.905	17.215.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	5265 Orang	5265 Orang	4.800.000.000	4.620.000.000	4.819.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	48 Orang	48 Orang	48 Orang	19.008.000	19.008.000	19.008.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	130.000.000	130.000.000	113.235.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	390.928.000	390.928.000	386.816.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	32.931.424	32.931.424	19.414.475,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	49.855.000	49.855.000	144.760.905,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	5 Orang	5 Orang	45.000.000	45.000.000	37.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.491.600	33.491.600	693.734.523,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	80 Orang	14.900.000	14.900.000	6.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	80 Orang	14.900.000	14.900.000	7.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	14.900.000	14.900.000	7.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	210.000.000	148.047.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,25%	71,25%	71,25%	4.266.929.375	5.521.245.063,80	4.862.312.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	131.332.845	182.324.125	118.888.572,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01.01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	10 Orang	10 Orang	10 Orang	67.956.655	118.947.935	80.812.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 05.2.01.02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	33.334.960	33.334.960	18.553.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30.041.230	30.041.230	19.523.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.15 %	14.15 %	14.15 %	4.135.596.530	5.338.920.938,80	4.743.423.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	150000 Orang	150000 Orang	234.335.280	412.787.640	271.462.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	300.000.000	1.324.872.048,80	1.249.897.889,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	50000 Keluarga	50000 Keluarga	3.176.261.250	3.176.261.250	2.964.367.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
1 06 05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	425.000.000	425.000.000	257.695.179,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	799.701.767	973.108.567	743.167.002,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	517.499.687	604.311.327	494.224.872,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	373 Orang	179.498.067	179.498.067	162.214.307,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	373 Orang	80.008.000	80.008.000	79.712.237,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.250.000	30.250.000	28.766.825,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	54.052.000	74.052.000	52.878.534,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	280 Orang	280 Orang	173.691.620	240.503.260	170.652.969,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	282.202.080	368.797.240	248.942.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.02 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	145.077.859	231.673.019	178.566.223,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.02 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	137.124.221	137.124.221	70.375.907,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Sosial ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

11. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

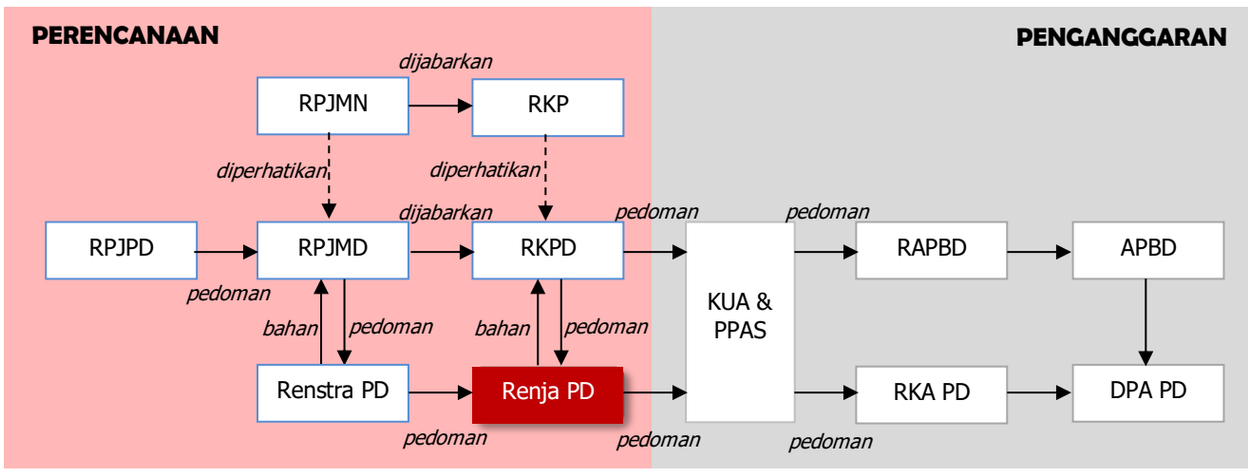

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas

Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat efisiensi kegiatan dan realokasi anggaran; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
t. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5doc	4 doc	7 doc	1 doc	28,57	5 dok	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5doc	3 doc	1doc	0 doc	0	3 dok	60
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5doc	3 doc	1doc	1 doc	100	4 dok	80
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5doc	3 doc	1doc	0 doc	0	3 dok	60
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5doc	2 doc	1doc	0 doc	0	2 dok	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10doc	6 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67	8 laporan	80
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5doc	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	4 laporan	80
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1dok	0 dok	1dok	0doc	0	0doc	0
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKP	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	70 org/ bln	78 orang/bulan	78 orang/bulan	100	78 org/bln	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 doc	12 doc	6 dok	50	18 dok	100
X.XX.01.2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20jenis	3 paket	5 paket	2 paket	40	5 paket	25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5jenis	3 paket	5 paket	0 paket	0	3 paket	60
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35jenis	5 paket	24 paket	2 paket	40	7 paket	20

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40jenis	8 paket	42 paket	21 paket	50	29 paket	72,5
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15jenis	7 paket	11 paket	6 paket	54,54	13 paket	86,6
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730eksem	36 dok	36 dokumen	18 dok	50	54 dok	7,40
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500org	200 lap	2 laporan	1 laporan	50	201 laporan	40,2
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200keg	100 lap	390 laporan	150 laporan	64	250 laporan	125
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5keg	4 dok	4 dok	0 dok	0	4 dok	80
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5jenis	4 doc	19 dok	0 dok	0	4 dok	80
X.XX.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20jenis	23 unit	57 unit	0 unit	0	23 unit	115
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 lap	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24org	12 lap	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urussan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24unit	24 unit	24 unit	24 unit	100	24 unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18jenis	63 unit	50 unit	25 unit	50	88 unit	488
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3gedung	2 unit	3 unit	0 unit	0	3 unit	100
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	80,95%	75%	100%	133,3	180,95%	226,19
2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1doc	1doc	1 doc	0 dok	0	1 dok	100
2.07.02.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50org	0 org	50 doc	0 dok	0	0 dok	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80%	79,06%	79%	79,36%	100,45	158,42%	198,02

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57%	62,6%	52%	50%	96,15	112,60%	197,54
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	460org	720org	776 orang	384 orang	50	1104 org	240
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	5jenis	23 unit	6 unit	18 unit	78,26	41 unit	820
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	26%	36,05%	22%	22%	100	58,05%	223,27
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40LPK	20 lembaga	25 lembaga	0 lembaga	0	20 lembaga	50
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	109,3%	100%	80%	80	189,30%	189.30%
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50LPK	37 perizinan	25 perizinan	0 perizinan	0	37 perizinan	74
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	50 perusahaan	45 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan	50	45 perusahaan	90
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	50 perusahaan	45 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan	50	45 perusahaan	90
2.07.03.2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp155.809.000	Rp153.908.817	Rp152.739.000	Rp152.739.000	100	Rp306.647.817	196,82

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15perusah	33 dok	6 dok	6 dok	100	40 dok	266
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72%	111,71%	70%	101,30%	144,71	213,01%	295,84
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	100000org	3462 org	2000 orang	1618 orang	80,90	5080 org	5,08
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	0org	3138 org	2000 orang	1252 orang	62,60	4390 org	0
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	12kali	30 org	60 org	42 org	70	50 org	600
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	155org	30 org	15 orang	15 orang	100	45 org	29,03
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	190org	44 org	75 orang	35 orang	46,67	94 org	41,58
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	5000org	1316 org	1000 orang	1574 orang	157,40	2890 org	57,80
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60bulan	2809 org	2500 orang	1574 orang	62,96	4383 org	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3750org	862 org	1000 orang	772 orang	77,2	1634 org	43,57
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	240org	54 org	40 orang	15 org	37,50	69 org	28,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	130org	0 org	15 orang	0 orang	0	54 org	41,54
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	82org	15 org	15 orang	15 org	100	69 org	84,15
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,70%	89,58%	5,60 %	90,57%	1617,32	180,15%	3160,52
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	848perush	843 perush	788 perusahaan	802 perusahaan	101,77	802 perusahaan	94,57
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	300 perush	164 perusahaan	50 perusahaan	32 perusahaan	64	196 perusahaan	65,33
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60kegiatan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50	5 laporan	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	62%	56%	58%	50%	86,20	50%	80,64

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	230org/ perush	163 perkara	100 perkara	55 perkara	55	281 perkara	122,17
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	800kasus	83 perkara	50 perkara	20 perkara	40	205 perkara	25,62
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	40PUK	10 ap&sp	18 asosiasi dan serikat kerja	0 asosiasi dan serikat kerja	0	26 asosiasi dan serikat kerja	65
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60keg	1 lembaga	1 lembaga	0 lembaga	0	1 lembaga	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Job Fair/Bursa Kerja”, “Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”, “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan” dan “Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan”.

Semua sub kegiatan mengalami efisiensi anggaran, efisiensi anggaran terbesar berada pada sub kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”. Hal ini terjadi karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian perhitungan oleh TAPD agar tidak mengakibatkan silpa terlalu banyak pada belanja pegawai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.877.811.180	6.873.926.973	40,73%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.905.212	0	0,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.404.008	0	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	834.997	0	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	719.370	0	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	577.274	0	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	719.370	0	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	265.255	0	0,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.439	0	0,00%
8	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	27.073.499	0	0,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.178.234.960	6.165.620.828	46,79%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.965.190.960	6.037.616.798	46,57%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.044.000	85.040.000	39,92%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.836.931	45.537.250	3,17%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.820.488	7.566.000	30,48%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.663.379	0	0,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.998.199	7.987.900	31,95%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.687.632	7.048.500	47,99%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.015.180	4.260.850	47,26%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.924.736	2.090.000	35,28%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.714	2.635.500	26,42%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.979.456	12.956.500	61,76%
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.995.444	0	0,00%
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.174.776.703	990.000	0,1%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.961.943	0	0,00%
1	Pengadaan Mebel	216.961.943	0	0,00%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.493.570	618.982.115	41,36%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.606.590	122.385.715	26,06%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.026.886.980	496.596.400	48,36%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.378.564	148.843.402	29,69%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	12.706.500	31,84%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.342.000	116.673.902	46,24%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.784.674	19.463.000	33,68%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.341.840	0	0,00%
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	18.139.647	0	0,00%
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	18.139.647	0	0,00%
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	18.139.647	0	0,00%
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.053.341.475	1.495.293.400	48,97%
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.744.330.250	1.419.771.500	51,73%
1	Proses Pelaksanaan Pendidikandan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.725.660.196	1.406.341.500	51,60%
2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	18.670.054	13.430.000	71,93%
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	236.374.191	25.454.000	10,77%
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	236.374.191	25.454.000	10,77%
3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	20.838.706	7.206.400	34,58%
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	20.838.706	7.206.400	34,58%
4.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	13.297.113	7.733.000	58,16%
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	13.297.113	7.733.000	58,16%
5.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.501.216	35.128.500	91,24%
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	38.501.216	35.128.500	91,24%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	816.772.010	328.356.870	40,20%
1.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	356.141.427	159.408.120	44,76%
1	Pelayanan antar Kerja	92.686.435	37.594.600	40,56%
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	14.117.843	9.255.000	65,56%
3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	26.550.466	24.605.355	92,67%
4	Perluasan Kesempatan Kerja	222.786.683	87.953.165	39,48%
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	383.281.643	149.625.500	39,04%
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	146.438.356	31.215.000	21,32%
2	Job Fair/Bursa Kerja	236.843.287	118.410.500	50,00%
4.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	77.348.940	19.323.250	24,98%
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.324.865	1.270.000	2,52%
2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	27.024.075	18.053.250	66,80%
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	474.044.329	234.205.340	49,41%
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.988.524	77.045.000	43,04%
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20.040.032	15.439.000	77,04%
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	158.948.492	61.606.000	38,76%
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	295.055.805	157.160.340	53,26%
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Kabupaten/Kota	32.775.529	0	0,00%
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Kabupaten/Kota	13.724.014	5.499.200	40,07%
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Afiliasi	19.950.775	0	0,00%
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	228.605.487	151.661.140	66,34%
TOTAL		21.240.108.641	8.931.782.583	42,05%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 17 kegiatan dan 48 sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebesar Rp 21.240.108.641. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II

realisasinya adalah sebesar Rp 8.931.782.583. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 12.308.326.058.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dinas tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan: Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,30 %	9,00 %	8,60 %	8,00 %	7,10 %	6,20 %	9,54 %	7,6 %	5,99 %	5,82 %	5,82 %	5,01 %	6,80 %
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,95 %	70,04 %	70,10 %	70,15 %	70,20 %	70,25 %	69,41 %	70,90 %	69,42 %	69,88 %	69,88 %	71,50 %	70,00 %
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	0,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	0,00	71,91	83,45	83,45	83,45	84,07	73,00
Sasaran 2: Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	75,00 %	76,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	80,00 %	68,14 %	72,74 %	74,94 %	79,06 %	79,33 %	80,00%	77,00 %
Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	62,00 %	64,00 %	66,00 %	68,00 %	70,00 %	72,00 %	91,60 %	97,33 %	50,05%	52,94 %	55,83 %	98,25%	97,5 %
Sasaran 4: Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	52,00 %	54,00 %	56,00 %	58,00 %	60,00 %	62,00 %	53,71 %	61,11 %	75,00 %	70,63 %	73,00 %	62,00 %	60,00 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Menurunkan pengangguran” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, target sebesar 7,10 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 5,82% (capaian 118,03%); “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, target 70,20 %, dengan realisasi sebesar 69,88% (Capaian 99,54%).
b. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Nilai AKIP” dapat mencapai target 73, dengan realisasi sebesar 83,45 (capaian sebesar 114,31%).
c. Sasaran “Meningkatnya keterampilan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi” dapat mencapai target sebesar 79 %, dengan realisasi sebesar 79,33% (capaian sebesar 100,42%).
d. Sasaran “Meningkatnya penempatan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” belum dapat mencapai target sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 55,83 % (capaian sebesar 79,76%).
e. Sasaran “Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)” dapat mencapai target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 73% (capaian sebesar 121,67%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi;
2. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
3. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Sarana hubungan industrial masih belum optimal;
2. Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi teknologi digital pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi
   2) Ketersediaan Informasi Pasar Kerja belum optimal
b. Peluang
   1) Adanya inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap Informasi Pasar Kerja
   2) Deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesempatan kerja
2. Belum optimalnya hubungan industrial

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
DINAS TENAGA KERJA	Kota Semarang			21.167.582.270,72	DINAS TENAGA KERJA	Kota Semarang			21.167.582.270,72	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Semarang			21.167.582.270,72	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Semarang			21.167.582.270,72	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Semarang			21.167.582.270,72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Semarang			21.167.582.270,72	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	15.599.369.889,61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	15.599.369.889,61	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	34.885.212,04	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	34.885.212,04	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.384.007,85	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.384.007,85	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	834.997,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	834.997,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	719.370,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	719.370,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	577.274,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	577.274,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	719.370,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	719.370,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	265.255,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	265.255,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	311.439,19	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	311.439,19	
Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.073.499,00	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.073.499,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	12.390.031.117,57	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	12.390.031.117,57	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.176.987.117,57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.176.987.117,57	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	213.044.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	213.044.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	1.315.903.266,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	1.315.903.266,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	24.820.488,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	24.820.488,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.392.050,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.392.050,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24.998.199,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24.998.199,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	14.687.632,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	14.687.632,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	9.015.180,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	9.015.180,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.262.400,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.262.400,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.975.714,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.975.714,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	45.979.456,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	45.979.456,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.995.444,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.995.444,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19 Dokumen	1.174.776.703,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19 Dokumen	1.174.776.703,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	100.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	100.000,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	100.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	100.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	1.508.313.570,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	1.508.313.570,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	469.406.590,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	469.406.590,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.038.906.980,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.038.906.980,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	350.136.724,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	350.136.724,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	252.342.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	252.342.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	57.784.674,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	57.784.674,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	18.139.647,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	18.139.647,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 Dokumen	18.139.647,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 Dokumen	18.139.647,00	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	18.139.647,00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	18.139.647,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	3.180.379.075,34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	3.180.379.075,34	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55%	2.841.367.850,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55%	2.841.367.850,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	918 Orang	2.822.697.796,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	918 Orang	2.822.697.796,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	18.670.054,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	18.670.054,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	266.374.191,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	266.374.191,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	266.374.191,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	266.374.191,00	
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	20.838.706,00	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	20.838.706,00	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	20.838.706,00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	20.838.706,00	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas	10 Perusahaan	13.297.112,67	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas	10 Perusahaan	13.297.112,67	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi	60 Perusahaan	13.297.112,67	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi	60 Perusahaan	13.297.112,67	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Peningkatan Produktivitas					Peningkatan Produktivitas			
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154267000 Rupiah	38.501.215,67	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154267000 Rupiah	38.501.215,67	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	38.501.215,67	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	38.501.215,67	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	916.772.010,10	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	916.772.010,10	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	456.141.427,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	456.141.427,00	
Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	92.686.435,00	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	92.686.435,00	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	110 Orang	114.117.843,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	110 Orang	114.117.843,00	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	26.550.466,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	26.550.466,00	
Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	222.786.683,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	222.786.683,00	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	383.281.643,10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	383.281.643,10	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar	2500 Orang	146.438.355,99	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar	2500 Orang	146.438.355,99	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	236.843.287,11	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	236.843.287,11	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	50 orang	77.348.940,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	50 orang	77.348.940,00	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	50.324.865,00	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	50.324.865,00	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	27.024.075,00	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	27.024.075,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,60%	1.452.921.648,67	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,60%	1.452.921.648,67	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 Perusahaan	1.157.865.844,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 Perusahaan	1.157.865.844,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	20.040.032,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	20.040.032,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	1.137.825.812,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	1.137.825.812,00	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	60 persen	295.055.804,67	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	60 persen	295.055.804,67	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	32.775.529,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	32.775.529,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	13.724.014,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	13.724.014,00	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	19.950.775,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	19.950.775,00	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	228.605.486,67	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	228.605.486,67	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;

4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya".
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melaui Perjanjain Bersama (PB)".
3. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	%	10,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 1 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya	%	2,00
	SASARAN 2 : Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melaui Perjanjain Bersama (PB)	%	60,00
	SASARAN 3 : Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi	%	79,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	DINAS TENAGA KERJA					22.504.715.366,00	22.958.096.766,00	21.167.582.270,72		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.504.715.366,00	22.958.096.766,00	21.167.582.270,72		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					22.504.715.366,00	22.958.096.766,00	21.167.582.270,72		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	17.215.301.220,00	17.215.301.220,00	15.599.369.889,61		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	111.243.634,00	111.243.634,00	34.885.212,04		
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	51.245.864,00	51.245.864,00	4.384.007,85	PAD	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.614,00	2.494.614,00	834.997,00	PAD	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139,00	2.081.139,00	719.370,00	PAD	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.704.294,00	1.704.294,00	577.274,00	PAD	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139,00	2.081.139,00	719.370,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	747.474,00	747.474,00	265.255,00	PAD	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	889.110,00	889.110,00	311.439,19	PAD	
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.073.499,00	PAD	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	13.394.308.000,00	13.178.234.960,00	12.390.031.117,57		
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	13.181.264.000,00	12.965.190.960,00	12.176.987.117,57	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	213.044.000,00	213.044.000,00	213.044.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	1.667.226.562,00	1.667.226.562,00	1.315.903.266,00		
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	24.820.488,00	24.820.488,00	24.820.488,00	PAD	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	150.821.328,00	150.821.328,00	2.392.050,00	PAD	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24.998.199,00	24.998.199,00	24.998.199,00	PAD	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	42 Paket	24.995.647,00	24.995.647,00	14.687.632,00	PAD	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	21.362.553,00	21.362.553,00	9.015.180,00	PAD	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	24 Dokumen	5.924.736,00	5.924.736,00	4.262.400,00	PAD	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.980.000,00	19.980.000,00	9.975.714,00	PAD	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390 Laporan	390 Laporan	90 Laporan	209.556.020,00	209.556.020,00	45.979.456,00	PAD	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.990.888,00	9.990.888,00	4.995.444,00	PAD	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	1.174.776.703,00	1.174.776.703,00	1.174.776.703,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Berbasis Elektronik pada SKPD								
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	216.961.943,00	216.961.943,00	100.000,00		
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	57 Unit	57 Unit	216.961.943,00	216.961.943,00	100.000,00	PAD	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	1.280.420.530,00	1.496.493.570,00	1.508.313.570,00		
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	469.606.590,00	469.606.590,00	469.406.590,00	PAD	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	810.813.940,00	1.026.886.980,00	1.038.906.980,00	PAD	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	545.140.551,00	545.140.551,00	350.136.724,00		
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999,00	43.959.999,00	39.910.050,00	PAD	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	292.054.038,00	292.054.038,00	252.342.000,00	PAD	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	57.784.674,00	57.784.674,00	57.784.674,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	151.341.840,00	151.341.840,00	100.000,00	PAD	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	75%	75%	64.382.763,00	46.762.654,00	18.139.647,00		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64.382.763,00	46.762.654,00	18.139.647,00		
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	50 Orang	50 Orang	64.382.763,00	46.762.654,00	18.139.647,00	PAD	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	79%	79%	3.001.491.850,00	3.454.873.250,00	3.180.379.075,34		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55%	55%	55%	2.513.763.850,00	2.967.145.250,00	2.841.367.850,00		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	776 Orang	776 Orang	918 Orang	2.494.763.850,00	2.948.145.250,00	2.822.697.796,00	PAD	
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	6 Unit	6 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	18.670.054,00	PAD	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	24%	24%	317.728.000,00	317.728.000,00	266.374.191,00		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	25 Lembaga	20 Lembaga	317.728.000,00	317.728.000,00	266.374.191,00	PAD	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerj	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	20.838.706,00		
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga	25 Perizinan	25 Perizinan	20 Perizinan	60.000.000,00	60.000.000,00	20.838.706,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi								
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	30.000.000,00	30.000.000,00	13.297.112,67		
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	60 Perusahaan	60 Perusahaan	60 Perusahaan	30.000.000,00	30.000.000,00	13.297.112,67	PAD	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154267000 Rupiah	154267000 Rupiah	154267000 Rupiah	80.000.000,00	80.000.000,00	38.501.215,67		
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	38.501.215,67	PAD	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	70%	70%	1.290.811.533,00	1.308.431.642,00	916.772.010,10		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	2000 orang	2000 orang	612.811.533,00	651.656.642,00	456.141.427,00		
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	92.686.435,00	PAD	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	60 Orang	110 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	114.117.843,00	PAD	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	10 Orang	23.824.990,00	62.670.099,00	26.550.466,00	PAD	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	75 Orang	75 Orang	40 Orang	333.986.543,00	333.986.543,00	222.786.683,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Perluasan Kesempatan Kerja								
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	1000 orang	1000 orang	533.000.000,00	533.000.000,00	383.281.643,10		
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	233.000.000,00	233.000.000,00	146.438.355,99	PAD	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	236.843.287,11	PAD	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	50 orang	50 orang	50 orang	145.000.000,00	123.775.000,00	77.348.940,00	PAD	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	15 Orang	10 Orang	100.000.000,00	78.775.000,00	50.324.865,00	PAD	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	15 Orang	10 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	27.024.075,00	PAD	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,60%	5,60%	5,60%	932.728.000,00	932.728.000,00	1.452.921.648,67		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 Perusahaan	818 Perusahaan	818 Perusahaan	327.105.756,00	327.105.756,00	1.157.865.844,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	43.995.252,00	43.995.252,00	20.040.032,00	PAD	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	283.110.504,00	283.110.504,00	1.137.825.812,00	PAD	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	60 persen	60 persen	60 persen	605.622.244,00	605.622.244,00	295.055.804,67		
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	74.650.504,00	74.650.504,00	32.775.529,00	PAD	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	50 Perkara	50 Perkara	27.002.114,00	27.002.114,00	13.724.014,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.845.254,00	43.845.254,00	19.950.775,00	PAD	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	460.124.372,00	460.124.372,00	228.605.486,67	PAD	
JUMLAH						22.504.715.366,00	22.958.096.766,00	21.167.582.270,72		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

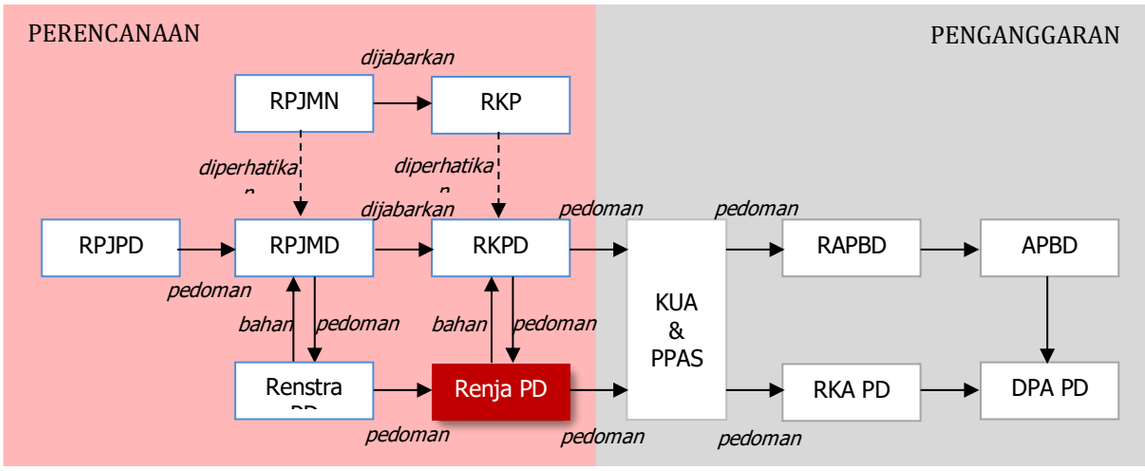

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2025. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan II tahun 2025 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2025 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	43,75%	43,75	143,75%	143,75
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	73,07%	73,07	173,07%	173,07
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	28 Dokumen	27 Dokumen	14 Dokumen	51,85	42 Dokumen	155,55
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25	7 Dokumen	175

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	200
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	83,33	11 Laporan	183,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	6 Dokumen	50	18 Dokumen	150
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	146	124 Orang/Bulan	302
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	100
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1	1	1	-	-	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Tanggapan Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	50	21 Laporan	150
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	300
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	480 Orang	480 Orang	225 Orang	46,875	705 Orang	176,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	200
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	3 Paket	300
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	3 Paket	100
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	50	6 Paket	225
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	66,66	5 Paket	166,66
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33,33	16 Laporan	133,33
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	22 Laporan	20 Laporan	7 Laporan	35	29 Laporan	145

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Konsultasi SKPD	SKPD							
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	8 Dokumen	160
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100	15 Unit	750
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit	5 Unit	5 Unit	100	16 Unit	1600
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	80
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 Laporan	36 Laporan	18 Laporan	50	54 Laporan	150
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	18 Laporan	150
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	200
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	27 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100	60 Unit	222,22

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	20 Unit	200
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	4 Unit	400
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	4 Unit	40
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	44,74%	44,74	144,74%	144,74
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program/Kegiatan	150 Kegiatan/ Kegiatan	98 Program/ Kegiatan	98 Program/Kegiatan	100	248 Program/Kegiatan	266,66 Program/Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	2 Dokumen	100
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	2 Dokumen	200
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100	6 Organisasi	200
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40	7 Dokumen	350

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	62 Lembaga	206,66
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100	50 Lembaga	200
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	9 Dokumen	900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kabupaten/Kota								
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00 Poin	28,73 Poin	11,44% Poin	16,87 Poin	147,46	45,6 Poin	325,714
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50	6 Kegiatan	150
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	24 Dokumen	1200
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100	10 Lembaga	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	228 Orang	100 Orang	100 Orang	100	328 Orang	328
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	-	250 Layanan	-	-	-	250 Layanan	-
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	27 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	100	53 Lembaga	203,84
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	3 Dokumen	25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1630 Orang	297 Orang	-	-	-	297 Orang	18,22
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60	8 Orang	266,66
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	19 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	22 Dokumen	550

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	4 Kegiatan	200
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	70 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	42,85	34 Perangkat Daerah	212,5
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	33 Dokumen	3300
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50	3 Dokumen	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	10 Kegiatan	58,82	27 Kegiatan	158,82
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	4 Lembaga	400
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	20%	20	120%	120
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	3 Kegiatan	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	3 Dokumen	150
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5 Dokumen	250
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	38,89%	38,89	138,89%	138,89
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	100	18 Jejaring	225

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	3 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100	5 Organisasi	71,42
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	28,75	8 Dokumen	400
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	7 Lembaga	77,77	16 Lembaga	228,57

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	85 Orang	10 Orang	10 Orang	100	95 Orang	23,75
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6 Dokumen	150
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80	10 Dokumen	250

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	10 Dokumen	166,66
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,02%	0,01%	0,02%	200	0,04%	333,33
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50	4 Kegiatan	100
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	150 Orang	-	-	-	150 Orang	-
2.08.07.2.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	40	2 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 Lembaga	7 Lembaga	-	-	-	7 Lembaga	100
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	-	65 Orang	-	-	-	65 Orang	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100	354 Kelurahan	354
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan	-	-	177 Orang	177 Orang	100	177 Orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		kapasitas							
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	48,57%	48,75	148,75%	148,75
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100	354 Kelurahan	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kabupaten/Kota								
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5 Dokumen	0
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	3 Lembaga	-
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	-	-	6 Dokumen	3 Dokumen	50	3 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa							
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50	2 Laporan	-
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	5 Laporan	-
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	-	-	40 Dokumen	20 Dokumen	50	20 Dokumen	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II tahun 2025 beberapa sub kegiatan sudah mencapai tingkat realisasi lebih dari 60% tetapi juga ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena sedang proses pelaksanaan di triwulan III dan triwulan IV.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG		**25.196.302.076**	**8.028.187.449**	**31,86%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.618.822.066**	**6.365.351.602**	**38,30%**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.735.400	3.057.400	2,51%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.235.200	-	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.289.000	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.744.000	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.530.000	-	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.080.000	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.271.200	2.652.400	62,10%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.586.000	405.000	15,66%
8	Penyelenggaraan Wilidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.683.559.920	5.148.845.854	40,59%
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.386.804.720	5.107.792.054	41,24%
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.984.000	40.970.000	14,08%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.348.800	83.800	6,21%
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.000	-	0,00%
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.023.200	-	0,00%
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	899.200	-	0,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	352.252.760	188.094.000	53,40%
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	178.752.760	37.400.000	20,92%
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	173.500.000	150.694.000	86,86%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.289.801.460	270.818.425	21,00%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor	6.999.950	2.212.000	31,60%
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.673.880	105.736.700	49,72%
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.621.250	13.003.725	34,56%
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.789.880	9.012.250	13,91%
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.729.926	9.776.600	36,58%
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.380.500	5.456.500	7,64%
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.882.704	18.900.000	3,56%
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	338.723.370	106.720.650	31,51%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.075.024	-	0,00%
25	Pengadaan Mebel	79.775.940	-	0,00%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.663.384	-	0,00%
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.635.700	-	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.957.880	473.715.856	42,56%
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.915.600	64.579.571	20,06%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.042.280	409.136.285	51,72%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.439.622	280.820.067	32,41%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	7.910.026	17,99%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.399.969	121.341.541	25,58%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.243.241	13.689.000	23,11%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.831.000	121.341.050	50,18%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.005.413	16.538.450	35,18%
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.375.000.000**	**288.295.200**	**20,97%**
8	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	170.590.400	27.150.000	15,92%
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	70.590.400	27.150.000	38,46%
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	-	0,00%
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	139.272.600	139,27%
37	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100.000.000	17.400.000	17,40%
10	Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupaten/Kota	1.104.409.600	121.872.600	11,04%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
39	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	979.409.600	109.438.000	11,17%
39	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	12.434.600	9,95%
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**1.345.111.720**	**185.782.990**	**13,81%**
11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	77.237.300	35,11%
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	77.237.300	35,11%
12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	633.611.720	107.115.690	16,91%
41	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	633.611.720	107.115.690	16,91%
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	491.500.000	1.430.000	0,29%
42	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.186.050	1.430.000	0,71%
43	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	149.313.950	8.333.000	5,58%
44	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	1.275.000	0,91%
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**554.828.200**	**137.517.750**	**24,79%**
14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	93.175.000	23,29%
45	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	93.175.000	46,59%
46	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	1.954.000	1,95%
47	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	13.994.000	13,99%
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.828.200	44.342.750	28,64%
48	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.828.200	44.342.750	28,64%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**282.396.670**	**53.200.000**	**18,84%**
16	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282.396.670	53.200.000	18,84%
49	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	86.277.990	34.100.000	39,52%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
50	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	196.118.680	19.100.000	9,74%
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**1.008.397.480**	**167.056.750**	**16,57%**
17	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	370.000.000	3.670.000	0,99%
51	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-	0,00%
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	3.670.000	1,05%
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	638.397.480	163.386.750	25,59%
53	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	258.397.480	113.336.750	43,86%
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.919.780	50.050.000	35,77%
55	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.080.220	16.739.997	15,21%
56	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	17.400.000	13,38%
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**340.000.000**	**14.950.000**	**4,40%**
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	14.950.000	4,40%
57	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	340.000.000	14.950.000	4,40%
8	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**741.547.730**	**57.900.000**	**7,81%**
20	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	741.547.730	57.900.000	7,81%
58	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	47.007.550	15.900.000	33,82%
59	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	23.987.300	-	0,00%
60	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	81.197.000	-	0,00%
61	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	42.886.730	-	0,00%
62	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	546.469.150	42.000.000	7,69%
9	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.930.198.210**	**758.133.157**	**25,87%**
21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.930.198.210	758.133.157	25,87%
63	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	151.026.360	7.425.000	4,92%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Masyarakat Hukum Adat			
64	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	144.926.650	-	0,00%
65	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.081.275.230	733.008.157	67,79%
66	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.988.610	17.700.000	17,53%
67	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.027.160	-	0,00%
68	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.351.954.200	154.878.750	11,46%
T o t a l Anggaran		**25.196.302.076**	**8.028.187.449**	**31,86%**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, dan 21 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebesar Rp 25.196.302.076. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.028.187.449. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 17.168.114.627.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026
TUJUAN RENSTRA													
Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarustamaan gender dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90	91	92	93	94	N/A	92,46	100	98,87	100	94
SASARAN RENSTRA													
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52	100
	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,15	51,30	49,78	48,76	50,42	51,34
	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	4	50	75	100	155	177	4	60	42,37	100	100	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	69,74	70,10	70,40	70,70	71,00	71,30	74,56	76,71	78,75	77,85	77,85	71,30
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	N/A	70,59	71,80	71,80	71,36	69,87
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	743	701	801	801	801	901	738,30	744,40	744,40	833,01	833,01	901

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026
Perlindungan Khusus Anak													
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak” dan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarustamaan gender dalam pembangunan” dan “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”.
b. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga” memiliki 4 indikator kinerja yaitu “Persentase penanganan perempuan korban kekerasan”, “Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan”, “Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan”, dan “Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga”.
c. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)”.
d. Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak” memiliki indikator kinerja “Peringkat Kota Layak Anak (KLA)”.
e. Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang” memiliki indikator kinerja “Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)”.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara internal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain terkait dengan optimalisasi sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta perlunya peningkatan kualitas sistem pelayanan yang responsif dan inklusif.
2. Secara eksternal, terdapat dinamika isu-isu sosial seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, serta perlunya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
3. Upaya pembenahan secara berkelanjutan terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan program pemberdayaan, perluasan jejaring kerja sama, serta pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis data dan teknologi informasi.
4. Keseluruhan langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai institusi yang tanggap, profesional, dan berkeadilan gender dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan dalam Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
2. Semakin kompleksnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan maupun anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga;
4. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang sudah dibentuk;
5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan TTG;
6. Lembaga kemasyarakatan yang ada belum berperan serta secara optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Meningkatkan peran serta perempuan dalam kesetaraan gender pada bidang politik dan ekonomi;
   2) Melaksanakan penanganan kasus secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi TPPO dan pembentukan JPPA di setiap kelurahan;
   3) Melaksanakan program kegiatan untuk percepatan penurunan stanting melalui KIE/promosi kesehatan reproduksi pada Calon pengantin (Catin);
   4) Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada pada masyarakat, DP3A mempunyai tantangan untuk tetap berkomitmen meningkatkan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui workshop dan pelatihan terhadap kelompok perempuan;
   5) Mengoptimalkan peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang.

b. Peluang
   1) DP3A mempunyai mitra kerja yang aktif dan cukup berpengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
   2) Mempunyai relawan-relawan tangguh yang tergabung dalam PPT pada setiap kecamatan di Kota Semarang dalam melaksanakan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   3) Komitmen dan integritas dari dari lemabaga kemasyarakatan yang ada dalam mendukung program kerja DP3A.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;

7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	16.618.822.066	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	14.084.290.743,34	
		DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%			DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%		
		DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	121.735.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	74.744.020,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	53.235.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	23.474.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.289.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.012.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.744.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.040.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.530.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.012.000,00	
	Koordinasi dan	DP3A	Jumlah	1 Dokumen	2.080.000	Koordinasi dan	DP3A	Jumlah	1		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.040.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.271.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.652.400,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.586.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	405.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	44.108.620,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	12.683.559.920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	10.824.625.748,04	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12.386.804.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	10.548.895.748,04	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	290.984.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	272.620.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.348.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.124.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	14 Laporan	2.023.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	14 Laporan	1.124.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	899.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	562.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	352.252.760	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	353.705.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	178.752.760	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	150.380.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	173.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	203.325.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3A Kota	Cakupan pelaksanaan	100%	1.289.801.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3A Kota	Cakupan pelaksanaan	100%	707.924.303,30	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semarang	administrasi umum				Semarang	administrasi umum			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.999.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.999.950,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	212.673.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	167.499.356,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	37.621.250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	37.621.250,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.789.880	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.783.360,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.729.926	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.270.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.380.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	530.882.704	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	173.214.227,30	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			SKPD					SKPD			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	338.723.370	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	232.536.160,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	192.075.024	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	133.872.090,00	
	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	79.775.940	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	39.104.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	97.663.384	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	72.659.770,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	14.635.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	22.108.320,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	12 Laporan	1.112.957.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	12 Laporan	1.172.571.070	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	321.915.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	207.732.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.042.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	964.839.070,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	866.439.622	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3A Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	817.548.512	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	474.399.969	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	377.412.210,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	DP3A Kota	Jumlah Peralatan dan	10 Unit	59.243.241	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	DP3A Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 Unit	46.810.821,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lainnya	Semarang	Mesin Lainnya yang Dipelihara			Lainnya	Semarang	Lainnya yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	241.831.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	288.392.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.005.413	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65.023.431,00	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.375.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	672.036.727,00	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program/Kegiatan	170.590.400	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program/Kegiatan	113.755.271,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	3 Dokumen	70.590.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	3 Dokumen	58.390.400,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	55.364.871,00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	100.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	102.500.000,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.500.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan	31 Lembaga	1.104.409.600	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan	31 Lembaga	547.781.456,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan yang mendapat pelatihan			Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan yang mendapat pelatihan			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	979.409.600	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	301.390.486,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	125.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	246.390.970,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44% Poin	1.345.111.720	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44% Poin	874.861.477,00	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan	4 Kegiatan	220.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan	4 Kegiatan	224.214.117,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota		kekerasan terhadap perempuan			Daerah Kabupaten/Kota		terhadap perempuan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	224.214.117,00	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	633.611.720	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	426.791.750,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	633.611.720	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	283.371.750,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	-	143.420.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	491.500.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	223.855.610,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	202.186.050	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	53.200.750,00	
						Peningkatan Kapasitas Sumber	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia	-	44.000.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	149.313.950	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	125.365.260,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	140.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.289.600,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	554.828.200	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	1.314.719.130,00	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	400.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	1.193.100.880,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Perangkat Daerah	200.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Perangkat Daerah	1.132.600.000,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	3 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	3 Dokumen	33.605.870,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kabupaten/Kota yang Tersedia					Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	26.895.010,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	154.828.200	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	121.618.250,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	154.828.200	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	121.618.250,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	282.396.670	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	209.769.098,00	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	282.396.670	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	209.769.098,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	86.277.990	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	75.671.500,00	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	196.118.680	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	134.097.598,00	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	1.008.397.480	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	1.264.596.873,00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	370.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	817.729.643,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	6.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	811.729.643,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	638.397.480	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	446.867.230,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	258.397.480	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	220.584.040,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	139.919.780	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	60.247.790,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	5 Dokumen	110.080.220	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	5 Dokumen	117.847.460,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	130.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	48.187.940,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Semarang	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	340.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Semarang	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	261.906.421,00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	340.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	150.166.421,00	
						Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Semarang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	45.700.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	340.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	104.466.421,00	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	86.720.000,00	
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Semarang	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	-	86.720.000,00	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	25.020.000,00	
						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi	Kota Semarang	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan	-	25.020.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		penanganan AMPK			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Semarang	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	741.547.730	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Semarang	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	685.006.791,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	741.547.730	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	685.006.791,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	1 Dokumen	47.007.550	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	1 Dokumen	37.650.050,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 Dokumen	23.987.300	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 Dokumen	10.669.600,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kota Semarang	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	177 Orang	81.197.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kota Semarang	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	177 Orang	32.996.191,00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	42.886.730	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	20.117.430,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	546.469.150	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	583.573.520,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Semarang	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	2.930.198.210	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Semarang	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	3.348.687.962,70	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	2.930.198.210	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	3.348.687.962,70	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan	2 Dokumen	151.026.360	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan	2 Dokumen	410.890.500,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	144.926.650	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	161.745.173,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan	6 Dokumen	1.081.275.230	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan	6 Dokumen	1.414.193.222,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Desa		pendapatan asli desa			Desa		pendapatan asli desa			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	100.988.610	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	21.722.179,00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.027.160	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	73.295.970,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	40 Dokumen	1.351.954.200	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	40 Dokumen	1.266.840.918,70	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak"

dengan indikator tujuan "Persentase implementasi pengarustamaan gender dalam pembangunan"

dan

"Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan"

dengan indikator tujuan "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan;
2. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
3. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
4. Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga;
5. Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
6. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
7. Peringkat Kota Layak Anak (KLA);
8. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarustamaan gender dalam pembangunan	Persen	100
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	93
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	Persen	100
	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	Persen	100
	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Persen	51,32
	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	Persen	84,74
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Poin	77,95
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,10
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Poin	801
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	Persen	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” dan indikator sasaran “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	16.618.822.066	16.618.822.066	14.084.290.743,34	PAD	DP3A Kota Semarang
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%				PAD	DP3A Kota Semarang
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%				PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	121.735.400	121.735.400	74.744.020,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	53.235.200	53.235.200	23.474.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.289.000	3.289.000	1.012.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.744.000	3.744.000	1.040.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.530.000	2.530.000	1.012.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000	2.080.000	1.040.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4.271.200	4.271.200	2.652.400,00	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.586.000	2.586.000	405.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.108.620,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	12.683.559.920	12.683.559.920	10.824.625.748,04	PAD & DAU	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	12.386.804.720	12.386.804.720	10.548.895.748,04	PAD & DAU	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	290.984.000	290.984.000	272.620.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.348.800	1.348.800	1.124.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	300.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	2.023.200	2.023.200	1.124.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	899.200	899.200	562.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber	100%	100%	100%	352.252.760	352.252.760	353.705.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		daya aparatur								
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	178.752.760	178.752.760	150.380.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	480 Orang	480 Orang	173.500.000	173.500.000	203.325.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	1.289.801.460	1.289.801.460	707.924.303,30	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.999.950	6.999.950	6.999.950,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	212.673.880	212.673.880	167.499.356,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	37.621.250	37.621.250	37.621.250,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	64.789.880	64.789.880		PAD	DP3A Kota

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						50.783.360,00		Semarang
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	26.729.926	26.729.926	15.270.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.380.500	71.380.500	24.000.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	530.882.704	530.882.704	173.214.227,30	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	338.723.370	338.723.370	232.536.160,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	192.075.024	192.075.024	133.872.090,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	79.775.940	79.775.940	39.104.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	97.663.384	97.663.384	72.659.770,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14.635.700	14.635.700	22.108.320,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	1.112.957.880	1.112.957.880	1.172.571.070	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	321.915.600	321.915.600	207.732.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	791.042.280	791.042.280	964.839.070,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	866.439.622	866.439.622	817.548.512	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	474.399.969	474.399.969	377.412.210,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	59.243.241	59.243.241	46.810.821,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	241.831.000	241.831.000	288.392.000,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	47.005.413	47.005.413	65.023.431,00	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA	Cakupan Pengarusutamaan	100%	100%	100%	1.375.000.000	1.375.000.000	672.036.727,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program/Kegiatan	98 Program/Kegiatan	98 Program/Kegiatan	170.590.400	170.590.400	113.755.271,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	70.590.400	70.590.400	58.390.400,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	55.364.871,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100.000.000	100.000.000	102.500.000,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	100.000.000	102.500.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	1.104.409.600	1.104.409.600	547.781.456,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	979.409.600	979.409.600	301.390.486,00	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	125.000.000	125.000.000	246.390.970,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44% Poin	11,44% Poin	11,44% Poin	1.345.111.720	1.345.111.720	874.861.477,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	220.000.000	220.000.000	224.214.117,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	220.000.000	220.000.000	224.214.117,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	633.611.720	633.611.720	426.791.750,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan korban kekerasan								
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	633.611.720	633.611.720	283.371.750,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	-	-	-			143.420.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	491.500.000	491.500.000	223.855.610,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	202.186.050	202.186.050	53.200.750,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	-			44.000.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	5 Orang	5 Orang	149.313.950	149.313.950	125.365.260,00	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000	140.000.000	1.289.600,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	554.828.200	554.828.200	1.314.719.130,00	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	400.000.000	400.000.000	1.193.100.880,00	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Perangkat Daerah	70 Perangkat Daerah	70 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000	1.132.600.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	33.605.870,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	26.895.010,00	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	154.828.200	154.828.200	121.618.250,00	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	154.828.200	154.828.200	121.618.250,00	PAD	Kota Semarang
2.08.05	PROGRAM	Cakupan pengelolaan	100%	100%	100%	282.396.670	282.396.670	209.769.098,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	sistem data gender dan anak								
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	282.396.670	282.396.670	209.769.098,00	PAD	Kota Semarang
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	86.277.990	86.277.990	75.671.500,00	PAD	Kota Semarang
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	196.118.680	196.118.680	134.097.598,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	1.008.397.480	1.008.397.480	1.264.596.873,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	370.000.000	370.000.000	817.729.643,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	20.000.000	20.000.000	6.000.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	350.000.000	350.000.000	811.729.643,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	638.397.480	638.397.480	446.867.230,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	258.397.480	258.397.480	220.584.040,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	139.919.780	139.919.780	60.247.790,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	110.080.220	110.080.220	117.847.460,00	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	130.000.000	130.000.000	48.187.940,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07	PROGRAM	Persentase anak korban kekerasan	0,01%	0,01%	0,01%	340.000.000	340.000.000	261.906.421,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	yang ditangani								
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	340.000.000	340.000.000	150.166.421,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	-	-			45.700.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	340.000.000	340.000.000	104.466.421,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-			86.720.000,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	-	-	-			86.720.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-			25.020.000,00	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	-	-	-			25.020.000,00	PAD	Kota Semarang
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	741.547.730	741.547.730	685.006.791,00	PAD & BANKEU	Kota Semarang
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	741.547.730	741.547.730	685.006.791,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	47.007.550	47.007.550	37.650.050,00	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.987.300	23.987.300	10.669.600,00	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	177 Orang	177 Orang	177 Orang	81.197.000	81.197.000	32.996.191,00	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.886.730	42.886.730	20.117.430,00	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	546.469.150	546.469.150	583.573.520,00	PAD	Kota Semarang
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	2.930.198.210	2.930.198.210	3.348.687.962,70	PAD & BANKEU	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	2.930.198.210	2.930.198.210	3.348.687.962,70	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	151.026.360	151.026.360	410.890.500,00	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	144.926.650	144.926.650	161.745.173,00	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.081.275.230	1.081.275.230	1.414.193.222,00	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.988.610	100.988.610	21.722.179,00	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.027.160	100.027.160	73.295.970,00	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim	Jumlah dokumen	40	40	40	1.351.954.200	1.351.954.200		PAD	Kota

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	Dokumen	Dokumen			1.266.840.918,70		Semarang
JUMLAH						25.196.302.076	25.196.302.076	22.808.575.223,04		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 juncto Permendagri Nomor 50 Tahun 2020. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanaftkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

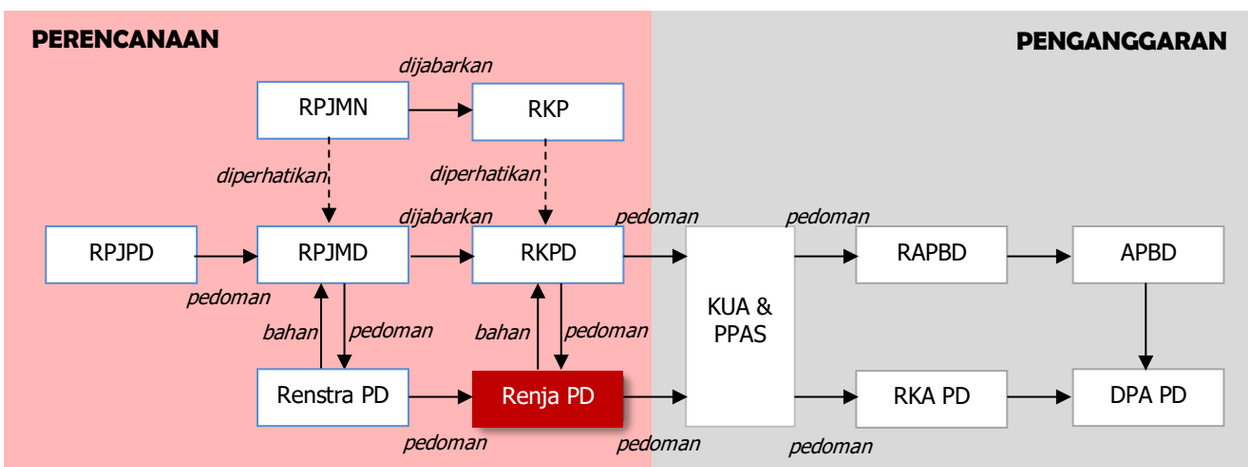

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2025 menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021- 2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

y. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Nomor 700.1.1.3/5/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	36 dokumen	21 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD	6 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	10 dokumen	6 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dokumen	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	10 dokumen	6 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	30 Jenis	18 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	20 Jenis	12 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	110 jenis	67 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	225 jenis	135 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45 jenis	30 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	15 jenis	9 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	1750 orang	1050 orang	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	500 kegiatan	300 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	20 jenis	100 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	15 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	1 unit	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	20 jenis	20 jenis	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistic	2 rapat	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal / Kapita / Tahun (100 %)	3056 Kkal / Kapita / Tahun (60 %)	NA	NA	NA	NA	NA
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	60%	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	5 buku	3 buku	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor HBKN	5 kali	3 kali	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor Satgas Harga Pangan	30 kali	18 kali	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	15 Pelatihan	8 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Teknis Pengembangan empon empon	50 pelatihan	30 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	30 kegiatan	18 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panga	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	80 lokasi	48 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan yang disusun	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	15 lokasi	9 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	80 laporan	48 laporan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	16 orang	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	50 lokasi	30 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Perkembangan Harga Pangan	120 laporan	72 laporan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM)	10 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	15 pelatihan	9 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Data Base Jaringan Distribusi Pangan	4 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembanga n dan Pembinaan Toko Tani Indoensia (TTIC)	100 lokasi	60 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	100 lokasi	60 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	15 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras Anjungan Terima Mandiri (ATM)	422.500 kg	253.500 kg	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 lokasi	10 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Lumbung Pangan	177 kelurahan	96 kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	177 lokasi	140 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	10 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	5 buku	3 buku	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	10 event	6 event	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi Pangan Lokal	105 kegiatan	63 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kampung Tematik Produktif	40 kegiatan	24 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rumah Pangan Lestari	80 pelatihan	5 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi (Intervensi Pangan Anak Harapan/IPAH)	1263 anak	963 anak	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rapat Teknis Pengembanga n Pangan Lokal	5 kegiatan	3 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	5 kegiatan	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1%	3,9%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	10 buku	4 buku	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	10 kelurahan	4 kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	10 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	83%	81,50	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	55 kegiatan	11 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	10 dokumen	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	33 kegiatan	3 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijianan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	150 kegiatan	10 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	5 dokuemn	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	10 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD- UK)	120 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	240 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	20 kegiatan	20 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	1 orang	1 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	408 lokasi	216 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	NA	NA
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	NA	NA
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	50%	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	NA	8 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	66,67	NA	NA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	4 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	NA	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	NA	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	NA	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	4 dokumen	4 laporan	4 dokumen	100	NA	NA
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	NA	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	NA	NA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	48 orang / bulan	48 orang / bulan	48 orang / bulan	100	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	100	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	NA	17 dokumen	12 laporan	6 dokumen	50	NA	NA
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	1 paket	1 paket	1 paket	100	NA	NA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	1 paket	1 paket	1 paket	100	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	1 paket	1 paket	1 paket	100	NA	NA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	1 paket	1 paket	1 paket	100	NA	NA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA	1 paket	1 paket	1 paket	100	NA	NA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	NA	NA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	NA	NA
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	NA	NA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	NA	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	24 unit	24 unit	12 unit	50	NA	NA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	25 unit	25 unit	12 unit	50	NA	NA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA	NA
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA	NA
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA	NA
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	NA	3057 kkal/kapita /tahun	3058 kkal/kapita/tahun	3057 kkal/kapita/ tahun	99,96	NA	NA
		Presentase Cakupan Distribusi	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pasokan dan Harga Pangan								
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	NA	10 laporan	10 laporan	5 laporan	50	NA	NA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50	NA	NA
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA	NA
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	NA	100 keluarga	100 keluarga	50 keluarga	50	NA	NA
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	NA	NA
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	NA	44 unit	177 unit	177 unit	100	NA	NA
	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	NA	6 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	NA	NA
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Wilayah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	NA	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50	NA	NA
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	NA	28 dokumen	12 dokumen	6 laporan	50	NA	NA
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	NA	NA
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	NA	100%	100%	50%	50	NA	NA
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	97,5	100,5 ton	32,2 ton	32	NA	NA
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	NA	10 ton	10 ton	0 ton	0	NA	NA
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Angka Kecukupan Energi	NA	88%	88%	88%	100	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	NA	4 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67	NA	NA
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	4 dokumen	2 laporan	1 dokumen	50	NA	NA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	NA	4 dokumen	2 laporan	1 dokumen	50	NA	NA
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	NA	0%	3%	0%	100	NA	NA
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	NA	2 buku	2 buku	0 buku	0	NA	NA
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	NA	2 buku	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	NA	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	100	NA	NA
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan	NA	5 laporan	4 laporan	2 laporan	50	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota							
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	NA	NA	1 dokumen	0 dokumen	0	NA	NA
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	NA	81%	82%	82%	100	NA	NA
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	NA	100	100%	50%	50	NA	NA
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	NA	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	NA	NA
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	NA	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100	NA	NA
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	NA	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67	NA	NA
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas	NA	45dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dan mutu pangan segar asal tumbuhan	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
- Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
- Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan

3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- Ketersediaan Energi / Kapita
- Presentase Cakupan Distribusi
- Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang

4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan

5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) Adalah

a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
l. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
o. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
p. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
q. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
r. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
s. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
t. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Ada beberapa Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
i. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
j. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
k. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
l. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
m. Pemantauan Stok Pangan
n. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
o. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
p. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
q. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
r. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
s. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
t. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
u. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
v. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

x. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
y. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
z. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
aa. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
bb. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.926.060.352	4.324.682.787	31,05
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.009.200	2.984.250	2,69
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.762.000	402.750	0,79
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.475.900	0	0,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.700.900	0	0,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.475.900	722.000	48,92
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.700.900	0	0,00
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.893.600	1.859.500	47,76
01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	0,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.634.983.320	3.735.057.643	43,25
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.404.007.120	3.632.926.643	43,23
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.956.000	101.840.000	44,48
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	0	0,00
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.347.800	291.000	21,59
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	0	0,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.002.723	82.190.676	24,91

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.574	4.366.185	87,33
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.108.343	0	0,00
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.047.474	26.573.740	61,73
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.108.399	21.771.075	74,79
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.276.213	2.067.100	18,33
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	3.000.000	52,63
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.161.360	11.329.000	15,07
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.694.500	13.083.576	41,28
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.906.860	0	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	943.913.360	400.477.341	42,43
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.290.000	57.007.688	30,44
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.623.360	343.469.653	45,40
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.906.151.749	103.972.877	2,66
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	10.675.650	29,69
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.082.000	85.992.227	21,77
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.864.749	7.305.000	14,95
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.426.250.000	0	0,00
02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	25.000.000	23.198.375	93
2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	23.198.375	93
01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	25.000.000	23.198.375	92,79
03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.109.724.290	740.329.900	23,81
2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.160.422.770	363.104.300	44,67
01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	73.619.410	64.142.500	87,13

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	8.200.000	6.475.000	78,96
01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	5.995.000	745.000	12,43
01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	113.800.000	22.912.400	20,13
01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	47.460.290	41.676.250	87,81
01.010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	706.102.540	157.887.400	22,36
01.011	Pemantauan Stok Pangan	2.248.120	1.650.000	73,39
01.013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	5.376.400	2.000.000	37,20
01.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	13.275.156	3.453.750	26,02
01.015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	143.500.970	60.685.500	42,29
01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	40.844.884	1.476.500	3,61
2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.434.416.700	231.470.000	17,24
02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.306.500.000	207.690.000	15,90
02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	127.916.700	23.780.000	18,59
2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	514.884.820	145.755.600	17,56
04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan	128.507.950	8.650.000	6,73
04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	87.270.170	130.600	0,15
04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	299.106.700	136.975.000	45,79
04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	177.480.140	30.607.000	16,71
2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	44.259.960	805.000	1,61
01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	44.259.960	805.000	1,61
2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.220.180	29.802.000	0,00
02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	62.375.790	1.500.000	0,00
02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	70.844.390	28.302.000	39,95
05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	891.949.887	396.488.610	44,45
2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	891.949.887	396.488.610	55,83

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
02.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	110.471.413	72.415.840	65,55
02.06	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	75.913.640	42.188.800	55,57
02.07	Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	571.359.254	189.183.970	33,11
02.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	134.205.580	92.700.000	69,07
JUMLAH		18.130.214.669	5.515.306.672	30,41

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada TW II Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pangan, 5 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebesar Rp 18.136.954.709 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.515.306.672 atau sebesar 30,41%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.233.764.196 atau sebesar 7,32 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran					91,80	Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran				
	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	86,67	86,68	86,69	86,70	NA	NA	91,31	91,31	92,74		91,32
Sasaran :														
Meningkatnya Ketersediandan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	252,05	252,806	253,563	254,318	255,074	255,83		367,13	409,01		421,95		255,074
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	80	80,5	81	85,62	85,7	85,8		84,60	84,61		87,45		84,7
	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	88,9	91,85	91,86	91,87		91,80	91,80		92,19		91,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang”. Pada Tahun 2025, realisasi TW II indikator ini adalah sebesar 92,74% dari target sebesar 86,69% (capaian). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} aiXij$$

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan, dengan Indikator “Persentase Ketersediaan Pangan”. Pada tahun 2025, realisasi TW II indikator ini adalah sebesar 421,95% dari target sebesar 255,074% (capaian 160,3%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan dan Cadangan Pangan Utama Kota (Beras)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Utama Kota (Beras)}} \times 100\%$$

Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, dengan Indikator 1 “Tingkat Keamanan Pangan”. Pada tahun 2025, realisasi TW II indikator ini adalah sebesar 87,45% dari target sebesar 85,7% (capaian 104,46%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standart yang berlaku dalam kurun waktu tertentu

---

Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

X 100%

Dan indikator 2 “Pola Pangan Harapan”. Pada tahun 2025, realisasi TW II indikator ini adalah sebesar 92,19% dari target sebesar 91,87% (capaian 104,46%), dengan perhitungan sebagai berikut :

% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat menyebabkan gagal panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan.

Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi produksi pangan.

Sistem logistik pangan yang belum memadai dapat menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman masih belum optimal.

Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tantangan

Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan

Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu

Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang kemananan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar

Peluang

Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;

Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;

Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional.

Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarluakan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai berikut:

Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi

Inovasi yang mengusung tagline "Kenyang dan Sehat dari Kampung Sendiri", Kentang Padi menjadi salah satu upaya mewujudkan Kelurahan Mandiri Pangan. Dirintis melalui kajian pada tahun 2023, diharapkan pada tahun 2024 telah dilakukan intervensi pada Kelurahan percontohan dengan melibatkan aktor Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Swasta, Masyarakat dan Media) serta melibatkan seluruh OPD pendukung di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman

Merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berbentuk penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai

kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline “50-ewu iso blonjo werno-werno”, PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.

Lumbung Pangan Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penguatan jaringan distribusi pangan melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Lumpangsemar adalah sebuah jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi terutama pada bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Lumpangsemar berkolaborasi dengan beberapa offtaker (BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan Pelaku Usaha Pangan Lainnya.

Promosi Pangan Lokal Enak & Bergizi

Inovasi merupakan metode promosi pangan lokal yang dilaksanakan secara komprehensif dari tahap pembuatan bahan dasar, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran dilaksanakan dengan semangat kolaboratif multihelix yang ada di Kota Semarang sebagai upaya diversifikasi pangan agar tidak bergantung beras dalam pemenuhan karbohidratnya. Karena “Kenyang Tidak Harus Nasi”. Stakeholder yang terlibat antara lain semua OPD, Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, PHRI, PPJI, ICA, Organisasi Profesi. Pada puncaknya diadakan even FESTIVAL PENDAMPING BERAS Tingkat Kota Semarang dan akan ditingkatkan menjadi even Tahunan Tingkat Nasional yang akan dijadikan sarana memasyarakatkan konsumsi pangan non beras non terigu dimana semua peserta dari kolaboarsi pentahelix tersebut menyajikan olahan pangan lokal dan membagi gratis kepada Masyarakat sebagai stimulant Cinta Pangan Lokal.

Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang

Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.

Pemantauan Kualitas Pangan Dengan Melibatkan Warga

Sistem pemantauan kualitas pangan yang mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK) untuk melakukan pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan mobil laboratorium untuk sarana pengujian mutu dan kulaitas pangan baik pangan segar maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan d an Pelaporan Kinerja KPD	100%		
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Presentase Kinerja A dministrasi dan elaporan Keuangan KPD	100%		
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Presentase Pemenuhan S arana dan Prasarana paratur	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	111.009.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen encana Kerja dan encana Anggaran SKPD	9 dokumen	111.009.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.762.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen erencanaan Perangkat aerah	3 dokumen	50.762.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen erubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen erubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi K inerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil P enyelenggaraan Walidata endukung Statistik S ektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	7.422.564.044	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen P elaporan Keuangan S KPD	4 dokumen	7.422.564.044	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	7.191.587.844.91	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	7.191.587.844.91	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.956.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil P enyediaan Administrasi elaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.956.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	umlah Laporan euangan Akhir Tahun KPD dan Laporan Hasil oordinasi Penyusunan aporan Keuangan Akhir ahun SKPD	1 laporan	223.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	umlah Laporan euangan Bulanan/ riwulanan/ Semesteran KPD dan Laporan oordinasi Penyusunan aporan Keuangan	12 laporan	1.347.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keuangan Bulanan/Triwulan an/S emesteran SKPD					ulanan/Triwulanan/S em steran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokume n	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	umlah Dokumen elaporan dan Analisis rognosis Realisasi nggaran	1 dokumen	448.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	238.256.122	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	resentase Tersedianya ebutuhan Rumah angga SKPD	100%	238.256.122	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.574	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	umlah Paket Komponen nstalasi istrik/Penerangan angunan Kantor yang isediakan	1 paket	4.999.574	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.308.981	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	umlah Paket Peralatan an Perlengkapan Kantor ang Disediakan	1 paket	1.308.981	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	36.525.225	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	umlah Paket Peralatan umah Tangga yang isediakan	1 paket	36.525.225	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	29.108.399	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	umlah Paket Bahan ogistik Kantor yang isediakan	1 paket	29.108.399	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.276.213	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	umlah Paket Barang etakan dan Penggandaan ang Disediakan	1 paket	11.276.213	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 dokumen	5.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	umlah Dokumen Bahan acaan dan Peraturan erundang-	1 dokumen	5.700.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Undangan yang Disediakan					Undangan ang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	umlah Laporan Fasilitasi unjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	57.029.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	umlah Laporan enyelenggaraan Rapat oordinasi dan Konsultasi KPD	12 laporan	57.029.500	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	17.146.870	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	umlah Dokumen ukungan Pelaksanaan istem Pemerintahan erbasis Elektronik pada KPD	1 dokumen	17.146.870	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	970.313.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	resentase Tersedianya ebutuhan Rumah angga SKPD	100%	970.313.360	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	206.490.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	umlah Laporan enyediaan Jasa elayanan Umum Kantor ang Disediakan	12 laporan	206.490.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	763.823.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	umlah Laporan enyediaan Jasa omunikasi, Sumber aya Air dan Listrik yang isediakan	12 laporan	763.823.360	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	765.375.774	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	resentase Tersedianya ebutuhan Rumah angga SKPD	100%	765.375.774	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	umlah Kendaraan erorangan Dinas atau	1 unit	35.955.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		endaraan Dinas Jabatan ang Dipelihara dan ibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	395.082.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	umlah Kendaraan Dinas perasional atau apangan yang Dipelihara an dibayarkan Pajak dan erizinannya	24 unit	395.082.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	48.864.749	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang ipelihara	25 unit	48.864.749	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	1 unit	285.474.025	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	umlah Gedung Kantor an Bangunan Lainnya ang ipelihara/Direhabilitasi	1 unit	285.474.025	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	akupan Wilayah ayanan Kemandirian angan	100%		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung	1 unit		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Kota Semarang	umlah infrastruktur ergudangan dan sarana endukung lainnya	1 unit		
	Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		ntuk penyimpanan adangan pangan			
	Penyediaan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur	1 unit	25.000.000	Penyediaan Infrastruktur	Kota Semarang	umlah Infrastruktur endukung	1 unit	25.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Kemandirian angan yang Tersedia			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Semarang	etersediaan Energi /3(apita	3058 Kkal / Kapita / Tahun		
			Presentase Cakupan Distribusi	100%				resentase Cakupan istribusi	100%		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%				erlaksananya Kegiatan emberdayaan Masyarakat Dalam angka Pemenuhan onsumsi Pangan yang eragam dan Bergizi eimbang	100%		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1.200.422.730	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	resentase ersalurkannya Pangan okok dan Pangan ainnya		1.200.422.730	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	73.619.410	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	angan Berbasis Sumber aya Lokal yang Tersedia	10 laporan	73.619.410	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	8.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, S inkronisasi dan P elaksanaan Distribusi P angan Pokok dan Pangan l ainnya	2 laporan	8.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	5.995.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	umlah Kelembagaan saha Pangan Masyarakat an Toko Tani Indonesia ang Dikembangkan	1 unit	5.995.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	213.800.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan etahanan Pangan eluarga	100 keluarga	213.800.000	
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	47.460.290	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka		umlah laporan engembangan usaha engolahan pangan erbasis sumber daya okal	1 laporan	47.460.290	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	646.102.540	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	umlah Kelembagaan istribusi Pangan	177 unit	646.102.540	
	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	2.248.120	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	nformasi Stok Pangan	12 dokumen	2.248.120	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.376.400	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	nformasi Prognosa Neraca angan Wilayah abupaten/Kota	1 dokumen	5.376.400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	4 laporan	13.275.156	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	umlah koordinasi dan inkronisasi pemantauan tok pangan, pasokan angan dan harga pangan okok Strategis	4 laporan	13.275.156	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	143.500.970	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	nformasi Harga dan asokan Pangan	12 dokumen	143.500.970	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	40.844.844	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	nformasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	40.844.844	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.434.416.700	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	enguatan Cadangan angan	100%	1.434.416.700	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	umlah Cadangan Pangan emerintah abupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	127.916.700	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	umlah Cadangan Pangan emerintah abupaten/Kota yang erpelihara	10 ton	127.916.700	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88%	1.221.183.840	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	ngka Kecukupan Energi	88%	1.221.183.840	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	478.507.950	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	arget Konsumsi Pangan er Kapita Per Tahun	3 dokumen	478.507.950	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	87.270.170	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	umlah Pemberdayaan elompok Masyarakat alam Penganekaragaman onsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	87.270.170	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	2 laporan	655.405.720	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	Kota Semarang	umlah Koordinasi dan inkronisasi Pemantauan an	2 laporan	655.405.720	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Evaluasi Konsumsi er Kapita Per Tahun			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	resentase Daerah entan Rawan Panga	3%		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	ersedianya Peta atahanan dan erentanan Pangan	2 buku		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	44.259.960	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	eta dan Analisis etahanan dan erentanan Pangan yang imutahirkan	1 dokumen	44.259.960	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	313.220.180	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	ertanganinya erawanan Pangan	2 kelurahan	313.220.180	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	62.375.790	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	umlah koordinasi dan inkronisasi penanganan erawanan pangan dan izi kabupaten/kota	4 laporan	62.375.790	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	250.844.390	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	umlah Intervensi ewaspadaan Pangan dan izi	1 dokumen	250.844.390	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	resentase Pangan Segar sal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan angan	82%		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	1.027.749.887	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	erlaksananya engawasan Keamanan angan Sega	100%	1.027.749.887	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	206.271.413	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	umlah Rekomendasi eamanan Pangan Segar sal Tumbuhan Daerah abupaten/Kota	12 dokumen	206.271.413	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	75.913.640	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	umlah Rekomendasi erizinan keamanan angan segar asal umbuhan	100 dokumen	75.913.640	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	571.359.254	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	umlah sarana pengujian eamanan dan mutu angan segar asal umbuhan daerah abupaten/kota	3 dokumen	571.359.254	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	174.205.580	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	umlah dokumen enguatan kelembagaan engawas keamanan dan mutu pangan segar asal umbuhan	4 dokumen	174.205.580	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.
Prioritas 9.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah"

dengan indikator tujuan "Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Ketersediaan Pangan".
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
   Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat Keamanan Pangan" dan "Pola Pangan Harapan"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	-	86,69
Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	%	421,95
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	%	87,45
	Pola Pangan Harapan	skor	92,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.355.453.433	13.926.060.352	14.355.453.433	14.355.453.433	13.926.060.352	APBD	
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD							APBD	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							APBD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	111.009.200	111.009.200	111.009.200	111.009.200	111.009.200	APBD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.762.000	50.762.000	50.762.000	50.762.000	50.762.000	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.475.900	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.475.900	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	3.893.600	3.893.600	3.893.600	3.893.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	8.775.851.200	8.634.983.320	8.775.851.200	8.775.851.200	8.634.983.320	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	8.544.875.000	8.404.007.120	8.544.875.000	8.544.875.000	8.404.007.120	APBD	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.956.000	228.956.000	228.956.000	228.956.000	228.956.000	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800	APBD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600	APBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	704.603.991	330.002.723	704.603.991	704.603.991	330.002.723	APBD	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an	1 paket	4.999.574	4.999.574	4.999.574	4.999.574	4.999.574	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	28.108.343	28.108.343	28.108.343	28.108.343	28.108.343	APBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	43.047.474	43.047.474	43.047.474	43.047.474	43.047.474	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.997.208	29.108.399	49.997.208	49.997.208	29.108.399	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.007.174	11.276.213	31.007.174	31.007.174	11.276.213	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	APBD	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	75.161.360	75.161.360	75.161.360	75.161.360	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	365.675.998	31.694.500	365.675.998	365.675.998	31.694.500	APBD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	100.906.860	100.906.860	100.906.860	100.906.860	100.906.860	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	803.045.480	943.913.360	803.045.480	803.045.480	943.913.360	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	615.755.480	187.290.000	615.755.480	615.755.480	187.290.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.290.000	756.623.360	187.290.000	187.290.000	756.623.360	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	3.960.943.562	3.906.151.749	3.960.943.562	3.960.943.562	3.906.151.749	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.603.603	35.955.000	39.603.603	39.603.603	35.955.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	445.225.210	395.082.000	445.225.210	445.225.210	395.082.000	APBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	48.864.749	48.864.749	48.864.749	48.864.749	48.864.749	APBD	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.427.250.000	3.426.250.000	3.427.250.000	3.427.250.000	3.426.250.000	APBD	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.137.360.370	3.109.724.290	4.137.360.370	4.137.360.370	3.109.724.290	APBD	
		Presentase Cakupan Distribusi	100%						APBD	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%						APBD	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1.399.365.350	1.160.422.770	1.399.365.350	1.399.365.350	1.160.422.770	APBD	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	106.409.600	73.619.410	106.409.600	106.409.600	73.619.410	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	12.300.000	8.200.000	12.300.000	12.300.000	8.200.000	APBD	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	14.911.120	5.995.000	14.911.120	14.911.120	5.995.000	APBD	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	100 keluarga	120.800.000	113.800.000	120.800.000	120.800.000	113.800.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Ketahanan Pangan Keluarga								
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	124.017.760	47.460.290	124.017.760	124.017.760	47.460.290	APBD	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	785.279.500	706.102.540	785.279.500	785.279.500	706.102.540	APBD	
	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	10.000.000	2.248.120	10.000.000	10.000.000	2.248.120	APBD	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	5.376.400	15.000.000	15.000.000	5.376.400	APBD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	16.500.000	13.275.156	16.500.000	16.500.000	13.275.156	APBD	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	174.147.370	143.500.970	174.147.370	174.147.370	143.500.970	APBD	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	20.000.000	40.844.884	20.000.000	20.000.000	40.844.884	APBD	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.441.500.000	1.434.416.700	1.441.500.000	1.441.500.000	1.434.416.700	APBD	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	1.306.500	1.306.500.000	1.306.500.000	1.306.500	APBD	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	135.000.000	127.916.700	135.000.000	135.000.000	127.916.700	APBD	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Angka Kecukupan Energi	88%	1.296.495.020	514.884.820	1.296.495.020	1.296.495.020	514.884.820	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	874.249.850	128.507.950	874.249.850	874.249.850	128.507.950	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	91.645.170	87.270.170	91.645.170	91.645.170	87.270.170	APBD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 laporan	330.600.000	299.106.700	330.600.000	330.600.000	299.106.700	APBD	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	272.282.200	177.480.140	272.282.200	272.282.200	177.480.140	APBD	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	50.000.000	44.259.960	50.000.000	50.000.000	44.259.960	APBD	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	50.000.000	44.259.960	50.000.000	50.000.000	44.259.960	APBD	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	222.282.200	133.220.180	222.282.200	222.282.200	133.220.180	APBD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	75.000.000	62.375.790	75.000.000	75.000.000	62.375.790	APBD	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	147.282.200	70.844.390	147.282.200	147.282.200	70.844.390	APBD	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi	82%	724.545.625	891.949.887	724.545.625	724.545.625	891.949.887	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan								
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	724.545.625	891.949.887	724.545.625	724.545.625	891.949.887	APBD	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	314.365.311	110.471.413	314.365.311	314.365.311	110.471.413	APBD	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	100.000.000	75.913.640	100.000.000	100.000.000	75.913.640	APBD	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	156.680.314	571.359.254	156.680.314	156.680.314	571.359.254	APBD	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	153.500.000	134.205.580	153.500.000	153.500.000	134.205.580	APBD	
JUMLAH								18.136.954.709		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan.

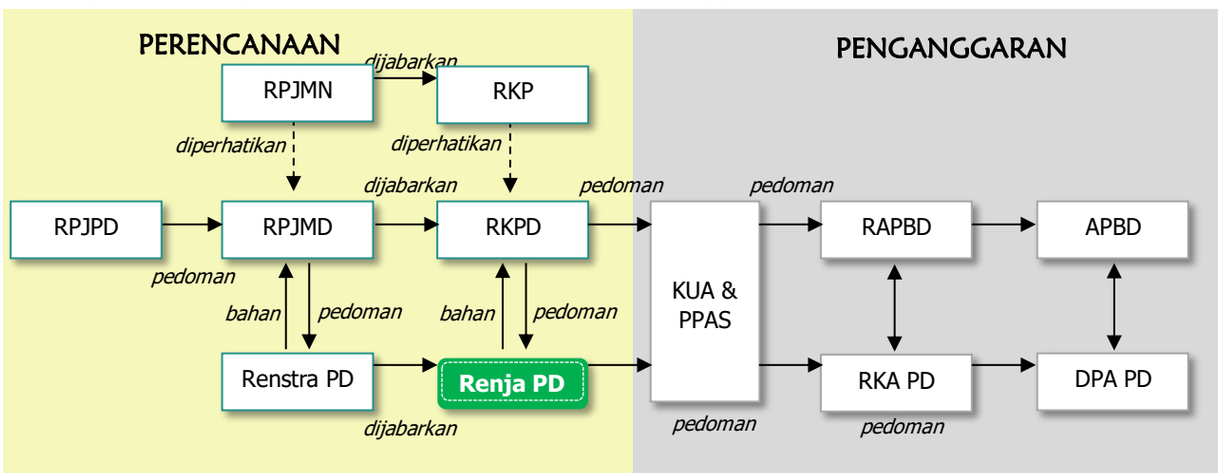

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Tahun 2025, yang berpedoman pada Perubahan PRKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem Pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2025 triwulan II.

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103).

w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
y. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/I/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja perubahan tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada PRKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian target Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 hingga Triwulan II terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00	9 dokumen	27 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	3 dokumen	8 dokumen	53,33
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		dokumen DPA-SKPD								
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00	5 laporan	15 laporan	60,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	12 dokumen	60,00
		Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 orang/bln	115 orang/bln	115 orang/bln	1115 orang/bln	100,00	100 orang/bln	100 orang/bln	86,95

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD								
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100,00	22 paket	34 paket	113,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100,00	6 paket	14 paket	35,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100,00	3 paket	7 paket	70,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100,00	3 paket	7 paket	70,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	30 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	8 dokumen	15 dokumen	50,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	3 unit	3 unit	100,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	200 unit	200 unit	200 unit	100,00	310 unit	310 unit	100,00
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100,00	16 unit	48 unit	60,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1000 unit	214 unit	214 unit	214 unit	100,00	200 unit	628 unit	62,80
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	30 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	10 unit	16 unit	53,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi								
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200,00	2 dokumen	5 dokumen	62,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66 %	57,00 %	59,00 %	78,07 %	132,32	62,00	62,00 %	93,94
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	85,00 %	87,00 %	86,15 %	99,02	89,00 %	89,00 %	95,69

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50 Ha	10 Ha	20 Ha	24,25 Ha	121,25	30 Ha	30 Ha	60,00
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	25,00 %	5,90 %	2,00 %	22 %	1.100	2,00 %	22 %	88,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	750 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	203 perusahaan	135,33	150 perusahaan	450 perusahaan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai	95 persen	45 persen	65 persen	45 persen	69,23	75 persen	45 persen	60,00
		Emisi CO_2	9749288.85 Kt Co2	4197900,29 Kt Co2	7625348,23 Kt Co2	5281980 Kt Co2	69,27	8274362,08 Kt Co2	8274362,08 Kt Co2	84,87
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	45 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100,00	9 dokumen	41 dokumen	91,11
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas	60 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100,00	12 dokumen	39 dokumen	65,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan								
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	100,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	30 laporan	4 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00	8 laporan	17 laporan	56,67

ode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terkonservasi	90 Ha	50 Ha	60 Ha	77,67 Ha	129,45	70 Ha	70 Ha	77,78
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	2 dokumen	10 dokumen	62,50
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	15 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	9 jenis	60,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	1 dokumen	7 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	10 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100,00	1 unit	7 unit	70,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	7,9 Ha	4 Ha	7,9 Ha	7,9 Ha	100,00	7,9 Ha	7,9 Ha	100,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Brbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	62 persen	54,5 persen	56 persen	53,7 persen	95,89	56 persen	58 persen	93,55
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	29,00 perusahaan	58,00	50,00 perusahaan	50 perusahaan	100,00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	1 dokumen	7 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik								
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	150 laporan	20 laporan	50 laporan	50 laporan	100,00	40 laporan	40 laporan	73,33
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	5 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	2 jenis	40,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya								
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86,00 persen	86,08 persen	85,40 persen	88,23 persen	103,31	85,60 persen	85,60 persen	99,53
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	150 dokumen	25 dokumen	60 dokumen	54 dokumen	90,00	40 dokumen	119 dokumen	79,33
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	120 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00	100 laporan	104 laporan	86,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58 persen	48 persen	50 persen	58 persen	116,00	53 persen	53 persen	91,38
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	9 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	135 lembaga	160 lembaga	160 lembaga	100,00	200 lembaga	200 lembaga	80,00
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	13 persen	16,91 persen	11,50 persen	17,28 persen	150,26	12,00	12,00	92,30
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	250 entitas	50 entitas	60 entitas	60 entitas	100,00	60 entitas	170 entitas	68,00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	38 kasus	60 kasus	64 kasus	106,67	50 kasus	50 kasus	83,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	100,00	1 pengaduan	3 pengaduan	60,00
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melaui pengadilan	5 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	100,00	1 pengaduan	3 pengaduan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	92,00 persen	90,50 persen	91,00 persen	91,00 persen	100,00	91,50 persen	91,50 persen	99,45
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32 persen	26,04 persen	27 persen	27,10 persen	99,63	28,00 persen	28,00 persen	87,50
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69 persen	73,31 persen	72 persen	72,10 persen	99,86	73,31 persen	73,31 persen	93,75
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	50 kelompok	25 kelompok	27 kelompok	27 kelompok	100,00	30 kelompok	30 kelompok	60,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk	50 dokumen	10 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100,00	3 dokumen	35 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada								
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/tpst/spa Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	100 unit	20 unit	40 unit	40 unit	100,00	20 unit	80 unit	80,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	60,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui penangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 ton	293 ton	363 ton	363 ton	100,00	363 ton	363 ton	90,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00	6 laporan	14 laporan	70,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	150 dokumen	30 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100,00	50 dokumen	130 dokumen	86,60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan 10 program, 17 Kegiatan dan 55 sub kegiatan. Dari 10 program tersebut terdapat 9 indikator program yang belum mencapai target, sementara dari 17 kegiatan terdapat 14 indikator yang belum mencapai target dan 1 indikator dengan realisasi rendah. Sedangkan dari 55 sub kegiatan diperoleh data 6 indikator realsiasi rendah dan 28 indikator belum mencapai target. Adapun berikut hasil evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Capaian terhadap indikator kinerja utama
   Indikator kinerja utama menggambarkan kinerja yang termuat di dalam dokumen perencanaan strategis yang mampu menjawab permasalahan dan isu daerah terhadap perwujudan visi dan misi Pembangunan. Capaian indikator kinerja utama sampai dengan triwulan II pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025		Capaian s.d Triwulan II
			Target	Realisasi s.d Tiwulan II	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai indeks	64,89	59,41	91,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data diatas, indikator indeks kualitas lingkungan hidup termasuk dalam kategori tinggi, meskipun indikator yang diukur masih menggunakan data kinerja tahun 2024 dikarenakan pengukuran dan publikasinya dilakukan satu kali setiap tahun dan publikasi hasilnya pada periode tahun setelahnya.

2) Capaian terhadap indikator kinerja daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian s.d Triwulan II
			Target	Realisasi s.d Tiwulan II	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54	33,62	92,01
2.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30	28,01	93,37
Urusan Lingkungan Hidup					
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	64,89	59,41	91,55
a.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	57,71	45,56	78,95
b.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	82,63	86,90	105,17

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian s.d Triwulan II
			Target	Realisasi s.d Tiwulan II	
c.	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	44,43	32,35	72,81
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota				
a.	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	30	28,01	93,37
b.	Persentase penanganan timbulan sampah	%	70	71,91	97,27
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,80	82,50	96,15

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Indikator kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kota Semarang adalah indeks kualitas lingkungan hidup, yang menjadi salah satu indikator tujuan pembangunan strategis Pemerintah Kota Semarang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 mengalami penurunan kinerjanya sebesar 59,41 atau 5,14 % dibandingkan IKLH pada tahun 2023 sebesar 64,55. Capaian ini disumbangkan oleh peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

IKA mengalami penurunan menjadi 45,56 di tahun 2024 dari tahun 2023 yang sebesar 57,31. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 86,90 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,23. Sedangkan dengan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami penurunan menjadi 32,35 di tahun 2024 dari angka 44,29 di tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder peduli lingkungan.

3) Capaian terhadap indikator program

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Capaian s/d Triwulan II
				Target	Realisasi s/d Tiwulan II	
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	50	50
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	50	50
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	64	73,63	115
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	91	65,93	72,45
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	40	53,61	134
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2	5,98	299
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragama n hayati (kehati) di Kota Semarang	%	100	50	50

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Capaian s/d Triwulan II
				Target	Realisasi s/d Tiwulan II	
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	60	100	166
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,80	82,50	96,15
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundangundangan	%	100	50	50
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	56	53,12	94,86
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	12,50	19,51	156

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Capaian s/d Triwulan II
				Target	Realisasi s/d Tiwulan II	
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	50	50
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,70	91,60	99,89
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	30	28,01	93,37
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	91,70	91,60	97,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data diatas, pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukan dari 16 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan terdapat 5 indikator kinerja dengan predikat sangat rendah (SR : 50% ≥ X) perlu upaya keras, 1 indikator dengan predikat sedang (S: 75% ≥ X ≥ 66%), 5 indikator berpredikat tinggi (T : 90% ≥ X ≥ 76%) dan 5 indikator dengan predikat sangat tinggi (ST : 100% ≥ X ≥ 91%).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.946.065.816	21.546.551.216	44,02

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.411.116	0	0
01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.440.536	0	0
01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	744.900	0	0
01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	834.900	0	0
01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	744.900	0	0
01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	834900	0	0
01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	685.980	0	0
01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	49.125.000	0	0
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.406.923.910	9.870.423.299	40,44
02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	22.163.802.680	8.316.335.384	37,52
02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	437.633.970	111.830.000	25,55
02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.804.029.060	1.441.713.315	79,91
02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	561.000	544.600	97,08
02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	448.600	0	0
02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	448.600	0	0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.456.846.141	321.088.865	22,04
06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45.650.000	9.610.000	21,05
06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	443.857.507	59.755.000	13,46
06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	99.727.619	30.390.900	30,47
06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.254.690	6.371.650	77,19
06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.055.800	0	0
06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	67.500.000	20.310.395	30,09

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	68.250.589	46.100.920	67,55
06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	721.549.936	148.550.000	20,59
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.246.108	511.054.076	35,14
08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	820.177.308	295.217.076	35,99
08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	634.068.800	215.837.000	34,04
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.557.638.541	10.843.984.976	50,30
09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	133.615.215	53.831.980	40,29
09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20.134.711.939	10.650.312.496	52,89
09.0005	Pemeliharaan mebel	5.246.748	0	0
09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	252.150.499	80.940.500	32,10
09.0011	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.031.914.140	58.900.000	5,71
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	826.138.275	50.469.480	6,11
2.01	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	173.971.259	13.148.300	7,56
01.0002	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	150.955.564	9.800.000	6,50
01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	23.015.695	3.348.300	14,55
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	652.167.016	37.321.180	5,72
02.0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	652.167.016	37.321.180	5,72
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.905.497.896	528.906.950	13,54
2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.154.013.279	422.166.550	13,39

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.154.013.279	422.166.550	13,39
01.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	828.057.114	35.674.500	4,31
01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1.526.192.532	182.395.750	11,95
01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	799.763.634	204.096.300	25,52
2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	291.883.466	38.184.900	13,08
02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	291.883.466	38.184.900	13,08
2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	459.601.151	68.555.500	14,92
03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	459.601.151	68.555.500	14,92
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.421.206.626	151.973.650	10,69
2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.421.206.626	151.973.650	10,69
01.0001	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	952.875.072	65.993.450	6,93
01.0007	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	187.454.656	0	0
01.0009	Pengelolaan taman keanekargaman hayati di luar kawasan hutan	280.876.898	85.980.200	30,61
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	102.512.582	24.576.100	23,97
2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	47.849.454	11.772.600	24,60

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	13.672.157	6.500.000	47,54
01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	34.177.297	5.272.600	15,43
2.02	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.663.128	12.803.500	23,42
02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	54.663.128	12.803.500	23,42
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	269.855.560	85.718.825	31,76
2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	269.855.560	85.718.825	31,76
01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	112.389.274	47.072.625	41,88
01.0009	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	157.466.285	38.646.200	24,54
08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.245.187.583	325.276.100	14,49
2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.245.187.583	325.276.100	14,49
01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	323.994.749	11.740.700	3,62

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	1.921.192.835	313.535.400	16,32
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	191.654.082	103.252.500	53,87
2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.654.082	103.252.500	53,87
01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan /filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	191.654.082	103.252.500	53,87
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	57.766.789	11.510.500	19,93
2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	57.766.789	11.510.500	19,93
01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	43.643.143	11.510.500	26,37
01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	14.123.647	0	0
11	Program Pengelolaan Persampahan	83.194.504.280	31.519.012.794	37,89
2.01	Pengelolaan Sampah	83.194.504.280	31.519.012.794	37,89
01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.937.564.035	1.440.224.589	74,33
01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	14.831.722.247	9.221.983.100	62,18
01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.765.358.349	928.045.639	8,62
01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	73.144.060	14.699.978	20,09
01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	50.392.402.891	19.432.383.688	38,56
01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	3.688.712.282	25.490.150	0,69
01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1.505.600.416	456.185.650	30,29
Total Keseluruhan		141.160.389.488	54.347.248.115	38,50

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 10 program, 17 Kegiatan dan 55 sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebesar Rp. 141.160.389.488,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.347.248.115,- atau sebesar 38,50 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.86.813.141.373,- atau sebesar 62,60 %.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup telah di raih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan Nirwasita Tantra dengan kategori sebagai entitas pemerintah kategori kota besar terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim dengan kategori partisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan program kampung iklim (proklim) di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW II)
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	33,76	46,00	45,56	45,56
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.00	95,40	95,60	96,80	96,00	96,20	77,38	80,55	89,90	89,90
	Penurunan emisi CO_2	132.262,29	143.447,76	155.619,35	168.864,53	183.278,54	198.965,07	247.855,14	1.162.164	381.109.16	381.109.16
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64,18	64,38	64,58	64,78	64,98	65,18	65,40	65,40	58,00	58,00
Sasaran 1											
Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78.37	78,57	75,75	75,85	75,95	76,05	73,71	75,75	76,75	77,25
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	78,92	79,02	79,12	44,45	78,82	80,56	80,56
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	87,50	87,60	87,70	87,50	93,75	100	100
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,20	85,40	85,60	88,33	88,43	88,53	86,08	88,23	88,62	82,50
	Persentase penurunan emisi GRK	n/a	2,00	2,00	20,00	22,00	24,00	5.90	22	5,98	5,98
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani *(Indikator bermakna negatif)*	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	73,31	72,10	71,34	71,91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 4 (empat) indikator kinerja antara lain :
    a. Indeks kualitas air (IKA) belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 45,56 poin dari target sebesar 52,63 (capaian 86,57 %) dengan kategori kurang, hal ini dikarenakan badan air sungai di Kota Semarang tercemar adanya limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan serta dikarenakan parameter BOD, COD dan tingginya nilai coliform sehingga daya tampung beban pencemaran sungai terkontaminasi.
    b. Indeks kualitas udara (IKU) belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 89,90 poin dari target sebesar 96,00 poin (capaian 93,65 %), meskipun belum mencapai target namun termasuk dalam kategori baik.
    c. Penurunan emisi CO_2 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 381.109.16 $KtCO_2$ dari yang ditargetkan sebesar 183.278,54 $KtCO_2$ sehingga dengan demikian menunjukkan persentase capaian sebesar 207 persen.
    d. Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 58 persen dari target sebesar 64,98. Dikarenakan data pengukuran ditarik dari penilaian yang ada di SIPSN
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 5 (lima) indikator kinerja antara lain :
    a. Persentase kualitas air belum memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 80,56 persen dari target sebesar 79,02 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 101,95 persen.
    b. Persentase kualitas udara telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 100 persen dari target sebesar 87,60 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 114 persen.
    c. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 82,50 persen dari target sebesar 88,43 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 93,29 persen.
    d. Persentase penurunan emisi GRK telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 5,98 persen dari target sebesar 22 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 27,18. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan perhitungan dari aplikasi AKSARA laman dari Kementerian Lingkungan Hidup.
    e. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 71,91 persen dari target sebesar 70 persen namun secara keseluruhan telah mencapai persentase ketercapaian sebesar 97,27 persen dengan kategori baik. Untuk indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif sehingga semakin kecil realisasi makan semakin baik kinerjanya.

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas air di Kota Semarang
b. Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal
c. Kerentanan terhadap perubahan iklim

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas urusan lingkungan hidup diantaranya :

1. Masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang
   Hal ini diantaranya disebabkan karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau ke badan air yang mengakibatkan menurunnya kualitas badan air, serta diakibatkan
   adanya sumber pencemar dari limbah domestik, maupun limbah industri, pertanian dan peternakan.
2. Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal
   Sistem pengelolaan sampah belum mencapai efektivitas yang optimal dan belum mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya (rumah tangga) hingga pembuangan akhir dengan menetapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan melibatkan berbagai stakeholder secara koordinatif.
3. Kerentanan terhadap perubahan iklim
   Perubahan iklim mengacu pada perubahan akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti pemicu pemanasan global, perubahan pola cuaca maupun peningkatan suhu rata-rata, dan berdampak pada degradasi keanekargaman hayati.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan pemasangan alat pantau real time dan melakukan monitoring evaluasi hasil pemantauan secara berkala
b. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan pada semua aspek secara simultan dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, implementasi hierarki pengelolaan sampah 3R, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, penguatan partisipasi masyarakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta pemberdayaan ekonomi berbasis sampah
c. Diperlukan komitmen dan kerjasama mulai dari individu, masyarakat, pemerintah guna merancang strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif dan terintegrasi meliputi penguatan adaptasi mitigasi, strategi adaptasi berbasis ekosistem,

penguatan kelompok masyarakat melalui ProKlim, pengelolaan sampah berkelanjutan

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada
2) Masih adanya regulasi yag tumpang tindih terkait peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
3) Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat maupun dunia usaha terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah khususnya dalam upaya pengelolan, penanganan dan pengurangan sampah
4) Menurunnya data dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota
5) Meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan vegetasi akan berdampak apabila tiak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang

b. Peluang

1) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah
2) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
3) Adanya peraturan peraturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pada tingkat pusat, provinsi dan daerah

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas

b. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaannya perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi jawa tengah diantaranya kebijakan terkait :
   1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   2) Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
   3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Selain regulasi/kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan diantaranya : dokumen Jakstrada, penyusunan DIKPLHD, penyusunan KLHS RDTR BWK VI,VII,IX, dan X, penyusunan kajian Adipura, penyusunan kajian FS grezing zone.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				165.649.504.001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				165.649.504.001	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	55.757.350.570	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	55.757.350.570	-
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	70.411.116	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	70.411.116	-
01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	17.440.536	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	17.440.536	-
01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	-
01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	-
01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	-
01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	685.980	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	685.980	-
01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	49.125.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	49.125.000	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen	21.551.640.375	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	21.551.640.375	-
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen				Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen		
02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/ bulan	19.514.672.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	19.514.672.245	-
02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	437.633.970	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	437.633.970	-
02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.597.875.960	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.597.875.960	-
02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	-
02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	448.600	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	-
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	687.936.792	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	687.936.792	-
06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	65.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	65.650.000	-
06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	124.229.163	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	124.229.163	-
06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	99.727.619	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	99.727.619	-
06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	12.026.304	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	12.026.304	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	0 dokumen	300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 dokumen	300.000	-
06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	67.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	67.500.000	-
06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	138.250.589	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	138.250.589	-
06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	8 dokumen	180.253.118	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8 dokumen	180.253.118	-
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	6.954.120.308	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	6.954.120.308	-
08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	758.346.508	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	758.346.508	-
08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6.195.773.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6.195.773.800	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	26.493.241.979	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	26.493.241.979	-
09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	133.615.215	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	133.615.215	-
09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	25.177.047.972	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	25.177.047.972	-
09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	-
09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	272.648.879	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	272.648.879	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	904.683.165	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	904.683.165	-
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	1.186.138.275	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	1.186.138.275	-
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 dokumen	173.971.259	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 dokumen	173.971.259	-
01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	150.955.564	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	150.955.564	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	23.015.695	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	23.015.695	-
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1.012.167.016	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1.012.167.016	-
02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	1.012.167.016	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	1.012.167.016	-
03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40 Ha	10.053.971.813	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40 Ha	10.053.971.813	-
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen		

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen		
			Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen		
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 persen				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 persen		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8980648,51 Kt CO2e	9.211.760.969	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8980648,51 Kt CO2e	9.211.760.969	-
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai			
			Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			
01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4 dokumen	1.821.007.114	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4 dokumen	1.821.007.114	-
01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumahnkaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	12 dokumen	1.533.685.032	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	1.533.685.032	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	5.857.068.823	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	5.857.068.823	-
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	291.883.466	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	291.883.466	-
02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	291.883.466	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	291.883.466	-
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	80 Ha	550.327.378	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	80 Ha	550.327.378	-
03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	550.327.378	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	550.327.378	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	1.390.850.196	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	1.390.850.196	-
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	1.390.850.196	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	1.390.850.196	-
01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	930.086.822	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	930.086.822	-
01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	-
01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	273.308.718	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	273.308.718	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	423.099.962	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	423.099.962	-
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	47.849.454	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	47.849.454	-
01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	13.672.157	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	13.672.157	-
01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	34.177.297	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	34.177.297	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1unit	375.250.508	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	375.250.508	-
02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	375.250.508	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	375.250.508	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang undangan	100 persen	268.384.809	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	268.384.809	-
			Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen				Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85,80 persen		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	268.384.809	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	268.384.809	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen		
01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	45 dokumen	112.389.274	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	45 dokumen	112.389.274	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
						Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkaiT Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	155.995.535	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkaiT Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	155.995.535	
08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.591.430.942	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.591.430.942	-
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.591.430.942	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.591.430.942	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	407.244.748	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	407.244.748	-
01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	2.184.186.19	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	2.184.186.19	-
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	204.654.412	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,5 persen	204.654.412	-
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	204.654.412	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	204.654.412	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	204.654.412	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka pplh	70 entitas	204.654.412	-
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	58.807.574	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	58.807.574	-
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	58.807.574	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	58.807.574	-

01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 pengaduan	39.683.928	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 pengaduan	39.683.928	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen perkara	19.123.647	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen perkara	19.123.647	-
11	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70 persen	93.714.815.448	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70 persen	93.714.815.448	-
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30 persen				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30 persen		
			Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen				Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya	100 persen	93.714.815.448	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya	100 persen	93.714.815.448	-

			pelayanan pengelolaan persampahan					pelayanan pengelolaan persampahan			
01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	2.777.564.035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	2.777.564.035	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	32.096.985.765	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	32.096.985.765	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	8.353.659.349	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	8.353.659.349	-
01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	73.144.06	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	73.144.06	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	45.219.149.541	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	45.219.149.541	-
01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan ton	3.688.712.282	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	6 laporan ton	3.688.712.282	-
01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	1.505.600.416	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kot.a yang ditetapkan	53 dokumen	1.505.600.416	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
Fisik					
1	Pengadaan tong sampah	Kelurahan Bulustalan, Kel. BuluStalan, Kec. Semarang Selatan	1000 unit	250.000.000	Diakomodir di Th. 2024
2.	Pengadaan Tong Sampah	Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	1600 buah	250.000.000	Diakomodir di Th. 2024
3.	Pengadaan Becak Sampah	Wilayah kelurahan karangturi, Kec. Semarang Timur	10 unit	255.000.000	Tidak terakomodir, belum menjadi prioritas DLH
4.	Bantuan Benih Ikan	Wilayah kelurahan Karangturi, Kec. Semarang Timur	3000 buah	215.000.000	Bukan kewenangan DLH
5.	Pengadaan Tempat Sampah	Jl. Protokol Wilayah Kelurahan Kebonagung, Kec. Semarang Timur	100 unit	400.000.000	Diakomodir di Th. 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
6.	Pembangunan Tempat Pilah Sampah	Tanah Fasum Depan Balai RW 03 RT 04, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu	1 unit	500.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000 dg catatan aset milik pemkot
7.	Pengadaan Angkutan Sampah Viar	Kelurahan Randugarut RW 1,2,3 Kel. Randugarut, Kec. Tugu	1 unit	201.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 40.000.000 adapun akan mengoptimalkan fungsi TPS 3 R yang sudah ada
8.	Pavingisasi Halaman TPS3R	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	600 m^2	500.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000
9.	Rumah untuk Pilah Sampah TPS 3R	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	400 m^2	300.000.000	Tidak terakomodir krn akan mengoptimalkan fungsi TPS 3 R yang sudah ada
10.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	1 buah	210.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000
11.	Mesin Pencacah Biji Plastik	Karanganyar Gunung RT 06 rw 03, Kel. Karanganyar, Kec. Candisari	5 buah	300.000.000	Diakomodir di Th. 2024
12.	Pembuatan Rumah Pilah Sampah RW 02	Jalan Jatingaleh Trangkil RT 05 RW 02, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik	1 unit	800.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000 dg catatan aset milik pemkot
13.	Karena di kampung semawis alat gerobak sudah tidak berfungsi dengan bai (rusak)	TPS Kampung Semawis RT 01 RW 09, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang	3 buah	15.000.000	Diakomodir di Th. 2024
14.	Karena di wilayah Kampung semawis terutama Fasum di depan ruko2 Kampung Semawis banyak yang rusak	Depan ruko kampung semawis dan sekitar taman kampung semawis RT 01 RW 09	40 buah	15.000.000	Diakomodir di Th. 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
Non Fisik					
1.	Sosialisasi retribusi sampah non PDAM	Lingkungan Kelurahan Panggunglor, Kec. Semarang Utara	1 kegiatan	25.000.000	Sudah pernah dilaksanakan
2.	Pengelolaan limbah sampah	Kp. Klipang RT 04 RW 01, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang	1 kegiatan	200.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000
3.	Pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga	Balai Kelurahan Tembalang RW 02, Kel. Tembalang, Kec. Tembalang	50 orang	20.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000
4.	Pendampingan Petugas KSM dan Ibu-ibu dalam Mengelola sampah di masyarakat	Jangli Perbalan RT 7 RW 6, Kel. Ngesrep, kec. Banyumanik	1 kegiatan	7.000.000	Tidak terakomodir
5.	Pelatihan daur ulang sampah non organik	Kelurahan Tambakrejo RT 05 RW 03, Kec. Gayamsari	1 kegiatan	10.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu antara lain :

1) Perlu penambahan tempat sampah umum di tiap unit lingkungan
2) Perlu penghijauan di Rusunawa Karangroto, dengan pohon besar yang rindang
3) Perlu pelatihan pengelolaan sampah secara mandiri bagi anggota PKK dan pemuda karangtaruan di Kec. Banyumanik

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2025 triwulan II. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mempedomani RKP Tahun 2025, RPJMN Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2025-2030. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang. Penyusunan RKPD ini mengacu juga kepada nomenklatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan tujuan menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 TELAAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

3.3 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SEMARANG

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2025. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
   a) Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
   b) Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
   c) Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
   d) Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
   e) Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
   f) Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
   g) Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah

pinggiran Kota Semarang;
h) Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
   a) Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
   b) Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
   c) Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
   d) Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   e) Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC);
   f) Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas;
   g) Fokus pada kelurahan yang kasus stuntingnya mengalami peningkatan;
   h) Penambahan armada Ambulance Hebat;
   i) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis;
   j) Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
   k) Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat;
   l) Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
   m) Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
   n) Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
   a) Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
   b) Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
   c) Memperbanyak beasisiwa untuk masuk perguruan tinggi;
   d) Penambahan program pelatihan operator EMIS (Education Management Information System) bagi para guru Madrasah Diniyah;
   e) Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   f) Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, dan juga transformasi tata kelola guru.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kot

a) Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
b) Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
c) Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
d) Perlu pemeriksanaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
e) Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
f) Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
g) Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
h) Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
i) Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran;
j) Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
k) Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
l) Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balau RT yang telah rusak dan belum ada;
m) Memperhatikan ruang publik terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
n) Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
o) Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
p) Perlu rekonstruksi ulang bagi halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan;
q) Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
r) Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota
   a) Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
   b) Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
   c) Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
   d) Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
   e) Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar

pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bisa positif;

f) Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
g) Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
h) Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
i) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
j) Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
k) Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
l) Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
m) Agar Pemkot Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

3.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini telah mengakomodir kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2025-2030 yang tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 Triwulan II serta isu-isu strategis di tahun 2025. Tema pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 2.	Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 5.	Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 7.	Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas Daerah 8.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro;
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya

air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir;

7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah perubahan RKPD kota Semarang Tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

Sasaran	Indikator	Target	Prioritas PRKPD
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,63 poin	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
	Indeks Kualitas Udara	96,00 poin	
	Penurunan Emisi CO2	183.278,54 ton CO_2e	
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	70 %	

3.5 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD tahun 2021-2026 ke RPJMD tahun 2025-2029. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Semarang, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 beserta perubahannya secara normatif tetap mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026, namun secara substansi juga harus selaras dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, terutama pada arah kebijakan pembangunan daerah, visi, misi dan program prioritas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian, baik terkait indikator sasaran maupun definisi dan formulasi indicator tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 yaitu

"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)
2) Indeks Kualitas Udara (IKU)
3) Penurunan Emisi CO_2
4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran Renja beserta indikatornya, adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam, dengan indikator sasaran antara lain :
   - Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu
   - Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu
   - Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
   - Persentase penurunan emisi GRK
   - Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,63
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	96,00
	- Penurunan Emisi CO2	ton CO_2e	183.278,54
	- Indeks Kinerrja Pengelolaan Sampah (IKPS)	persen	64,98
SASARAN :			
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	75,95
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	persen	79,02
	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	persen	87,60
	- Persentase Penurunan Emisi GRK	persen	25,00
	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	persen	88,43
	- Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	persen	70,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mempedomani RKP Tahun 2025, RPJMN Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2025-2030;
2. Mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 9 (sembilan) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan penunjang, dan 12 (dua belas) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) sub kegiatan, yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) sub

kegiatan penunjang, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 165.649.504.001,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			165.649.504.001							139.950.123.700
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	55.757.350.570	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	54.814.187.203
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100 persen	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100 persen					100 persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen					100 persen	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	70.411.116	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	9 dokumen	108.546.493
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	17.440.536	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	34.892.697
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.945.910

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.797.410
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.615.910
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.797.410
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	685.980	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 laporan	7.497.156

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	49.125.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	55.000.000
2.1.01.2.012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100%	Persentase administrasi keuangan SKPD	100%	21.551.640.375	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 dokumen	27.028.257.237
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen					100%	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	19.514.672.245	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	115 orang/bulan	25.803.607.500
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	437.633.970	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	439.692.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.597.875.960	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	777.578.717
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.927.100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.803.460
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.648.460
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	687.936.792	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	2.251.533.108
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	65.650.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 paket	50.215.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	124.229.163	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	22 paket	588.384.662
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	99.727.619	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 paket	122.464.011

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	12.026.304	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 paket	65.180.170
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peruncang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peruncang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	2.510.132
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	67.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	148.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	138.250.589	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	455.084.289
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dokumen	180.253.118	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 dokumen	819.194.844
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	6.954.120.308	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	1.721.258.200
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	758.346.508	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	902.195.039

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6.195.773.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	819.063.161
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	26.493.241.979	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	23.704.592.165
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	133.615.215	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 unit	176.518.100
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	25.177.047.972	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	310 unit	22.230.542.906
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	16 unit	1.420.658
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	272.648.879	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	200 unit	275.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	904.683.165	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	10 unit	1.021.110.501
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	1.186.138.275	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	496.458.804
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 dokumen	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 dokumen	173.971.259	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	322.938.116
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	150.955.564	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	211.614.700
2.11.02.2.01.01	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	23.015.695	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	111.323.416

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 persen	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 persen	1.012.167.016	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	173.520.688
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	1.012.167.016	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	173.520.688
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 persen	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 persen	10.053.971.813	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	5.108.516.478
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen					64 persen	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen					93 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup	40 Ha	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup	40 Ha					50 Ha	
		Persentase perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca	2 persen	Persentase perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca	2 persen					2 persen	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8980648.51 Kt CO2e	Emisi CO2	8980648.51 Kt CO2e	9.211.760.969	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	9749288.54 Kt CO2e	3.837.353.494
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan					150 perusahaan	
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen	Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen					95 persen	
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup	100 persen	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup	100 persen					100 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	1.821.007.114	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 dokumen	1.028.109.920
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	1.533.685.032	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	1.893.909.872
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	5.857.068.823	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	915.333.702
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	291.883.466	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	756.121.148
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	291.883.466	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 laporan	756.121.148

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	80 Ha	Luasan Lahan yang terkonservasi	80 Ha	550.327.378	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	90 Ha	515.041.836
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	80 Ha	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	550.327.378	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	90 Ha	515.041.836
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	1.390.850.196	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	1.958.345.466
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	1.390.850.196	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	1.958.345.466
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	930.086.822	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.435.621.551
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 unit	206.499.388
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	273.308.718	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 unit	316.224.527

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	423.099.962	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	60 persen	282.998.952
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	47.849.454	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	50 perusahaan	184.855.834
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	13.672.157	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	104.858.994
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	34.177.297	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	45 laporan	79.996.840

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	375.250.508	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 unit	98.143.118
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	375.250.508	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	98.143.118

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen	268.384.809	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	86 persen	562.737.039
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen					100 persen	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	268.384.809	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	562.737.039
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen					100 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 dokumen	112.389.274,	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	45 dokumen	289.682.075
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Jumlah laporan dari hasil usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	155.995.535	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	105 laporan badan usaha	273.054.964
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.591.430.942	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	56 persen	2.616.743.085

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.591.430.942	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	2.616.743.085
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen	407.244.748	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	488.469.300
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	250 lembaga	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	250 lembaga	2.184.186.195	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	250 lembaga	2.128.273.785
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	204.654.412	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12,50 persen	273.762.808
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	204.654.412	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	273.762.808

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	204.654.412	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	70 entitas	273.762.808
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	58.807.574	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	141.688.379
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	58.807.574	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	60 kasus	141.688.379

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 dokumen	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditangani/ditindaklanjuti	55 pengaduan	39.683.928	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	55 pengaduan	112.648.566
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen perkara	19.123.647	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen perkara	29.039.813
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30 persen	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30 persen	93.714.815.448	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	32 persen	73.694.685.486
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70 persen	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70 persen					69 persen	
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen					92 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	93.714.815.448	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	73.694.685.486
2.11.11.2.01 .0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	2.777.564.035	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	32 kelompok	2.148.969.240
2.11.11.2.01 .0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	32.096.985.765	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	4.762.805.759

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	8.353.659.349	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	20 unit	4.702.217.015
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	73.144.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	108.680.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkuta	365 ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	45.219.149.541	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	365 ton	57.163.751.384
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	6 dokumen	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan ton	3.688.712.282	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 laporan ton	3.139.027.283

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	1.505.600.416	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	53 dokumen	1.669.234.805

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini juga berpedoman pada PRKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perbaikan untuk dilakukan tindak lanjut atas isu- isu strategis yang ada, antara lain
   - Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan pemasangan alat pantau real time dan melakukan monitoring evaluasi hasil pemantauan secara berkala
   - Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan pada semua aspek secara simultan dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, implementasi hierarki pengelolaan sampah 3R, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, penguatan partisipasi masyarakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta pemberdayaan ekonomi berbasis sampah
   - Diperlukan komitmen dan kerjasama mulai dari individu, masyarakat, pemerintah guna merancang strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif dan terintegrasi meliputi penguatan adaptasi mitigasi, strategi adaptasi berbasis ekosistem, penguatan kelompok masyarakat melalui ProKlim, pengelolaan sampah berkelanjutan

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari komitmen, peran dan tanggung jawab oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta keterlibatan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* terkait guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hubungan antar dokumen Renstra OPD terhadap dokumen RPJMD dan terhadap RPJMN serta dokumen Renja OPD terhadap RKPD dan terhadap RKP yang kesemua dokumen tersebut digambarkan dari sisi Perencanaan dan Penganggaran, dapat dilihat seperti gambar bagan di bawah ini :

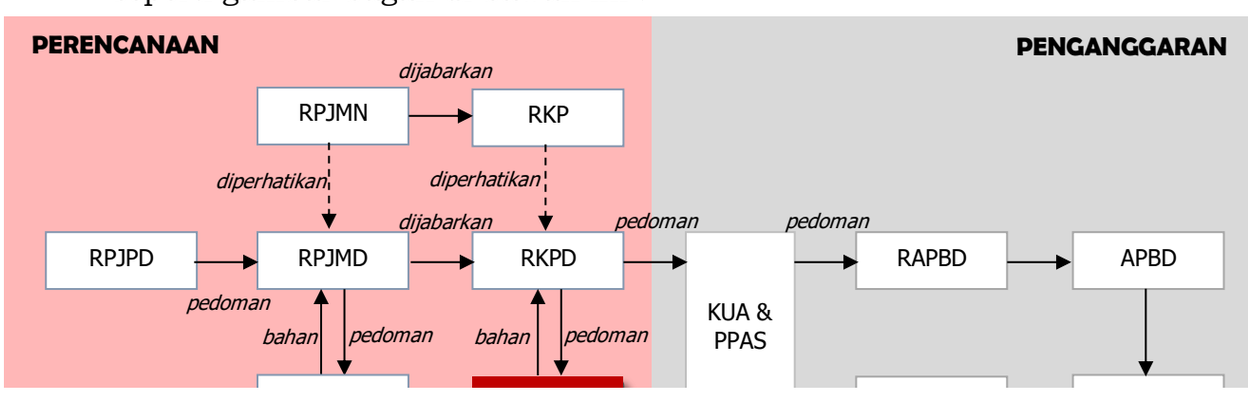

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

(1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka dilaksanakan efisiensi dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut.
(2) Pelaksanaan program dan kegiatan dari pusat yaitu program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu program kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
t. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/2161/VI/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

w. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/2185/VII/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan 2024 serta Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

   Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan 2024 serta Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					WAJIB										
2	12				Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.01		Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	1 dokumen	50%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	95%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	95%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	95%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	100%	95%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	95%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	95%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	60% 60%	60% 60%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang / 1.260 OB	89 orang / 1.246 OB	78 orang / 1.092 OB	78 orang / 655 OB	60%	92 orang / 1.288 OB	92 orang / 736 OB	60%	95%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	95%
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	100%	95%
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	98%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	65%	65%	95%
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	20 orang	10 orang	50%	95%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	95%
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	98%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	95%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	3 paket	60%	5 paket	4 paket	80%	95%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	95%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	95%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	95%
2	12	01	2.06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	50%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	8 laporan	60%	95%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	95%
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	100 unit	50 unit	50%	50%	100 unit	50 unit	50%	95%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	36 unit	28 unit	75%	75%	36 unit	28 unit	75%	95%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	8 laporan	60%	95%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	95%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	25 unit	76%	23 unit	18 unit	78%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	80 unit	65%	100 unit	80 unit	80%	95%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	400 unit	400 unit	80%	100%	395 unit	237 unit	60%	95%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	10 unit	50%	18 unit	10 unit	56%	95%
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	1 unit	50%	50%	2 unit	1 unit	50%	95%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,70%	98%	99,40%	95,57%	95,07%	99,40%	98,53%	99,12%	98,82%
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	80%	66,45%	74%	68,45%	92,50%	77%	72,75%	94,48%	90,93%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	434.000 dokumen	428.000 dokumen	430.000 dokumen	261.838 dokumen	61,17%	432.000 dokumen	255.772 dokumen	59,20%	95%
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	30 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	100 dokumen	65 dokumen	65%	95%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	50%	50%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	325.000 dokumen	320.500 dokumen	320.500 dokumen	160.250 dokumen	50%	323.500 dokumen	231.598 dokumen	72%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	95%
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelengggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	95%
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	95%
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	95%
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 laporan	-	-	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	95%
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	98,25%	97,20%	97,50%	99,13%	98,30%	98,32%	100%	95%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	46.000 dokumen	100%	100%	100%	100%	45.450 dokumen	24.174 dokumen	53,18%	95%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	46.000 dokumen	100%	100%	50%	50%	45.450 dokumen	24.174 dokumen	53,18%	95%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	50%	50%	3 layanan	2 layanan	3 layanan	95%
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tersedia									
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	95%
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	10 kecamatan	62,5%	12 laporan	9 laporan	75%	95%
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	2 laporan	4 laporan	95%
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipill	60 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	100%	65%	65%	95%
						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	95%
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	95%
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	60 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan haril inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	10 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan	2 laporan	1 laporan	95%
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	95%
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	3 laporan	75%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	70%	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	95%
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	50 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%	97%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	95%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	95%
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	1 jenis buku	50%	85%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan yaitu pada Bulan Juni 2025 - Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sampai Dengan Triwulan II / Bulan Juni Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	PAGU MURNI APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2025	
			REALISASI KEUANGAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.163.498.764	8.734.879.522	41,27%
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.163.498.764	8.734.879.522	41,27%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	340.613.230	15.893.000	4,67%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	235.197.430	4.534.000	1,93%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	8.659.960	4.534.000	52,36%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.659.960	0	0,00%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	187.877.510	0	0,00%
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	41.119.920	0	0,00%
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantau, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	16.159.960	0	0,00%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	24.959.960	0	0,00%
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	55.635.920	11.359.000	20,42%
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	28.225.960	917.500	3,25%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	27.409.960	10.441.500	38,09%
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	8.659.960	0	0,00%
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	8.659.960	0	0,00%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	PAGU MURNI APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2025	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	127.109.720	5.099.000	4,01%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	68.629.840	599.000	0,87%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.239.960	0	0,00%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	13.659.960	599.000	4,39%
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantau, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	4.909.960	0	0,00%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	17.819.960	0	0,00%
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	42.319.920	4.500.000	10,63%
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	21.159.960	4.500.000	21,27%
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	21.159.960	0	0,00%
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	16.159.960	0	0,00%
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	16.159.960	0	0,00%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	505.265.597	70.997.922	14,05%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	140.542.421	5.954.920	4,24%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.159.960	5.394.960	25,50%
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	119.382.461	559.960	0,47%
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.659.960	0	0,00%
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantau, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	23.659.960	0	0,00%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	271.348.441	65.043.002	23,97%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	PAGU MURNI APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2025	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.899.940	900.000	10,11%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.293.220	3.800.000	30,91%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	65.972.120	4.418.000	6,70%
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	128.169.541	52.184.002	40,71%
2.12.04.2.03.06	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	56.013.620	3.741.000	6,68%
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	69.714.775	0	0,00%
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.221.555	0	0,00%
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi, administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	53.493.220	0	0,00%
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	134.616.095	2.646.555	1,97%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	134.616.095	2.646.555	1,97%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	134.616.095	2.646.555	1,97%
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	20.055.894.122	8.640.243.045	43,08%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.131.636	2.228.100	2,12%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	0	0,00%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.032.300	683.100	66,17%
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.251.800	0	0,00%
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.032.300	1.017.000	98,52%
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.251.800	0	0,00%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	248.418	244.500	98,42%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.018	283.500	89,99%
2.12.01.2.01.08	Penyelenggara Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	0,00%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	PAGU MURNI APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2025	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.304.265.654	6.211.658.799	46,69%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.066.773.000	6.139.208.799	46,98%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	236.747.400	72.450.000	30,60%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	248.418	0	0,00%
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	248.418	0	0,00%
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	248.418	0	0,00%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.365.720	0	0,00%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156.365.720	0	0,00%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.527.217	138.936.915	10,28%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.774.800	2.442.000	8,79%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.706.220	21.552.500	21,40%
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.466.680	30.846.200	24,39%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.996.800	7.010.860	2,13%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.159.009	13.290.303	14,74%
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.900.000	1.690.100	6,79%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.656.760	62.104.952	17,22%
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.560.000	0	0,00%
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	230.306.948	0	0,00%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.961.480	0	0,00%
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	101.730.350	0	0,00%
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.231.130	0	0,00%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.752.809.616	1.801.922.106	48,02%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	814.100.000	383.073.816	47,05%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.938.709.616	1.418.848.290	48,28%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.832.799	485.497.125	41,79%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	PAGU MURNI APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2025	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.477.462	77.219.125	26,49%
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	14.544.000	1.120.000	7,70%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	410.763.497	65.821.000	16,02%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.650.000	341.337.000	83,12%
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.397.840	0	0,00%
JUMLAH		21.163.498.764	8.734.879.522	41,27%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari 5 (lima) Program, dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada APBD Induk adalah sebesar Rp 21.163.498.764,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan pada Bulan Juni 2024 - Triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.734.879.522,- atau sebesar 41,27% untuk capaian realisasinya dari anggaran murni DPA Tahun 2025. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 12.248.619.242- atau 57,87%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra 2021-2026 Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TRW II	2026	2027
	TUJUAN :													
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50%	93,00 %	85,62 %	86,00 %	92,85 %	92,95%	93,96 %	93,00 %	93,50 %
	SASARAN :													
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudu-kan	88,86 %	93,52 %	94,20 %	94,88%	95,54 %	79,42 %	87,00 %	92,85 %	92,95%	93,96%	93,00%	93,50 %
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,5	84	84,5	85	82,8	85,28	85,90	89,00	93,77	87,80	88,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	75,7	75,8	75,9	76	76,1	75,32	77,21	79,30	80,00	82,00	82,10	82,15

Sumber : Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang", memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil", target pada tahun 2025 sebesar 92,50% dapat tercapai, dengan realisasi pada semester I sebesar 93,96% (capaian 101,58%).
b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ada 3 Sasaran, yaitu :
    1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target pada tahun 2025 sebesar 94,88% dan telah tercapai sebesar 93,96% (capaian 99,03%);
    2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2025 sebesar 84,50 dan pada semester I telah tercapai sebesar 93,77 (capaian 110,97%);
    3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip, dengan target sebesar 76,00 dan pada Semester 1 Tahun 2025 ini telah tercapai Nilai Sakip sebesar 82,00.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi indikator kinerja Sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijabarkan dalam Indikator Kinerja , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Uraian	Uraian Indikator	Target Indikator Kinerja						Realisasi Indikator Kinerja					Proyeksi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 SMT I	2026
1	Meningkatnya perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik	99,20 %	99,30 %	99,40 %	99,50 %	99,60 %	99,70 %	95,07 %	96,93 %	99,57%	99,35 %	98,58%	99,50%
2	Meningkatnya kepemilikan KIA pada anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,00 %	68,00 %	71,00 %	74,00 %	77,00 %	80,00 %	61,79 %	64,31 %	66,45%	71,06 %	72,65%	74,00%
3	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	95,00 %	97,00 %	97,20 %	97,50 %	97,80 %	98,00 %	98,81 %	97,85 %	98,25%	98,35 %	98,55%	98,75%
4	Meningkatnya kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAANMUSRENBANG / TAHUN RKPD)				Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2925	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024 / 2025	2025 / 2026
	N I H I L											

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan adminduk dengan menerapkan pelayanan adminduk berbasis teknologi informasi sehingga dapat mempermudah masyarakat, karena dapat diakses dari mana saja dan tidak perlu datang ke tempat layanan adminduk tetapi cukup dengan mengakses Pelayanan Dukcapil Online yaitu Aplikasi SiDenOK (Sistem Informasi Dukcapil Online Kependudukan);
b. Melalui penerapan pelayanan online adminduk yang telah dapat dilakukan di hampir seluruh jenis layanan, maka dilakukan optimalisasi jumlah TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) yang ada di Kecamatan, sehingga lebih efektif dan efisien terhadap anggaran dan sumber daya yang ada. Selain itu dengan dengan penerapan pelayanan online ini Disdukcapil dapat lebih lincah dan gesit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hampir seluruh layanan dapat diselesaikan melalui pelayanan online tanpa harus datang ke Dinas atau TPDK. Sehingga pengurangan atau optimalisasi jumlah tempat layanan dapat menjadi suatu pilihan yang tepat;
c. Melakukan penguatan dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, membentuk tim, menyiapkan sarana prasarana sebagai kanal aduan baik luring maupun daring, sehingga dengan

adanya optimalisasi jumlah TPDK, akan tetapi tidak berpengaruh kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat;

d. Mengoptimalkan SDM aparatur pengelola pelayanan adminduk untuk dapat menyelesaikan permohonan dokumen administrasi kependudukan dengan tepat waktu, khususnya bagi pelayanan online, dimana tuntutan warga akan pelayanan online yang cepat dan akurat dapat diwujudkan. Maka dari itu, diperlukan penataan, pembinaan dan pengawasan SDM Aparatur yang terus menerus dari Pimpinan dan Bidang Layanan di setiap jenjang sangat diperlukan;
e. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan dan pengiriman dokumen adminduk bagi warga miskin ekstrem melalui program P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dengan fasilitasi penerbitan dan pengiriman dokumen kependudukan sampai ke rumah-rumah warga miskin ekstrem;
f. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai instansi yang terlibat secara langsung maupun yang dapat membantu penyelenggaraan pelayanan adminduk, seperti OPD, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Universitas, KUA, Pengadilan Agama dan Yayasan-yayasan, Panti Asuhan dan Panti Sosial;
g. Meningkatkan capaian penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat. Dengan cara melaksanakan sosialisasi yang terus-menerus dan *massive* akan manfaat dan kegunaan IKD, salah satu manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk mengajukan dokumen adminduk seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diajukan secara singkat dan sederhana bagi orangtua yang menginstal IKD;
h. Mengoptimalkan Buku Pokok Pemakaman yang ada pada setiap Kelurahan agar datanya dapat terintegrasi dengan Dukcapil. Buku Pokok Pemakaman ini untuk menunjang data dan pelaporan yang lebih akurat terkait penerbitan Akta Kematian terhadap jumlah kematian aktual yang terjadi di setiap Kelurahan serta membangun sistem informasi terkait data kematian dan pemakaman yang dapat bermanfaat terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil. Sehingga setiap ada warga yang meninggal di Kelurahan, maka akan tercatat di sistem yang ada di Kelurahan dan sekaligus dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematiannya oleh Disdukcapil dan diserahkan oleh petugas Kelurahan kepada keluarga almarhum yang meninggal;
2) Belum optimalnya capaian penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat;
3) Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi, bebas pungli dan berorientasi pelayanan prima.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan

pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.
   2) Masih perlunya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat secara luas. Masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus, agar capaian IKD di Kota Semarang dapat mencapai target untuk seluruh Wajib KTP-el di Kota Semarang.
   3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tengah mencanangkan program Perekaman KTP-el di Sekolah-Sekolah bagi Pemula yang usianya belum menginjak 17 (tujuh belas) tahun. Perekaman KTP-el bagi Pemula ini bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang. Dengan melakukan perekaman KTP-el lebih awal, maka pada saat usia peserta perekaman KTP-el menginjak 17 tahun, mereka dapat langsung mencetak KTP-el di Dinas atau di 10 TPDK Kecamatan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja perekaman KTP-el di Kota Semarang.
   4) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
   5) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

b. Peluang
   1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
   2) Tersedianya gedung Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 10 Kecamatan menjadi peluang dan kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
   3) Penggunaan aplikasi pelayanan online SiDenok merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat pelayanan dapat menggunakan aplikasi

SiDenok untuk pendaftaran dokumen administrasi kependudukan.

4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti Kios Adminduk dan Anjungan Dukcapil Mandiri serta sistem pelayanan online administrasi kependudukan seperti Aplikasi SiDenok dan IKD yang dapat membantu masyakarat dalam mengakses pelayanan adminduk dengan lebih mudah, cepat, tepat, akurat dan bebas pungutan.
5) Adanya berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan melalui ekstensifikasi waktu dan jam pelayanan. Diwujudkan melalui pelayanan akhir pekan dan malam hari, pelayanan keliling, perekaman KTP_el ke sekolah SMA dan SMK, penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin ekstrem dan lain sebagainya.
6) Ada banyaknya mahasiswa yang ingin melakukan magang kerja dari berbagai Universitas, menjadi awal inovasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dan inovasi Perjanjian Kerjasama Magang Tematik Administrasi Kependudukan dengan beberapa Univsersitas atau yang diberi nama inovasi Anti Mager dengan tema membantu sosialisasi dan memberikan layanan untuk warga dalam mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dapat diformulasikan tindak lanjut dari isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :

a. Terkait dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka turut dilakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) yang ada di Kecamatan dari yang semua 16 Kecamatan berkurang menjadi 10 Kecamatan. Hal ini telah melalui beberapa kajian dan disebabkan karena terus berkurangnya jumlah pegawai setiap tahun, serta telah diterapkannya pelayanan adminduk online sehingga tidak memerlukan terlalu banyak ruang pelayanan karena pelayanan adminduk telah terdigitalisasi.
b. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Kelurahan-kelurahan se-Kota Semarang dengan melalui inovasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) yaitu E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian) adalah sebuah aplikasi berbasis android dan website untuk pelaporan kematian warga. Dengan adanya inovasi E-Pakem ini RT, RW dan Kelurahan dapat melaporkan secara langsung apabila ada warganya yang meninggal dunia. Dari pelaporan tersebut Disdukcapil akan menerima dan memproses menjadi Akta Kematian dan pengambilannya dilakukan oleh ahli waris warga yang meninggal.
c. Dengan mulai diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat secara luas, membutuhkan kerja keras dari Disdukcapil agar target capaian aktivasi IKD dari Pemerintah Pusat

dapat tercapai. Hal ini terkendala oleh kurangnya personil untuk Sosialisasi IKD seluruh masyarakat Kota Semarang. Sementara di sisi lain, terdapat banyak mahasiswa magang kerja ke Disdukcapil dari berbagai Universitas. Oleh karenanya dibuatlah sebuah inovasi yaitu Anti Mager yang merupakan kepanjangan dari Pendayagunaan KKN Tematik dan Magang Merdeka untuk Meningkatkan Pencapaian Target Aktivasi IKD. Beberapa Universitas yang telah bekerjasama untuk menjalankan KKN Tematik Program Adminduk Aktivasi IKD ini yaitu Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang , Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Semarang (USM), Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

d. Implementasi dan internalisasi budaya kerja anti pungli dan pelayanan Prima terus ditingkatkan melalui berbagai hal misalnya dengan memulai apel pagi dengan menyanyikan yel-yel, budaya pelayanan 5 S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga dengan menetapkan Role Model dan Agen Perubahan, juga dilaksanakan pula pemilihan Pegawai Teladan setiap 3 bulan sekali. Ditambah lagi dengan diusulkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 ini, sebagaimana sebelumnya telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KPK dan KemenPANRB tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	340.613.230	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	209.638.230	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00%				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432.000 dokumen	235.197.430	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432.000 dokumen	185.247.430	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 dokumen	8.659.960	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 dokumen	4.534.960	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	38.659.960	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	859.960	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.500 dokumen	187.877.510	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.500 dokumen	179.852.510	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	41.119.920	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	1.419.920	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	16.159.960	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	859.960	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 dokumen	24.959.960	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 dokumen	559.960	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	55.635.920	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	22.110.920	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	28.225.960	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	8.425.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	27.409.960	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	13.684.960	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	8.659.960	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	859.960	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	8.659.960	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	859.960	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	127.109.720	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	26.603.760	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.475 dokumen	68.629.840	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.475 dokumen	20.219.840	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.450 dokumen	32.239.960	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.450 dokumen	17.939.960	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	13.659.960	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	859.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	4.909.960	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	859.960	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 paket	17.819.960	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	559.960	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	42.319.920	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	5.523.960	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	21.159.960	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	4.664.000	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	21.159.960	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	859.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	16.159.960	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	859.960	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	16.159.960	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	859.960	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	505.265.597	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	202.522.905	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16 OPD				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16 OPD		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	140.542.421	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	119.767.420	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 dokumen	21.159.960	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	8.484.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	119.382.461	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	111.282.460	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	23.659.960	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	559.960	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	23.659.960	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	559.960	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	271.348.441	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	80.980.750	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	8.899.940	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	1.699.940	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12.293.220	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	5.918.220	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 dokumen	65.972.120	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 dokumen	13.582.120	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	128.169.541	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 laporan	52.366.850	
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	56.013.620	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	7.413.620	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	69.714.775	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	1.214.775	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	16.221.555	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	621.555	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 laporan	53.493.220	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	593.220	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	134.616.095	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	76.423.536	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	134.616.095	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	76.423.536	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	134.616.095	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	76.423.536	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	20.055.894.122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	20.412.735.672	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	105.131.636	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	8.072.582	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.530.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.032.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.032.300	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.251.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.251.800	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.032.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.032.300	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.251.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.096.909,10	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	248.418	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	248.418	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	315.018	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	315.018	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	2 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 dokumen	565.837	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Administrasi Keuangan SKPD	100%	13.304.265.654	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	12.603.753.481	
			Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang/ bulan	13.066.773.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang/ bulan	12.387.644.826,61	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	236.747.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	215.363.400	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	248.418	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	248.418	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	248.418	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	248.418	
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	248.418	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	248.418	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	156.365.720	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	30.668.730	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	156.365.720	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	30.668.730	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.351.527.217	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	2.666.267.804	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	27.774.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.934.900	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	100.706.220	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	26.069.560	
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	126.466.680	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	98.805.980	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	328.996.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	2.123.571.300	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	90.159.009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	25.949.500	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	360.656.760	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	276.750.880	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	61.560.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	61.560.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	230.306.948	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	24.125.683,50	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	223.961.480	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	7.122.340	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	101.730.350	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	3.281.200	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	122.231.130	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	3.841.140	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3.752.809.616	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	4.002.804.100	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	814.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	957.195.980	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.938.709.616	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.045.608.120	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.161.832.799	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.094.046.635	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	23 unit	291.477.462	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	23 unit	255.390.432	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinannya			
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	14.544.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	7.272.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	410.763.497	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	379 unit	386.336.363,40	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	410.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	410.650.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	34.397.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	34.397.840	
JUMLAH					21.163.498.764					20.927.924.102,61	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja OPD hasil forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum OPD atau forum gabungan OPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja OPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/OPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah

Berjalannya tahun anggaran 2025 sampai dengan Semester I tahun 2025 ini mengalami beberapa dinamika keuangan yang harus diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini berkaitan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini mengatur pembatasan belanja non prioritas, seperti belanja seremonial, belanja perjalanan dinas, studi banding serta pengurangan belanja honorarium dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sehingga dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan penyesuaian Belanja Daerah secara simultan diakomodir APBD TA 2025 melalui pergeseran anggaran ke-2. Penyesuaian Belanja Daerah ini diupayakan masih berpedoman pada arahan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian hasil akhir pergeseran tersebut menjadi dasar Perubahan RKPD Tahun 2025.

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah:

1. Proyeksi Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun terakhir. namun tetap memerhatikan besaran earmarking dan kebutuhan yang didasarkan di tahun 2025;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya;
3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
4. Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2025 dilakukan terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja Narasumber, belanja Operational Maintenance (OM), belanja konsumsi rapat, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan;
5. Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Secara umum jika dibandingkan dengan RKA Tahun 2025, pada Perubahan RKA Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar atau berkurang Rp 235.574.661,-, dengan komposisi perbandingan belanja seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU			SELISIH	
		RKPD 2025	APBD MURNI 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN APBD MURNI
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDAPATAN	0	0	0	0	0
	Pendapatan	0	0	0	0	0
II.	BELANJA	21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.102,61	-235.574.661,39	-235.574.661,39
	Belanja Pegawai	13.066.773.000	13.066.773.000	12.387.644.826,61	-679.128.173,39	-679.128.173,39
	Belanja Barang dan Jasa	7.565.387.556	7.565.387.556	8.482.961.692	917.574.136	917.574.136
	Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	531.338.208	531.338.208	57.317.584	-474.020.624	-474.020.624

Dari penjelasan Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD 2025 diperkirakan akan terdapat penurunan atau pengurangan anggaran sebesar Rp 235.574.661,39. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan menggunakan anggaran tersebut secara produktif dan efisien, agar struktur pendapatan dan belanja daerah menjadi ideal dan seimbang.

Adapun Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang anggarannya diperinci pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Anggaran 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.163.498.764,00	20.927.924.102,61	-235.574.661,39	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.055.894.122,00	20.412.735.671,61	356.841.549,61	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.131.636,00	8.072.582,10	-97.059.053,90	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	1.530.000,00	-48.470.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.032.300,00	1.032.300,00	0,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.251.800,00	1.251.800,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.032.300,00	1.032.300,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.251.800,00	2.096.909,10	845.109,10	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	248.418,00	248.418,00	0,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.018,00	315.018,00	0,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	565.837,00	-49.434.163,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.304.265.654,00	12.603.753.480,61	-700.512.173,39	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.066.773.000,00	12.387.644.826,61	-679.128.173,39	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	236.747.400,00	215.363.400,00	-21.384.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	248.418,00	248.418,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	248.418,00	248.418,00	0,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	248.418,00	248.418,00	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.365.720,00	30.668.730,00	-125.696.990,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156.365.720,00	30.668.730,00	-125.696.990,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.527.217,00	2.666.267.803,50	1.314.740.586,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.774.800,00	21.934.900,00	-5.839.900,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.706.220,00	26.069.560,00	-74.636.660,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.466.680,00	98.805.980,00	-27.660.700,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.996.800,00	2.123.571.300,00	1.794.574.500,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.159.009,00	25.949.500,00	-64.209.509,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.900.000,00	7.500.000,00	-17.400.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.656.760,00	276.750.880,00	-83.905.880,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.560.000,00	61.560.000,00	0,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	230.306.948,00	24.125.683,50	-206.181.264,50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.961.480,00	7.122.340,00	-216.839.140,00	
Pengadaan Mebel	101.730.350,00	3.281.200,00	-98.449.150,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.231.130,00	3.841.140,00	-118.389.990,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.752.809.616,00	4.002.804.100,00	249.994.484,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	814.100.000,00	957.195.980,00	143.095.980,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.938.709.616,00	3.045.608.120,00	106.898.504,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.832.799,00	1.094.046.635,40	-67.786.163,60	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.477.462,00	255.390.432,00	-36.087.030,00	
Pemeliharaan Mebel	14.544.000,00	7.272.000,00	-7.272.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	410.763.497,00	386.336.363,40	-24.427.133,60	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.650.000,00	410.650.000,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.397.840,00	34.397.840,00	0,00	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	340.613.230,00	209.638.230,00	-130.975.000,00	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	235.197.430,00	185.247.430,00	-49.950.000,00	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	8.659.960,00	4.534.960,00	-4.125.000,00	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.659.960,00	859.960,00	-37.800.000,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	187.877.510,00	179.852.510,00	-8.025.000,00	
Penataan Pendaftaran Penduduk	41.119.920,00	1.419.920,00	-39.700.000,00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	16.159.960,00	859.960,00	-15.300.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	24.959.960,00	559.960,00	-24.400.000,00	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	55.635.920,00	22.110.920,00	-33.525.000,00	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	28.225.960,00	8.425.960,00	-19.800.000,00	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	27.409.960,00	13.684.960,00	-13.725.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	8.659.960,00	859.960,00	-7.800.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	8.659.960,00	859.960,00	-7.800.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	127.109.720,00	26.603.760,00	-100.505.960,00	
Pelayanan Pencatatan Sipil	68.629.840,00	20.219.840,00	-48.410.000,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.239.960,00	17.939.960,00	-14.300.000,00	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	13.659.960,00	859.960,00	-12.800.000,00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	4.909.960,00	859.960,00	-4.050.000,00	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	17.819.960,00	559.960,00	-17.260.000,00	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	42.319.920,00	5.523.960,00	-36.795.960,00	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	21.159.960,00	4.664.000,00	-16.495.960,00	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	21.159.960,00	859.960,00	-20.300.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	16.159.960,00	859.960,00	-15.300.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	16.159.960,00	859.960,00	-15.300.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	505.265.597,00	202.522.905,00	-302.742.692,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	140.542.421,00	119.767.420,00	-20.775.001,00	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.159.960,00	8.484.960,00	-12.675.000,00	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	119.382.461,00	111.282.460,00	-8.100.001,00	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.659.960,00	559.960,00	-23.100.000,00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.659.960,00	559.960,00	-23.100.000,00	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	271.348.441,00	80.980.750,00	-190.367.691,00	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.899.940,00	1.699.940,00	-7.200.000,00	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.293.220,00	5.918.220,00	-6.375.000,00	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	65.972.120,00	13.582.120,00	-52.390.000,00	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	128.169.541,00	52.366.850,00	-75.802.691,00	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	56.013.620,00	7.413.620,00	-48.600.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	69.714.775,00	1.214.775,00	-68.500.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.221.555,00	621.555,00	-15.600.000,00	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	53.493.220,00	593.220,00	-52.900.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	134.616.095,00	76.423.536,00	-58.192.559,00	
Penyusunan Profil Kependudukan	134.616.095,00	76.423.536,00	-58.192.559,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	134.616.095,00	76.423.536,00	-58.192.559,00	
J U M L A H	21.163.498.764,00	20.927.924.102,61	-235.574.661,39	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapain tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA EMAS 2025, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkedaulatan.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang yang telah dirancang dalam RPJPN 2025-2045, periode pembangunan jangka menengah tertuang dalam RPJMN 2025-2029 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2025-2029. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2025-2029 dengan mengangkat Visi “BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2025”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2025-2029, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategis khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beberapa fokus utama mencakup peningkatan kualitas data kependudukan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya pencatatan sipil. Beberapa langkah yang dilakukan dalam arah strategi dan kebijakan tersebut, antara lain :

a. Peningkatan kualitas data kependudukan melalui penyempurnaan SIAK (Sistem Informasi Data Kependudukan, peningkatan akurasi data dan pemanfaatan data;
b. Optimalisasi kualitas data kependudukan melalui penyederhanaan proses, peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan.

c. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan dan partisipasi.
d. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana prasarana, peningkatan koordinasi.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2029
Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2025	1. Peningkatan kualitas data kependudukan;	Penyempurnaan SIAK (Sistem Informasi Data Kependudukan, Peningkatan akurasi data dan Pemanfaatan data
	2. Optimalisasi kualitas data kependudukan;	Penyederhanaan proses, peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan.
	3. Peningkatan kesadaran masyarakat;	Sosialisasi adminduk, pendidikan tentang kebijakan adminduk dan partisipasi masyarakat dalam adminduk
	4. Penguatan kelembagaan.	Peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana prasarana, peningkatan koordinasi.

Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, belum seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Semarang memahami untuk kemudian membutuhkan data kependudukan agar dapat mendukung program kerja pada perangkat daerah, sehingga belum banyak perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiil, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, tujuan pembangunan administrasi kependudukan jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang. Sedangkan Sasaran pembangunan administrasi

kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2025, maka disusun strategi pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan dan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2025, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Meningkatkan pembangunan pelayanan publik yang berkualitas di bidang Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel;
5. Pengembangan kualitas SDM;
6. Peningkatan dukungan sarana prasarana aparatur.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindaklanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional.
3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang”.

Sedangkan Sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;

3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota semarang		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan rata-rata dari : Rata-rata dari Persentase Kepemilikan KTP-el + Persentase Kepemilikan KK+Persentase Kepemilikan KIA + Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun +Persentase Akta Kematian	92,50
	1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Merupakan rata-rata dari :	94,88%
		1) Persentase Kepemilikan KTP-el	99,70%
		2) Persentase Kepemilikan KIA	77,00%
		3) Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98,40%
		4) Persentase Akta Kematian	100%
		5) Persentase Pemanfaatan Data dari OPD yang sudah ber-Perjanjian Kerjasama	100%
	2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1000
	3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Hasil Reviu AKIP dari Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025	79,50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

5.1 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang, dengan Indikator : Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP OPD.
3. Meningkatkan program dan kegiatan yang langsung turun ke masyarakat, melalui kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan Keliling;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini besumber dari APBD Kota Semarang
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.102,61		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	99.60%	99.60%	340.613.230	340.613.230	209.638.230	APBD Kota Semarang	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00%	77.00%	77.00%					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432.000 dokumen	432.000 dokumen	432.000 dokumen	235.197.430	235.197.430	185.247.430		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	8.659.960	8.659.960	4.534.960		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	38.659.960	38.659.960	859.960		
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.500 dokumen	323.500 dokumen	323.500 dokumen	187.877.510	187.877.510	179.852.510		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	41.119.920	41.119.920	1.419.920		
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	16.159.960	16.159.960	859.960		
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	24.959.960	24.959.960	559.960		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	55.635.920	55.635.920	22.110.920		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	28.225.960	28.225.960	8.425.960		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	27.409.960	27.409.960	13.684.960		
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	8.659.960	8.659.960	859.960		
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8.659.960	8.659.960	859.960		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	98.50%	98.50%	127.109.720	127.109.720	26.603.760	APBD Kota Semarang	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.475 dokumen	45.475 dokumen	45.475 dokumen	68.629.840	68.629.840	20.219.840		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.450 dokumen	45.450 dokumen	45.450 dokumen	32.239.960	32.239.960	17.939.960		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	13.659.960	13.659.960	859.960		
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.909.960	4.909.960	859.960		
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 paket	1 paket	1 Paket	17.819.960	17.819.960	559.960		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	42.319.920	42.319.920	5.523.960		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21.159.960	21.159.960	4.664.000		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21.159.960	21.159.960	859.960		
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	16.159.960	16.159.960	859.960		
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16.159.960	16.159.960	859.960		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	100%	100%	505.265.597	505.265.597	202.522.905	APBD Kota Semarang	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%					
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16 OPD	16 OPD	16 OPD					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	140.542.421	140.542.421	119.767.420		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	21.159.960	21.159.960	8.484.960		
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	119.382.461	119.382.461	111.282.460		
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	23.659.960	23.659.960	559.960		
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	23.659.960	23.659.960	559.960		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	271.348.441	271.348.441	80.980.750		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8.899.940	8.899.940	1.699.940		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12.293.220	12.293.220	5.918.220		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	65.972.120	65.972.120	13.582.120		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	6 laporan	5 laporan	128.169.541	128.169.541	52.366.850		
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	56.013.620	56.013.620	7.413.620		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	69.714.775	69.714.775	1.214.775		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16.221.555	16.221.555	621.555		
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	53.493.220	53.493.220	593.220		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	134.616.095	134.616.095	76.423.536	APBD Kota Semarang	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	134.616.095	134.616.095	76.423.536		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	134.616.095	134.616.095	76.423.536		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	20.055.894.122	20.055.894.122	20.412.735.672	APBD Kota Semarang	

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%					
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	100%	100%	105.131.636	105.131.636	8.072.582		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	50.000.000	1.530.000		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.032.300	1.032.300	1.032.300		
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.251.800	1.251.800	1.251.800		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.032.300	1.032.300	1.032.300		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.251.800	1.251.800	2.096.909,10		
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	248.418	248.418	248.418		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	315.018	315.018	315.018		
2.12.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	565.837		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100.00	13.304.265.654	13.304.265.654	12.603.753.481		
		Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang/ bulan	92 orang/ bulan	92 orang/ bulan	13.066.773.000	13.066.773.000	12.387.644.826,61		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	236.747.400	236.747.400	215.363.400		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	248.418	248.418	248.418		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	248.418	248.418	248.418		
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248.418	248.418	248.418		
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	156.365.720	156.365.720	30.668.730		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	120 orang	20 orang	156.365.720	156.365.720	30.668.730		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	1.351.527.217	1.351.527.217	2.666.267.804		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	27.774.800	27.774.800	21.934.900		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	2 paket	100.706.220	100.706.220	26.069.560		
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	126.466.680	126.466.680	98.805.980		
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	3 paket	328.996.800	328.996.800	2.123.571.300		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	90.159.009	90.159.009	25.949.500		
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24.900.000	24.900.000	7.500.000		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	360.656.760	360.656.760	276.750.880		
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	61.560.000	61.560.000	61.560.000		
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	230.306.948	230.306.948	24.125.683,50		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD									
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	223.961.480	223.961.480	7.122.340		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	21 unit	5 unit	101.730.350	101.730.350	3.281.200		
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	2 unit	122.231.130	122.231.130	3.841.140		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	3.752.809.616	3.752.809.616	4.002.804.100		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	814.100.000	814.100.000	957.195.980		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.938.709.616	2.938.709.616	3.045.608.120		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	1.161.832.799	1.161.832.799	1.094.046.635		

No Reke-ning	Rancangan Awal RKPD		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintahan Daerah									
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	23 unit	291.477.462	291.477.462	255.390.432		
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	200 unit	100 unit	14.544.000	14.544.000	7.272.000		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	450 unit	379 unit	410.763.497	410.763.497	386.336.363,40		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	410.650.000	410.650.000	410.650.000		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	34.397.840	34.397.840	34.397.840		
JUMLAH						21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.102,61		

BAB VI
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

6.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini, pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini berpedoman pada program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra periode 2021-2026; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelayanan adminduk online yang diberikan kepada masyarakat, melalui tata kelola SDM yang baik agar dengan minimnya jumlah SDM yang dimiliki tetap dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan tanggap kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan secara daring maupun luring. Hal ini akan berdampak turunnya kelurahan dan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan online sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminduk online di Kota Semarang.
2) Memberikan sosialisasi di berbagai media secara terus menerus kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan aplikasi pelayanan online administrasi kependudukan atau aplikasi SiDenok dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3) Meningkatkan capaian KIA (Kartu Idenitas Anak) dengan memperbanyak sosialisasi KIA kepada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang.
4) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Kelurahan-kelurahan se-Kota Semarang dengan melalui inovasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) yaitu E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian) adalah sebuah aplikasi berbasis android dan website untuk pelaporan kematian warga. Dengan adanya inovasi E-Pakem ini RT, RW dan Kelurahan dapat melaporkan secara langsung apabila ada warganya yang meninggal dunia. Dari pelaporan tersebut Disdukcapil akan menerima dan memproses menjadi Akta Kematian dan pengambilannya dilakukan oleh ahli waris warga yang meninggal.
5) Meningkatkan jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang melakukan Perjanjian Kerjasama terkait Pemanfaatan Data Kependudukan sehingga dapat digunakan untuk kemajuan pembangunan daerah.
6) Meningkatkan jumlah mitra yang berperjanjian kerjasama, yaitu dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Yayasan Layanan Kematian atau Instansi lainnya untuk percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

6.4 Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 pada Triwulan Ke-4 (empat) Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat

menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

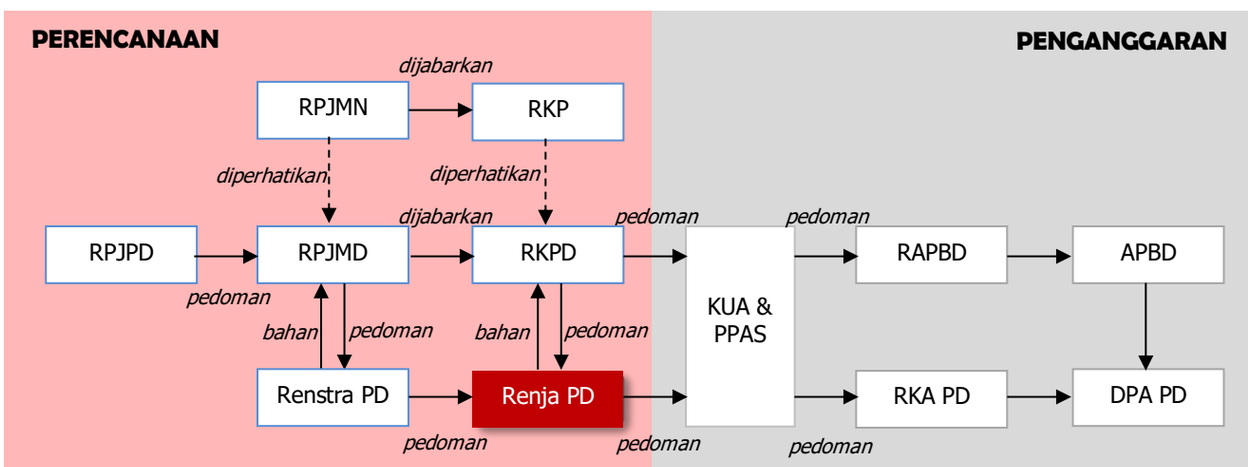

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2025. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dok	3 Dok	3 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Dok	1 Dok	3 Laporan	3 laporan	100 %	3 laporan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.14.01.2.01.08	Penyelenggara Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Laporan	4 laporan	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	40 orang/bln	38 orang/bln	95%	38 orang/bln	95%
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	5 Dok	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100%	12 laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	12 Paket	12 Paket	0 paket	0%	0 paket	0%
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pakey Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	12 Paket	12 Paket	6 paket	50%	6 paket	50%
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	12 Paket	12 Paket	6 paket	50%	6 paket	50%
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17 jenis	12 Paket	12 Paket	3 paket	25%	3 paket	25%
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 Paket	12 Paket	4 paket	50%	4 paket	50%
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	500 Orang	12 Laporan	12 Laporan	3 laporan	25%	3 laporan	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 Dok	12 Laporan	2 Laporan	16%	2 Laporan	16%
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7 unit	4 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Orang	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD							
2.14.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	85 Unit	81 unit	81 unit	68 unit	83%	68 unit	83%
2.14.01.2. 09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	82 Unit	133 unit	129 unit	52 unit	40%	52 unit	40%
2.14.01. 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	6 unit	5 unit	1 unit	20%	1 unit	20%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.33%	0.50%	0.33%	50%	0.33%	50%
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.33%	0.50%	0.33 %	50%	0.33 %	50%
2.14.02. 2.01.18	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan	0 kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal							
2.14.02.2.01.19	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	0 kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0%
2.14.02.2.01.21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	0 kegiatan	12 Kegiatan	11 Kegiatan	6 kegiatan	50%	6 kegiatan	50%
2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0%
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	0.33%	0.50%	0.33%	50%	0.33%	50%
2.14.02.2.02.09	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Keg	1 Dok	4 Laporan	2 Laporan	50%	2 Laporan	50%
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	15 Cetak	12 laporan	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	5 Keg	12 Dok	12 Laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	2100 Buku	1 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2 %	1.72%	2%	1.72 %	50%	1.72 %	50%
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44 %	77.73%	77.74%	77.735 %	50%	77.735 %	50%
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 laporan	10 laporan	160 laporan	60 laporan	38%	60 laporan	38%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	0 laporan	10 laporan	10 laporan	5 laporan	50%	5 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.03.2.01.11	Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan dokumentasi	0 dokumen	6 dokumen	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	umlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 dok	0 dok	16 Dok	10 Dok	62%	10 Dok	62%
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	0 organisasi	5 organisasi	6 organisasi	6 organisasi	100%	6 organisasi	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		dan Mitra Kerja							
2.14.03.2.02	KegiatanPendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	77.73%	77.74%	77.735%	50%	77.735%	50%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	16 kec	177 orang	177 orang	100 orang	56%	100 orang	56%
2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 organisasi	0 organisasi	177 organisasi	100 organisasi	56%	100 organisasi	56%
2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencan (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	0 laporan	12 laporan	12 Laporan	10 laporan	83%	10 laporan	83%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	7.00 %	5.13%	5.12%	5.127%	50%	5.127%	50%
		tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	5.00%	4.99%	4.997%	50%	4.997%	50%
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	4366 orang	4607 orang	2308 orang	50%	2308 orang	50%
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	2 Laporan	2 Laporan	1 laporan	50%	1 laporan	50%
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	22 unit	16 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	14 laporan	4 Laporan	2 laporan	50%	2 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan	100,00%	40 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	68 orang	30 Orang	30 orang	100%	30 orang	100%
2.14.03.2.03.14	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0 kab/kota	0 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	100%	1 kab/kota	100%
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan danPeningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44 %	77.73%	77.74%	77.735 %	50%	77.735 %	50%
2.14.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	16 dokumen	0 unit	177 laporan	100 laporan	56%	100 laporan	56%
2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	0 unit	O unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 kampung	177 kampung	177 kampung	74 kampung	42%	74 kampung	42%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	72.08%	72.09%	72.15%	100%	72.15%	100%
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	72.08%	72.09%	72.15%	100%	72.15%	100%
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	162 laporan	0 laporan	2 Laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	50 %
2.14.04.2.01.16	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	0 laporan/dok	16 laporan/dok	8 laporan	4 laporan	50%	4 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
2.14.04. 2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	umlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 laporan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	50 %
2.14.04. 2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok KegiatanKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	0 unit	25 unit	15 unit	0 unit	0 %	0 unit	0 %
2.14.04. 2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 laporan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	50%
2.14.04.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	0 orang	0 orang	90 orang	45 orang	50%	45 orang	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.01.24	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan							
2.14.04. 2.01. 28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 kelompok	0 kelompok	16 kelompok	9 kelompok	56 %	9 kelompok	56 %
2.14.04.2. 02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42%	72.08%	72.09%	72.15%	100%	72.15%	100%
2.14.04. 2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	6 laporan	2 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2.14.04.2 .02.05	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran ,Baduta/Balita)	0 laporan	10 laporan	10 laporan	4 laporan	40%	4 laporan	40%
2.14.04.2 .02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	0 laporan	10 laporan	10 laporan	4 laporan	40%	4 laporan	40%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik). Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN II	REALISASI sd 1 Juli 2025	%
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.540.886.924	9.648.445.032	33,81%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.033.776.700	470.020.689	45,47%
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	180.059.090	99.101.900	55,04%
1	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	111.400.000	99.101.900	88,96%
2	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	46.750.000	0	0,00%
3	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	18.150.000	0	0,00%
4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	3.759.090	0	0,00%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	853.717.610	370.918.789	43,45%
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.999.600	8.600.000	14,33%
6	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	298.568.110	204.256.750	68,41%
7	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	211.537.000	27.000.000	12,76%
8	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	283.612.900	131.062.039	46,21%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.559.147.429	2.478.336.923	25,93%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.190.560.080	180.360.000	15,15%
9	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	307.232.080	9.750.000	3,17%
10	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	320.000.000	40.310.000	12,60%
11	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.552.000	28.000.000	27,85%
12	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	213.440.000	82.925.000	38,85%
13	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	249.336.000	19.375.000	7,77%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.391.480.778	167.570.000	12,04%
14	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	926.438.720	0	0,00%
15	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	158.500.000	48.700.000	30,73%
16	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	306.542.058	118.870.000	38,78%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.142.135.331	1.503.484.445	29,24%
17	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.047.620.000	1.235.536.425	30,53%
18	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	16.900.000	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN II	REALISASI sd 1 Juli 2025	%
19	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	634.549.331	1.811.520	0,29%
20	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya	243.691.000	106.950.000	43,89%
21	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25.775.000	18.850.000	73,13%
22	Peningkatan Kesertaan KB Pria	42.375.000	27.000.000	63,72%
23	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	131.225.000	113.336.500	86,37%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.834.971.240	626.922.478	34,17%
24	Pembinaan Terpadu Kampung KB	108.224.640	162.800.000	150,43 %
25	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.063.825.000	12.525.000	1,18%
26	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	662.921.600	451.597.478	68,12%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.685.346.545	2.201.899.400	28,65%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	854.051.545	148.469.400	17,38%
27	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	121.894.530	35.490.000	29,12%
28	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	122.400.000	24.000.000	19,61%
29	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	275.219.515	8.500.000	3,09%
30	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	200.000.000	3.000.000	1,50%
31	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	83.925.000	54.669.400	65,14%
32	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	31.462.500	19.210.000	61,06%
33	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19.150.000	3.600.000	18,80%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.831.295.000	2.053.430.000	30,06%
34	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	142.795.000	131.880.000	92,36%
35	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.866.500.000	392.750.000	13,70%
36	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	3.822.000.000	1.528.800.000	40,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.262.616.250	4.498.188.020	43,83%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.505.834	0	0,00%
37	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.890.284	0	0,00%
38	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253.000	0	0,00%
39	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	208.000	0	0,00%
40	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.000	0	0,00%
41	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	832.000	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN II	REALISASI sd 1 Juli 2025	%
42	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.800	0	0,00%
43	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	26.724.750	0	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.795.727.240	3.788.689.193	48,60%
44	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.534.225.240	3.677.679.193	48,81%
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	562.000	0	0,00%
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	260.940.000	111.010.000	42,54%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.914.235	34.848.200	10,05%
47	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.666.546	0	0,00%
48	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.044.255	0	0,00%
49	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.351.337	2.720.000	5,51%
50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.795.355	6.500.000	4,93%
51	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.160.362	758.200	14,69%
52	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.957.500	5.270.000	24,00%
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.938.880	19.600.000	19,61%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.680.000	0	0,00%
54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.680.000	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.755.142	383.950.516	41,12%
55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.465.742	111.304.966	44,44%
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	683.289.400	272.645.550	39,90%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.033.799	290.700.111	25,37%
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	9.257.350	25,75%
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	655.542.000	185.352.764	28,27%
59	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.156.857	42.956.997	40,09%
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	347.379.942	53.133.000	15,30%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 14 kegiatan serta 60 sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah sebesar Rp 28.540.886.924 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.648.445.032. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.892.441.892.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 `tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	1.86%	1.75%	1.74%	1,72%	1,72%	0	2.00 %
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS Unmeet need	7.00%	9.08 %	8.56 %	8.04 %	7.52 %	7.00 %	10,89%	9.13%	8.42%	5,13%	5,127%	0	7.52 %
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.10 %	11.00 %	10.90 %	10.80%	19,63%	7.91%	6.18%	5,00%	4,997	0	10.90 %
	Peserta KB Aktif	78.00%	77.04 %	77.14 %	77.24 %	77.34 %	77.44%	73,88%	76.08%	77.72 %	77,73%	77,735%	0	77.34 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0,58%	0.39%	0.31%	0,33%	0.33%	0	0.50 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02 %	60.12 %	60.22 %	60.32 %	60.42%	39,39%	72.90%	69.51 %	72,08%	72,15%	0	60.32 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.37	74.95	75.15	75.35	75.55	75.75	79.75	75.95	76.10	76.40	79.75	0	75.55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, yang mempunyai target setiap tahunnya 2.00 %
b. Sasaran 1 “Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB” memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
    1. Indikator “PUS Unmeet need” berhasil memenuhi target yaitu target 5.127 tercapai 5.127 (100%). Berhasil menurunkan capaian dibandingkan tahun 2024 sebesar 5.13 (136,54%).
    2. Indikator “tingkat putus alat kontrasepsi (DO)” berhasil menurunkan Cakupan Tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dengan target 4.997 tercapai 4.997 (100%). Berhasil menurunkan capaian dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,00 (154,54%).
    3. Indikator “peserta KB Aktif” berhasil memenuhi target yaitu target 77,735 tercapai 77,735 (100%). Berhasil meningkatkan capaian dibandingkan tahun 2024 sebesar 77.73.
    4. Indikator “PUS yang isterinya < 20 tahun” berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 tercapai 0,33 (134.00%). Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 138,00% (0,31).
c. Sasaran 2 “Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”
    1. Indikator “keaktifan anggota Bina Keluarga” telah berhasil meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif dari yang ditargetkan 72,06 tercapai 72,15 atau berhasil mencapai target 100,12%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program KB masih kurang menarik bagi masyarakat, terutama KB pria ;
2. Masih terdapat keluarga berisiko stunting yang tidak mau didampingi ;

3. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya pola asuh terhadap keluarga (Balita, Remaja, Lansia) ;
4. Kemampuan kader masih belum sesuai dengan yang diharapkan ;
5. Sekolah siaga kependudukan belum menjadi prioritas sekolah ;
6. Fungsi rumah data belum optimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya :

1. Pendekatan pelayanan kepada Masyarakat, edukasi melibatkan tenaga pakar (keahlian khusus) dan penambahan uang pengganti tidak bekerja untuk KB pria ;
2. Bekerjasama dengan kader, tokoh Masyarakat, pemangku wilayah serta kolaborasi dengan OPD terkait untuk memberikan pengertian pentingnya pendampingan keluarga berisiko stunting ;
3. Kolaborasi dengan Institusi dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang lain ;
4. Peningkatan kapasitas kader sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Masyarakat saat ini ;
5. Penguatan pemahaman dan implementasi sekolah siaga kependudukan di satuan Pendidikan ;
6. Mengadakan orientasi dan pemanfaatan rumah data.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1). Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata sehingga mengakibatkan :
      - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan ;
      - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence ;
      - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun ;
      - Rendahnya kesertaan KB Pria.

   2). Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi yang mengakibatkan :
      - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja :
      - Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah :

- Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

3) Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal, antara lain Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)

b. Peluang

Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

- Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga legislatif terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- Peran Mitra kerja terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) semakin dapat diandalkan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				30.770.763.293,83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				30.770.763.293,83	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	9.659.816.626,83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	9.659.816.626,83	
		Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100			Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100		
		Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100			Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	50.498.584	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	50.498.584	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.134.784	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.134.784	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	208.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	208.000	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	253.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	253.000	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	832.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	832.000	
6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas	3 Laporan	344.800	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian	3 Laporan	344.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				n, Semua Kel/Desa	Penduduk dan Keluarga Berencana			
7	Penyelenggara walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	28.473.000	Penyelenggara walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	28.473.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	7.151.459.704,83	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	7.151.459.704,83	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/ bulan	6.889.957.704,83	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/ bulan	6.889.957.704,83	
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	260.940.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	260.940.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	369.132.702	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	369.132.702	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	19.055.826	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	19.055.826	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pakey Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	18.309.351	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pakey Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	18.309.351	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	29.733.792	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	29.733.792	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	126.281.103	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	126.281.103	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	10.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	10.800.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
16	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	40.013.750	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	40.013.750	
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.938.880	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.938.880	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	31.062.677,80	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	31.062.677,80	
18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	25.809.003,40	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	25.809.003,40	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	960.054.248	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	960.054.248	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	278.863.168	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	278.863.168	
20	Sub Kegiatan	Kota Semarang,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		681.191.080	Sub Kegiatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		681.191.080	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	1.097.608.710,20	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	1.097.608.710,20	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	1 unit	35.955.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	1 unit	35.955.000	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	81 unit	655.542.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	81 unit	655.542.000	
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	125.174.875	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	125.174.875	
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	5 unit	286.190.509,60	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	5 unit	286.190.509,60	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	2.041.930.900	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	2.041.930.900	
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	434.134.846	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	434.134.846	
25	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	100.000.000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	100.000.000	
26	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	64.484.846	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	64.484.846	
27	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11 Kegiatan	249.500.000	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11 Kegiatan	249.500.000	
28	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program	0 kegiatan	150.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program	0 kegiatan	150.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	1.607.796.054,00	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	1.607.796.054,00	
29	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 laporan	59.999.600	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 laporan	59.999.600	
30	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	12 Dokumen	1.129.395.280	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	12 Dokumen	1.129.395.280	
31	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan	196.537.000	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan	196.537.000	
32	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen	221.864.174	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen	221.864.174	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	11.133.669.222	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Semarang, Semua Kecamata			11.133.669.222	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77,34%	1.393.090.480	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	1.393.090.480	
33	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	160 Laporan	364.832.080	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	160 Laporan	364.832.080	
34	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	320.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	320.000.000	
35	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan dokumentasi	12 Dokumen	100.552.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan dokumentasi	12 Dokumen	100.552.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
36	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	358.370.400	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	358.370.400	
37	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	249.336.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	249.336.000	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.34%	1.324.219.278	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.34%	1.324.219.278	
38	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	177 orang	926.438.720	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	177 orang	926.438.720	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
39	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177 organisasi	154.022.320	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177 organisasi	154.022.320	
40	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	243.758.238	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	243.758.238	
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	7.52%	5.869.057.124	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	7.52%	5.869.057.124	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.90%				tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.90%		
41	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4607 orang	4.837.350.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4607 orang	4.837.350.000	
42	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 Laporan	34.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 Laporan	34.100.000	
43	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 unit	485.450.109	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 unit	485.450.109	
44	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	257.462.015	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	257.462.015	
45	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan	12 Laporan	18.850.000	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan	12 Laporan	18.850.000	
46	Sub Kegiatan	Kota Semarang, Semua		30 Orang	69.725.000	Sub Kegiatan	Kota Semarang, Semua		30 Orang	69.725.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang			
47	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 kab/kota	169.745.000	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 kab/kota	169.745.000	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34%	2.547.302.340	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34%	2.547.302.340	
48	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	177 laporan	43.180.740	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	177 laporan	43.180.740	
49	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 unit	1.841.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 unit	1.841.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
50	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 kampung	662.921.600	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 kampung	662.921.600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	7.935.346.545	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	7.935.346.545	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	854.051.545	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	854.051.545	
51	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	2 Laporan	94.575.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	2 Laporan	94.575.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengelolaan Keuangan Keluarga)					Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
52	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 laporan /dokumen	122.400.000	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 laporan/dokumen	122.400.000	
53	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	255.834.065	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	255.834.065	
54	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 unit	220.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 unit	220.000.000	
55	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan	2 laporan	110.629.980	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	2 laporan	110.629.980	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			Keluarga Akseptor (UPPKA)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			
56	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 orang	31.462.500	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 orang	31.462.500	
57	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	16 kelompok	19.150.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	16 kelompok	19.150.000	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta	Kota Semarang, Semua		60.32%	7.081.295.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran	Kota Semarang, Semua		60.32%	7.081.295.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif			Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif			
58	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	362.795.000	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	362.795.000	
59	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	2.866.500.000	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	2.866.500.000	
60	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	10 Laporan	3.852.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	10 Laporan	3.852.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Semua Kel/Desa				pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	n, Semua Kel/Desa				

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas"

dengan indikator tujuan "Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang"

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB ;
2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera di Kota Semarang ;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah'

dengan indikator sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total ;
2. Meningkatan anggota bina keluarga aktif ;
3. Menurunya PUS yang isterinya <20 tahun ;
4. Meningkatkan peserta KB Aktif ;
5. Menurunkan tingkat putus pemakaian alat kontrasepsi ;
6. Menunurunkan PUS Unmet Need.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	*rasio*	2

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi	PUS Unmeet need	*Persen*	5,12
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	*Persen*	4,99
	Peserta KB Aktif	*Persen*	77,74
	PUS yang isterinya < 20 tahun	*Persen*	0,50
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	*Persen*	72,09
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*predikat*	76,5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 ;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Keluarga” dan indikator sasaran “mempertahankan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dan meningatnya kesejahteraan keluarga (Indeks Kebahagiaan)”
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					31.900.136.672	31.900.136.672	30.770.763.293,83		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	100	100	10.784.346.697	10.784.346.697	9.659.816.626,83		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100	100	100					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100					
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	100	112.677.400	112.677.400	50.498.584		
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	51.962.000	51.962.000	20.134.784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	253.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	208.000	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	253.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	832.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.495.800	2.495.800	344.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.01.08	Penyelenggara walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	28.473.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	100	7.800.524.840	7.800.524.840	7.151.459.704,83		
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/ bulan	40 orang/ bulan	40 orang/ bulan	7.534.225.240	7.534.225.240	6.889.957.704,83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
									PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	862.000	862.000	562.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	265.437.600	265.437.600	260.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	664.370.771	664.370.771	369.132.702		
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.666.546	21.666.546	19.055.826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pakey Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.044.255	17.044.255	18.309.351	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	49.351.337	49.351.337	29.733.792	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
									DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	146.078.778	146.078.778	126.281.103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.198.975	35.198.975	10.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	44.815.000	44.815.000	40.013.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.215.880	350.215.880	124.938.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	2.680.000	2.680.000	31.062.677,80		
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	2.680.000	2.680.000	25.809.003,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	933.755.142	933.755.142	960.054.248		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.465.742	250.465.742	278.863.168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	683.289.400	683.289.400	681.191.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	100	100	1.270.338.544	1.270.338.544	1.097.608.710,20		
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	1 unit	1 unit	1 unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	81 unit	81 unit	81 unit	776.198.142	776.198.142	655.542.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	129 unit	129 unit	107.156.857	107.156.857	125.174.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	5 unit	347.379.942	347.379.942	286.190.509,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	0.50%	0.50%	2.085.599.600	2.085.599.600	2.041.930.900		
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	0.50%	0.50%	436.918.067	436.918.067	434.134.846		
2.14.02.2.01.18	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	130.750.000	130.750.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.02.2.01.19	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	211.601.400	211.601.400	64.484.846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.02.2.01.21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	52.566.667	52.566.667	249.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	42.000.000	42.000.000	150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	0.50%	0.50%	1.648.681.533	1.648.681.533	1.607.796.054,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
2.14.02.2.02.09	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 laporan	4 laporan	4 laporan	59.999.600	59.999.600	59.999.600	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	848.406.450	848.406.450	1.129.395.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	418.128.750	418.128.750	196.537.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	322.146.733	322.146.733	221.864.174	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2%	2%	2%	10.908.552.575	10.908.552.575	11.133.669.222		
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34%	77.34%	77.34%	1.394.146.080	1.394.146.080	1.393.090.480		
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	160 Laporan	160 Laporan	160 Laporan	307.232.080	307.232.080	364.832.080	DAK NON FISIK-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	320.000.000	320.000.000	320.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan dokumentasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.552.000	100.552.000	100.552.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	umlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	417.026.000	417.026.000	358.370.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	249.336.000	249.336.000	249.336.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.34%	77.34%	77.34%	1.805.249.880	1.805.249.880	1.324.219.278		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	177 orang	177 orang	177 orang	926.438.720	926.438.720	926.438.720	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177 organisasi	177 organisasi	177 organisasi	308.811.160	308.811.160	154.022.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	570.000.000	570.000.000	243.758.238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	7.52%	7.52%	7.52%	5.725.409.371	5.725.409.371	5.869.057.124		
		tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.90%	10.90%	10.90%					
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan	4607 orang	4607 orang	4607 orang	4.047.620.000	4.047.620.000	4.837.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							(PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCAN A DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.150.000	19.150.000	34.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 unit	12 unit	12 unit	644.549.331	644.549.331	485.450.109	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kesprodi di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	545.325.000	545.325.000	257.462.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	136.315.040	136.315.040	18.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	62.600.000	62.600.000	69.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Sub Kegiatan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	269.850.000	269.850.000	169.745.000	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.03.2.03.14	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan							DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34%	77.34%	77.34%	1.983.747.244	1.983.747.244	2.547.302.340		
2.14.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	177 laporan	177 laporan	177 laporan	182.424.630	182.424.630	43.180.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 unit	16 unit	16 unit	1.138.401.014	1.138.401.014	1.841.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 kampung	177 kampung	177 kampung	662.921.600	662.921.600	662.921.600	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	60.32%	60.32%	8.121.637.800	8.121.637.800	7.935.346.545		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	60.32%	60.32%	1.263.087.800	1.263.087.800	854.051.545		
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	207.094.530	207.094.530	94.575.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.01.16	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 laporan/dok	8 laporan/dok	8 laporan/dok	122.400.000	122.400.000	122.400.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.04.2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	389.905.470	389.905.470	255.834.065	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	15 unit	15 unit	15 unit	215.000.000	215.000.000	220.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		tersedia								
2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	217.687.800	217.687.800	110.629.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 orang	90 orang	90 orang	66.000.000	66.000.000	31.462.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.01.28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	16 kelompok	16 kelompok	16 kelompok	45.000.000	45.000.000	19.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32%	60.32%	60.32%	6.858.550.000	6.858.550.000	7.081.295.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	170.050.000	170.050.000	362.795.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.14.04.2.02.05	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.866.500.000	2.866.500.000	2.866.500.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	3.822.000.000	3.822.000.000	3.852.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	
JUMLAH						31.900.136.672	31.900.136.672	30.770.763.293,83		

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

17. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

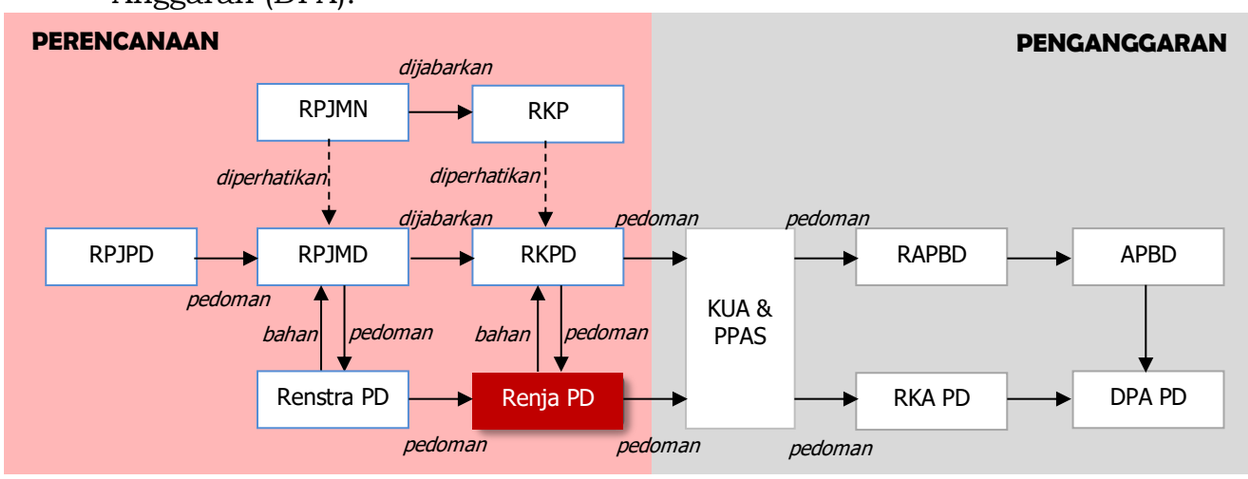

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh:

1. Ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024;
2. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	20	12	4	0	-	12	60,00
2.15.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	5	3	1	0	-	3	60,00
2.15.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	5	3	1	0	-	3	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	5	3	1	0	-	3	60,00
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	5	3	1	0	-	3	60,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	5	4	2	2	100,00	6	120,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	10	15	12	6	50,00	21	210,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	398	199	199	199	100,00	398	100,00
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	24	12	6	50,00	30	83,33
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1	0	0	0	-	0	-
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1	0	0	0	-	0	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	5	2	1	0	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	2	1	0	-	2	66,67
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1	0	0	0	-	0	-
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semsteran	5	2	1	1	100,00	3	60,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	4	1	1	100,00	5	100,00
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	5	2	1	1	100,00	3	60,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	5	3	2	0	-	3	60,00
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	1	1	0	-	1	50,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1500	900	300	0	-	900	60,00
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	-	0	-
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1	1	0	0	-	1	100,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	205	66	0	0	-	66	32,20
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2	1	1	100,00	3	75,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	5	4	3	1	33,33	5	100,00
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	165	48	0	0	-	48	29,09
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	150	97	0	0	-	97	64,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Jumlah Paket Bahan Logistik	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml barang cetakan	125	53	0	0	-	53	42,40
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan MInuman	22.500	9100	0	0	-	9100	40,44
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	24	12	6	50,00	30	83,33
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	60	24	0	0	-	24	40,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	24	12	6	50,00	30	83,33
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	30	24	0	0	-	24	80,00
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	55	38	3	2	66,67	40	72,73

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4	5	1	0	-	5	125,00
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	17	11	1	0	-	11	64,71
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	8	1	1	100,00	9	75,00
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35	23	1	1	100,00	24	68,57
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	10.000,00	6950	0	0	-	6950	69,50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2	1	1	1	100,00	2	100,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36	12	6	50,00	42	70,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	24	12	12	6	50,00	18	75,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5	3	1	1	100,00	4	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	355	279	116	116	100,00	395	111,27
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20	12	4	4	100,00	16	80,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	9	5	3	60,00	12	120,00
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	14	3	2	66,67	16	64,00
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55	30	12	6	50,00	36	65,45
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	60	24	0	0	-	24	40,00
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3	2	1	1	100,00	3	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68,15	71,99	66,82	57,83	86,55	129,82	190,49
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	90,04	92	90,04	97,87	180,08	191,57
		Jml trayek BRT	15	13	13	13	100,00	26	173,33
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30	33,51	31	27,56	88,90	61,07	203,57
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,01	5,53	6,94	5,55	79,97	11,08	158,06
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100	300	100	50	50,00	350	350,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	32	30	13	5	38,46	35	109,38
		Pengiriman trem dari belanda	1	0	0	0	-	0	-
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2	2	0	0	-	2	100,00
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1	0		0	-	0	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	25	12	0	0	-	12	48,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	88	32	56	22	39,29	54	61,36
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	26	13	0	0	-	13	50,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3783	585	3198	1611	50,38	2196	58,05
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	14	6	0	0	-	6	42,86
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	222	119	103	62	60,19	181	81,53
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.100,00	481	82	63	76,83	544	49,45
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	15	9	3	3	100,00	12	80,00
2.15.02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2	2	0	0	-	2	100,00
		Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang teenuhi.	91	48	20	20	100,00	68	74,73
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	15	9	3	3	100,00	12	80,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Penyelenggaraan parkir	60	12	12	6	50,00	18	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
	Pembangunan Fasilitas Parkir								
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	60	36	12	6	50,00	42	70,00
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3236	1624	800	400	50,00	2024	62,55
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasa	60	36	12	6	50,00	42	70,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danTerbangunnya Fasilitas	36	24	12	6	50,00	30	83,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	60	36	12	6	50,00	42	70,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7	2	29	0	-	2	28,57
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000,00	44.200	5300	5300	100,00	49500	90,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Teelihara	175	105	35	35	100,00	140	80,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	60	36	12	6	50,00	42	70,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	20	4	0	0	-	4	20,00
		Detector speed	2	0	0	0	-	0	-
		Jml mesin e tiketing	20	20	0	0	-	20	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Jml Shelter BRT	2	1	0	0	-	1	50,00
		Komputer	22	22	0	0	-	22	100,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	14	4	0	0	-	4	28,57
		Jml studi / jasa konsultasi	12	6	0	0	-	6	50,00
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	24	12	12	6	50,00	18	75,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	60	24	0	0	-	24	40,00
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	36	24	12	6	50,00	30	83,33
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60	36	12	6	50,00	42	70,00
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	5	2	0	0	-	2	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	5	4	2	1	50,00	5	100,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	10	4	0	0	-	4	40,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9	6	1	1	100,00	7	77,78
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	2	2	0	0	-	2	100,00
		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	28	16	12	6	50,00	22	78,57
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	60	36	12	6	50,00	42	70,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalulintas dan penumpang kapal atau pesawat	60	24	0	0	-	24	40,00
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	60	24	0	0	-	24	40,00
		Penyuluhan awak angkutan barang	5	2	0	0	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	36	24	12	6	50,00	30	83,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Manajemen Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum							
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	500	300	100	50	50,00	350	70,00
		Pelayanan angkutan	500	300	100	50	50,00	350	70,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	2	2	0	0	-	2	100,00
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1020	474	287	287	100,00	761	74,61
		Kertas Thermal E-Tiket	157.500,00	63.000	0	0	-	63000	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Operasional BRT	60	24	0	0	-	24	40,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	15	12	12	6	50,00	18	120,00
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	12	6	0	0	-	6	50,00
		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	4	1	1	100,00	5	100,00
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	10	6	2	1	50,00	7	70,00
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	2	0	0	-	2	25,00
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	Jml dokumen angkutan / trayek	5	2	0	0	-	2	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	10	6	2	1	50,00	7	70,00
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	10	2	0	0	-	2	20,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	0	0	-	2	66,67
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah kegiatan	5	3	1	1	100,00	4	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	12	4	2	1	50,00	5	41,67
2.15.02.2.15.03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml aplikasi	5	2	0	0	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	1	1	100,00	3	100,00
2.15.02.2.15.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	10	5	0	0	-	5	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*10*
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	14	13	1	1	100,00	14	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah sejumlah 25 sub kegiatan.

Ada 2 sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami efisiensi yaitu “Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota”, dan “Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 setelah adanya efisiensi belanja barang dan jasa. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.716.033.627	27.222.452.825	34,15
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.847.200	3.000.000	2,57
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.536.400	-	-
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.032.300	-	-
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.131.800	-	-
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.032.300	-	-
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.251.800	-	-
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.578.800	3.000.000	83,83
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.283.800	-	-
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.086.831.400	8.076.288.440	34,98
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.559.265.000	7.863.488.440	34,86
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	515.295.000	212.800.000	41,30
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.823.800	-	-
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.023.800	-	-

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.423.800	-	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.343.787	204.659.749	56,02
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.802.500	-	-
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	304.541.287	204.659.749	67,20
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.328.902.556	278.327.041	20,94
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.770.077	40.100.970	45,17
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.611.315	30.198.750	16,36
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.109.915	23.836.000	30,91
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.404.195	38.438.400	36,12
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.349.723	31.469.550	22,75
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	9.688.125	21,53
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.950.000	104.595.246	42,01
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	439.707.331	-	-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.394.889.758	769.700.000	55,18
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.077.421.500	769.700.000	71,44
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	41.558.400	-	-
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.258.962	-	-
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.858.400	-	-
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.792.496	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.316.052.800	3.743.348.275	51,17
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000	5.400.000	11,25
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.321.690.800	669.603.175	50,66
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.946.362.000	3.068.345.100	51,60
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.607.166.126	1.142.981.479	20,38
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	6.491.154	18,05
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.729.709.836	975.808.122	26,16

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	157.420.853	35.442.300	22,51
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.117.481.000	-	-
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.619.821	29.897.850	61,49
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	517.979.616	95.342.053	18,41
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.500.000.000	13.004.147.841	32,11
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.500.000.000	13.004.147.841	32,11
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	246.080.047.116	106.072.485.978	43,10
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	496.363.600	-	-
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	496.363.600	-	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.699.628.843	3.900.291.320	30,71
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.380.467.158	1.452.414.400	19,68
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.948.518.310	1.558.182.720	52,85
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.744.567.049	526.236.950	30,16
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	626.076.326	363.457.250	58,05
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.458.237.223	277.155.248	19,01
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	223.585.168	74.799.248	33,45
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.234.652.055	202.356.000	16,39
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.819.078.110	827.427.690	45,49
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	503.056.750	338.712.690	67,33
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.316.021.360	488.715.000	37,14

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.651.002.834	288.634.995	10,89
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.444.042.252	-	-
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	246.507.519	-	-
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	960.453.063	288.634.995	30,05
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.389.393.070	972.452.750	40,70
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.465.612.610	507.259.750	34,61
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	879.394.460	465.193.000	52,90
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	44.386.000	-	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	25.350.000	4.950.000	19,53
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6.750.000	-	-
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	18.600.000	4.950.000	26,61
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4.909.737.790	600.672.709	12,23
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4.909.737.790	600.672.709	12,23
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.137.072.596	99.122.698.266	45,23
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	255.955.420	243.055.381	94,96
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.881.117.176	98.879.642.885	45,18
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.949.520	12.300.000	6,06

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.949.520	12.300.000	6,06
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.950.000	750.000	18,99
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.950.000	750.000	18,99
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	249.155.530	49.153.000	19,73
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	249.155.530	49.153.000	19,73
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.128.000	16.000.000	41,96
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.603.000	-	-
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	31.525.000	16.000.000	50,75
JUMLAH		325.796.080.743	133.294.938.803	40,91

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 21 kegiatan dan 65 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebesar

Rp 325.796.080.743,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 133.294.938.803,00 atau 40,91%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 192.501.141.940,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI				Proyeksi 2025
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,54	0,52	0,53	0,52	0,52
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,92	0,88	0,88	0,88
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	63	64,2	65,51	66,82	68,15	67,71	69,32	71,99	57,83	72
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	66	67	68	69	70	68,11	71,5	73,6	75,25	75,25

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan dengan indikator Kinerja lalu lintas ditargetkan 0,64 telah tercapai 0,52;

b. Sasaran Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan idikator Konektivitas Kota ditargetkan 0,59 telah tercapai 0,88;
c. Sasaran Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang ditargetkan 66,82 telah tercapai 57,83;
d. Sasaran Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP ditargetkan 69 telah tercapai 75,25.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Beberapa pengusaha angkutan umum tidak mampu meremajakan armadanya, sehingga tidak bisa melayani penumpang;
2. Peningkatan volume lalu lintas kendaraan akibat dari berputarnya roda ekonomi pascapandemi yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
   - Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.
b. Peluang:
   - Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
   - Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis;

b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan lalu lintas angkutan jalan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				359.815.602.971	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				362.565.602.971	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	78.350.599.765	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	78.350.599.765	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 Persen		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	100.00 Persen				Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	100.00 Persen		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	116.847.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	116.847.200	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	53.536.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	53.536.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perencanaan Perangkat Daerah										
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.032.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.032.300	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.131.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.131.800	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.032.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.032.300	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.251.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.251.800	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.578.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.578.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.283.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.283.800	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	20.356.248.889	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	20.356.248.889	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/ bulan	19.825.418.489	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/ bulan	19.825.418.489	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	518.559.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	518.559.000	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.823.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.823.800	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.023.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.023.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.423.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.423.800	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	446.095.177	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	446.095.177	
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	91.605.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	91.605.000	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	354.490.177	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	354.490.177	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	1.005.754.423	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	1.005.754.423	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.770.077	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.770.077	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	138.406.788	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	138.406.788	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	77.109.915	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	77.109.915	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.404.195	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.404.195	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.349.723	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.349.723	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.294.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.294.000	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.950.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.950.000	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	127.469.725	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	127.469.725	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	1.308.538.862	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	1.319.197.970	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.077.421.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.077.421.500	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	6.926.400	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	45.258.962	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	45.258.962	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	185.858.400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	185.858.400	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.732.708	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	7.665.201.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	7.654.541.942	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	37.340.892	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.497.730.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.497.730.800	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.119.470.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.119.470.250	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	5.682.379.726	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	5.682.379.726	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	3.729.709.836	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	3.729.709.836	
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	157.420.853	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	4 Unit	157.420.853	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Angkutan Darat Tak Bermotor							Dibayarkan Perizinannya			
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.117.481.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.117.481.000	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	48.619.821	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	48.619.821	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	593.193.216	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	593.193.216	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	41.769.534.438	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	41.769.534.438	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	41.769.534.438	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	41.769.534.438	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jml trayek BRT	15.00	281.465.003.207	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jml trayek BRT	15.00	284.215.003.207	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33				Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33		
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,82				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,82		
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,94				Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,94		
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92				Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	596.368.115	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	1.142.368.075	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	596.368.115	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	13 Dokumen	1.142.368.075	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	15.481.276.650	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	17.485.308.520	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	47 Unit	7.981.895.394	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	56 Unit	8.376.700.194	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	572 Unit	5.128.737.882	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3198 Unit	6.737.964.952	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	1.744.567.049	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	1.744.567.049	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	626.076.326	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	626.076.326	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	1.372.624.973	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	1.372.624.973	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	20 Orang	204.350.918	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	20 Orang	204.350.918	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	1.168.274.055	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	1.168.274.055	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.023.764.710	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.023.764.710	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	387.152.270	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	800 Dokumen	387.152.270	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.636.612.440	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.636.612.440	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	1.684.372.129	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	1.684.372.129	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	29 Unit	496.645.797	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	29 Unit	496.645.797	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5300 Dokumen	246.507.519	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5300 Dokumen	246.507.519	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	941.218.813	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	941.218.813	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	12 bulan	2.581.350.250	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	12 bulan	2.581.350.250	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.657.569.790	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.657.569.790	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	879.394.460	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	879.394.460	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	44.386.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	44.386.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan Andalalin	1 tahun	25.350.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan Andalalin	1 tahun	25.350.000	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	6.750.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	6.750.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	18.600.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	18.600.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12 bulan	5.388.969.070	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12 bulan	5.588.937.240	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	5.388.969.070	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	5.588.937.240	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	251.805.244.260	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	251.805.244.260	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	255.955.420	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	255.955.420	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	287 Unit	251.549.288.840	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	287 Unit	251.549.288.840	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Kabupaten/Kota yang Tersedia			
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	202.949.520	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	202.949.520	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.949.520	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.949.520	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	15.450.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	15.340.000	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	110.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.450.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.230.000	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	249.155.530	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	249.265.530	
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	110.000	
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	249.155.530	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan	1 Dokumen	249.155.530	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	38.128.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	38.128.000	
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	30 Unit	6.603.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	30 Unit	6.603.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.525.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.525.000	
Jumlah					359.815.602.971					362.565.602.971	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.

3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;

4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.

5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan"

dengan indikator tujuan "Kinerja lalu lintas".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi yang dengan indikator Konektivitas Kota;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
3. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,64
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	Rasio	0,59
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	66,82
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	68,22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur" serta indikator sasaran "Rasio konektivitas kabupaten/kota" dan "Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	80.213.655.576	80.213.655.576	78.350.599.765		
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	120.847.200	120.847.200	116.847.200		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.036.400	55.036.400	53.536.400	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	2.532.300	2.032.300	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.631.800	2.631.800	2.131.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	2.532.300	2.032.300	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	2.751.800	2.751.800	2.251.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	3.578.800	3.578.800	3.578.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	1.783.800	1.783.800	1.283.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	25.092.993.400	25.092.993.400	20.356.248.889		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/bulan	212 Orang/bulan	212 Orang/ bulan	24.559.627.000	24.559.627.000	19.825.418.489	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	515.295.000	515.295.000	518.559.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.623.800	8.623.800	5.823.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	7.423.800	7.423.800	5.023.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.023.800	2.023.800	1.423.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	380.343.787	380.343.787	446.095.177		
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Unit	75.802.500	75.802.500	91.605.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	300 Paket	350 Paket	304.541.287	304.541.287	354.490.177	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	1 Paket	1 Paket	100 persen	1.676.289.036	1.676.289.036	1.005.754.423		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	88.770.077	88.770.077	88.770.077	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3 Paket	184.611.315	184.611.315	138.406.788	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	77.109.915	77.109.915	77.109.915	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	117.270.940	117.270.940	106.404.195	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	194.977.738	194.977.738	138.349.723	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.500.000	97.500.000	55.294.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	476.341.720	476.341.720	273.950.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	439.707.331	439.707.331	127.469.725	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	1.394.889.758	1.394.889.758	1.319.197.970		
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	3 Unit	1.077.421.500	1.077.421.500	1.077.421.500	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	1 Unit	41.558.400	41.558.400	6.926.400	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	45.258.962	45.258.962	45.258.962	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	185.858.400	185.858.400	185.858.400	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	1 Unit	44.792.496	44.792.496	3.732.708	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	5.315.690.800	5.315.690.800	7.654.541.942		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	37.340.892	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.321.690.800	1.321.690.800	1.497.730.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.946.000.000	3.946.000.000	6.119.470.250	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	5.732.601.595	5.732.601.595	5.682.379.726		
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118 Unit	118 Unit	116 Unit	3.851.496.702	3.851.496.702	3.729.709.836	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	4 Unit	157.420.853	157.420.853	157.420.853	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	5 Unit	1.117.481.000	1.117.481.000	1.117.481.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3 Unit	48.619.821	48.619.821	48.619.821	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	12 Unit	517.979.616	517.979.616	593.193.216	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	100 persen	100 persen	40.500.000.000	40.500.000.000	41.769.534.438		
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.500.000.000	40.500.000.000	41.769.534.438		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	15.00	15.00	15.00	248.760.466.561	248.760.466.561	284.215.003.207		
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	31	31	31					
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,82	66,82	66,82					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,94	6,94	6,94					
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92	92	92					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100 persen	100 persen	100 persen	496.363.600	496.363.600	1.142.368.075		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	13 Dokumen	496.363.600	496.363.600	1.142.368.075	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	100 persen	100 persen	12.858.769.240	12.858.769.240	17.485.308.520		
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	56 Unit	7.380.467.158	7.380.467.158	8.376.700.194	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	547 Unit	547 Unit	3198 Unit	2.963.761.805	2.963.761.805	6.737.964.952	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	103 Unit	103 Unit	1.887.367.049	1.887.367.049	1.744.567.049	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	82 Unit	82 Unit	627.173.228	627.173.228	626.076.326	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3 unit	3 unit	3 unit	1.512.268.523	1.512.268.523	1.372.624.973		
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	22 Orang	22 Orang	20 Orang	277.616.468	277.616.468	204.350.918	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.234.652.055	1.234.652.055	1.168.274.055	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	terehabilitasi dan terpelihara								
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.057.313.110	2.057.313.110	2.023.764.710		
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	800 Dokumen	800 Dokumen	503.056.750	503.056.750	387.152.270	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.554.256.360	1.554.256.360	1.636.612.440	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.658.202.834	2.658.202.834	1.684.372.129		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	29 Unit	1.444.042.252	1.444.042.252	496.645.797	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5200 Dokumen	5200 Dokumen	5300 Dokumen	246.507.519	246.507.519	246.507.519	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	967.653.063	967.653.063	941.218.813	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.375.368.254	3.375.368.254	2.581.350.250		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.889.074.610	1.889.074.610	1.657.569.790	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.277.094.460	1.277.094.460	879.394.460	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	209.199.184	209.199.184	44.386.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	58.040.000	58.040.000	25.350.000		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	16 Laporan	1 Laporan	13.790.000	13.790.000	6.750.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	44.250.000	44.250.000	18.600.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.917.359.890	4.917.359.890	5.588.937.240		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	4.917.359.890	4.917.359.890	5.588.937.240	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	100 persen	100 persen	220.155.313.820	220.155.313.820	251.805.244.260		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	263.463.820	263.463.820	255.955.420	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	215 Unit	287 Unit	219.891.850.000	219.891.850.000	251.549.288.840	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	202.949.520	202.949.520	202.949.520		
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	202.949.520	202.949.520	202.949.520	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	55.249.740	55.249.740	15.340.000		
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	49.674.740	49.674.740	110.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.575.000	5.575.000	15.230.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	314.502.030	314.502.030	249.265.530		
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	43.246.500	43.246.500	110.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	271.255.530	271.255.530	249.155.530	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	98.766.000	98.766.000	38.128.000		
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	1 Unit	30 Unit	14.796.000	14.796.000	6.603.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	83.970.000	83.970.000	31.525.000	APBD Kota Semarang	
Jumlah						328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
   3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

   Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan

Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Perubahan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

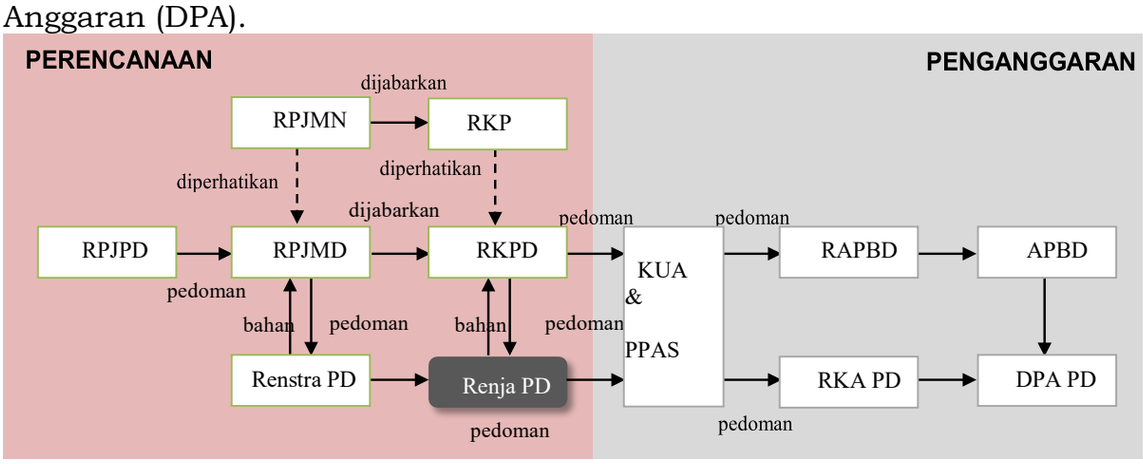

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan Renja PD

Adapun muatan dari Perubahan Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang agar tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat;; Free Wifi pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi Smart City Kota Semarang.

Kinerja pengelolaan e-Government salah satunya dapat ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2024 capaian Indeks SPBE Kota Semarang sebesar 3,95 (Sangat Baik). Belum optimalnya pencapaian ini disebabkan dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek Audit TIK, masih jauh dari standar ideal (terealisasi 2,64 dari skala 5). Sedangkan dari domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE menunjukkan skor diatas 3. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diharapkan dapat mengungkit Indeks SPBE Kota Semarang mendatang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 202ssss0 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 2Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (11 Juli 2025).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, informatika,

Statistik dan Persandian Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024
Memuat evaluasi pelaksanaan perubahan Renja dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Kualitas perubahan Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perubahan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 Triwulan II. Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 55.675.478.499 dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 53.839.780.732 atau sebesar 96,70%.

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	500%	100%	100%	83%	83%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	500%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	67%	16 dokumen	53,30%
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33%	14 dokumen	100,00%
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	13 Laporan	86,67%
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	515 orang	91 Orang/bulan	139 Orang/bulan	139 orang	100%	448 orang	86,99%
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	37 dokumen	61,67%
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100%	37 Laporan	740%
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	14 Laporan	35 laporan	17 laporan	49%	59 Laporan	84,29%
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 Dokumen	34 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	500%	100%	100	45%	0%	100%	100%
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 orang	160 orang	150 orang	0 orang	0%	480 orang	60%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 Paket	6 paket	0 paket	0%	3 paket	60%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 Paket	2 paket	1 paket	50%	4 paket	80%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	150 Laporan	25 laporan	7 laporan	28%	457 laporan	76,17%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	100 Laporan	150 laporan	50 laporan	33%	350 laporan	70%
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0%	9 dokumen	60%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	3 Unit	2 unit	0 unit	0%	10 unit	66,67%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	500%	100%	100%	60%	60%	100%	100%
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	7 laporan	46,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180 laporan	36 Laporan	24 laporan	12 laporan	50%	120 laporan	66,67%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	4 unit	80%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	10 Unit	18 unit	18 unit	100%	72 unit	90%
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 unit	2 Unit	2 unit	1 unit	50%	7 unit	70%
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	3 Unit	4 unit	2 unit	50%	11 unit	73,33%
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	40 unit	8 Unit	2 unit	0 unit	0%	24 unit	60%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	500%	100%	100%	65%	65%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	3 dokumen	60%
		Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	N/A	N/A	100%	53%	53%	53%	53%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapsitasnya	3420 orang	600 Orang	600 orang	N/A	N/A	2220 orang	76,61%
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	N/A	N/A	90 Orang	50 Orang	55,56%	50 Orang	55,56%
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan	60 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	36 dokumen	70%
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	N/A	N/A	100%	57%	57%	57%	57%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	500%	100%	100%	70%	70%	100%	100%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	200 unit	54 unit	40 unit	N/A	N/A	134 unit	75,50%
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	N/A	N/A	517 Aplikasi	794 Aplikasi	153,58%	794 Aplikasi	153,58%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	70%
		Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	N/A	N/A	6 Program	3 Program	50%	3 Program	50%
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	N/A	N/A	24 dokumen	70%
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	517 Aplikasi	794 Aplikasi	153,58%	794 Aplikasi	153,58%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah pendaftaran nama domin pemerintah kabupaten/kota	2885 domain	577 domain	577 domain	N/A	N/A	1875 domain	65%
		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah DaerahKab/Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	50 unit	10 unit	10 unit	N/A	N/A	30 unit	80%
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	N/A	N/A	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100%	52 Perangkat Daerah	100%
URUSAN STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	500%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasistas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistic sektoral dari BPS	170 orang	61 orang	34 orang	N/A	N/A	129 orang	92%
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	N/A	N/A	34 Orang	34 Orang	100%	34 Orang	100%
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	N/A	N/A	147 Dokumen	34 Dokumen	23,29%	34 Dokumen	23,29%
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	N/A	N/A	15 Dokumen	10 Dokumen	66,67%	10 Dokumen	66,67%
URUSAN PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	60 laporan	39 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	63 laporan	105%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2025

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN DAN INFORMATIKA	72.394.218.937	23.039.196.898	31,82%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.886.478.510	9.386.449.050	42,89%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.919.869	10.309.150	10,22%
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.935.101	744.000	0,98%
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.063.154	0	0,00%
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.851.699	0	0,00%
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.063.154	4.838.750	95,57%
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.851.699	0	0,00%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.155.062	4.726.400	91,68%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.297.854.180	8.691.356.110	47,50%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.875.715.760	8.505.669.390	47,58%
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.704.000	180.240.000	44,10%
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.602.904	4.039.600	87,76%
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.478.140	1.407.120	31,42%
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.353.376	0	0,00%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.720.860	26.785.000	10,35%
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	258.720.860	26.785.000	10,35%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.386.795.347	113.372.234	8,18%
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.818.160	35.300.000	43,14%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.120.827	0	0,00%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.600.000	17.506.300	49,18%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.387.400	21.766.508	47,96%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	7.590.000	50,60%
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.525.000	7.775.000	25,47%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.638.574	23.434.426	7,77%
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	417.705.386	0	0,00%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.355.779	0	0,00%
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	109.355.779	0	0,00%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.087.400	221.846.218	33,71%
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	3.849.000	49,99%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.387.400	217.997.218	33,52%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.745.075	322.780.338	30,03%
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	19.786.008	45,01%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	593.092.628	234.777.378	39,59%
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	63.550.698	18.066.302	28,43%
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.821.750	47.550.650	27,20%
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.320.000	2.600.000	1,30%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.476.304.400	2.152.911.396	39,31%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.476.304.400	2.152.911.396	39,31%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	947.869.960	219.207.112	23,13%
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	199.728.000	33.267.000	16,66%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	1.167.192.680	333.737.380	28,59%
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	336.937.000	76.422.540	22,68%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.474.848.760	1.391.807.364	56,24%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	349.728.000	98.470.000	28,16%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	45.031.436.027	11.499.836.452	25,54%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45.031.436.027	11.499.836.452	25,54%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	3.578.855.057	813.921.848	22,74%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	2.600.331.280	1.342.608.496	51,63%
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13.965.590.650	204.524.107	1,46%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	23.971.055.160	8.854.124.321	36,94%
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	915.603.880	284.657.680	31,09%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	836.207.760	176.248.376	21,08%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	836.207.760	176.248.376	21,08%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	836.207.760	176.248.376	21,08%
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	285.603.880	145.673.388	51,01%
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	250.603.880	24.245.488	9,67%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	170.000.000	1.130.000	0,66%
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	130.000.000	5.199.500	4,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.048.410.020	705.608.100	67,30%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.048.410.020	705.608.100	67,30%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.048.410.020	705.608.100	67,30%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.048.410.020	705.608.100	67,30%
	T O T A L	74.278.836.717	23.921.053.374	32,20%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada perubahan Anggaran Tahun 2025, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 (tiga) urusan, 5 (lima) program, dan 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp 67.494.609.231,14 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 23.921.053.374. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 43.573.555.857,14.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					PROYEKSI					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2024
Tujuan : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	Skor	3,2	3,4	3,6	3,8	4	3,3	N/A				3,4
	Indeks domain layanan SPBE	Skor	4	4,1	4,2	4,3	4,4	3,23	N/A				4,1
Sasaran : Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integrative	%	80	82	85	87	90	80	50				82
	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik	Persentase Penyelenggaraan	%	100	100	100	100	100	100	50				100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					PROYEKSI					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2024
Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional												

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu "Indeks domain tata kelola SPBE", target sebesar 3,8 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,6 (capaian 94,74%) dan "Indeks domain layanan SPBE", target sebesar 4,46 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 4,45 (capaian 99,78%);
b. Sasaran 1 : "Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal" memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu "Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif" sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%) dan "Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi" sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 2 : "Meningkatnya pengamanan data dan informasi" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi" sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 3 : "Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat" sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 4 : "Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional" sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian, menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025	
	ASPEK PELAYANAN UMUM															
1.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75	75.33	75.33	75.34	75.34	75	75.95	95.87	95.87	95	78.65		95	
4.	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100			100	
5.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025	
	tentang Keterbukaan Informasi Publik															
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
7.	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65		100	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	117.20	88.06	88.06	94.26	94.26		100	
9.	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	65	65	75	80	85	100	100	100	100	100	100		100	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2025

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pentingnya penguatan keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. Pengembangan integrasi data dalam rangka penguatan SPBE;
c. Penguatan kelembagaan pelaksanaan statistik sektoral.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, diantaranya :

1. Perkembangan teknologi TIK yang cepat dan canggih serta harganya mahal;
2. Berubahnya SOTK Kementerian Kominfo menjadi Komdigi;
3. Kurang pemahaman pentingnya internet bagi Masyarakat;
4. Masih kurangnya Literasi Digital bagi pegawai dan Masyarakat;

5. Selalu berganti nama kanal pengaduan sehingga perlu rebranding berkali-kali, dan mendapatkan banyak kritik serta protes dari Masyarakat;
6. Karena berganti nama kembali, maka perlu dibuatkan peraturan walikota baru dan dilakukan sosialisasi secara *massive*;
7. Masih belum terintegrasinya sistem pengaduan lokal dengan sistem Sp4N Lapor!;
8. Belum disiapkan ruangan dalam rangka penyatuan *Call Center* 112 dan DKK. (Baik itu ruang operator dan *rest room*);
9. OPD terkait masih enggan menggunakan fitur *tracking* L3 di sistem Call Center 112 sehingga posisi dan lokasi petugas lapangan tidak bisa terdeteksi di system;
10. Kedisiplinan *Call taker* dan relawan masih kurang. Keterlambatan jam masuk dan jam pulang serta break makan siang yang terlalu lama;
11. Layanan internet *monitoring* CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang dikarenakan keterbatasan anggaran;
12. Masih banyaknya keluhan mengenai *down* / jaringan lemot pada internet kelurahan;
13. Masih banyaknya keluhan terkait kecepatan internet yang tidak stabil dari OPD - OPD di Kota Semarang;
14. Skalabilitas / kemampuan sistem atau proses dalam menangani penambahan beban tanpa penurunan kinerja yang signifikan;
15. Ketersediaan / *availability* yang merupakan periode waktu ketika suatu layanan tersedia;
16. Banyaknya laporan masuk tentang kerusakan CCTV yang kepemilikan asetnya adalah aset milik kecamatan;
17. Belum tersedianya landasan hukum maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
18. Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal SDI Tingkat Kota Semarang;
19. Belum optimalnya pemenuhan integrasi kinerja utama terkait data pangan dan kemiskinan;
20. Belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai pengelola data statistik sektoral;
21. Belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dan penyusunan metadata statistik masing-masing OPD;
22. Adanya aplikasi-aplikasi pengelolaan data dari K/L/I yang tidak dapat dilakukan integrasi ke Portal SDI Tingkat Kota Semarang;
23. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah terhadap data sektoral yang diampu maupun data sektoral yang lintas D/K/L/I;
24. Belum adanya lisensi keamanan informasi yang handal sesuai dengan perkembangan teknologi;
25. Perlunya peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi SKKNI Bidang Keamanan Siber dan Sandi yang berlaku;
26. OPD pemilik sistem elektronik tidak segera melakukan validasi dan perbaikan ketika ada temuan/laporan dari luar Diskominfo terkait kerentanan/Insiden siber pada domain semarangkota.go.id;
27. OPD pemilik sistem elektronik tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan sesuai waktu yang telah disepakati setelah dilakukan pemindaian kerentanan pada Sistem Elektronik;
28. Sistem Elektronik dikembangkan oleh pihak ketiga yang sudah tidak mendapat dukungan perawatan;

29. Sistem Elektronik yang dibuat dari hasil proper tidak terpelihara.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   - Perlu ada penambahan bandwith untuk kantor UPTD/OPD yang baru serta penambahan jumlah titik internet monitoring CCTV RT;
   - Kebutuhan layanan teknologi pusat data bertambah besar baik skala kapasitas dan kualitas serta SDM pengelola teknis pusat data dan layanan nya dituntut lebih dalam keahlian penuntasan masalah teknis dan ruang lingkupnya;
   - Perlunya perhatian terhadap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas dalam menerima hasil-hasil pembangunan, sehingga perlu dimasukkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas;
   - Kerjasama dengan badan vertikal terkait pelayanan informasi kepada masyarakat;
   - Perkembangan TIK yang semakin pesat;
   - Ancaman hacker dan virus yang tiap tahun bertambah dan mencoba menggaggu sistem keamanan data center;
   - Kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan cepat sehingga membutuhkan terobosan inovasi TIK;
   - Kebutuhan SDM baik untuk programer, pengelola data dan keamanan informasi yang tentunya semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya;
   - Perlunya meningkatkan partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui www.semarangkota.go.id dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;
   - Perlunya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD;
   - Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yg terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
   - Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik yang terintegrasi;
   - Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat; Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya;
   - Penggunaan Data dan informasi statistik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang Data dan informasi

statistik tersebut harus dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi, serta kaidah-kaidah statistik.

b. Peluang
- Dengan terbangunnya infrastruktur jaringan fiber optik nantinya internet bisa stabil dan bisa menggunakan jaringan local selain bisa di monitoring penggunaan bandwithnya kita juga mudah dalam melakukan troubleshooting jika terdapat kerusakan perangkatnya;
- Dengan dibangunnya free wifi di area publik,bisa memberikan layanan internet gratis kepada warga masyarakat sehingga memanfaatkannya;
- Internet monitoring CCTV RT sangat membantu warga dalam TIK;
- Pemuktahiran dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data dapat dilakukan dengan optimalisasi pilihan teknologi saat ini;
- Terbentuknya satu sistem laporan layanan informasi Kota Semarang;
- Dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk melakukan inovasi;
- Pemanfaatan media-media seperti media sosial, website dan sebagainya sebagai sarana sosialisasi dan publikasi kebijakan dan arahan positif untuk pengelolaan data, aplikasi dan keamanan informasi;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data tidak harus mengembangkan fisik fasilitas tapi dapat dengan menyewa fasilitas;
- Perkembangan teknologi layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data;
- Terwujudnya Perda Keterbukaan Informasi;
- Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan
- infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber serta mencegah penyalahgunaan data pribadi;
- Integrasi dan interoperabilitas; mengintegrasikan data serta pemanfaatan satu data yang semakin penting untuk menyediakan data yang sahih dan terpercaya khususnya untuk pelayanan;
- Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem;
- Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik;
- Transformasi Kapabilitas SDM; memastikan SDM yang terampil;
- Kebijakan dan Tata Kelola; harus meningkatnya level SPBE ke level transformasi dan penilaian secara periodik terkait indeks SPBE dan Smart City Nasional;
- Pemerintah Kota Semarang sudah menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yang mengatur pelaksanaan tata kelola data di Pemerintah Kota Semarang;

- Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Portal SDI yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan data statistik dan data spasial;
- Sudah terbentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang sebagai wadah atau media untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di tingkat Kota Semarang;
- Sudah mempunyai Tim Pengelola Data yang bertugas mengelola data di tiap-tiap OPD.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut :

a. Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber serta mencegah penyalahgunaan data pribadi;
b. Integrasi dan interoperabilitas; mengintegrasikan data serta pemanfaatan satu data yang semakin penting untuk menyediakan data yang sahih dan terpercaya khususnya untuk pelayanan;
c. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi system;
d. Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan public;
e. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah serta OPD, melalui mekanisme sesuai dengan SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral & Prinsip Satu Data Indonesia;
f. Pengelolaan layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				67.494.609.231,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				67.494.609.231,14	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				64.845.763.998,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				64.845.763.998,14	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	20.965.585.677,16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	20.965.585.677,16	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan					Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran					Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			
			Persentase peningkatan kemampuan ASN					Persentase peningkatan kemampuan ASN			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11.00 Dokumen	125.437.439,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11.00 Dokumen	125.437.439,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.539.139,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.539.139,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	4.939.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	4.939.500,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	4.617.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	4.617.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.617.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.617.600,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.784.100,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.784.100,00,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.370.444.236,86	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.370.444.236,86	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	16.950.338.352,86	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	16.950.338.352,86	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	407.393.320,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	407.393.320,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	4.103.848,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	4.103.848,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	4.366.740,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	4.366.740,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	4.241.976,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	4.241.976,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	160.282.985,20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	160.282.985,20	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	160.282.985,20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	160.282.985,20	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.423.270.747,10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.423.270.747,10	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	177.272.680,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	177.272.680,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	166.930.923,80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	166.930.923,80	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.600.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.600.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.387.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.387.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.442.075,88	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.442.075,88	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	33.855.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	33.855.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	153.642.037,72	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	153.642.037,72	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	805.140.629,70	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	805.140.629,70	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	78.267.210,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	78.267.210,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	78.267.210,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	78.267.210,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	660.805.285,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	660.805.285,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.712.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.712.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	652.093.285,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	652.093.285,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.147.077.774,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.147.077.774,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	598.678.760,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	598.678.760,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	49.263.566,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	49.263.566,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	192.894.998,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	192.894.998,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	266.330.400,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	266.330.400,00	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.671.442.211,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.671.442.211,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.671.442.211,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.671.442.211,00	
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	76.653.690,00	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	76.653.690,00	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	992.868.451,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	992.868.451,00	
	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	1.135.993.340,00	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	1.135.993.340,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	3.533.781.490,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	3.533.781.490,00	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	632.275.470,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	632.275.470,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 orang	299.869.770,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 orang	299.869.770,00	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	37.208.736.109,98	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	37.208.736.109,98	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	100%	37.208.736.109,98	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	100%	37.208.736.109,98	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.209.000.548,60	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.209.000.548,60	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	2.456.869.580,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	2.456.869.580,00	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	2.528.757.900,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	2.528.757.900,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.743.636.054,88	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.743.636.054,88	
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan	Kota Semarang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota	6 Program	5.270.472.026,50	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan	Kota Semarang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota	6 Program	5.270.472.026,50	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			Kabupaten atau Kota Cerdas		Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				494.431.378,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				626.003.608	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	494.431.378,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	494.431.378,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	494.431.378,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	494.431.378,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	174.706.160,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	174.706.160,00	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	145.763.864,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	145.763.864,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	80.686.354,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	80.686.354,00	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	93.275.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	93.275.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.154.413.855,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.154.413.855,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	2.154.413.855,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	2.154.413.855,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	2.154.413.855,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	2.154.413.855,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	2.154.413.855,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	2.154.413.855,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Demikian juga pada perubahan anggaran tahun 2025 ada beberapa usulan program dan kegiatan yang berasal dari DPRD Kota Semarang yang perlu dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan tujuan menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1) Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3) Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
4) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Tema pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P- RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas;
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro;
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir;
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kedelapan, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari perencanaan perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik",

dengan indikator tujuan "Indeks domain tata kelola SPBE" dan "Indeks domain layanan SPBE".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu:

1. "Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal" dengan indikator sasaran "Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif" dan "Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi";
2. "Meningkatnya pengamanan data dan informasi" dengan indikator sasaran "Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi"
3. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik" dengan indikator "Tingkat penyebarluasan Informasi ke Masyarakat";
4. "Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia" dengan indikator "Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem	Indeks domain tata kelola SPBE	skor	3,8

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	Indeks domain layanan SPBE	skor	4,45
SASARAN :			
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	100
	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.34
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	85.00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

3.3 Program dan Kegiatan

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2025 di dalam tabel 3.2 berikut

Tabel 3. 2
Daftar Sub Kegiatan, Kegiatan, dan Kegiatan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Indeks SPBE”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, biang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					74.326.836.717,00	74.326.836.717,00	67.494.609.231,14		
2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					72.444.218.937,00	72.444.218.937,00	64.845.763.998,14		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%	21.936.478.510	21.936.478.510	20.965.585.677	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	10 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	150.919.869	150.919.869	125.437.439		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	75.935.101	75.935.101	51.539.139		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.063.154	5.063.154	4.939.500		
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	4.617.600		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.063.154	5.063.154	4.939.500		
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	4.617.600		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5.155.062	5.155.062	4.784.100		
2.16.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
2.16.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen RKA-Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	18.297.854.180,00	18.297.854.180,00	17.370.444.236,86		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	139 Orang/bulan	139 Orang/bulan	17.875.715.760	17.875.715.760	16.950.338.352,86		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	408.704.000	408.704.000	407.393.320		
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	4.602.904	4.602.904	4.103.848		
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	4.478.140	4.478.140	4.366.740		
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	4.353.376	4.353.376	4.241.976		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	258.720.860,00	258.720.860,00	160.282.985,20		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	258.720.860	258.720.860	160.282.985,20		
2.16.01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan DPA-SPKD	3 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	1.386.795.347,00	1.386.795.347,00	1.423.270.747,10		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	81.818.160	81.818.160	177.272.680		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	459.120.827	459.120.827	166.930.923,80		
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35.600.000	35.600.000	35.600.000		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.387.400	45.387.400	35.387.400		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.442.075,88		
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	30.525.000	30.525.000	33.855.000		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	150 laporan	301.638.574	301.638.574	153.642.037,72		
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	417.705.386	417.705.386	805.140.629,70		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	109.355.779	109.355.779	78.267.210		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	109.355.779	109.355.779	78.267.210		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	658.087.400	658.087.400	660.805.285		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.700.000	7.700.000	8.712.000		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	650.387.400	650.387.400	652.093.285		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	1.074.745.075	1.074.745.075	1.147.077.774		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050		
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	18 unit	18 unit	593.092.628	593.092.628	598.678.760		
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	63.550.698	63.550.698	49.263.566		
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	174.821.750	174.821.750	192.894.998		
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	199.320.000	199.320.000	266.330.400		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	100%	100%	5.476.304.400	5.476.304.400	6.671.442.211		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	5.476.304.400	5.476.304.400	6.671.442.211		
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Khalayak Sasaran yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%	199.728.000	199.728.000	76.653.690		
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	1.167.192.680	1.167.192.680	992.868.451		
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	100%	100%	100%	336.937.000	336.937.000	1.135.993.340		
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Di Kelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Jenis	5 Media	5 Media	5 Media	2.474.848.760	2.474.848.760	3.533.781.490		
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan Peraturan Perundungan	5000 Permohonan	5000 Permohonan	5000 Permohonan	947.869.960	947.869.960	632.275.470		
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	90 orang	90 orang	90 orang	349.728.000	349.728.000	299.869.770		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	100%	100%	45.031.436.027,00	45.031.436.027,00	37.208.736.109,98		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	1 Dokumen	100%	100%	45.031.436.027,00	45.031.436.027,00	37.208.736.109,98		
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.578.855.057	3.578.855.057	3.209.000.548,60		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	517 Aplikasi	517 Aplikasi	2.600.331.280	2.600.331.280	2.456.869.580		
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	517 Aplikasi	517 Aplikasi	13.965.590.650	13.965.590.650	2.528.757.900		
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	23.971.055.160	23.971.055.160	23.743.636.054,88		
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	6 Program	6 Program	6 Program	915.603.880	915.603.880	5.270.472.026,50		
2.20	URUSAN STATISTIK					836.207.760	836.207.760	494.431.378		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%	836.207.760	836.207.760	494.431.378		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	100%	100%	836.207.760	836.207.760	494.431.378		
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasioanl	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100%	250.603.880	250.603.880	145.763.864		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah Dilengkapi Metadata	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	170.000.000	170.000.000	80.686.354		
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	34 Orang	34 Orang	34 Orang	285.603.880	285.603.880	174.706.160		
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standart	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah Meminta Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	130.000.000	130.000.000	93.275.000		
2.21	URUSAN PERSANDIAN					1.046.410.020	1.046.410.020	2.154.413.855		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	1.046.410.020	1.046.410.020	2.154.413.855		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	100%	100%	1.046.410.020	1.046.410.020	2.154.413.855		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.046.410.020	1.046.410.020	2.154.413.855		

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2025

Untuk perubahan anggaran tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 67.494.609.231,14 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Koma Empat Belas Rupiah), dimana ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran, baik berupa penambahan dan pengurangan anggarannya baik dalam satu sub kegiatan maupun antar sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

19. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

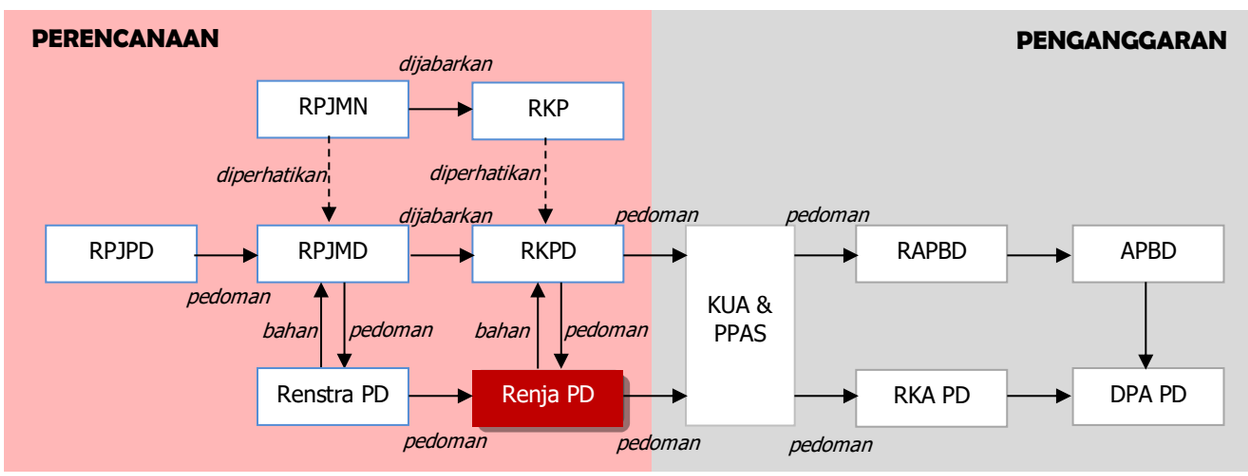

Gambar I. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: 1. karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024, 2. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025.

Perubahan RKPD 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan RKPD 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk: 1. Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. 3.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. 4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2025

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	11 dok	13 dok	4 dok	30,77	15	32,61
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	4 dok	1 dok	25,00	5 dok	50
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	1 dok	0 dok	0,00	-	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100,00	6 dok	40
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 dok	0 dok	0,00	0 dok	0 dok

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	0	0	0,00	3	100
					2 paket	0	0,00	2	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	7 paket	3 paket	42,86	8	160
					7 paket	3 paket	42,86	8	160
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	-	-	-	7 jenis	100
					50 paket	25 paket	50	37 Paket	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	-	-	-	8 jenis	100
					8 paket	4 paket	50	4 Paket	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	2 jenis	100
					12 dok	6 dok	50	4 dok	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 laporan	12 laporan	8 laporan	50	20 laporan	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	300 keg	-	-	-	300 keg	60
				12 laporan	12 laporan	5 laporan	50	17 laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Jenis	-	-	-	3 jenis	60
				1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	6 unit	10 unit	0 dokumen	0,00	6	200
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	2 unit	3 unit	0 dokumen	0,00	2	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
				12 laporan	12 laporan	6 laporan	0,00	18 laporan	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	26 unit	27 unit	27 unit	100,00	27 unit	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	3 jenis	0	0	0	3 jenis	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	5 Jenis	100
				51 Unit	70 unit	51 unit	72,86	102 Unit	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (60%)	100% (80%)	50% (10%)	50,00	100 (70%)	100 (70%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	100%	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 orang/bulan	77 orang/bulan	77 orang/bulan	100	77 0rang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	100%	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	18 dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	3 dok	3 dok	1 dok	66,67	5 dok	33,33
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	3 laporan	1 laporan	0	0,00	3 Laporan	60,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00	7 Laporan	70,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	0%	0,00	3%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	58 koperasi	15 koperasi	0 koperasi	0,00	58 koperasi	77,33
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	240 unit usaha	25 unit usaha	0 unit usaha	0,00	240 unit usaha	160
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	3 koperasi	2 koperasi	0 koperasi	0,00	3 koperasi	30
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 unit usaha	302 unit usaha	25 unit usaha	0 unit usaha	0,00	302 unit usaha	201
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	68,34%	50%	21,08%	42,16	89,42	178,84
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	470 koperasi	100 koperasi	26 koperasi	26,00	496 koperasi	423

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-	503 unit usaha	250 unit usaha	100 Unit usaha	40	603 Unit usaha	-
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	44,00%	33%	16,00%	48,48	60%	171
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	69,28%	69%	18,20%	26,38	87,48	124,97
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	345 unit usaha	250 unit usaha	91 unit usaha	36,40	436 unit usaha	145,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	41,30%	10%	10,86%	108,6	52,16	521,60
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	98,30%	77%	80,26%	104,23	178,56	223,2
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	580 orang	520 orang	76 orang	14,62	656 orang	164
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	30,82%	28%	21,80%	77,86	52,62	175,4
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	67,93%	50%	5,57%	11,14	73,5	147
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	20 Kelompok Masyarakat	16 kelompol masyarakat	80	16 kelompok masyarakat	-
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	500	500 unit usaha	39 unit usaha	70,80	539	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	5,47%	3%	2,02%	67,33	7,49	249,67
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	4469 orang	600orang	617 orang	102,83	5086 orang	169,53
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha	500 unit usaha	460 unit usaha	200 unit usaha	92 unit usaha	46,00	552 unit usaha	110
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	90 Unit Usaha	30 unit usaha	33,33	30 unit usaha	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1000 unit usaha	934 unit usaha	240 unit usaha	30 unit usaha	12,50	964 unit usaha	96,4
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan	1000 orang	1080 orang	490 orang	0 orang	0,00	1080 orang	108

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	350 Unit Usaha	100 unit usaha	28,57	100 unit usaha	-
2.17.07.2.01.11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	400 Unit Usaha	52 unit usaha	13,00	52 unit usaha	-
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	2780 orang	1540 orang	795 orang	51,62	3575 orang	476,67,67
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	53,28%	20%	6,43%	32,15	59,71	238,84
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	2154 orang	100 orang	45 orang	45,00	2199 orang	366,50
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.000 unit usaha	5634 unit usaha	1200 unit usaha	110 unit usaha	9,17	5744 unit usaha	191,47
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator program sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator kinerja program dengan predikat tercapai (termasuk program penunjang) , 3 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan syarat ijin usaha simpan pinjam yang baru antara lain adalah Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 serta realokasi anggaran pada program, Kegiatan dan sub Kegiatan. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
s/d Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.322.152	13.188.787.774	5.776.218.177	43,80
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.849.400	53.012.783	1.868.200	3,52
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.143.000	3.499.000	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.891.400	1.001.400	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.900	1.250.900	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.179.400	645.400	608.800	94,33
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.458.900	834.900	0	0,00
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.885.800	1.368.600	1.259.400	92,02
2	17	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	44.412.583	0	0,00

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.757.319.600	11.757.207.200	5.502.858.747	46,80
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.486.646.000	11.486.646.000	5.397.321.247	46,99
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.664.000	269.664.000	105.260.000	39,03
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448.600	336.200	277.500	82,54
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	561.000	561.000	0	0,00
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	861.267.355	582.665.475	85.094.720	14,60
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.784.366	171.784.366	0	0,00
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.114.840	22.114.840	5.049.500	22,83
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.300	24.482.740	6.453.000	26,36
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.020.437	25.404.117	1.450.000	14,35
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	900.000	46,88
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	30.000.000	12.753.100	42,51
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.751.860	157.283.860	58.489.120	37,19
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.675.552	149.675.552	0	0,00
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.101.912	53.101.912	0	0,00
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	7.284.264	7.284.264	0	0,00
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.817.648	45.817.648	0	0,00
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.530.000	313.530.000	46.204.642	14,74
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.530.000	313.530.000	46.204.642	14,47
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.253.885	429.270.404	140.191.868	32,66
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.603.603	35.955.000	14.375.356	39,98
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.550.296	346.215.418	115.936.512	33,49
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.099.986	47.099.986	9.880.000	20,98

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	150.000.000	39.065.000	0	0,00
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	20.900.000	0	0,00
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	20.900.000	0	0,00
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	18.165.000	0	0,00
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	18.165.000	0	0,00
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	504.320.000	179.002.720	36.300.000	20,28
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	504.320.000	179.002.720	36.300.000	20,28
2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	504.320.000	179.002.720	36.300.000	20,28
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	394.320.000	242.867.790	110.747.000	45,60
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.320.000	242.867.790	110.747.000	45,60
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	394.320.000	242.867.790	110.747.000	45,60
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	601.700.000	253.964.240	57.744.500	22,74

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	601.700.000	253.964.240	57.744.500	22,74
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	601.700.000	253.964.240	57.744.500	22,74
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.092.353.680	955.495.141	167.740.280	17,56
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.092.353.680	955.495.141	167.740.280	17,56
2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.687.353.680	742.445.141	125.650.280	16,92
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.456.538.390	4.811.458.993	863.392.020	17,94
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.456.538.390	4.811.458.993	863.392.020	17,94
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	138.996.000	73.247.820	34.592.500	47,23
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000	21.764.102	13.948.300	64,09
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	726.306.840	616.397.520	60.395.530	9,80
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.201.410.000	1.084.145.116	41.625.000	3,84
2	17	7	2.01	8	Pemulihan Usaha Mikro	267.544.400	184.595.150	106.718.910	57,81
2	17	7	2.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	1.149.184.000	573.368.990	30.964.300	5,40
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
JUMLAH						27.588.592.490	22.611.759.198	7.882.377.647	34,86

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.588.592.490,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.488.592.490,- dan DBHCHT sebesar Rp. 2.100.000.000,-. Namun dengan adanya Inpres I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran pada Dinas koperasi dan usaha Mikro berkurang menjadi Rp. 22.611.759.198,-

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.882.377.647,- (34,86%) . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.729.381.551,- (65,14%).

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2025
Tujuan:														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	65,42	58,91	59,72	51,56	-	56,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	16,93	17,17	17,40	17,46	-	17,50
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,63	77,04	77,58	82,57	-	83,00
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	40,58	42,53	44,41	44,89	-	45,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	80,25	80,45	-	80,45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "persentase koperasi yang berkualitas", sampai dengan Triwulan II 2025 tercapai sebesar 51,56 % dari target sebesar 56,00 % atau baru sebesar 92,07 %.
b. Tujuan "Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha", telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 sudah sebesar 17,46 % dari target sebesar 15,00% (capaian sebesar 116,40 %);
c. Sasaran "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase koperasi aktif", telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 sudah sebesar 82,57% dari target sebesar 77,50% (capaian sebesar 106,54%);
d. Sasaran "Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro", sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tercapai sebesar 44,89 % dari

target 45,00 % (capaian sebesar 99,76 %);

e. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 realisasinya sebesar 80,45% dari target sebesar 78,00% (capaian sebesar 103,14%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA				PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2024	TW-II 2025	2025	2026
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				PROYEKSI		CAT
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025	2026	
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	76,63%	77,04%	77,58%	82,57%	77,50%	78%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	16,93%	17,17%	17,40%	17,46%	17,50%	17,60%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	56%	57%	65,42%	58,91%	59,72%	51,56%	56%	57%	

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap mencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas, semua kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaannya diarahkan pada kegiatan yang responsif Gender. Dimana dari 8 program, 14 kegiatan, dan 40 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2025 ini yang telah dibuatkan GAP dan GBS adalah sebanyak 3 program (37,50%), 3 kegiatan (21,43 %) dan 3 sub kegiatan (7,50 %).

Dari jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2025 yang sebesar Rp 27.588.592.490,- jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 7.134.135.418,- (25,86 %).

Tabel 2.6
Anggaran Responsif Gender
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2025

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
JUMLAH						7.134.135.418	5.412.107.835	1.487.473.150	27,48

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2025 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

a. Keterbatasan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
b. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
c. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.
d. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro di Kota Semarang tentang strategi pemasaran modern serta pemanfaatan tehnologi digitalisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

a. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;
b. Melaksanakan fasilitasi kolaborasi antara usaha mIkro dan Perusahaan besar serta Lembaga keuangan untuk menfasilitasi akses terhadap modal dan pembiayaan.
c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

d. Memberikan pelatihan pemasaran digital, melaksanakan kemitraan dengan marketplace secara berkelanjutan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
   - Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengadopsi tehnologi digital dan literasi digital.
   - kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
   - Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
   - Kemampuan dan Pengetahuan Tehnologi Informasi KUMKM masih terbatas.
   - Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dimana pada setiap desa/kelurahan diharapkan untuk membentuk Koperasi Merah Putih.
b. Peluang:
   - Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
   - Adanya komitmen kebijakan dari Pemerintah terkait kemudahan Perijinan dan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
   - Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
   - Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
   - Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Perlunya peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro supaya lebih mempunyai daya saing.
2. Perlunya mendorong Peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Belum optimalnya akses Pemasaran dan pemanfaatan tehnologi digitalisasi terhadap peluang pasar.
4. Belum optimalnya respon dari Pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital.

5. Perlunya dukungan penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi bagi pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang merupakan koperasi jenis baru.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				23.937.632.864	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				23.937.632.864	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.847.006.290	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.847.006.290	
			Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	53.012.783	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	53.012.783	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	3.499.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	3.499.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.001.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.001.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.250.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.250.900	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	645.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	645.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	834.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.368.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.368.600	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	44.412.583	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	44.412.583	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	10.795.554.330	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	10.795.554.330	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	10.525.097.130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	10.525.097.130	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	336.200	
	Koordinasi dan Penyusunan	Dinas Koperasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan	Dinas Koperasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	561.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dan Usaha Mikro	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dan Usaha Mikro	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	461.464.228	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	461.464.228	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	153.985.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	153.985.050	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	24.482.740	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	24.482.740	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	25.254.117	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	25.254.117	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.647.482	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.647.482	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	60.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	60.000	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Berbasis Elektronik pada SKPD	Usaha Mikro	Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD	Usaha Mikro	Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	90.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	90.000	
		Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	45.000	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	45.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	107.614.545	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	107.614.545	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.614.545	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.614.545	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	429.270.404	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	429.270.404	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	346.215.418	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	346.215.418	
		Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi &Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	39.065.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang, Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	39.065.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	20.900.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Kop	20.900.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	20.900.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	20.900.000	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	18.165.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Kop	18.165.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	18.165.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	18.165.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	158.160.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	158.160.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	158.160.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	158.160.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	158.160.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	158.160.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33 Persen	263.710.510	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33 Persen	263.710.510	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	69%	263.710.510	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	68%	263.710.510	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	263.710.510	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	263.710.510	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	549.819.918	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	549.819.918	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	549.819.918	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	549.819.918	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 org	549.819.918	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 org	549.819.918	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	1.211.844.613	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	1.211.844.613	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	1.211.844.613	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	1.211.844.613	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	26 Kelompok Masyarakat	411.755.150	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	26 Kelompok Masyarakat	411.755.150	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 org	800.089.463	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	800.089.463	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6.510.208.993	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6.510.208.993	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	6.510.208.993	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	6.510.208.993	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	410 Unit Usaha	1.592.942.320	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	410 Unit Usaha	1.592.942.320	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Mikro	Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro			Mikro	Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro			
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	21.764.102	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	21.764.102	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	606.778.860	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	606.778.860	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 org	1.114.145.116	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 org	1.114.145.116	
		Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	180.845.150	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	180.845.150	
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	582.987.650	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	582.987.650	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1060 org	2.410.745.795	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1060 org	2.410.745.795	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.357.817.540	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.357.817.540	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.357.817.540	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.357.817.540	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.357.817.540	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.357.817.540	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya menfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan managemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran)
11.	Pelatihan packaging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya (Halal, PIRT,HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.
2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital

Dari 11 usulan yang diakomodir serta hasil aspirasi DPRD Kota Semarang tersebut diatas sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sudah mengakomodir semua usulan melalui kegiatan Fasilitasi Pelatihan ketrampilan dan manajemen kewirausahaan, sosialisasi legalitas usaha/NIB, fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI, PIRT, pelatihan Digitalisasi Pemasaran bagi pelaku usaha mikro di kota semarang serta Pelatihan dan uji komeptensi bagi pengurus koperasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.
Prioritas 9.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar

dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Koperasi aktif
b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 serta menyesuaikan Capian realisasi pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	59,80
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,50
SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi 2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Persentase Koperasi aktif	%	77,60
	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	45,00
	- Nilai AKIP	%	80,35

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Perubahan Kedua Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029 : "KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF", yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian pokok Visi ke-2 : "*Pusat Ekonomi yang Berkeadilan, social, Sejahtera dan inklusif*" serta Misi ke 3 "Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak ". Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Rasio Gini" dan indikator sasaran "PDRB per Kapita" melalui indikator "*Rasio Kewirausahaan Daerah*" .
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	13.901.894.152	13.583.322.152	11.847.006.290	APBD	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%	-				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	-				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	9 dok	9 dok	109.849.400	109.849.400	53.012.783	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	4 dok	5 dok	51.143.000	51.143.000	3.499.000	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.891.400	1.891.400	1.001.400	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2.290.900	2.290.900	1.250.900	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.179.400	1.179.400	645.400	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	1 dok	1 dok	1.458.900	1.458.900	834.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	1.885.800	1.885.800	1.368.600	APBD	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.412.58	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	12.075.891.600	11.757.319.600	10.795.554.330	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	-	-	-		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	11.805.218.000	11.486.646.000	10.525.097.130	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	10 dok	12 Dokumen	269.664.000	269.664.000	269.560.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	448.600	448.600	336.200	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 lap	2 lap	1 lap	561.000	561.000	561.000	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	861.267.355	861.267.355	461.464.228	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	171.784.366	171.784.366	153.985.050	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	22.114.840	22.114.840	22.114.840	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket	50 paket	40.000.300	40.000.300	24.482.740	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	26.020.437	26.020.437	25.254.117	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	40.000.000	40.000.000	55.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	409.751.860	409.751.860	178.647.482	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	149.675.552	149.675.552	60.000	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	53.101.912	53.101.912	90.000	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	7.284.264	7.284.264	45.000	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	45.817.648	45.817.648	45.000	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	313.530.000	313.530.000	107.614.545	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 lap	12 lap	12 lap	313.530.000	313.530.000	107.614.545	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	488.253.885	488.253.885	429.270.404	APBD	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	27 unit	401.550.296	401.550.296	346.215.418	APBD	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	70 unit	47.099.986	47.099.986	47.099.986	APBD	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	150.000.000	150.000.000	39.065.000	APBD	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	15 kop	15 kop	75.000.000	75.000.000	20.900.000	APBD	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	75.000.000	75.000.000	20.900.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	2 kop	2 kop	75.000.000	75.000.000	18.165.000	APBD	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	75.000.000	75.000.000	18.165.000	APBD	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	504.320.000	504.320.000	158.160.000	APBD	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	504.320.000	504.320.000	158.160.000	APBD	
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	504.320.000	504.320.000	158.160.000	APBD	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33%	33%	33%	394.320.000	394.320.000	263.710.51	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69%	69%	69%	394.320.000	394.320.000	263.710.51	APBD	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 unit usaha	250 unit usaha	200 unit usaha	394.320.000	394.320.000	263.710.51	APBD	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	601.700.000	601.700.000	549.819.918	APBD	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%	1%	1%	-	-	-	APBD	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	77%	77%	601.700.000	601.700.000	549.819.918	APBD	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	520 org	640 org	601.700.000	601.700.000	549.819.918	APBD	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	28%	28%	2.060.280.000	2.092.353.680	1.211.844.61	APBD	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	2.060.280.000	2.092.353.680	1.211.844.61	APBD	
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	26 Kelompok Masyarakat	405.000.000	405.000.000	411.755.150	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
2.17.06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	1.687.353.680	800.089.463	APBD	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	APBD	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	600 org	600 org	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	APBD	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 unit usaha	200 unit usaha	410 unit usaha	228.700.000	138.996.000	1.592.942.320	APBD	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	21.764.102	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 unit usaha	240 unit usaha	150 unit usaha	210.270.000	726.306.840	606.778.860	PAD + DBHCHT	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	490 org	490 org	100 org	1.201.410.000	1.201.410.000	1.114.145.116	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit Usaha	350 Unit Usaha	150 Unit Usaha	203.830.000	267.544.400	180.845.150	APBD	
2.17.07.2.01.11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	250 Unit Usaha	1.149.184.000	1.149.184.000	582.987.650	APBD	
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1540 org	1060 org	1.316.900.000	2.923.097.150	2.410.745.795	PAD + DBHCHT	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	APBD	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	100 org	100 org	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	APBD	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1200 unit usaha	1200 unit usaha	700 unit usaha	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	APBD	
JUMLAH						25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

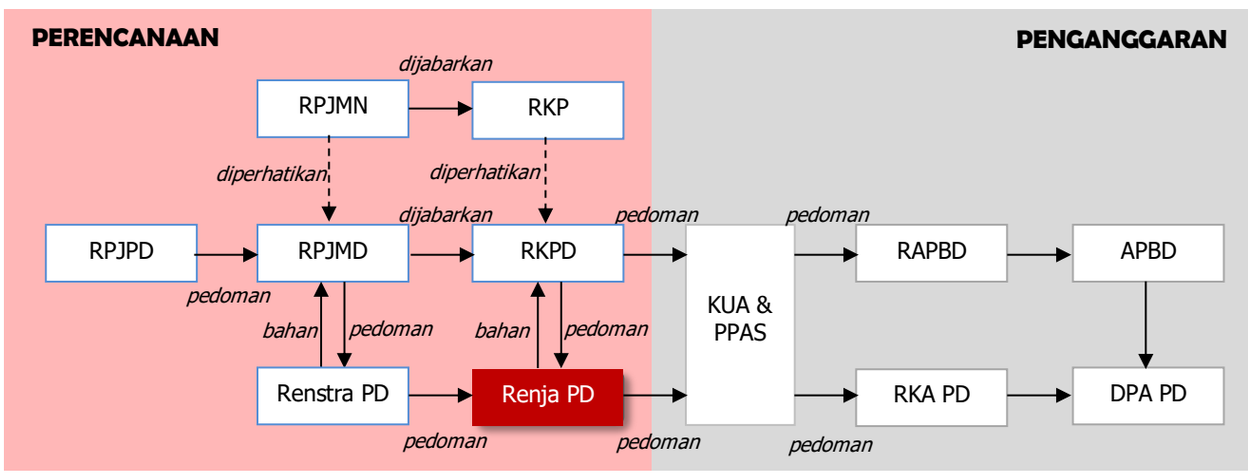

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta adanya kebijakan nasional maupun provinsi yang berdampak langsung terhadap arah dan fokus pembangunan daerah. Selain itu, perubahan ini juga merespons terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah, yang mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan penajaman program serta rasionalisasi anggaran guna meningkatkan kualitas belanja dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
q. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021–2026;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	7%	10,03%	7%	7,79%	100%	10,03%	100%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 Penanam Modal	3795 Penanam Modal	3713 Penanam Modal	2689 Penanam Modal	72,42 %	3795 Penanam Modal	100%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 Buah	5 Buah	5 buah	5 buah	100%	5 Buah	100%
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 Dokumen	100%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	100%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 Investor	550 Investor	595 Investor	11039 Investor	100%	11039 Investor	100%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	15 Kegiatan	7 kegiatan	17 Kegiatan	100%	17 Kegiatan	100%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	17 Kegiatan	100%	17 Kegiatan	100%
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	96%	96,71%	95,50%	95,80%	100%	96,71%	100%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50%	6 Dokumen	100%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2450 Pelaku Usaha	2450 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	1800 Pelaku Usaha	75%	2450 Pelaku Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	63%	800 Pelaku Usaha	100%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	800 Kegiatan Usaha	750 Kegiatn Usaha	500 Kegiatan Usaha	67%	800 Kegiatan Usaha	100%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	2 Nilai	2 Nila	1 Nilai	50%	2 Nilai	100%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	10,03%	7%	7,79%	100%	10,03%	100%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	0	0	0	0	0
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0	0%	400 Pelaku Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	100%	26 Kegiatan Usaha	100%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	97%	99%	99%	100%	97%	100%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	10 Dokumen	77%	11 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	60%	3 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	100%
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	1 dokumen	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	44 orang/bulan	40 orang/bulan	65 orang/bulan	100%	44 orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	1 dokumen	100%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	9 laporan	50%	18 laporan	100%
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	0%	0	100%	100%
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 unit	100 unit	0 unit	0	200 unit	100%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	100 unit	100 unit	0 unit	0	100 unit	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	1 paket	0	0	0	0
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	100%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	100%
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0	0	3 dokumen	100%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	100%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	34 unit	33 unit	33 unit	100%	33 unit	100%
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	150 unit	150 unit	0 unit	0	150 unit	100%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	30 unit	100 unit	50 unit	50%	50 unit	50%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kota Semarang menunjukkan kinerja yang sangat baik hingga Triwulan II Tahun 2025. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah mencapai atau bahkan melampaui target akhir periode Renstra. Dari indikator utama seperti persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2024, telah tercapai sebesar 10,03% dari target akhir Renstra sebesar 7%, menunjukkan peningkatan minat investasi yang signifikan di Kota Semarang. Begitu pula jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) telah jauh melampaui target Renstra dengan capaian 11039 investor pada triwulan II 2025 , dibandingkan target 654 investor.

Beberapa indikator output juga menunjukkan tingkat pencapaian maksimal (100%), seperti pada penyusunan dokumen kebijakan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan penanaman modal, serta penyediaan layanan administrasi dan dukungan perkantoran. Realisasi ini mencerminkan konsistensi DPMPTSP dalam memenuhi target strategis, baik dari sisi fasilitasi investasi maupun pelayanan publik yang terintegrasi.

Namun demikian, terdapat beberapa subkegiatan yang belum menunjukkan kemajuan signifikan, seperti: Penyusunan dokumen *Rencana Umum Penanaman Modal* (0% realisasi fisik meskipun capaian Renstra tercapai), Bimbingan teknis kepada pelaku usaha (0% realisasi), Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai serta kegiatan sosialisasi regulasi (masih 0%), Pemeliharaan mebel dan beberapa dukungan administrasi umum (realisasi 0–50%).Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan pada semester kedua 2025 agar capaian output tahunan dapat terwujud dan mendukung akumulasi capaian Renstra secara keseluruhan.

Secara akumulatif, realisasi kinerja hingga Triwulan II telah mencapai lebih dari 80% dari target-target Renstra untuk sebagian besar indikator. DPMPTSP Kota Semarang berada pada jalur yang tepat untuk merealisasikan seluruh sasaran strategis Renstra Tahun 2021–2026 apabila konsistensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan tetap dijaga pada sisa waktu tahun berjalan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 setelah realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.025.322.531	6.466.256.430	46,10%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.048.900	1.177.750	19,47%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.600	177.250	56,52%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	463.900	0	0%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	953.300	0	0%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.900	442.500	95,39%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.251.800	0	0%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	223.800	0	0%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.600	558.000	88,77%
01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.750.000	0	0%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.714.145.560	4.714.567.033	48,53%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.438.448.360	4.607.487.033	48,82%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	274.800.000	106.970.000	38,93%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.400	110.000	97,86%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000	0	0%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	0	0%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.150.000	0	0%
05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.760.000	0	0%
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48.390.000	0	0%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.655.882	139.326.153	19,09%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.416.565	80.172.682	18,50%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.372.890	12.947.500	33,74%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.783.648	1.428.000	8,03%
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0	0%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.250.000	7.502.000	33,72%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.177.021	37.275.971	42,27%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.655.758	0	0%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.557.520	1.321.995.686	52,12%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	801.000.000	296.782.088	37,05%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.735.557.520	1.025.213.598	59,07%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.764.669	289.189.808	30,19%
09.01	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	39.910.050	26.385.900	66,11%
09.02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	439.210.350	182.088.011	41,46%
09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	473.644.269	80.715.897	17,04%
02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	507.107.864	87.379.500	17,23%
2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	322.048.387	83.772.000	26,01%
01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	264.316.623	48.675.000	18,42%
01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	57.731.764	35.097.000	60,79%
2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	185.059.477	3.607.500	1,95%
02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	108.290.338	0	0%
02.02	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	76.769.139	3.607.500	4,70%
03	Program Promosi Penanaman Modal	1.066.487.033	103.820.245	9,73%
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.066.487.033	103.820.245	9,73%
01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1.056.877.033	103.820.245	9,82%
01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	9.610.000	0	0%
04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.246.358.985	782.476.960	62,78%
2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	1.246.358.985	782.476.960	62,78%
01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	399.032.596	302.118.000	75,71%
01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	428.507.590	299.945.000	70%
01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	350.966.697	168.533.000	48,02%
01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	67.852.102	11.880.960	17,51%
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.432.616	21.560.700	42,75%
2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	50.432.616	21.560.700	42,75%
01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.535.590	0	0%
01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35.897.026	21.560.700	60,06%
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	129.986.169	0	0%
2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.986.169	0	0%
01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	129.986.169	0	0%
JUMLAH		17.025.695.198	7.461.493.835	43,82%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang adalah sebesar Rp 17.025.695.198,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.461.493.835.- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp Rp9.564.201.363,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dalam urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :												
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49%	10,31%	10.03%	7,79%	-	7%
Sasaran :												
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.662.472	27.205.700	28.261.147	15.229.837	-	29.277.425
Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,5%	96%	95,63%	95,69%	96,71%	95,80%	-	95,5%
	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,05	77,25	77,35	78,1	-	78

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 7,79%, telah melampaui target tahunan sebesar 7%, dan juga berada pada tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan DPMPTSP dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang, serta efektivitas strategi fasilitasi dan promosi penanaman modal yang telah dilaksanakan sejak awal periode Renstra.

b. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Realisasi nilai investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai sebesar Rp15.229.837 juta, atau lebih dari 50% dari target tahunan sebesar Rp29.277.425 juta. Meskipun belum mencapai nilai maksimal, capaian ini menunjukkan potensi tercapainya target akhir tahun apabila kinerja tetap konsisten pada semester kedua. Bila dilihat dari tren tahunan sejak 2022, realisasi nilai investasi selalu meningkat dan bahkan melampaui target tahunan pada tahun 2023 dan 2024.

c. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima – Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP)

Capaian persentase izin terbit sesuai SP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 95,80%, telah melebihi target tahunan sebesar 95,5%. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan prosedural dan efisiensi pelayanan perizinan yang tetap terjaga dengan baik. DPMPTSP telah mampu memberikan layanan yang responsif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mendukung iklim usaha yang kondusif di wilayah Kota Semarang.

d. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima – Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan realisasi sebesar 78,1 pada tahun 2025, melampaui target tahun 2025 sebesar 78. Ini menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja organisasi. Kinerja ini mengindikasikan sistem manajemen kinerja yang semakin tertata dan terukur.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penananman modal yaitu adanya

isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   1) Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
   2) Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
   3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah , transparan, dan pasti;
b. Peluang:
   1) Tuntutan masyarakat terkait kemudahan akasesibititas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
   2) Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah tranparan, dan pasti.
   3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
   4) Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
   5) Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemeberi pelayanan.

6) Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

1) Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang berpengaruh pada nilai realisasi investasi.
3) Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pelayanan keliling dan pendampingan perizinan online.
4) Perlunya upaya peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan perizinan dan non perizinan baik internal DPMPTSP Kota Semarang maupun petugas pelayanan dari OPD-OPD teknis.
5) Perlunya adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi yang massif dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6) Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	7%	16.046.286.104,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	7%	16.046.286.104,10	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713 Penanam Modal	565.698.803	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713 Penanam Modal	565.698.803	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 buah	294.887.020	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 buah	294.887.020	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	213.455.240	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	213.455.240	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	81.431.780	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	81.431.780	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 Dokumen	270.811.783	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 Dokumen	270.811.783	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.290.338	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.290.338	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	162.521.445	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	162.521.445	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.098.625.634	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.098.625.634	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.098.625.634	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.098.625.634	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1.098.515.634	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1.098.515.634	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	110.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	110.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	1.402.853.069	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	1.402.853.069	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	1.402.853.069	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	1.402.853.069	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	489.330.327	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	489.330.327	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	502.046.040	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	502.046.040	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	345.524.600	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	345.524.600	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	750 Kegiatn Usaha	65.952.102	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatn Usaha	65.952.102	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha								
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nila	77.432.616	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nila	77.432.616	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	77.432.616	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	77.432.616	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	18.785.590	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	18.785.590	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari	4 Kegiatan Usaha	58.647.026	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi	4 Kegiatan Usaha	58.647.026	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	196.626.372	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	196.626.372	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	196.626.372	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	196.626.372	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	196.626.372	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	196.626.372	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.705.049.610,10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.705.049.610,10	
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan	100%		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaporan Keuangan SKPD					Pelaporan Keuangan SKPD			
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	13 Dokumen	6.048.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	13 Dokumen	6.048.900	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	313.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	313.600	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	463.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	463.900	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	953.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	953.300	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	463.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	463.900	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1.251.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1.251.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	223.800	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	628.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	628.600	
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1.750.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1.750.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	8.627.570.839,10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	8.627.570.839,10	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	8.350.493.639,10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	8.350.493.639,10	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	276.180.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	276.180.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	112.400	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	561.000	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	97.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	97.150.000	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 unit	32.760.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 unit	32.760.000	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	64.390.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	64.390.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	667.029.635	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	667.029.635	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	417.690.726	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	417.690.726	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	38.372.890	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	38.372.890	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.783.648	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.783.648	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	22.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	22.250.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	155.949.581	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	155.949.581	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	4.982.790	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	4.982.790	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.468.011.476	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.468.011.476	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	708.605.576	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	708.605.576	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.759.405.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.759.405.900	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	839.238.760	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	839.238.760	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	439.210.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	439.210.350	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	355.118.360	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	355.118.360	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7 – 8%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk

mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ",

dengan indikator tujuan "Persentase Peningkatan Nilai Investasi".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatnya Nilai Investasi
2) Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebuk memiliki indikator sasaran berikut ini:

1) Nilai investasi
2) Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3) Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025

	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	29.277.425
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95,5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	78

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase Peningkatan Nilai Investasi" dan indikator sasaran "Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit Sesuai SP, dan Nilai AKIP";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	20.551.360.190	17.025.695.198	16.046.286.104,10	20.551.360.190	17.025.695.198	16.046.286.104,10	DAU dan PAD	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	841.000.000	507.107.864	87.379.500	841.000.000	507.107.864	87.379.500	PAD	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	450.000.000	322.048.387	83.772.000	450.000.000	322.048.387	83.772.000	PAD	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	300.000.000	264.316.623	48.675.000	300.000.000	264.316.623	48.675.000	PAD	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	150.000.000	57.731.764	35.097.000	150.000.000	57.731.764	35.097.000	PAD	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	391.000.000	185.059.477	3.607.500	391.000.000	185.059.477	3.607.500	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000	108.290.338	0	141.000.000	108.290.338	0	PAD	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	250.000.000	76.769.139	3.607.500	250.000.000	76.769.139	3.607.500	PAD	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.201.874.293	1.066.487.033	103.820.245	1.201.874.293	1.066.487.033	103.820.245	PAD	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	1.201.874.293	1.066.487.033	103.820.245	1.201.874.293	1.066.487.033	103.820.245	PAD	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.101.874.293	1.056.877.033	103.820.245	1.101.874.293	1.056.877.033	103.820.245	PAD	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	100.000.000	9.610.000	0	100.000.000	9.610.000	0	PAD	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	2.900.000.000	1.246.358.985	782.476.960	2.900.000.000	1.246.358.985	782.476.960	PAD	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	2.900.000.000	1.246.358.985	782.476.960	2.900.000.000	1.246.358.985	782.476.960	PAD	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	950.000.000	399.032.596	302.118.000	950.000.000	399.032.596	302.118.000	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	900.000.000	428.507.590	299.945.000	900.000.000	428.507.590	299.945.000	PAD	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	900.000.000	350.966.697	168.533.000	900.000.000	350.966.697	168.533.000	PAD	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	150.000.000	67.852.102	11.880.960	150.000.000	67.852.102	11.880.960	PAD	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	120.000.000	50.432.616	21.560.700	120.000.000	50.432.616	21.560.700	PAD	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	120.000.000	50.432.616	21.560.700	120.000.000	50.432.616	21.560.700	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0		0	0		0	PAD	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.000.000	14.535.590	21.560.700	20.000.000	14.535.590	21.560.700	PAD	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100.000.000	35.897.026	0	100.000.000	35.897.026	0	PAD	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	134.215.642	129.986.169	0	134.215.642	129.986.169	0	PAD	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	134.215.642	129.986.169	0	134.215.642	129.986.169	0	PAD	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan	134.215.642	129.986.169	196.626.372	134.215.642	129.986.169	196.626.372	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	14.887.010.462	14.025.322.531	12.705.049.610,10	14.887.010.462	14.025.322.531	12.705.049.610,10	PAD	
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD								
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD								
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	123.626.100	6.048.900	6.048.900	123.626.100	6.048.900	6.048.900	PAD	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.345.200	313.600	313.600	51.345.200	313.600	313.600	PAD	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.487.900	463.900	463.900	2.487.900	463.900	463.900	PAD	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.150.100	953.300	953.300	6.150.100	953.300	953.300	PAD	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2.993.900	463.900	463.900	2.993.900	463.900	463.900	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD								
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.448.600	1.251.800	1.251.800	6.448.600	1.251.800	1.251.800	PAD	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.797.400	223.800	223.800	1.797.400	223.800	223.800	PAD	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.403.000	628.600	628.600	2.403.000	628.600	628.600	PAD	
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	1.750.000	1.750.000	50.000.000	1.750.000	1.750.000	PAD	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	9.722.391.960	9.714.145.560	8.627.570.839,10	9.722.391.960	9.714.145.560	8.627.570.839,10	PAD	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.438.448.360	9.438.448.360	8.350.493.639,10	9.438.448.360	9.438.448.360	8.350.493.639,10	DAU dan PAD	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.000.000	274.800.000	276.180.000	279.000.000	274.800.000	276.180.000	PAD	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.798.400	112.400	112.400	1.798.400	112.400	112.400	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.347.800	561.000	561.000	1.347.800	561.000	561.000	PAD	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.797.400	223.800	223.800	1.797.400	223.800	223.800	PAD	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	237.028.840	81.150.000	97.150.000	237.028.840	81.150.000	97.150.000	PAD	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.760.000	32.760.000	32.760.000	32.760.000	32.760.000	32.760.000	PAD	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204.268.840	48.390.000	64.390.000	204.268.840	48.390.000	64.390.000	PAD	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	1.241.391.798	729.655.882	667.029.635	1.241.391.798	729.655.882	667.029.635	PAD	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	440.245.780	433.416.565	417.690.726	440.245.780	433.416.565	417.690.726	PAD	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.490.630	38.372.890	38.372.890	60.490.630	38.372.890	38.372.890	PAD	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55.024.030	17.783.648	17.783.648	55.024.030	17.783.648	17.783.648	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	PAD	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.000.000	22.250.000	22.250.000	32.000.000	22.250.000	22.250.000	PAD	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	523.975.600	88.177.021	155.949.581	523.975.600	88.177.021	155.949.581	PAD	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.655.758	119.655.758	4.982.790	119.655.758	119.655.758	4.982.790	PAD	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	2.536.557.520	2.536.557.520	2.468.011.476	2.536.557.520	2.536.557.520	2.468.011.476	PAD	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	801.000.000	801.000.000	708.605.576	801.000.000	801.000.000	708.605.576	PAD	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.735.557.520	1.735.557.520	1.759.405.900	1.735.557.520	1.735.557.520	1.759.405.900	PAD	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	1.026.014.244	957.764.669	839.238.760	1.026.014.244	957.764.669	839.238.760	PAD	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	39.910.050	39.910.050	43.959.999	39.910.050	39.910.050	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	503.409.976	439.210.350	439.210.350	503.409.976	439.210.350	439.210.350	PAD	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	PAD	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	473.644.269	473.644.269	355.118.360	473.644.269	473.644.269	355.118.360	PAD	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
   3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

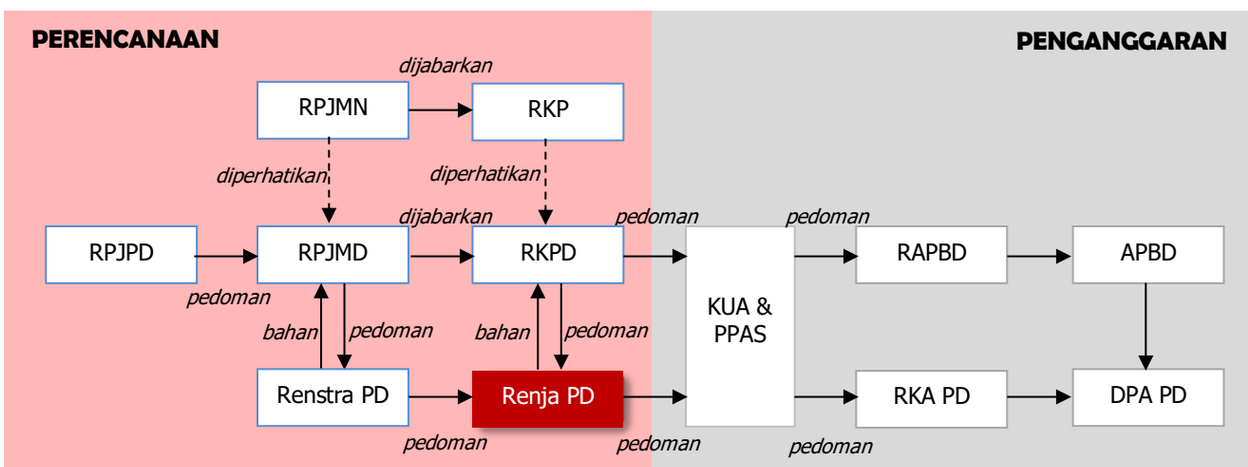

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, dengan berdasarkan

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Kota Semarang Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang,tugas pokok dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 100 100 Persen persen Persen		100.00 100 100 Persen persen Persen				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen		8.00 Dokumen	4			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	2			
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen		100 Persen	50			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		75 Orang/bulan	75			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen		100 persen	50			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen		100 Persen	50			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	0			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	5			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	6			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	6			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis		9.00 Jenis	0			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	0			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	0			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen		100.00 Persen	50			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen		100.00 Persen				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22			
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	0			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen		45.00 Persen	42			
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan		10 kegiatan	5			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000 Orang		1000 Orang	500			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan		5 Kegiatan	3			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang		300 Orang	150			
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00 Orang		1600.00 Orang	1600			
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	40 Organisasi		40 Organisasi	40			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang		1000 Orang	500			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	1273.00 5 jumlah Lapangan		1273.00 5 jumlah Lapangan	1273			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah		6.00 jumlah	6			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit		6 Unit	6			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan		6.00 kegiatan	6			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6			
	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan		1 Kegiatan	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang		1000 Orang	0			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00 Orang		1373.00 Orang	1373			
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda		7 Pelatda	7			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang		50 Orang	0			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan		2.00 kegiatan	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen		12 Dokumen	6			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan		5.00 Lapangan	0			
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan		1 Laporan	0			
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit		10 Unit	0			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	53.00 Kegiatan		53.00 Kegiatan	30			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53 Kegiatan		53 Kegiatan	30			
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	5			

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah belum ada dikarenakan sub kegiatan di Dispora Kota Semarang sudah terjadwal sampai akhir tahun

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu sub kegiatan yang didalamnya terdapat Pengadaan belanja modal seperti

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		Rp62.133.370.649,18	Rp27.589.399.642,00	Rp34.543.971.007,18
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp18.843.689.932,38	Rp5.703.722.726,00	Rp13.139.967.206,38
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp173.396.354,40	Rp5.738.440,00	Rp167.657.914,40
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp103.153.000,00	Rp1.801.800,00	Rp101.351.200,00
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp923.126,00	Rp0,00	Rp923.126,00
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp769.500,00	Rp769.200,00	Rp300,00
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp762.428,00	Rp618.800,00	Rp143.628,00
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp1.168.935,00	Rp925.440,00	Rp243.495,00
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp575.653,00	Rp575.400,00	Rp253,00
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp18.672.780,00	Rp1.047.800,00	Rp17.624.980,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp47.370.932,40	Rp0,00	Rp47.370.932,40
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.752.935.632,00	Rp4.745.163.029,00	Rp5.007.772.603,00
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp363.684.000,00	Rp145.329.000,00	Rp218.355.000,00
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp2.200.000,00	Rp500.000,00	Rp1.700.000,00
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp1.080.000,00	Rp1.079.800,00	Rp200,00
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp56.100,00	Rp0,00	Rp56.100,00
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp1.159.950,00	Rp999.600,00	Rp160.350,00
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.954.400,00	Rp1.599.600,00	Rp354.800,00
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp573.628,00	Rp0,00	Rp573.628,00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp36.671.903,80	Rp6.400.000,00	Rp30.271.903,80
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp36.671.903,80	Rp6.400.000,00	Rp30.271.903,80
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.305.410.623,10	Rp160.454.587,00	Rp2.144.956.036,10
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.000.000,00	Rp11.776.000,00	Rp13.224.000,00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.349.518.441,90	Rp0,00	Rp1.349.518.441,90
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp71.549.290,00	Rp14.960.650,00	Rp56.588.640,00
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp48.000.000,00	Rp13.761.500,00	Rp34.238.500,00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp32.628.100,00	Rp14.925.999,00	Rp17.702.101,00
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp8.940.000,00	Rp4.470.000,00	Rp4.470.000,00
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp80.000.000,00	Rp25.643.200,00	Rp54.356.800,00
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp255.629.224,10	Rp74.917.238,00	Rp180.711.986,10

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp434.145.567,10	Rp0,00	Rp434.145.567,10
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp518.065.011,00	Rp0,00	Rp518.065.011,00
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp280.164.044,00	Rp0,00	Rp280.164.044,00
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp237.900.967,00	Rp0,00	Rp237.900.967,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.822.848.072,08	Rp458.451.910,00	Rp2.364.396.162,08
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp877.281.773,08	Rp98.899.707,00	Rp778.382.066,08
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp98.550.343,00	Rp35.108.450,00	Rp63.441.893,00
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.847.015.956,00	Rp324.443.753,00	Rp1.522.572.203,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.863.654.258,00	Rp178.006.760,00	Rp2.685.647.498,00
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp35.955.000,00	Rp20.882.550,00	Rp15.072.450,00
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp403.160.720,00	Rp157.124.210,00	Rp246.036.510,00
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp7.272.000,00	Rp0,00	Rp7.272.000,00
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp2.417.266.538,00	Rp0,00	Rp2.417.266.538,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp2.626.464.214,10	Rp823.100.410,00	Rp1.803.363.804,10
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp1.122.325.554,00	Rp594.510.660,00	Rp527.814.894,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp616.491.400,00	Rp283.205.000,00	Rp333.286.400,00
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Rp117.796.384,00	Rp82.915.660,00	Rp34.880.724,00
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp388.037.770,00	Rp228.390.000,00	Rp159.647.770,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.504.138.660,10	Rp228.589.750,00	Rp1.275.548.910,10
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp919.635.190,00	Rp185.953.500,00	Rp733.681.690,00
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Rp584.503.470,10	Rp42.636.250,00	Rp541.867.220,10
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp38.163.216.502,70	Rp18.562.576.506,00	Rp19.600.639.996,70
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.715.173.518,50	Rp2.073.383.806,00	Rp1.641.789.712,50
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp3.715.173.518,50	Rp2.073.383.806,00	Rp1.641.789.712,50
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.506.169.140,99	Rp2.605.624.700,00	Rp3.900.544.440,99

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp1.646.738.078,97	Rp51.910.810,00	Rp1.594.827.268,97
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp3.359.431.062,02	Rp1.053.713.890,00	Rp2.305.717.172,02
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp2.767.465.310,00	Rp883.568.000,00	Rp1.883.897.310,00
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp2.134.311.180,00	Rp831.443.000,00	Rp1.302.868.180,00
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp633.154.130,00	Rp52.125.000,00	Rp581.029.130,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp23.000.000.000,00	Rp11.500.000.000,00	Rp11.500.000.000,00
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Rp23.000.000.000,00	Rp11.500.000.000,00	Rp11.500.000.000,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp2.174.408.533,21	Rp1.500.000.000,00	Rp674.408.533,21
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp1.700.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp200.000.000,00
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Rp474.408.533,21	Rp0,00	Rp474.408.533,21
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD MURNI 2025	REALISASI S.D JUNI 2025	Sisa Pagu Anggaran
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp62.133.370.649,18	Rp27.589.399.642,00	Rp34.543.971.007,18

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 14 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah sebesar Rp 62.133.370.649 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 27.589.399.642. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 29.556.087.000

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Persentase wirausaha Muda mandiri	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
	Persentase pemuda yang menjadi pengurus OKP	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36							
MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang	Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional	18.18	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46							
Meningkatnya kualitas	Persentase Sarpras	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60							

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	olahraga dalam kondisi bangunan baik dan baik sekali													

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang;
b. Sasaran MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang;
c. Sasaran Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga;

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart;
4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. masih terbatsnya central Olahraga yang terpusat tingkat kota
2. masih terbatasnya sarana prasarana yang digunakan atlet untuk latihan.
3. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder.
4. Masih Kurangnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
2. Pembentukan sebuah wadah olahraga yang dapat menampung atlet-atlet Kota Semarang
3. Pengkoordinasian antara Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder kepemudaan yang masih kurang
4. Masih banyaknya pemuda yang belum di bekali dengan kemapuan atau keahlian khusus guna menunjang kehidupan pemuda tersebut
5. Masih minimnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diadakan pemerintah daerah

b. Peluang

1. Pembentukan sebuah wadah untuk atlet kota semarang terutama pelajar
2. Pembuatan tentang Perda kepemudaan
3. Kegiatan lomba,Kompetisi,atau event Olahraga yang sekarang semakin meningkat
4. Peningkatan Pelatihan kewiarausahaan bagi pemuda
5. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet kota semarang
6. Meningkatnya club olahraga di Kota Semarang
7. Bertambahnya organisasi pemuda di kota semarang

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart;
4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA SEMARANG	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 100 100 Persen persen Persen	18.843.689.932,38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA SEMARANG	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 100 100 Persen persen Persen	18.843.689.932,38
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	173.396.354,40	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	173.396.354,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	103.153.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	103.153.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	923.126,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	923.126,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	769.500,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	769.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	762.428,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	762.428,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.168.935,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.168.935,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	575.653,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	575.653,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.672.780,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.672.780,00

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KOTA SEMARANG				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	47.370.932,40		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	47.370.932,40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	10.123.643.710,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	10.123.643.710,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA SEMARANG				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	9.752.935.632,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	9.752.935.632,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA SEMARANG				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	363.684.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	363.684.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA SEMARANG				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.080.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.080.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	56.100,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	56.100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KOTA SEMARANG				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.159.950,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.159.950,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.954.400,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.954.400,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA SEMARANG				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	573.628,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	573.628,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	36.671.903,80	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	36.671.903,80
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA SEMARANG				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	36.671.903,80		KOTA SEMARANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	36.671.903,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	2.305.410.623,10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	2.305.410.623,10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA SEMARANG				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA SEMARANG				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.349.518.441,90		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.349.518.441,90
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA SEMARANG				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	71.549.290,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	71.549.290,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA SEMARANG				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	48.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	48.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA SEMARANG				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32.628.100,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32.628.100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA SEMARANG				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.940.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.940.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA SEMARANG				Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA SEMARANG				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.629.224,10		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.629.224,10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KOTA SEMARANG				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	434.145.567,10		KOTA SEMARANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	434.145.567,10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	518.065.011,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	518.065.011,00
	Pengadaan Mebel	KOTA SEMARANG				Pengadaan Mebel	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	280.164.044,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	280.164.044,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA SEMARANG				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	237.900.967,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	237.900.967,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	2.822.848.072,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA SEMARANG	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	2.822.848.072,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA SEMARANG				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.281.773,08		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.281.773,08
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA SEMARANG				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.550.343,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.550.343,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA SEMARANG				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.847.015.956,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.847.015.956,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA SEMARANG	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	2.863.654.258,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA SEMARANG	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	2.863.654.258,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA SEMARANG				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA SEMARANG				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	403.160.720,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	403.160.720,00
	Pemeliharaan Mebel	KOTA SEMARANG				Pemeliharaan Mebel	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.272.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.272.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA SEMARANG				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.417.266.538,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.417.266.538,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	KOTA SEMARANG	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	2.626.464.214,10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	KOTA SEMARANG	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	2.626.464.214,10
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	1.122.325.554,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	1.122.325.554,00

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000 Orang	616.491.400,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000 Orang	616.491.400,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	117.796.384,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	117.796.384,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	388.037.770,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	388.037.770,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00 Orang	1.504.138.660,10	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00 Orang	1.504.138.660,10
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	40 Organisasi	919.635.190,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	40 Organisasi	919.635.190,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	584.503.470,10		KOTA SEMARANG	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	584.503.470,10
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	KOTA SEMARANG	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	1273.00 5 jumlah Lapangan	38.163.216.502,70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	KOTA SEMARANG	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	1273.00 5 jumlah Lapangan	38.163.216.502,70
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	3.715.173.518,50	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	3.715.173.518,50
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	3.715.173.518,50		KOTA SEMARANG	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	3.715.173.518,50

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan	6.506.169.140,99	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan	6.506.169.140,99
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	1.646.738.078,97		KOTA SEMARANG	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	1.646.738.078,97
	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1.500.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1.500.000.000,00
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	KOTA SEMARANG				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	3.359.431.062,02		KOTA SEMARANG	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	3.359.431.062,02
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	KOTA SEMARANG	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00 Orang	2.767.465.310,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	KOTA SEMARANG	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00 Orang	2.767.465.310,00
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	KOTA SEMARANG				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	KOTA SEMARANG			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		KOTA SEMARANG	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	2.134.311.180,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	2.134.311.180,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	633.154.130,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	633.154.130,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	KOTA SEMARANG	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	23.000.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	KOTA SEMARANG	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	23.000.000.000,00
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	KOTA SEMARANG				Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen	23.000.000.000,00		KOTA SEMARANG	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen	23.000.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	2.174.408.533,21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	2.174.408.533,21
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1.700.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1.700.000.000,00

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	KOTA SEMARANG				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	474.408.533,21		KOTA SEMARANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	474.408.533,21
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KOTA SEMARANG	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	53.00 Kegiatan	2.500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KOTA SEMARANG	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	53.00 Kegiatan	2.500.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	KOTA SEMARANG	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53 Kegiatan	2.500.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	KOTA SEMARANG	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53 Kegiatan	2.500.000.000,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	KOTA SEMARANG				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	KOTA SEMARANG			
		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	2.500.000.000,00		KOTA SEMARANG	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	2.500.000.000,00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin

keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

" *Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi"* dengan indikator tujuan *"Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang"*

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang
2. MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang dengan indikator
3. Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga

Indicator Sasaran sebagai berikut sasaran sebagai berikut:

1. Persentase wirausaha Muda mandiri
2. Persentase pemuda yang menjadi pengurus OKP
3. Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional
4. Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi bangunan baik dan baik sekali

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	TARGET
No.	Uraian	No.	Uraian		
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	1.	Persentase wirausaha Muda mandiri	PERSEN	0.01
			Persentase pemuda yang menjadi pengurus OKP	PERSEN	0.36
2.	MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang	2.	Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional	PERSEN	9.81
3.	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	3.	Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi bangunan baik dan baik sekali	PERSEN	0.60

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan " *Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi"* dan indikator sasaran (1) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang, (2) MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang, (3) Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 100 100 Persen persen Persen	100.00 100 100 Persen persen Persen	100.00 100 100 Persen persen Persen	15.033.082.919,00	15.486.946.436,00	18.843.689.932,38	APBD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	181.635.180,00	181.635.180,00	173.396.354,40	APBD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	63.061.400,00	63.061.400,00	103.153.000,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.566.800,00	6.566.800,00	923.126,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	769.500,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	762.428,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	1.168.935,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0							APBD	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	575.653,00	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0							APBD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	42.006.980,00	42.006.980,00	18.672.780,00	APBD	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	47.370.932,40	APBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	100 Persen	101 Persen	10.976.874.000,00	10.807.612.600,00	10.123.643.710,00	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0							APBD	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	76 Orang/bulan	10.564.510.000,00	10.395.248.600,00	9.752.935.632,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
JUMLAH									APBD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	387.264.000,00	387.264.000,00	363.684.000,00	APBD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	APBD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.080.000,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0							APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	56.100,00	APBD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.159.950,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0							APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.954.400,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3.700.000,00	3.700.000,00	573.628,00	APBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	100 persen	101 persen	90.000.000,00	90.000.000,00	36.671.903,80	APBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0							APBD	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	101 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	36.671.903,80	APBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	100 Persen	101 Persen	1.097.005.694,00	1.150.869.211,00	2.305.410.623,10	APBD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0							APBD	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0							APBD	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	200.117.246,00	253.980.763,00	1.349.518.441,90	APBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0							APBD	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	71.549.290,00	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	48.000.000,00	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0							APBD	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	32.628.100,00	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.940.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00	APBD	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0							APBD	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0							APBD	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	480.762.105,00	480.762.105,00	255.629.224,10	APBD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0							APBD	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	201.186.343,00	201.186.343,00	434.145.567,10	APBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	9.00 Jenis	9.00 Jenis	152.016.295,00	152.016.295,00	518.065.011,00	APBD	
	Pengadaan Mebel	0							APBD	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	134.727.560,00	134.727.560,00	280.164.044,00	APBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	17.288.735,00	17.288.735,00	237.900.967,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	891.922.786,00	1.061.184.186,00	2.822.848.072,08	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0							APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.000.000,00	318.000.000,00	877.281.773,08	APBD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0							APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	98.550.343,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0							APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	518.922.786,00	688.184.186,00	1.847.015.956,00	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.643.628.964,00	2.043.628.964,00	2.863.654.258,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0							APBD	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.603.603,00	39.603.603,00	35.955.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	456.765.042,00	456.765.042,00	403.160.720,00	APBD	
	Pemeliharaan Mebel	0							APBD	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.272.000,00	7.272.000,00	7.272.000,00	APBD	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0							APBD	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.139.988.319,00	1.539.988.319,00	2.417.266.538,00	APBD	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	45.00 Persen	45.00 Persen	2.950.487.224,00	2.950.487.224,00	2.626.464.214,10	APBD	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	10 kegiatan	11 kegiatan	1.470.487.224,00	1.470.487.224,00	1.122.325.554,00	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	0							APBD	
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000 Orang	1000 Orang	1001 Orang	746.962.000,00	746.962.000,00	616.491.400,00	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	185.694.224,00	185.694.224,00	117.796.384,00	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	0							APBD	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	300 Orang	301 Orang	537.831.000,00	537.831.000,00	388.037.770,00	APBD	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00 Orang	1600.00 Orang	1600.00 Orang	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00	1.504.138.660,10	APBD	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0							APBD	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	40 Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi	759.855.620,00	759.855.620,00	919.635.190,00	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	0							APBD	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	1000 Orang	1001 Orang	720.144.380,00	720.144.380,00	584.503.470,10	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	1273.00 5 jumlah Lapangan	1273.00 5 jumlah Lapangan	1273.00 5 jumlah Lapangan	38.778.184.937,00	38.724.321.420,00	38.163.216.502,70	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	6.00 jumlah	6.00 jumlah	5.322.184.937,00	5.268.321.420,00	3.715.173.518,50	APBD	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	0							APBD	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	6 Unit	7 Unit	5.322.184.937,00	5.268.321.420,00	3.715.173.518,50	APBD	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	5.091.000.000,00	5.091.000.000,00	6.506.169.140,99	APBD	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0							APBD	
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.101.000.000,00	1.101.000.000,00	1.646.738.078,97	APBD	
	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	APBD	
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	0							APBD	
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	1000 Orang	1001 Orang	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	3.359.431.062,02	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00 Orang	1373.00 Orang	1373.00 Orang	2.865.000.000,00	2.865.000.000,00	2.767.465.310,00	APBD	
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0							APBD	
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	7 Pelatda	8 Pelatda	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	2.134.311.180,00	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	0							APBD	
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	50 Orang	51 Orang	625.000.000,00	625.000.000,00	633.154.130,00	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	APBD	
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	0							APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.174.408.533,21	APBD	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0							APBD	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	APBD	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	0							APBD	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	10 Unit	11 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	474.408.533,21	APBD	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	53.00 Kegiatan	53.00 Kegiatan	53.00 Kegiatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	APBD	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53 Kegiatan	53 Kegiatan	53 Kegiatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	APBD	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0							APBD	
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	APBD	

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

22. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Rencana Strategis), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Rencana Kerja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun hubungan antar dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran dapat diperhatikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

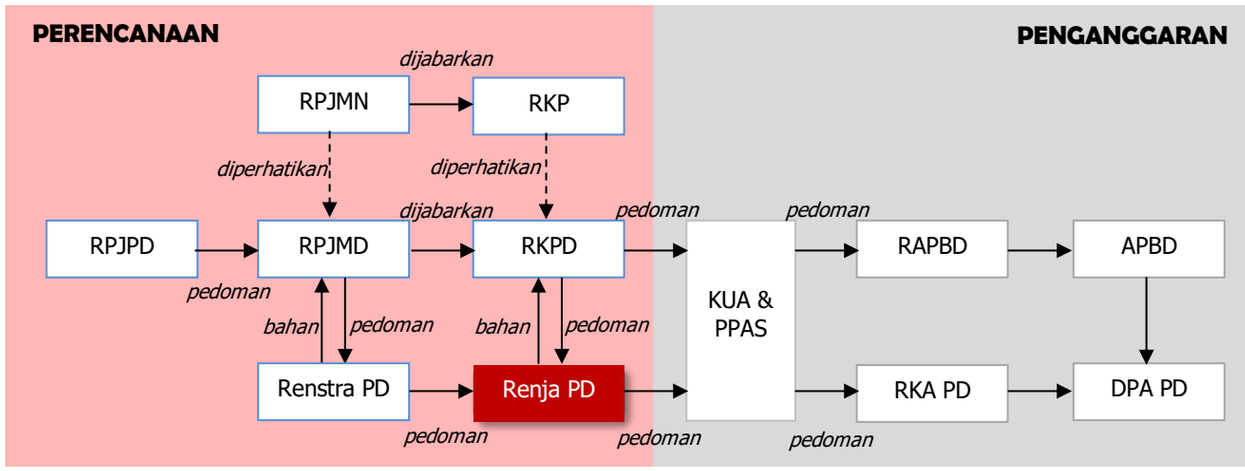

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis. Untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Rencana Kerja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan antara lain menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian anggaran belanja daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatifnya

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
y. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
z. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
aa. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
bb. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 dengan

berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Kualitas Rencana Kerja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Rencana Kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 sampai dengan triwulan II, yang menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	20%	20%	20%	100	60%	60	
2.22.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	17 dokumen	188,88	
2.22.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	200	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	200	Kepmen
2.22.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
2.22.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	Renstra
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan	69 orang/bulan	74 orang/bulan	74 orang/bulan	100	143 orang/bulan	213,43	Kepmen
2.22.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	18 dokumen	150	Kepmen
2.22.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	200	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	200	Kepmen
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	1 event	-	-	-	1 event	33,33	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	546 orang	74 orang	74 orang	100	620 orang	837,83	Kepmen
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	6 kegiatan	16 kegiatan	7 kegiatan	43,75	6 kegiatan	433,33	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	167 orang	74 orang	74 orang	100	241 orang	325,67	Kepmen
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	14 paket	13 paket	13 paket	100	27 paket	192,85	Renstra
		Jumlah Paket Komponen Instalasi	13 paket	14 paket	13 paket	13 paket	100	27 paket	192,85	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	13 paket	6 paket	0 paket	0	0	0	Renstra
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	13 paket	6 paket	0 paket	0	0	0	Kepmen
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	50 paket	6 paket	3 paket	50	3 paket	5,55	Renstra
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 paket	50 paket	6 paket	3 paket	50	3 paket	5,55	Kepmen
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 paket	13 paket	4 paket	30,76	16 paket	133,33	Renstra
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	13 paket	4 paket	30,76	16 paket	133,33	Kepmen
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	140 laporan	115 laporan	70 laporan	60,86	70 laporan	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	140 laporan	115 laporan	70 laporan	60,86	70 laporan	NA	Kepmen
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	77 laporan	60 laporan	21 laporan	35	21 laporan	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	77 laporan	60 laporan	21 laporan	35	21 laporan	NA	Kepmen
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	6 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	42,85	3 dokumen	NA	Renstra
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	42,85	3 dokumen	42,85	Kepmen
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	173 unit	82 unit	5 unit	6,09	178 unit	NA	Renstra
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	82 unit	173 unit	82 unit	5 unit	6,09	178 unit	217,07	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Lainnya yang Disediakan								
2.22.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
2.22.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	18 laporan	150	Kepmen
2.22.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	18 laporan	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	18 laporan	150	Kepmen
2.22.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
2.22.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	20 unit	20 unit	28 unit	28 unit	100	48 unit	240	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	20 unit	28 unit	28 unit	100	48 unit	240	Kepmen
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	3 unit	2 unit	1 unit	50	4 unit	66,66	Renstra
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3 unit	2 unit	1 unit	50	4 unit	66,66	Kepmen
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	71 unit	200 unit	94 unit	47	165 unit	NA	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	71 unit	200 unit	94 unit	47	165 unit	82,50	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	34,69%	30%	28,49%	94,96	63,18	180,51	
2.22.02 .2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	51,64%	30%	54,46%	181,53	106,10	303,14	
2.22.02 .2.01.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	13 event	16 event	3 event	18,75	16 event	800	Renstra
		Drama Tari Tradisional	2 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Drama Tradisional	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	0	0	1 event	100	Renstra
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	0	0	1 event	100	Renstra
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	11 event	9 event	4 event	44,44	15 event	300	Renstra
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	4 event	6 event	0	0	4 event	200	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Pemajuan Kebudayaan (1 orang)								
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Objek Pemajuan Kebudayaan	100	20 Objek Pemajuan Kebudayaan	200	Kepmen
2.22.02 .2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	42,99%	30%	33,56%	111,86	95,88	95,88	
2.22.02 .2.02.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	170 event	0	0	0	170 event	37,77	Renstra
		Festival Film Semarang	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Festival Goa Kreo	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Festival Keroncong	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Festival Semarang	2 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Festival Seni dan Budaya	15 event	0	1 event	1 event	100	1 event	6,66	Renstra
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	0	0	0	1 event	100	Renstra
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	0	0	0	1 event	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Sesaji Rewanda	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100	20 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	200	Kepmen
2.22.02 .2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	42,37%	30%	17,72%	59,06	17,72%	50,62	
2.22.02 .2.03.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1 event	100	2 event	200	Renstra
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event	1 event	100	2 event	200	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	Renstra
		Wayang 1 Muharam	1 event	0	1 event	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	3.548 orang	2.600 orang	9.878 orang	379,92	13.426 orang	516,38	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	34,96%	30%	13,32%	44,40	48,28%	137,94	
2.22.03 .2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	35%	34,96%	30%	13,32%	44,40	48,28%	137,94	
2.22.03 .2.01.0 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Lomba Seni	2 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	1 kegiatan	14,28	8 kegiatan	400	Renstra
		Parade Seni	1 event	1 event	0	0	0	1 event	100	Renstra
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	0	1 kegiatan	0	0	0	0	Renstra
		Workshop Seni	20 kegiatan	6 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	25	7 kegiatan	35	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	777 sertifikat	846 sertifikat	609 sertifikat	71,98	1.386 sertifikat	220,34	Kepmen
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu	12 bulan	0	0	0	0	0	0	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya								
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	234 lembaga	191 lembaga	121 lembaga	63,35	355 lembaga	286,29	Kepmen
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	129,22%	91,57%	129,22%	141,11	258,44%	258,44	
2.22.05 .2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	129,22%	91,57%	129,22%	141,11	258,44%	258,44	
2.22.05 .2.02.0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	1 kegiatan	50	Renstra
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	2 tahun	200	Renstra
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	465 objek	465 objek	465 objek	100	930 objek	201,73	Kepmen
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50	50%	50	
3.26.02 .2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	81 buah	0	0	0	0	0	0	
3.26.02 .2.01.0 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Kajian Pariwisata	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	79 lokasi	0	0	0	0	0	0	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		(Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)								
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	2.851.485 orang	1.453.030 orang	1.607.104 orang	110,60	4.458.589 orang	289,47	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	24 bulan	200	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	288 OB	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	33,33	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	144 lokasi	5 lokasi	0	0	144 lokasi	182,27	Kepmen
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100	200%	200	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	12 unit	200	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara								
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	25	Renstra
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100	7 laporan	350	Kepmen
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	300 orang	0	0	0	0	0	0	Kepmen
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	14 laporan	14 laporan	6 laporan	42,85	20 laporan	142,85	Kepmen
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.26.03 .2.01.0 07	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	80	5 kegiatan	500	Renstra
		Kajian	2 dokumen	0	3 dokumen	0	0	0	0	Renstra
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	123 buku	0	0	0	123 buku	123	Renstra
		Pembuatan Guide Book	100 buku	150 buku	0	0	0	150 buku	150	Renstra
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	10.000 lembar	4.500 lembar	4.500 lembar	100	14.500 lembar	247,86	Renstra
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	2 jenis	66,66	Renstra
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan	50	1,5 tahun	150	Renstra
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	1,5 tahun	150	Renstra
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	1,5 tahun	150	Renstra
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan	50	1,5 tahun	150	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui	18 promosi	18 promosi	28 promosi	20 promosi	71,42	38 promosi	211,11	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	0	0	0	Renstra
		Pameran	1 kegiatan	14 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan	16,66	15 kegiatan	1.500	Renstra
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 kegiatan	200	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 kegiatan	16 kegiatan	14 kegiatan	2 kegiatan	14,28	18 kegiatan	360	Kepmen
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	Renstra
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	1,5 tahun	150	Renstra
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	3 dokumen	4 dokumen	0	0	3 dokumen	150	Renstra
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	50	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	0	0	3 dokumen	75	Kepmen
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	99,57%	90%	92%	102,22	191,57%	191,57	
3.26.05 .2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	99,57%	90%	92%	102,22	191,57%	191,57	
3.26.05 .2.01.0 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata	50 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Pelatihan Pemandu Geowisata	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	120 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 bulan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	1.787 orang	3.267 orang	1.290 orang	39,48	3.077 orang	0	Kepmen
		Sub Kegiatan Pemutakhiran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tahun 2023 belum ada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan ini baru ada pada tahun 2024.								

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan 7 program, 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah sebagai berikut :
   a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
   b. Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   d. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan
2) Program Pengembangan Kebudayaan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap kegiatan seni budaya.
3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap pengembangan seni budaya tradisional.
4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya.
5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik destinasi pariwisata.
6) Program Pemasaran Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik wisata yang dipasarkan.
7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah SDM Pariwisata.

Adapun sampai dengan triwulan II tahun 2025 ada sub kegiatan yang telah tercapai 100% kinerjanya yaitu sub kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sedangkan sub kegiatan yang sedang proses dan sudah di laksanakan yaitu ada sebanyak 37 sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11. Pelindungan Cagar Budaya
12. Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
13. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
14. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Efisiensi anggaran pada 14 sub kegiatan tersebut dalam rangka menindak lanjuti sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		37.787.966.922	16.174.823.243	42,80
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.790.350.985	11.316.963.221	47,57
1	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	23.790.350.985	11.316.963.221	47,57
1	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.523.146.606	7.641.632.321	43,61
1	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.421.800	98.000	0,13
1	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.043.600	-	-
2	2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253.000	-	-
3	2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	208.000	-	-
4	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.000	-	-
5	2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	208.000	-	-
6	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.200	98.000	21,48
7	2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	-
2	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.288.411.780	6.086.418.368	45,80
8	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.014.912.400	5.954.166.368	45,75
9	2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	272.827.980	132.170.000	48,44
10	2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	82.000	36,64
11	2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	223.800	-	-
12	2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.977.400	24.340.000	48,70
13	2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.972.400	4.740.000	95,33
14	2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.005.000	19.600.000	43,55
4	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	836.454.687	295.252.697	35,30
15	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	168.879.500	51.726.900	30,63
16	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.118.450	-	-
17	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.512.780	31.627.200	66,57
18	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.632.517	7.538.900	17,68
19	2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	181.297.500	154.200.765	85,05
20	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.631.000	41.358.932	36,40
21	2.22.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	189.382.940	8.800.000	4,65
5	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.913.580	12.134.600	7,49
17	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.913.580	12.134.600	7,49
6	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.265.184.300	943.179.262	41,64
18	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.090.000	402.906.520	38,37
19	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.215.094.300	540.272.742	44,46
7	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.783.059	280.209.394	33,17
20	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	407.679.179	166.713.604	40,89
21	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.908.343	36.237.500	19,70

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
22	2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.195.537	77.258.290	30,51
2	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.593.116.814	1.799.365.900	69,39
8	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	512.148.410	471.138.000	91,99
23	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	512.148.410	471.138.000	91,99
9	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	222.488.750	215.954.000	97,06
24	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	222.488.750	215.954.000	97,06
10	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.858.479.654	1.112.273.900	59,85
25	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.858.479.654	1.112.273.900	59,85
3	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.120.079.355	1.858.515.000	59,57
11	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.120.079.355	1.858.515.000	59,57
26	2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.097.549.355	829.015.000	75,53
27	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.022.530.000	1.029.500.000	50,90
4	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	554.008.210	17.450.000	3,15
12	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	554.008.210	17.450.000	3,15
28	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	554.008.210	17.450.000	3,15
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.997.615.937	4.857.860.022	34,70
2	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.997.615.937	4.857.860.022	34,70
5	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.630.916.012	4.154.559.522	35,72

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
13	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.533.706.319	2.291.583.870	35,07
29	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.533.706.319	2.291.583.870	35,07
14	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.968.975.956	1.844.007.527	37,11
30	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	61.342.936	-	-
31	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.807.633.020	1.747.457.527	36,35
32	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	96.550.000	96,55
15	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	128.233.737	18.968.125	14,79
33	3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	128.233.737	18.968.125	14,79
6	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.697.936.185	391.205.500	23,04
16	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.697.936.185	391.205.500	23,04
34	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	267.311.680	24.195.000	9,05
35	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	617.572.760	130.467.000	21,13
36	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	813.051.745	236.543.500	29,09
7	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	668.763.740	312.095.000	46,67
17	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	668.763.740	312.095.000	46,67

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
37	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	668.763.740	312.095.000	46,67
JUMLAH		37.787.966.922	16.174.823.243	42,80

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan 7 program, 18 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 37.787.966.922,-. Dari anggaran tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2025 realisasinya sebesar Rp 16.174.823.243,- atau sebanyak 42,80%.

Adapun pada triwulan II dengan target sebesar Rp 22.483.420.663,- dan realisasi TW II : Rp 16.174.823.243,- dengan persentase sebanyak 71,94%. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Jambore Pokdarwis yang semula direncanakan untuk dilaksanakan Bulan Februari, namun diundur ke Bulan Juni atas petunjuk pimpinan. Proses pembayaran diselesaikan bulan Juli 2025.
2. Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk digeser di anggaran perubahan ialah Asosiasi Kepariwisataan, Fasilitasi BP2KS, dan Kegiatan Konsultasi ke Kementerian Pariwisata.
3. Adanya penyesuaian jadwal untuk beberapa kegiatan seperti Pameran Pariwisata, Sales Mission, Kolaborasi Seni dan Budaya, serta Cetak Leaflet.
4. Berkurangnya frekuensi permintaan fasilitasi denok kenang.
5. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Pengelola UPTD Taman Lele sudah jalan sejak TW II dengan metode E-PL dan masih dalam proses SPK sejak 16 Juni 2025.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2025
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	45,48 %	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	50,47 %	62,41 %	71,94 %	86,10 %	81,38 %	89,84 %	89,84 %
SASARAAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	65,30 %	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	167,69 %	77,76 %	78,93 %	129,22 %	129,22 %	134,68%	134,68%
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66 %	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	37,16 %	47,04 %	64,96 %	42,99 %	33,55 %	45 %	45%
TUJUAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk	Persentase Peningkatan Kunjung	6%	6%	6%	6%	6%	6%	-18,46 %	100,58%	21,52 %	13,13 %	6,41 %	8,5 %	8,5%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2025
Unggulan Daerah	an Wisata													
SASARAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455.921 orang	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	2.663.684 orang	5.338.233 orang	6.478.883 orang	7.321.077 orang	3.533.379 orang	8.618.555 orang	7.943.369 orang
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	7.025 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	77 orang	4.918 orang	13.992 orang	24.296 orang	10.334 orang	28.602 orang	26.361 orang
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	33,96 %	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	31,74%	54,01%	57,11 %	59,17 %	58,20 %	58,20 %	58,20 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan triwulan II tersebut dari Tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

a. Tujuan “Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal”
   memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal.
   Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 81,38% dari target sebesar 66,20% (capaian 122,93%).
b. Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”
   memiliki dua (2) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
   1) Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
      Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 129,22% dari target 91,57% (capaian 141,11%).
   2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
      Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 33,55% dari target 40,83% (capaian 82,17%).

Urusan Pilihan Pariwisata

a. Tujuan “Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah”

memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.
Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 6,41% dari target sebesar 6% (capaian 106,83%).

b. Sasaran "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi"
memiliki tiga (3) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1) Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 6.478.883 orang dari target 3.883.073 orang (capaian 166,84%).
2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 10.334 orang dari target 8.869 orang (capaian 116,51%).
3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.
Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 58,20% dari target 48,52% (capaian 119,95%).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pelindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya adat istiadat.
b. Belum optimalnya pelindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.
c. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya tradisional.
d. Belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya.
e. Belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.
f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.

g. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
h. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
i. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
j. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.
k. Pengembangan dan penguatan tata kelola destinasi sebagai bagian yang utuh dari penerapan tata kelola pariwisata untuk membangunan tatanan ekosistem kepariwisataan.
l. Pengembangan daya tarik wisata untuk penguatan destinasi tematik berbasis keunikan, kekhasan dan lokalitas.
m. Beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan kebudayaan dan pariwisata antara lain :

1. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan banyaknya kelompok/sanggar seni budaya yang tidak memperbaharui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) apabila sudah habis masa berlakunya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
2. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tahapan proses penemuan benda yang diduga cagar budaya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi penemuan benda cagar budaya.
3. Belum adanya rintisan kampung budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum adanya kampung budaya yang ada di Kota Semarang dengan pengelolaan dan tata kelola.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan perintisan kampung budaya.
4. Belum optimalnya keberadaan museum kota lama.
   Hal ini antara lain disebabkan kurang dikenalnya museum kota lama.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan promosi secara masif museum kota lama.
5. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.
   Hal ini antara lain disebabkan belum ada generasi penerus pelaku seni budaya wayang potehi.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menampilkan wayang potehi dalam setiap kesempatan pertunjukkan event seni budaya.

6. Berdasarkan analisa pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
   Hal ini antara lain disebabkan belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instragram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.
7. Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya tarik wisata dengan perintisan wisata baru.
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kerjasama antar asosiasi pariwisata dan belum optimalnya pemangku wilayah dalam perintisan tempat wisata.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata.
8. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata termasuk di dalamnya seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penjualan paket wisata.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata.
9. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat.
   Hal ini antara lain disebabkan masih kurang optimalnya pengelolaan sehingga daya tarik wisata tersebut belum mempunyai keunikan sehingga pengunjung masih terbatas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan.
10. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan.
    Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

11. Pemasaran pariwisata masih kurang masif.
    Hal ini antara lain disebabkan koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pemasaran pariwisata secara variatif dan berkelanjutan.
12. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
    Hal ini antara lain disebabkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) sehingga tidak bermalam di penginapan atau di hotel.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
    2) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
    3) Pengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
    4) Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
    5) Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
    6) Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
    7) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
    8) Perubahan iklim dapat mengancam pariwisata dengan bencana alam antara lain banjir dan rob.
    9) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
    10) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
    11) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.

12) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.

b. Peluang
   1) Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
   2) Tersedianya infrastruktur *digital* untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada *blank spot*.
   3) Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
   4) Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
   5) Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
   6) Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
   7) Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
   8) Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
   9) *Co-Working Space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
   10) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
   11) Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
   12) Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
   13) Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
   14) Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
   15) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
   16) Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

17) Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis. Mendorong pengembangan *wellness tourism* sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
18) Pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan dan permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, selanjutnya dapat diformulasikan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

a. Adaptasi budaya dengan tetap mempertahankan identitas masyarakat.
b. Pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.
c. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka kontribusi perekonomian.
d. Peningkatan tata kelola dan pengembangan kompetensi masyarakat lokal berbasis kearifan lokal.
e. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
f. *Business and pleasure*, menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
g. *Wellness tourism*, berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan spritiual misalnya yoga, spa dan jamu yang sekarang baru ngetrend.
h. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
i. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
j. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
k. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
l. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
m. Sarana prasarana daya tarik wisata yang responsive gender dan ramah anak.
n. Berkelanjutan lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian eko sistem.
o. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.

p. Kunjungan wisata lebih banyak perempuan karena perempuan lebih memiliki minat yang besar dalam menjelajahi seni budaya dan kuliner. Perempuan cenderung mengambil peran lebih aktif dalam perjalanan wisata.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					49,163,519,401.04	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				48,907,560,401.04	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					30,266,933,624.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30,266,933,624.04	
RUTIN					15,990,505,815.04	RUTIN				15,990,505,815.04	
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					14,276,427,809.00	KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN				14,276,427,809.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					18,896,585,777.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				18,640,626,777.00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			30,266,933,624.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			30,266,933,624.04	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	15,990,505,815.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	15,990,505,815.04	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	78,421,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	78,421,800	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	27,043,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	27,043,600	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Rencana Strategis	1 dokumen	943,800			Rencana Strategis	1 dokumen	943,800	
			Renja Murni	1 dokumen	67,400			Renja Murni	1 dokumen	67,400	
			Renja Perubahan	1 dokumen	67,400			Renja Perubahan	1 dokumen	67,400	
			FGD Renstra OPD	1 kegiatan	8,500,000			FGD Renstra OPD	1 kegiatan	8,500,000	
			FGD RTP RSO OPD	1 kegiatan	9,265,000			FGD RTP RSO OPD	1 kegiatan	9,265,000	
			Forum OPD	1 kegiatan	8,200,000			Forum OPD	1 kegiatan	8,200,000	
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	253,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	253,000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			RKA	2 dokumen	253,000			RKA	2 dokumen	253,000	
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	208,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	208,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Perubahan RKA	2 dokumen	208,000			Perubahan RKA	2 dokumen	208,000	
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	253,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	253,000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			DPA	2 dokumen	253,000			DPA	2 dokumen	253,000	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	208,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	208,000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								sebagai berikut :			
			Perubahan DPA	2 dokumen	208,000			Perubahan DPA	2 dokumen	208,000	
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	456,200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	456,200	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			LKPJ	1 laporan	283,800			LKPJ	1 laporan	283,800	
			LKjIP	1 laporan	172,400			LKjIP	1 laporan	172,400	
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50,000,000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50,000,000			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50,000,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	12,006,066,029.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	12,006,066,029.04	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	11,732,566,649.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	11,732,566,649.04	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.326.042.647,12			Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.326.042.647,12	
			TPP	14 kali	6.253.834.001,92			TPP	14 kali	6.253.834.001,92	
			Insentif		152.690.000,00			Insentif		152.690.000,00	
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	272,827,980	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	272,827,980.00	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Honor Bendahara	12 bulan	53,100,000			Honor Bendahara	12 bulan	53,100,000	
			Honor KPA	12 bulan	135,700,000			Honor KPA	12 bulan	135,700,000	
			Honor PPK	12 bulan	15,200,000			Honor PPK	12 bulan	15,200,000	
			Honor PPTK	12 bulan	56,000,000			Honor PPTK	12 bulan	56,000,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6,528,000			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6,528,000	
			Honor Pengurus Barang	12 bulan	4,800,000			Honor Pengurus Barang	12 bulan	4,800,000	
			Fotocopy dan jilid		1,499,980			Fotocopy dan jilid		1,499,980	
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223,800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223,800			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223,800	
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 laporan	223,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2 laporan	223,800	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223,800			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223,800	
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223,800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223,800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223,800			Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223,800	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	49,977,400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	49,977,400	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	4,972,400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangann	orang	4,972,400	
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	45,005,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 orang	45,005,000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bimtek I		45,005,000			Bimtek I		45,005,000	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	747,038,867	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	747,038,867	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168,879,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	168,879,500	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								sebagai berikut :			
			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520,000			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520,000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10,295,000			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10,295,000	
			Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32,031,900			Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32,031,900	
			Klem Kabel	100 pasang	1,560,000			Klem Kabel	100 pasang	1,560,000	
			Lampu LED 8 watt	80 unit	12,105,600			Lampu LED 8 watt	80 unit	12,105,600	
			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5,167,000			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5,167,000	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10,378,000			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10,378,000	
			Lampu Neon LED	100 buah	6,165,000			Lampu Neon LED	100 buah	6,165,000	
			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1,121,000			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1,121,000	
			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3,654,000			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3,654,000	
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44,725,000			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44,725,000	
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39,233,000			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39,233,000	
			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1,924,000			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1,924,000	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	62,888,580	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	62,888,580	
			Yang terdiri untuk					Yang terdiri untuk			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pengadaan sebagai berikut :					pengadaan sebagai berikut :			
			Bed Cover II	15 buah	12,441,790			Bed Cover II	15 buah	12,441,790	
			Bantal Dakron	40 buah	8,272,570			Bantal Dakron	40 buah	8,272,570	
			Gelas Kaki	22 buah	1,255,770			Gelas Kaki	22 buah	1,255,770	
			Handuk mandi	50 buah	7,956,000			Handuk mandi	50 buah	7,956,000	
			Piring Makan	4 lusin	954,990			Piring Makan	4 lusin	954,990	
			Sendok kecil stainless	4 set	257,650			Sendok kecil stainless	4 set	257,650	
			Sendok Makan stainless	6 set	970,530			Sendok Makan stainless	6 set	970,530	
			Sprei Lengkap II	20 set	10,328,400			Sprei Lengkap II	20 set	10,328,400	
			Sprei Lengkap III	20 set	6,633,880			Sprei Lengkap III	20 set	6,633,880	
			Sulak Halus	10 buah	420,300			Sulak Halus	10 buah	420,300	
			Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459,700			Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459,700	
			Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2,108,700			Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2,108,700	
			Sarung Bantal	40 buah	2,197,200			Sarung Bantal	40 buah	2,197,200	
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu	10 buah	2,466,000			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu	10 buah	2,466,000	
			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6,165,100			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6,165,100	
			Rak Loker 24 loker	2 buah	0			Rak Loker 24 loker	2 buah	0	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	0			Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	0	
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	0			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	0	
			Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M²	0			Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M²	0	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	47,512,780	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	47,512,780.00	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips		22,651,740			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku		22,651,740	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik						ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			jepit, tinta stempel					(l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai		11,000,000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai		11,000,000	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200		13,861,040			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644		13,861,040	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			supllies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328					yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328			
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	47,636,117	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	47,636,117.00	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos		47,636,117			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop		47,636,117	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			arsip, MMT, X banner					Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner			
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115 laporan	181,297,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115 laporan	181,297,500.00	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		66,250,000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		66,250,000	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		115,047,500			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		115,047,500	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	138,631,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	138,631,000.00	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		119,906,000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		119,906,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18,725,000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18,725,000	
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	100,193,390	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	100,193,390	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		6,685,230			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		6,685,230	
			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Printer, UPS)		8,920,240			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Printer, UPS)		8,920,240	
			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		50,960,000			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		50,960,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33,627,920			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33,627,920	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	14,728,900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	14,728,900	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	14,728,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	14,728,900	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Selang Air Uk. ¾	2 roll	1,950,840			Selang Air Uk. ¾	2 roll	1,950,840	
			Karpet Sajadah Roll	10 roll	11,432,980			Karpet Sajadah Roll	10 roll	11,432,980	
			Bunga Meja	4 set	1.345.080			Bunga Meja	4 set	1.345.080	
			Meja Kerja	5 buah	0			Meja Kerja	5 buah	0	
			Kursi Susun Bahan Steinless + busa	56 buah	0			Kursi Susun Bahan Steinless + busa	56 buah	0	
			Kursi kerja staf	6 buah	0			Kursi kerja staf	6 buah	0	
			Trolley	1 buah	0			Trolley	1 buah	0	
			Mesin Poles Lantai	1 unit	0			Mesin Poles Lantai	1 unit	0	
			AC Split 1 PK	5 unit	0			AC Split 1 PK	5 unit	0	
			Tangga BI	2 buah	0			Tangga BI	2 buah	0	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Blower Unit	2 buah	0			Blower Unit	2 buah	0	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,259,500,330	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,259,500,330	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1,050,090,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1,050,090,000	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21,090,000			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21,090,000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123,000,000			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123,000,000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900,000,000			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900,000,000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6,000,000			Belanja langganan surat kabar	12 bulan	6,000,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								untuk dinas dan UPTD			
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,209,410,330	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,209,410,330	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	58 buah	2,711,500			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	58 buah	2,711,500	
			Engkrak Seng	79 buah	3,286,400			Engkrak Seng	79 buah	3,286,400	
			Gayung Air	60 buah	1,092,000			Gayung Air	60 buah	1,092,000	
			Handuk cuci tangan	44 buah	951,720			Handuk cuci tangan	44 buah	951,720	
			Kapur Barus Besar	114 pak	2,515,980			Kapur Barus Besar	114 pak	2,515,980	
			Keset Handuk	74 buah	3,353,680			Keset Handuk	74 buah	3,353,680	
			Lap Kaca	74 buah	671,920			Lap Kaca	74 buah	671,920	
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	74 kaleng	2,890,440			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	74 kaleng	2,890,440	
			Pembersih Kaca Kecil	104 botol	1,398,800			Pembersih Kaca Kecil	104 botol	1,398,800	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	224 botol	7,333,760			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	224 botol	7,333,760	
			Pembersih Porselin/ Closet	43 buah	995,450			Pembersih Porselin/ Closet	43 buah	995,450	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pewangi Ruangan 400 ml	124 buah	4,295,360			Pewangi Ruangan 400 ml	124 buah	4,295,360	
			Pewangi Ruangan gantung	74 buah	1,370,480			Pewangi Ruangan gantung	74 buah	1,370,480	
			Sabun cuci cair 320 ml	74 botol	1,962,480			Sabun cuci cair 320 ml	74 botol	1,962,480	
			Sabun Deterjen Cream	74 buah	2,657,340			Sabun Deterjen Cream	74 buah	2,657,340	
			Sabun Lysol	117 botol	393,120			Sabun Lysol	117 botol	393,120	
			Sabun Mandi Cair 42 buah	12 bulan	15,760,080			Sabun Mandi Cair 42 buah	12 bulan	15,760,080	
			Sapu Ijuk	124 buah	3,752,240			Sapu Ijuk	124 buah	3,752,240	
			Sapu Lidi	130 buah	1,444,300			Sapu Lidi	130 buah	1,444,300	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	124 buah	7,878,960			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	124 buah	7,878,960	
			Sapu Lowo-lowo	54 buah	3,934,440			Sapu Lowo-lowo	54 buah	3,934,440	
			Sikat W.C	84 buah	4,789,680			Sikat W.C	84 buah	4,789,680	
			Sulak Kemoceng bulu ayam	44 buah	1,817,640			Sulak Kemoceng bulu ayam	44 buah	1,817,640	
			Tempat Sampah Injak 90 Lt	43 buah	7,208,950			Tempat Sampah Injak 90 Lt	43 buah	7,208,950	
			Tempat Sampah Uk < 70 lt	43 buah	24,971,390			Tempat Sampah Uk < 70 lt	43 buah	24,971,390	
			Tissue Kotak / (Per bungkus)	174 dus	4,875,480			Tissue Kotak / (Per bungkus)	174 dus	4,875,480	
			Tissue roll	124 roll	1,722,360			Tissue roll	124 roll	1,722,360	
			Tongkat Pel	64 buah	1,727,360			Tongkat Pel	64 buah	1,727,360	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sikat Kamar Mandi	100 buah	3,044,200			Sikat Kamar Mandi	100 buah	3,044,200	
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	38 buah	30,679,680			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	38 buah	30,679,680	
			Tempat tissue Bahan Acrilyc	34 buah	3,949,440			Tempat tissue Bahan Acrilyc	34 buah	3,949,440	
			Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	103,066,000			Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	103,066,000	
			Tenaga Pengadministrasi 9 orang (SMA)	4 bulan	127,944,000			Tenaga Pengadministrasi 9 orang (SMA)	4 bulan	127,944,000	
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138,606,000			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138,606,000	
			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	121,342,000			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	121,342,000	
			Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12		82,150,400			Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12		82,150,400	
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231,504,000			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231,504,000	
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173,628,000			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173,628,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laundry Handuk Besar 10x200 hari		8,860,000			Laundry Handuk Besar 10x200 hari		8,860,000	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	5,117,760			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	5,117,760	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	3,838,320			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	3,838,320	
			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5,117,760			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5,117,760	
			BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3,411,840			BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3,411,840	
			JKK Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	307,080			JKK Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	307,080	
			JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	230,310			JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	230,310	
			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307,080			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307,080	
			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204,720			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204,720	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			JKM Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	383,832			JKM Tenaga Administrasi 9 orang	4 bulan	383,832	
			JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	287,874			JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	287,874	
			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383,832			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383,832	
			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255,888			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255,888	
			JHT Tenaga Administrasi 9 orang	4	4,733,928			JHT Tenaga Administrasi 9 orang	4	4,733,928	
			JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	3,550,446			JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	3,550,446	
			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4,733,928			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4,733,928	
			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3,155,952			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3,155,952	
			Garu Cangkul	3 buah	1,014,000			Garu Cangkul	3 buah	1,014,000	
			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		29,838,750			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		29,838,750	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	834,772,489	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	834,772,489	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah										
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	407,679,179	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	407,679,179	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 2 16 unit)		63,136,800			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 2 16 unit)		63,136,800	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan		321,837,840			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		321,837,840	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)					(Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22,704,539			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22,704,539	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	164,483,343	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	164,483,343	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38,850,000			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38,850,000	
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18,000,000			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18,000,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		15,000,000			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		15,000,000	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		92,633,343			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		92,633,343	
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	200 unit	262,609,967	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	200 unit	262,609,967	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			BBM Genset	2 unit	16,848,000			BBM Genset	2 unit	16,848,000	
			Accu 200 A Genset	2 buah	10,569,520			Accu 200 A Genset	2 buah	10,569,520	
			Pemeliharaan Genset	6 unit	46,864,863			Pemeliharaan Genset	6 unit	46,864,863	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Pompa Portabel	4 unit	10,909,080			Pemeliharaan Pompa Portabel	4 unit	10,909,080	
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Biaya Service Air Purifier 7 unit, Pemeliharaan mesin penghancur kertas 2 unit, Pemeliharaan Printer 10 buah, Pemeliharaan Scanner 2 unit	21 unit	16,046,212			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Biaya Service Air Purifier 7 unit, Pemeliharaan mesin penghancur kertas 2 unit, Pemeliharaan Printer 10 buah, Pemeliharaan Scanner 2 unit	21 unit	16,046,212	
			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U 11 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen Ciller 15 unit	26 unit	26,818,080			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U 11 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen Ciller 15 unit	26 unit	26,818,080	
			Pemeliharaan AC split 50 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen Pengisian Freon 25 unit	25 unit	36,568,200			Pemeliharaan AC split 50 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen	25 unit	36,568,200	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pengisian Freon 25 unit			
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit dan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 31 unit	20 unit/ tahun	13,837,930			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit dan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 31 unit	20 unit/ tahun	13,837,930	
			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1,630,900			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1,630,900	
			Pemeliharaan Sound System Service	10 unit	9,090,900			Pemeliharaan Sound System Service	10 unit	9,090,900	
			Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	30 unit	19,729,740			Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	30 unit	19,729,740	
			Pemeliharaan CCTV	7 unit	31,818,150			Pemeliharaan CCTV	7 unit	31,818,150	
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6,400,000			Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6,400,000	
			Pemeliharaan Instalasi Listrik		15,478,392			Pemeliharaan Instalasi Listrik		15,478,392	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	6,142,330,244	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	6,142,330,244	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	3,472,148,410	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap	30%	3,472,148,410	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Daerah Kabupaten/ Kota		Kegiatan Budaya			
2.22.02.2 .01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	3,472,148,410	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	3,472,148,410	Respon sif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Kulit	9 kegiatan	360,000,000			Pagelaran Wayang Kulit	9 kegiatan	360,000,000	
			Wayang On The Street	4 kegiatan	360,000,000			Wayang On The Street	4 kegiatan	360,000,000	
			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	112,148,410			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	112,148,410	
			FGD Tematik	5 kegiatan	100,000,000			FGD Tematik	5 kegiatan	100,000,000	
			FGD Seni Budaya 1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000			FGD Seni Budaya 1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	
			Atraksi Budaya	7 Kegiatan	105,000,000			Atraksi Budaya	7 Kegiatan	105,000,000	
			Atraksi Budaya	2 Kegiatan	40,000,000			Atraksi Budaya	2 Kegiatan	40,000,000	
			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 Kegiatan	125,000,000			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 Kegiatan	125,000,000	
			Murwo Bumi (Ruwat Kutha) dan Kirab Pusaka Ki Ageng Pandanaran	1 Kegiatan	300,000,000			Murwo Bumi (Ruwat Kutha) dan Kirab Pusaka Ki	1 Kegiatan	300,000,000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Ageng Pandanaran			
			Haul Ki Ageng Pandanaran	1 Kegiatan	100,000,000			Haul Ki Ageng Pandanaran	1 Kegiatan	100,000,000	
			Pagelaran Hari Wayang Nasional	1 Kegiatan	150,000,000			Pagelaran Hari Wayang Nasional	1 Kegiatan	150,000,000	
			Mahakarya Legenda Goa Kreo	1 Kegiatan	200,000,000			Mahakarya Legenda Goa Kreo	1 Kegiatan	200,000,000	
			Pagelaran Wayang Orang	5 Kegiatan	300,000,000			Pagelaran Wayang Orang	5 Kegiatan	300,000,000	
			Festival Wayang Orang	1 Kegiatan	1,000,000,000			Festival Wayang Orang	1 Kegiatan	1,000,000,000	
			Souvenir untuk Masyarakat		200,000,000			Souvenir untuk Masyarakat		200,000,000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	222,488,750	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	222,488,750	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	222,488,750	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	222,488,750	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Karnaval Seni Budaya Lintas Agama 1 Kegiatan		222,488,750			Karnaval Seni Budaya Lintas Agama 1 Kegiatan		222,488,750	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2,447,693,084	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2,447,693,084	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2,447,693,084	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2,447,693,084	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Dugder Balaikota	1 kegiatan	749,006,744			Dugder Balaikota	1 kegiatan	749,006,744	
			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40,000,000			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40,000,000	
			SDM Museum	1 kegiatan	918,613,600			SDM Museum	1 kegiatan	918,613,600	
			Pemeliharaan Museum		168,052,710			Pemeliharaan Museum		168,052,710	
			Wayang Tingkat Kota		300,000,000			Wayang Tingkat Kota		300,000,000	
			Kompetisi Visualisasi Warak Ngendog		129,213,430			Kompetisi Visualisasi Warak Ngendog		129,213,430	
			Belanja Modal proyektor LCD untuk Museum Kota Lama		142,806,600			Belanja Modal proyektor LCD untuk		142,806,600	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Museum Kota Lama			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	7,485,079,355	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	7,485,079,355	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	30%	7,485,079,355	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	30%	7,485,079,355	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	650 sertifikat	3,782,549,355	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	650 sertifikat	3,782,549,355	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Workshop Seni	3 kegiatan	109,183,485			Workshop Seni	3 kegiatan	109,183,485	
			Lomba Seni	2 kegiatan	455,428,500			Lomba Seni	2 kegiatan	455,428,500	
			Pelatihan Seni	1 kegiatan	11,250,000			Pelatihan Seni	1 kegiatan	11,250,000	
			FGD Tematik	5 kegiatan	95,250,000			FGD Tematik	5 kegiatan	95,250,000	
			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	671,437,370			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	671,437,370	
			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	-			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	-	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Lomba Barongsai	1 kegiatan	260,000,000			Lomba Barongsai	1 kegiatan	260,000,000	
			Lomba Rebana	1 Kegiatan	140,000,000			Lomba Rebana	1 Kegiatan	140,000,000	
			Lomba Lukis Payung & Kipas Tema Warak Ngendog	2 Kegiatan	340,000,000			Lomba Lukis Payung & Kipas Tema Warak Ngendog	2 Kegiatan	340,000,000	
			Sosialisasi dan Awarding Film		1,055,000,000			Sosialisasi dan Awarding Film		1,055,000,000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	191 lembaga	3,702,530,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	191 lembaga	3,702,530,000	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Benchmarking	1 kegiatan	-			Benchmarking	1 kegiatan	-	
			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa	1 kajian	-			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa	1 kajian	-	
			Apresiasi Seni dan Budaya	142 paket	2.365.650.000			Apresiasi Seni dan Budaya	142 paket	2.365.650.000	
			Misi Seni Tradisi	9 paket	66.880.000			Misi Seni Tradisi	9 paket	66.880.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	120.000.000			Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	120.000.000	
			Semarang Jelahah Musik	1 kegiatan	-			Semarang Jelahah Musik	1 kegiatan	-	
			Gema Budaya Pesona Purnama	1 Kegiatan	200.000.000			Gema Budaya Pesona Purnama	1 Kegiatan	200.000.000	
			Semarang Bercerita	1 kegiatan	650.000.000			Semarang Bercerita	1 kegiatan	650.000.000	
			Pagelaran Seni Pendukung Pertempuran 5 Hari di Semarang 1 Kegiatan		300.000.000			Pagelaran Seni Pendukung Pertempuran 5 Hari di Semarang 1 Kegiatan		300.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	649.018.210	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	649.018.210	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	649.018.210	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	649.018.210	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	649.018.210	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	649.018.210	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	65.010.000	
			Kajian Budaya	1 kegiatan	130.020.000			Kajian Budaya	1 kegiatan	130.020.000	
			Kajian Dampak Ekonomi Simpul Perdagangan Jalur Rempah	1 kegiatan	65.010.000			Kajian Dampak Ekonomi Simpul Perdagangan Jalur Rempah	1 kegiatan	65.010.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	147.890.510			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	147.890.510	
			Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000			Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	66.067.700			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	66.067.700	
			Tenaga Ahli Kebudayaan		30.000.000			Tenaga Ahli Kebudayaan		30.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			18.896.585.777	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			18.640.626.777	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.877.765.012	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.621.806.012	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	1.453. 030 orang	7.305.985.319	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	1.453. 030 orang	7,050,026,319	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Kabupaten/ Kota		Kawasan Daya Tarik Wisata					Kawasan Daya Tarik Wisata			
3.26.02.2 .02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 unit	7.305.985.319	Pengadaan/ /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 unit	7,050,026,319	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 1,5 jam		-			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 1,5 jam		-	
			Snack	50 orang	-			Snack	50 orang	-	
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 4 OB x 12 Bulan	12 bulan	184.648.800			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 4 OB x 12 Bulan	12 bulan	184.648.800	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 52 OB	12 bulan	3.009.552.000			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 52 OB	12 bulan	3.009.552.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Kebersihan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang 1 paket 3 OB	12 bulan	173.628.000			Belanja Kebersihan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang 1 paket 3 OB	12 bulan	173.628.000	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000	
			Pemeliharaan Gedung Heritage	1 paket	198.850.000			Pemeliharaan Gedung Heritage	1 paket	198.850.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis	1 paket	197.520.039			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis	1 paket	197.520.039	
			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama	1 paket	16.644.868			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama	1 paket	16.644.868	
			Pemeliharaan Golfcar 1 unit	1 tahun	34.432.432			Pemeliharaan Golfcar 1 unit	1 tahun	34.432.432	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	1 tahun	6.818.180			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	1 tahun	6.818.180	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Paket 1 (1 paket		33.000.000			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata		33.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perencanaan,1 paket pengawasan)					Paket 1 (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)			
			Belanja Street Furniture (Bollard Besi Tempa)	20 Unit	28.026.000			Belanja Street Furniture (Bollard Besi Tempa)	20 Unit	28.026.000	
			Belanja Tanaman		4.899.500			Belanja Tanaman		4.899.500	
			FGD Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Strategis Kota Lama	3 Kegiatan	48.206.450			FGD Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Strategis Kota Lama	3 Kegiatan	48.206.450	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kabel 2 roll; Lampu 7 buah)		3.132.180			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kabel 2 roll; Lampu 7 buah)		3.132.180	
			Belanja Bench	10 Unit	89.907.000			Belanja Bench	10 Unit	89.907.000	
			Belanja Tangga 6 meter	1 Unit	4.673.130			Belanja Tangga 6 meter	1 Unit	4.673.130	
			Belanja Alat Studio & Komunikasi (Megaphone)	3 Buah	4.910.760			Belanja Alat Studio & Komunikasi (Megaphone)	3 Buah	4.910.760	
			Belanja Alat Studio & Komunikasi (Handy Talkie)	2 Buah	6.528.300			Belanja Alat Studio & Komunikasi (Handy Talkie)	2 Buah	6.528.300	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Kursi/Bangku	30 Unit	110.888.400			Belanja Kursi/Bangku	30 Unit	110.888.400	
			Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Creative Hub (1 Paket Perencanaan; 1 Paket Pengawasan; 1 Paket Pelaksanaan)		233.000.000			Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Creative Hub (1 Paket Perencanaan; 1 Paket Pengawasan; 1 Paket Pelaksanaan)		233.000.000	
			Pemeliharaan Gedung Oudetrap Penunjang Ruang Pamer Dekranasda (1 Paket Perencanaan; 1 Paket Pengawasan; 1 Paket Pelaksanaan)		231.750.000			Pemeliharaan Gedung Oudetrap Penunjang Ruang Pamer Dekranasda (1 Paket Perencanaan; 1 Paket Pengawasan; 1 Paket Pelaksanaan)		231.750.000	
			Kajian Masterplan Goa Kreo		60.138.140			Kajian Masterplan Goa Kreo		60.138.140	
			Kajian Masterplan Taman Lele		60.138.140			Kajian Masterplan Taman Lele		60.138.140	
			Kajian Potensi Pola Ruang Wisata Berdasarkan Preferensi Wisatawan di Kawasan		51.570.000			Kajian Potensi Pola Ruang Wisata Berdasarkan Preferensi Wisatawan di Kawasan		51.570.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Strategis Situs Kota Lama					Strategis Situs Kota Lama			
			Tenaga Crew Pengangkutan Sampah		115.752.000			Tenaga Crew Pengangkutan Sampah		-	
			Sewa Truk Untuk Pengangkutan sampah Kota Lama Ke TPA		84.525.000			Sewa Truk Untuk Pengangkutan sampah Kota Lama Ke TPA		-	
			Sewa kendaraan roda 3 Untuk Pengangkutan sampah Kota Lama		55.682.000			Sewa kendaraan roda 3 Untuk Pengangkutan sampah Kota Lama		-	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.443.545.956	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.443.545.956	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 lokasi	205.912.936	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	205.912.936	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/ Perkotaan/ Buatan	1 paket	0			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/ Perkotaan/ Buatan	1 paket	0	
			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960	
			Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	9.772.976			Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	9.772.976	
			Kajian Potensi Perintisan dan Pengembangan Produk Wisata Minat Khusus di Kota Semarang	1 Paket	51.570.000			Kajian Potensi Perintisan dan Pengembangan Produk Wisata Minat Khusus di Kota Semarang	1 Paket	51.570.000	
			Kajian Profil Potensi Daya Tarik Wisata Kota Semarang	1 Paket	63.000.000			Kajian Profil Potensi Daya Tarik Wisata Kota Semarang	1 Paket	63.000.000	
			Kajian Dokumen Sertifikasi SNI CHSE (SNI 9042:2021)/ K3 Jembatan Kaca	1 Paket	30.000.000			Kajian Dokumen Sertifikasi SNI CHSE (SNI 9042:2021)/ K3 Jembatan Kaca	1 Paket	30.000.000	
3.26.02.2 .03.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi	6 unit	7.137.633.020	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	unit	7.137.633.020	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara			Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700			Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700	
			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	99.367.910			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	99.367.910	
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/UPTD 29 OB	12 bulan	1.338.703.800			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/ UPTD 29 OB	12 bulan	1.338.703.800	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulan	1.273.272.000			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulan	1.273.272.000	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulam	983.892.000			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulam	983.892.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1		190.056.110			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket		190.056.110	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			paket pelaksanaan					pengawasan, 1 paket pelaksanaan			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		-			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		-	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000	
			Pembangunan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		197.340.000			Pembangunan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		197.340.000	
			Pelatihan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata	1 kegiatan	30.470.480			Pelatihan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata	1 kegiatan	30.470.480	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Paket 1 (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		33.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Paket 1 (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		33.000.000	
			Belanja cetak MMT 40 m2		2.324.000			Belanja cetak MMT 40 m2		2.324.000	
			Belanja Tempat Sampah	1 buah	695.960			Belanja Tempat Sampah	1 buah	695.960	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Paket 2 (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		33.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Paket 2 (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		33.000.000	
			DED Pembangunan Cafetaria Kampung Wisata Taman Lele	1 Paket	35.000.000			DED Pembangunan Cafetaria Kampung Wisata Taman Lele	1 Paket	35.000.000	
			Pembangunan Kios Parkir Bawah Kreo (1 paket		233.000.000			Pembangunan Kios Parkir Bawah Kreo (1 paket		233.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perencanaan,1 paket pengawasan)					perencanaan,1 paket pengawasan)			
			Pembangunan Penunjuk Arah di Destinasi Wisata (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pembangunan Penunjuk Arah di Destinasi Wisata (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pembangunan Penunjuk Arah/Signboard Destinasi Wisata Sodong dan Kreo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pembangunan Penunjuk Arah/Signboard Destinasi Wisata Sodong dan Kreo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pembangunan Area Mainan Anak Di Taman Lalu Lintas (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pembangunan Area Mainan Anak Di Taman Lalu Lintas (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pembangunan Area Glamping Tinjomoyo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pembangunan Area Glamping Tinjomoyo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pembangunan Penunjuk Arah/Signboard		233.000.000			Pembangunan Penunjuk Arah/Signboar		233.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Destinasi Wisata Tinjomoyo, TBRS dan Taman Lele (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)					d Destinasi Wisata Tinjomoyo, TBRS dan Taman Lele (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)			
			Pemeliharaan Toilet dan Sarpras Kreo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pemeliharaan Toilet dan Sarpras Kreo (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pemeliharaan Sarpras TBRS (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pemeliharaan Sarpras TBRS (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pemeliharaan Gedung Ticketing Taman Lalu Lintas (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pemeliharaan Gedung Ticketing Taman Lalu Lintas (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000	
			Pemeliharaan Kios Kuliner dan Pembuatan Spot Selfie di Taman Lele (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		233.000.000			Pemeliharaan Kios Kuliner dan Pembuatan Spot Selfie di Taman Lele (1 paket perencanaan,1		233.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								paket pengawasan)			
			Pemeliharaan Amenitas / Fasum Rintisan Destinasi Wisata (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		230.340.000			Pemeliharaan Amenitas / Fasum Rintisan Destinasi Wisata (1 paket perencanaan,1 paket pengawasan)		230.340.000	
			Pemeliharaan Instalasi Listrik		13.636.360			Pemeliharaan Instalasi Listrik		13.636.360	
			Belanja Alat Studio Sound System (Megaphone 1 Unit; Speaker Aktive 1 Unit)		11.164.840			Belanja Alat Studio Sound System (Megaphone 1 Unit; Speaker Aktive 1 Unit)		11.164.840	
			Belanja Alat Permainan Anak (Ayunan Bulat 2 buah; Jungkat Jungkit 2 buah; alat permainan edukasi dan stimulasi 1 set)		15.499.090			Belanja Alat Permainan Anak (Ayunan Bulat 2 buah; Jungkat Jungkit 2 buah; alat permainan edukasi dan stimulasi 1 set)		15.499.090	
			Belanja Rambu Tidak Bersuar	2 buah	2.690.240			Belanja Rambu Tidak Bersuar	2 buah	2.690.240	
			Belanja Alat Permainan Edukatif	1 buah	2.840.530			Belanja Alat Permainan Edukatif	1 buah	2.840.530	
3.26.02.2 .03.0006	Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil	4 laporan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil	laporan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.000			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.000	
3.26.02.2 .04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	128.233.737	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	128.233.737	
3.26.02.2 .04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	128.233.737	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	laporan	128.233.737	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.064.297			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.064.297	
			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 1 OB	12 bulan	46.162.200			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 1 OB	12 bulan	46.162.200	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Tenaga Pelayanan Inventarisasi Usaha Jasa Wisata 1 OB	12 bulan	-			Belanja Tenaga Pelayanan Inventarisasi Usaha Jasa Wisata 1 OB	12 bulan	-	
			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 paket	-			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 paket	-	
			Kajian Inventarisasi Usaha Sektor Pariwisata	1 paket	51.007.240			Kajian Inventarisasi Usaha Sektor Pariwisata	1 paket	51.007.240	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	2.810.057.025	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	2.810.057.025	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	2.810.057.025	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	2.810.057.025	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neger	4 dokumen	267.311.680	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neger	dokumen	267.311.680	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 Bulan	165.300.000			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 Bulan	165.300.000	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 Kegiatan	29.225.000			Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 Kegiatan	29.225.000	
			Kerjasama Pariwisata	2 Kegiatan	4.979.080			Kerjasama Pariwisata	2 Kegiatan	4.979.080	
			Kerjasama dan Kolaborasi Budaya	1 Kegiatan	60.657.600			Kerjasama dan Kolaborasi Budaya	1 Kegiatan	60.657.600	
			Perjalanan Dinas		7.150.000			Perjalanan Dinas		7.150.000	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 kegiatan	1.252.572.760	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 kegiatan	1.252.572.760	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pameran Pariwisata	4 Kegiatan	203.209.030			Pameran Pariwisata	4 Kegiatan	203.209.030	
			Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	361.943.550			Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	361.943.550	
			Sales Mission	1 kegiatan	50.895.440			Sales Mission	1 kegiatan	50.895.440	
			Duta Wisata	1 Kegiatan	36.840.060			Duta Wisata	1 Kegiatan	36.840.060	
			Pameran Jalur Sutra Dan Seni Budaya Semarang Tempoe Doeloe	1 Kegiatan	99.886.750			Pameran Jalur Sutra Dan Seni Budaya Semarang Tempoe Doeloe	1 Kegiatan	99.886.750	
			Penerbad Expo	1 Kegiatan	149.999.760			Penerbad Expo	1 Kegiatan	149.999.760	
			Pameran Sejarah	1 Kegiatan	149.887.040			Pameran Sejarah	1 Kegiatan	149.887.040	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Peringatan Pertempuran Lima Hari Di Semarang					Peringatan Pertempuran Lima Hari Di Semarang			
			Barang Yang di Berikan Kepada Masyarakat		199.911.130			Barang Yang di Berikan Kepada Masyarakat		199.911.130	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 promosi	1.290.172.585	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi	1.290.172.585	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			SIBARISTA	1 Kegiatan	129.550.000			SIBARISTA	1 Kegiatan	129.550.000	
			FGD Tematik	5 Kegiatan	100.562.015			FGD Tematik	5 Kegiatan	100.562.015	
			Digital Marketing	12 Bulan	205.000.000			Digital Marketing	12 Bulan	205.000.000	
			Tools Marketing	12 Bulan	67.280.000			Tools Marketing	12 Bulan	67.280.000	
			FGD Pemasaran Pariwisata yang Berkualitas	1 Kegiatan	12.450.000			FGD Pemasaran Pariwisata yang Berkualitas	1 Kegiatan	12.450.000	
			Sosialisasi Program	8 Kegiatan	29.550.000			Sosialisasi Program	8 Kegiatan	29.550.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemasaran Pariwisata					Pemasaran Pariwisata			
			Tenaga Operasional Pemasaran	4 Orang	198.864.800			Tenaga Operasional Pemasaran	4 Orang	198.864.800	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 Kegiatan	53.730.880			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 Kegiatan	53.730.880	
			Kajian Dampak Multiplayer Efek Jalur Sutera		73.389.960			Kajian Dampak Multiplayer Efek Jalur Sutera		73.389.960	
			Pembuatan Souvenir	1 Kegiatan	16.120.000			Pembuatan Souvenir	1 Kegiatan	16.120.000	
			Video ABBWI 10 Menit		50.000.000			Video ABBWI 10 Menit		50.000.000	
			Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia	1 Kegiatan	149.944.050			Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia	1 Kegiatan	149.944.050	
			Telemarketing dan Influencer	12 Bulan	150.000.000			Telemarketing dan Influencer	12 Bulan	150.000.000	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 Kegiatan	53.730.880			Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 Kegiatan	53.730.880	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	1.208.763.740	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	1.208.763.740	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku	90%	1.208.763.740	Pelaksanaan Peningkatan	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku	90%	1.208.763.740	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Sumber Daya Manusia		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Kapasitas Sumber Daya Manusia		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1000 orang	1.208.763.740	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1000 orang	1.208.763.740	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pembinaan Pokdarwis dan Ekraf -	4 kegiatan	82.583.000			Pembinaan Pokdarwis dan Ekraf -	4 kegiatan	82.583.000	
			Jambore Pokdarwis -	1 kegiatan	215.447.840			Jambore Pokdarwis -	1 kegiatan	215.447.840	
			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	41.613.000			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	41.613.000	
			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.000			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.000	
			Fasilitasi Festival Pokdarwis Jawa Tengah -	1 kegiatan	2.260.000			Fasilitasi Festival Pokdarwis Jawa Tengah -	1 kegiatan	2.260.000	
			Fasilitasi Tour Guide -	1 tahun	8.750.000			Fasilitasi Tour Guide -	1 tahun	8.750.000	
			Fasilitasi Festival Deswita	5 kegiatan	15.259.070			Fasilitasi Festival Deswita	5 kegiatan	15.259.070	
			Sarasehan Kepariwisataan	3 kegiatan	159.965.250			Sarasehan Kepariwisataan	3 kegiatan	159.965.250	
			Fasilitasi FK Pokdarwis dan Deswita Jawa Tengah -	2 kegiatan	13.941.760			Fasilitasi FK Pokdarwis dan Deswita Jawa Tengah -	2 kegiatan	13.941.760	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sertifikasi Profesi Kepariwisataan	1 kegiatan	126.000.000			Sertifikasi Profesi Kepariwisataa n	1 kegiatan	126.000.000	
			Apresiasi Desa Wisata	1 kegiatan	305.000.000			Apresiasi Desa Wisata	1 kegiatan	305.000.000	
			Fasilitasi Komekraf	1 kegiatan	40.000.000			Fasilitasi Komekraf	1 kegiatan	40.000.000	
			Pengembangan Saka Pariwisata	3 kegiatan	25.000.000			Pengembangan Saka Pariwisata	3 kegiatan	25.000.000	
			Penguatan SDM Desa Wisata	3 kegiatan	45.000.000			Penguatan SDM Desa Wisata	3 kegiatan	45.000.000	
			SPPD Luar Daerah		25.045.000			SPPD Luar Daerah		25.045.000	
			Fasilitasi Video dan Laporan		2.898.820			Fasilitasi Video dan Laporan		2.898.820	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dapat kita perhatikan pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 total anggarannya sebesar Rp 49.163.519.401,04 dan setelah di analisa sesuai kebutuhan total anggarannya sebesar Rp 48.907.560.4001,04 sehingga anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 48.907.560.3401,04. Adapun anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 48.907.560.401,04.

Selisih antara Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 255.959.000,- yaitu yang terdiri dari usulan sebagai berikut :

1. Tenaga crew pengangkutan sampah sebesar Rp 115.752.000,-
2. Sewa truk untuk pengangkutan sampah Kota Lama Ke TPA sebesar Rp 84.525.000,-
3. Sewa kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah Kota Lama sebesar Rp 55.682.000,-

Usulan anggaran sebesar Rp 255.959.000,- tersebut dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengingat yang terkait dengan sampah merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

Ada 8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter".

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada :

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

Urusan Wajib Kebudayaan

"Meningkatkan Kearifan Budaya
Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal".

Urusan Pilihan Pariwisata

"Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata".

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

"Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi
Terhadap Kesenian Lokal"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Urusan Pilihan Pariwisata

"Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
dan Tingkat Hunian Akomodasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN			
TUJUAN : Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	66,20
SASARAN : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	91,57
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	40,83
URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
TUJUAN : Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.363.020
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	8.869
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	48,52
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai	78

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan pada urusan wajib kebudayaan "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal" dengan idikator sasaran "Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya" dan "Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal", sedangkan untuk urusan pilihan pariwisata dengan indikator tujuan "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata" dengan idikator sasaran "Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara", "Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara" dan "Persentase Tingkat Hunian Akomodasi".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja, pagu indikatif serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.22	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan					26.773.970.587	26.673.970.587	30.266.933.624,04	APBD	
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100%	100%	100%	17.998.272.835	17.898.272.835	15.990.505.815,04	APBD	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100%	100%	100%				APBD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100%	100%	100%				APBD	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100%	100%	100%				APBD	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	102.869.600	102.869.600	78.421.800	APBD	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	50.536.400	50.536.400	27.043.600	APBD	
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	463.900	463.900	253.000	APBD	
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	418.900	418.900	208.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	463.900	463.900	253.000	APBD	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	418.900	418.900	208.000	APBD	
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	567.600	567.600	456.200	APBD	
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100%	100%	100%	13.480.698.380	13.342.211.780	12.006.066.029,04	APBD	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	74 orang/bulan	74 orang/bulan	13.153.399.000	13.014.912.400	11.732.566.649,04	APBD	
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	326.627.980	326.627.980	272.827.980	APBD	
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian- disbudpar	100%	100%	100%	149.977.400	49.977.400	49.977.400	APBD	
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	60 orang	60 orang	104.972.400	4.972.400	4.972.400	APBD	
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	74 orang	74 orang	45.005.000	45.005.000	45.005.000	APBD	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar	100%	100%	100%	1.079.087.773	1.079.087.773	747.038.867	APBD	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 paket	13 paket	13 paket	168.879.500	168.879.500	168.879.500	APBD	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	19 paket	6 paket	93.118.450	93.118.450	62.888.580	APBD	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket	6 paket	69.543.720	69.543.720	47.512.780	APBD	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	13 paket	13 paket	43.313.163	43.313.163	47.636.117	APBD	
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan	100 laporan	115 laporan	239.850.000	239.850.000	181.297.500	APBD	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	60 laporan	275.000.000	275.000.000	138.631.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	189.382.940	189.382.940	100.193.390	APBD	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100%	100%	100%	161.913.580	161.913.580	14.728.900	APBD	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 unit	82 unit	7 unit	161.913.580	161.913.580	14.728.900	APBD	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100%	100%	100%	2.126.697.700	2.265.184.300	2.259.500.330	APBD	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.050.090.000	1.050.090.000	1.050.090.000	APBD	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.076.607.700	1.215.094.300	1.209.410.330	APBD	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100%	100%	100%	897.028.402	897.028.402	834.772.489	APBD	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	28 unit	28 unit	459.924.522	459.924.522	407.679.179	APBD	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	2 unit	183.908.343	183.908.343	164.483.343	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 unit	127 unit	200 unti	253.195.537	253.195.537	262.609.967	APBD	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	30%	30%	7.286.515.538	3.310.037.038	6.142.330.244	APBD	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	30%	30%	1.067.911.194	1.067.911.194	3.472.148.410	APBD	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	1.067.911.194	1.067.911.194	3.472.148.410	APBD	Responsif Gender
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	30%	30%	4.198.967.250	222.488.750	222.488.750	APBD	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 objek	10 objek	10 objek	4.198.967.250	222.488.750	222.488.750	APBD	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	30%	30%	2.019.637.094	2.019.637.094	2.447.693.084	APBD	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.600 orang	2.600 orang	2.019.637.094	2.019.637.094	2.447.693.084	APBD	Responsif Gender
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar	30%	30%	30%	749.142.214	4.725.620.714	7.485.079.355	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional								
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	30%	30%	30%	749.142.214	4.725.620.714	7.485.079.355	APBD	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	650 sertifikat	750 sertifikat	846 sertifikat	524.479.064	1.434.370.564	3.782.549.355	APBD	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 lembaga	160 lembaga	191 lembaga	224.663.150	3.291.250.150	3.702.530.000	APBD	
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Warisan Budaya	91.57%	91.57%	91.57%	740.040.000	740.040.000	649.018.210	APBD	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91.57%	91.57%	91.57%	740.040.000	740.040.000	649.018.210	APBD	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	465 objek	465 objek	740.040.000	740.040.000	649.018.210	APBD	
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					16.293.736.353	16.293.736.353	18.640.626.777		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	11.880.684.360	11.880.684.360	14.621.806.012	APBD	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	1.453.030 orang	1.453.030 orang	6.598.086.280	6.598.086.280	7.050.026.319	APBD	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	1 unit	1 unit	1 unit	6.598.086.280	6.598.086.280	7.050.026.319	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pariwisata Kabupaten/Kota	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	5.137.397.400	5.137.397.400	7.443.545.956	APBD	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	117.552.640	117.552.640	205.912.936	APBD	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6 unit	6 unit	4.919.844.760	4.919.844.760	7.137.633.020	APBD	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	95%	95%	145.200.680	145.200.680	128.233.737	APBD	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	14 laporan	14 laporan	145.200.680	145.200.680	128.233.737	APBD	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	3.513.051.993	3.513.051.993	2.810.057.025	APBD	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	3.513.051.993	3.513.051.993	2.810.057.025	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	842.556.000	842.556.000	267.311.680	APBD	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 kegiatan	9 kegiatan	14 kegiatan	1.044.997.713	1.044.997.713	1.252.572.760	APBD	Responsif Gender
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Neger	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 promosi	25 promosi	28 promosi	1.625.498.280	1.625.498.280	1.290.172.585	APBD	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	90%	90%	90%	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	APBD	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	90%	90%	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	APBD	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.000 orang	1.000 orang	3.267 orang	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	APBD	Responsif Gender
Jumlah						43.067.706.940	42.967.706.940	48.907.560.401,04	APBD	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ada penambahan satu (1) sub kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
   3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

23. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

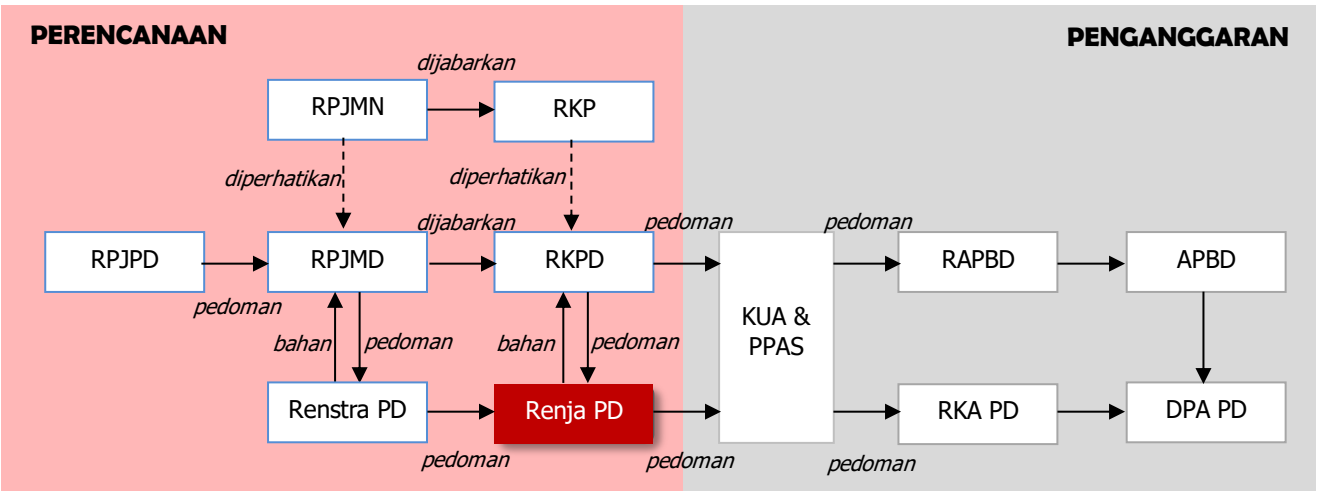

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: adanya pandemi Covid-19 yang mengubah pola layanan perpustakaan, perubahan kebutuhan masyarakat akan informasi digital, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;

v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, analisis

kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	0.93 Rasio	1 Rasio	0.93 Rasio	93	0.93 Rasio	93
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100	100	100
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	60 Orang	100
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	100
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	100	200 Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	10 Lokus	10 Lokus	7 Lokus	70	15 Lokus	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	10 Perpustakaan	5 Perpustakaan	6 Perpustakaan	120	16 Perpustakaan	80
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60	5 Orang	100
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	100
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	3 Orang	3 Orang	2 Orang	67	5 Orang	100
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	1 Eksemplar	50	5 Eksemplar	100
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100	2 Eksemplar	100
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	5 Eksemplar	100
	NON URUSAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67	3 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50	8 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75	75 Orang/bulan	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60	5 Dokumen	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	10 Unit	50	20 Unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	5 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6 Unit	50	12 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
2.24	URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	500 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	100	800 Berkas	80
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	4000 Berkas	4000 Berkas	2000 Berkas	50	4000 Berkas	80
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	125 Arsip	62,5	250 Arsip	100
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	225 Arsip	56,25	500 Arsip	100
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	80 Pengguna	75 Pengguna	60 Pengguna	80	100 Pengguna	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	3000 Arsip	5000 Arsip	2000 Arsip	40	5000 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2000 Berkas	2500 Berkas	1000 Berkas	40	3000 Berkas	120
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	4 Daftar	4 Daftar	2 Daftar	50	6 Daftar	85,71
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	4 Arsip	4 Arsip	2 Arsip	50	6 Arsip	85,71

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	80
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	100
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	100 Arsip	50	250 Arsip	100
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	300 Arsip	300 Arsip	170 Arsip	57	376 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	3 SOP	60	5 SOP	100
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	130 Arsip	65	250 Arsip	100

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) atau lebih adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
5. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat koordinasi, Subkegiatan-subkegiatan berikut ditetapkan sebagai prioritas utama mengingat kontribusinya yang sangat penting terhadap pencapaian target kinerja Dinas. Adapun subkegiatannya adalah:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
4. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
5. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
6. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
7. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Adapun Subekegiatan yang mengalami efisiensi anggaran cukup signifikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
8. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
11. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Kerja sama lintas bidang merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi, meskipun kontribusinya mungkin tidak selalu dapat diukur secara langsung

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.129.191.990	7.413.389.875	50,3%
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.233.190.357	160.726.700	1,5%
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	199.728.000	126.194.510	94,0%
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	642.981.920	114.538.000	32,6%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	698.113.023	43.854.000	16,3%
6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	95.245.010	-	0,0%
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.842.600	6.600.000	5,5%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.301.715.240	6.718.475.778	54,6%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.079.980	34.575.540	10,9%
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.807.407	-	0,0%
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	825.435.243	373.329.007	45,2%
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	963.311.520	280.409.550	39,0%
13	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.310.347	116.877.700	24,2%
14	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	582.880.010	43.849.000	0,4%
15	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	47.722.800	-	0,0%
16	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	152.005.200	126.194.510	94,0%
17	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	250.844.110	34.626.500	23,4%
18	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	145.459.830	54.844.000	43,0%
19	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	246.677.980	25.067.500	32,8%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
20	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	84.247.523	23.854.000	48,6%
21	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	56.042.640	-	0,0%
22	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	217.100.720	20.000.000	17,6%
23	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	142.053.540	-	0,0%
24	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	198.668.600	-	0,0%
25	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	95.245.010	-	0,0%
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.064.000	830.000	1,5%
27	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.808.600	200.000	5,0%
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.713.000	3.054.000	74,7%
29	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.257.000	2.516.000	59,1%
30	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	0,0%
31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.088.785.240	6.633.613.778	54,9%
32	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.018.000	84.750.000	40,4%
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.454.200	112.000	7,7%
34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.457.800	-	0,0%
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.784.298	4.454.000	53,1%
36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.380.980	2.495.600	26,6%
37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.193.490	7.258.300	24,9%
38	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.305.540	4.120.000	40,0%
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	3.290.000	31,9%
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.325.000	1.478.640	14,1%
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.767.500	11.479.000	31,7%
42	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	203.003.172	-	0,0%
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	463.807.407	-	0,0%
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.741.200	89.025.663	33,5%
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.694.043	284.303.344	50,8%
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.603.603	14.971.000	41,6%
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	543.774.759	116.867.950	31,3%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.203.870	11.337.500	36,4%
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.729.288	137.233.100	49,2%
50	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	41.580.590	600.000	20,3%
51	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.477.400	1.645.000	37,0%
52	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	23.555.000	94,2%
53	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	23.492.500	94,0%
54	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	697.500	69,8%
55	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	24.432.000	5.791.200	59,4%
56	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	129.911.920	18.196.500	5,8%
57	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	125.457.640	15.150.000	35,5%
58	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	249.450.797	27.750.000	47,3%
59	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.755.820	525.000	28,0%
60	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24.097.200	23.102.500	95,9%
61	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	420.292.554	17.371.500	0,2%
62	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	11.567.736	450.000	100,0 %
63	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	77.166.700	2.400.000	78,1%
64	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	22.125.680	-	0,0%
65	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.597.120	-	0,0%
66	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	145.647.270	126.194.510	95,0%
67	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	6.357.930	-	0,0%
68	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	81.218.900	13.181.500	18,2%
69	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	46.567.040	6.720.000	91,8%
70	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	123.058.170	14.725.000	21,7%
71	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	28.352.790	-	0,0%
72	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	117.107.040	54.844.000	55,3%
73	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	82.456.260	-	0,0%
74	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	164.221.720	25.067.500	37,6%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
75	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	35.636.663	6.966.000	36,3%
76	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	48.610.860	16.888.000	56,4%
77	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	33.035.800	-	0,0%
78	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	23.006.840	-	0,0%
79	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	0,0%
80	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.720	-	0,0%
81	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	8.700.000	-	0,0%
82	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	33.400.000	20.000.000	69,0%
83	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100.000.720	-	0,0%
84	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	42.052.820	-	0,0%
85	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	41.344.400	-	0,0%
86	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	57.188.200	-	0,0%
87	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	100.136.000	-	0,0%
88	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	53.295.010	-	0,0%
89	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	41.950.000	-	0,0%
JUMLAH		17.996.450.300	7.858.703.085	29,85 %

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 Urusan, 6 Program, 19 Kegiatan dan 64 Subkegiatan adalah sebesar Rp. 17.996.450.300,-. Dari total anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar 29,85% atau sejumlah Rp. 7.858.703.085,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 10.139.747.215,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor

122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2025
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarak kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun	44	45	46	47	48	49	45	67	69.17	69.59	69.59	-	71
	Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	55	56	57	58	59	60	56	57.05	59.80	64.30	64.30	-	65
	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	76	77	78	79	80	81	77	79.02	80.76	80.76	80.76	-	81
	Persentase indeks pembangunan literasi masyarakat	56	57	58	59	60	61	56	59.8	70.78	71.58	71.58	-	72

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip Dan Perpustakaan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif” memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

1. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarak kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.
2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.
4. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.

Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social dengan indicator Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.
2) Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK dengan indicator Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.
3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik dengan indicator Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.
4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat dengan indicator Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat, di mana capaian tahun 2024 sudah sejalan dengan Renstra.

Dalam pemenuhan sasaran renstra disusunlah *critical succes factor* sehingga sasaran renstra diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut

1) Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan yakni Jumlah Seluruh masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan (termasuk tapi tidak terbatas pada KIE, Kunjugan onsite, dan kunjungan online) dibagi jumlah populasi

2) Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang yakni Jumlah koleksi (Termasuk tapi tidak terbatas pada buku, terbitan berkala, literatur kelabu, manuskrip, audio visual, rekaman, dan koleksi digital) dibagi jumlah populasi kota semarang

3) Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal

Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Arsip Dan Perpustakaan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemindahan gedung Perpustakaan Kota Semarang berdampak pada penurunan kualitas layanan. Gedung baru yang ditempati kurang memadai, baik dari sisi desain maupun luas ruangan. Ruang yang sempit dan tidak representatif membuat suasana belajar dan membaca menjadi kurang nyaman bagi pengunjung.;
2. Penempatan perpustakaan satu gedung dengan depo arsip juga tidak sesuai dengan regulasi ANRI. Hal ini berisiko merusak arsip dan mengganggu layanan perpustakaan. Hasil pengawasan

kearsipan menunjukkan bahwa ruang penyimpanan arsip belum memenuhi standar yang berlaku.;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Masih minimnya jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang terakreditasi serta rendahnya kualitas koleksi bacaan. Banyak perpustakaan sekolah belum memenuhi standar akreditasi dari Perpusnas. Selain itu, koleksi bacaan yang tersedia seringkali belum relevan dengan kurikulum dan kurang menarik bagi siswa. Baik dari segi jumlah maupun kualitas, perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan untuk mendorong minat baca dan mendukung proses pembelajaran.
2. Pengelolaan perpustakaan umum di tingkat kelurahan dan kecamatan belum sesuai standar. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga pustakawan profesional, anggaran operasional yang minim, serta kurangnya program literasi yang inovatif. Diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan serta dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan koleksi, pemeliharaan sarana, dan pengembangan layanan literasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Terbatasnya fasilitas gedung dan ruang layanan perpustakaan. Pemindahan gedung perpustakaan yang tidak representatif menurunkan kenyamanan dan kualitas layanan bagi masyarakat.
    2) Penempatan fungsi perpustakaan dan depo arsip dalam satu gedung. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi ANRI dan berpotensi merusak arsip serta mengganggu aktivitas layanan perpustakaan.
    3) Rendahnya jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Koleksi bacaan yang kurang relevan dengan kurikulum dan minat siswa menjadi hambatan dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan pendidikan dasar.
    4) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan umum di tingkat kelurahan dan kecamatan. Keterbatasan tenaga pustakawan, anggaran operasional, serta minimnya program literasi yang menarik menjadi tantangan besar dalam penguatan literasi masyarakat di tingkat akar rumput.
b. Peluang
    1) Dukungan regulasi nasional terkait penguatan literasi dan kearsipan. Kebijakan nasional membuka ruang untuk penguatan layanan perpustakaan dan arsip melalui program sinergi pusat-daerah.

2) Kesadaran masyarakat dan satuan pendidikan akan pentingnya literasi terus meningkat. Ini dapat menjadi dasar pengembangan koleksi dan program literasi yang lebih relevan dan berdampak.
3) Potensi kolaborasi dengan komunitas, Bunda Literasi, dan dunia usaha. Dukungan dari berbagai pihak bisa dimanfaatkan untuk peningkatan layanan, penyediaan koleksi, serta penyelenggaraan kegiatan literasi.
4) Perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi koleksi, layanan perpustakaan elektronik, serta pemanfaatan media sosial membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pemustaka secara fleksibel dan inovatif.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan peran Bunda Literasi sebagai motor penggerak literasi lokal melalui pelatihan, fasilitasi kegiatan literasi keluarga, dan sinergi dengan sekolah dan komunitas
2. enyelenggaraan seminar internasional tokoh pahlawan Kota Semarang yang terintegrasi dalam program berbasis sejarah dan kebudayaan lokal.
3. pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Semarang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan.
4. Integrasi pelaksanaan peringatan sejarah dengan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran sejarah dan minat baca masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	2.033.155.242	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	12.847.539.508	DAK Fisik
2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1.085.002.102	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1.578.168.874	
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	329.895.467	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	58.705.000	
4	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	20.644.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	4.444.000	
5	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	100 Eksemplar	119.927.184	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	100 Eksemplar	564.972.000	AWP

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
6	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	108.336.987	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	7.143.960	
7	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	32.167.616	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	25.000.000	
8	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	48.151.418	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	1.000.000	
9	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	22.386.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	25.000.000	
11	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan	100 Eksemplar	100.671.782	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan	100 Eksemplar	882.159.914	DAK Fisik

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
12	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	36.731.760	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	9.744.000	
13	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	948.153.139	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	11.269.370.634	
14	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	127.716.670	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	3.873.200	
15	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	305.321.807	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	10.264.438.954	DAK FIsik
16	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya	5 Orang	443.844.669	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya	5 Orang	450.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			
17	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	18.314.296	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	24.097.200	
18	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	52.955.698	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	976.511.280	AWP
19	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	236.789.654	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	384.290.120	
20	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	62.713.768	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	1.500.000	
21	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	25.437.360	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	750.000	
22	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	37.276.408	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	750.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
23	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	174.075.886	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	382.790.120	
24	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	167.130.257	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	380.194.910	AWP
25	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	6.945.630	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	2.595.210	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.247.362.379	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.596.741.055	
27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	71.601.608	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	88.122.600	
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.738.560	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.744.000	
29	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	1.678.352	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	4.033.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.163.376	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.088.000	
31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	26.021.320	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4.257.000	
32	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	12.308.247.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	50.000.000	
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ bulan	12.011.433.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ bulan	11.717.306.753	
34	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	293.670.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	210.018.000	
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.394.432	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.454.200	
36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Laporan	1.750.112	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Laporan	1.232.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	539.810.359	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	115.697.710	
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.262.373	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.392.149	
39	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.602.150	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9.380.980	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.239.410	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.299.590	
41	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.676.678	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.305.540	
42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.732.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.320.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
43	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.328.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.503.850	
44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	232.427.770	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.174.201	
45	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	235.541.178	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	321.400	
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	168.875.487	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	5.000.000	
47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	168.875.487	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5.000.000	
48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	913.066.334	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	825.435.243	
49	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.670.848	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.741.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	648.395.486	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	559.694.043	
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.245.760.847	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	632.473.749	
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	37.393.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	35.955.000	
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	505.131.120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	373.857.249	
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	401.628.843	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	31.140.012	
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	301.607.684	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.521.488	
56	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerintahan berbasis elektronik	100%	508.882.954	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerintahan berbasis elektronik	100%	867.374.885	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
57	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	147.672.249	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	149.941.520	
58	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	28.091.077	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	84.044.450	
59	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	31.518.542	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	7.318.810	
60	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	88.062.630	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	58.578.260	
61	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100%	139.292.143	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100%	632.654.435	
62	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	48.366.084	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	511.185.660	Seminar
63	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	90.926.059	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	121.468.775	
64	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip	100%	221.918.562	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip	100%	84.778.930	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tingkat Kabupaten/Kota		arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang			Tingkat Kabupaten/Kota		arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang			
65	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	40.399.840	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	9.532.230	
66	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	181.518.722	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	75.246.700	
67	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100%	379.350.385	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100%	433.865.143	
68	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100%	60.041.952	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100%	54.124.043	
69	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	32.052.634	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	24.168.613	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
70	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	27.989.318	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	29.955.430	
71	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	34.679.999	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	29.575.475	
72	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	14.152.958	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	23.390.735	
73	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	20.527.042	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	6.184.740	
74	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	72.714.689	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	80.478.210	
75	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	7 Daftar	20.625.176	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	7 Daftar	60.250.210	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
76	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	14.462.531	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	728.000	
77	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	15.675.806	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	8.700.000	
78	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	21.951.176	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	10.800.000	
79	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	144.407.389	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	201.940.890	
80	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	51.736.214	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	46.431.100	
81	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai	376 Arsip	92.671.175	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai	376 Arsip	155.509.790	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penjaminan Keabsahan Arsip		Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Penjaminan Keabsahan Arsip		Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			
82	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	67.506.356	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	67.746.525	
83	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	35.527.346	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	22.180.800	
84	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	15.320.040	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	42.435.700	
85	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	16.658.970	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	3.130.025	
86	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	49.110.137	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	63.162.340	
87	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	49.110.137	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	63.162.340	
88	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang	5 SOP	39.553.037	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang	5 SOP	32.462.340	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	yang Bersifat Tertutup		Disusun dan Ditetapkan			yang Bersifat Tertutup		Disusun dan Ditetapkan			
89	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	9.557.101	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	30.700.000	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif"

dengan indikator tujuan "Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu:

1. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat;
2. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik;

4. Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang;
2. Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan;
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang;
4. Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	72
	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat	Persen	73
	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	Persen	83
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	Persen	65

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif di Kota Semarang. Hal ini diwujudkan melalui beberapa indikator kinerja utama. Pada aspek perpustakaan, ditargetkan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mencapai 72 persen, yang mencerminkan minat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas literasi. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga ditargetkan mencapai 73 persen sebagai indikator keberhasilan berbagai program literasi yang telah dilakukan.

Sementara itu, pada aspek kearsipan, terdapat dua indikator penting. Pertama, persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya ditetapkan sebesar 83 persen, yang menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas dan keaslian arsip sebagai sumber informasi yang valid. Kedua, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi ditargetkan mencapai 65 persen. Target ini menjadi ukuran dalam memastikan bahwa arsip dikelola secara sistematis dan dapat diakses ketika dibutuhkan sebagai bentuk akuntabilitas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	1	1	1	15.129.191.990	15.129.191.990	13.596.741.055	APBD	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	121.842.600	121.842.600	88.122.600	APBD	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	58.064.000	58.064.000	25.744.000	APBD	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.808.600	4.808.600	4.033.600	APBD	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.713.000	4.713.000	4.088.000	APBD	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4.257.000	4.257.000	4.257.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	1	1	12.301.715.240	12.301.715.240	11.930.011.753	APBD	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	12.088.785.240	12.088.785.240	11.717.306.753	APBD	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	210.018.000	210.018.000	210.018.000	APBD	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.454.200	1.454.200	1.454.200	APBD	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.457.800	1.457.800	1.232.800	APBD	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	1	1	1	453.079.980	453.079.980	115.697.710	APBD	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.784.298	16.784.298	8.392.149	APBD	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.380.980	9.380.980	9.380.980	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.193.490	29.193.490	25.299.590	APBD	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.305.540	10.305.540	10.305.540	APBD	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.320.000	10.320.000	10.320.000	APBD	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.325.000	24.325.000	10.503.850	APBD	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	149.767.500	149.767.500	41.174.201	APBD	
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	203.003.172	203.003.172	321.400	APBD	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	463.807.407	463.807.407	5.000.000	APBD	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	463.807.407	463.807.407	5.000.000	APBD	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1	1	825.435.243	825.435.243	825.435.243	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	265.741.200	265.741.200	265.741.200	APBD	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	559.694.043	559.694.043	559.694.043	APBD	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	963.311.520	963.311.520	632.473.749	APBD	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	APBD	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	543.774.759	543.774.759	373.857.249	APBD	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	101.203.870	101.203.870	31.140.012	APBD	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	278.729.288	278.729.288	191.521.488	APBD	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1 Rasio	1.233.190.357	1.233.190.357	12.847.539.508	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.02.2.01	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1	1	650.310.347	650.310.347	1.578.168.874	APBD	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	249.450.797	249.450.797	58.705.000	APBD	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	24.477.400	24.477.400	4.444.000	APBD	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	125.457.640	125.457.640	564.972.000	APBD	AWP
2.23.02.2.01.04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	41.580.590	41.580.590	7.143.960	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.02.2.01.05	Pembinaan perpustakaan umum dan khusus tingkat kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	5.000.000	5.000.000	1.000.000	APBD	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	129.911.920	129.911.920	882.159.914	APBD dan DAK	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24.432.000	24.432.000	9.744.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	1	1	582.880.010	582.880.010	11.269.370.634	APBD	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	15 Lokus	15 Lokus	77.166.700	77.166.700	3.873.200	APBD	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	420.292.554	420.292.554	10.264.438.954	APBD dan DAK	
2.23.02.2.02.03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	11.567.736	11.567.736	450.000	APBD	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	24.097.200	24.097.200	24.097.200	APBD	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	49.755.820	49.755.820	976.511.280	APBD	AWP

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	1	1	1	199.728.000	199.728.000	384.290.120	APBD	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	1	1	1	47.722.800	47.722.800	1.500.000	APBD	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	5 Orang	5 Orang	22.125.680	22.125.680	750.000	APBD	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	25.597.120	25.597.120	750.000	APBD	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	1	1	152.005.200	152.005.200	382.790.120	APBD	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	145.647.270	145.647.270	380.194.910	APBD	AWP
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	6.357.930	6.357.930	2.595.210	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN					1.436.339.953	1.436.339.953	1.364.402.368	APBD	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	1	1	1	642.981.920	642.981.920	867.374.885	APBD	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	1	1	1	250.844.110	250.844.110	149.941.520	APBD	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	81.218.900	81.218.900	84.044.450	APBD	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	5000 Berkas	5000 Berkas	46.567.040	46.567.040	7.318.810	APBD	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	123.058.170	123.058.170	58.578.260	APBD	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	1	1	1	145.459.830	145.459.830	632.654.435	APBD	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	28.352.790	28.352.790	511.185.660	APBD	Seminar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	117.107.040	117.107.040	121.468.775	APBD	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	1	1	246.677.980	246.677.980	84.778.930	APBD	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	100 Pengguna	82.456.260	82.456.260	9.532.230	APBD	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	164.221.720	164.221.720	75.246.700	APBD	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	1	1	1	698.113.023	698.113.023	433.865.143	APBD	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100%	1	1	84.247.523	84.247.523	54.124.043	APBD	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	5000 Arsip	5000 Arsip	5000 Arsip	48.610.860	48.610.860	29.955.430	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	bawah 10 (sepuluh) tahun	Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun								
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2500 Berkas	2500 Berkas	35.636.663	35.636.663	24.168.613	APBD	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	1	1	56.042.640	56.042.640	29.575.475	APBD	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	33.035.800	33.035.800	23.390.735	APBD	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	23.006.840	23.006.840	6.184.740	APBD	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	1	1	217.100.720	217.100.720	80.478.210	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	75.000.000	75.000.000	60.250.210	APBD	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	100.000.720	100.000.720	728.000	APBD	
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	8.700.000	8.700.000	8.700.000	APBD	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	33.400.000	33.400.000	10.800.000	APBD	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	1	1	1	142.053.540	142.053.540	201.940.890	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	100.000.720	100.000.720	46.431.100	APBD	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	376 Arsip	376 Arsip	42.052.820	42.052.820	155.509.790	APBD	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	1	1	198.668.600	198.668.600	67.746.525	APBD	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	41.344.400	41.344.400	22.180.800	APBD	
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	57.188.200	57.188.200	42.435.700	APBD	
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	100.136.000	100.136.000	3.130.025	APBD	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	0,8	0,8	0,8	95.245.010	95.245.010	63.162.340	APBD	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat	80%	0,8	0,8	95.245.010	95.245.010	63.162.340	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		tertutup dengan izin yang diberikan								
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	53.295.010	53.295.010	32.462.340	APBD	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	41.950.000	41.950.000	30.700.000	APBD	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

24. DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

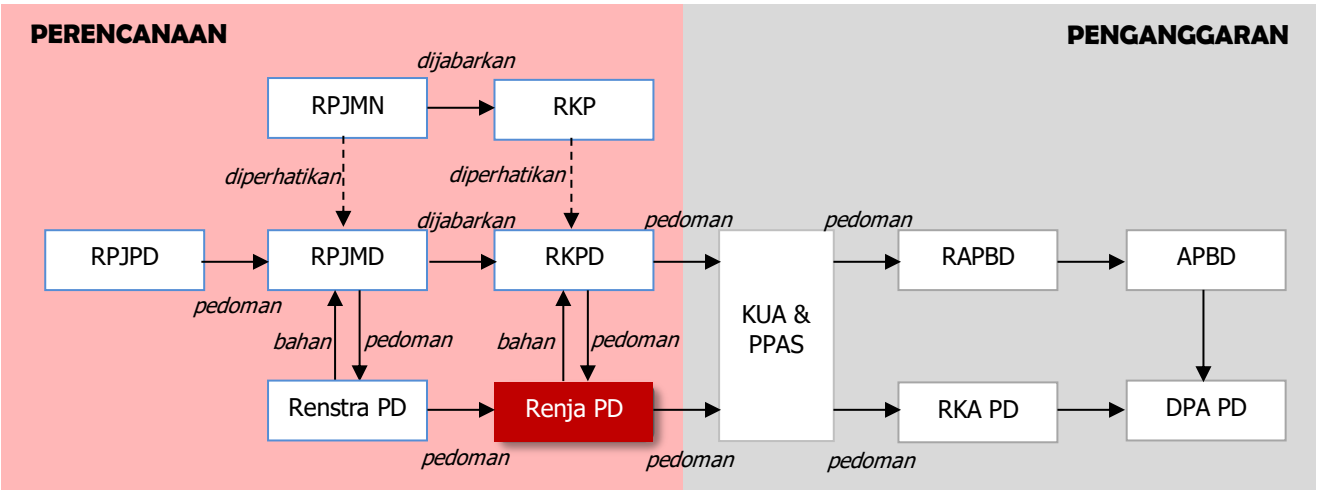

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) Mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih (SE Mendagri Nomor Nomor 900.1.1/640/SJ); serta (4) Memperhatikan rancangan Perda RPJMD Tahun 2025-2029.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perikanan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 607 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perikanan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	-	19 Orang	30 Orang	26 Orang	100 %	-	-
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	-	100 %	100 %	50 %	50 %	-	-
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	75 %	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	-	100 %	100 %	50 %	50 %	-	-
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	50 %	8 Dokumen	75 %
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	-	-
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	75 %
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				0 Dokumen	0 %		75 %
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	75 %
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	75 %
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.01.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	75 %	75 %
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	-	-	-	75 %	75 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	19 Orang	33 Orang / bulan	26 Orang / bulan	50 %	-	-
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100 %	100 %	-	-	-	75 %	75 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	-	-
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	75 %
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75 %
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	-	-
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan / Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	75 %
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	4 Kegiatan	75 %
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	50 Orang	100 Orang	0 Orang	0 %	-	-
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	50 Orang	100 Orang	0 Orang	0 %	-	-
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	75 %	75 %
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	10 Jenis	10 Jenis	-	-	-	10 Jenis	75 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 %	-	-
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	35 Jenis	-	-	-	35 Jenis	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	50 %	50 %	-	-
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	-	-	-	8 Jenis	75 %
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	50 %	50 %	-	-
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan minum rapat	700 orang	700 orang	-	-	-	500 orang	75 %
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	50 %	-	-
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan	36 Kegiatan	-	-	-	36 Kegiatan	75 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	50 %	-	-
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Peralatan Kantor Elektronik	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-	3 Jenis	75 %
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	-	3 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	50 %	3 Jenis	75 %
3.25.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	2 Jenis	75 %
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	25 Unit	13 Unit	50 %	-	-
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	75 %	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100 %	100 %	-	-	-	75 %	75 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50 %	-	-
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-	1 Jenis	75 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	-	-
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	3 Orang	-	-	-	3 Orang	75 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50 %	-	-
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	75 %	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50 %	1 Unit	75 %
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	50 %	28 Unit	75 %
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50 Unit	50 Unit	25 Unit	50 %	-	-
		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	2 Jenis	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	-	-
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	3.213,34 Ton	3.115,94 Ton	3.169,37 Ton	1.590,56 Ton	50,19 %	1.590,56 Ton	75 %
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnyayang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restoking di Perairan Umum untuk peningkatan penangkapan ikan	300.000 Benih	200.000 Benih	250.000 Ekor	125.000 Ekor	50 %	125.000 Ekor	75 %
		Rekomendasi BBM untuk Nelayan	-	20 Kelompok	-	-	-	-	-
		Validasi Data Nelayan	-	1.081 Nelayan	-	-	-	-	-
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG	120 Orang	-	-	-	-	90 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kajian Jasa Konsultasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	75 %
		Jumlah Nelayan Tervalidasi	200 Orang	1.081 Orang	-	-	-	150 Orang	75 %
		Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	-	-	1 Orang	75 %
		Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap	40 Orang	107 Orang	-	-	-	30 Orang	75 %
		Restocking di perairan umum	300.000 Benih	200.000 Benih	250.000 Ekor	125.000 Ekor	50 %	125.000 Ekor	75 %
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	107 Unit	30 Unit	0 Unit	0 %	-	-
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	300 Orang	50 Orang	240 Orang	90 Orang	37,5 %	90 Orang	75 %
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Sosialisasi Nelayan	300 Orang	92 Orang	-	-	-	90 Orang	75 %
		Forum KUB	150 Orang	92 Orang	-	-	-	90 Orang	75 %
		Magang Nelayan	20 Orang	92 Orang	-	-	-	20 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pelatihan Nelayan	180 Orang	184 Orang	-	-	-	135 Orang	75 %
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasmya	180 Orang	184 Orang	200 Orang	90 Orang	45 %	135 Orang	75 %
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	90 Orang	50 Orang	60 Orang	30 Orang	50 %	30 Orang	75 %
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	90 Orang	50 Orang	60 Orang	30 Orang	50 %	30 Orang	75 %
		Sosialisasi Optimalisasi TPI	60 Orang	75 Orang	-	-	-	30 Orang	75 %
		Sarpras Pengelolaan TPI	20 Paket	1 Unit	-	-	-	1 Paket	75 %
		Monev TPI	12 Kali	12 Kali	-	-	-	6 Kali	75 %
		Fasilitasi Pembangunan TPI	2 Paket	1 Paket	-	-	-	2 Paket	75 %
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	-	-
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.202,58 Ton	3.961,42 Ton	4.080,17 Ton	2.036,57 Ton	49,91 %	2.036,57 Ton	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100 Orang	50 %	100 Orang	75 %
		Pelatihan Kolam Terpal	-	140 Orang				-	-
		Pelatihan / Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	-	340 Orang				-	-
		Pembuatan Pakan Ikan	-	40 Orang				-	-
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	-	40 Orang				-	-
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau	40 Orang	40 Orang	-	-	-	40 Orang	75 %
		Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang	340 Orang	-	-	-	100 Orang	75 %
		Panen Raya Ikan	100 Orang	40 Orang	-	-	-	75 Orang	75 %
		Pelatihan Teknologi Pakan Ikan	40 Orang	40 Orang	-	-	-	40 Orang	75 %
		Honoraium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	-	-	1 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pendidikan dan Pelatihan	Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	60 Orang	40 Orang	-	-	-	30 Orang	75 %
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Kelompok	20 Kelompok	10 Kelompok	50 %	-	-
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Pengelolaan Ikan Melalui Pelatihan / Sosialisasi	80 Orang	60 Orang	60 Orang	30 Orang	50 %	30 Orang	75 %
		Tersedianya Induk Ikan	-	5 Jenis	-	-	-	-	-
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Induk Ikan	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	1 Jenis	75 %
		Tersedianya Pakan Ikan	8.000 Kg	4.150 Kg	-	-	-	3.080 Kg	75 %
		Tersedianya Obat-Obatan Ikan	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-	4 Jenis	75 %
		Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan	80 Orang	60 Orang	-	-	-	40 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pembinaan UPR	80 Orang	-	-	-	-	40 Orang	75 %
		Rehab Kolam dan Saluran BBI	4 Jenis	1 Jenis	-	-	-	2 Jenis	75 %
		Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI	2 Jenis	3 Jenis	-	-	-	1 Jenis	75 %
		Honor Non ASN	11 Orang	10 Orang	-	-	-	11 Orang	75 %
		Lomba Mancing	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	75 %
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	1 Unit	4 Unit	2 Unit	50 %	-	-
3.25.04.2.04.11	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan diDarat	Rehab kolam dan saluran Minapolitan	3 Jenis	1 Jenis	-	-	-	1 Jenis	75 %
		Pembangunan Kawasan Minapolitan	3 Jenis	1 Jenis	-	-	-	1 Jenis	75 %
		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	-	-	4 Unit	2 Unit	50 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	20 Orang	-	-	-	-	-
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	1 Kasus	-	2 Kasus	0 Kasus	100 %	0 Kasus	75 %
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	200 Orang	50 Orang	40 Orang	0 Orang	0 %	40 Orang	75 %
3.25.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pengawasan	Pelatihan Pokmaswas	200 Orang	50 Orang	40 Orang	0 Orang	0 %	150 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan Pokmaswas	200 Orang	-	-	-	-	150 Orang	75 %
		Jasa Konsultasi Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	75 %
		Temu Usaha Perikanan	160 Orang	100 Orang	-	-	-	120 Orang	75 %
		Uji Mutu Hasil Perikanan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	75 %
		Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan / atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota	-	-	40 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
3.25.06		Produksi Ikan Olahan	17.986,26 Ton	17.802,22 Ton	17.808,18 Ton	8.947,19 Ton	50,24 %	8.947,19 Ton	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita	40,21 Kg/kapita/th	44,18 Kg / Kapita / Th	40,21 Kg / Kapita / Th	-	-	44,18 Kg / Kapita / Th	75 %
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	120 Orang	150 Orang	80 Orang	0 Orang	0 %	90 Orang	75 %
3.25.06.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan PengolahanHasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	120 Orang	150 Orang	80 Orang	0 Orang	0 %	90 Orang	75 %
		Bintek/Magang	20 Orang	30 Orang	-	-	-	20 Orang	75 %
		Monev Pedagang Ikan Hias	12 Kali	12 Kali	-	-	-	6 Kali	75 %
		Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	-	-	1 Orang	75 %
		Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	250 Orang	40 Orang	-	-	-	180 Orang	75 %
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penolahan Hasil Perikanan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		berdasarkan Skala Usaha dan Risiko							
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan KeamananHasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran SkalaMikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	150 Orang	100 Orang	50 Orang	50 %	75 Orang	75 %
3.25.06.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Coocking Class	50 Orang	35 Orang	-	-	-	40 Orang	75 %
		Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK	20 Orang	20 Orang	-	-	-	20 Orang	75 %
		Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi	20 Orang	20 Orang	-	-	-	20 Orang	75 %
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	150 Orang	-	-	-	75 Orang	75 %
		Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	100 Orang	300 Orang	-	-	-	75 Orang	75 %
		Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak	80 Orang	100 Orang	-	-	-	60 Orang	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Sekolah							
		Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan	80 Orang	-	-	-	-	60 Orang	75 %
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	8 Unit Usaha	15 Unit Usaha	8 Unit Usaha	50 %	-	-
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	20 Orang	50 %	20 Orang	75 %
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan	Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH	40 Orang	40 Orang	40 Orang	20 Orang	50 %	20 Orang	75 %
		Jumlah Pembangunan/Peralatan	3 Jenis	1 Jenis	-	-	-	3 Jenis	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Gedung							
		Honorarium Non ASN	4 Orang	3 Orang	-	-	-	4 Orang	75 %
		Sarpras PIH	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-	3 Jenis	75 %
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	17.802,22 Ton	17.800 Ton	8.947,19 Ton	50,27 %	-	-
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	-	-	15 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	50 %	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”, “Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD”, “Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran”.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini Dinas Perikanan Kota Semarang mengalami Efisiensi Anggaran sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, dimana beberapa belanja yang di efisiensi meliputi : Belanja Modal, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Cetak, Belanja ATK, Belanja Makan Minum, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja yang bersifat seremonial.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp.7.870.354.150,00	Rp.2.659.122.552,00	33,79%
3.25.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.103.344.400,00	Rp.0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.50.539.200,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.534.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.624.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.506.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.624.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.517.200,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.6.305.764.120,00	Rp.2.279.972.281,00	36,16%
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.6.078.877.720,00	Rp.2.248.582.281,00	36,99%
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.225.650.000,00	Rp.31.390.000,00	13,91%
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.562.000,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp337.200,00	Rp0,00	0,00%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp337.200,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp344.641.277,00	Rp33.884.990,00	9,83%
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp34.153.412,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.39.361.467,00	Rp16.332.790,00	41,49%
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp5.296.356,00	Rp2.330.700,00	44,01%
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp16.397.045,00	Rp8.772.000,00	53,50%
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp61.304.681,00	Rp6.449.500,00	10,52%
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp188.128.316,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp139.808.796,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp139.808.796,00	Rp0,00	0,00%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp594.618.064,00	Rp247.483.375,00	41,62%
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp199.999.168,00	Rp87.902.503,00	43,95%
3.25.01.2.0.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp127.367.616,00	Rp9.030.000,00	7,09%
3.25.01.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp267.251.280,00	Rp150.550.872,00	56,33%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp382.177.493,00	Rp97.781.906,00	25,59%
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp39.910.050,00	Rp15.470.568,00	38,76%
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp295.883.820,00	Rp71.416.338,00	24,14%
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp27.606.359,00	Rp10.895.000,00	39,47%
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp18.777.264,00	Rp0,00	0,00%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp1.399.946.687,00	Rp469.686.715,00	33,55%
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp446.748.687,00	Rp99.906.245,00	22,36%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp446.748.687,00	Rp99.906.245,00	22,36%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp362.617.100,00	Rp95.959.900,00	26,46%
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp362.617.100,00	Rp95.959.900,00	26,46%
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp590.580.900,00	Rp273.820.570,00	46,36%
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp590.580.900,00	Rp273.820.570,00	46,36%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp2.791.060.575,00	Rp631.780.750,00	22,64%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp244.971.359,00	Rp89.305.100,00	36,46%
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp244.971.359,00	Rp89.305.100,00	36,46%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp2.546.089.216,00	Rp542.475.650,00	21,31%
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.743.823.133,00	Rp473.055.350,00	27,13%
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp802.266.083,00	Rp69.420.300,00	8,65%
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp89.418.216,00	Rp29.932.975,00	33,48%
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp89.418.216,00	Rp29.932.975,00	33,48%
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Rp89.418.216,00	Rp29.932.975,00	33,48%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp943.261.982,00	Rp306.554.165,00	32,50%
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp60.175.880,00	Rp375.000,00	0,62%
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp60.175.880,00	Rp375.000,00	0,62%
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp125.530.165,00	Rp58.412.915,00	46,53%
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rp125.530.165,00	Rp58.412.915,00	46,53%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp757.555.937,00	Rp247.766.250,00	32,71%
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp561.353.437,00	Rp173.866.250,00	30,97%
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp196.202.500,00	Rp73.900.000,00	37,67%
JUMLAH		Rp13.094.041.610,00	Rp4.097.077.157,00	31,29%

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 5 program, dan 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebesar Rp 13.094.041.610,00 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 4.097.077.157,00 (31,29 %) Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 8.996.964.453,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	6.539, 12 ton	6.781, 54 ton	6.901, 85 ton	7.075, 02 ton	7.249, 54 ton	7.415, 92 ton	6.712, 12 ton	6.896, 79 ton	6.963, 70 ton	7.077, 36 ton	3.627, 13 ton	-	7.249, 54 ton
Sasaran :														
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai AKIP	65,7	70	71	72	73	74	-	70	77,55	78,75	78,80	-	73

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB”.
b. Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
    1) Terwujudnya Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan Indikator ”Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)”. Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator ini adalah 3.627,13 ton (50,03%) dari target sebesar 7.249,54 ton pada tahun 2025.
    2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, dengan Indikator ”Nilai AKIP Dinas Perikanan”. Pada tahun 2025, Nilai AKIP Dinas Perikanan adalah 78,80 meningkat dari tahun 2024 sebesar 78,75.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perikanan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan budidaya
2. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan karena alih fungsi lahan
3. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan tangkap
4. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi ikan olahan
5. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.
   Hal ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memberikan himbauan kepada pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan menjaga kualitas air, media budidaya serta penggunaan obat ikan dengan bijak.

2. Belum optimalnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan.
   Hal ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain memberikan bantuan kepada nelayan
3. Belum optimalnya penjualan hasil pengolahan ikan yang di produksi.
   Hal ini antara lain disebabkan kendala dalam pemasarannya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain pelatihan pemasaran on line serta dilakukan pelatihan pengemasan yang baik dan bernilai jual.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Pengelolaan BBI belum optimal
   2) Pengelolaan TPI belum optimal
   3) PIH belum dapat dapat difungsikan secara optimal

4) Perlu memperluas jaringan distribusi pemasaran bagi kelompok pelaku usaha perikanan

b. Peluang
1) Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan mulai dari hulu hingga hilir
2) Pengembangan pasar distribusi ikan
3) Menciptakan area lokasi pusat penjualan hasil perikanan bagi kelompok pelaku usaha perikanan
4) Pengembangan Kawasan perikanan terpadu sebagai pusat kegiatan perikanan dari hulu ke hilir

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya
2. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah
3. Angka konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata-rata Nasional
4. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum optimal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PERIKANAN				11.559.229.459					11.559.229.459	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Semarang			11.559.229.459	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Semarang			11.559.229.459	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang			11.559.229.459	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang			11.559.229.459	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30 Orang 100% 100% 100%	6.668.139.385	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30 Orang 100% 100% 100%	6.668.139.385	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	103.344.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	103.344.400	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.539.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.539.200	
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	534.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	534.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	624.000	
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	624.000	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	517.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	517.200	
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	5.120.835.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	5.120.835.744	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.893.949.344	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.893.949.344	
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.650.000	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	337.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	1.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	1.000.000	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	500.000	
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	500.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	278.134.887	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	278.134.887	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.153.412	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.153.412	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.361.467	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.361.467	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Baran	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.296.356	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Baran	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.296.356	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	16.397.045	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	16.397.045	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.304.681	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.304.681	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	96.621.926	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	96.621.926	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	42.086.716	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	42.086.716	
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	42.086.716	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	42.086.716	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	740.560.146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	740.560.146	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.000.000	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	126.367.616	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	126.367.616	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	411.192.530	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	411.192.530	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	382.177.493	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	382.177.493	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	28 Unit	295.883.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	28 Unit	295.883.820	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	27.606.359	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	27.606.359	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.777.264	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.777.264	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	1.372.790.504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	1.372.790.504	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan Validasi Data Nelayan	250.000 ekor - 	508.615.464	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan Validasi Data Nelayan	250.000 ekor - 	508.615.464	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	508.615.464	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	508.615.464	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	362.617.100	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	362.617.100	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	362.617.100	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	362.617.100	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	501.557.940	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	501.557.940	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	501.557.940	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	501.557.940	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Semarang	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	2.446.198.674	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Semarang	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	2.446.198.674	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	200 Orang	272.535.039	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	200 Orang	272.535.039	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	272.535.039	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	272.535.039	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	2.173.663.635	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	2.173.663.635	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1.763.438.553	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1.763.438.553	
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Unit	410.225.082	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Unit	410.225.082	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	90.468.216	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	90.468.216	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	90.468.216	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	90.468.216	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	90.468.216	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	90.468.216	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Semarang	• Produksi ikan olahan Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton	981.632.679	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Semarang	• Produksi ikan olahan Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton	981.632.679	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	60.175.880	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	60.175.880	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	60.175.880	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	60.175.880	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	125.530.165	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	125.530.165	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	125.530.165	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	125.530.165	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	795.926.634	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	795.926.634	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	529.718.734	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	529.718.734	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	266.207.900	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	266.207.900	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara

berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah"

dengan indikator tujuan "Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
2. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,99 %
SASARAN 1 Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	7.249,54 Ton
SASARAN 2 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan dan Ikan Olahan	-Persentase Peningkatan Produksi Perikanan -Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan	% %	2,6 1,25
SASARAN 3 Meningkatnya kinerja SKPD	Nilai AKIP	-	73

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perikanan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	DINAS PERIKANAN					14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459	APBD	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459	APBD	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459	APBD	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30 Orang 100% 100% 100%	30 Orang 100% 100% 100%	30 Orang 100% 100% 100%	8.109.963.900	8.109.963.900	6.668.139.385	APBD	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	103.344.400	103.344.400	103.344.400	APBD	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.539.200	50.539.200	50.539.200	APBD	
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	534.000	534.0000	534.000	APBD	
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	624.000	624.000	624.000	APBD	
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	506.000	506.000	506.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	624.000	624.000	624.000	APBD	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	517.200	517.200	517.200	APBD	
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	50.000.000	APBD	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	6.399.387.400	6.305.764.120	5.120.835.744	APBD	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	25 Orang/bulan	6.172.501.000	6.078.877.720	4.893.949.344	APBD	
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	225.650.000	225.650.000	225.650.000	APBD	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	562.000	562.000	562.000	APBD	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	APBD	
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	337.200	APBD	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	60.600.000	60.600.000	1.000.000	APBD	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30.300.000	30.300.000	500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Peraturan Perundang-Undangan								
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30.300.000	30.300.000	500.000	APBD	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	433.379.913	433.379.913	278.134.887	APBD	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	34.153.412	34.153.412	34.153.412	APBD	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	39.361.467	39.361.467	39.361.467	APBD	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Baran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.059.037	50.059.037	5.296.356	APBD	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	35.000.000	35.000.000	16.397.045	APBD	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	86.677.681	86.677.681	86.304.681	APBD	
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	188.128.316	188.128.316	96.621.926	APBD	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	139.808.796	139.808.796	42.086.716	APBD	
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	5 Unit	139.808.796	139.808.796	42.086.716	APBD	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	524.854.404	618.477.684	740.560.146	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	199.999.168	199.999.168	203.000.000	APBD	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	151.227.236	151.227.236	126.367.616	APBD	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	173.628.000	267.251.280	411.192.530	APBD	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	448.588.987	448.588.987	382.177.493	APBD	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	APBD	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	345.259.979	345.259.979	295.883.820	APBD	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	27.606.359	27.606.359	27.606.359	APBD	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	31.762.650	31.762.650	18.777.264	APBD	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	3169.37 ton	3169.37 ton	1.643.198.000	1.643.198.000	1.372.790.504	APBD	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan • Validasi Data Nelayan	250.000 ekor - -	250.000 ekor - -	250.000 ekor - -	477.000.000	477.000.000	508.615.464	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	30 Unit	30 Unit	477.000.000	477.000.000	508.615.464	APBD	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	240 Orang	240 Orang	505.000.000	505.000.000	362.617.100	APBD	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	200 Orang	505.000.000	505.000.000	362.617.100	APBD	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	60 Orang	60 Orang	661.198.000	661.198.000	501.557.940	APBD	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	661.198.000	661.198.000	501.557.940	APBD	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	4080.17 ton	4080.17 ton	2.694.439.000	3.299.439.000	2.446.198.674	APBD	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan • Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	607.497.000	607.497.000	272.535.039	APBD	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok	10 Kelompok	607.497.000	607.497.000	272.535.039	APBD	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	60 orang	60 orang	2.086.942.000	2.691.942.000	2.173.663.635	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.479.378.000	1.819.378.000	1.763.438.553	APBD	
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	607.564.000	872.564.000	410.225.082	APBD	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	200.000.000	169.950.351	90.468.216	APBD	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	40 Orang	40 Orang	200.000.000	169.950.351	90.468.216	APBD	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	- Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	200.000.000	169.950.351	90.468.216	APBD	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	• Produksi ikan olahan	17808.18 ton	17808.18 ton	17808.18 ton	1.648.518.037	1.678.567.686	981.632.679	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Angka konsumsi ikan per kapita								
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	80 Orang	80 Orang	80 Orang	153.997.000	153.997.000	60.175.880	APBD	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	153.997.000	153.997.000	60.175.880	APBD	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	500.000.000	500.000.000	125.530.165	APBD	
3.25.06.2.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	500.000.000	500.000.000	125.530.165	APBD	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	994.521.037	1.024.570.686	795.926.634	APBD	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	17800 Ton	17800 Ton	632.888.000	632.888.000	529.718.734	APBD	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	361.633.037	391.682.686	266.207.900	APBD	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

25. DINAS PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

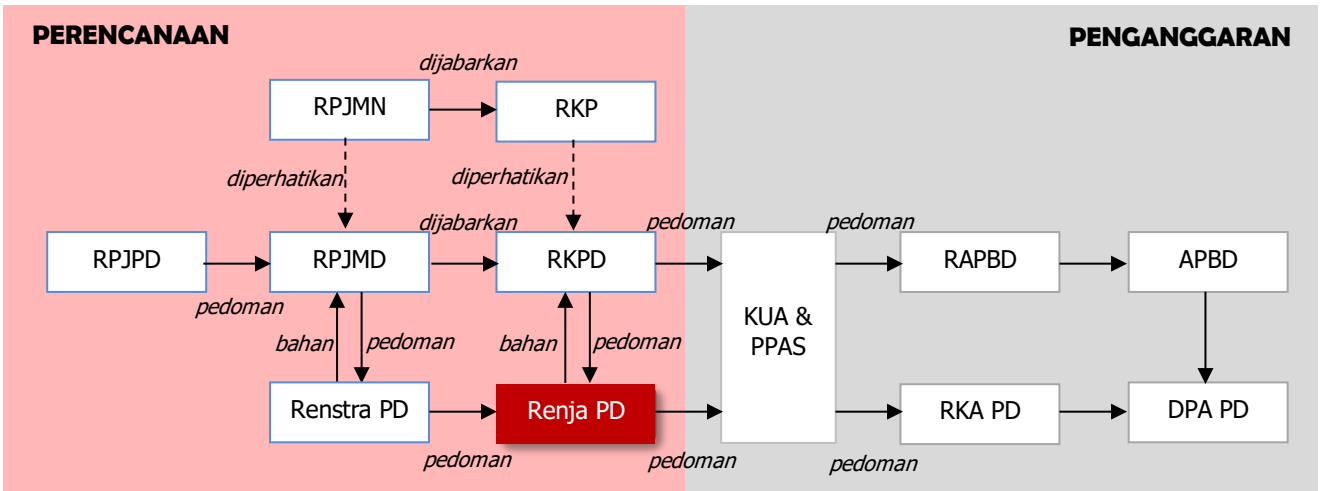

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (*unaudited*) pada APBD TA 2024, (2) perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja yang menyebabkan perlu adanya penyesuaian target pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, serta (3) adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pertanian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		6		*7*		*8=(7/6)*	*9=(5+7)*		*10=(9/4)*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51.283,73	ton	50.519,18	ton	51.069,22	ton	30.216,70	ton	59,17%	30.216,70	ton	58,92%
		produksi hasil peternakan	36.822,00	ton	41.535,94	ton	36.519,00	ton	21.419,00	ton	58,65%	21.419,00	ton	58,17%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	150	kelompok	86	kelompok	28	kelompok	26	kelompok	92,86%	112	kelompok	74,67%
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	66	ha	24	ha	13	ha	10	ha	76,92%	34	ha	51,36%
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	31	kelompok	6	kelompok	6	kelompok	0	kelompok	0,00%	6	kelompok	19,35%
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan		*laporan*	47	*laporan*	*35*	*laporan*	*8*	*laporan*	22,86%	55	*laporan*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi												
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23	kelompok	6	kelompok	6	kelompok	16	kelompok	266,67%	22	kelompok	95,65%
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	15	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	0	kegiatan	0,00%	3	kegiatan	20,00%
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60	kali	12	kali	12	kali	0	kali	0,00%	12	kali	20,00%
		Jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82	paket	16	paket	16	paket	16	paket	100,00%	32	paket	39,02%
		Jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	28	kelompok	6	kelompok	6	kelompok	24	kelompok	400,00%	30	kelompok	107,14%
		Jumlah bibit yg disediakan untuk *social planting*	135.000	batang	73.800	batang	30.000	batang	0	batang	0,00%	73.800	batang	54,67%
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*laporan*	*94*	*laporan*	*40*	*laporan*	*20*	*laporan*	50,00%	114	*laporan*	100,00%
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	88	persen	69	persen	68,75	persen	69,32	persen	100,83%	69,32	persen	79,22%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16	unit	26	unit	26	unit	26	unit	100,00%	52	unit	325,00%
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	4.000	batang	2.000	batang	2.000	batang	1850	batang	92,50%	3.850	batang	96,25%
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		*dokumen*	*6*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	*0*	*dokumen*	0,00%	6	*dokumen*	100,00%
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	65	persen	50	persen	60	persen	30	persen	50,00%	30	persen	46,15%
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	6	laporan	50,00%	18	laporan	30,00%
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	20	kelompok	4	kelompok	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	8	kelompok	40,00%
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		*laporan*	*9*	*laporan*	*9*	*laporan*	*4*	*laporan*	44,44%	13	*laporan*	100,00%
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	445	ekor	770	ekor	100	ekor	100	ekor	100,00%	870	ekor	195,51%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kabupaten/Kota Lain													
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16	kecamatan	16	kecamatan	16	kecamatan	16	kecamatan	100,00%	32	kecamatan	200,00%
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		*ekor*	*770*	*ekor*	*380*	*ekor*	*0*	*ekor*	0,00%	770	*ekor*	100,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6	ton/ha	6,82	ton/ha	6,38	ton/ha	6,76	ton/ha	105,96%	6,76	ton/ha	105,96%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	61	unit	27	unit	12	unit	0	unit	0,00%	27	unit	44,26%
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	7	unit	2	unit	1	unit	0	unit	0,00%	2	unit	28,57%
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		*unit*	*2*	*unit*	*1*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	2	*unit*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	6	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		*unit*		*unit*	*0*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	0	*unit*	0,00%
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	42	unit	24	unit	11	unit	0	unit	0,00%	24	unit	57,14%
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	*42*	*unit*	*24*	*unit*	*11*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	24	*unit*	57,14%
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	7	unit	2	unit	1	unit	0	unit	0,00%	2	unit	28,57%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5,00	persen	-53,92	persen	-5,00	persen	-6,38	persen	1,28	-6,38	persen	127,60%
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14	kelurahan	12	kelurahan	14	kelurahan	12	kelurahan	85,71%	24	kelurahan	28,57%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165	kali	12	kali	24	kali	17	kali	70,83%	29	kali	17,58%
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	26.500	ekor	2.875	ekor	3.500	ekor	1.635	ekor	46,71%	4.510	ekor	17,02%
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		*laporan*		*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	6	*laporan*	100,00%
3.27.04.2.01.08	*Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*		*laporan*	*60*	*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	66	*laporan*	100,00%
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan					2	kegiatan	2	kegiatan	100,00%	2	kegiatan	100,00%
3.27.04.2.02.04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM					3	laporan	2	laporan	66,67%	2	laporan	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04.2.02.05	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan					2	laporan	2	laporan	100,00%	2	laporan	100,00%
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95	persen	100	persen	95	persen	60	persen	63,16%	60	persen	63,16%
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100	persen	100	persen	100	persen	70	persen	70,00%	70	persen	70,00%
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100	persen	100	persen	100	persen	70	persen	70,00%	70	persen	70,00%
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		*laporan*	*34*	*laporan*	*14*	*laporan*	*9*	*laporan*	64,29%	43	*laporan*	100,00%
3.27.04.2.04.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi					35	unit usaha	18	unit usaha	51,43%	18		
3.27.04.2.04.09	Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Registrasi Produk Hewan Segar Berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan					35	produk	18	produk	51,43%	18		
3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik					35	unit usaha	18	unit usaha	51,43%	18		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85	persen	100	persen	80	persen	100	persen	125,00%	100	persen	117,65%
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	37	kelompok	64	kelompok	7	kelompok	16	kelompok	228,57%	80	kelompok	216,22%
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18	kelompok	5	kelompok	3	kelompok	2	kelompok	66,67%	7	kelompok	38,89%
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		*ha*	*105*	*ha*	*100*	*ha*	*6*	*ha*	6,00%	111	*ha*	100,00%
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19	kelompok	3	kelompok	10	kelompok	0	kelompok	0,00%	3	kelompok	15,79%
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan		*Ha*	*0*	*Ha*	*20*	*Ha*	*0*	*Ha*	0,00%	0	*Ha*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perkebunan yang Ditangani												
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36	kelompok	34	kelompok	33	kelompok	34	kelompok	103,03%	68	kelompok	188,89%
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	65	persen	95	persen	55	persen	71,69	persen	130,35%	72	persen	110,29%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	13	kegiatan	8	kegiatan	8	kegiatan	5	kegiatan	62,50%	13	kegiatan	100,00%
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas		*unit*	*107*	*unit*	*5*	*unit*	*5*	*unit*	100,00%	112	*unit*	100,00%
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900	orang	540	orang	400	orang	175	orang	43,75%	715	orang	79,44%
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	2	kegiatan	66,67%	5	kegiatan	26,32%
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25	kelompok	5	kelompok	25	kelompok	0	kelompok	0,00%	5	kelompok	20,00%
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		*unit*	*47*	*unit*	*25*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	47	*unit*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	50	persen	50,00%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		*unit*	*5*	*unit*	*3*	*unit*	*1*	*unit*	33,33%	6	*unit*	100,00%
3.27.07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		*orang*		*orang*		*orang*	*25*	*orang*		25	*orang*	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	100	persen	100	persen	42,31	persen	42,31%	100	persen	100,00%
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan*	*131*	*dokumen*	*30*	*dokumen*	*26*	*dokumen*	*10*	*dokumen*	38,46%	40	*dokumen*	30,53%
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	26	dokumen	8	dokumen	6	dokumen	1	dokumen	16,67%	9	dokumen	34,62%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*dokumen*	*8*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	16,67%	9	*dokumen*	100,00%
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	105	dokumen	22	dokumen	20	dokumen	10	dokumen	50,00%	32	dokumen	30,48%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*dokumen*	*22*	*dokumen*	*20*	*dokumen*	*10*	*dokumen*	50,00%	32	*dokumen*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral					*1*	*dokumen*	*0*	*dokumen*	0,00%	0	*dokumen*	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	100	persen	100,00%
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	50	persen	50,00%
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	75,00%	7	dokumen	35,00%
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	200	persen	200,00%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*org/bulan*	*92*	*org/bulan*	*145*	*org/bulan*	*145*	*org/bulan*	100,00%	145	*org/bulan*	100,00%
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*dokumen*	*12*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	100,00%	13	*dokumen*	100,00%
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0,00%	2	dokumen	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		*dokumen*	*2*	*dokumen*	*2*	*dokumen*	*0*	*dokumen*	0,00%	2	*dokumen*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	10	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	25,00%	5	dokumen	50,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		*dokumen*	*4*	*dokumen*	*4*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	25,00%	5	*dokumen*	100,00%
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	2	dokumen	40,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		*dokumen*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	100,00%	2	*dokumen*	100,00%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	100	persen	100,00%
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	50	persen	50,00%
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	jenis	11	jenis	11	jenis	6	jenis	54,55%	17	jenis	34,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*paket*	*4*	*paket*	*1*	*paket*	*1*	*paket*	100,00%	5	*paket*	100,00%
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	150	jenis	11	jenis	11	jenis	6	jenis	54,55%	17	jenis	11,33%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		*paket*	*12*	*paket*	*12*	*paket*	*6*	*paket*	50,00%	18	*paket*	100,00%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	55	jenis	10	jenis	10	jenis	2	jenis	20,00%	12	jenis	21,82%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*paket*	*4*	*paket*	*4*	*paket*	*2*	*paket*	50,00%	6	*paket*	100,00%
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	15	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100,00%	6	Jenis	40,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		*dokumen*	*12*	*dokumen*	*12*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	50,00%	18	*dokumen*	100,00%
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	50	persen	50,00%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	18	*laporan*	100,00%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	50	persen	50,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*laporan*	*13*	*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	19	*laporan*	100,00%
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	34	jenis	13	jenis	13	jenis	0	jenis	0,00%	13	jenis	38,24%
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		*dokumen*	*9*	*dokumen*	*5*	*dokumen*	*0*	*dokumen*	0,00%	9	*dokumen*	100,00%
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	150	persen	150,00%
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	16	jenis	7	jenis	7	jenis	0	jenis	0,00%	7	jenis	43,75%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		*unit*	*21*	*unit*	*67*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	21	*unit*	100,00%
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	19	jenis	8	jenis	8	jenis	0	jenis	0,00%	8	jenis	42,11%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		*unit*	*10*	*unit*	*14*	*unit*	*0*	*unit*	0,00%	10	*unit*	100,00%
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	150	persen	150,00%
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	150	persen	150,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	18	*laporan*	100,00%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	150	persen	150,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*6*	*laporan*	50,00%	18	*laporan*	100,00%
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50,00%	150	persen	150,00%
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00%	2	unit	200,00%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		*unit*	*1*	*unit*	*1*	*unit*	*1*	*unit*	100,00%	2	*unit*	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025					Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	67	unit	66	unit	45	unit	45	unit	100,00%	111	unit	165,67%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		*unit*	*66*	*unit*	*45*	*unit*	*45*	*unit*	100,00%	111	*unit*	100,00%
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	48	jenis	11	jenis	11	jenis	6	jenis	54,55%	17	jenis	35,42%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		*unit*	*210*	*unit*	*140*	*unit*	*70*	*unit*	50,00%	280	*unit*	100,00%
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	46	gedung	11	gedung	11	gedung	6	gedung	54,55%	17	gedung	36,96%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		*unit*	*12*	*unit*	*2*	*unit*	*1*	*unit*	50,00%	13	*unit*	100,00%

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data-data pada Tabel 2.1 dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2024 telah dilaksanakan melalui 6 program, 15 kegiatan, dan 37 subkegiatan dengan total indikator sebanyak 111 indikator yang terdiri dari 9 indikator program, 16 indikator kegiatan dan 86 indikator subkegiatan. Selanjutnya pada perkembangannya, Dinas Pertanian mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang pangan dan pertanian yang peruntukannya untuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh Pertanian) sebesar Rp114.000.000,00.
2) Secara umum capaian kinerja Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II cukup baik dimana terdapat 62 indikator (55,86% dari seluruh indikator yang ada) memiliki capaian yang sangat tinggi, 3 indikator (2,70% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang tinggi, 3 indikator (2,70% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sedang, 5 indikator (4,50% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang rendah, dan 38 indikator (33,33% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategis pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan cukup efektif dan efisien.
3) Dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2024, semua program memiliki capaian indikator yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai.
4) Dari 16 indikator kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat 4 indikator dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian tinggi, 1 indikator dengan capaian sedang, 1 indikator dengan capaian rendah, dan 8 indikator dengan capaian sangat rendah. Indikator dengan capaian yang sangat rendah yaitu Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab; Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan; Prosentase Administrasi Keuangan SKPD; Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD; Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum; Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor; Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor; dan Persentase Pemeliharaan aset OPD. Untuk indikator jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab dengan target 12 unit, terdapat efisiensi anggaran yang menyebabkan penyesuaian target output menjadi 8 unit. Hal ini berakibat pada mundurnya pelaksanaan kegiatan, sehingga akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Sedangkan, untuk indikator lainnya merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal tiap bulan dan triwulan sehingga capaian

indikator pada triwulan II yaitu 50% yang termasuk dalam kelas sangat rendah. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerjanya.

5) Dari 86 indikator kinerja subkegiatan, 50 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi, 1 indikator memiliki capaian yang tinggi, 2 indikator memiliki capaian sedang, 4 indikator memiliki capaian yang rendah, dan 29 indikator memiliki capaian yang sangat rendah. Indikator dengan capaian sangat rendah dapat disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan III dan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian indikatornya.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	39.011.720.834,64	11.802.444.208,00	30,25
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.749.734.841,80	10.296.365.609,00	43,35
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.790.000,00	0,00	0,00
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.540.000,00	0,00	0,00
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	48.250.000,00	0,00	0,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.897.285.254,00	8.327.249.952,00	44,07
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.660.625.600,00	8.248.099.952,00	44,20
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	231.926.000,00	79.150.000,00	34,13
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.423.800,00	0,00	0,00
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.886.054,00	0,00	0,00
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.423.800,00	0,00	0,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.610.906,80	105.940.490,00	21,91
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	12.846.500,00	21,41
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.115.809,80	72.217.590,00	44,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000,00	1.680.000,00	23,33
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.660.000,00	2.960.000,00	30,64
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000,00	7.725.000,00	49,05
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.511.400,00	8.511.400,00	100,00
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	218.373.697,00	0,00	0,00
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.423.912,00	0,00	0,00
2.07.05	Pengadaan Mebel	104.981.692,00	0,00	0,00
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.442.220,00	0,00	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.971.896.320,00	1.530.439.814,00	51,50
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.200,00	144.313.698,00	36,08
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.571.896.120,00	1.386.126.116,00	53,90
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.728.449,00	332.735.353,00	27,90
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050,00	11.658.650,00	29,21
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.257.689,00	141.361.030,00	44,28
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.474.845,00	61.597.110,00	36,56
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	665.085.865,00	118.118.563,00	17,76
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.644.155.099,33	536.245.655,00	5,56
2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.503.789.736,45	430.140.855,00	5,73
2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.489.318.185,65	103.135.455,00	6,93
2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.014.471.550,80	327.005.400,00	5,44
2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.291.509.759,00	104.869.800,00	8,12
2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.291.509.759,00	104.869.800,00	8,12
2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	380.821.311,60	0,00	0,00
2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	380.821.311,60	0,00	0,00
2.06	Penyedian Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	468.034.292,28	1.235.000,00	0,26
2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	468.034.292,28	1.235.000,00	0,26
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.881.584.827,00	141.254.312,00	3,64

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.881.584.827,00	141.254.312,00	3,64
2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.244.138.645,00	100.751.012,00	3,11
2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	637.446.182,00	40.503.300,00	6,35
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	743.911.449,52	540.074.392,00	72,60
2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	532.114.247,52	457.041.892,00	85,89
2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	532.114.247,52	457.041.892,00	85,89
2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	45.202.800,00	900.000,00	1,99
2.02.04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit	28.652.800,00	0,00	0,00
2.02.05	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	16.550.000,00	900.000,00	5,44
2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	166.594.402,00	82.132.500,00	49,30
2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	115.464.402,00	60.777.500,00	52,64
2.04.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	18.030.000,00	9.705.000,00	53,83
2.04.09	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	16.550.000,00	0,00	0,00
2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	16.550.000,00	11.650.000,00	70,39
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	152.281.842,00	35.749.500,00	23,48
2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	152.281.842,00	35.749.500,00	23,48
2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	127.712.826,00	35.749.500,00	27,99
2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	24.569.016,00	0,00	0,00
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	840.052.774,99	252.754.740,00	30,09
2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	840.052.774,99	252.754.740,00	30,09
2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	110.634.981,00	72.683.700,00	65,70
2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	599.377.779,99	137.641.040,00	22,96
2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	16.040.014,00	4.430.000,00	27,62
2.01.04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	114.000.000,00	38.000.000,00	33,33

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 16 kegiatan, dan 43 subkegiatan

pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp39.011.720.834,64. Dari anggaran tersebut, realisasi s.d. triwulan II adalah sebesar Rp11.802.444.208,00 (30,25%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp27.209.276.627 (69,75%). Rendahnya realisasi keuangan ini karena terdapat banyak paket pekerjaan yang sedang dalam proses pengadaan dan dijadwalkan pencairan maupun pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan, Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW II	2025
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	0,790%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,790%	0,780%	0,750%	0,798%
SASARAN :											
1. Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian (ton)	91.531	86.066,87	86.569,76	87.076,23	87.588,22	88.105,73	90.617,40	92.055,12	73.054,70	87.588,22
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72,00	72,20	72,40	72,60	72,80	76,55	78,55	80,00	78,55

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Renstra tahun 2021-2026 “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”. Pada triwulan II tahun 2025 kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku adalah 0,750%. Apabila dibandingkan dengan target Renja 2025 yaitu 0,798%, capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 93,98% dan apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu sebesar 0,8% maka termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 93,75%. Nilai persentase PDRB yang ada merupakan data sementara yang dapat diperoleh dari BPS Kota Semarang;
b. Pada Renstra tahun 2021-2026 memiliki 2 sasaran, yaitu:
    1) Sasaran 1 ”Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu ”jumlah produksi pertanian”. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah produksi pertanian sebesar 73.054,70 ton atau 83,41% dari target Renja tahun 2025. Tingkat capaian ini termasuk dalam kategori tinggi sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2025;
    2) Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian” memiliki 1 indikator yaitu “Nilai AKIP Dinas Pertanian”. Pada tahun 2024 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah 78,55. Nilai tersebut melampaui target pada Renja tahun 2024. Sedangkan hingga triwulan II tahun 2025, nilai AKIP Dinas Pertanian yaitu 80,00 dari target yaitu 72,60. Tingkat capaian ini termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase yaitu 110,19%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang berkaitan langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga diperlukan pencermatan realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW II	2025
1	Produktivitas pertanian per ha per tahun	ton/ha	-	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,85	6,82	6,76	6,70
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	-	-5	-5	-5	-5	-5	-88,21	-53,92	-6,38	-5
3	Sentra produk unggulan pertanian	kawasan	4	4	5	6	7	7	5	6	6	7
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan	kelurahan	85	117	132	147	162	177	177	177	177	177
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	persen	-	75	75	80	80	85	100	100	100	100
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	-	75	81,25	81,25	81,25	87,5	37,5	62,5	75	75

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Dalam Penyelenggaraan urusan Pertanian, pada periode RPJMD tahun 2021-2026 terdapat 6 Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Pertanian. Pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke-4 periode RPJMD 2021-2026, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu pada indikator ”Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular” dan ”Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Hal ini disebabkan karena penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Desease (LSD)* yang sempat menjadi wabah di tahun 2022 – 2023 belum sepenuhnya bisa diberantas.

Pada triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 3 indikator yang belum mencapai target Renja 2025 yaitu indikator ”Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular”, ”Sentra produk unggulan pertanian”, dan ”Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Pada indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, target yang dimiliki adalah menurunnya kasus sebanyak 5%, sedangkan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu baru menurun sebanyak 6,38%. Hal ini disebabkan oleh tingginya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular khususnya pada triwulan I yaitu sebanyak 86 kasus dari total 88 kasus sampai triwulan II. Pada indikator sentra produk unggulan pertanian memiliki target yaitu 7 kawasan, sedangkan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu 6 kawasan. Hal ini disebabkan karena 1 indikator yang belum terealisasi masih dalam progres pembentukannya. Sedangkan, pada indikator persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis memiliki target yaitu 81,25% dengan capaian indikator yaitu 75%. Hal ini karena masih terdapat banyak kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kota Semarang terutama penyakit mulut dan kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), dan *Septicaemia Epizootica* (SE). Tercatat sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat 88 kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada 4 kecamatan di Kota Semarang, yaitu Kecamatan Banyumanik, Mijen, Gunungpati, dan Tembalang. Namun, dengan adanya pelaporan yang aktif, kasus ini dapat ditindaklanjuti dan dikendalikan dengan baik sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2025.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis,

baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian menyebabkan penurunan luasan budidaya pertanian.
b. Pengembangan pertanian perkotaan sebagai solusi untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah keterbatasan lahan untuk budidaya Pertanian.
c. Dalam 5 tahun periode Renstra 2021-2026 pertanian perkotaan tumbuh pesat di Kota Semarang dimana dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang, seluruhnya telat melakukan praktek pertanian perkotaan dan menjadi kawasan pengembangan pertanian perkotaan.
d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian perlu ditingkatkan dan dioptimalkan penggunaannya untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
e. Perlunya peningkatan status kesehatan hewan untuk mencegah lebih dini penyebaran kejadian kasus penyakit hewan menular terutama yang strategis dan/atau bersifat zoonosis. Surveillans maupun pelaporan kasus harus lebih didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian di antaranya:

a. Terbatasnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
b. Masih rendahnya pengembangan sentra produk pertanian.
c. Belum optimalnya pengembangan pertanian perkotaan karena masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri dan belum berorientasi pasar.
d. Kurang optimalnya dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (sarana klinik hewan, puskeswan, BPP, pengendalian OPT, dll)
e. Masih rendahnya tingkat produktivitas pertanian dan pendapatan usaha karena kecilnya skala usaha tani.
f. Rendahnya perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian).
g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan *carrying capacity*.
h. Belum optimalnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan.
i. Adanya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) serta gangguan reproduksi ternak yang berdampak pada rendahnya produktivitas ternak.

j. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi, dan sarana maupun prasarana.
k. Menurunnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian.
l. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, kemandirian petani, serta pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi,.
m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

Permasalahan-permasalahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi lahan;
    2) Kota Semarang sebagai pusat perdagangan ternak terbesar di Jawa Tengah memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran zoonosis dari daerah asal ternak;
    3) Produk pertanian dari luar daerah mudah masuk ke Kota Semarang, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat bagi produk lokal;
    4) Dampak perubahan iklim global menyebabkan ketidakpastian dalam kontinuitas, jumlah, dan mutu hasil pertanian serta peternakan;
    5) Sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, seperti irigasi, jaringan air, jalan pertanian, dan kelembagaan belum berfungsi secara optimal;
    6) Masih dominannya penggunaan metode pertanian konvensional yang bergantung pada bahan kimia anorganik sebagai input produksi;
    7) Kemampuan kelembagaan petani dalam menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya masih lemah, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta sikap inovatif dalam mengembangkan usaha tani;
    8) Jumlah tenaga kerja terampil dan produktif yang berminat bekerja di sektor pertanian semakin menurun;
    9) Meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat menyebabkan tuntutan akan produk pertanian yang lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi
b. Peluang

1) Tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan asal hewan terus mengalami peningkatan;
2) Pasar pertanian semakin terbuka luas, khususnya dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendukung perdagangan bebas;
3) Minat investasi di sektor pertanian meningkat, ditandai dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis;
4) Kerja sama agribisnis antara petani dan pelaku usaha semakin berkembang melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.
5) Penerapan prinsip Sapta Usaha Tani melalui GAP dan SOP mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara intensif.
6) Dukungan dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur pertanian mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah.
7) Strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim memberi perlindungan terhadap keberlangsungan usaha pertanian.
8) Pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti pupuk organik, pestisida nabati, dan agens hayati terus digalakkan melalui kegiatan sekolah lapang.
9) Kemampuan dan pengetahuan petani ditingkatkan melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan pendidikan lapangan.
10) Modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian mendukung efisiensi kerja serta mengatasi minimnya tenaga kerja.
11) Promosi dan pengembangan komoditas unggulan daerah menjadi sarana untuk memperluas pasar hasil pertanian lokal.
12) Kebun dinas dikembangkan menjadi kawasan pertanian terpadu yang mendukung fungsi produksi, edukasi, riset, dan wisata, serta mendorong ekonomi lokal.
13) Peraturan tentang tata ruang dan LP2B menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif dari alih fungsi.
14) Model pertanian kota dikembangkan melalui pemilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan produktif yang sesuai dengan keterbatasan lahan.
15) Diversifikasi usaha tani dan peningkatan nilai tambah dilakukan melalui kegiatan pengolahan hasil dan penanganan pascapanen.
16) Kenaikan harga pangan yang berdampak pada inflasi menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi komoditas strategis seperti cabai dan bawang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

1) Terbatasnya lahan pertanian.
2) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian.
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
4) Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produk unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
5) Masih diperlukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
6) Peran kelembagaan pertanian belum berfungsi secara optimal.
7) Ancaman penyakit hewan menular strategis masih berisiko menurunkan hasil produksi peternakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.5.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kota Semarang, pada rancangan perubahan RKPD terdapat penambahan 1 sub kegiatan yaitu Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara. Sub kegiatan tersebut ada di dalam Renstra Dinas Pertanian 2021-2026, tetapi untuk Renja 2025 tidak ada alokasi untuk sub kegiatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan kebutuhan penyediaan prasarana pertanian terutama jalan pertanian yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi pangan direncanakan untuk dilakukan pembangunan / rehab jalan pertanian tahun 2026 sehingga di perubahan anggaran perlu dilakukan penyusunan DED terlebih dahulu.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9		10	11
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51.069,22	ton	10.489.670.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51.069,22	ton	7.840.027.406	
			produksi hasil peternakan	36.519,00	ton				produksi hasil peternakan	36.519,00	ton		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30	kelompok	8.239.236.128	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	28	kelompok	5.501.406.538	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13	ha	1.879.824.213	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13	ha	1.853.093.462	
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6	kelompok				Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6	kelompok		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	35	*laporan*				*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	29	*laporan*		
	Pendampingan Penggunaan Sarana	Kota Semarang	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6	kelompok	6.359.411.915	Pendampingan Penggunaan Sarana	Kota Semarang	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6	kelompok	3.648.313.076	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Pendukung Pertanian		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3	kegiatan		Pendukung Pertanian		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3	kegiatan		
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12	kali				Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12	kali		
			jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16	paket				jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16	paket		
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6	kelompok				jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6	kelompok		
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000	batang				Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000	batang		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*40*	*laporan*				*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*9*	*laporan*		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	68,75	persen	1.322.486.525	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	75,00	persen	1.337.927.082	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26	unit	1.322.486.525	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26	unit	1.337.927.082	
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2.000	batang				Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2.000	batang		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan	*6*	*dokumen*				*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	*6*	*dokumen*		

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
			Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60	persen	437.133.057	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60	persen	514.259.494	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12	laporan	437.133.057	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12	laporan	514.259.494	
			Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4	kelompok				Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4	kelompok		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*9*	*laporan*				*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*9*	*laporan*		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	100	ekor	490.814.292	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	100	ekor	486.434.292	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang	Kota Semarang	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16	kecamatan	490.814.292	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang	Kota Semarang	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16	kecamatan	486.434.292	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*380*	*ekor*		Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*380*	*ekor*		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38	ton/ ha	3.893.646.182	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38	ton/ ha	3.098.800.141	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	12	unit	3.893.646.182	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	8	unit	3.098.800.141	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	0	unit	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	16	unit	859.018.943	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11	unit	3.254.400.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9	unit	343.501.617	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	1	unit	639.246.182	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	26	unit	1.896.279.581	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	persen	1.084.748.876	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	persen	743.911.450	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14	keluraha n	717.994.145	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14	keluraha n	532.114.248	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	24	kali	717.994.145	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semaran g	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	24	kali	532.114.248	
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	3.500	ekor				Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	3.500	ekor		
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*12*	*laporan*				*Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*12*	*laporan*		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*	*12*	*laporan*		*Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kota Semaran g	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*	*12*	*laporan*		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2	kegiatan	58.600.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2	kegiatan	45.202.800	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kota Semarang	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3	laporan	36.800.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kota Semarang	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3	laporan	28.652.800	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2	laporan	21.800.000	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2	laporan	16.550.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95	persen	308.154.731	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95	persen	166.594.402	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100	persen	209.554.731	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100	persen	115.464.402	
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100	persen				Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100	persen		
			Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	0	laporan				Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	0	laporan		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*14*	*laporan*				*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*14*	*laporan*		

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Semarang	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	*35*	*unit usaha*	23.600.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Semarang	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	*35*	*unit usaha*	18.030.000	
	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kota Semarang	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	*35*	*produk*	55.000.000	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kota Semarang	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	*35*	*produk*	16.550.000	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	*35*	*unit usaha*	20.000.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	*35*	*unit usaha*	16.550.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80	persen	203.650.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80	persen	191.883.983	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7	kelompok	203.650.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7	kelompok	191.883.983	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3	kelompok	173.204.650	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3	kelompok	167.314.967	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Hortikultura, dan Perkebunan		*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*100*	*ha*		Hortikultura, dan Perkebunan		*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*100*	*ha*		
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	10	kelompok	30.445.350	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	10	kelompok	24.569.016	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	*20*	*ha*				*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*20*	*ha*		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33	kelompok	1.024.405.285	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33	kelompok	1.048.420.842	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55	persen	1.024.405.285	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55	persen	1.048.420.842	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8	kegiatan	250.830.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8	kegiatan	103.369.131	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk	5	unit				Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5	unit		

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
			penguatan kapasitas										
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400	orang	737.055.285	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400	orang	815.011.697	
			Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3	kegiatan				Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3	kegiatan		
			Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25	kelompok				Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25	kelompok		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	unit				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	unit		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100	persen	36.520.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100	persen	16.040.014	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	unit		
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Kota Semarang	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0	orang	0	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Kota Semarang	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	25	orang	114.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	24.095.995.030	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	21.800.604.795	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100	persen		DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100	persen		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27	dokumen	108.853.360	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27	dokumen	61.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	53.259.626	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	13.540.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	dokumen	5.593.734	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	dokumen	10.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	1	dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	1	dokumen	48.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	18.897.285.254	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	17.210.559.088	
			Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4	dokumen				Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4	dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100	persen	18.660.625.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100	persen	16.980.155.434	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*145*	*org/ bulan*				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*145*	*org/ bulan*		
	Penyediaan Administrasi	Kota Semarang	Persentase ASN pengelola	100	persen	231.926.000	Penyediaan Administrasi		Persentase ASN pengelola	100	persen	225.670.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Pelaksanaan Tugas ASN		kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang				Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*1*	*dokumen*				*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1*	*dokumen*		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	dokumen	1.423.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	dokumen	1.423.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	dokumen	1.886.054	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	dokumen	1.886.054	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1.423.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1.423.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	persen	659.014.924	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	persen	448.425.998	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Kota Semarang	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	jenis	60.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Kota Semarang	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	jenis	96.694.202	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	n Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1*	*paket*		n Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1*	*paket*		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11	jenis	175.143.227	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11	jenis	163.115.810	
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	*12*	*paket*				*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*12*	*paket*		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10	jenis	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10	jenis	10.780.000	
			Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	*4*	*paket*				*Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan*	*4*	*paket*		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	jenis	9.660.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	jenis	9.660.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12*	*dokumen*				*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12*	*dokumen*		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	persen	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	persen	15.750.000	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*12*	*laporan*				*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12*	*laporan*		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100	persen	125.838.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100	persen	52.290.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12*	*laporan*				*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12*	*laporan*		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13	jenis	218.373.697	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13	jenis	100.135.586	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*5*	*dokumen*				*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*5*	*dokumen*		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	142.423.912	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	33.026.939	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7	jenis	104.981.692	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	0	jenis	10.000	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*67*	*unit*				*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*0*	*unit*		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8	jenis	37.442.220	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8	jenis	33.016.939	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*14*	*unit*				*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*8*	*unit*		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	3.033.722.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	2.993.865.290	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100	persen	400.000.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100	persen	422.000.200	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12*	*laporan*				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12*	*laporan*		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100	persen	2.633.722.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100	persen	2.571.865.090	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12*	*laporan*				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12*	*laporan*		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100	persen	1.254.695.220	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100	persen	1.052.927.480	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	39.910.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	377.174.511	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	388.947.929	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Target Capaian		Perubahan Renja 2025	
	Operasional atau Lapangan						Operasional atau Lapangan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11	jenis	168.474.845	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11	jenis	168.474.845	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*140*	*unit*				*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*140*	*unit*		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/ rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11	gedung	665.085.865	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11	gedung	455.594.656	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit		

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter".

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian"

dengan indikator tujuan "Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator Jumlah produksi pertanian;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,80
SASARAN : 1. Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	Ton	92.060,12
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai	80,00

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam rumusan program yang dilaksanakan. Dalam merumuskan program pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Efisiensi terhadap belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2016-2021;
5. Belanja yang berasal dari dana perimbangan (DAU dan DAK) dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
6. Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, serta penyesuaian target output dengan adanya efisiensi angggaran.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai target kinerjanya di tahun 2025, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mendorong partisipasi aktif petani, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya (Perguruan Tinggi, TNI, PKK, Komunitas, dll) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian.
2. Meningkatkaan koordinasi dengan instansi vertical (Kementerian Pertanian dan dinas lingkup pertanian Provinsi Jawa Tengah) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang.
3. Optimalisasi sumber daya untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Desease (LSD).*
4. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian untuk mencapai target kinerja tahun 2025.

Selanjutnya untuk melaksanakan strategi-strategi di atas, akan diambil kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan kurang mendukung program prioritas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Memedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Memedomani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian tujuan “meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing” pada sasaran “terjaganya stabilitas harga barang dan jasa”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
1	*2*	*3*	*6*		*7*		*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51.069,22	ton	51.069,22	ton	51.069,22	ton	8.950.320.221	10.489.670.002	7.840.027.406	APBD, DAK, DIF	
		produksi hasil peternakan	36.519,00	ton	36.519,00	ton	36.519,00	ton					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30	kelompok	30	kelompok	28	kelompok	6.878.315.367	8.239.236.128	5.501.406.538	APBD, DAK, DIF	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13	ha	13	ha	13	ha	518.903.452	1.879.824.213	1.853.093.462	APBD, DAK, DIF	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6	kelompok	6	kelompok	6	kelompok					
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*35*	*laporan*	*35*	*laporan*	*29*	*laporan*					
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6	kelompok	6	kelompok	6	kelompok	6.359.411.915	6.359.411.915	3.648.313.076	APBD, DIF	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan					
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12	kali	12	kali	12	kali					
		jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16	paket	16	paket	16	paket					
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6	kelompok	6	kelompok	6	kelompok					
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000	batang	30.000	batang	30.000	batang					
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*40*	*laporan*	*40*	*laporan*	*9*	*laporan*					
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	68,75	persen	68,75	persen	75,00	persen	1.322.486.525	1.322.486.525	1.337.927.082	APBD	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26	unit	26	unit	26	unit	1.322.486.525	1.322.486.525	1.337.927.082	APBD	
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2.000	batang	2.000	batang	2.000	batang					
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*6*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	*6*	*dokumen*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60	persen	60	persen	60	persen	174.000.000	437.133.057	514.259.494	APBD	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	174.000.000	437.133.057	514.259.494	APBD	
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4	kelompok	4	kelompok	4	kelompok					
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*9*	*laporan*	*9*	*laporan*	*9*	*laporan*					
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	100	ekor	100	ekor	100	ekor	575.518.329	490.814.292	486.434.292	APBD, DIF	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16	kecamatan	16	kecamatan	16	kecamatan	575.518.329	490.814.292	486.434.292	APBD, DIF	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*380*	*ekor*	*380*	*ekor*	*380*	*ekor*					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38	ton/ha	6,38	ton/ha	6	ton/ha	2.834.200.000	3.893.646.182	3.098.800.142	APBD	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	12	unit	12	unit	8	unit	2.834.200.000	3.893.646.182	3.098.800.142	APBD	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara*	*0*	*unit*	*0*	*unit*	*16*	*unit*	0	0	859.018.943	APBD	
3.27.03.2.02.09	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*11*	*unit*	*11*	*unit*	*9*	*unit*	*2.614.400.000*	*3.254.400.000*	*343.501.617*	*APBD*	
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	1	unit	1	unit	26	unit	219.800.000	639.246.182	1.896.279.581		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	persen	-5	persen	-5	persen	900.044.839	1.084.748.876	743.911.450	APBD	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14	kelurahan	14	kelurahan	14	kelurahan	617.994.145	717.994.145	532.114.248	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	24	kali	24	kali	24	kali				APBD	
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	3.500	ekor	3.500	ekor	3.500	ekor					
3.27.04.2.01.08	*Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*617.994.145*	*717.994.145*	*532.114.248*	*APBD*	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	*58.600.000*	*58.600.000*	*45.202.800*		
3.27.04.2.02.04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	*3*	*laporan*	*3*	*laporan*	*3*	*laporan*	36.800.000	36.800.000	28.652.800		
3.27.04.2.02.05	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	*2*	*laporan*	*2*	*laporan*	*2*	*laporan*	21.800.000	21.800.000	16.550.000		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95	persen	95	persen	95	persen	223.450.694	308.154.731	166.594.402	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100	persen	100	persen	100	persen	124.850.694	209.554.731	115.464.402	APBD	
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100	persen	100	persen	100	persen					
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*14*	*laporan*	*14*	*laporan*	*14*	*laporan*					
3.27.04.2.02.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	35	unit usaha	35	unit usaha	*35*	unit usaha	23.600.000	23.600.000	18.030.000		
3.27.04.2.02.09	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	35	produk	35	produk	*35*	produk	55.000.000	55.000.000	16.550.000		
3.27.04.2.02.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35	unit usaha	35	unit usaha	*35*	unit usaha	*20.000.000*	*20.000.000*	*16.550.000*		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80	persen	80	persen	80	persen	203.650.000	203.650.000	191.883.983	APBD	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7	kelompok	7	kelompok	7	kelompok	203.650.000	203.650.000	191.883.983	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3	kelompok	3	kelompok	3	kelompok	173.204.650	173.204.650	167.314.967	APBD	
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*100*	ha	*100*	ha	*100*	ha					
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	10	kelompok	10	kelompok	10	kelompok	30.445.350	30.445.350	24.569.016	APBD	
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani	*20*	Ha	*20*	Ha	*20*	Ha					
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33	kelompok	33	kelompok	33	kelompok	824.405.285	1.024.405.285	1.048.420.842	APBD, DIF	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55	persen	55	persen	55	persen	824.405.285	1.024.405.285	1.048.420.842	APBD, DIF	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8	kegiatan	8	kegiatan	8	kegiatan				APBD	
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	*5*	unit	*5*	unit	*5*	unit	*250.830.000*	*250.830.000*	*103.369.131*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400	orang	400	orang	400	orang	537.055.285	737.055.285	815.011.697	APBD, DIF	
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan					
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25	kelompok	25	kelompok	25	kelompok					
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*25*	*unit*	*25*	*unit*	*25*	*unit*					
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100	persen	100	persen	100	persen	36.520.000	36.520.000	16.040.014	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*3*	*unit*	*3*	*unit*	*3*	*unit*					
3.27.07.2.01.06	*Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian*	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	*0*	*orang*	*0*	*orang*	*25*	*orang*	*0*	*0*	*114.000.000*		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	100	persen	100	persen	24.095.995.030	24.095.995.031	21.800.604.795	APBD, DAU, DIF	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100	persen	100	persen	100	persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen	100	persen	100	persen					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27	dokumen	27	dokumen	27	dokumen	108.853.360	108.853.360	61.800.000	APBD	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	53.259.626	53.259.626	13.540.000	APBD	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	20	dokumen	20	dokumen	21	dokumen	5.593.734	5.593.734	10.000	APBD	
3.27.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	APBD	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	100	persen	100	persen	19.596.212.654	18.897.285.254	17.210.559.088	APBD, DAU	
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen					
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100	persen	100	persen	100	persen	19.359.553.000	18.660.625.600	16.980.155.434	APBD, DAU	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*145*	*org/bulan*	*145*	*org/bulan*	*145*	*org/bulan*					
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100	persen	100	persen	100	persen	231.926.000	231.926.000	225.670.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*					
3.27.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*	*2*	*dokumen*	*2*	*dokumen*	*2*	*dokumen*	*1.423.800*	*1.423.800*	1.423.801	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*4*	*dokumen*	*4*	*dokumen*	*4*	*dokumen*	1.886.054	1.886.054	1.886.054	APBD	
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	1.423.800	1.423.800	1.423.800	APBD	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	persen	100	persen	100	persen	659.014.924	659.014.924	448.425.998	APBD	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	jenis	11	jenis	11	jenis	60.000.000	60.000.000	96.694.202	APBD	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*1*	*paket*	*1*	*paket*	*1*	*paket*					
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11	jenis	11	jenis	11	jenis	175.143.227	175.143.227	163.115.810	APBD	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*12*	*paket*	*12*	*paket*	*12*	*paket*					
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10	jenis	10	jenis	10	jenis	30.000.000	30.000.000	10.780.000	APBD	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*4*	*paket*	*4*	*paket*	*4*	*paket*					
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	jenis	3	jenis	3	jenis	9.660.000	9.660.000	9.660.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12*	*dokumen*	*12*	*dokumen*	*12*	*dokumen*					
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	40.000.000	40.000.000	15.750.000	APBD	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*					
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	125.838.000	125.838.000	52.290.400	APBD	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*					
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13	jenis	13	jenis	13	jenis	218.373.697	218.373.697	100.135.586	APBD	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*5*	*dokumen*	*5*	*dokumen*	*5*	*dokumen*					
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	100	persen	100	persen	142.423.912	142.423.912	33.026.939	APBD	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7	jenis	7	jenis	0	jenis	104.981.692	104.981.692	10.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*67*	*unit*	*67*	*unit*	*0*	*unit*					
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8	jenis	8	jenis	8	jenis	37.442.220	37.442.220	33.016.939	APBD	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*14*	*unit*	*14*	*unit*	*8*	*unit*					
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	100	persen	100	persen	2.334.794.960	3.033.722.360	2.993.865.290	APBD	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100	persen	100	persen	100	persen	400.000.200	400.000.200	422.000.200	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*					
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100	persen	100	persen	100	persen	193.479.760	2.633.722.160	2.571.865.090	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*					
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100	persen	100	persen	100	persen	1.254.695.220	1.254.695.220	1.052.927.480	APBD, DIF	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1*	*unit*	*1*	*unit*	*1*	*unit*	43.959.999	43.959.999	39.910.050	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (*Outcome*), Kegiatan (*Output*), dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target						Pagu Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025		APBD TA 2025		Perubahan Renja 2025		Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*45*	*unit*	*45*	*unit*	*45*	*unit*	377.174.511	377.174.511	388.947.929	APBD	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11	jenis	11	jenis	11	jenis	168.474.845	168.474.845	168.474.845	APBD	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*140*	*unit*	*140*	*unit*	*140*	*unit*					
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11	gedung	11	gedung	11	gedung	665.085.865	665.085.865	455.594.656	APBD, DIF	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*2*	*unit*	*2*	*unit*	*8*	*unit*					

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

26. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

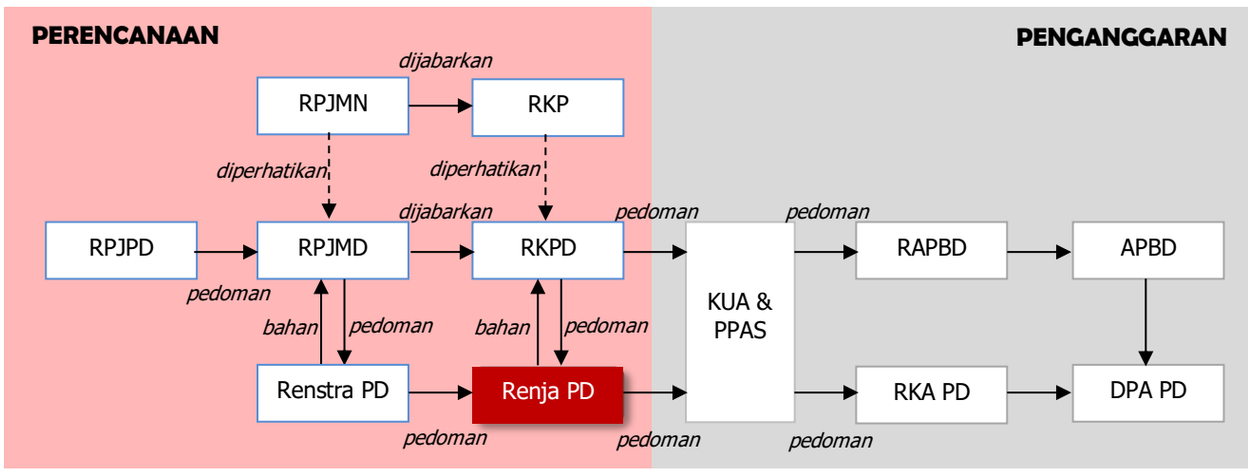

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas

Perdagangan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional berupa Asta Cita; (2) menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih tahun 2025-2030; (3) adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024; serta (4) adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
q. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta

mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut,

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	80%
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	50%	100%	80%
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	80%
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	50%	12 Dokumen	80%
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	7 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	80%
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	80%
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	80%
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	8 Laporan	80%
3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/bulan	145 Orang/bulan	142 Orang/bulan	142 Orang/bulan	100%	287 Orang/bulan	80%
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	80%
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	80%
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	80%
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	80%
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	6 Paket	60%
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	6 Paket	8 Paket	4 Paket	50%	10 Paket	80%
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	18 Paket	80%
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	5 Paket	3 Paket	2 Paket	67%	7 Paket	80%
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	80%
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	80%
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	80%
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0%	50 Unit	80%
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	30 Unit	0 Unit	0%	50 Unit	80%
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	13 Unit	100 Unit	7 Unit	7%	20 Unit	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	80%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	80%
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	100 Persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	80%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	28 pasar	26 pasar	26 pasar	18 pasar	69%	44 Pasar	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	28 pasar	26 pasar	26 pasar	18 pasar	69%	44 Pasar	80%
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	80%
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	50 Unit	50 Unit	24 Unit	48%	74 Unit	80%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	52 pasar	24 pasar	48%	76 Pasar	80%
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	80%
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.80 Persen	9.97 Persen	3.93 Persen	8.58 Persen	100%	18.55 Persen	80%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%	100 Persen	80%
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	80%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1817484281 US$	1443742642US$	1713153249 US$	508832903 US$	30%	1952575545 US$	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	30 persen	36 persen	12 persen	33%	42 Persen	80%
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	60%	16 Pelaku Usaha	80%
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	150 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	60%	16 Pelaku Usaha	80%
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	10 Produk	6 Produk	60%	16 Produk	80%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91 Persen	84.98 Persen	86 Persen	54.81 Persen	64%	139.79 Persen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91 Persen	84.97 Persen	86 persen	21.5 Persen	25%	106.47 Persen	80%
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110 Unit	62184 Unit	62780 Unit	31390 Unit	50%	93574 Unit	75%
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	180 Orang	80%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60 Persen	30 Persen	40 Persen	15 Persen	38%	45 Persen	75%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500 orang	100 orang	100 orang	50 orang	25%	150 Orang	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	30 UMKM	10 UMKM	5 UMKM	50%	35 UMKM	80%
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	30 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	100%	40 UMKM	80%

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah mencapai 100% antara lain “evaluasi kinerja perangkat daerah”, “koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD”, “koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD”, “penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran”, dan “penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor”.

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing/efisiensi anggaran yaitu “penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah”, “pemeliharaan mebel”, “pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya”, “penyediaan sarana distribusi perdagangan”, “fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan”, “pameran dagang nasional” dan “misi dagang bagi produk ekspor unggulan”. Ketujuh sub kegiatan ini pendukung dari indikator sasaran RPJMD Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dengan terefocusing nya tujuh sub kegiatan tersebut maka Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak akan mencapai target yang di tentukan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 setelah mengalami efisiensi yang tertuang dalam Pergeseran APBD Kota Semarang. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.273.321.091	15.713.566.767	39,02%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.200.000	0	0,00%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	19.200.000	-	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	-	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	-	0,00%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	0,00%
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	-	0,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.051.821.760	11.976.254.939	41,22%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.656.229.760	11.816.434.939	41,24%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	395.592.000	159.820.000	40,40%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	0,00%

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	-	0,00%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	0,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.339.097	183.594.947	23,08%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.926.150	9.053.750	91,21%
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	104.548.347	-	0,00%
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.041.630	7.585.000	25,25%
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.642.470	55.000.000	44,13%
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	227.960.000	11.897.382	5,22%
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.500.000	49.626.975	35,83%
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.720.500	50.431.840	31,58%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.516.948.685	2.999.153.035	39,90%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.707.229.065	2.601.995.860	38,79%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809.719.620	397.157.175	49,05%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.890.011.549	554.563.846	19,19%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.596.150	127.519.846	50,28%
23	Pemeliharaan Mebel	19.998.000	-	0,00%
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.972.399	210.503.000	63,79%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.286.445.000	216.541.000	9,47%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	109.432.990	43.098.542	39,38%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	109.432.990	43.098.542	39,38%
26	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	109.432.990	43.098.542	39,38%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	27.800.018.998	7.264.487.839	26,13%
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21.403.108.097	4.187.518.173	19,57%
27	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.922.611.147	654.631.646	5,99%
28	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.480.496.950	3.532.886.527	33,71%
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6.396.910.901	3.076.969.666	48,10%
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.929.821.060	2.231.783.564	45,27%
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.467.089.841	845.186.102	57,61%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	227.287.434	181.526.712	79,87%
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	227.287.434	181.526.712	79,87%

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
31	sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	227.287.434	181.526.712	79,87%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	302.650.464	58.500	0,02%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	302.650.464	58.500	0,02%
32	Pameran Dagang Nasional	189.061.494	-	0,00%
33	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	9.914.200	-	0,00%
34	Peningkatan Citra Produk Ekspor	103.674.770	58.500	0,06%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	938.442.856	437.703.074	46,64%
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	938.442.856	437.703.074	46,64%
35	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	624.898.632	292.783.074	46,85%
36	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	313.544.224	144.920.000	46,22%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	700.280.410	430.537.996	61,48%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	700.280.410	430.537.996	61,48%
37	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	505.468.010	298.882.200	59,13%
38	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	194.812.400	131.655.796	67,58%
JUMLAH		70.351.434.243	24.070.979.430	34,22%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebesar Rp 70.351.434.243 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 24.070.979.430. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 46.280.454.813.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang

tercantum pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI				PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	Jumlah PDRB sub sektor perdagangan	23.538.464,13 juta rupiah	26.949.187,59 juta rupiah	28.835.630,72 juta rupiah	30.854.124,87 juta rupiah	33.013.913,61 juta rupiah	25.19 milyar rupiah	26.95 milyar rupiah	32.584.490 juta rupiah	N/A	30.854.124,87 juta rupiah
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	38%	40%	42%	44%	46%	38%	38%	34,61%	34,61 %	44%
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	3%	3%	4%	4%	4%	19,42 %	58,74%	-58,53%	0,91%	4%
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11 %	4,09 %	4,06 %	4,00 %	3,80%	15,09 %	11,54%	9,97 %	5,77%	4,00%
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10,42%	-2,51 %	18,34 %	5%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah PDRB sub sektor perdagangan”, telah dapat terealisasi sesuai target, dimana realisasinya sebesar 34.642.420 juta rupiah dari target sebesar 30,854,124.87 juta rupiah;
b. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 34,61% dari target sebesar 44%;
c. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koefisien variasi harga antar waktu”, tidak dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 5,77% dari target sebesar 4,00% (target bersifat negatif dimana semakin kecil prosentase menunjukkan kinerja semakin baik);
d. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas” telah dapat terealisasi melebihi target, dimana realisasinya sebesar 18,32% dari target sebesar 4%;
e. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” telah dapat terealisasi sesuai target, dimana realisasinya sebesar 19,61% dari target sebesar 5%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki kinerja cukup baik dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 program yang dijabarkan dalam 38 sub kegiatan, sebanyak 32 sub kegiatan realisasi capaian sudah sesuai dengan target. Jadi secara umum kinerja Dinas Perdagangan Kota Semarang masih dalam level baik (memadai).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri;
2. Belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan;

3. Belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;
5. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

a. Tantangan:
    1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen;
    2) Persaingan perdagangan di dalam negeri belum sehat;
    3) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
    4) Banyak sawah dan perkebunan yang berubah fungsi.

b. Peluang:
    1) Permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat;
    2) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
    3) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan.

- Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

a. Tantangan:
    1) Adanya kecenderungan masih tingginya impor bahan baku atau penolong untuk kegiatan ekspor, sehingga perlu diupayakan tumbuhnya industri yang mendukung subtitusi impor;
    2) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (emerging market) termasuk produk dari Kota Semarang;
    3) Makin gencarnya isu lingkungan yakni adanya tuntutan negara maju agar produk yang masuk ke negaranya tidak merusak lingkungan;
    4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
    5) Masih banyak pengusaha yang belum menerapkan hasil - hasil penelitian dan pengembangan (Litbang)

perguruan tinggi sehingga produk-produk inovatif dan kreatif belum dikembangkan sesuai selera pasar.

b. Peluang
   1) Selain ASEAN, pasar non tradisional perlu dikembangkan untuk itu perlu dilakukan penetrasi ke pasar di negara-negara seperti : Amerika Latin maupun Amerika Tengah, Timur Tengah dan Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Rusia, Kawasan Australia dan Selandia Baru (kewilayahan pasar non tradisional;
   2) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (Dumping, Subsidy, Safeguard) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forumforum ekspor;
   3) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang.

- Perlindungan Konsumen

a. Tantangan
   1) Banyaknya arus masuk produk-produk barang dan jasa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif terkait produk-produk impor dan lokal yang sesuai SNI dan persyaratan teknis lainnya (Label dan MKG Berbahasa Indonesia);
   2) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen;
   3) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen.

b. Peluang
   1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia yang cukup dinamis;
   2) Regulasi/kebijakan perdagangan yang mempermudah investasi dan perijinan berusaha;
   3) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
   4) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi

terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya Selanjutnya juga perlu dijab.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
3. Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
4. Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaraan perusahaan secara online.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 persen	37.946.600.942	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 persen	37.946.600.942	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	19.511.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	19.511.900	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.200.000	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	150.000	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	150.000	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.000	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000	
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	1 dokumen	2.900	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	1 dokumen	2.900	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	26.287.966.479	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	26.287.966.479	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	25.942.977.479	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	25.942.977.479	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	344.980.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	344.980.000	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000	
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000	
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	1.449.688.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	1.449.688.760	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.926.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.926.150	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	483.080.440	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	483.080.440	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	22.307.370	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	22.307.370	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	134.542.470	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	134.542.470	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	476.611.830	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	476.611.830	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	138.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	138.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	184.720.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	184.720.500	
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	8.785.950.870	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	8.785.950.870	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.179.370.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.179.370.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.606.580.870	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.606.580.870	
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	1.403.482.933	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	1.403.482.933	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	253.596.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	253.596.150	
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	19.998.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	19.998.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	419.643.783	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	419.643.783	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	710.245.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	710.245.000	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen	109.432.990	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen	109.432.990	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	109.432.99	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	109.432.99	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	109.432.99	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	109.432.99	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	22.184.353.868	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	22.184.353.868	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	26 pasar	16.228.322.297	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	26 pasar	16.228.322.297	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	7.053.863.597	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	7.053.863.597	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	9.174.458.700	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	9.174.458.700	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	5.956.031.57	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	5.956.031.57	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	4.159.453.110	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	4.159.453.110	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	12 Dokumen	1.796.578.46	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	12 Dokumen	1.796.578.46	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 persen	227.287.434	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 persen	227.287.434	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	227.287.434	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	227.287.434	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	227.287.434	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	227.287.434	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor non migas	US$ 1713153	551.350.848	Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor non migas	US$ 1713153	551.350.848	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	551.350.84	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	551.350.84	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	264.850.294	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	264.850.294	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 pelaku usaha	168.530.200	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 pelaku usaha	168.530.200	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	117.970.354	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	117.970.354	
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 persen	859.842.856	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 persen	859.842.856	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen	859.842.856	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen	859.842.856	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	62780 Unit	636.598.632	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	62780 Unit	636.598.632	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	223.244.224	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	223.244.224	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 persen	700.280.410	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 persen	700.280.410	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	700.280.410	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	700.280.410	
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	499.468.010	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	499.468.010	
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	200.812.400	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	200.812.400	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan

Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen"

dengan indikator tujuan "Jumlah PDRB sub sektor perdagangan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan;
2. Peningkatan nilai ekspor non migas;
3. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Peningkatan kualitas perlindungan konsumen.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
2. Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas;
3. Persentase koefisien variasi harga antar waktu;
4. Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	Jumlah PDRB sub sektor perdagangan	Juta rupiah	30.854.124,87
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		77
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	44
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	persen	4
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	4,0
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	5

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perdagangan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi dan indikator sasaran berupa nilai ekspor dan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB.
3. pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	41.122.944.918	100 Persen	42.123.125.918	41.122.944.918	37.946.600.942	APBD Kota Semarang	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		100 Persen				APBD Kota Semarang	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen		100 Persen				APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	109.845.228	8 Dokumen	109.845.228	109.845.228	19.511.900	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	52.173.016	1 Dokumen	52.173.016	52.173.016	19.200.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.471.099	1 Dokumen	1.471.099	1.471.099	150.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	1.428.099	1 Dokumen	1.428.099	1.428.099	3.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.471.099	2 Dokumen	1.471.099	1.471.099	150.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1.428.099	1 Dokumen	1.428.099	1.428.099	3.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.873.816	3 Laporan	1.873.816	1.873.816	3.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	2.900	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	29.054.666.522	100 persen	30.240.145.762	29.054.666.522	26.287.966.479	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	28.656.229.760	142 Orang/bulan	29.841.709.00	28.656.229.760	25.942.977.479	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	395.592.000	12 Dokumen	395.592.000	395.592.000	344.980.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	948.254	1 Laporan	948.254	948.254	3.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	948.254	1 Laporan	948.254	948.254	3.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	948.254	1 Dokumen	948.254	948.254	3.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	1.197.039.507	100 persen	1.197.039.507	1.197.039.507	1.449.688.760	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.926.150	1 Paket	9.926.150	9.926.150	9.926.150	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.548.347	1 Paket	104.548.347	104.548.347	483.080.440	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	30.041.630	8 Paket	30.041.630	30.041.630	22.307.370	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	199.999.880	12 Paket	199.999.880	199.999.880	134.542.470	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	397.960.000	3 Paket	397.960.000	397.960.000	476.611.830	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	179.660.000	12 Laporan	179.660.000	179.660.000	138.500.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.903.500	12 Laporan	274.903.500	274.903.500	184.720.500	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	7.516.948.685	100 persen	7.331.650.445	7.516.948.685	8.785.950.870	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.707.229.06	12 Laporan	6.707.229.06	6.707.229.06	6.179.370.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.719.620	12 Laporan	624.421.380	809.719.620	2.606.580.870	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 Persen	3.244.444.976	100 Persen	3.244.444.976	3.244.444.976	1.403.482.933	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	607.999.976	50 Unit	607.999.976	607.999.976	253.596.150	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000	30 Unit	20.000.000	20.000.000	19.998.000	APBD Kota Semarang	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	330.000.000	100 Unit	330.000.000	330.000.000	419.643.783	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.286.445.000	1 Unit	2.286.445.000	2.286.445.000	710.245.000	APBD Kota Semarang	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen	116.621.990	100 persen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	APBD Kota Semarang	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	116.621.990	100 persen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	APBD Kota Semarang	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	116.621.990	1 Dokumen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	28.267.029.470	26 pasar	27.163.272.070	28.267.029.470	22.184.353.868	APBD Kota Semarang	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	26 pasar	21.425.203.470	26 pasar	21.255.942.070	21.425.203.470	16.228.322.297	APBD Kota Semarang	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	10.943.287.066	1 Unit	11.190.163.906	10.943.287.066	7.053.863.597	APBD Kota Semarang	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	10.481.916.404	50 Unit	10.065.778.164	10.481.916.404	9.174.458.700	APBD Kota Semarang	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	6.841.826.000	52 pasar	5.907.330.000	6.841.826.000	5.956.031.571	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	5.305.890.000	12 Dokumen	5.005.890.000	5.305.890.000	4.159.453.110	APBD Kota Semarang	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	1.535.936.000	12 Dokumen	901.440.000	1.535.936.000	1.796.578.461	APBD Kota Semarang	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 Persen	3.753.298.294	3.93 Persen	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	APBD Kota Semarang	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	3.753.298.294	100 persen	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	3.753.298.294	12 Laporan	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	APBD Kota Semarang	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	171315 3249 US$	497.776.580	171315 3249 US$	497.776.580	497.776.580	551.350.848	APBD Kota Semarang	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	497.776.580	36 persen	497.776.580	497.776.580	551.350.848	APBD Kota Semarang	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	265.687.000	10 Pelaku Usaha	265.687.000	265.687.000	264.850.294	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	113.445.610	10 Pelaku Usaha	113.445.610	113.445.610	168.530.200	APBD Kota Semarang	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	118.643.970	10 Produk	115.643.970	118.643.970	117.970.354	APBD Kota Semarang	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 Persen	1.138.486.600	86 Persen	1.000.000.000	1.138.486.600	859.842.856	APBD Kota Semarang	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 Persen	1.138.486.600	86 Persen	1.000.000.000	1.138.486.600	859.842.856	APBD Kota Semarang	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	62780 Unit	775.625.181	62780 Unit	637.138.581	775.625.181	636.598.632	APBD Kota Semarang	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	362.861.419	5 Orang	362.861.419	362.861.419	223.244.224	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 Persen	872.004.800	40 Persen	860.230.000	872.004.800	700.280.410	APBD Kota Semarang	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	872.004.800	100 orang	860.230.000	872.004.800	700.280.410	APBD Kota Semarang	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	656.880.000	10 UMKM	705.880.000	656.880.000	499.468.010	APBD Kota Semarang	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	215.124.800	10 UMKM	154.350.000	215.124.800	200.812.400	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.348		

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021- 2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

27. DINAS PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

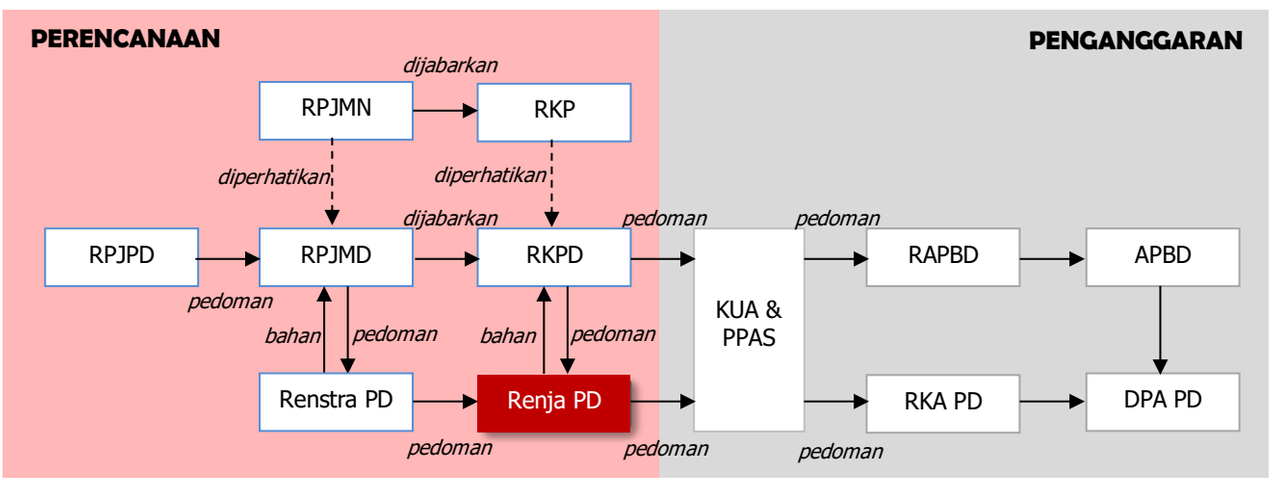

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, dengan

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh adanya Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025. Adanya dinamika perekonomian dan iklim yang terjadi baik di level nasional maupun regional tentunya mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2025. Selain itu, adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyelarasan terhadap rencana program serta kegiatan di tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perindustrian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perindustrian Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	12 Dokumen	80%
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133%	13 Dokumen	87%
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan	37 Orang/ bulan	95%	37 Orang/ bulan	95%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	42 Dokumen	70%
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	42 Dokumen	70%
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	210 Orang	70 Orang	0 Orang	0%	210 Orang	60%
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83 Paket	17 Paket	11 Paket	2 Paket	18%	19 Paket	23%
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	102 Paket	12 Paket	25 Paket	5 Paket	20%	17 Paket	17%
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	205 Paket	52 Paket	40 Paket	7 Paket	18%	59 Paket	29%
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 Paket	13 Paket	14 Paket	10 Paket	71%	23 Paket	38%
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	42 Laporan	70%
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	50 Laporan	30 Laporan	10 laporan	4 Laporan	40%	34 Laporan	68%
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	5 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	20%
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	20%
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	200%	3 Unit	60%
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	42 Laporan	70%
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Laporan	21 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	71%	26 Laporan	74%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	42 Laporan	70%
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	200%	3 Unit	60%
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	19 Unit	20 Unit	30 Unit	150%	49 Unit	49%
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	120 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	120 Unit	2400%
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1 Unit	3 Unit	1 Unit	33%	2 Unit	13%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	10 Dokumen	67%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	56%	32 Dokumen	71%
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	65 Dokumen	39 Dokumen	13 Dokumen	9 Dokumen	69%	48 Dokumen	74%
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	55 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	3 Dokumen	27%	36 Dokumen	65%
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri								

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	10 Dokumen	67%
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	13 Dokumen	65%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI								

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota								
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	17 Dokumen	68%
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	10 Dokumen	67%
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Data ke SIINas								

(Ambil dari Excel)
Sumber: Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD”, “Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD”, “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD” dan “Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran”,

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”, “Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah”, “Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN”, “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan”, “Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor”, “Penyediaan Bahan Logistik Kantor”, “Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan”, “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”, “Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD”, “Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota”, “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri”, “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri”, “Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri”, “Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas”, dan “Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas”.

Efisiensi terjadi karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah TA. 2025.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.955.365.510,79	Rp8.133.195.318,00	37,04%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp66.431.370,00	Rp5.683.800,00	8,56%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.671.600,00	Rp0,00	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.797.400,00	Rp0,00	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.796.900,00	Rp0,00	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2.363.680,00	Rp2.088.200,00	88,35%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp2.845.590,00	Rp0,00	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.706.200,00	Rp3.595.600,00	97,02%
	Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp48.250.000,00	Rp0,00	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.662.920.528,79	Rp3.439.625.339,00	51,62%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.539.895.168,79	Rp3.384.140.339,00	51,75%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp117.600.000,00	Rp52.620.000,00	44,74%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp2.550.000,00	Rp1.950.000,00	76,47%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.090.080,00	Rp558.000,00	51,19%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.090.080,00	Rp357.000,00	32,75%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp695.200,00	Rp0,00	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp8.636.360,00	Rp0,00	0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp50.000,00	Rp0,00	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp486.560.810,00	Rp172.749.988,00	35,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp41.641.697,00	Rp16.988.650,00	40,80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp74.956.173,00	Rp28.994.500,00	38,68%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp74.534.990,00	Rp32.655.000,00	43,81%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp22.404.450,00	Rp15.116.000,00	67,47%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp82.325.150,00	Rp33.632.300,00	40,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp190.648.350,00	Rp45.363.538,00	23,79%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp50.000,00	Rp0,00	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp410.100.000,00	Rp50.000.000,00	12,19%
	Pengadaan Mebel	Rp50.000,00	Rp0,00	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp50.000,00	Rp0,00	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp410.000.000,00	Rp50.000.000,00	12,20%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.584.578.360,00	Rp643.337.118,00	40,60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp383.441.200,00	Rp91.253.708,00	23,80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp73.726.360,00	Rp23.590.000,00	32,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.135.997.160,00	Rp528.493.410,00	46,52%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp756.299.000,00	Rp117.096.653,00	15,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp35.955.000,00	Rp12.524.800,00	34,83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp255.294.000,00	Rp94.571.853,00	37,04%
	Pemeliharaan Mebel	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp460.000.000,00	Rp10.000.000,00	2,17%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp50.000,00	Rp0,00	0,00%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp9.263.184.735,00	Rp2.229.090.720,00	24,06%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp9.263.184.735,00	Rp2.229.090.720,00	24,06%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp51.681.200,00	Rp14.609.360,00	28,27%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp363.027.422,00	Rp199.408.000,00	54,93%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp590.503.540,00	Rp179.124.000,00	30,33%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp553.735.800,00	Rp255.015.600,00	46,05%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp7.507.832.133,00	Rp1.580.058.760,00	21,05%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp196.404.640,00	Rp875.000,00	0,45%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp2.051.228.167,00	Rp1.059.485.700,00	51,65%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp2.051.228.167,00	Rp1.059.485.700,00	51,65%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp686.592.320,00	Rp551.730.100,00	80,36%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp1.364.635.847,00	Rp507.755.600,00	37,21%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp665.426.180,00	Rp416.126.000,00	62,54%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp665.426.180,00	Rp416.126.000,00	62,54%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Rp373.063.580,00	Rp180.052.000,00	48,26%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Rp277.371.120,00	Rp233.574.000,00	84,21%
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp14.991.480,00	Rp2.500.000,00	16,68%

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 10 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebesar Rp 21.955.365.510,80 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.133.195.318,00 (37,04%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 13.822.170.192,80 (62,96%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan fungsi sebagai sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026
Tujuan: "Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan"	Indikator Tujuan												
	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	27,54%	28,66%	28,7%	28,72%	28,74%	28,76%	27,54%	28,66%	28,7%	28,72%	28,35%	28,76%
Sasaran: - Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) - Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indikator Sasaran												
	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah	20	25	25	30	35	40	20	45	30	30	0	40
	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian	500	1500	2000	2500	3000	3500	3638	1557	3600	5258	6060	3500
	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	2,23%	5,03%	7,6%	8,89%	10,14%	11,35%	2,23%	6,4%	8,89%	2,31%	11.06%	11,35%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Terhadap Sektor Industri Pengolahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB", untuk triwulan II 2025 belum terealisasi sesuai data BPS yang terealisasi di awal tahun 2026
b. Sasaran "Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang" memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menegah" pada triwulan II 2025 realisasinya sebesar 0 IKM, untuk indikator ini akan terealisasi di triwulan III 2025;
    2) Indikator "Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian" pada triwulan II 2025 realisasinya sebesar 6060 Ijin dari target sebesar 3000 Ijin;
    3) Indikator "Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas" pada triwulan II 2025 realisasinya sebesar 11,06% dari target sebesar 10,14 %.
    4) Indikator "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian" pada triwulan II 2025 realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 100%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian , maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 11,06%.
2. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat.
3. Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2024 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang

perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya
2. Keterampilan teknik produksi dan manajemen yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM
3. Adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya
4. Pelaku Industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pamer produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi bersama. Memberikan fasilitasi *link and match* dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan *digital marketing* untuk mendukung pemasaran produk IKM.
2. Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas.
3. Memberikan sosialisasi dan melakukan monev data industri untuk mendorong pelaku industri memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga Dinas Perindustrian dapat memberikan pembinaan secara baik dan tepat.
4. Memberikan sosialisasi dan monev legalitas secara berkala sehingga pelaku industri tergerak untuk mendapatkan legalitas usahanya, sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.
5. Memberikan fasilitasi link and match dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan digital marketing untuk mendukung pemasaran produk IKM

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
    2) Permasalahan IKM terkait :
        a. Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
        b. Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
        c. Strategi pemaran yang belum tepat
        d. Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif

e. Banyaknya usaha IKM yang belum berijin

3) Me-link and match-kan IKM di kota Semarang dengan stakeholder sehingga produk IKM bisa terserap
4) Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
5) Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan start up dan sektor industri kreatif
6) Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang

b. Peluang

1) Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions), PIRT).
2) Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektonik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.
3) Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
4) Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
5) Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide–ide kreatif.
6) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
7) Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
8) Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.

9) Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
   a. Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
      Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
   b. Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (Harbor Toll)
      Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang
   c. Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port
      Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai berikut:

1. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah;
2. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang			21.955.365.511	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang			21.955.365.511	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.975.526.429	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.975.526.429	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN DInas Perindustrian	100%				Persentase Peningkatan Kinerja ASN DInas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 Dokumen	66.431.370	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 Dokumen	66.431.370	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.671.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.671.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.797.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.797.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.796.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.796.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.363.680	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.363.680	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.845.590	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.845.590	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3.706.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3.706.200	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	48.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	48.250.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.662.920.529	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.662.920.529	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	6.539.895.169	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	6.539.895.169	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.600.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.550.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Dinas Perindustrian	12 Laporan	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Dinas Perindustrian	12 Laporan	1.090.080	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	8.636.360	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	8.636.360	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	50.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	50.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	486.560.810	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	486.560.810	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	41.641.697	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	41.641.697	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	74.956.173	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	74.956.173	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	40 Paket	74.534.990	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	40 Paket	74.534.990	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Paket	22.404.450	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Paket	22.404.450	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	82.325.150	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	82.325.150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	190.648.350	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	190.648.350	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	0 Dokumen	50.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	0 Dokumen	50.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	410.100.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	410.100.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	50.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	50.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	0 unit	50.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	0 unit	50.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kantor atau Bangunan Lainnya			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	1 unit	410.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	1 unit	410.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.584.578.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.584.578.360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	383.441.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	383.441.200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	73.726.360	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	73.726.360	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.135.997.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.135.997.160	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	756.299.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	756.299.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	20 unit	255.294.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	20 unit	255.294.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	460.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	460.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	50.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.263.184.735	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.263.184.735	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8. 263.184.735	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8. 263.184.735	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	51.681.200	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	51.681.200	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	363.027.422	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	363.027.422	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dokumen	590.503.540	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dokumen	590.503.540	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	13 Dokumen	553.735.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	13 Dokumen	553.735.800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11 Dokumen	7.507.832.133	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11 Dokumen	7.507.832.133	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	196.404.640	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	196.404.640	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				2.051.228.167	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				1.604.881.150	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				2.051.228.167	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri				1.604.881.150	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	686.592.320	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	686.592.320	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah,	4 Dokumen	1.364.635.847	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah,	4 Dokumen	1.364.635.847	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	665.426.180	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	665.426.180	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dokumen	373.063.580	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dokumen	373.063.580	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	277.371.120	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	277.371.120	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	14.991.480	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	1 Dokumen	14.991.480	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Penyampaian Data ke SIINas			

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan

Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;

3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan"

dengan indikator tujuan "Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu

1. Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah;
2. Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian;
3. Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas;
4. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Persentase	28,74
Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil dan Menegah (IKM)	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah (IKM) Setiap Tahun	IKM	35
	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian	Ijin	3000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	Persentase	10,14
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persentase	100

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase kontribusi sektor industry pengolahan pada PDRB" dan indikator sasaran "Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah, Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian, Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas, Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp18.406.507.350	Rp18.571.626.200	Rp21.955.365.511
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp53.141.600	Rp53.141.600	Rp4.671.600
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp1.797.400	Rp1.797.400	Rp1.797.400
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.796.900	Rp2.796.900	Rp2.796.900
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.363.680	Rp2.363.680	Rp2.363.680

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.845.590	Rp2.845.590	Rp2.845.590
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp3.706.200	Rp3.706.200	Rp3.706.200
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp48.250.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	39 Orang/bulan	Rp6.915.728.000	Rp6.805.418.440	Rp6.539.895.169
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp249.684.000	Rp249.684.000	Rp117.600.000
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp7.722.128	Rp7.722.128	Rp2.550.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp1.090.080	Rp1.090.080	Rp1.090.080
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp1.090.080	Rp1.090.080	Rp1.090.080
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp695.200	Rp695.200	Rp695.200
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	70 Orang	Rp148.000.000	Rp148.000.000	Rp50.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	11 Paket	11 Paket	Rp31.681.697	Rp31.681.697	Rp41.641.697
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	25 Paket	25 Paket	Rp64.996.173	Rp64.996.173	Rp74.956.173

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	40 Paket	40 Paket	40 Paket	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp74.534.990
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	Rp47.268.982	Rp47.268.982	Rp22.404.450
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp73.085.150	Rp73.085.150	Rp82.325.150
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Rp206.040.000	Rp206.040.000	Rp190.648.350
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	Rp173.749.188	Rp173.749.188	Rp50.000
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	Rp12.791.918	Rp12.791.918	Rp50.000
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	Rp702.705.337	Rp702.705.337	Rp50.000
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp110.000.000	Rp110.000.000	Rp410.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp383.441.200
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp73.726.360
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp1.009.128.800	Rp1.119.438.360	Rp1.135.997.160
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp39.603.603	Rp39.603.603	Rp35.955.000
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Rp288.504.494	Rp288.504.494	Rp255.294.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3 Unit	Rp110.000.000	Rp110.000.000	Rp460.000.000
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri							
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp51.681.200
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp363.027.422
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	19 Dokumen	9 Dokumen	Rp1.000.000.000	Rp854.049.500	Rp590.503.540

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	13 Dokumen	Rp620.000.000	Rp630.000.000	Rp553.735.800
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen	Rp2.780.000.000	Rp2.925.950.500	Rp7.507.832.133
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp196.404.640
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	Rp1.074.881.150	Rp630.000.000	Rp686.592.320
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	Rp530.000.000	Rp1.130.000.000	Rp1.364.635.847

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
		menjadi kewenangan pemerintah pusat						
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp373.063.580
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp306.360.000	Rp306.360.000	Rp277.371.120
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp14.991.480

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

28. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

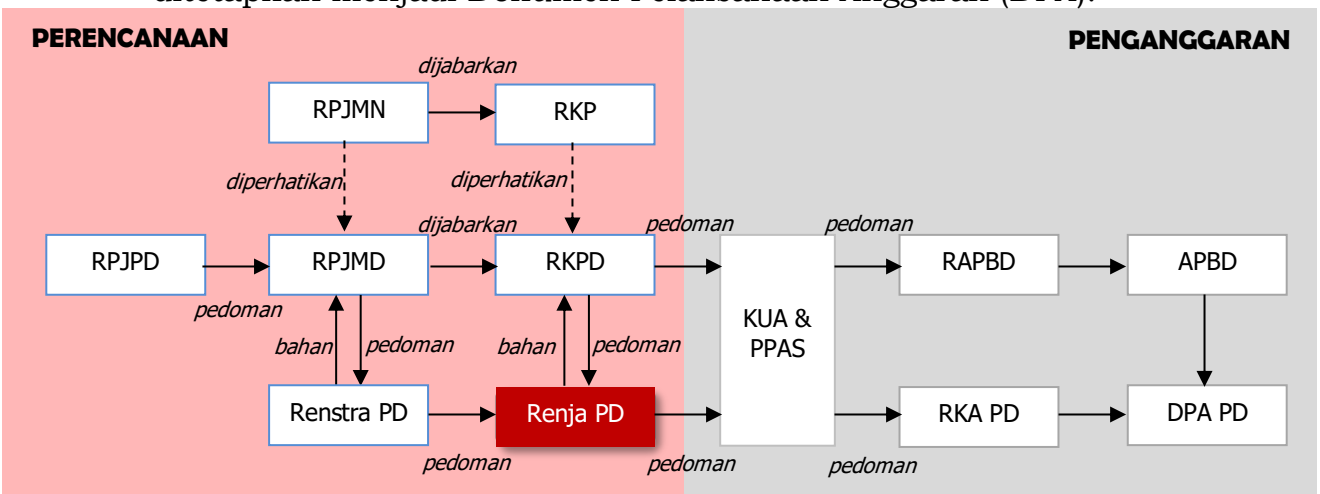

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban

untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);

p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang;

q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);

s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00 %	50.00%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 kecamatan	16.00 kecamatan	16.00 kecamatan	16 kecamatan	100.00%	16 kecamatan	100.00%
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100.00 %	100.00%	2.00 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50.00%
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.00 %	100.00 %	2.00 dokumen	1.dokumen	50%	1 dokumen	50.00 %
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100.00 %	100.00 %	5 dokumen	3 dokumen	60%	3 dokumen	60.00%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah	5.00 %	60.00 %	70.00 %	40.00 %	57%	40%	57%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang dan Kepala Daerah							
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5.00 %	100.00 %	80.00 %	40.00 %	50.00%	40.00 %	50.00%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.61 Dokumen	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	5 Kegiatan	50%	5 Kegiatan	50%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	6.00 kegiatan	67.00%	6.00 kegiatan	67.00%
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.00 %	13.00 dokumen	13.00 Dokumen	9 dokumen	70.00%	9 dokumen	70.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100.00 %	11 dokumen	5 Dokumen	8 dokumen	160.00%	8 dokumen	160.00%
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	100.00 %	7 dokumen	5 Dokumen	4 dokumen	80.00%	4 dokumen	80.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
		Kearsipan, Trantibum Linmas							
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	133.00 %	4.48	128 %	4.43	100%	4.43	100%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	133.00 %	100%	100.00%	72.70%	72.70%	72.70%	72.70%
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	133.00 %	697.00	565 Dokumen	393 Dokumen	70.00%	393 Dokumen	70.00%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	133.00 %	92.00	55 Kasus	5 Kasus	9.00%	5 Kasus	9.00%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	133.00 %	2207.00	550 Dokumen	74 Dokumen	14.00%	74 Dokumen	14.00%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah	5.00 %	60.00%	70%	40%	57%	40%	57%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
		Kota Semarang dan Kepala Daerah							
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.05 Dokumen	25.00 Dokumen	20 Dokumen	5 Dokumen	25%	5 Dokumen	25%
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7.06 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	1 Dokumen	33%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100.00 dokumen	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40.00 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	38.00%	3 dokumen	38.00%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	30.00 dokumen	8 dokumen	8 laporan	2 laporan	25.00%	2 laporan	25.00%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.00 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50.00%	4 dokumen	50.00%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0.00%	0 dokumen	0.00%
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0.00%	0 dokumen	0.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00	100.00 %	100.00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	6 Laporan	50.00%	6 laporan	50.00%
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	6 Laporan	50.00%	6 laporan	50.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1150.00 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50.00%	6 dokumen	50.00%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.00 Kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50.00%	6 dokumen	50.00%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	125.00 Kegiatan	220 orang	220 orang	110 orang	50.00%	110 orang	50.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00 dokumen	6 dokumen	100%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3.00 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	60.00%	3 dokumen	60.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0%	0%	0%	0%
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0%	0%	0%	0%
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	100.00%	100.00 %	25.00%	25.00%	25.00%	25%
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0%	1.00 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0%	1.00 dokumen	0%
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	1.00 dokumen	100.00%
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0%	0.00 dokumen	0%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00%	100.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrai keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	100%	100.00%	50.00 %	50.00%	50.00 %	50.00%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	100.00 %	276 orang/ bulan	276 orang/ bulan	71.00%	276 orang/ bulan	71.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 %	100.00 %	1.00 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	100.00 %	1.00 laporan	1.00 laporan	100%	1.00 laporan	100%
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.00 %	100.00 %	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00%
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (RT)	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen				

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Keuangan)	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00 dokumen	100.00%	2.00 dokumen	3 dokumen	50.00%	3 dokumen	50.00%
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00 dokumen	100.00%	3.00 laporan	1 laporan	33.00%	1 laporan	33.00%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00%	4 paket	3 paket	75.00%	3 paket	75.00%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.00 jenis	3 paket	4 paket	3 paket	75.00%	3 paket	75.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00%	100.00 %	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	75.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00%	0.00 %	0.00%
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 %	200 orang	200 orang	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100%	100.%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %		100%				
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.00 jenis	9.00 paket	6 paket	3 paket	50.00%	3 paket	50.00%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	70.00 jenis	6.00 paket	5 paket	3 paket	60.00%	3 paket	60.00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22.00 jenis	5.00 paket	5 paket	2 paket	40.00%	2 paket	40.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00%	50.00 %	50.00%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00%	100.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00%	50.00 %

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 %	77.00 %	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 %	100.00 %	14 laporan	7 laporan	50.00%	7 laporan	50.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00%	100.00 %				
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00 jenis	3.00 dokumen	3.00 dokumen	2.00 dokumen	67.00%	2.00 dokumen	67.00%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %		100.00 %				
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2.00 jenis	-	3.00 unit	0.00 unit	0.00%	0.00 unit	0.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
	Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan							
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00 jenis	25.00 unit	1 unit	0.00 unit	0.00%	0.00 unit	0.00%
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00 jenis	186 unit	720 unit	385 unit	53.00%	385 unit	53.00%
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00 jenis	115.00 unit	153 unit	90 unit	58.00%	90 unit	58.00%
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.00 jenis	-	1.00 unit	1 unit	100.00%	1 unit	100.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00%	50.00 %	50.00%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100%	100.00 %	50.00 %	50.00%	50.00 %	50.00%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 %	100.00%	12 laporan	6 laporan	50.00%	6 laporan	50.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025		
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 %	3 laporan	3 laporan	1 laporan	33.3%	1 laporan	33.3%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 %	100.00%	12 laporan	6 laporan	50.00%	6 laporan	50.00%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 %	100.00%	12 laporan	6 laporan	50.00%	12 laporan	6 laporan	50.0
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100%	1100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100%	100%					
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 %	4 unit	4 unit	2 unit	50.00%	2 unit	50.00%	

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
	Kendaraan Dinas Jabatan								
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan genset yang dipelihara	100.00 %	221.00 unit	149 unit	77 unit	52.00%	77 unit	52.00%
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 %	1500.00 unit	1500 unit	823 unit	55.00%	823 unit	55.00%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100.00 %	14.00 unit	16 unit	9 unit	56,25%	9 unit	56,25%
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	740.00 unit	1140 unit	611 unit	54.00%	611 unit	54.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	910.00 unit	807 unit	347 unit	43.00%	347 unit	43.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.00 %	100.00%	100.00%	2 orang/bulan	71.00%	2 orang/bulan	71.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %		100%				
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %		100%				

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26.00 jenis	24.00 paket	12 paket	6 paket	50.00%	6 paket	50.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %		100%				
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.00 %	100.00%	2 orang/bulan	2 orang/bulan	67.00%	2 orang/bulan	67.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %		100%				
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %		100%				

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	10.00 paket	12 paket	6 paket	50.00%	6 paket	50.00%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	1.00 paket	12 paket	6 paket	50.00%	6 paket	50.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	00.00 OPD		45 OPD				
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00 indeks		89.00 indeks				
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.00 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0.00%	0 dokumen	0.00%
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.00 Dokumen	1 dokumen	2.00 laporan	1 dokumen	50.00%	1 dokumen	50.00%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00 Dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	0 dokumen	0.00%	0 dokumen	0.00%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5.00 %	100.00%	80.00 %	100.00%	125.00%	100.00%	125.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5.00 %	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	165.01 dokumen	20.00 dokumen	14 dokumen	0	0%	0	0%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100.00 %	100.00%	12.00 laporan	6 laporan	50.00%	6 laporan	50.00%
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100.00 %	100.00%	12.00 laporan	6 laporan	50.00%	6 laporan	50.00%

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9= 5+7	10= 9/4
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100.00 %	100.00%	12.00 laporan	6 laporan	50.00%	6 laporan	50.00%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial” , “Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD”, “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD”, “Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya”.

Mayoritas Sub kegiatan pada Sekretariat Daerah yang mengalami efisiensi anggaran, salah satunya pada Bagian Administrasi yaitu “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”, “Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan”,” Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan”, “Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”, “Penyelenggaraan Wali Data Sektoral Daerah”.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Triwulan II 2025

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Hukum	4.263.922.626	1.850.525.850	43,40
2.	Tata Pemerintahan	3.070.891.695	1.403.335.870	45,70
3.	Organisasi	1.727.147.882	985.474.721	57,06
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	4.778.379.916	1.175.961.254	24,61
5.	Perekonomian dan SDA	4.046.058.960	961.380.679	23,76
6.	Administrasi Pembangunan	664.167.618	145.431.664	21,90
7.	Kesejahteraan Rakyat	51.824.118.521	14.506.133.669	27,99
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	1.646.667.894	318.115.323	19,32

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	22.745.499.934	4.1.25.876.420	18,14
10.	Tata Usaha	26.694.127.162	8.818.374.102	33,03
11.	Rumah Tangga	61.117.057.321	17.597.336.176	28,79
12.	Keuangan	45.505.144.080	31.061.311.456	44,27
	JUMLAH	256.066.051.333	72.034.772.229	28,13

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 20 kegiatan dan 91 sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 256.066.051.333,-, dari anggaran tersebut, sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 72.034.772.229,- atau sebesar 28,13 %, Adapun sisa anggaran yang belum digunakan Adalah Rp 156.048.411.380,-.

.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrastif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut.dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Sampai Dengan TW II 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 tw ii	2025
Tujuan :												
Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	72,68	72,68	84.14	89.21	78,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	88,63	91,02	90.59	90.59	89,00
	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>70/ BB	>72/ BB	>74/ BB	>76/ BB	>78/ BB	>80/ A	70,35	71,32	73.12	73.12	>78/ BB
	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,44/ ST	3,45/ ST	3,46/ ST	3,47 / ST	3,48 / ST	3,49 / ST	3,45	3,53	3.53	3.30	3,53/ ST
Sasaran :												
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 tw ii	2025
	laporan kinerja tepat waktu											
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	72.70%	100%
	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	16.67%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	40%	100%
	Persentase kegiatan keagamaan,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 tw ii	2025
	kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi											
	Indeks tata kelola PBJ	50 cukup	50 cukup	50 cukup	70 baik	73 baik	76 baik	49 cukup	73,10 baik	89.50	89.50	89.50 baik
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 tw ii	2025
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah" memiliki 4 indikator kinerja yaitu:
   - Indeks Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 72,68 dari target sebesar 74,00 (capaian 98,22%);
   - Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,02 dari target sebesar 88,00 (capaian 103,43%)
   - Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,32 dari target sebesar 74,00 (capaian 96,38%); dan
   - Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD), pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,53 dari target sebesar 3,46 (capaian 102,02%).

b. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan Indikator sebagai berikut:
      - Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan

- Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).

2) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa dengan Indikator sebagai berikut:
   - Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
   - Indeks tata kelola PBJ, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 73,10 dari target sebesar 50,00 (capaian 146,2%).

3) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga dengan indikator sebagai berikut:
   - Persentase berita dan press release yang terpublikasi), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
   - Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);

- Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase penyediaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
- Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya:

1. BAGIAN HUKUM
   - Kesulitan pada saat melakukan pembuktian dalam penanganan perkara di pengadilan dikarenakan OPD tidak memiliki bukti surat asli dan/atau saksi.
   - Kurangnya partisipasi warga sehingga sulit untuk menghimpun warga dalam rangka pembentukan Kelompok KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum).
   - Kurangnya pemahaman atas tujuan dan aspek penilaian Aksi HAM, sehingga OPD kurang proaktif dan responsif dalam pengumpulan data.
   - Banyak warga miskin yang tidak masuk dalam database warga miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang.
   - Kurangnya peran LBH dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum non litigasi bagi warga miskin.
   - Dinamika perkembangan regulasi. Dengan ditetapkannya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya PP Nomor 35 Tahun 2023 sehingga Kab/Kota harus menyesuaikan.
   - Perencanaan yang kurang maksimal.
   - Kurangnya pemahaman OPD terhadap substansi rancangan produk hukum yang diusulkan sehingga mengakibatkan lamanya pembahasan produk hukum.
   - Kapasitas server yang kurang memadai.
   - Terjadinya serangan hacker pada laman JDIH dan System Elektronik Legal Drafting (E-Ling) yang mengakibatkan

gangguan pada sistem sehingga mengganggu proses pembentukan produk hukum daerah.

2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
   - Kegiatan Partisipasi Masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal karena adanya penyesuaian kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan.

3. BAGIAN ORGANISASI
   - Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana beberapa kali berubah di tahun 2023. Perubahan peraturan ini menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan jabatan pelaksana yang telah disusun sebelumnya pada tahun berjalan.
   - Beberapa perangkat daerah kurang optimal dalam penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi tematik.

4. BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
   - Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan beberapa pihak terkait.
   - Proses administrasi perizinan berjenjang dari Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri) memerlukan waktu yang lama, sehingga terkadang perizinannya baru keluar melewati waktu keberangkatan yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sudah tercantum di DPA Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
   - Undangan dari pihak pemerintah/lembaga di luar negeri yang waktunya mepet sehingga tidak memungkinkan untuk hadir sedangkan perizinannya memerlukan waktu yang lama.
   - Adanya biaya keikutsertaan dalam pameran atau acara formal lain yang anggarannya diluar batas yang tercantum di DPA, sehingga memutuskan untuk tidak ikut pameran yang sejatinya bisa dimanfaatkan sebagai peluang promosi dan kerja sama baru.

5. BAGIAN PEREKONOMIAN
   - Di tahun 2023 terdapat BUMD yang belum memberikan PAD / deviden kepada Pemerintah Kota Semarang yaitu PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) karena kurang optimal dalam peningkatan kinerja.
   - Deviden PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) tidak disetorkan kepada Pemerintah Kota Semarang dan menjadi laba ditahan dengan pemanfaatan untuk kebutuhan investasi

mengingat tahun 2022 tidak diberikan penyertaan modal serta untuk pembayaran hutang.
- Fasilitasi Pameran bagi Pelaku Usaha dan UMKM masih kurang maksimal.
- Kurang Koordinasi intern antar OPD Pengelola DBHCHT, dan koordinasi dengan Sekretariat DBHCHT Kota Semarang belum maksimal.
- Program CSR masih perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah perusahaan yang bergabung ke aplikasi CSR serta meningkatkan kepatuhan hukum terutama dalam hal pelaporan, Banyak perusahaan yang sudah melaksanakan CSR tetapi melaporkan CSRnya ke Kantor Pusat atau Kementerian BUMN. Selain itu pada bulan Desember 2023 website CSR mengalami take down sehingga perlu diperbaiki.
- Untuk LPG dan BBM Bersubsidi dari hasil monitoring masih ditemukan penggunaan LPG yang tidak berhak dan telah disosialisasikan terkait BBM dan LPG Bersubsidi berbasis Web karena mulai 1 Januari akan diterapkan ketentuan bagi yang tidak terdaftar di Web tidak akan dilayani, sedangkan untuk BBM jenis solar pembelian. dengan barcode dan terdaftar di aplikasi My Pertamina dan BBM Jenis Pertalite masih menunggu revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
   - Terbatasnya vendor yang menyediakan material tertentu di Kota Semarang sehingga menyebabkan adanya permainan harga dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari harga wajar.
   - Kurangnya disiplin OPD dalam mengumpulkan data fisik tiap bulannya.
   - Belum adanya aplikasi online untuk evaluasi kegiatan yang bersumber dari Non PAD kecuali Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

7. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
   - Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan setelah ditetapkannya anggaran perubahan 2023
   - Data tempat ibadah (akta, kepengurusan, dll) yang diterima kurang akurat sehingga calon penerima hibah harus gugur dan mengakibatkan anggaran hibah tidak sesuai dengan rencana di awal tahun.
   - Kurangnya sarana prasarana yang mendukung seperti narasumber sehingga pembinaan dan sosialisasi belum dapat mencakup seluruh institusi di Kota Semarang.

8. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
   - Jumlah fungsional PBJ belum terpenuhi sehingga beban kerja setiap pegawai *overload*.

- Strategi pemaketan pengadaan yang masih terpecah-pecah membuat paket pengadaan tidak efektif dan efisien.
- PPK belum memiliki referensi harga saat pembelian e-katalog.

9. BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
   - Isu tau sentimen negative yang muncul di media sosial mengenai Kota Semarang.
10. BAGIAN TATA USAHA
   - Efisiensi harga yang menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap secara optimal.
   - Masih banyak kegiatan luar daerah yang dilaksanakan secara virtual.
   - Dana Penunjang Operasional tetap terbagi (teranggarkan) untuk Wakil Kepala Daerah meskipun terjadi kekosongan pada jabatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

a. Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab.
c. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.
e. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah.
f. Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal.
g. Optimalisasi PAD/deviden oleh BUMD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian

pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan Central Business District (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun dalam tugasnya membantu Wali Kota, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban, baik dalam perumusan kebijakan daerah, maupun dalam pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun

2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG				265.130.574.991	URUSAN PENUNJANG				237.877.923.040	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	180.160.073.730	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	146.691.125.339	
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %		
			OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %		

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	59.903.982	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	137.439.600	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	31.237.475	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	70.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	716.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.270.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	626.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.370.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.499.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	22.987.908	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	2.258.922.968	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	45.681.474.400	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	41.200.180.168	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.058.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	889.680.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	111.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	111.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Bagian Keuangan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	414.955.285	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.305.085.000	-
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	25.046.405	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	60.085.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	389.908.880	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.245.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	206.384.773	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	6.495.983.114	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	183.259.773	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	6.251.983.114	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	23.125.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	244.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	23.852.417.869	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	5.500.000.000	-
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1.090.138.919	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	2.300.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	560.459.798	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	1.650.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	168.532.896	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	11.936.036.523	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	7.312.006.461	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	2.785.243.272	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	8.647.654.953	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	27.100.000.000	-
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	8.029.310.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 unit	5.161.523.992	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 unit	24.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1482 unit	2.815.814.240	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	186 unit	1.700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	176 unit	2.632.310.721	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	115 unit	900.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	8.696.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	16.330.307.096	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	10.254.466.994	-
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	95.293.587	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.403.219.632	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.374.466.994	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.869.300.785	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	3.333.729.286	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	880.00.000	Bagian Rumah Tangga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	628.763.806			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	38.109.231.043	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	15.528.253.711	-

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	167.432.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	168.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 unit	2.649.485.354	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	2.600.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	110.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	31.750.294.283	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	9.800.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1140 unit	2.807.627.018	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	2.000.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	603 unit	613.313.188	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 unit	850.253.711	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	6.937.982.772	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	1.089.313.000	-
			Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	850.336.800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	5.848.332.972	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 orang/ bulan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	2.446.846.655	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.260.000.000	-
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	530.361.182	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	1.098.690.368	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.300.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	303.096.332	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	514.698.773	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	760.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan	100 %	26.940.466.334	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	25.384.109.520	-

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Daerah								
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1.869.945.362	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.216.897.156	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18.011.476.515	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	15.321.001.465	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.059.044.457	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.846.210.899	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	77.004.824.747	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	80.200.000.000	-
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %		
			Indek Pelayanan Publik	128 %				Indek Pelayanan Publik	128 %		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di	100 %				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Wilayah								
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.047.874.544	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.950.000.000	-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	367.757.090	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	520.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	513.042.762	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	1.000.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	3.120.541.843	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	3.200.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 dokumen	46.532.849		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomu Daerah	8 dokumen	230.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	63.848.471.183	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	67.700.000.000	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dokumen	50.594.767.869	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	55.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	2 dokumen	12.476.525.594	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	5 dokumen	12.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Terkait Kesejahteraan Sosial		Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			Terkait Kesejahteraan Sosial		Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	777.177.720	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	4.891.330.726	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	5.872.140.252	-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	362.046.060	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.341.036.964	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.188.247.702	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	4.217.148.294	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.550.000.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	933.366.142	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.850.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	3.283.782.152	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.700.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	7.965.676.514	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.986.797.701	-
			Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %		
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.349.065.583	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.811.797.701	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	6 dokumen	1.157.259.391	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	8 dokumen	1.080.696.863	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	1.062.472.133	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	1.031.100.838	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.129.334.059	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	208.315.931	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	1.075.000.000	-
			Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	227.714.770	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 584.Daerah	1 dokumen	250.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	291.353.674	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	675.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	110.272.632	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	1.756.667.894	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.800.000.000	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	888.701.617	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.850.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	504.672.577	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	925.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	363.293.700	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	1.025.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan	100 %	250.000.800	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan	100 %	300.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			perundang-undangan di bidang cukai					di bidang cukai			
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	6 dokumen	250.000.800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG				248.791.047.927	URUSAN PENUNJANG				237.877.923.040	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	167.574.016.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	146.691.125.339	
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan	100 %		

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
								elektronik			
			OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	133.869.450	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	137.439.600	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	66.429.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	70.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.270.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 dokumen	5.270.900	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
								SKPD			
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.370.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	45.851.442.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	45.681.474.400	

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.059.648.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	889.680.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Bagian Keuangan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.247.279.172	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.305.085.000	-
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	122.915.102	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	60.085.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah SKPD					Daerah SKPD					
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.124.364.070	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.245.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	414.659.773	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	6.495.983.114	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	183.259.773	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	6.251.983.114	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	231.400.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	244.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	35.509.416.937	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	5.500.000.000	-
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1.151.077.137	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	2.300.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	702.094.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	1.650.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	713.597.299	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.889.753.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	20.362.670.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	1.690.224.597	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	7.471.747.266	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	27.100.000.000	-
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1.954.710.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	496.392.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 unit	24.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	1.430.518.037	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	186 unit	1.700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153 unit	2.132.549.054	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	115 unit	900.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.457.578.175	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	15.858.590.038	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	10.254.466.994	-
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.403.219.632	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.374.466.994	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.564.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	3.182.379.486	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	880.00.000	Bagian Rumah Tangga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	588.990.920			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	24.431.520.236	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	15.528.253.711	-
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	182.679.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	168.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	149 unit	2.857.775.348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	2.600.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	110.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	17.770.145.883	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	9.800.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1140 unit	2.807.627.018	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	2.000.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	807 unit	692.213.188	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 unit	850.253.711	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	5.342.375.800	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	1.089.313.000	-
			Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	850.336.800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	4.252.726.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 orang/ bulan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	-
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.110.970.938	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.260.000.000	-
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	552.074.925	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.233.691.216	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.300.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	569.058.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	756.146.797	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	760.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	23.247.144.640	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	25.384.109.520	-
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.041.242.491	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.216.897.156	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	14.098.183.150	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	15.321.001.465	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.107.718.999	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.846.210.899	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	70.986.758.903	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	80.200.000.000	-
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %		
			Indek Pelayanan Publik	128 %				Indek Pelayanan Publik	128 %		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.577.262.403	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.950.000.000	-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	480.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	520.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	817.438.390	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	1.000.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	3.164.162.810	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	3.200.000.000	Bagian Tata Pemerintahan

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 dokumen	115.661.203		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomu Daerah	8 dokumen	230.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	53.391.518.319	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	67.700.000.000	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	43.074.379.400	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	55.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	5 dokumen	9.682.738.919	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 dokumen	12.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penduduk dan KB								
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	634.400.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	5.872.140.252	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	5.872.140.252	-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Bagian Hukum

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.145.837.929	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.550.000.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.566.072.736	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.850.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.579.765.193	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.700.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.230.272.374	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.986.797.701	-
			Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.519.826.084	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.811.797.701	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	1.080.696.863	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	1.080.696.863	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	931.100.838	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	1.031.100.838	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.508.028.383	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan	100 %	968.192.250	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	100 %	1.075.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kegiatan Pembangunan secara Periodik					Pembangunan secara Periodik			
			Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	227.714.770	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 584.Daerah	1 dokumen	250.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	624.236.320	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	675.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	116.241.160	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.473.745.140	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.800.000.000	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.704.934.320	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.850.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Kode Rekening	Rancangan P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	805.638.820	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	925.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	963.172.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	1.025.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	268.508.900	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	300.000.000	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	268.508.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%

3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1.Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2.Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

6. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
7. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
8. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
9. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses

lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.

10. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
11. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
12. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “nilai AKIP, nilai EKPPD, dan IKM Kota Semarang”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
   b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
   c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
   d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
   e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaiakn laporan kinerja tepat waktu;
   f. Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan;
   g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
   h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
   i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.
2. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
   b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
   c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
   d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;
   e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;
   f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.
3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;

b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;
g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	78
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,48
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78
SASARAN : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Hukum, serta Organisai	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan)	%	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	yang ditetapkan		
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaiakn laporan kinerja tepat waktu	%	100
	Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan	%	100
	Persentase warga yang diberikan bantuan	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	100
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	89
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis	Nilai	76

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani	%	100
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu	%	100
	Persentase fasilitasi pengelolaan aset	%	100
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	%	100
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, serta Perubahan Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2025-2029. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH					248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991	APBD	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991	APBD	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	45.00 OPD	45.00 OPD	167.574.016.650	173.042.789.090	180.160.073.730	APBD	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha		0	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian TU		0	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		0	100 Persen					
		Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha		0	100 Persen					
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD		0	100 Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Presentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha		0	100 Persen					
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	100 Persen					
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	133.869.450	133.869.450	59.903.982	APBD	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	66.429.850	66.429.850	31.237.475	APBD	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	716.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	626.900	APBD	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.900	4.258.900	3.499.900	APBD	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.538.900	3.538.900	834.900	APBD	
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	22.987.908	APBD	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang	1	1	1	45.851.442.400	44.851.495.200	42.258.922.968	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Lebih Baik								
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	276 Orang/bulan	276 Orang/bulan	44.788.323.000	43.788.375.800	41.200.180.168	APBD	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.059.648.000	1.059.648.000	1.058.520.000	APBD	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	785.000	785.000	114.000	APBD	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	2.685.600	2.685.600	111.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.247.279.172	1.279.352.852	414.955.285	APBD	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	122.915.102	138.951.942	25.046.405	APBD	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1.124.364.070	1.140.400.910	389.908.880	APBD	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 Paket	4 Paket	4 Paket	414.659.773	414.659.773	206.384.773	APBD	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	183.259.773	183.259.773	183.259.773	APBD	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	50 Orang	231.400.000	231.400.000	23.125.000	APBD	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	33.009.416.937	33.147.217.016	23.852.417.869	APBD	
		Tersedianya sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		perkantoran perangkat daerah								
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.151.077.137	1.166.763.919	1.090.138.919	APBD	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	702.094.004	733.518.244	560.459.798	APBD	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3 Paket	713.597.299	713.597.299	168.532.896	APBD	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.889.753.400	10.966.690.400	11.936.036.523	APBD	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	17.862.670.500	17.862.670.500	7.312.006.461	APBD	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.690.224.597	1.703.976.654	2.785.243.272	APBD	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelayanan sarana	100 persen	100 persen	100 persen	9.971.747.266	14.04	18.647.654.953	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dan prasarana aparatur					3.308.427			
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10 Unit	1.954.710.000	4.655.710.000	8.029.310.000	APBD	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15 Unit	496.392.000	496.392.000	5.161.523.992	APBD	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	1482 Unit	1.430.518.037	2.486.040.032	2.815.814.240	APBD	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153 Unit	153 Unit	176 Unit	4.632.549.054	4.947.588.220	2.632.310.721	APBD	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1.457.578.175	1.457.578.175	8.696.000	APBD	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15.858.590.038	15.950.914.438	16.330.307.096	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	181.549.600	95.293.587	APBD	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9.403.219.632	9.403.219.632	9.403.219.632	APBD	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.564.000.000	2.564.000.000	2.869.300.785	APBD	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	588.990.920	588.990.920	628.763.806	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.182.379.486	3.213.154.286	3.333.729.286	APBD	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 persen	24.431.520.236	26.300.781.636	38.109.231.043	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	182.679.999	182.679.999	167.432.400	APBD	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 Unit	149 Unit	149 Unit	2.857.775.348	2.857.775.348	2.649.485.354	APBD	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 Unit	1500 Unit	1500 Unit	121.078.800	121.078.800	121.078.800	APBD	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	17.770.145.883	19.639.407.283	31.750.294.283	APBD	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1140 Unit	1140 Unit	1140 Unit	2.807.627.018	2.807.627.018	2.807.627.018	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	807 Unit	807 Unit	603 Unit	692.213.188	692.213.188	613.313.188	APBD	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.342.375.800	5.342.375.800	6.937.982.772	APBD	
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	239.313.000	239.313.000	239.313.000	APBD	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800	APBD	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.252.726.000	4.252.726.000	5.848.332.972	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	APBD	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	APBD	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	APBD	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	89 Indeks	89 Indeks	4.110.970.938	4.142.611.658	2.446.846.655	APBD	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	552.074.925	697.602.226	530.361.182	APBD	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.233.691.216	2.024.777.722	1.098.690.368	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	569.058.000	648.481.033	303.096.332	APBD	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	756.146.797	771.750.677	514.698.773	APBD	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	23.247.144.640	23.481.202.840	26.940.466.334	APBD	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.041.242.491	2.056.846.371	1.869.945.362	APBD	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.098.183.150	14.160.382.190	18.011.476.515	APBD	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.107.718.999	7.263.974.279	7.059.044.457	APBD	
37347	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	70.972.759.273	72.677.226.049	77.004.824.747	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		sosial kemasyarakatan								
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen					
		Indek Pelayanan Publik	128.00 Persen	128.00 Persen	128.00 Persen					
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	4.577.262.403	4.577.262.403	4.047.874.544	APBD	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	480.000.000	480.000.000	367.757.090	APBD	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	817.438.390	817.438.390	513.042.762	APBD	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.164.162.810	3.164.162.810	3.120.541.843	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	115.661.203	115.661.203	46.532.849	APBD	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	53.377.518.689	53.957.053.449	63.848.471.183	APBD	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	7 Dokumen	43.074.379.400	43.281.840.480	50.594.767.869	APBD	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	9.668.739.289	9.864.776.129	12.476.525.594	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Pengendalian Penduduk dan KB								
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	634.400.000	810.436.840	777.177.720	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Perduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.872.140.252	5.983.099.252	4.891.330.726	APBD	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	685.727.323	706.764.163	362.046.060	APBD	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	1.855.535.087	1.919.249.487	1.341.036.964	APBD	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	3.330.877.842	3.357.085.602	3.188.247.702	APBD	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 Persen	80 Persen	80 Persen	7.145.837.929	8.159.810.945	4.217.148.294	APBD	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	1.566.072.736	1.582.109.576	933.366.142	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.579.765.193	6.577.701.369	3.283.782.152	APBD	
37712	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	10.230.272.374	10.256.036.194	7.965.676.514	APBD	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa		0	100.00 Persen					
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		pelaksanaan APBD								
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.519.826.084	5.582.674.564	5.349.065.583	APBD	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	1.080.696.863	1.096.084.263	1.157.259.391	APBD	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	931.100.838	947.137.678	1.062.472.133	APBD	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3.508.028.383	3.539.452.623	3.129.334.059	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	968.192.250	984.229.090	609.942.237	APBD	
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	227.714.770	227.714.770	208.315.931	APBD	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	624.236.320	624.236.320	291.353.674	APBD	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.241.160	132.278.000	110.272.632	APBD	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.473.745.140	3.489.132.540	1.756.667.894	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		pengadaan barang dan jasa								
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.704.934.320	1.720.321.720	888.701.617	APBD	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	805.638.820	805.638.820	504.672.577	APBD	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	220 Orang	220 Orang	963.172.000	963.172.000	363.293.700	APBD	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 persen	100 persen	100 persen	268.508.900	200.000.000	250.000.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	268.508.900	200.000.000	250.000.800	APBD	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

29. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

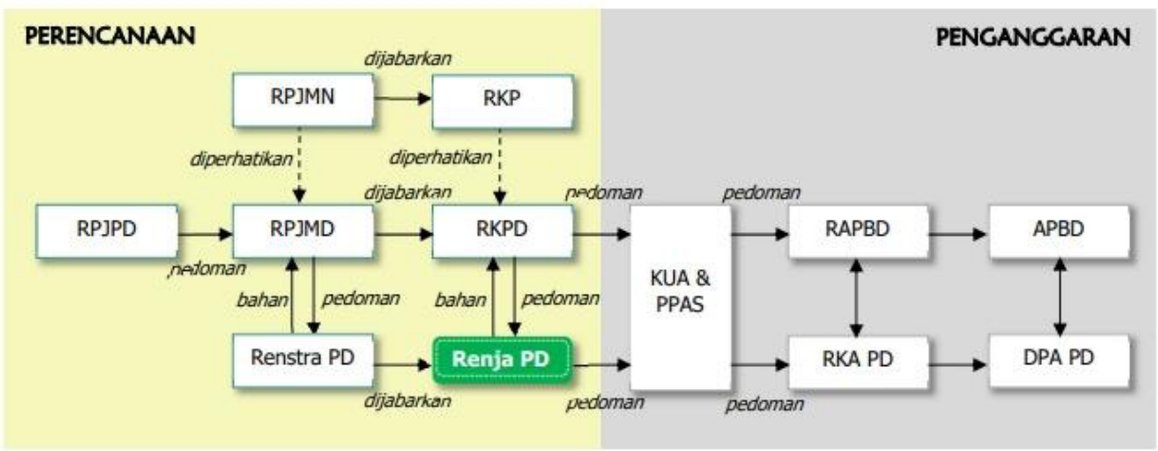

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dengan dinamika perencanaan kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2024 dan efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Pusat maka salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Perubahan RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2025 sampai dengan triwulan II, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun Triwulan II Tahun 2025

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD							
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan							48,2 %
4.02.02.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	85 Dokumen	36 Dokumen	16 Dokumen	5 Dokumen	31,25%	41 Dokumen	48.2 %
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD							80 %
4.02.02.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	80 %
4.02.02.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	54 orang	18 Orang	18 Orang	100%	72 orang	80 %
4.02.02.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 dokumen	80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat							66,6 %
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 Dokumen	450 Dokumen	150 Dokumen	50 Dokumen	33,3 %	500 Dokumen	66,6 %
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							60 %
4.02.02.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.02.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja							
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja							
		Persentase peningkatan kemampuan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran							
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan							
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	8 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100 %
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	4%	3 Dokumen	6 0%
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0%	6 Dokumen	60 %
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN							100%
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	94,96%	94,96%	52 orang	100%
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	3 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	3 laporan	60 %
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	60 laporan	36 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	42 laporan	70%
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi							
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	60%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	250 orang	150 orang	50 orang	20 orang	40 %	170 orang	68%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur							
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket	9 Paket	3 Paket	2 Paket	66%	11 Paket	73,3%
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	35 Paket	21 Paket	7 Paket	3 Paket	42,8%	24 Paket	68,5%
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang tersedia	60 Paket	36 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	42 Paket	70%
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Paket	18 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	21 paket	70%
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya							
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	60%	7 Unit	0 Unit	0 %	15 unit	60%
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	60%	55 Unit	25 Unit	45,4%	55 Unit	68%
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	60%	25 Unit	20 Unit	80%	25 unit	67%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat,							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Komunikasi Sumber daya Air & Listrik							
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 laporan	3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	3 laporan	60%
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 laporan	6 laporan	50%	42 Laporan	70%
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 laporan	6 laporan	50%	42 Laporan	70%
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya							
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	210 Unit	156 Unit	52 Unit	26 Unit	50%	182 unit	86.6 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	1240	744 Unit	248 Unit	124 Unit	50%	868 unit	70%
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	80%
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	500 Unit	300 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	350 unit	70%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD							
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	250 orang	150 orang	50 Orang	50 Orang	100%	200 orang	80%
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	30 Paket	18 Paket	6 Paket	3 paket	50%	21 Paket	70%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	38 Paket	36 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	36 Paket	94.7%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Pergeseran II (Setelah Efisiensi dan Penyesuaian SHS) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat DPRD	122.201.317.289	49.646.167.019	40,63%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.709.298.524	36.017.427.584	46,35%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.310.318	5.654.500	2,85%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.087.418	220.000	0,24%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.561.400	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.370.900	-	0,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.306.900	3.915.000	47,13%
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.370.900	-	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.731.400	1.409.500	24,59%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30.881.400	110.000	0,36%
11	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	0,00%
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.674.939.471	4.434.056.527	51,11%
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.305.667.440	4.276.936.027	51,49%

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	365.452.431	155.796.000	42,63%
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.685.000	646.000	38,34%
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.134.600	678.500	31,79%
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	-	0,00%
18	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	-	0,00%
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.253.050	171.600.000	42,87%
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.253.050	171.600.000	42,87%
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.162.302.355	2.880.871.388	46,75%
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	17.726.300	23,64%
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	397.327.845	140.757.133	35,43%
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	487.389.216	105.993.200	21,75%
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	440.487.546	150.427.500	34,15%
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	225.776.400	42.541.000	18,84%
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.725.002.640	2.128.400.845	57,14%
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.318.708	295.025.410	36,36%
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.245.589.879	619.625.000	14,59%
30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.916.298.840	-	0,00%
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	854.839.453	468.225.000	54,77%

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	474.451.586	151.400.000	31,91%
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.304.232.211	1.534.657.171	24,34%
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	11.500.000	51,16%
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.135.936	20.700.668	20,88%
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.182.618.582	1.502.456.503	24,30%
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.940.366.878	422.245.061	21,76%
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	966.300.475	239.648.751	24,80%
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.313.203	33.104.640	10,08%
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.904.000	113.810.190	28,18%
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.849.200	35.681.480	14,75%
42	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.711.504.362	25.948.717.937	52,20%
43	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.719.959.000	25.872.662.482	53,10%
44	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	991.545.362	76.055.455	7,67%
45	Layanan Administrasi DPRD	1.800.000	-	0,00%
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.000	-	0,00%
47	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.492.018.765	13.628.739.435	30,63%
48	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	14.427.487.880	5.839.247.826	40,47%

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
49	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14.427.487.880	5.839.247.826	40,47%
50	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.828.247.924	1.150.684.780	16,85%
51	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.137.275.184	143.165.000	12,59%
52	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.073.577.440	720.664.780	23,45%
53	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.617.395.300	286.855.000	10,96%
54	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.031.289.886	2.229.380.242	31,71%
55	Pelaksanaan Reses	7.031.289.886	2.229.380.242	31,71%
56	Fasilitasi Tugas DPRD	16.204.993.075	4.409.426.587	27,21%
57	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.578.837.160	4.042.744.587	32,14%
58	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.626.155.915	366.682.000	10,11%
	Jumlah	122.201.317.289	49.646.167.019	40,63%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Tahun 2025, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 14 kegiatan serta 41 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp 122.201.317.289. Dengan realisasi anggaran sampai triwulan II ini sebesar Rp49.646.167.019 atau setara 40.63% . Beberapa aspek yang mempengaruhi capaian Realisasi anggaran Sekretariat DPRD pada triwulan II ini adalah Efisiensi terhadap beberapa rekening seperti Perjalanan Dinas dan Pengadaan Modal. Selain itu terdapat penyesuaian Standar Harga Satuan sesuai dengan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang telah memfasilitasi kegiatan DPRD dalam menetapkan keputusan DPRD, diantaranya adalah :

1. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rancangan Pembangunan Industri Kota
3. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal
4. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Nomenklatur PT BPR Bank Pasar
5. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/7 Tahun 2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata kelola Badan Usaha Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi				Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
Tujuan										
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	85%	90%	91%	93,5 %	84.83 %	87.51 %	77,6 %	-	87%
Sasaran										
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	83,3 %	84 %	53.3%	62.50 %	62.50%	31,25%	75%
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	79.94	80	80,5	81	73.86	77,15	79,10	-	80,20

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 91, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 77,6%;
b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
   1) “Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
   2) “Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Tahun 2025 merupakan peralihan kepemimpinan Kepala Daerah di Kota Semarang. Kepala

Daerah hasil pemilihan serentak telah menjalankan tugasnya sehingga diperlukan akselerasi dalam pemenuhan janji politik saat kampanye.

Dampak dari Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran juga menjadi perhatian DPRD Kota Semarang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, DPRD Kota Semarang turut mengawal perubahan RKPD hingga menjadi RAPBD Kota Semarang tahun 2025. Sinergi yang baik dalam tata kelola pemerintahan ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat tetap berjalan dengan baik.

Peran Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan kepada Anggota Dewan dituntut secara profesional, tetap netral dan maksimal. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang saat ini adalah melaksanakan fungsi penyelengaraan administrasi kesekretariatan, administarsi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalananankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Rencana Kerja DPRD

   Rencana Kerja DPRD disusun secara partisipatif melalui kegiatan Workshop Renja DPRD yang melibatkan seluruh anggota dan perangkat pendukung. Workshop ini bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan DPRD yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Seiring waktu, efisiensi anggaran menjadi perhatian utama menyusul arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong optimalisasi belanja negara dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Semarang melalui Edaran Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang melakukan penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS) yang berdampak pada pengurangan uang harian perjalanan dinas dan pagu biaya penginapan. Penyesuaian ini diharapkan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tetapi justru meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Rencana Kerja DPRD tetap dapat berjalan optimal, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat..
2. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

   Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini apabila dilihat dari tahun sebelumnya memperoleh hasil yang sama yakni 10 Raperda yang ditetapkan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelengaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan sosial media dalam penyebarluasan informasi DPRD Kota Semarang

   Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyaraka. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahaman terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

   Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

   Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

2. JDIH Sekretariat DPRD

   Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

   Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat https://jdih.dprd.semarangkota.go.id

   Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

3. Dhayoh-e

   Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis. Link dapat diakses pada tautan berikut https://etamudprd.semarangkota.go.id/buku-tamu/public/reservasi

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2025 mendatang :

a) Tantangan
   1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.
   2) Pemenuhan janji politik Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.
   3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang
   4) Mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dampak dari kasus korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Semarang menjadi tugas bersama antara Eksekutif dan Legislatif

b) Peluang
   1) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
   2) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional
   3) Mendorong partisipasi publik melalui forum dengar pendapat, reses interaktif, dan kanal aspirasi digital untuk membangun kepercayaan serta kedekatan dengan masyarakat;
   4) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang berpihak pada kepentingan publik, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dan responsif terhadap permasalahan aktual di Kota Semarang.
   5) Memperluas kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal dan media guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kredibilitas DPRD di mata masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.02	SEKRETARIAT DPRD			118.746.066.977				118.746.066.977
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	70.680.649.532	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	70.680.649.532
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	117.091.701	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	117.091.701
4.02.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	31.018.801	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2 dokumen	31.018.801
4.02.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.561.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	4.561.400
4.02.01.2.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	4.370.900
4.02.01.2.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	8.306.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	8.306.900

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD						
4.02.01.2.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	4.370.900
4.02.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.731.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	5.731.400
4.02.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	8.731.400	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	8.731.400
4.02.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.712.705.649	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.712.705.649
4.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	49 orang/ bulan	8.370.575.618	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	49 orang/ bulan	8.370.575.618
4.02.01.2.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	338.310.431	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	338.310.431
4.02.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.685.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	1.685.000

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 Laporan	2.134.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	2.134.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	2.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	2.000.000
4.02.01.2.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 dokumen	2.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	2.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	500.103.050	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	500.103.050
4.02.01.2.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	500.103.050	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	500.103.050
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	6.155.366.686	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	6.155.366.686
4.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000
4.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	351.494.200	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	351.494.200
4.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	287.389.216	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	287.389.216
4.02.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	388.161.279	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	388.161.279

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	145.070.000	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	145.070.000
4.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.913.246.923	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.913.246.923
4.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	995.005.068	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	995.005.068
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	639.932.282	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	639.932.282
4.02.01.2.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	450.001	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	0 Unit	450.001
4.02.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	478.653.715	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	478.653.715
4.02.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	160.828.566	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	160.828.566
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	3.332.789.349	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	3.332.789.349
4.02.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	80.698.354	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	80.698.354
4.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.229.613.302	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.229.613.302

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	1.557.862.785	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	1.557.862.785
4.02.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	883.095.115	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	883.095.115
4.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	153.176.403	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	153.176.403
4.02.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	403.904.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	403.904.000
4.02.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	117.687.267	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	117.687.267
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	49.660.998.030	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	49.660.998.030
4.02.01.2.15.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	48.719.959.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	48.719.959.000
4.02.01.2.15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	941.039.030	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	941.039.030
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.800.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.800.000
4.02.01.2.16.0004	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.800.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.800.000

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	48.065.417.466	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	48.065.417.466
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.870.658.360	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.870.658.360
4.02.03.2.01.0002	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.870.658.360	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.870.658.360
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.011.319.824	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.011.319.824
4.02.02.2.04.0004	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.103.577.440	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.103.577.440
4.02.02.2.04.0006	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Dokumen	2.675.575.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Dokumen	2.675.575.300
4.02.02.2.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	1.232.167.084	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat - Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.232.167.084
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.714.200.498	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.714.200.498
4.02.02.2.05.0003	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.714.200.498	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.714.200.498
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	17.469.238.764	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	17.469.238.764
4.02.02.2.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	14.475.047.557	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	14.475.047.557
4.02.02.2.08.0004	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.994.191.207	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.994.191.207

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

Delapan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, adalah :

"Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD"

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	93.50%
SASARAN :			
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	%	84%
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	81

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan rutin dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp 118.746.066.977 (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tuju Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02	SEKRETARIAT DPRD					140.938.973.172	122.201.317.289	118.746.066.977		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	79.681.037.967	77.709.298.524	70.680.649.532		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	200.685.318	198.310.318	117.091.701		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	92.462.418	90.087.418	31.018.801	PAD	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.561.400	4.561.400	4.561.400	PAD	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	PAD	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.306.900	8.306.900	8.306.900	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	PAD	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.731.400	5.731.400	5.731.400	PAD	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.881.400	30.881.400	8.731.400	PAD	
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PAD	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	8.674.939.471	8.674.939.471	8.712.705.649		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	50	8.305.667.440	8.305.667.440	8.370.575.618	PAD, DTU-DAU	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	365.452.431	365.452.431	338.310.431	PAD	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.685.000	1.685.000	1.685.000	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
		Keuangan Akhir Tahun SKPD								
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2.134.600	2.134.600	2.134.600	PAD	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	8 buah	8 buah	70.000.000	70.000.000	2.000.000		
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000	70.000.000	2.000.000	PAD	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	50 orang	50 orang	816.053.050	400.253.050	500.103.050		
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	816.053.050	400.253.050	500.103.050	PAD	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	7.601.390.369	6.162.302.355	6.155.366.686		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	397.327.845	397.327.845	351.494.200	PAD	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	487.389.216	487.389.216	287.389.216	PAD	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	440.487.546	440.487.546	388.161.279	PAD	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	225.776.400	225.776.400	145.070.000	PAD	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.725.002.640	3.725.002.640	3.913.246.923	PAD	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.250.406.722	811.318.708	995.005.068	PAD	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	4.245.589.879	4.245.589.879	639.932.282		
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	0 Unit	2.916.298.840	2.916.298.840	450.001	PAD	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	55 Unit	854.839.453	854.839.453	478.653.715	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	474.451.586	474.451.586	160.828.566	PAD	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.304.232.211	6.304.232.211	3.332.789.349		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.477.693	22.477.693	22.477.693	PAD	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.135.936	99.135.936	80.698.354	PAD	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.182.618.582	6.182.618.582	3.229.613.302	PAD	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2.054.843.307	1.940.366.878	1.557.862.785		
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	52 Unit	1.080.776.904	966.300.475	883.095.115	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	248 Unit	248 Unit	328.313.203	328.313.203	153.176.403	PAD	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	403.904.000	403.904.000	403.904.000	PAD	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	241.849.200	241.849.200	117.687.267	PAD	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	49.711.504.362	49.711.504.362	49.660.998.030		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	50	48.719.959.000	48.719.959.000	48.719.959.000	PAD	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	991.545.362	991.545.362	941.039.030	PAD	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.800.000	1.800.000	1.800.000	PAD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00	18.00	18.00	61.257.935.205	44.492.018.765	48.065.417.466		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	18 Perda	18 Perda	15.381.426.880	14.427.487.880	15.870.658.360	PAD	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	15.381.426.880	14.427.487.880	15.870.658.360	PAD	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	100%	7.329.762.924	6.828.247.924	7.011.319.824		
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.166.675.184	1.137.275.184	3.103.577.440	PAD	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.487.512.440	3.073.577.440	2.675.575.300	PAD	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.675.575.300	2.617.395.300	1.232.167.084	PAD	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	7.528.819.486	7.031.289.886	7.714.200.498		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	7.528.819.486	7.031.289.886	7.714.200.498	PAD	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	100%	31.017.925.915	16.204.993.075	17.469.238.764		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.391.770.000	12.578.837.160	14.475.047.557	PAD	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.626.155.915	3.626.155.915	2.994.191.207	PAD	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitemen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA Perubahan nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;
2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

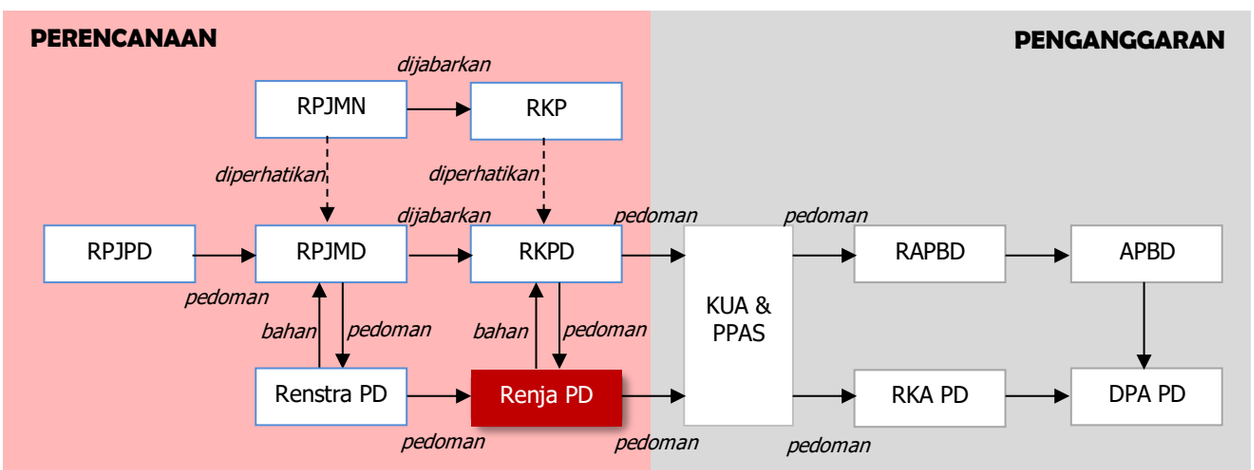

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah". Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur

Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian.

Selain mengacu pada Renstra, penyusunan Renja juga memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang; dimana sehubungan dengan dinamika perencanaan kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; serta (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target capaian pembangunan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Bappeda Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
x. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, serta review terhadap Perubahan RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Bappeda Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dan Pencapaian Renstra
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
	BAPPEDA KOTA SEMARANG								
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00% (70,73%)	100,00% (20,00%)	23,08% (9,76%)	23,08	80,49%	80,49
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	29 Dokumen	13 Dokumen	4 Dokumen	30,77	33 Dokumen	80,49
5.01.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	72,73
		- *Dokumen Renja Bappeda*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Dokumen Perubahan Renja Bappeda*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ROO Bappeda*	-	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*1 Dokumen*	
		- *Dokumen Renstra Bappeda*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Dokumen Pra Ranwal Renstra Bappeda*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Dokumen Rencana Tindak Pengendalian RSO Tahun 2025-2029*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - DKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	60,00
5.01.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	60,00
5.01.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	60,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	12 Laporan	120,00
		- *Jumlah LKPJ Bappeda*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*		*4 Laporan*	
		- *Jumlah LKJIP Bappeda*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*		*4 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda*	-	*2 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Data dan Informasi untuk Evaluasi Perencanaan*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
5.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Waidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	62,91% (12,58%)	62,91	72,58%	72,58
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	75,82% (15,16%)	100,00	75,16%	75,16
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	61 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	101,64	62 Orang/Bulan	
		- *Persentase ASN yang Disediakan Gaji & Tunjangan*	*100,00%*	*100,00% (60,00%)*	*100,00% (20,00%)*	*100,00% (20,00%)*		*80,00%*	*80,00*
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	16 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00	22 Dokumen	
		- *Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas*	*100,00%*	*100,00% (60,00%)*	*100,00% (20,00%)*	*50,00% (10,00%)*		*70,00%*	*70,00*
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	11 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	13 Dokumen	86,67
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	4 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00	6 Laporan	120,00
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	60,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	71,79% (14,36%)	71,79	74,36%	74,36
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	11 Kegiatan	73,33
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	65 Orang	50 Orang	76,92	50 Orang	
		- Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	11 Kegiatan	*73,33*
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	50,90% (10,18%)	50,90	70,18%	70,18
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	36,03% (7,21%)	36,03	67,21%	67,21
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	15 Paket	16 Paket	0 Paket	0,00	15 Paket	78,95
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	37 Paket	7 Paket	3 Paket	42,86	40 Paket	66,67
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Paket	108 Paket	15 Paket	5 Paket	33,33	113 Paket	95,76
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	20 Paket	5 Paket	2 Paket	40,00	22 Paket	62,86

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	10 Laporan	
		- *Jumlah Tamu yang Berkunjung*	*25.900 Orang*	*14.400 Orang*	*5.750 Orang*	*2.875 Orang*		*17.275 Orang*	*66,67*
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	10 Laporan	
		- *Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah*	*775 Kegiatan*	*360 Kegiatan*	*100 Kegiatan*	*50 Kegiatan*		*410 Kegiatan*	*52,90*
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	
		- *Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda*	*33 Jenis*	*14 Jenis*	*4 Jenis*	-		*14 Jenis*	*42,42*
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	50,00% (10,00%)	50,00	70,00%	70,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	10 Laporan	-
		- *Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)*	*100,00%*	*100,00% (60,00%)*	*100,00% (20,00%)*	*50,00% (10,00%)*		*70,00%*	*70,00*
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	10 Laporan	-
		- *Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*100,00%*	*100,00% (60,00%)*	*100,00% (20,00%)*	*50,00% (10,00%)*		*70,00%*	*70,00*
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	66,67% (13,33%)	13,33	73,33%	73,33
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	4 Unit	80,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	82 Unit	22 Unit	22 Unit	100,00	104 Unit	71,72

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung (60,00%)	1 Gedung (20,00%)	0 Gedung	0,00	1 Gedung (60,00%)	60,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00%	99,66%	100,00%	98,67%	98,67	98,67%	98,67
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	80,00% (16,00%)	80,00	76,00%	76,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	4 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	6 Berita Acara	85,71
		- *Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD*	*5 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*4 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	-	-		*1 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD*	*1 Kegiatan*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*1 Kegiatan*	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7 Berita Acara	4 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	6 Berita Acara	85,71
		- *Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)*	*5 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*4 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	-	-		*1 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)*	*1 Kegiatan*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*1 Kegiatan*	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	4 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	6 Berita Acara	85,71
		- *Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD*	*5 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*4 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	-	-		*1 Kegiatan*	
		- *Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD*	*1 Kegiatan*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*		*1 Kegiatan*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4000 Usulan	1600 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	100,00	2400 Usulan	60,00
		- *Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dok. Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga & Musrenbang Kel & Kec*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*1 Dokumen*	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	18 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	15 Dokumen	83,33
		- *Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD*	*10 Dokumen*	*6 Dokumen*	*2 Dokumen*	-		*6 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RPJPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RPJMD*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan*	*6 Dokumen*	*8 Dokumen*	*2 Dokumen*	-		*8 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen background study RPJPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen Teknokratik RPJPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen background study RPJMD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen Teknokratik RPJMD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJMD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	0,00% (0,00%)	60,00	60,00%	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok. Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perenc. Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	60,00
		- *Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan IKU Kota Semarang*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Lap. Forum Satu Data Kota Semarang*	*10 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5 Buku	3 Buku	1 Buku	0 Buku	0,00	3 Buku	60,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Eval. & Pelaporan Bidang Perenc. Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	12,50% (0,50%)	12,50	60,50%	60,50
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	11 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	6 Laporan	54,55
		- *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah*	*10 Laporan*	*6 Laporan*	*2 Laporan*	-		*6 Laporan*	
		- *Jumlah Lap. Koord. Penyusunan Renstra OPD*	*1 Laporan*	-	*1 Laporan*	-		-	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	22 Laporan	14 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	25,00	15 Laporan	68,18
		- *Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Kota Semarang*	*20 Laporan*	*12 Laporan*	*4 Laporan*	*1 Laporan*		*13 Laporan*	
		- *Jumlah Lap. Evaluasi RPJPD Kota Semarang*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Lap. Evaluasi RPJMD Kota Semarang*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan RTP Risiko Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026 – 2031*	-	-	*1 Laporan*	-		-	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,65%	100,00%	96,14%	96,14	96,14%	96,14
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	28,57% (5,71%)	28,57	65,71%	65,71

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	61,54
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan*	*1 Aplikasi*	*1 Aplikasi*	-	-		*1 Aplikasi*	
		- *Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan*	*1 Aplikasi*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan*	*1 Aplikasi*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Umum TMMD*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00	5 Laporan	71,43
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan (Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan)*	*1 Laporan*	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*		-	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan*	*1 Laporan*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	32 Dokumen	27 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	37,50	30 Dokumen	93,75
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Kegiatan TOT/ Bintek PPRG*	*5 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	-		*3 Kegiatan*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen (2025-2029)*	*1 Dokumen*		*2 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak / RAD Kota Layak Anak*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*2 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Renum TMMD*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	-	-		*3 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	-	-		*3 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	-	-		*3 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	
		- *Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pembangunan Digitalisasi Arsip Pemerintah*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan*	*1 Dokumen*	-	--	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan*	*1 Dokumen*	-	-			-	
		- *Jumlah Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Kajian Mekanisme Layanan Informasi, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RAD Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Minat Membaca Pelajar Pada Perpustakaan Sekolah Daerah dan Keliling Pasca Daring*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029*	-	-	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah NA dan Raperda Pencegahan dan Penurunan Stunting*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38 Laporan	18 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50,00	22 Laporan	57,89
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah LP2KD*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*		*4 Laporan*	
		- *Laporan Kinerja TKPKD*							
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDg's Kota Semarang Tahun 2024*	*5 Laporan*	*2 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Profil Kampung Tematik Kota Semarang*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Laporan*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat*	*1 Aplikasi*	*1 Aplikasi*	-	-		*1 Aplikasi*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 – 2030*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Sehat Kota Semarang 2024 - 2029*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan 2024 - 2029*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 – 2031*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiayata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG*	-	-	*1 Laporan*	-		-	
		- *Jumlah Laporan Optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang*	-	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*		-	
		- *Jumlah Laporan Kajian Evaluasi Pembinaan Atlet Muda Berprestasi Melalui Kelas Khusus Olahraga*	-	-	*1 Laporan*	-		-	
		- *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024*	-	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*		-	
5.01.03									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,63%	100%	98,61%			
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	100,00% (60,00%)	100,00% (20,00%)	0,00%	0,00		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	21 Dokumen	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00	21 Dokumen	105,00
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen (Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang)*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-			
		- *Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-			
		- *Jumlah Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-			
		- *Jumlah Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-			
		- *Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun Ke Depan*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Transformasi Dunia Usaha: Tantangan dan Peluang Menuju 2045*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pengaruh Kebudayaan Tionghoa Terhadap Peradaban dan Perekonomian Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Ekosistem Pariwisata Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	0 Dokumen	0,00	8 Laporan	38,01
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Laporan*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal (dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang)*	*5 Dokumen*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dok. Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot thd Pelaku Usaha di Kt Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dok.Strategi Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dok. Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dok. Review Pngembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	17 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	17 Dokumen	85,00
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*8 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pembentukan dan Fasilitasi Penguatan kelembagaan Semarang Technopark*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang/Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perikanan kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang / Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Alam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy / Dokumen Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen UKL-UPL Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen NA dan Raperda Pembudayaan Pertanian Perkotaan*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 -2024*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan : Analisis Interdependensi Antara Sektor-Sektor Kunci*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Kaws. Industri Urban Farming Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Umum Energi Daerah Kota Semarang*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	4 Laporan	80,00
		- *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100%	100%	100%		
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur & Kewilayahan			100%	100%	100%		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 Dokumen	24 Dokumen	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	24 Dokumen	68,57
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	
		- *Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Hunian vertikal*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen RAD AMPL*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Review RISPK*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)*	*2 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Review RP2KPKPK*	*2 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Draft Perwal Masterplan Air Limbah*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Reviu RISPAM dan Draft Perwal Rispam*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Rencan Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Banjir*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Kajian Pengembangan Jaringan Irigasi*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Kajian Pengembangan Potensi Tampungan Air Pada Sistem Timur*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16 Laporan	21 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	21 Laporan	131,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota / Dokumen Draft Perwal Masterplan Transportasi*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Transportasi rendah karbon / Dokumen Kajian Roadmap Pengembangan Transportasi Rendah Karbon*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen (pindah sub kegiatan)*	
		- *Jumlah Dokumen Perda Sumber Daya Air / Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Progr. Pamsimas Kota Semarang*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi (SI AMANAH)*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP*	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-		*1 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025*	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-		*1 Laporan*	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	15 Dokumen	53,57
		- *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*	*5 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	-		*3 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama* ▪ *Dokumen Penyusunan database urban lanscape di Situs Kota Lama Semarang*	*4 Dokumen*	*3 Dokumen* *1 Dokumen*	-	-		*3 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		▪ *Dokumen Penyusunan fasade bangunan di Situs Kota Lama Semarang* ▪ *Dokumen Penyusunan Inventarisasi kepemilikan bangunan di Situs Kota Lama Semarang*		*1 Dokumen* *1 Dokumen*					
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel*	*5 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Land Banking*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden / farming*	*1 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan*	*4 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung*	*4 Dokumen*	-	-	-		-	
		- *Jumlah Dokumen Persampahan Sektor Hilir*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Organik*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	
		- *Masterplan Pengembangan Kawasan Penggaron*	-	*1 Dokumen*	-	-		*1 Dokumen*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	
					Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = (5+7)*	*10 = (19/4)*
		- *Jumlah Dokumen Kajian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan*	-	-	*1 Dokumen*	-		-	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	7 Laporan	70,00
		- *Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Laporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K))*	*5 Laporan*	*3 Laporan*	*1 Laporan*	-		*3 Laporan*	
		- *Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim*	-	*1 Laporan*	-	-		*1 Laporan*	

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sub kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan 44 sub kegiatan lainnya sedang dalam proses pelaksanaan sub kegiatan.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 setelah Pergeseran II (efisiensi anggaran). Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
BAPPEDA KOTA SEMARANG			22.153.386.827,49	7.377.769.885,00	33,30
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12.852.244.778,22	5.349.256.247,00	41,62
1.1	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.935.000,00	1.142.660,00	1,66
1.1.1	5.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	6.420.000,00	0,00	0,00
1.1.2	5.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.050.000,00	0,00	0,00
1.1.3	5.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.770.000,00	0,00	0,00
1.1.4	5.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.025.000,00	496.980,00	24,54
1.1.5	5.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.385.000,00	0,00	0,00
1.1.6	5.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.035.000,00	645.680,00	62,38
1.1.7	5.01.01.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	48.250.000,00	0,00	0,00
1.2	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.817.823.280,00	5.079.592.100,00	46,96
1.2.1	5.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.503.138.280,00	4.977.752.100,00	47,39
1.2.2	5.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	313.105.000,00	101.840.000,00	32,53
1.2.3	5.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000,00	0,00	0,00
1.2.4	5.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	900.000,00	0,00	0,00
1.2.5	5.01.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	230.000,00	0,00	0,00
1.3	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.590.000,00	43.090.000,00	54,14
1.3.1	5.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.590.000,00	43.090.000,00	54,14
1.4	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.581.722,20	78.686.002,00	7,22
1.4.1	5.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.955.380,90	0,00	0,00
1.4.2	5.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.885.000,30	7.296.500,00	16,63
1.4.3	5.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.725.465,50	5.613.400,00	11,76
1.4.4	5.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.906.916,10	1.884.150,00	9,01

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.4.5	5.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	4.548.100,00	22,74
1.4.6	5.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.732.814,00	43.855.204,00	19,60
1.4.7	5.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	553.376.145,40	15.488.648,00	2,80
1.5	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.994.857,02	22.877.610,00	12,50
1.5.1	5.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.825.000,42	1.558.962,00	19,92
1.5.2	5.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.169.856,60	21.318.648,00	12,17
1.6	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.319.919,00	123.867.875,00	20,23
1.6.1	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.960.001,00	20.419.805,00	56,78
1.6.2	5.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.029.918,00	103.448.070,00	30,69
1.6.3	5.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.330.000,00	0,00	0,00
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.505.285.442,00	895.011.953,00	35,72
2.1	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.830.312.894,00	667.221.335,00	36,45
2.1.1	5.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	217.575.000,00	118.060.810,00	54,26
2.1.2	5.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	131.550.000,00	94.946.890,00	72,18
2.1.3	5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	430.282.000,00	156.145.600,00	36,29
2.1.4	5.01.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2.525.000,00	2.011.900,00	79,68
2.1.5	5.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	1.048.380.894,00	296.056.135,00	28,24
2.2	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.900.000,00	14.173.500,00	22,18
2.2.1	5.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38.740.000,00	0,00	0,00
2.2.2	5.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.160.000,00	14.173.500,00	56,33
2.3	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	611.072.548,00	213.617.118,00	34,96
2.3.1	5.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	312.893.400,00	198.128.470,00	63,32
2.3.2	5.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	298.179.148,00	15.488.648,00	5,19
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.795.856.607,27	1.133.501.685,00	16,68
3.1	5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.473.132.792,40	693.743.239,00	47,09
3.1.1	5.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.579.504,00	34.790.628,00	20,16
3.1.2	5.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	167.164.000,00	18.774.520,00	11,23

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
3.1.3	5.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	544.274.968,80	308.282.121,00	56,64
3.1.4	5.01.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	589.114.319,60	331.895.970,00	56,34
3.2	5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Peren-canaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.638.059.215,87	181.190.088,00	6,87
3.2.1	5.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	943.296.157,00	123.943.240,00	13,14
3.2.2	5.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	190.135.690,37	32.047.458,00	16,86
3.2.3	5.01.03.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.487.727.368,50	25.199.390,00	1,69
3.2.4	5.01.03.2.02.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16.900.000,00	0,00	0,00
3.3	5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.684.664.599,00	258.568.358,00	9,63
3.3.1	5.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.725.886.406,00	45.650.268,00	2,65
3.3.2	5.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	232.416.187,00	24.816.830,00	10,68
3.3.3	5.01.03.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	478.354.942,00	165.808.920,00	34,66
3.3.4	5.01.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	248.007.064,00	22.292.340,00	8,99

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 setelah Pergeseran II, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang adalah sebesar Rp.22.153.386.827,49. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Semarang. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.7.377.769.885,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.14.775.616.942,49.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan di Kota Semarang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik I, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024, 5 (Lima) Besar Kota Terbaik pada I-SIM for Cities 2024, serta Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur pada UI Green Metric Ranking Tahun 2024.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Perubahan IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI				PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada Renstra, sudah tidak berlaku mulai tahun 2023)*	91,60 %	-	-	-	-	91,74 %	-	-	-	-
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada IKU, sudah tidak berlaku mulai tahun 2024)*	-	91,20 %	-	-	-	-	91,86 %	-	-	-
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada Perubahan IKU, berlaku mulai tahun 2024)*	-	-	90,40 %	91,20 %	92,00 %	-	-	88,21 %	89,11 %	91,20 %
SASARAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja *(indikator dan target pada Renstra, sudah tidak berlaku mulai tahun 2023)*	72,00 %	-	-	-	-	73,87 %	-	-	-	-
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada IKU, sudah tidak berlaku mulai tahun 2024)*	-	89,60 %	-	-	-	-	89,82 %	-	-	-
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada Perubahan IKU, berlaku mulai tahun 2024)*	-	-	100,00%	100,00 %	100,00 %	-	-	97,07 %	97,83 %	100,00 %
SASARAN Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda *(indikator pada Renstra, dengan penyesuaian target sesai formulasi baru)*	80,60	81,00	81,50	81,80	82,00	80,60	81,40	81,85	82,00	82,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”.
   Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 91,20%, realisasinya adalah sebesar 89,11% (capaian sebesar 97,71%). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum mencapai target. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
b. Sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten dan Akuntabel, dengan indikator “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”.
      Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 100,00%, realisasinya adalah sebesar 97,83% (capaian sebesar 97,83%). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum mencapai target. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
   2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan indikator “Nilai AKIP Bappeda”.
      Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 82,00%, realisasinya adalah sebesar 82,00% (capaian sebesar 100,00%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					PRO YEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, dimana pada tahun 2024 disusun RPJPD Kota Semarang periode Tahun 2025-2045. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Selain indikator Pelayanan Bappeda Kota Semarang yang sudah disebutkan di atas, Bappeda Kota Semarang juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Pekerjaan Umum.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pekerjaan Umum sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
	2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
	3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
	4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
	5) Jumlah kerja samapenyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, selain memenuhi capaian IKK di atas Bappeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 3 program, 12 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan pada Bappeda di tahun 2025, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (100,00%), 10 kegiatan (83,33%) dan 26 sub kegiatan (56,52%).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 20.243.988.064,- (61,86%).

Selain realisasi dari target pelayanan Bappeda Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda Kota Semarang sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,16	5,73	5,79	5,62	-
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	1,19	4,99	2,84	1,69	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,12	29,75	29,88	29,70	-
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,65	28,85	28,78	28,35	-
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-84,20	83,55	84,08	84,43	85,24	-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	15.425	16.047	16.420	16.990	-
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,32	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,56	4,24	4,23	4,03	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	9,54	7,60	5,99	5,82	-
	ASPEK DAYA SAING											
	Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp.	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	123,67	137,12	146,87	156,57	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Newrenbang
   Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence-based planning).

3. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
   Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota", "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia", serta "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan". Namun capaian dari indikator-indikator tersebut telah memiliki peringkat kinerja "Sangat Tinggi" (>90) berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan diantaranya :

1. Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi SIPD-RI, sebagai pengganti aplikasi SIPD sebelumnya. Aplikasi ini masih dalam proses pengembangan, sehingga dibutuhkan banyak diskusi serta *trial and error*. Beberapa menu juga belum optimal sepenuhnya, sehingga dapat berpengaruh terhadap tampilan atribut program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD, RKA, DPA, dan juga pada APBD.
   Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun SIPD-RI dari Kemendagri, terutama mengenai penyesuaian menu, proses entry, serta penyesuaian atribut program, kegiatan, dan sub kegiatan secara manual pada dokumen RKPD.
2. Pada tahun 2025 Bappeda Kota Semarang melaksanakan rangkaian penyusunan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Kendala yang dihadapi adalah adanya petunjuk baru, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang baru ditetapkan pada akhir Maret 2025, di saat proses penyusunan RPJMD dan Renstra sudah berjalan.
   Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain segera melakukan berbagai penyesuaian dengan regulasi baru, melakukan koordinasi secara aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, mengadakan workshop penyusunan RPJMD, dan melaksanakan pendampingan terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda Kota Semarang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
3) Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*".
   Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil/dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
   Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
      Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
      Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan

stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

1) Koordinasi Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program prioritas. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025, pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana dari 11 indikator tujuan RPJMD, sebanyak 6 indikator telah mencapai atau melampaui target tahun 2025, sementara 5 indikator belum mencapai target. Adapun untuk indikator sasaran RPJMD, dari 38 indikator sasaran baru sebanyak 18 indikator telah mencapai atau melampaui target, sedangkan 20 indikator belum mencapai target.
   Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang dapat tercapai, diantaranya melalui :
   a. Pemantauan capaian target indikator kinerja secara berkala (tahunan dan atau triwulanan), dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
   b. Verifikasi dan penetapan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kinerja, serta mengintegrasikannya dengan Penilaian Kinerja Organisasi;
   c. Pemantauan implementasi program prioritas RPJMD yang tertuang secara bertahap dalam kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
   d. Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran yang menganut "*e-performance based budgeting*" agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
   e. Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2) Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Selain hal tersebut, untuk tahun 2025 secara khusus Bappeda Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
2) Magang Tematik;
3) Kampung Tematik Produktif;
4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
5) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
6) Unit Kerja Promosi Kota;
7) Pengembangan Sport Tourism;
8) Penyusunan Masterplan Perikanan Berkelanjutan Dalam Mendukung Blue Economy di Kota Semarang;
9) Penyusunan Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan Dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang;
10) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
11) Gerakan Bersama Forum CSR;
12) Kota Ramah HAM;
13) Musrenbang Perempuan (Fasilitasi Regulasi);
14) Semarang Kota Inklusif;
15) Rooftop Solar Panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
16) Pengadaan Lahan Perluasan TPA;
17) Mengubah Air dari Masalah (banjir dan rob) menjadi Potensi (*Water as Leverage*);
18) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
19) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
20) Revitalisasi Semarang Lama;
21) Pembangunan Tram;
22) Transportasi Massal Terintegrasi;
23) Terminal Angkutan Barang/Peti Kemas;
24) Akselerasi SPBE (Pelaksanaan dan Dukungan Pelaksanaan);
25) Pengelolaan Manajemen Risiko;
26) Pengembangan Alternatif Pembiayaan di Luar APBD.

3) Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda Kota Semarang perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

4) Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan

dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan : (1) Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD dan Renja berpedoman pada RPJMD dan Renstra; (2) Mengoptimalkan pengendalian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, serta memanfaatkan evaluasi hasil perencanaan sebagai feedback dalam penyusunan dokumen perencanaan; serta (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penganggaran pembangunan daerah; baik sumber daya manusia pada Bappeda Kota Semarang, maupun pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

5) Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :
   1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang - Salatiga Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo - Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
   3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   4) Perencanaan Pembangunan Responsif Gender;
   5) Percepatan Penurunan Stunting;
   6) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

   Selain regulasi/kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

6. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi
   Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

Dalam penyediaan data dan informasi, Kota Semarang telah mengembangkan SATU DATA Kota Semarang, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang sebagai Wali Data Pendukung. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengoptimalan penyediaan data dan informasi, diantaranya dengan :

1) Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi;
2) Mengintensifkan koordinasi dalam rangka pengoptimalan SATU DATA Kota Semarang;
3) Mendorong secara aktif keterisian data spasial dan pembaruan geoportal, baik melalui Forum SATU DATA atau melalui koordinasi dengan Wali Data secara langsung.

7. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda Kota Semarang

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan dengan memerhatikan pengelolaan risiko, penerapan standar dan prosedur kerja, kualitas sumber daya aparatur, kualitas pelayanan administrasi, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana.

Untuk itu perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan, diantaranya dengan :

1) Melakukan pengelolaan risiko melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Operasional OPD (ROO) dan Risiko Strategis OPD (RSO). Juga diperlukan koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi dalam mengoptimalkan standar dan prosedur kerja pada Bappeda Kota Semarang melalui penyusunan SOP;
2) Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan Bappeda; serta melakukan koordinasi dan konsultasi intensif, baik dengan BPKAD maupun Tim dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan;
3) Terkait sumber daya aparatur Bappeda, beberapa hal yang perlu terus dilakukan antara lain : (a) Melakukan pemetaan dan updating kondisi eksisting maupun kebutuhan sumber daya aparatur Bappeda, diantaranya melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bappeda; (c) Membentukan Tim Kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan kinerja;
4) Terkait pemenuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana Bappeda serta inventarisasi dan penertiban Barang Milik Daerah pada Bappeda Kota Semarang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG				22.417.736.613,48		BAPPEDA KOTA SEMARANG				22.417.736.613,48	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.054.478.729,48	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.054.478.729,48	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	13 Dokumen	63.730.000	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	13 Dokumen	63.730.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.215.000	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
			- Dokumen Renja Bappeda	1 Dokumen					- Dokumen Renja Bappeda	1 Dokumen		
			- Dokumen Perubahan Renja Bappeda	1 Dokumen					- Dokumen Perubahan Renja Bappeda	1 Dokumen		
			- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ROO Bappeda	1 Dokumen					- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ROO Bappeda	1 Dokumen		
			- Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen					- Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen		
			- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian RSO Tahun 2025-2029	1 Dokumen					- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian RSO Tahun 2025-2029	1 Dokumen		
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - DKPD	1 Dokumen	4.050.000	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - DKPD	1 Dokumen	4.050.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.770.000	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.770.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.025.000	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.025.000	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	10.401.061.304	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	10.401.061.304	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	1. Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	10.401.061.304	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	1. Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	10.401.061.304	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	10.010.956.304	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	10.010.956.304	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	388.525.000	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	388.525.000	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	1.580.000	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	1.580.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	450.000	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	450.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	900.000	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	900.000	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	230.000	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	230.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	163.515.000	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	163.515.000	
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	163.515.000	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	163.515.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	163.515.000	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	163.515.000	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	1.426.172.425,48	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	1.426.172.425,48	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	632.422.649,46	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	632.422.649,46	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.465.000	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.465.000	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	43.885.000,30	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	43.885.000,30	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	60.276.000	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	60.276.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.994.649,16	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.994.649,16	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.000.000	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	329.812.000	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	329.812.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	153.990.000	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	153.990.000	
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	182.994.857,02	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	182.994.857,02	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	7.825.000,42	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	7.825.000,42	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	175.169.856,60	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	175.169.856,60	
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	610.754.919	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	610.754.919	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.960.001	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.960.001	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	337.029.918	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	337.029.918	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	237.765.000	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	237.765.000	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	2.653.255.000	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	2.653.255.000	
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	1.889.570.000	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	1.889.570.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	- Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	130.382.000	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	- Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	130.382.000	
			- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan		
			- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	103.023.000	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	103.023.000	
			- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan		
			- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	306.416.000	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	306.416.000	
			- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan		
			- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan					- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	2.525.000	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	2.525.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.347.224.000	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.347.224.000	
			- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen					- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Dokumen Perencanaan	-					- Jumlah Dokumen Kajian Dokumen Perencanaan	-		
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	160.825.000	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	160.825.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	135.900.000	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	135.900.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	24.925.000	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	24.925.000	
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	602.860.000	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	602.860.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	312.640.000	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	312.640.000	
			- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen					- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen		
			- Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Renstra OPD	1 Dokumen					- Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Renstra OPD	1 Dokumen		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	290.220.000	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	290.220.000	
			- Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Kota Semarang Tahun 2025	4 Dokumen					- Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Kota Semarang Tahun 2025	4 Dokumen		
			- Jumlah Laporan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026–2031	1 Dokumen					- Jumlah Laporan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026–2031	1 Dokumen		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.924.879.000	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.924.879.000	
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.924.879.000	5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.924.879.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	179.580.000	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	179.580.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Rencana Umum TMMD	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Rencana Umum TMMD	1 Dokumen		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	166.914.000	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	166.914.000	
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan					- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	942.270.000	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	942.270.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) Tahun 2025 -2029	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) Tahun 2025 -2029	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Support System dan Lomba Perilaku Destruktif	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Support System dan Lomba Perilaku Destruktif	1 Dokumen		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	636.115.000	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	636.115.000	
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG	1 Laporan		
			- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	2 Laporan					- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	2 Laporan		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDg's Kota Semarang Tahun 2024	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDg's Kota Semarang Tahun 2024	1 Laporan		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024	1 Laporan					- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	1 Laporan					- Jumlah Laporan Optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Laporan		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.871.173.884	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.871.173.884	
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.871.173.884	5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.871.173.884	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.026.560.000	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.026.560.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang	1 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Pengaruh Kebudayaan Tionghoa Terhadap Peradaban dan Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Pengaruh Kebudayaan Tionghoa Terhadap Peradaban dan Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang	1 Dokumen		
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	437.325.000	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	437.325.000	
			-Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		
			-Jumlah Kajian Naskah Akademis Pengusulan K.H. Sholeh Darat menjadi Pahlawan Nasional	1 Laporan					- Jumlah Kajian Naskah Akademis Pengusulan K.H. Sholeh Darat menjadi Pahlawan Nasional	1 Laporan		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.390.388.884	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.390.388.884	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Ketahanan Pangan	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Masterplan Ketahanan Pangan	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Program Inkubasi Bisnis Semarak Muda Semarang 2025	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Program Inkubasi Bisnis Semarak Muda Semarang 2025	1 Dokumen		
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	16.900.000	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	16.900.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perangkat Daerah Bidang SDA		- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan			Perangkat Daerah Bidang SDA		- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.913.950.000	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.913.950.000	
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.913.950.000	5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.913.950.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	1.783.390.000	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	1.783.390.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo	1 Dokumen		
			- Jumlah Kajian Pengembangan Jaringan Irigasi	1 Dokumen					- Jumlah Kajian Pengembangan Jaringan Irigasi	1 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Ranperwal RP3KP	1 Dokumen					- Jumlah Ranperwal RP3KP	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kota Semarang	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kota Semarang	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Rencan Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Banjir	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Rencan Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Banjir	1 Dokumen		
			- Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)	1 Dokumen					- Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)	1 Dokumen		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	256.300.000	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	256.300.000	
			- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1 Laporan					- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025	1 Laporan					- Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025	1 Laporan		
			- Laporan Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Laporan					- Laporan Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Laporan		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Kode Rekening	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	654.355.000	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	654.355.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen		
			- Jumlah Dokumen Kajian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1 Dokumen					- Jumlah Dokumen Kajian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1 Dokumen		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	219.905.000	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	219.905.000	
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		
			- Jumlah Laporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Laporan					- Jumlah Laporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Laporan		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", yang selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2025, yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%;
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382;
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter".

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah beserta fokusnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan, didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada :

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28 – 8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80 – 5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20 – 4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis.

4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Bila disandingkan antara target dan capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Provinsi Jawa Tengah	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%.
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,5 – 5 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 beserta perubahannya merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 beserta perubahannya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Bappeda maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat", dengan indikator tujuan "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Semarang yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Bappeda.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Bappeda akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan baseline nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	91,20
SASARAN 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	82,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Bappeda Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi Sakip/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat; perekonomian dan sumber daya alam; serta infrastruktur dan kewilayahan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG					30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613,48	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					13.954.087.872	13.861.087.872	12.054.478.729,48	APBD Kota Semarang
		1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%				APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	130.300.000	130.300.000	63.730.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.700.000	50.700.000,00	1.215.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Renja Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Dokumen Perubahan Renja Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ROO Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian RSO Tahun 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - DKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	4.050.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	4.770.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	2.025.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	2.385.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.035.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
5.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Waidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	10.946.583.000	10.818.288.280	10.401.061.304	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	10.944.933.000	10.818.288.280	10.401.061.304	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	10.631.433.000	10.503.138.280	10.010.956.304	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	313.500.000	313.500.000	388.525.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.580.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	450.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	900.000	900.000	900.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	250.000	230.000	APBD Kota Semarang
5.01.01									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	100%	100%	317.600.000	317.600.000	163.515.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	317.600.000	317.600.000	163.515.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	65 Orang	60 Orang	317.600.000	317.600.000	163.515.000	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	2.559.604.872	2.594.899.592	1.426.172.425,48	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.722.104.872	1.712.099.592	632.422.649,46	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	206.237.360	181.237.360	3.465.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	50.400.000	44.394.720	43.885.000,30	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	64.000.000	72.500.000	60.276.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	22.385.512	22.385.512	20.994.649,16	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	68.000.000	68.000.000	20.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	770.000.000	770.000.000	329.812.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	541.082.000	553.582.000	153.990.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	153.200.000	183.700.000	182.994.857,02	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.200.000	8.200.000	7.825.000,42	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	147.000.000	175.500.000	175.169.856,60	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	100%	100%	684.300.000	699.100.000	610.754.919	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.000.000	44.000.000	35.960.001	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	400.700.000	415.500.000	337.029.918	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	239.600.000	239.600.000	237.765.000	APBD Kota Semarang
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					4.510.000.000	4.525.500.000	2.653.255.000	APBD Kota Semarang
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	100%	100%	4.510.000.000	4.525.500.000	2.653.255.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	100%	100%	3.190.000.000	3.190.000.000	1.889.570.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000	300.000.000	130.382.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000	200.000.000	103.023.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	630.000.000	630.000.000	306.416.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	160.000.000	160.000.000	2.525.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000.000	1.900.000.000	1.347.224.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Kajian Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-				
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	300.000.000	300.000.000	160.825.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	135.900.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100.000.000	100.000.000	24.925.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	100%	100%	1.020.000.000	1.035.500.000	602.860.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	700.000.000	700.000.000	312.640.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
		- Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Renstra OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	320.000.000	335.500.000	290.220.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Kota Semarang Tahun 2025	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
		- Jumlah Laporan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026 – 2031	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					11.978.000.000	14.338.988.064	7.710.002.884	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.520.000.000	2.582.000.000	1.924.879.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.520.000.000	2.582.000.000	1.924.879.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	315.500.000	179.580.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Rencana Umum TMMD	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	120.000.000	262.700.000	166.914.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporam	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	988.300.000	942.270.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Kegiatan TOT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-				
		- Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen	-	-				
		- Jumlah Dokumen Pembangunan Digitalisasi Arsip Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Manusia	1 Dokumen	-	-				
		- Jumlah Dokumen Pengembangan Informasi Layak Anak Terintegrasi	1 Dokumen	-	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) Tahun 2025 -2029	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Naskah Akademis dan Raperda Pencegahan dan Penurunan Stunting	-	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Support System dan Lomba Perilaku Destruktif	-	-	1 Dokumen				
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.000.000.000	1.015.500.000	636.115.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan				
		- Jumlah Kajian Evaluasi Pemberian Insentif Kader di Wilayah Kota Semarang	1 Laporan	-	-				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDg's Kota Semarang Tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Kajian Evaluasi Pembinaan Atlet Muda Berprestasi Melalui Kelas Khusus Olahraga	1 Laporan	1 Laporan	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Laporan	1 Laporan	-				
		- Jumlah Laporan Optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	-	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	-	-	1 Laporan				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	3.850.000.000	5.633.488.064	2.871.173.884	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	3.850.000.000	5.633.488.064	2.871.173.884	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	1.975.000.000	1.975.000.000	1.026.560.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Pengaruh Kebudayaan Tionghoa Terhadap Peradaban dan Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Ekosistem Pariwisata Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	725.000.000	725.000.000	437.325.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Event Penguatan Ekonomi Kreatif dan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-				
		- Jumlah Kajian Naskah Akademis Pengusulan K.H. Sholeh Darat menjadi Pahlawan Nasional	-	-	1 Laporan				
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000	2.883.488.064	1.390.388.884	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Umum Energi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Rodmap Optimalisasi Sumber Daya Alam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penguatan kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	-	-				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Ketahanan Pangan	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Program Inkubasi Bisnis Semarak Muda Semarang 2025	-	-	1 Dokumen				
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	16.900.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.608.000.000	6.123.500.000	2.913.950.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.608.000.000	6.123.500.000	2.913.950.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	2.588.000.000	3.103.500.000	1.783.390.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	1 Dokumen	-	-				
		- Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah (RIPDA)	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Traffic Pada Kawasan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Kajian Pengembangan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Kajian Pengembangan Potensi Tampungan Air Pada Sistem Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Ranperwal RP3KP	-	-	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kota Semarang	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Rencan Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Banjir	-	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)	-	-	1 Dokumen				
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	500.000.000	500.000.000	256.300.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Laporan Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	-	-	1 Laporan				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000	1.800.000.000	654.355.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Kajian Elemen Bangunan di Situs Kota Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Historic Impact Assesment Situs Kota Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Historic Urban Landscape Situs Kota Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
		- Jumlah Dokumen Kajian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Sport Centre Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-				
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	720.000.000	720.000.000	219.905.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

4.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Semarang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perencanaan			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100
4.	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD tahunan	%	100

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

4.3. INOVASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang terus dikembangkan, diantaranya :

4. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
5. Newrenbang
   Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence-based planning).

6. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
   Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan III dan IV tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

31. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

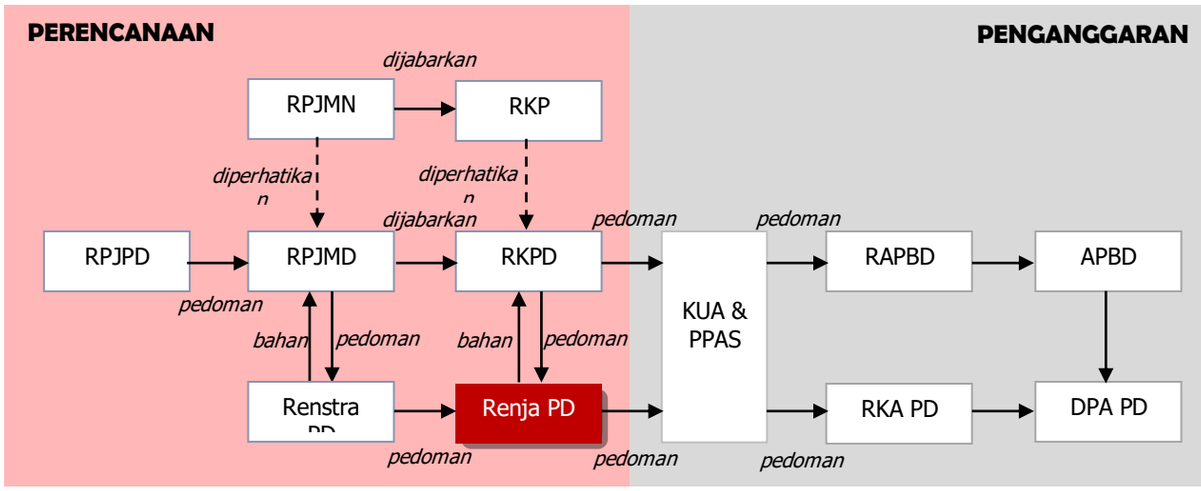

Gambar I.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD, yang dapat berupa:
   1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
   2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
   3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. Keadaan darurat;
e. Keadaan luar biasa;
f. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 164);

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);

z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

aa. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan hasil pembahasan penajaman IKU BPKAD Tahun 2021-2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang pada tanggal 28 November 2022;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KEUANGAN										
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	41,67%	41,67%	41,67%	41,67%
		-	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%
		-	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		-	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	42,21%	42,21%	42,21%	42,21%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	8 Dok	9	4	44%	4	50,00%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 Dok						
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dok	6	2	33%		
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dok						
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dok						
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	1	0	0%		
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dok						
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	1	1	100%		
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dok						
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	1	0	0%		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dok						
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 lap	4	3	75%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 dok	0	0%		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	63%	62,50%	62,50%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00%						
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 orang/bulan	88	88	100%		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00%						
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dok	12	6	50%		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok						
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 lap	1	0	0%		
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok						
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 lap	1	1	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn						
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	100	0	0%		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	53,67%	54%	53,67%	53,67%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis						
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 paket	1	1	100%		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis						
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	3	1	33%		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis						
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 paket	2	1	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis						
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 paket	1	0	0%		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis						
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	1	1	100%		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25						
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dok	10	0	0%		
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang berkunjung	7.000 orang						
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 lap	36	12	33%		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn						
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 lap	150	30	20%		
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dok	1	1	100%		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis						
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dok	4	0	0%		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	95 unit						
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		230 unit	40	0	0%		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	67%	66,67%	66,67%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00%						
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 lap	1	1	100%		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00%						
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	48,51%	49%	48,51%	48,51%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit						
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	1	1	100%		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37 unit	45	42	93%		
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit						
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	50	0	0%		
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit						
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		16 unit	21	16	76%		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung						
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	2	0	0%		
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 unit						
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 unit	172	37	22%		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,62%	5,01%	0,82%	5,01%	611%	5,01%	808,06%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran		100,53%	100,00%	46,48%	46%	46,48%	46,48%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS	100,00%	100,00%	100,00%	9,74%	10%	9,74%	9,74%
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dok						
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dok						
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Persentase RKA perubahan terverifikasi		52 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi		52 dok	52	0	0%		
		- Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00%						
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	- Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi		52 dok	52	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	SKPD									
		-	Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00%						
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD		52 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok						
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan,buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok						
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD		12 dok	15	9	60%		
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100,00%						
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Persentase Anggaran Belanja Daerah		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100,00%						
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan		2 dok	3	2	67%		
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100,00%						
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 kgtn						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	100,00%	36,61%	37%	36,61%	36,61%	100,00%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Koordinasi							
		- Laporan Harian Kasda							
		- Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas							
		- Laporan Pendapatan Transfer							
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754 dok	720	360	50%			754 dok
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Bendel SPD							
		- Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran							
		- Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD							
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 dok	408	153	38%			408 dok
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
		- Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 dok	0	0	0%			1 dok
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 dok	6	5	83%			6 dok
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang							
		- Laporan Progres Transaksi Non Tunai							
		- Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai							
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 dok	48641	7705	16%			48641 dok

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah SP2D di diselesaikan							
		- Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan							
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 lap	2	1	50%			2 lap

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah							
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17 dok	0	0	0%			17 dok
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan							
		- Terealisasinya belanja BPJS dan JKK, JKM dan THT							
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 dok	14	6	43%			14 dok
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 orang	1200	600	50%			1200 orang
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	100,00%	30,56%	31%	30,56%	30,56%	100,00%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 lap	624	312	50%			612 lap
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan							
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 dok	12	6	50%			12 dok
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 lap	12	9	75%			12 lap
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan							
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 lap	12	6	50%			12 lap
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD							
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	4 dok	4	2	50%			4 dok

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK							
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dok	3	1	33%			3 dok
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 dok	6	2	33%			6 dok
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	- Jumlah data yang dikelola							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pelaksanaan APBD									
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dok	1	0	0%			1 dok
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia							
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1	0	0%			1 dok
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola							
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dok	1	0	0%			1 dok
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun							
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 orang	250	0	0%			250 orang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah pembinaan yang dilakukan							
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 lembaga	39	0	0%			39 lembaga
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25%		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		1 lap	1	0	0%		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00%						
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 lap	12	6	50%		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Legalitas Aset	100,00%	100,00%	50,00%	50%	50,00%	50,00%	100,00%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Managemen Aset	1 lap	0	0	0%			1 lap
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun							
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12 lap	12	6	50%			12 lap
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	100,00%	100,00%	46,23%	46%	46,23%	46,23%	100,00%
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	46,23%	46%	46,23%	46,23%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Daerah									
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD							
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	1	1	100%			1 dok
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Persentase penatausahaan aset daerah							
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 dok	1	1	100%			2 dok
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD baru yang diinvertarisir							
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 dok	1	0	0%			2 dok
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah aset yang telah bersertifikat							
5.02.03.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 lap	4	2	50%			4 lap
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD yang dinilai							
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 lap	11	3	27%			4 lap
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	-	Jumlah pengawasan dan pengendalian							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Barang Milik Daerah									
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 lap	10	5	50%			10 lap
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan							
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 lap	10	3	30%			4 lap
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina							
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 lap	10	3	30%			4 lap

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 Kegiatan yang sudah mencapai 50% ke atas yaitu:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun alasan kinerja pada beberapa kegiatan belum mencapai 50% karena:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagian akan dilakanakan pada triwulan 3 untuk Perubahan APBD 2025 dan Penyusunan Renstra pada triwulan 4;
2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah akan dilaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Monitoring Pengelolaan Keuangan pada triwulan 4;
3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan triwulan 3 sesuai dengan jadwal Perubahan APBD 2025;
4) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah untuk beberapa sub kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS, RKA, serta APBD dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
5) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah beberapa sub kegiatan seperti rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
6) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah beberapa sub kegiatan seperti pembinaan akuntansi, penyusunan kebijakan dan sisdur akuntansi serta pertanggungjawaban APBD dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran induk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu anggaran induk beserta realisasi

anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.2
Realisasi Keuangan BPKAD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEUANGAN			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp116.816.216.032,00	Rp51.447.731.314,00	44,04
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp71.848.558,00	Rp3.864.000,00	5,38
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp52.984.996,00	Rp0,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4.075.254,00	Rp0,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp4.851.699,00	Rp0,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4.865.574,00	Rp2.535.000,00	52,10
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp2.081.139,00	Rp0,00	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp2.989.896,00	Rp1.329.000,00	44,45
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp50.000.000,00	Rp0,00	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.652.194.756,00	Rp7.084.859.450,00	51,90
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.204.337.920,00	Rp6.866.929.450,00	52,01
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp447.360.000,00	Rp217.930.000,00	48,71
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp248.418,00	Rp0,00	-
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp248.418,00	Rp0,00	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp129.927.900,00	Rp0,00	-
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp129.927.900,00	Rp0,00	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.917.468.819,00	Rp169.045.030,00	4,32
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp18.026.445,00	Rp9.996.000,00	55,45
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp547.823.543,00	Rp28.300.000,00	5,17
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp154.638.941,00	Rp25.009.500,00	16,17
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp103.638.428,00	Rp18.551.500,00	17,90
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp28.443.439,00	Rp5.000.000,00	17,58
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.488.509,00	Rp0,00	-
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp62.431.424,00	Rp4.771.000,00	7,64
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp502.178.191,00	Rp71.417.030,00	14,22
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp14.985.000,00	Rp6.000.000,00	40,04

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp2.482.814.899,00	Rp0,00	-
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp74.406.275,00	Rp0,00	-
23	Pengadaan Mebel	Rp74.406.275,00	Rp0,00	-
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp97.638.354.531,00	Rp44.033.000.805,00	45,10
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp222.000,00	Rp11.000,00	4,95
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp96.759.944.291,00	Rp43.525.295.541,00	44,98
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp878.188.240,00	Rp507.694.264,00	57,81
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.332.015.193,00	Rp156.962.029,00	11,78
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp43.959.999,00	Rp15.651.285,00	35,60
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp500.749.965,00	Rp103.065.744,00	20,58
29	Pemeliharaan Mebel	Rp4.035.960,00	Rp0,00	-
30	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp42.359.099,00	Rp20.160.000,00	47,59
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp631.906.128,00	Rp0,00	-
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp109.004.042,00	Rp18.085.000,00	16,59
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp106.443.620.846,00	Rp1.627.761.810,00	1,53
H	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp4.044.665.344,00	Rp744.246.020,00	18,40
33	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp197.192.412,00	Rp0,00	-
34	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp238.298.222,00	Rp0,00	-
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp22.083.097,00	Rp0,00	-
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp21.912.157,00	Rp0,00	-
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp23.082.000,00	Rp0,00	-
38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp4.291.000,00	Rp0,00	-
39	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp797.494.013,00	Rp197.292.270,00	24,74
40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp561.889.093,00	Rp893.000,00	0,16
41	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp1.729.264.712,00	Rp545.745.750,00	31,56
42	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp36.563.292,00	Rp315.000,00	0,86
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp117.559.824,00	Rp0,00	-
44	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp52.506.171,00	Rp0,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
45	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp242.529.351,00	Rp0,00	-
I	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp1.144.530.519,00	Rp79.550.150,00	6,95
46	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp234.774.519,00	Rp8.815.500,00	3,75
47	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp176.749.000,00	Rp5.504.150,00	3,11
48	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp180.263.000,00	Rp3.752.000,00	2,08
49	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp92.731.000,00	Rp2.500.000,00	2,70
50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp106.929.000,00	Rp2.237.500,00	2,09
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp112.518.000,00	Rp5.010.000,00	4,45
52	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp240.566.000,00	Rp51.731.000,00	21,50
J	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp1.646.449.000,00	Rp19.465.640,00	1,18
53	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp32.200.000,00	Rp5.401.000,00	16,77
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp120.200.000,00	Rp1.345.000,00	1,12
55	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp223.200.000,00	Rp1.583.200,00	0,71
56	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp283.200.000,00	Rp9.448.200,00	3,34
57	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp299.100.000,00	Rp1.088.240,00	0,36
58	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp17.149.000,00	Rp0,00	-
59	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp81.100.000,00	Rp300.000,00	0,37
60	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp59.100.000,00	Rp0,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
61	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp153.100.000,00	Rp300.000,00	0,20
62	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp149.100.000,00	Rp0,00	-
63	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp99.500.000,00	Rp0,00	-
64	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp129.500.000,00	Rp0,00	-
K	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp99.607.975.983,00	Rp784.500.000,00	0,79
65	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp99.607.975.983,00	Rp784.500.000,00	0,79
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.566.060.901,00	Rp1.310.213.840,00	36,74
L	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.566.060.901,00	Rp1.310.213.840,00	36,74
66	Penyusunan Standar Harga	Rp167.363.461,00	Rp21.164.000,00	12,65
67	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp71.045.738,00	Rp1.400.000,00	1,97
68	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp107.737.281,00	Rp3.833.800,00	3,56
69	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp355.347.188,00	Rp3.555.050,00	1,00
70	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp209.949.430,00	Rp1.472.900,00	0,70
71	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp1.248.827.432,00	Rp863.738.265,00	69,16
72	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp910.475.044,00	Rp316.009.125,00	34,71
73	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp105.350.107,00	Rp13.434.950,00	12,75
74	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp305.798.259,00	Rp85.605.750,00	27,99
75	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp84.166.961,00	Rp0,00	-
JUMLAH		Rp226.825.897.779,00	Rp54.385.706.964,00	23,98

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel II.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana pada APBD induk yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 12 kegiatan dan 75 sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp226.875.897.779,00 dari anggaran tersebut sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp54.385.706.964,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp172.490.190.815,00.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 serta berdasarkan pertemuan pada tanggal 28 November 2022 dalam acara Desk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Bappeda ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
Tujuan (Sesuai Renstra)													
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tujuan (Hasil Pemantapan IKU)													
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	79,5	80	80,5	81	81,5	85	79,3	81,88	78,16	78,16	81
Sasaran (Sesuai Renstra)													
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
	Semarang												
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	65%	65%	75%	85%	95%	100%	65%	65%				
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	79	80	81	81,3	81,5	81,7	72,93	78,21	80	81,3	81,5	81,5
Sasaran (Hasil Pemantapan IKU)													
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	95	95,3	95,7	96	96,3	96,7	98,11	96,42	97,88	97,46	43,77	97,47
Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	89	89,5	90	90,5	91	91,5	89,68	89,77	98,54	98,88	98,88	98,89

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel;

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 6 dimensi meliputi:

   1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA-PPAS, KUA-PPAS dengan APBD serta kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS dan KUA-PPAS dengan APBD;
   2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dari penerimaan dana transfer, serta standar pelayanan minimal;

3) transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup ketepatan waktu terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan serta keteraksesan terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses etau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangrya selama dua tahun anggaran;
4) penyerapan anggaran meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer;
5) kondisi keuangan daerah mencakup kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang; serta solvabilitas layanan.; dan
6) opini Badan Pemeriksa Keuargan atas LKPD selama 3 tahun bterakhir berturut-turut.

Dengan skor masing-masing dimensi:

Tabel II.4
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2024

No	Dimensi	Nilai Pengukuran
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11,846
2	Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	20
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
4	Penyerapan Anggaran	13,333
5	Kondisi Keuangan Daerah	2,989
6	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	15
Total		78,168

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/39 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024.

Sehingga total indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 atas tahun anggaran 2023 sebesar 78,168 dan untuk penilaian tahun 2025 dilakukan pada akhir tahun.

b. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;

Sasaran tersebut diperoleh dari rata-rata Persentase penetapan APBD tepat waktu, Persentase penyerapan anggaran belanja daerah (realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah), serta Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu. Dari target tahun 2025 sebesar 97,56% sampai dengan Triwulan II capaian BPKAD sebesar 43,77% dengan rincian:

1) 0 (belum dinilai karena jadwal Penetapan APBD pada triwulan 4. Sampai dengan triwulan 2 proses penetapan APBD masih pada tahap Penyusunan RKPD.
2) 31,31 (merupakan nilai realisasi belanja daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) tahun anggaran 2024 periode 1 januari – 26 juni 2024).
3) 100 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan permohonan pembahasan untuk mendapat persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang TA 2024 pada tanggal 17 Juni 2025).

c. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional;

Nilai aset keseluruhan sebesar Rp21.556.812.807.798,00 merupakan aset tetap dan properti investasi. Nilai aset yang belum dikelola sebesar Rp241.388.475.079,00 di dalamnya terdapat aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan. Sehingga

diketahui nilai aset yang dikelola sebesar Rp21.315.424.332.719,00 yaitu 98,88%. (Sumber data Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024).

d. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan;

BPKAD Kota Semarang telah melaksanakan penilaian SAKIP pada bulan mei dan telah dievaluasi oleh Inspektorat dengan nilai 81,5 hal tersebut sesuai dengan target nilai SAKIP BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 sebesar 81,5 dengan kategori A.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

a. Kualitas sumber daya manusia;
b. Perkembangan sistem informasi yang terintegrasi;
c. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Melaksanakan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk lebih memprioritaskan kegiatan yang mendukung program strategis nasional;
    2) Menyesuaikan aturan kapitalisasi aset tetap;
    3) Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

b. Peluang
    1) Kesesuaian penganggaran belanja daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan;
    2) Menyusun perubahan kebijakan akuntansi tentang aset tetap;
    3) Melakukan penyesuaian SHS yang berlaku di Kota Semarang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan efisiensi anggaran dengan melakukan perubahan anggaran untuk kegiatan penunjang program strategis nasional dan daerah serta melakukan perubahan kebijakan akuntansi dan peraturan standar harga satuan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				188.224.776.254,50	KEUANGAN				188.224.776.254,51	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00 %	108.464.274.104,79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00 %	108.464.274.104,79	
		BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00 %			BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00 %		
		BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00 %			BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00 %		
		BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %			BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok	87.937.458,00	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok	87.937.458,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	21.332.996,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	21.332.996,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.087.354,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.087.354,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.697.299,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.697.299,00	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.075.254,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.075.254,00	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.004.659,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.004.659,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	2.989.896,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	2.989.896,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	49.750.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	49.750.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00 %	13.363.330.712,08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00 %	13.363.330.712,08	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang /bulan	12.917.323.876,08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ bulan	12.917.323.876,08	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	445.510.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	445.510.000,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	248.418,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	248.418,00	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	248.418,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	248.418,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00 %	120.182.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00 %	120.182.300,00	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	120.182.300,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	120.182.300,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	1.784.646.244,50	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	1.784.646.244,50	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.026.445,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.026.445,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.267.154,80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.267.154,80	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	173.200.594,30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	173.200.594,30	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.834.369,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.834.369,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.226.551,20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.226.551,20	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dok	1.102.440,90	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dok	1.102.440,90	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34 Lap	65.309.465,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34 Lap	65.309.465,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	225.759.847,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	225.759.847,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	146.781.305,20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	146.781.305,20	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	872.138.072,10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	872.138.072,10	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	153.573.805,80	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	153.573.805,80	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	153.573.805,80	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	153.573.805,80	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100,00 %	91.627.958.761,99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100,00 %	91.627.958.761,99	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	222.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	222.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Lap	90.756.856.521,99	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Lap	90.756.856.521,99	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	870.880.240,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	870.880.240,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	1.326.644.822,42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	1.326.644.822,42	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	424.764.810,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	424.764.810,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lapangan					
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960,00	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960,00	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	42.359.099,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	42.359.099,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	704.950.237,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	704.950.237,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	110.624.666,42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	110.624.666,42	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	76.506.724.061,31	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	76.506.724.061,32	
			Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00 %				Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00 %		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	2.968.026.003,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	2.968.026.003,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	121.944.150,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	121.944.150,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	157.246.810,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	157.246.810,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	3.420.653,70	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	3.420.653,70	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	3.045.396,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	3.045.396,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	23.680.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	23.680.000,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	124.542,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	124.542,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	558.976.848,40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	558.976.848,40	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	500.544.455,80	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	500.544.455,80	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dok	1.409.862.888,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dok	1.409.862.888,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	11.458.580,50	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	11.458.580,50	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	43.085.134,30	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	43.085.134,30	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	7.746.084,50	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	7.746.084,50	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	126.890.459,80	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	126.890.459,80	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	656.431.458,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	656.431.458,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dok	106.921.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dok	106.921.000,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dok	131.099.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dok	131.099.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	6 Dok	86.541.458,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	6 Dok	86.541.458,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dok	46.319.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dok	46.319.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Lap	79.282.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Lap	79.282.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dok	65.201.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dok	65.201.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	141.068.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	141.068.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	1.054.241.559,10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	1.054.241.559,10	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	33.980.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	33.980.000,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	25.070.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	25.070.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	99.060.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	99.060.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	127.067.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	127.067.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	259.900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	259.900.000,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	124.542,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	124.542,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	156.280.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	156.280.000,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	52.250.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	52.250.000,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	107.220.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	107.220.000,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	120.947.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	120.947.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	37.723.017,10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	37.723.017,10	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	34.620.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	34.620.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	71.828.025.041,21	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	71.828.025.041,22	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 Lap	71.828.025.041,21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 Lap	71.828.025.041,22	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	100,00 %	3.253.778.088,40	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	100,00 %	3.253.778.088,40	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00 %	3.253.778.088,40	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00 %	3.253.778.088,40	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	103.268.152,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	103.268.152,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	1 Dok	31.721.852,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	1 Dok	31.721.852,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	1 Dok	147.948.080,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	1 Dok	147.948.080,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	4 Lap	181.261.418,40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	4 Lap	181.261.418,40	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	11 Lap	171.563.755,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	11 Lap	171.563.755,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	10 Lap	1.268.532.626,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	10 Lap	1.268.532.626,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	10 Lap	1.047.926.467,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	10 Lap	1.047.926.467,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 Lap	44.086.744,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 Lap	44.086.744,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	12 Dok	251.318.994,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	12 Dok	251.318.994,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	200 Orang	6.150.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	200 Orang	6.150.000,00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional". 8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Keja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
c. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
d. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
e. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
c. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

a. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
b. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
c. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
d. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling

bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

a. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

b. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.

c. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;

d. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.

e. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

f. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

g. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).

h. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
c. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala BPKAD Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran BPKAD maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel” dengan indikator tujuan “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BPKAD Kota Semarang yaitu:

a. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;
b. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang professional;
c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase pengelolaan keuangan daerah;
b. Persentase nilai aset yang dikelola;
c. Nilai SAKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	97,47
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	%	98,89
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	81,5

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” dan indikator sasaran “Persentase pengelolaan keuangan daerah, Persentase nilai aset yang dikelola, dan Nilai SAKIP”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel IV.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02	KEUANGAN					203.521.163.979	226.875.897.779	188.224.776.255	APBD	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	100%	100%	116.866.216.032	116.866.216.032	108.464.274.105	APBD	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	121.848.558	121.848.558	87.937.458	APBD	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	52.984.996	52.984.996	21.332.996	APBD	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.075.254	4.075.254	3.087.354	APBD	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	3.697.299	APBD	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.865.574	4.865.574	4.075.254	APBD	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139	2.081.139	3.004.659	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.989.896	2.989.896	2.989.896	APBD	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.750.000	APBD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	100%	100%	13.907.268.836	13.652.194.756	13.363.330.712	APBD	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.459.412.000	13.204.337.920	12.917.323.876	APBD	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	447.360.000	447.360.000	445.510.000	APBD	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	248.418	248.418	248.418	APBD	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248.418	248.418	248.418	APBD	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	100%	100%	129.927.900	129.927.900	120.182.300	APBD	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	129.927.900	129.927.900	120.182.300	APBD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%	3.917.468.819	3.917.468.819	1.784.646.245	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.026.445	18.026.445	18.026.445	APBD	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	547.823.543	547.823.543	200.267.155	APBD	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	154.638.941	154.638.941	173.200.594	APBD	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	103.638.428	103.638.428	59.834.369	APBD	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	28.443.439	28.443.439	22.226.551	APBD	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	2.488.509	2.488.509	1.102.441	APBD	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	36 Laporan	34 Laporan	62.431.424	62.431.424	65.309.465	APBD	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	502.178.191	502.178.191	225.759.847	APBD	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.985.000	14.985.000	146.781.305	APBD	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.482.814.899	2.482.814.899	872.138.072	APBD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	74.406.275	74.406.275	153.573.806	APBD	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	42 Unit	74.406.275	74.406.275	153.573.806	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	100%	100%	97.383.280.451	97.638.354.531	91.627.958.762	APBD	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	222.000	222.000	222.000	APBD	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.759.944.291	96.759.944.291	90.756.856.522	APBD	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	623.114.160	878.188.240	870.880.240	APBD	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	100%	100%	1.332.015.193	1.332.015.193	1.326.644.822	APBD	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	APBD	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	45 Unit	500.749.965	500.749.965	424.764.810	APBD	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	4.035.960	APBD	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	21 Unit	42.359.099	42.359.099	42.359.099	APBD	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	631.906.128	631.906.128	704.950.237	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	172 Unit	172 Unit	109.004.042	109.004.042	110.624.666	APBD	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	0,82%	0,82%	83.388.887.046	106.443.620.846	76.506.724.061	APBD	
		Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100%	100%					
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	4.044.665.344	4.044.665.344	2.968.026.003	APBD	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	197.192.412	197.192.412	121.944.150	APBD	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	238.298.222	238.298.222	157.246.810	APBD	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	22.083.097	22.083.097	3.420.654	APBD	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	21.912.157	21.912.157	3.045.396	APBD	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	23.082.000	23.082.000	23.680.000	APBD	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	4.291.000	4.291.000	124.542	APBD	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	797.494.013	797.494.013	558.976.848	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	561.889.093	561.889.093	500.544.456	APBD	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1.729.264.712	1.729.264.712	1.409.862.888	APBD	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	36.563.292	36.563.292	11.458.581	APBD	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	117.559.824	117.559.824	43.085.134	APBD	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	52.506.171	52.506.171	7.746.085	APBD	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	242.529.351	242.529.351	126.890.460	APBD	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	1.144.530.519	1.144.530.519	656.431.458	APBD	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	720 Dokumen	720 Dokumen	234.774.519	234.774.519	106.921.000	APBD	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	408 Dokumen	408 Dokumen	176.749.000	176.749.000	131.099.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	180.263.000	180.263.000	86.541.458	APBD	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	48641 Dokumen	48641 Dokumen	92.731.000	92.731.000	46.319.000	APBD	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	106.929.000	106.929.000	79.282.000	APBD	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	112.518.000	112.518.000	65.201.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	240.566.000	240.566.000	141.068.000	APBD	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	100%	100%	1.646.449.000	1.646.449.000	1.054.241.559	APBD	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	624 Laporan	624 Laporan	32.200.000	32.200.000	33.980.000	APBD	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	120.200.000	120.200.000	25.070.000	APBD	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	223.200.000	223.200.000	99.060.000	APBD	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	283.200.000	283.200.000	127.067.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	299.100.000	299.100.000	259.900.000	APBD	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	17.149.000	17.149.000	124.542	APBD	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	81.100.000	81.100.000	156.280.000	APBD	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	59.100.000	59.100.000	52.250.000	APBD	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	153.100.000	153.100.000	107.220.000	APBD	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	149.100.000	149.100.000	120.947.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	250 Orang	99.500.000	99.500.000	37.723.017	APBD	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	129.500.000	129.500.000	34.620.000	APBD	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100%	100%	100%	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041	APBD	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041	APBD	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	100%	100%	100%	3.266.060.901	3.566.060.901	3.253.778.088	APBD	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100%	100%	100%	3.266.060.901	3.566.060.901	3.253.778.088	APBD	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	167.363.461	167.363.461	103.268.152	APBD	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	71.045.738	71.045.738	31.721.852	APBD	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107.737.281	107.737.281	147.948.080	APBD	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	355.347.188	355.347.188	181.261.418	APBD	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	209.949.430	209.949.430	171.563.755	APBD	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.248.827.432	1.248.827.432	1.268.532.626	APBD	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	610.475.044	910.475.044	1.047.926.467	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	105.350.107	105.350.107	44.086.744	APBD	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	305.798.259	305.798.259	251.318.994	APBD	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	84.166.961	84.166.961	6.150.000	APBD	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 serta disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat perubahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

32. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

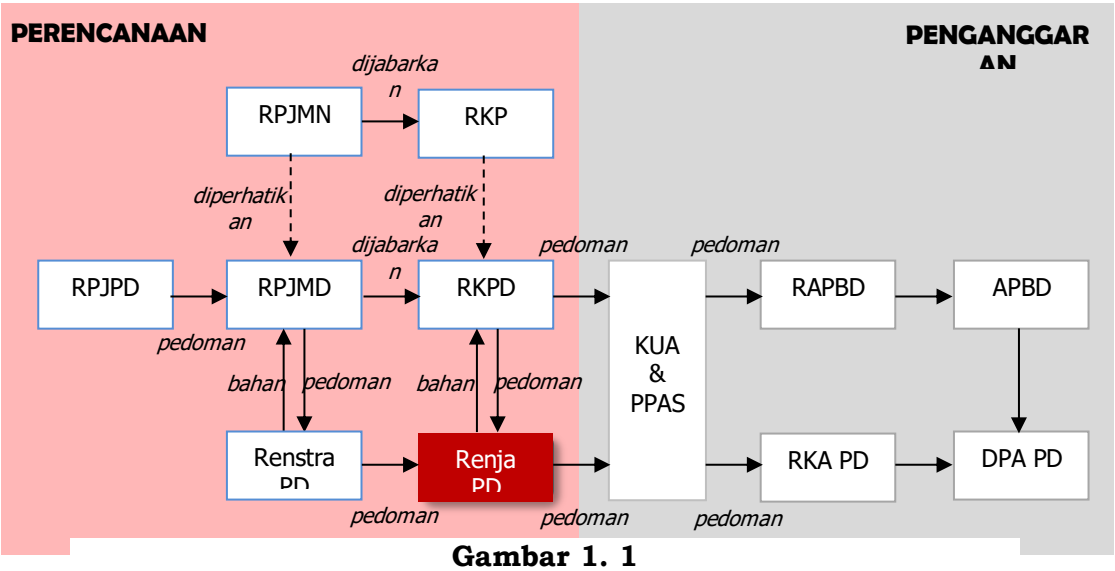

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2025 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 66);

r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);

t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11	12
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100	100%	0	0	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	0	100%	0

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	100%	100	100%	0	0	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	0	100%	0
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100%	100	100%	0	0	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	100%	0
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100	100%	0	0	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100%	0

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10% (80%	10%	24,7%	247%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10% (20%)	24,7%	247%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10% (80%	10%	24,7%	247%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10% (20%)	24,7%	247%
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100%	(60%)	100%	25%	25%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	25%	25%
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	100%	(80%)	100%	100%	100%				

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	100%	(80%)	100%	100%	100%				
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	100%	(80%)	100%	100%	100%				
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	100%	(80%)	100%	100%	100%				
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	100%	(80%)	100%	60%	60%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100.00 (20%)	60%	60%
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan	100%	(80%)	100%	42%	42%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.00 (20%)	42%	42%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	100%	(80%)	100%	42%	42%				
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	100%	(80%)	100%	42%	42%				
			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	100%	(80%)	100%	42%	42%				
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	100%	(80%)	100%	70%	70%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100.00 (20%)	70%	70%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	100%	(80%)	100%	70%	70%				
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	100%	(80%)	100%	75%	75%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100.00 (20%)	75%	75%
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(80%)	100%	75%	75%				
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(80%)	100%	75%	75%				
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	100%	(80%)	100%	62%	62%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00 (20%)	62%	62%
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100%	(80%)	100%	50%	50%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100.00 (20%)	50%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	100%	(80%)	100%	50%	50%				
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	100%	(80%)	100%	53%	53%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100.00 (20%)	53%	53%
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	100%	(80%)	100%	53%	53%				
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100%	(80%)	100%	53%	53%				
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	100%	(80%)	100%	53%	53%				

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	100%	(80%)	100%	53%	53%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00 (20%)	53%	53%
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	100%	(80%)	100%	60%	60%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100.00 (20%)	60%	60%
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100%	(80%)	100%	60%	60%				
			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	100%	(80%)	100%	60%	60%				
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	100%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan pendapatan daerah	100%	(80%)	100%	100%	100%				
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	(80%)	100%	55%	55%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 (20%)	55%	55%
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	(80%)	100%	24%	24%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 (20%)	24%	24%
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	(80%)	100%	49%	49%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 (20%)	49%	49%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	(80%)	100%	100%	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	(80%)	100%	48%	48%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 (20%)	48%	48%
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	100%	(80%)	100%	33%	33%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 (20%)	33%	33%
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	100%	(80%)	100%	33%	33%				

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100.00 (20%)	100%	100%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	100%	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100%	(80%)	100%	49%	49%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100.00 (20%)	49%	49%
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	(80%)	100%	50%	50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 (20%)	50%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	(80%)	100%	46%	46%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 (20%)	46%	46%
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100%	(80%)	100%	50%	50%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100.00 (20%)	50%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	(80%)	100%	0%	0%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	(80%)	100%	100%	100%	Tercapainya admnistrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	100%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	(80%)	100%	73%	73%	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100.00 (20%)	73%	73%
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	(80%)	100%	60%	60%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	60%	60%
	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	(80%)	100%	71%	71%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.00 (20%)	71%	71%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	(80%)	100%	74%	74%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	74%	74%
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	(80%)	100%	84%	84%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.00 (20%)	84%	84%
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100%	(80%)	100%	60%	60%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 (20%)	60%	60%
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	(80%)	100%	66%	66%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 (20%)	66%	66%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	(80%)	100%	43%	43%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 (20%)	43%	43%
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	(80%)	100%	0%	0%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	0%	0%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	(80%)	100%	62%	62%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	62%	62%
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	100%	(80%)	100%	67%	67%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 (20%)	67%	67%
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	(80%)	100%	67%	67%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 (20%)	67%	67%
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	(80%)	100%	55%	55%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	55%	55%
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	(80%)	100%	60%	60%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	60%	60%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	(80%)	100%	57%	57%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100.00 (20%)	57%	57%
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	(80%)	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	(80%)	100%	52%	52%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00 (20%)	52%	52%
	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	100%	(80%)	100%	0%	0%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 (20%)	0%	0%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Capaian Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		100%	54%	54%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	54%	54%
	5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100%		100%	0%	0%	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	0%	0%
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		100%	33%	33%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 (20%)	33%	33%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.774.448.308	18.452.493.583	24.03%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.800.094	6.872.500	3.26%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.600.109	1.055.700	1.08%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.011.400	109.600	1.22%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.610.900	210.800	1.99%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.655.400	1.984.800	22.93%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.954.900	-	0,00%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.967.385	3.511.600	11.34%
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	0.00%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.327.199.910	15.380.116.150	22.84%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.423.893.280	15.007.316.150	22.59%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	901.623.630	372.690.000	41.34%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	110.000	49.15%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.235.400	0	0,00%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	0	0.00%
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	272.048.600	43.510.050	15.99%
13	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	219.098.610	39.960.050	18.24%
14	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	52.949.990	3.550.000	06.70%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	472.423.523	34.939.600	07.40%
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	229.942.523	0	00.00%
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	242.481.000	34.939.600	14.41%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.484.034.431	342.062.126	23.05%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.670.500	28.675.000	45.04%
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.391.790	32.850.139	35.17%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.320.646	18.108.300	17,53%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	202.667.510	28.539.800	14.08%
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	5.790.000	48.25%
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.500.000	8.937.600	23.83%
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.105.375	125.161.287	18.22%
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	62.100.000	0	00.00%
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	222.278.610	94.000.000	42.29%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.453.318	0	00.00%
26	Pengadaan Mebel	65.029.160	0	00.00%
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.397.668	0	00.00%
28	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.026.490	0	00.00%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.003.531.166	1.990.235.584	49.71%
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	59.999.260	100%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	563.926.360	287.263.043	50.94%
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.003.903	32.755.260	35.60%
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.287.600.903	1.610.218.021	48.98%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.653.957.266	654.757.573	24,67%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	31.044.518	70.62%
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.278.769.910	257.860.399	20.16%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
35	Pemeliharaan Mebel	16.143.840	-	0,00%
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	541.223.887	181.988.130	33.63%
37	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.394.367	3.013.650	16.38%
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	755.465.263	180.850.876	23.94%
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	29.744.450.372	5.183.233.818	17.43%
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	29.744.450.372	5.183.233.818	17.43%
39	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	665.978.554	136.949.518	20.56%
40	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	675.038.940	291.161.000	43.13%
41	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.882.198.800	1.242.489.160	21.12%
42	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.083.008.160	509.618.500	16.53%
43	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	424.588.570	155.555.240	36.64%
44	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.494.398.967	745.881.200	13.58%
45	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.965.434.745	561.717.000	14.17%
46	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	432.069.530	120.381.000	27.86%
47	Penagihan Pajak Daerah	7.976.533.490	1.292.910.700	16.21%
48	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	201.208.020	41.190.000	20.47%
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	181.965.786	16.428.000	09.03%
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	762.026.810	68.952.500	09.05%
Total		106.518.898.680	23.635.727.401	22.19%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 9 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 106.518.898.680,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 23.635.727.401,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 82.883.171.279,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2024
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	49,47	51,23	52,96	52,77	60,58	54,57	54,57
Sasaran:														
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	10	10				17,85	6,71	11,36	1,79	24,70		
	2. Realisasi PAD terhadap Target PAD		100	100	100	100	100		100,49	98,30	51,00	43,59	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2024
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1. Nilai AKIP	74	74	74	74	74	74	76,52	78,06	78,75	79,10	79,70	74	74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah" yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah" , dengan realisasi sebesar 60,58% sampai dengan Triwulan II dari target 54,57% pada Tahun 2025;
b. Sasaran "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah" yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada periode tahun 2021 s.d 2026 sesuai dengan target Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu indikator "Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" dengan realisasi sebesar 24,70% dari target sebesar 10% sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ;
c. Sasaran "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah" yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 yang mengalami pemutakhiran pada Tahun 2022 yaitu indikator "Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah" dengan realisasi sebesar 43,59% dari target sebesar 100% sampai dengan Triwulan II tahun 2025
d. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah" yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator "Nilai AKIP" dengan realisasi nilai sebesar 79,70 dari target nilai sebesar 79,10 pada Tahun 2024.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam upaya mencapai target tingkat kemandirian keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 43.59% diperoleh realisasi sebesar 60.58% yang diperoleh dari :

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.667.895.597.934}{\text{Rp } 2.753.221.559.914} \times 100\%$$

= 60.58%

yang menggambarkan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja yang kedua yang sesuai dengan target renstra tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{PAD(n)-PAD(n-1)}{PAD(n-1)} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp.\ 1.667.895.597.934 - 1.337.552.385.879}{Rp\ 1.337.552.385.879} \times 100\%$$

= 24,70%

yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode per periode mengalami kenaikan.

Capaian indikator yang ketiga setelah adanya pemutakhiran yaitu Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 1.667.895.597.934}{Rp\ 3.826.262.515.007} \times 100\%$$

= 43,59%

yang menggambarkan Pemerintah Kota Semarang belum mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen dan pendapatan yang paling berdominan dari sector pajak daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD
Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	6.161.279.373.412	2.753.221.559.914	44.69
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.826.262.515.007	1.667.895.597.934	43,59
1.1.1	PAJAK DAERAH	3.040.722.250.000	1.322.122.595.453	43.48
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	688.841.797.729	244.242.846.727	35.46
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	84.386.062.278	29.260.116.448	34.67
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	12.312.405.000	72.270.039.306	586.97
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.335.016.858.405	1.085.325.961.980	46.48
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT	2.083.152.273.204	943.901.307.282	45.31
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	251.864.585.201	141.424.654.698	56.15

Data Pendapatan 26 Juni 2025 (sesuai data Laporan LRA ALL SKPD dari BPKAD (anaudited)

Target dan Realisasi Pajak Daerah Sampai dengan TW II pada APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (+/-) (%)
1.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	949.790.000.000	396.303.014.328	41.73
	Hotel	231.000.000.000	77.515.656.188	33.56
	Restoran	275.000.000.000	135.012.797.087	49.10
	Hiburan	40.270.000.000	19.320.695.681	47.98
	Parkir	30.770.000.000	6.062.800.449	19.70
	Tenaga Listrik	372.750.000.000	158.394.064.923	42.49
2.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	182.400.000	154.196.600	84.54
3.	Pajak Reklame	42.339.000.000	20.864.707.762	49.28
4.	Pajak Air Tanah	26.810.000.000	9.118.970.857	34.01
5.	Pajak Sarang Burung Walet	850.000	0	00.00
6.	Pajak BPHTB	777.000.000.000	227.128.478.002	29.23
7.	PBB Pedesaan & Perkotaan	704.600.000.000	449.058.154.545	63.73
8.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	390.000.000.000	167.634.033.600	42.98
9.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	150.000.000.000	61.139.213.500	40.76
TOTAL		3.040.722.250.000	1.727.709.783.522	56.82

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pencapaian tujuan kemandirian keuangan daerah sampai dengan akhir tahun dapat terpenuhi;
2) Diperlukan teknologi informasi yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan dalam pelayanan agar nilai AKIP yang telah diperoleh dapat terus dipertahankan dan ke depannya dapan melebihi nilai AKIP yang telah diperoleh.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
2) Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik;
3) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4) Perlu adanya pembaharuan dan pemutakhiran data base objek pajak daerah;
5) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemutakhiran objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6) Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sadar teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
   2) Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
   3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
   4) Tuntutan transparansi informasi publik.

b. Peluang
   1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
   2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat;
   3) Adanya website sebagai media informasi publik;
   4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak;
   5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu;
   6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan tekhnologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah;
   7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

a. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
d. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan reribusi yang ada.
e. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				77.060.316.966	BADAN PENDAPATAN DAERAH				77.060.316.966	
5.02	KEUANGAN				77.060.316.966	KEUANGAN				77.060.316.966	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	25.231.956.459	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	25.231.956.459	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	25.231.956.459	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	25.231.956.459	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	745.477.586	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	745.477.586	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	482.858.315	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	482.858.315	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.358.609.830	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan g Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.358.609.830	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	3.414.408.160	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	3.414.408.160	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	177.724.189	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	177.724.189	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.170.928.257	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.170.928.257	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.136.152.936	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.136.152.936	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	291.921.600	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	291.921.600	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.911.775.614	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.911.775.614	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	206.751.415	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	206.751.415	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	46.712.952	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	46.712.952	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	288.635.605	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	288.635.605	
5.02.01	NON URUSAN				51.828.360.507	NON URUSAN				51.828.360.507	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	51.828.360.507	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	51.828.360.507	
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %				Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8.00 dokumen*	116.620.800	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8.00 dokumen*	116.620.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	34.989.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	34.989.400	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.451.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.451.400	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.450.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.450.900	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.655.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.655.400	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.954.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.954.900	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	7.118.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	7.118.800	
5.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	43.442.710.392	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	43.442.710.392	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	42.651.319.303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	42.651.319.303	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	789.708.089	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	789.708.089	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	223.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.235.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.235.400	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	
5.02.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	129.975.620	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	129.975.620	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	108.918.610	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	108.918.610	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	21.057.010	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	21.057.010	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	291.777.523	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	291.777523	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	229.942.523	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	229.942.523	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	61.835.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	61.835.000	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	1.115.120.475	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	1.115.120.475	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.670.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.670.500	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	127.368.808	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	127.368.808	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	153.752.198	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	153.752.198	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	209.853.810	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	209.853.810	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	37.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	37.500.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	325.789.079	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	325.789.079	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	62.100.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	62.100.000	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	123.086.080	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	123.086.080	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	326.831.140	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	326.831.140	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	111.126.160	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	111.126.160	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	215.704.980	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	215.704.980	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 unit	56.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 unit	56.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	4.146.371.555	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	4.146.371.555	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	124.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	124.400.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	567.926.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	567.926.360	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	176.861.042	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	176.861.042	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	3.277.184.153	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	3.277.184.153	
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	2.258.897.002	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	2.258.897.002	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.910.050	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	947.088.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	947.088.000	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.143.840	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.143.840	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	481.895.482	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	481.895.482	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	18.394.367	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	18.394.367	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	755.465.263	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	755.465.263	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382

4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter".

Kebijakan pembangunan daerah tersebut yang dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas Daerah 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas;
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro;
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir;
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan

fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga – RT);

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 - 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah"

dengan indikator tujuan "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah;
2. Nilai AKIP;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
SASARAN : 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Derah	%	100
SASARAN : 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	79,70

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah. Bapenda bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Selain itu, Bapenda juga berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan pelayanan publik yang prima terkait perpajakan dan retribusi.

   indikator sasaran Bapenda bertugas mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi pendapatan daerah dan peningkatan kinerja pelayanan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966	APBD	
5.02	KEUANGAN					106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966	APBD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	29.744.450.372	29.744.450.372	25.231.956.459	APBD	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	*10.00 %*	*10.00 %*	29.744.450.372	29.744.450.372	25.231.956.459	APBD	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	665.978.554	665.978.554	745.477.586	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	8 laporan	8 laporan	675.038.940	675.038.940	482.858.315	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	10 laporan	10 laporan	5.882.198.800	5.882.198.800	5.358.609.830	APBD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.083.008.160	3.083.008.160	3.414.408.160	APBD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	424.588.570	424.588.570	177.724.189	APBD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.494.398.967	5.494.398.967	5.170.928.257	APBD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	12 layanan	12 layanan	3.965.434.745	3.965.434.745	3.136.152.936	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	432.069.530	432.069.530	291.921.600	APBD	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	7.976.533.490	7.976.533.490	5.911.775.614	APBD	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	201.208.020	201.208.020	206.751.415	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	181.965.786	181.965.786	46.712.952	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	762.026.810	762.026.810	288.635.605	APBD	
5.02.01	NON URUSAN					76.774.448.308	76.774.448.308	51.828.360.507	APBD	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	76.774.448.308	76.774.448.308	51.828.360.507	APBD	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*9 dokumen*	*9 dokumen*	*9 dokumen*	210.800.094	210.800.094	116.620.800	APBD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	97.600.109	97.600.109	34.989.400	APBD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.011.400	9.011.400	5.451.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.610.900	10.610.900	6.450.900	APBD	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.655.400	8.655.400	8.655.400	APBD	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.954.900	3.954.900	3.954.900	APBD	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	30.967.385	30.967.385	7.118.800	APBD	
5.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	67.327.199.910	67.327.199.910	43.442.710.392	APBD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	116 orang/bulan	116 orang/bulan	66.423.893.280	66.423.893.280	42.651.319.303	APBD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	76 dokumen	76 dokumen	901.623.630	901.623.630	789.708.089	APBD	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1.235.400	1.235.400	1.235.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
5.02.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	272.048.600	272.048.600	129.975.620	APBD	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	219.098.610	219.098.610	108.918.610	APBD	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52.949.990	52.949.990	21.057.010	APBD	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	472.423.523	472.423.523	291.777.523	APBD	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	229.942.523	229.942.523	229.942.523	APBD	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	46 orang	46 orang	242.481.000	242.481.000	61.835.000	APBD	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	1.484.034.431	1.484.034.431	1.115.120.475	APBD	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	63.670.500	63.670.500	63.670.500	APBD	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	93.391.790	93.391.790	127.368.808	APBD	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	90 paket	90 paket	103.320.646	103.320.646	153.752.198	APBD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	202.667.510	202.667.510	209.853.810	APBD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	72 laporan	72 laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	APBD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	687.105.375	687.105.375	325.789.079	APBD	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	62.100.000	62.100.000	62.100.000	APBD	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	222.278.610	222.278.610	123.086.080	APBD	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	350.453.318	350.453.318	326.887.140	APBD	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	65.029.160	65.029.160	111.126.160	APBD	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	282.397.668	282.397.668	215.704.980	APBD	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	3.026.490	3.026.490	56.0000	APBD	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	4.003.531.166	4.003.531.166	4.146.371.555	APBD	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	60.000.000	60.000.000	124.400.000	APBD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	563.926.360	563.926.360	567.926.360	APBD	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	168 laporan	168 laporan	92.003.903	92.003.903	176.861.042	APBD	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	3.287.600.903	3.287.600.903	3.277.184.153	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perub Renja 2025		
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	2.653.957.266	2.653.957.266	2.258.897.002	APBD	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	APBD	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	131 unit	131 unit	1.278.769.910	1.278.769.910	947.088.000	APBD	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	150 unit	150 unit	16.143.840	16.143.840	16.143.840	APBD	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	520 unit	520 unit	541.223.887	541.223.887	481.895.482	APBD	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	42 unit	18.394.367	18.394.367	18.394.367	APBD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	755.465.263	755.465.263	755.465.263	APBD	
JUMLAH						106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966		

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

33. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

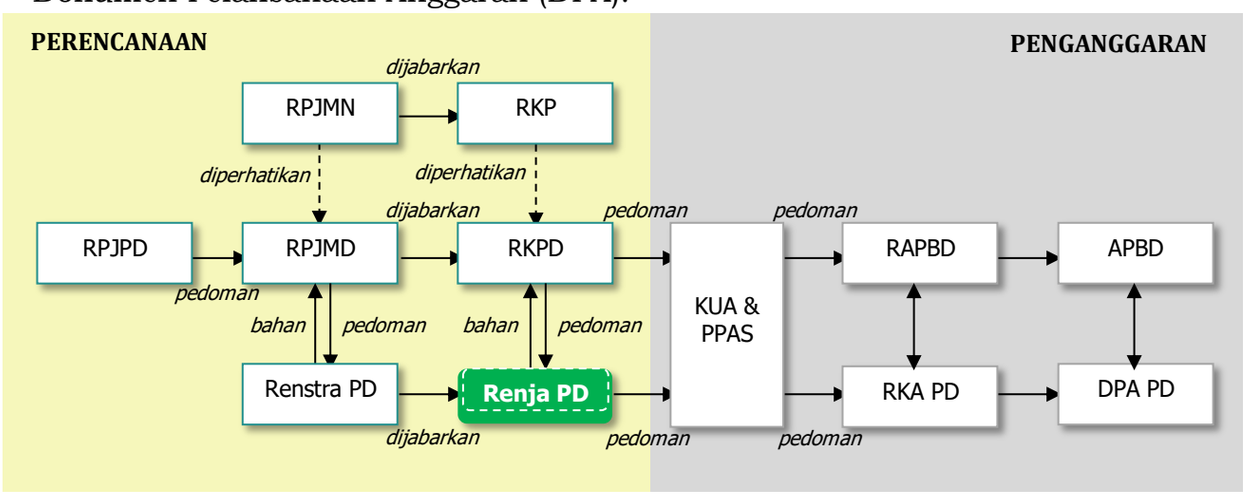

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang menjadi pedoman dalam Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD Perubahan, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
05.03.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen						
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen						
		Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen						
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai						
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen			100			100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			100			100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	115 Orang			100			100
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen			100			100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan			100			100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang berjalan baik								
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	207.65 Persen	207.65 Persen						
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	100 Persen						
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99,00 Persen	99,00 Persen						
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,00 Persen	99,00 Persen						
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81,50 Persen	81,50 Persen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,98 Persen	20,98 Persen						
z		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	300 Orang	300	300	100	300	300	100
		Jumlah peserta motivation achievment/capacity building	100 Orang	100 Orang	100	100	100	306	306	100
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
		Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	5 Orang	5	5	100	4	4	100
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	1 Kali	1	1	100	1	1	100
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	2	2	100	2	2	100
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8	8	100	6	6	100
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	4	4	100
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pembuatan aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2	2	100	2	1	100
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	5	3	60
		Uji Kompetensi Administrasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	1	1	100
		Penyusunan Perwal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	0	0	0
		Managemen Talenta ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	01.00	100	4	3	75
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian	99,00 Persen	99,00 Persen						
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang	300	300	100	320	320	100
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku	3 Buku	3	3	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	12000 Orang	1200	1200	100	1200	1221	101
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75 Orang	75 Orang	75	75	100	75	75	100
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	775 Surat Keputusan	775 Surat Keputusan	775	775	100	775	775	100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	10 Orang	10	10	100	0	0	0
		Layanan pengurusan kartu istri	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	200	200
		Layanan pengurusan kartu suami	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	207	207
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500 Orang	500 Orang	500	500	100	1500	929	61
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11.895	99.15

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pengelolaan arsip pegawai	100.000 Orang	100.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11.895	99.15
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	100 Orang	100	100	100	200	200	100
		Layanan cetak id card	1150 buah	1150 buah	1150	1150	100	1150	1150	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,00 Persen	99,00 Persen						
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan senam pegawai	44 Kali	44 Kali	44	44	100	22	21	95
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50 Orang	50 Orang	50	50	100	20	12	60
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60 Orang	60 Orang	60	60	100	60	41	68
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180 Piagam	180 Piagam	180	180	100	175	38	28

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 Berkas	40 Berkas	40	40	100	40	40	100
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	3 Orang	3 Orang	3	3	100	9	9	100
		Sosialisasi TPP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	2	2	100
		Verifikasi e-cuti	480 Berkas	480 Berkas	480	480	100	250	250	90
		Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	0 Berkas	0 Berkas	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 Kegiatan	90 Kegiatan	90	90	100	5	5	100
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5	5	100	5	5	100
		Pelepasan haji	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	1	100
		Bimbingan mental	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14	14	100	8	8	100
		Pembekalan disiplin	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	1	1	100
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Sosialisasi LHKPN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	0	0
		Sosialisasi Disiplin ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	75 Orang	75 Orang	75	75	100	63	32	50
		Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus	2	2	100	2	1	50
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12	12	100	12	10	83
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27	27	100	27	20	74
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemperosesan ijin pereceraian	30 Kasus	30 Kasus	30	30	100	27	15	55
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45 Persen	45 Persen						
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik								
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan	514 Orang	514 Orang	514	514	100	746	826	110,72

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	pilihan bagi Jabatan Administrasi								
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236 Orang	236 Orang	236	236	100			92
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	5 Orang	5 Orang	5	5	100	5	5	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang	30 Orang	30	30	100	0	0	0
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60 Orang	60 Orang	60	60	100	0	0	0
		Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12 Orang	12 Orang	12	12	100	0	0	0
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang	35 Orang	35	35	100	174	49	28
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81,50 Persen	81,50 Persen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	1	1	100
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Monev penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,98 Persen	20,98 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi aplikasi kegiatan pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	1	33
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	15	3	20
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	20	46	230
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	15	15	100
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1000 Orang	1000 Orang	1000	1000	100	400	403	100.75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750 Orang	750 Orang	750	750	100	250	105	42

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang melaksanakan 3 program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.616.128.857	17.915.465.125	96,24
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.366.537	31.268.850	99,69
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.314.914	1.303.900	99,16
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.324.765	6.311.400	99,79
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.834.367	5.816.000	99,69
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.388.206	7.381.000	99,90
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.324.765	6.294.950	99,53
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.179.520	4.161.600	99,57
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.386.418.950	11.026.857.183	96,84
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.067.027.190	10.708.085.583	96,76
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.010.000	316.410.000	99,81
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	592.000	99,25
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	695.200	694.100	99,84
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	1.075.500	98,66
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.349.606	153.320.500	98,69
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.349.606	153.320.500	98,69
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.940.654.073	2.761.467.614	93,91
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.982.810	90.978.315	100,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	385.334.428	383.155.492	99,43
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.229.200	99.114.575	99,88

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.343.089	101.293.260	99,95
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.940.060	1.900.000	97,94
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.750.000	95.837.500	79,37
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.612.577	411.596.472	100,00
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.729.461.909	1.577.592.000	91,22
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.153.175.251	1.053.464.400	91,35
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.153.175.251	1.053.464.400	91,35
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.627.322.965	1.616.304.085	99,32
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.939.531	382.024.527	98,73
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.695.834	325.843.400	99,43
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.687.600	908.436.158	99,53
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.841.475	1.272.782.493	96,29
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	40.303.117	99,98
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.651.239	469.055.235	92,03
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	73.696.630	73.674.500	99,97
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	698.180.426	689.749.641	98,79
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.747.153.592	8.081.506.182	82,91
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.130.513.671	2.145.376.201	68,53
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	31.181.497	29.791.458	95,54
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.917.866.001	1.058.902.742	55,21
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	411.112.435	366.372.050	89,12
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	117.278.222	108.641.431	92,64
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	653.075.516	581.668.520	89,07
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	2.652.899.600	2.410.596.334	90,87
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	525.919.000	490.517.500	93,27
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	465.387.770	465.386.070	100,00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.661.592.830	1.454.692.764	87,55
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.592.019.358	2.336.983.969	90,16
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.296.488.120	1.197.831.416	92,39
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	994.565.450	858.796.550	86,35
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	191.347.258	174.407.573	91,15
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	109.618.530	105.948.430	96,65
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.371.720.963	1.188.549.678	86,65
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	196.614.026	160.162.960	81,46
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	758.315.945	651.739.706	85,95
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	337.214.957	302.358.012	89,66
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	67.132.636	62.076.500	92,47
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.443.399	12.212.500	98,14
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.785.134.560	7.202.032.781	92,51
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.988.586.560	1.720.022.057	86,49
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	37.949.080	32.470.360	85,56
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	283.593.650	251.908.130	88,83
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.549.943.830	1.323.881.507	85,41
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	117.100.000	111.762.060	95,44
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.796.548.000	5.482.010.724	94,57
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	5.796.548.000	5.482.010.724	94,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
TOTAL		36.148.417.009	33.199.004.088	91,84

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebesar Rp 36.148.417.009, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.199.004.088 atau sebesar 91,84%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.949.412.921 atau sebesar 8,16%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- Dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan sehingga hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan terkait Pembinaan Kepegawaian serta sosialisasi program dan kegiatan penunjang kepegawaian tidak dapat terlaksana dengan efektif.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN		82,50	83,00	83,50	84,00	84,50				
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas	Sasaran I :		80,60	80,90	81,20	81,50	81,50				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian										
Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sasaran II : Indeks Sistem Merit		0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	0,66	0,73		

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, secara umum sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
3) Kurangnya kompetensi ASN;
4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut:

1. Peluang

a. BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;

e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutase jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait.

2. Tantangan
a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;
c. Pengadaaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah

tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acauan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					URUSAN KEPEGAWAIAN					
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen		
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen		
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	276.073.320	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang		
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku		
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	518.939.289	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	440.135.405	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang		
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	218.256.750	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi		
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	238.855.169	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang				Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang				Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10000 Orang				Layanan update data pegawai	10000 Orang		
			Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang				Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang		
			Layanan kartu pegawai	300 Orang				Layanan kartu pegawai	300 Orang		
			Layanan cetak id card	1150 buah				Layanan cetak id card	1150 buah		
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang				Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	509.698.900	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali		
			Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan				Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan		
			Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan				Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan		
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan				Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	333.160.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali		
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan				Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan		
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan				Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan				Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	1.622.047.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan	2.522.219.565	
		Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	445.738.906		Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang		
			Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	742.777.191	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan		
			Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan				Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan		
			Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan		
			Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang				Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang		
			Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	296.957.500	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan		
			Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	54.879.700	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang		
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang				Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	206.887.270	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan		
			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan				Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan		
			Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan				Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	1.091.979.710	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan		
			Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali				Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali		
			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang				Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang		
			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang				Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam				Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam		
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas		
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang		
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan		
			Verifikasi e-cuti	250.00 berkas				Verifikasi e-cuti	250.00 berkas		
			Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	489.773.780	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan		
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan		
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan		
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	115.254.960	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang		
			Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus		
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan		
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan		
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin pereceraian	28.00 Kasus	15.852.480	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin pereceraian	28.00 Kasus		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.489.994.670	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.989.994.670	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	36.500.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	5.04.02.2.01.01	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	254.450.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.361.968.096	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang		
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	212.172.500	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	5.527.060.142	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	5.527.060.142	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	71.954.800	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	51.163.683	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen				Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	4.075.254	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	4.075.254	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	5.907.975	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen		
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	1.00 Dokumen	3.042.399	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	1.00 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perubahan DPA-SKPD		perubahan yang tersusun			Perubahan DPA-SKPD		perubahan yang tersusun			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	5.436.140	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang			50.000.000						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.949.670.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	335.405.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	673.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	2.00 Dokumen	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	2.00 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Triwulanan/Semesteran SKPD		Perangkat Daerah yang tersusun					Perangkat Daerah yang tersusun			
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.235.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	157.959.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	157.959.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	73.326.067	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	194.949.464	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	95.449.188	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	85.260.669	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	995.404	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	85.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	355.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan		
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan				Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	198.091.734	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	182.340.788	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	182.340.788	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	654.116.904	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	248.734.007	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan				Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.354.705.872	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	387.108.164	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	30.269.700	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi	12 Bulan	565.446.923	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan hasil LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 terkait peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah agar semakin membaik oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan:

a. Penerapan Sistem Merit terus dioptimalkan untuk mendukung capaian indeks sistem merit, dengan meningkatkan beberapa komponen pembentuknya.

   Pemerintah Kota Semarang telah menjadi Indeks Sistem Merit menjadi salah satu Indikator Sasaran RENSTRA BKPP Kota Semarang dengan target nilai Indeks Sistem Merit sebesar 0,73 atau kategori Baik pada tahun 2024, secara bertahap hingga Indeks Sistem Merit mencapai sebesar 0,81 atau kategori Sangat Baik dikondisi akhir Renstra pada Tahun 2026. Pada Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti hasil penilaian sistem merit Tahun 2023 dari KASN, dan telah dilakukan verifikasi dan validasi dari BKN dengan mendapatkan hasil penilaian dalam penerapan sistem merit yang telah ditetapkan oleh BKN dengan nilai 312 atau indeks 0,76 dengan kategori “BAIK”

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarangmemiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengambangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional”, dengan indikator tujuan “Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BKPP Kota Semarang yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
b. Indeks Sistem Merit

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Persentase Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,00
SASARAN: Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	81,50
Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase Indeks Merit Sistem	Indeks	0,66

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pendidikan dan Pelatihan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 sub kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.33,784,868,699.89 yang bersumber dari dana APBD Perubahan 2025 Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN							APBD Kota Semarang			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %			APBD Kota Semarang			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 %	100 %	100 %			APBD Kota Semarang			
		Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	100 %	100 %			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	115 Orang	115 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Kota Semarang			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258,365%	258,365%	258,365%			APBD Kota Semarang			
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00	100.00	100.00						
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00	99.00	99.00						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00	99.00	99.00						
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50	81.50	81.50						
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20.98	20.98	20.98						
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00	100.00	100.00						
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		753 Dokumen	753 Dokumen	753 Dokumen			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Dokumen	1300 Dokumen	1300 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900 Orang	900 Orang	900 Orang			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen				APBD Kota Semarang			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45%	45%				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun									
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	306 Orang				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8 Laporan	8 Laporan				APBD Kota Semarang			

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
   3. Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

   1. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
   3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

34. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.s

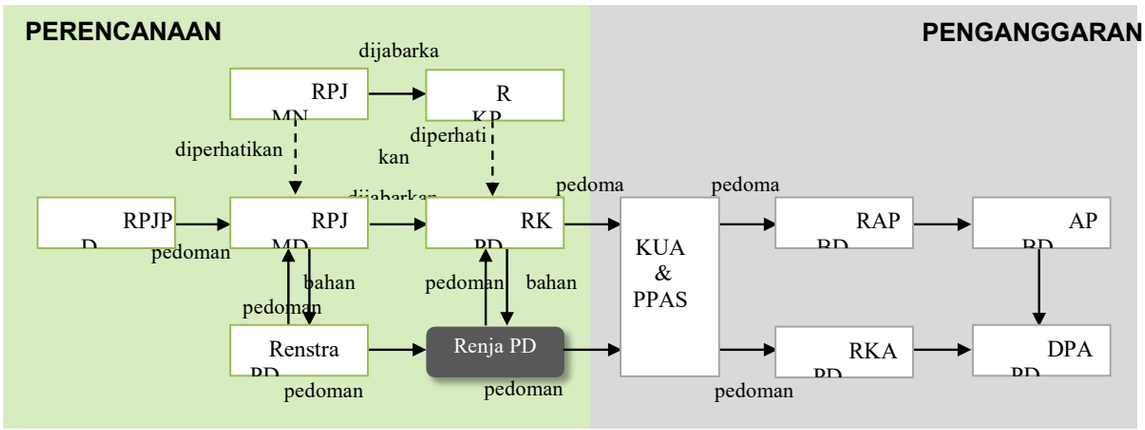

Gambar 1. Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya.

Hasil evaluasi selama pelaksanaan tahun berjalan, didapatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dilakukan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025. Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 juga didasarkan pada perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja dan adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja pada beberapa program atau kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Semarang Tahun 2024-2026. Selanjutnya Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
w. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35).
x. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Menyediakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan Program, kegiatan dan subkegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Selain itu, disajikan pula capaian dari target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang 2021-2016.

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Trriwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan
Pencapaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja								
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	24 dokumen	N/A	10 dokumen	10 dokumen	100%	12 Dokumen	22 dokumen	91.60%
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	6 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen	5 dokumen	83,00%
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	66,67%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	6 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 Dokumen	8 dokumen	133%
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100 %	100 % (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 %	N/A	100% 14 orang/bulan	100% 14 orang/bulan	100%	20 Orang/ bulan	100%	60%
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100 %	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 Dokumen	8 dokumen	66,67%
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 laporan	66,67%
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	6 laporan	N/A	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	4 laporan	66,67%
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3 laporan	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 Dokumen	3 laporan	100%
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100 %	100 % (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 kegiatan	N/A	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	N/A	3 kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 orang	80 orang	80 orang
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	N/A	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10 paket	60%
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	14 Jenis	N/A	5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	8 paket	57,00%
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase tersedianya Peratalan Rumah Tangga	36 Jenis	N/A	7 Paket	7 paket	100%	7 Paket	14 paket	38,89%
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	70 Jenis	N/A	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	30 paket	42,85%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 Jenis	N/A	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	10 paket	47,61%
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbsis elektronik pada SKPD	100 %	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100%	100% (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumentasi listrik/penerangan/ Air/ Jasa Komunikasi	100 %	N/A	4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan	8 laporan	66,67%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	N/A	8 unit	8 unit	100%	7 unit	15 unit	46,87%
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	66,67%
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	N/A	7 unit	7 unit	100%	6 unit	13 unit	44,82%
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitas Gedung Kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
5.05.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja								
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	8 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	9 dokumen	112,5%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian Bidang Aspek-aspek Sosial	8 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	9 dokumen	112,5%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 laporan	N/A	7 laporan	7 laporan	100%	8 laporan	15 laporan	375%
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	N/A	7 laporan	7 laporan	100%	8 laporan	15 laporan	375%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	21 dokumen	N/A	10 dokumen	10 dokumen	100%	17 Dokumen	27 dokumen	128,57%
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pemenuhan penelitian bidang perindustrian dan perdagangan	100%	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	10 Dokumen	14 dokumen	14 dokumen
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	N/A	6 dokumen	6 dokumen	100%	7 Dokumen	13 dokumen	13 dokumen
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	27 kegiatan/ laporan	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	15 kegiatan	19 kegiatan/laporan	70,37%
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Persentase hasil penelitian di bidang perekayasaan Teknologi dan Informasi	100% (9 kegiatan)	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	10 kegiatan	11 kegiatan	122%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Persentase penelitian yang telah didiseminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100% (6 kegiatan)	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	3 kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100% (6 kegiatan)	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	33,33%
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase fasilitasi hak kekayaan intelektual	100% (3 kegiatan)	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	3 kegiatan	100%

Dari data sebagaimana Tabel 2, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra adalah sebagai berikut,

1) Mengingat bahwa Badan Riset Daerah adalah institusi baru yang didirikan pada Maret 2024, maka data Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 tidak tersedia
   a) Namun pada tahun 2024 pencapaian target yang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
   b) Dari semua indikator memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Riset dan Inovasi, yang terdiri dari 2 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
   b) Dari 2 indikator kinerja program, semua indikator diperkirakan dapat memenuhi target
   c) Dari beberapa indikator kinerja kegiatan, terdapat indikator yang diperkirakan masih dalam proses pencapaian target Renstra Tahun 2024-2026

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	Target	Realisasi	%	
Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	3 dokumen	50	100%

Sub Kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	50%	100	100%

Sub kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

● Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	50%	50	100%

Sub Kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

● Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	50	50%	100%

Sub Kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

● Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	50	50%	100%

Sub Kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

● Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	50	50	100%

Sub kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Program Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025 (S.D. Triwulan II)			Realisasi Tahun 2024
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	50	50	100%

Sub kegiatan yang berhasil
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
c. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
d. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
e. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
f. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
g. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
h. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

2.1.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran Perubahan Brida tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Brida Kota Semarang Triwulan II tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN				
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
5.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Kinerja Perangkat Daerah			
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.943.995,38	0,00	0,00%
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	123.654,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	234.099,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.000,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	230.880,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.420.000,00	14.395.000,00	99,83%
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	48.250.000,00	0,00	0,00%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.309.028.272,81	1.654.174.822,00	38,39%
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.744.000,00	49.860.000,00	21,99%
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	303.776,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester-an SKPD	303.776,00	0,00	0,00%
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	303.776,00	0,00	0,00%
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.05.01.2.05.0010	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.164.240,00	0,00	0,00%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.899.474,80	16.367.550,00	86,60%
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.249.360,00	16.446.050,00	46,66%
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.906.609,22	7.045.575,00	29,47%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.718.577,00	1.744.000,00	17,95%
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.483.580,00	2.999.000,00	7,23%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.098.878,00	22.152.340,00	44,22%
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.604.385,00	0,00	0,00%
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	6.180.000,00	1.802.000,00	29,16%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Sumber Daya Air dan Listrik			
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.015.490,00	30.920.000,00	35,53%
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050,00	18.960.680,00	47,51%
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.373.510,00	25.713.116,00	22,10%
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	797.974.237,00	5.976.000,00	0,75%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	612.611.056,18	34.927.000,00	5,70%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1.584.296.034,00	124.601.000,00	7,86%
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	741.037.224,00	18.456.450,00	2,49%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.664.327.435,16	42.233.600,00	2,54%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	383.447.743,26	2.151.010,00	0,56%
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	122.492.138,00	2.855.000,00	2,33%
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	92.203.327,00	15.365.500,00	16,66%
JUMLAH		11.080.132.577,81	2.109.145.693,00	19,04%

Sumber: SIPD Penatausahaan Keuangan (30 Juni 2025)

Dari data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 (dua) urusan, 2 (dua) program, dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp11.080.132.577,81,-. Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp2.109.145.693,00,- atau 19,04%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp8.970.986.884,81,-.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan telah diraih penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dan Tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator yang tercantum pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (rujukan BRIDA sebagai OPD baru), yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang. Analisis dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang s.d. Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA/IKU						REALISASI		PRO-YEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025 TW II	2026
Tujuan										
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	66	68	69	67,92	67,92*	69
Sasaran										
Meningkatnya penyelenggaraan Penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi publik	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaat-kan dalam Pembangun-an Daerah	100	100	100	100	100	100	100	50	100
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan pembangungan Kota Semarang	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	100	100	100	100	100	100	100	50	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai AKIP BRIDA	-	-	-	71	78,2	78,5	77,5	78,75	79.00

**) merupakan nilai tahun 2024 karena nilai 2025 belum tersedia*
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan yaitu Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Inovasi Daerah. Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi nilai indikator yaitu 67,92 yang merupakan nilai tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 akan keluar pada akhir tahun anggaran.
b. Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut,
   - Meningkatnya penyelenggaraan penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi publik, dengan indikator persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator adalah sebesar 50% dari target sebesar 100% (capaian 50 %).
   - Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan pembangunan Kota Semarang dengan indikator persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah. Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator adalah sebesar 50% dari target sebesar 100% (capaian 50 %).
   - Terwujudnya kualitas kerja pelayanan BRIDA, dengan indikator Nilai AKIP BRIDA. Pada Triwulan II tahun 2025, Nilai AKIP sebesar 78,75 dari target sebesar 78,2 (capaian 100,7%).

Selain hal tersebut, realisasi kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang s.d. Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I	
1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	68	67,92	99,88
2	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100	0	0,00
3	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	47,06	73,00	100,00

Sumber : Perubahan RKPD Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertera dalam tabel untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Mengingat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang merupakan instansi baru, maka beberapa persiapan dan pembenahan perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan SDM yang secara kuantitatif masif kurang memadai untuk tugas yang kaitannya administratif kesekretariatan dan instrumen-instrumen lain seperti sarana dan prasarana perkantoran;
b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, yaitu Laju Inflasi dan Indeks Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran BRIDA sebagai koordinator serta fasilitator penelitian dan inovasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang penelitian dan inovasi, antara lain:

a. Perlunya kebutuhan pengelolaan fasilitasi pendukung riset, penelitian dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. OPD tidak melakukan update baik informasi maupun sistem yang terkait dengan inovasi yang telah dilakukan melaui kanal yang disediakan;
c. Belum adanya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait pelaksanaan inovasi dan penelitian di Kota Semarang;
d. Belum terorganisirnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh OPD khususnya dalam dokumentasi dan himpunisasi peraturan pendukung; dan
e. Perlunya peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM bidang urusan administrasi kesekretariatan.

Berbagai permasalahan tersebut dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu diupayakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   - Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
     Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur di BRIDA agar memiliki kapasitas yang cukup

untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
  Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- Perencanaan dan penganggaran dengan *"e-performance based budgeting".*
  Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut *"e-performance based budgeting"* sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil/dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
  Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya yang berdasarkan riset dan inovasi.

b. Peluang

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang secara langsung ataupun tidak dapat mendukung riset, penelitian dan inovasi daerah.
  Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
  Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam inovasi, riset dan penelitian.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan *stakeholder* lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas riset, penelitian dan inovasi daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Brida Kota Semarang sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, sebagai unsur penunjang penelitian dan pengembangan, salah satu fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Secara khusus Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang menjalankan fungsi terkait program prioritas, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
   Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dan dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka BRIDA Kota Semarang perlu memenuhi 4 komponen tersebut dengan baik.
d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
   Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Selain itu diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber

pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

   Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait:

   - Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   - Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
   - Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   - Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   - Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
   - Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

   Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB/SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, serta berbagai dokumen kebijakan lainnya.

f. Berakhirnya Periode RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025

   RPJPD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral pendukung.

g. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

   Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

h. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan BRIDA

   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan memedomani RancanganAwal RPJMN Tahun 2025-2029, Prioritas RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, Rancangan Awal RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2	Percepatan penyediaan sarana dan prasaran penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1) Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh;
   f. Peningkatan sarana dan prasaran penanganan dan pencegahan bencana;
   g. Peningkatan sarana dan prasaran lalu lintas terintegrasi.

2) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal;
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular;
3) Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu;
b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 - 3,84%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan Akuntabel”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Brida Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan urusan penunjang penelitian dan pengembangan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.0.00.0.00.01.0000	BRIDA KOTA SEMARANG										
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				11.080.132.578	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				11.080.132.578	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BRIDA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BRIDA Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 % 100 % 100 % 100 %	5.081.743.383	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BRIDA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BRIDA Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 % 100 % 100 % 100 %	5.081.743.383	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (BRIDA)	100% (12 Dokumen)	90.455.628	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (BRIDA)	100% (12 Dokumen)	90.455.628	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.943.995	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	26.943.995	-
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	123.654	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	123.654	-
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	1 Dokumen	234.099	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	1 Dokumen	234.099	-
5.05.01.2.01	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Dokumen DPA-	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Dokumen DPA-	1 Dokumen	253.000	-

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
.0004	Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
5.05.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do- kumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	230.880	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do- kumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	230.880	-
5.05.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.420.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.420.000	-
5.05.01.2.01 .0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	48.250.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	48.250.000	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan BRIDA Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	100 % 4 Dokumen	2.950.738.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan BRIDA Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	100 % 4 Dokumen	2.950.738.000	
5.05.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	4.309.028.273	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	4.309.028.273	-
5.05.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	226.744.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	226.744.000	-
5.05.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	303.776	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	303.776	-
5.05.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	303.776	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	303.776	-

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	303.776	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	303.776	-
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	14.164.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	14.164.240	
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	14.164.240	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	14.164.240	-
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	190.960.864	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	190.960.864	
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	18.899.475	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	18.899.475	-
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	35.249.360	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	35.249.360	-
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	23.906.609	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	23.906.609	-
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9.718.577	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9.718.577	-
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	41.483.580	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	41.483.580	-
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50.098.878	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50.098.878	-
5.05.01.2.06	Dukungan Pelaksanaan	Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	11.604.385	Dukungan	Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	11.604.385	-

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
.0011	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	93.195.490	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	93.195.490	
5.05.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	-
5.05.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	87.015.490	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	87.015.490	-
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	156.283.560	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	156.283.560	
5.05.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.910.050	-
5.05.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	6 Unit	116.373.510	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	6 Unit	116.373.510	-
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam	100 %	5.998.389.195	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan	100 %	5.998.389.195	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah					dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	797.974.237	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	797.974.237	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8 Laporan	797.974.237	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8 Laporan	797.974.237	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	612.611.056	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	612.611.056	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	6 Dokumen	612.611.056	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	6 Dokumen	612.611.056	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	2.325.333.258	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	2.325.333.258	
5.05.02.2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	10 Dokumen	1.584.296.034	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	10 Dokumen	1.584.296.034	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7 Dokumen	741.037.224	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7 Dokumen	741.037.224	-

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	2.262.470.643	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	2.262.470.643	
5.05.02. 2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10 Dokumen	1.664.327.435	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10 Dokumen	1.664.327.435	-
5.05.02. 2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	383.447.743	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	383.447.743	-
5.05.02. 2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	1 Laporan	122.492.138	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	1 Laporan	122.492.138	-
5.05.02. 2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	92.203.327	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	92.203.327	-

Sumber: Brida Kota Semarang, 2025

II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota/Forum OPD. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan.

Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, namun Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Namun mengingat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah OPD baru, untuk Perubahan Renja tahun 2025 tidak terdapat asprasi masyarakat yang berupa usulan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang. Demikian juga dengan aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, juga tidak terdapat aspirasi.

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber: Brida Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Adapun upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) b)Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 antara lain meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 - 5,60 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,50 - 5,00 %;
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 - 8,00 %;

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 7. Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,43	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	-	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Berdasarkan Tabel 7 dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian dipisahkan khusus di bidang Penelitian dan Pengembangan dan menjadi tujuan dari Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu "Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah" dengan indikator Nilai Indeks Inovasi Daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi publik
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan pembangunan Kota Semarang
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan			
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	poin	68
Sasaran			
Meningkatnya penyelenggaraan Penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi public	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan pembangungan Kota Semarang	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai AKIP Brida	poin	78,2

Sumber : Brida Kota Semarang, 2025

III.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai kinerja dalam bidang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kota Semarang, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 melaksanakan 2 program dan 32 sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan program. Dimana 32 sub kegiatan merupakan pendukung penunjang OPD dan 10 sub kegiatan program utama, dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 9. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
B	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Sumber : Brida Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

IV.1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah, dan indeks inovasi daerah.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang penelitian dan pengembangan daerah serta inovasi dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penjaringan riset/penelitian dan inovasi dari *stakeholder* di Kota Semarang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang; dan
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah rutin), dan 1 (satu) program penelitian/pengembangan;
2. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Brida Kota Semarang pada perubahan tahun 2024 adalah sebanyak 33 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 8 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Brida
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.080.132.578,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan rincian sebagai berikut:
    a. Urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp5.998.389.195,-, dengan rincian Fasilitasi Pengembangan

Penelitian sebesar Rp3.735.918.552,- dan Pengembangan Inovasi teknologi sebesar Rp 2.262.470.643,-

b. Urusan program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin) sebesar Rp5.081.743.383,-.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Brida Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.05.0.00.0.00.01.0000	BRIDA KOTA SEMARANG					10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578		
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578	APBD	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BRIDA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BRIDA Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	10.204.705.877	10.204.705.877	5.081.743.383	APBD	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (BRIDA)	100% (12 Dokumen)	100% (12 Dokumen)	100% (12 Dokumen)	155.145.101	155.145.101	90.455.628		
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75.935.101	75.935.101	26.943.995	APBD	Berubah
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	123.654	APBD	Berubah
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	4.100.000	234.099	APBD	Berubah
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000	3.580.000	253.000	APBD	Berubah

Kode Rekening	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.610.000	3.610.000	230.880	APBD	Berubah
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	14.420.000	14.420.000	14.420.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	APBD	Berubah
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BRIDA	100 %	100 %	100 %	4.746.321.000	4.746.321.000	4.536.683.601		
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	4.542.677.000	4.542.677.000	4.309.028.273	APBD	Berubah
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	196.744.000	196.744.000	226.744.000	APBD	Berubah
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.300.000	2.300.000	303.776	APBD	Berubah
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.300.000	2.300.000	303.776	APBD	Berubah
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000	2.300.000	303.776	APBD	Berubah
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	96.907.240	96.907.240	14.164.240		

Kode Rekening	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	96.907.240	96.907.240	14.164.240	APBD	Berubah
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	598.889.485	598.889.485	190.960.864		
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	3 Paket	3 Paket	89.333.098	89.333.098	18.899.475	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	35.250.000	35.250.000	35.249.360	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	34.000.000	34.000.000	23.906.609	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	23.433.650	23.433.650	9.718.577	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	57.063.460	57.063.460	41.483.580	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	228.181.000	228.181.000	50.098.878	APBD	Berubah
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	131.628.277	131.628.277	11.604.385	APBD	Berubah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	100 %	100 %	93.195.490	93.195.490	93.195.490		
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.180.000	6.180.000	6.180.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	87.015.490	87.015.490	87.015.490	APBD	Tetap
5.05.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemeliharaan	100 %	100 %	100 %	174.429.996	174.429.996	156.283.560		

Kode Rekening	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah								
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	APBD	Berubah
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	130.469.997	130.469.997	116.373.510	APBD	Berubah
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								APBD	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	4.339.817.565	4.339.817.565	5.998.389.195	APBD	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	100 %	295.000.000	295.000.000	797.974.237		
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	295.000.000	295.000.000	797.974.237	APBD	Berubah
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	100 %	730.000.000	730.000.000	612.611.056		
5.05.02.	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil	7 Dokumen	7	6 Dokumen	730.000.000	730.000.000	612.611.056	APBD	Berubah

Kode Rekening	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.02.01	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial		Dokumen						
5.05.02. 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	100 %	100 %	1.589.000.000	1.589.000.000	2.325.333.258		
5.05.02. 2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	8 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	849.000.000	849.000.000	1.584.296.034	APBD	Berubah
5.05.02. 2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	740.000.000	740.000.000	741.037.224	APBD	Berubah
5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	100 %	100 %	1.725.817.565	1.725.817.565	2.262.470.643		
5.05.02. 2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	795.817.565	795.817.565	1.664.327.435	APBD	Berubah
5.05.02. 2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000	400.000.000	383.447.743	APBD	Berubah
5.05.02. 2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	350.000.000	122.492.138	APBD	Berubah
5.05.02. 2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	180.000.000	180.000.000	92.203.327	APBD	Berubah
Total Keseluruhan Pagu						10.204.705.877	10.204.705.877	10.204.705.877		

Sumber: Brida Kota Semarang, 2025

Pada Perubahan tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

IV.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan tugas dan fungsi BRIDA dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	poin	68
2.	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100
3.	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	%	100
4.	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	poin	78,2

Sumber: Brida Kota Semarang, 2025

IV.3 Inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Brida Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya:

1. Jurnal Riptek Online
   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
2. JELITA (JENDELA INOVASI KOTA)
   Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian *Innovative Government Award (IGA).*

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiakomtan beserta indikatornya pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Mengingat Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Semarang merupakan instansi baru yang terbentuk pada tahun 2024, maka penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja Brida Tahun 2025, IKU Brida 2025 dan dokumen RSO RTP Brida tahun 2025 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan yang selanjutnya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran Perubahan 2025.

35. INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

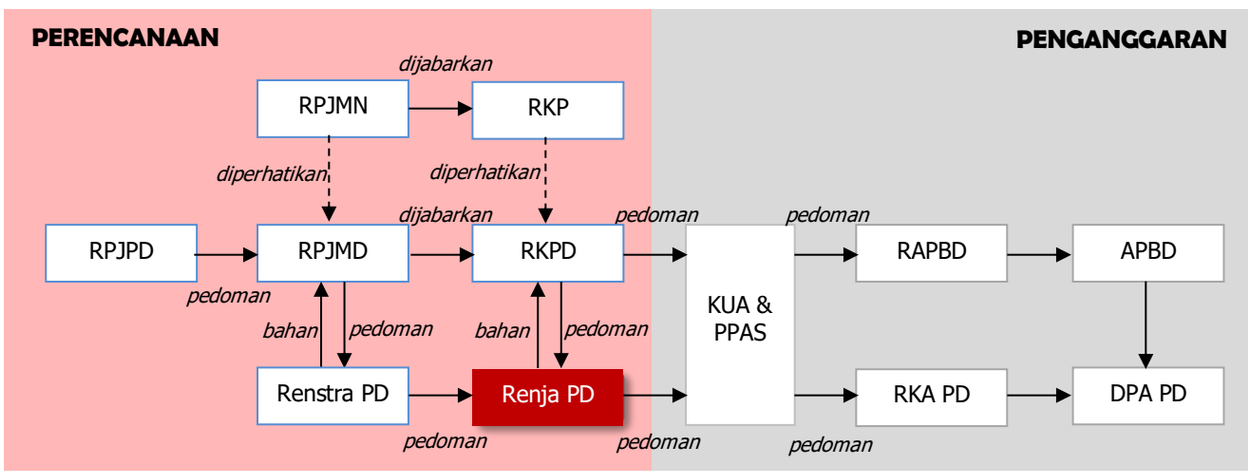

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh ada nya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Inspektorat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 8);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Inspektorat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja INSPEKTORAT Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 Leveling (penilaian 2024)	100	3.00 Leveling	100
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL								
		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	90%	87,55%	89%	50%	50	68,77%	57,30
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	250 laporan	223 laporan	48 laporan	46 laporan	95	269 laporan	107,6

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	500 laporan	473 laporan	100 laporan	57 laporan	57	530 laporan	106
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100	5 laporan	100
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100	5 laporan	100
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	62 kesepakatan	60 kesepakatan	2 kesepakatan	1 kesepakatan	50	61 kesepakatan	98,38
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75 Dokumen	105 Dokumen	60 Dokumen	20 dokumen	33,33	125 dokumen	166,66
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU								
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan Masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 laporan	2 laporan	2 laporan	0	0	2 laporan	20
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	500 laporan	262 laporan	100 laporan	44 laporan	44	306 laporan	61,2
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
		Nilai Maturitas SPIP	3,1	3,15	3,08	3,15 (penilaian 2024)	102,27	3,15 (penilaian 2024)	101,61
6.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN								
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3 indeks	2,99 indeks	3,05 indeks	2,99 (penilaian 2024)	98,03	2,99 (penilaian 2024)	99,66
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15 rekomendasi	12 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100	14 rekomendasi	93,33
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 rekomendasi	12 rekomendasi	2 rekomendasi	0	0	12 rekomendasi	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
		Persentase Terselenggarakannya Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	75%	75	87,5%	87,5
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	255 perangkat daerah	240 perangkat daerah	51 perangkat	51 perangkat daerah	100	291 perangkat daerah	114,12
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi	255 perangkat daerah	204 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	100	255 perangkat daerah	100
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	25 kegiatan	21 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	60	24 kegiatan	96

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	250 perangkag daerah	200 perangkat daerah	50 perangkat daerah	0	0	200 perangkat daerah	80
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
		Persentasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	75 dokumen	60 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	71,43	65 dokumen	86,66
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	40 dokumen	2 dokumen	0	0	40 dokumen	80
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	0	0	4 dokumen	80
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	5 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	0	0	4 dokumen	80
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	5 dokumen	100
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100	5 laporan	100
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4320 orang	3456 orang	1020 orang	445 orang	43,6	3901 orang	90,30
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksaaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	54 dokumen	90
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	54 dokumen	90
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 dokumen	100	5 laporan	100
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	0	0	4 dokumen	80
X.XX.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH								
		Persentase Terlaksananya Diklat dan Bimtek Peningkatan Kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	330 orang	264 orang	66 orang	51 orang	77,27	315 orang	95,45

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1500 orang	1032 orang	300 orang	281 orang	93	1313 orang	87
X.XX.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	0	0	4 paket	80
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	0	0	4 paket	80
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	0	0	4 paket	80
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	40 dokumen	1 dokumen	0	0	40 dokumen	80
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	48 laporan	12 laporan	6 laporan	50	54 laporan	90
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	48 laporan	12 laporan	6 laporan	50	54 laporan	90
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	54 dokumen	90

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	54 dokumen	90
X.XX.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
		Persentase Tersedianya Fasilitas Kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	26 unit	25 unit	3 unit	1 unit	33,33	26 unit	100
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit	40 unit	1 unit	0	0	40 unit	80
X.XX.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	50%	50	75%	75
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	48 laporan	12 laporan	6 laporan	50	54 laporan	90
X.XX.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD (Inspektorat)	100%	100%	100%	50%	50	75%	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	100
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100	36 unit	90
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 unit	140 unit	140 unit	70 unit	50	140 unit	100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	100 unit	80	125 unit	100
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45 unit	45 unit	45 unit	25 unit	55	45 unit	100

Sumber: Inspektorat Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) Adalah sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Kinerja;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Ada beberapa sub kegiatan yang belum ada realisasi yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hanya akan direalisasikan hanya jika ada laporan aduan terkait dengan kehilangan aset yang menyebabkan kerugian daerah.

Semua kegiatan terkena efisiensi karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pemeliharaan Mebel, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 setelah perubahan kedua APBD Kota Semarang. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Inspektorat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Inspektorat
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.415.818.750	8.595.438.740	38,35%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.262.859	3.148.140	2,66%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.740.962	750.000	1,40%
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.671.400	395.100	10,76%
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.354.099	0	0,00%
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.270.099	1.778.040	54,37%
e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.770.099	0	0,00%
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.200	225.000	49,32%
g	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	0	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.258.667.580	7.285.367.237	44,81%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.905.243.120	7.180.417.237	45,14%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	346.584.000	104.950.000	30,28%
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.857.600	0	0,00%
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.497.168	0	0,00%
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	485.692	0	0,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.877.411.880	445.642.611	23,74%
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.171.826.000	360.128.999	30,73%
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	705.585.880	85.513.612	12,12%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.162.480.581	445.642.611	20,61%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.757.604	23.687.925	18,26%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.681.089	21.463.050	22,67%
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	117.632.261	5.653.850	4,81%
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.977.018	224.190	4,50%
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.500.000	37.102.550	36,20%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	753.006.000	65.424.295	8,69%
g	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	263.320.618	57.840.000	21,97%
h	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	696.605.991	298.590	0,04%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.327.565.267	485.500.000	36,57%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	1.170.131.005	485.500.000	41,49%
b	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	157.434.262	0	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.623.800	3.000.817	34,80%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.623.800	3.000.817	34,80%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.806.783	161.309.675	24,34%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.625.000	14.763.944	41,44%
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.531.513	96.207.826	22,14%
c	Pemeliharaan Mebel	9.817.200	4.091.500	41,68%
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.755.390	25.059.500	27,02%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.077.680	21.186.905	23,52%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.129.485.320	584.438.050	14,15%
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.354.474.620	526.502.450	15,70%
a	Pengawasan Kinerja Pemda	365.449.000	48.362.900	13,23%
b	Pengawasan Keuangan Pemda	740.672.760	118.079.200	15,94%
c	Reviu Laporan Kinerja	657.361.200	69.613.400	10,59%
d	Reviu Laporan Keuangan	155.016.000	49.367.800	31,85%
e	Kerjasama Pengawasan Internal	1.071.130.960	238.404.150	22,26%
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	364.844.700	2.675.000	0,73%
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	775.010.700	57.935.600	7,48%
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	67.879.950	375.000	0,55%
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	707.130.750	57.560.600	8,14%
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.926.701.010	357.228.150	7,25%
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	406.776.000	2.140.000	0,53%
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	76.674.000	1.440.000	1,88%
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	330.102.000	700.000	0,21%
2	Pendampingan dan Asistensi	4.519.925.010	355.088.150	7,86%
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda	870.480.200	247.240.000	28,40%
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	568.495.000	3.588.800	0,63%
c	Koordinasi Monev serta Verifikasi Pencegahan Korupsi	2.868.549.060	79.494.750	2,77%
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	212.400.750	24.764.600	11,66%
JUMLAH		31.472.005.080	9.537.104.940	30,30%

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang adalah sebesar Rp31.472.005.080. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.537.104.940. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.934.900.140.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
TUJUAN														
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dala mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
SASARAN														
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP		3,02	3,04	3,06	3,08	3,1		3,012	3,086	3,158	0	0	3,16
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko		1,75	2	3	3	3		2,82	2,86	2,991	0	0	3
	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah		87	87,5	88	88,5	89	87,63	82,11	88,5	88,5	88,5	0	0

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan “Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, realisasi telah sesuai target, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sasaran terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kerja, yaitu:

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja:
   a. Nilai Maturitas SPIP, menetapkan target nilai sebesar 3,08 pada Renstra namun berdasarkan penilaian tahun 2024 dengan nilai 3,158 sehingga dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 target Nilai Maturitas SPIP adalah 3,16. Sampai dengan Triwulan II belum dilakukan penilaian SPIP oleh BPKP karena terkendala dalam proses pengisian Penilaian Mandiri SPIP oleh OPD., maka proyeksi tahun 2025 pada nilai 3,16.
   b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko, target indeks sebesar 3. Namun, sampai dengan Triwulan II belum dilakukan penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko. Berdasarkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2024 sebesar 2,991 maka proyeksi di angka 3;
   c. Level Kapabilitas APIP, menetapkan target dengan realisasi yaitu level 3. Namun, sampai dengan Triwulan II belum dilakukan penilaian Level Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP perangkat daerah, Inspektorat Kota Semarang belum dapat mencapai target nilai sebesar 88,51 dengan realisasi nilai sebesar 88,50 (capaian 99,99%) sesuai dengan hasil evaluasi oleh APIP.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
   WTP merupakan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang meraih WTP untuk kesembilan kalinya sampai dengan tahun 2025 atas LKPD Tahun 2024. Hal positif ini harus dipertahankan dengan dukungan semua perangkat daerah serta komitmen Kepala Daerah.

2. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
   Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ada 3 komponen penilaian yaitu:
   a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
   b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
   c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
3. Mempertahankan Level Kapabilitas APIP
   Penilaian atas kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif yang disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
   Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 telah berada pada level 3 (*integrated*) dimana peran dan layanan APIP tidak hanya *complient* audit tapi juga melakukan jasa konsultansi dan *performance* audit (Audit Kinerja) terhadap program prioritas pemerintah daerah.
4. Meningkatkan Nilai AKIP
   Nilai AKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Nilai AKIP Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 88,5 dengan kategori memuaskan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:
1. Masih lambatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa obyek pemeriksaan;
2. Masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan;
3. Terdapat pelimpahan tugas *mandatory* yang diperintahkan dari pusat untuk Inspektorat Daerah di luar kebijakan pengawasan yang tidak direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025;
4. Kurangnya pemahaman dan komitmen organisasi atas manajemen risiko dan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Semarang; dan
5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi Inspektorat *quality assurance*.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:
1. Tantangan
   a. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko;

b. Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas;
c. Meningkatkan Maturitas penyelenggaraan SPIP dan Pemerintah Kota Semarang sebagai pengendali mutu dan memberikan pemahaman kepada OPD;
d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

2. Peluang
   a. Dengan ditambahnya jumlah APIP akan semakin mudah bagi Inspektorat Kota Semarang dalam memaksimalkan pembagian tugas;
   b. Peningkatan kapasitas APIP dengan mengikuti berbagai pelatihan dan Pendidikan yang menunjang kegiatan pengawasan;
   c. Dipenuhinya Anggaran dalam pelaksanaan pengawasan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Kota Semarang sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
4. Meningkatkan kapabilitas APIP Pemerintah Kota Semarang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Inspektorat Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	INSPEKTORAT				22.996.381.927,63	INSPEKTORAT				22.996.381.927,63	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				22.996.381.927,63	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				22.996.381.927,63	
	INSPEKTORAT DAERAH				22.996.381.927,63	INSPEKTORAT DAERAH				22.996.381.927,63	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	19.075.410.253,63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	19.075.410.253,63	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7 Dokumen	77.886.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7 Dokumen	77.886.800	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.328.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.328.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.780.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.024.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.024.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	344.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	344.800	
g	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	48.250.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	48.250.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Statistik Sektoral Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Statistik Sektoral Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	14 Dokumen 100%	15.459.702.772,63	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	14 Dokumen 100 %	15.459.702.772,63	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	15.112.171.312,63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	15.112.171.312,63	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	345.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	345.360.000	
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	300.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1.497.168,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1.497.168,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	374.292,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	374.292,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	1.448.963.487,50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	1.448.963.487,50	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	1.147.497.607,50	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	1.147.497.607,50	
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	301.465.880,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	301.465.880,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	940.854.546,79	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	940.854.546,79	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.712.648,79	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.712.648,79	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.335.094,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.335.094,00	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.134.407,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.134.407,00	
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	224.190,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	224.190,00	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.500.000,00	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	307.730.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	307.730.500,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		, Semua Kel/Desa					, Semua Kel/Desa				
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	246.504.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	246.504.000,00	
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	23.713.707,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	23.713.707,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	521.556.999,71	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	521.556.999,71	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	496.667.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	496.667.000,00	
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	24.889.999,71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	24.889.999,71	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	8.623.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	8.623.800,00	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.623.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.623.800,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	617.821.847,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	617.821.847,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.342.937,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.342.937,00	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	381.465.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	381.465.000,00	
c	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	9.817.200,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	9.817.200,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	92.755.390,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	92.755.390,00	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	101.441.320,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	101.441.320,00	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	1.691.438.343,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	1.691.438.343,00	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan	100 % 89 %	1.239.669.960,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan	100 % 89 %	1.239.669.960,00	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	117.573.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	117.573.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	264.924.800,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	264.924.800,00	
c	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	174.300.000,00	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	174.300.000,00	
d	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	61.430.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	61.430.000,00	
e	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	541.538.460,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	541.538.460,00	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60 Dokumen	79.903.700,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60 Dokumen	79.903.700,00	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase penyelesaian kasus pengaduan	100%	451.768.383,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase penyelesaian kasus pengaduan	100%	451.768.383,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			masyarakat dan terselenggarakanny a pengawasan dengan tujuan tertentu					masyarakat dan terselenggarakanny a pengawasan dengan tujuan tertentu			
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	24.350.000,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	24.350.000,00	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	427.418.383,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	427.418.383,00	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Maturitas SPIP	3.08 Nilai	2.229.533.331,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Maturitas SPIP	3.08 Nilai	2.229.533.331,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3 indeks	114.250.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3 indeks	114.250.000,00	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	11.400.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	11.400.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	102.850.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	102.850.000,00	
2	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Terselenggarakannya Pendampingan dan Asistensi	100%	2.115.283.331,00	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Terselenggarakannya Pendampingan dan Asistensi	100%	2.115.283.331,00	
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	868.369.200,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	868.369.200,00	
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	123.994.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	123.994.000,00	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	1.036.388.631,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	1.036.388.631,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	86.531.500,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	86.531.500,00	

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar

dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel"

dengan indikator tujuan "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas SPIP;
2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko;
3. Level Kapabilitas APIP; dan
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,16
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	88,50

Sumber : Inspektorat, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Inspektorat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel" dan indikator sasaran "Nilai Maturitas SPIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko, Level Kapabilitas APIP, Nilai AKIP Perangkat Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH					31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.927,63		
6.01.0.001.00.01.0000	INSPEKTORAT					31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.927,63		
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	22.415.818.750	22.415.818.750	19.075.410.253,63		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	118.262.859	118.262.859	77.886.800		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	53.740.962	53.740.962	21.328.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.671.400	3.671.400	1.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.354.099	3.354.099	2.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.270.099	3.270.099	2.024.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.770.099	3.770.099	2.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	456.200	456.200	344.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	14 Dokumen 100%	14 Dokumen 100%	14 Dokumen 100%	16.258.667.580	16.258.667.580	15.459.702.772,63		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	15.905.243.120	15.905.243.120	15.112.171.312,63	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dkungan Pendanaan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
									atas Kebijakan Penggajia PPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	346.584.000	346.584.000	345.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.857.600	4.857.600	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.497.168	1.497.168	1.497.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	485.692	485.692	374.292,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	100%	100%	1.877.411.880	1.877.411.880	1.448.963.487,50		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	66 Orang	66 Orang	1.171.826.000	1.171.826.000	1.147.497.607,50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang2an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	705.585.880	705.585.880	301.465.880,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	100%	100%	2.162.480.581	2.162.480.581	940.854.546,79		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	129.757.604	129.757.604	129.712.648,79	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	94.681.089	94.681.089	86.335.094,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	117.632.261	117.632.261	44.134.407,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.977.018	4.977.018	224.190,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	102.500.000	102.500.000	102.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	753.006.000	753.006.000	307.730.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.320.618	263.320.618	246.504.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	696.605.991	696.605.991	23.713.707,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	1.327.565.267	1.327.565.267	521.556.999,71		
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1.170.131.005	1.170.131.005	496.667.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	157.434.262	157.434.262	24.889.999,71	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	8.623.800	8.623.800	8.623.800,00		
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.623.800	8.623.800	8.623.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	100%	100%	662.806.783	662.806.783	617.821.847,00		
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.625.000	35.625.000	32.342.937,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	36 Unit	434.531.513	434.531.513	381.465.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	140 Unit	9.817.200	9.817.200	9.817.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	125 Unit	92.755.390	92.755.390	92.755.390,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	45 Unit	90.077.680	90.077.680	101.441.320,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	4.129.485.320	4.129.485.320	1.691.438.343,00		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100%	100%	100%	3.354.474.620	3.354.474.620	1.239.669.960,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Persentase Tindak Lanjut	89%	89%	89%					
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	365.449.000	365.449.000	117.573.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	740.672.760	740.672.760	264.924.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	657.361.200	657.361.200	174.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	155.016.000	155.016.000	61.430.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.071.130.960	1.071.130.960	541.538.460,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi TL LHP BPK dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	100 Dokumen	60 Dokumen	364.844.700	364.844.700	79.903.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	775.010.700	775.010.700	451.768.383,00		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	67.879.950	67.879.950	24.350.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Negara/Daerah yang Ditangani								
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	707.130.750	707.130.750	427.418.383,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.16 Nilai	3.08 Nilai	3.08 Nilai	4.926.701.010	4.926.701.010	2.229.533.331,00		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3 indeks	3 indeks	3 indeks	406.776.000	406.776.000	114.250.000,00		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	76.674.000	76.674.000	11.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	330.102.000	330.102.000	102.850.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggarakannya Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	4.519.925.010	4.519.925.010	2.115.283.331,00		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	870.480.200	870.480.200	868.369.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket.
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	568.495.000	568.495.000	123.994.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monev serta Verifikasi Pencegahan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.868.549.060	2.868.549.060	1.036.388.631,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	212.400.750	212.400.750	86.531.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
JUMLAH						31.472.005.080,00	31.472.005.080,00	22.996.381.927,63		

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

36. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima ahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerha Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

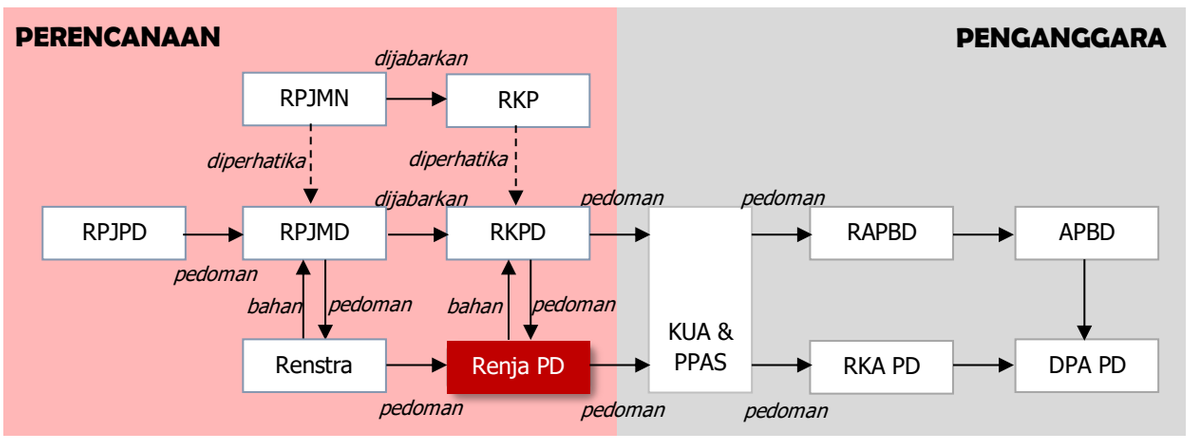

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja

Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);

p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang

Selatan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja Kecamatan Semarang Selatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
7.01	KECAMATAN								
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	94%	50%		92%	98%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka		1 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	2 Dokumen	n/a	n/a		2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	50%	100%	50%		50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Barusari	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Bulustalan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Randusari	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Pleburan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Lamper Tengah	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Wonodri	n/a	n/a	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Peterongan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Mugassari	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Lamper Kidul	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100%	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Lamper Lor							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	50%	100%	50%		50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	50%	100%	50%		50%	51%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	33%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	7 Lembaga	n/a	n/a		7 Lembaga	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	n/a	n/a	9 Lembaga	9 Lembaga		9 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	14 kegiatan	6 Unit	n/a	n/a		6 Unit	66%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	12 Unit	6 Unit		6 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	14 kegiatan	6 Unit	n/a	n/a		6 Unit	66%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	10 Unit	5 Unit		5 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	12 kegiatan	9 Unit	n/a	n/a		9 Unit	81%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	12 Unit	6 Unit		6 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan	9 Unit	n/a	n/a		9 Unit	75%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	12 Unit	6 Unit		6 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	15 kegiatan	6 Unit	n/a	n/a		6 Unit	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	8 Unit	4 Unit		4 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	14 kegiatan	6 Unit	n/a	n/a		6 Unit	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	6 Unit	3 Unit		3 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	12 kegiatan	7 Unit	n/a	n/a		7 Unit	87%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	11 Unit	11 Unit		5 Unit	45%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan	0 Unit	n/a	n/a		0 Unit	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	11 Unit	5 Unit		5 Unit	45%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	12 kegiatan	0 Unit	n/a	n/a		0 Unit	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	10 Unit	5 Unit		5 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	14 kegiatan	0 Unit	n/a	n/a		0 Unit	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	10 Unit	5 Unit		5 Unit	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan	7Unit	n/a	n/a		7Unit	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n/a	n/a	7 Unit	3 Unit		3 Unit	42%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	35 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	n/a	n/a		8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	10 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	3 dokumen		0 dokumen	0%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	9 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga		9 Lembaga	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	1 Laporan	n/a	n/a		1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	n/a	n/a	2 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	50%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	6,20%	25%	12.5%		6,20%	41%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	37 angka	31 angka	15 angka		37 angka	71%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	1 Laporan	n/a	n/a		1 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	2 laporan	1 laporan		1 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	50%	98%	49%		50%	54%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan		2 kegiatan	66%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan	60 Orang	n/a	n/a		60 Orang	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	n/a	n/a	100 orang	50 orang		50 orang	50%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	40%	n/a	n/a		40%	40%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	63%	n/a	n/a		63%	63%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100%	50%	n/a	n/a		50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	n/a	n/a	100%	50%		50%	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	3 dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen		3 dokumen	50%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		2 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	50%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	50%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	0 Dokumen	n/a	n/a		0 Dokumen	0%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	1 Laporan	n/a	n/a		1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 Laporan	n/a	n/a		1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	50%	100%	50%		50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	63 Orang/bulan	n/a	n/a		63 Orang/bulan	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan		81 Orang/bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	12 Dokumen	n/a	n/a		12 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	12 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	50%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 Laporan	n/a	n/a		1 Laporan	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	9 Laporan	n/a	n/a		9 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	18 Laporan	9 Laporan		9 Laporan	50%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	50%	100%	50%		50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	1 Paket	n/a	n/a		1 Paket	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket		1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	1 Paket	n/a	n/a		1 Paket	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket		1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	1 Paket	n/a	n/a		1 Paket	100%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket		1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	1 Paket	n/a	n/a		1 Paket	100%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket		1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	31 jenis	1 Dokumen	n/a	n/a		1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50%	100%	50%		50%	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	2 Unit	n/a	n/a		2 Unit	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit		1 Unit	50%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	50%	100%	50%		50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis	6 Laporan	n/a	n/a		6 Laporan	50%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	50%	100%	50%		50%	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit	36 Unit	n/a	n/a		36 Unit	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	47 Unit	23 Unit		23 Unit	49%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	7 Unit	n/a	n/a		7 Unit	63%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit		1 Unit	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	1 Unit	n/a	n/a		1 Unit	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit		1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 jenis	1 Unit	n/a	n/a		1 Unit	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit		1 Unit	100%

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah sub kegiatan rutin yang memang terjadwal di awal tahun seperti sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Hampir semua Sub Kegitan mengalami refocusing anggaran sebagai tindaklanjut dari inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara , namun tidak sampai mempengaruhi jumlah ouput sub kegiatan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN		Rp.21.690.373.630	Rp. 8.224.260.649	496,63%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 16.791.198.340	Rp.7.073.933.425	253,05%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 69.617.500	Rp. -	
7.1.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 53.488.900	Rp. -	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.107.300	Rp. -	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 3.488.900	Rp. -	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp. 2.107.300	Rp. -	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 3.488.900	Rp. -	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.447.300	Rp. -	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.488.900	Rp. -	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 14.412.672.840	Rp. 6.902.412.672	87,45%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 14.033.233.440	Rp. 6.754.822.672	48,13%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 375.396.000	Rp. 147.590.000	39,32%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.347.800	Rp. -	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.1.347.800	Rp. -	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.1.347.800	Rp. -	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.1.024.792.200	Rp. 46.436.950	93,42%

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 33.300.000	Rp. 8.435.000	25,33%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 207.100.000	Rp. -	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 45.800.000	Rp. 3.872.000	12,88%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 34.225.000	Rp. 5.379.950	31,14%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 131.163.200	Rp. 22.600.000	17,23%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 99.424.000	Rp. 6.150.000	6,84%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 473.780.000	Rp. -	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 73.300.000	Rp. -	0,00%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 73.300.000	Rp. -	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 256.600.000	Rp. 48.494.447	37,11%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 139.000.000	Rp. 31.651.447	22,78%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 117.600.000	Rp. 16.843.000	14,33%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 954.215.800	Rp. 76.589.356	35,07%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 319.400.000	Rp. 67.176.256	24,92%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 426.272.800	Rp. -	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 53.813.000	Rp. 3.343.100	6,21%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 154.730.000	Rp. 6.070.000	3,94%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.2.699.846.560	Rp. 964.557.224	136,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 614.500.000	Rp. 409.350.000	68,00%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp.4.500.000	Rp. -	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 610.000.000	Rp. 409.350.000	68,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 709.046.560	Rp. 293.728.640	49,00%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 709.046.560	Rp. 293.728.640	49,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.1.376.300.000	Rp. 261.478.584	19,00%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.1.376.300.000	Rp. 261.478.584	19,00%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.061.160.830	Rp. 175.780.000	98,16%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.893.610.830	Rp. 156.480.000	82,15%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 169.600.000	Rp. 102.420.000	70,75%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.1.200.000.000	Rp. -	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 524.010.830	Rp. 54.060.000	11,40%

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 167.550.000	Rp. 19.300.000	16,01%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 127.000.000	Rp. 19.300.000	16,01%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.7.750.000	Rp. -	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 32.800.000	Rp. -	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 107.467.900	Rp. 9.990.000	9,42%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 107.467.900	Rp. 9.990.000	9,42%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 107.467.900	Rp. 9.990.000	9,42%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 30.700.000	Rp. -	0,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 30.700.000	Rp. -	0,00%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp. 30.700.000	Rp. -	
7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BULUSTALAN		Rp.1.757.800.000	Rp. 362.742.229	126,84%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 27.673.479	33,26%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 27.673.479	33,26%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 27.673.479	33,26%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.1.669.800.000	Rp. 335.068.750	93,58%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.016.800.000	Rp. 39.943.750	43,17%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 17.343.750	1,83%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 66.800.000	Rp. 22.600.000	41,34%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 653.000.000	Rp. 295.125.000	50,41%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 653.000.000	Rp. 295.125.000	50,41%
7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARUSARI		Rp.1.988.800.000	Rp. 438.117.784	102,42%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 17.567.784	21,02%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 17.567.784	21,02%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 17.567.784	21,02%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.1.900.800.000	Rp. 420.550.000	81,40%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.029.400.000	Rp. 19.350.000	30,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. -	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 79.400.000	Rp. 19.350.000	30,00%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 871.400.000	Rp. 401.200.000	51,40%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 871.400.000	Rp. 401.200.000	51,40%

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN RANDUSARI		Rp.2.129.200.000	Rp. 515.996.070	25,86%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 19.119.470	21,73%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 19.119.470	21,73%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 19.119.470	21,73%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.041.200.000	Rp. 496.876.600	26,05%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.029.400.000	Rp. 35.432.600	3,50%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 17.382.600	1,83%
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 79.400.000	Rp. 18.050.000	29,04%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.1.011.800.000	Rp. 461.444.000	51,56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.011.800.000	Rp. 461.444.000	51,56%
7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MUGASSARI		Rp.2.222.800.000	Rp. 609.197.632	29,15%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 30.679.812	35,42%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 30.679.812	35,42%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 30.679.812	35,42%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.134.800.000	Rp. 578.517.820	28,88%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.029.400.000	Rp. 50.432.800	4,98%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 17.515.800	1,85%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 79.400.000	Rp. 32.917.000	53,15%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.1.105.400.000	Rp. 528.085.020	53,26%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.105.400.000	Rp. 528.085.020	53,26%
7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN PLEBURAN		Rp.2.065.600.000	Rp. 516.126.159	26,63%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 33.976.619	40,68%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 33.976.619	40,68%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 33.976.619	40,68%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.1.977.600.000	Rp. 482.149.540	26,00%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.012.600.000	Rp. 45.049.540	4,50%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 17.553.540	1,85%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 62.600.000	Rp. 27.496.000	52,85%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 965.000.000	Rp. 437.100.000	51,28%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 965.000.000	Rp. 437.100.000	51,28%
7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN WONODRI		Rp.2.692.000.000	Rp. 797.609.209	31,84%

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 23.614.459	28,55%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 23.614.459	28,55%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 23.614.459	28,55%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.604.000.000	Rp. 773.994.750	31,96%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.046.200.000	Rp. 35.919.750	3,49%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. -	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 96.200.000	Rp. 35.919.750	45,69%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.1.557.800.000	Rp. 738.075.000	52,97%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.557.800.000	Rp. 738.075.000	52,97%
7.01.0.00.0.00.01.0007 - KELURAHAN PETERONGAN		Rp.2.133.400.000	Rp. 551.456.095	27,47%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 54.041.095	63,27%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 54.041.095	63,27%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 54.041.095	63,27%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.045.400.000	Rp. 497.415.000	25,88%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.033.600.000	Rp. 34.140.000	3,35%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. -	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 83.600.000	Rp. 34.140.000	48,60%
7.1.3.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.1.011.800.000	Rp. 463.275.000	51,36%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.011.800.000	Rp. 463.275.000	51,36%
7.01.0.00.0.00.01.0008 - KELURAHAN LAMPER LOR		Rp.1.918.000.000	Rp. 411.516.752	22,66%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 24.691.752	29,57%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 24.691.752	29,57%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 24.691.752	29,57%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 1.830.000.000	Rp. 386.825.000	22,33%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 1.021.000.000	Rp. 19.550.000	1,93%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. -	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 71.000.000	Rp. 19.550.000	32,20%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 809.000.000	Rp. 367.275.000	50,89%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 809.000.000	Rp. 367.275.000	50,89%
7.01.0.00.0.00.01.0009 - KELURAHAN LAMPER KIDUL		Rp. 1.937.800.000	Rp. 450.954.562	24,55%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 88.000.000	Rp. 36.136.012	43,65%

Kode	PD / Unit PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI	REALISASI TW II	% (PERSEN)
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 36.136.012	43,65%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 88.000.000	Rp. 36.136.012	43,65%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.1.849.800.000	Rp. 414.818.550	23,65%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.025.200.000	Rp. 37.193.550	3,67%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 17.543.550	1,85%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 75.200.000	Rp. 19.650.000	30,98%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 824.600.000	Rp. 377.625.000	51,00%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 824.600.000	Rp. 377.625.000	51,00%
7.01.0.00.0.00.01.0010 - KELURAHAN LAMPER TENGAH		Rp.2.190.200.000	Rp. 602.944.747	29,23%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 98.000.000	Rp. 36.569.747	39,63%
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 98.000.000	Rp. 36.569.747	39,63%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 98.000.000	Rp. 36.569.747	39,63%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2.092.200.000	Rp. 566.375.000	28,74%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.1.033.600.000	Rp. 72.150.000	7,05%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dann Prasarana Kelurahan	Rp. 950.000.000	Rp. 32.715.000	3,44%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 83.600.000	Rp. 39.435.000	53,94%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.1.058.600.000	Rp. 494.225.000	52,17%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.1.058.600.000	Rp. 494.225.000	52,17%
	TOTAL	Rp.42.725.973.630	Rp. 13.480.921.888	32,77%

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar Rp 42.725.973.630,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan bulan Juni 2025 realisasinya adalah sebesar Rp 13.480.921.888,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 20.772.432.062,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					REALISASI	
				2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025 TW II
TUJUAN RENSTRA										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	91.00 angka	87.00 angka	88.00 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.00 angka	99.49 angka	96,73 angka
SASARAN RENSTRA										
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	71.55 angka	82.00 angka	75.25 angka	77.70 angka	79.60 angka	80.30 angka	82.00 angka	77.15 angka	77.45 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00 persen	30.00 persen	10.00 persen	15.00 persen	20.00 persen	25.00 persen	30.00 persen	21 persen	21 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	85.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	92.00 persen	95.00 persen	98.00 persen	100.00 persen	95 persen	0 persen

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 96,73 angka dari target sebesar 90,00 angka ;
b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP dimana realisasinya 77,45 angka dari target sebesar 80.30 angka ;
c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 1 angka dari target sebesar 1 angka ;
d. Sasaran 3 “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan dimana pada Triwulan II realisasinya 50.00 % dari target sebesar 100 % ;
e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” pada Triwulan II realisasinya sebesar 21 persen dari target sebesar 25 persen ;
    2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” pada Triwulan II realisasinya sebesar 0 persen dari target sebesar 100 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga
terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah:

1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Semarang Selatan belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Selatan adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Semarang Selatan hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan

dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2025 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Selatan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   Untuk tahun 2023, secara umum Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Masa Transisi dari RPJM Kota Semarang Tahun 2021-2026 ke RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
   Memasuki tahun 2025 sebagai tahun transisis dari politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong,

hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Semarang Selatan
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, perkiraan capaian di tahun 2025 serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur ya berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan unt menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah	Percepatan penyediaan sarana dan prasara penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh d berkeadilan;
Prioritas Daerah	Percepatan pengurangan pengangguran, d penurunan kemiskinan;

Prioritas Daerah	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumb Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan ya dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
   c. peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
   d. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
   e. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80

3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkanantara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Selatan

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			56.298.309.907,16	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			56.298.309.907,16	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			56.298.309.907,16	UNSUR KEWILAYAHAN			56.298.309.907,16	
7.01	KECAMATAN			56.298.309.907,16	KECAMATAN			56.298.309.907,16	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	16.965.452.135,86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	16.965.452.135,86	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan*	2 dokumen 6 dokumen	52.540.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan*	2 dokumen 6 dokumen	52.540.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	48.779.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	48.779.400,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	327.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	327.300,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	508.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	508.900,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	327.300,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	327.300,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	508.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	508.900,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	323.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	323.300,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1.764.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1.764.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan SKPD* *Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD*	100 persen 4 dokumen	14.793.354.093,16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan SKPD* *Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD*	100 persen 4 dokumen	14.793.354.093,16	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	81 Orang/bulan	14.005.021.773,16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	81 Orang/bulan	14.005.021.773,16	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	787.660.920,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	787.660.920,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	223.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	223.800,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	223.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	223.800,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	223.800,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	223.800,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi*	100 persen	855.830.477,70	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi*	100 persen	855.830.477,70	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	33.300.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	33.300.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	135.985.560,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	135.985.560,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	30.055.220,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	30.055.220,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	17.274.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	17.274.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	131.163.200,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	131.163.200,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	104.900.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	104.900.000,00	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	403.152.497,70	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	403.152.497,70	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	100 persen	24.790.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	100 persen	24.790.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	24.790.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	24.790.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100 persen	256.457.105,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100 persen	256.457.105,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	138.945.450,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	138.945.450,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	117.511.655,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	117.511.655,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	100 persen	982.480.460,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	100 persen	982.480.460,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	47 Unit	269.591.440,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	47 Unit	269.591.440,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	426.213.940,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	426.213.940,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	53.813.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	53.813.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	232.862.080,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	232.862.080,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	*Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan*	1 angka	728.491.942,30	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	*Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan*	1 angka	728.491.942,30	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	3.750.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	3.750.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	4 Dokumen	724.741.942,30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	4 Dokumen	724.741.942,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	525.959.252,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	525.959.252,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 persen	756.923.221,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 persen	756.923.221,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	756.923.221,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	756.923.221,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	9 Lembaga Kemasyara katan	144.755.190,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	9 Lembaga Kemasyara katan	144.755.190,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	7 Unit	1.200.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	7 Unit	1.200.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	474.274.230,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	474.274.230,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	4 Lembaga Kemasyara katan	120.527.060,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	4 Lembaga Kemasyara katan	120.527.060,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga Kemasyara katan	7.750.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga Kemasyara katan	7.750.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	151.400.000,00	Fasilitasi Pengembangan	*Jumlah Laporan Fasilitasi*	2 Laporan	151.400.000,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
					Usaha Ekonomi Masyarakat	*Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	106.058.430,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	106.058.430,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani*	31 angka	106.058.430,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani*	31 angka	106.058.430,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	106.058.430,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	106.058.430,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	104.450.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	104.450.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan*	3 kegiatan	104.450.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan*	3 kegiatan	104.450.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,*	100 Orang	104.450.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,*	100 Orang	104.450.000,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*			(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*			
	KELURAHAN BULUSTALAN				KELURAHAN BULUSTALAN				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	63.192.710,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	63.192.710,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	54.675.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	54.675.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.543.540.950,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.543.540.950,00	
	KELURAHAN BARUSARI				KELURAHAN BARUSARI				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan*	12 Laporan	83.559.323,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan*	12 Laporan	83.559.323,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	64.495.360,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	64.495.360,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.088.766.860,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.088.766.860,00	
	KELURAHAN RANDUSARI				KELURAHAN RANDUSARI				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	88.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	62.150.770,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	62.150.770,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.469.573.200,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.469.573.200,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	KELURAHAN MUGASSARI				KELURAHAN MUGASSARI				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	86.612.949,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	86.612.949,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	61.934.800,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan*	10 Pokmas / Ormas	61.934.800,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
						Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.743.791.470,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.743.791.470,00	
	KELURAHAN PLEBURAN				KELURAHAN PLEBURAN				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	83.521.883,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	83.521.883,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	6 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	6 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	52.030.520,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	52.030.520,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.359.552.100,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.359.552.100,00	
	KELURAHAN WONODRI				KELURAHAN WONODRI				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	82.724.684,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	82.724.684,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	915.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	915.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	78.618.200,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	78.618.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	3.875.752.790,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	3.875.752.790,00	
	KELURAHAN PETERONGAN				KELURAHAN PETERONGAN				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 Persen	2.842.954.598,30	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	85.414.698,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	85.414.698,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	70.249.790,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	70.249.790,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.455.290.800,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.455.290.800,00	
	KELURAHAN LAMPER LOR				KELURAHAN LAMPER LOR				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	83.491.226,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	83.491.226,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	950.000.000,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	60.705.240,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	60.705.240,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.954.300.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.954.300.000,00	
	KELURAHAN LAMPER KIDUL				KELURAHAN LAMPER KIDUL				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	82.783.339,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	82.783.339,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	63.425.700,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	63.425.700,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.981.271.700,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	1.981.271.700,00	
	KELURAHAN LAMPER TENGAH				KELURAHAN LAMPER TENGAH				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				KECAMATAN				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit*	100 persen	1.357.539.435,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak*	100 persen	1.357.539.435,00	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
2	3	4	5	6	3	4	5	6	
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	92.279.371,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	92.279.371,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	86.178.703,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	86.178.703,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.589.384.310,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	2.589.384.310,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Selatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Selatan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	RW	RT	VOLUME	USULAN ANGGARAN (RP)	KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH
1	Rehabilitasi Rumah Dinas (Kantor Lama)	Jl. Bulustalan II	BULUSTALAN	5	1	100 m²	225.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2	Perbaikan Saluran Air Dan Grill	Jl. Basudewa (SDN Bulustalan)	BULUSTALAN	8	4	150 meter	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Normalisasi Saluran	Jl. Tentara Pelajar s/d Sungai Bajak RT 07, 08, 09	LAMPER KIDUL	7,8,9	1	210 m²	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembuatan Saluran	Jl. Lampersari Depan Gereja Materdai s/d Sungai Bajak RT 01, 02	LAMPER KIDUL	1,2	1	300 m²	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Normalisasi Saluran	Jl. Mangga I s/d Kali Peterongan RT 01	LAMPER KIDUL	1	6	600 m²	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Rehab Balai	Jl. Durian I RT 04	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
7	Pembuatan Gedung	Jl. Durian Barat No. 31	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
8	Pemberian Atap TPS Dan Reposisi	Jl. Durian Barat No. 31	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	210.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Perbaikan Talud Kali Bajak	JL MANGGIS	LAMPER LOR	07, 09	3	500 meter	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Pengerukan Sedimen Kali Manggis	JL MANGGIS	LAMPER LOR	0	3	450 meter	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Rehab Kantor Randusari	JL.RANDUSARI POS II NO.155	RANDUSARI	4	1	1 Lokasi	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
12	Pembuatan Talud	WONOSARI 8	RANDUSARI	6	3	150 m³	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	Pembuatan Talud	WONOSARI	RANDUSARI	8	4	150 m³	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Pembuatan Bak Sampah	WONOSARI	RANDUSARI	4	3	1 unit	210.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	Pembuatan Talud Pinggir Sungai Dan Bahu Jalan	Jl. Singosari Timur (belakang PIP)	WONODRI	1, 3, 4, 2	1, 7, 12	1227 meter	1.000.986.600	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Rusak	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono	WONODRI	03.04	10	660 meter	401.742.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Normalisasi Saluran	Jl. HOS Cokroaminoto Raya dan 4	BARUSARI	2	3	150 m²	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kalisari Baru Rt 6 Rw 5	Jl. Kalisari Baru	BARUSARI	6	5	750 m²	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	Normalisasi Dan Perbaikan Saluran	Jl. Suyudono	BARUSARI	1,02	4	200 m²	285.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	RW	RT	VOLUME	USULAN ANGGARAN (RP)	KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH
20	Pembuatan Saluran	JL LAMPER TENGAH IX SAMPAI DEPAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH	LAMPER TENGAH	6	1	375 m²	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	Pembuatan Gedung Balai Pertemuan Warga RW 2	Jl. Penaton (Belakang Rumah Dinas) rt 2 rw 2	BARUSARI	2	2	140 m²	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
22	Perbaikan TPS	Jl. Kalisari Baru	BARUSARI	8	7	100 m³	215.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23	Perbaikan Saluran Sisi Timur Jalan	JL LAMPER TENGAH RAYA	LAMPER TENGAH	0	002 & 003	230 m²	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	Pengerukan Sedimen Saluran Sebelah Barat Sepanjang Jl Lamper Tengah Raya	JL LAMPER TENGAH RAYA	LAMPER TENGAH	001-004	4	1000 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	Pengerukan Sedimen Sungai Kecil Ex. Saluran Irigasi Sepanjang Jl Lamper Tengah Ix Dan X	JL LAMPER TENGAH IX DAN X	LAMPER TENGAH	0	004-008	1000 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	Pelebaran Saluran Sudet Sungai Kecil Dari Gayamsari Masuk Ke Sungai Besar	SEBELUM JEMBATAN TALANG WILAYAH GAYAMSARI	LAMPER TENGAH	0	0	247 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	Pembuatan Saluran Untuk Mengalirkan Air Dari Kini Balu Tandang Masuk Ke Sungai Besar (Bajak)	JL TENTARA PELAJAR SAMPING ASRAMA	LAMPER TENGAH	0	0	490.2 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	Pengerukan Sedimen Saluran Samping Jalan Tol	JL LAMPER TENGAH SAMPING JALAN TOL	LAMPER TENGAH	0	001-003	1 unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	Normalisasi Dan Perbaikan Saluran	Jl. Kyai Saleh	MUGASSARI	3	2	675 m²	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	Perbaikan Balai RW III Di Buat Lantai 2	Jl. Mugas Barat	MUGASSARI	3	3	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
31	Perbaikan Lokasi Tempat Sampah	Jl. Taman Mugas Timur	MUGASSARI	8	4	1 unit	205.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi
    a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
    b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
    c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
    d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
    e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
    f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
    a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
    b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
    a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
    b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
    c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
    d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
    a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
    b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
    c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dansasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

“ Meningkatkan kinerja pelayanan publik , pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan dengan pemanfaatan teknologi informasi”

dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu “Meningkatnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan ;

Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan ; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik; dan Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah ", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan
   Indikator : -Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90.00
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	80,30
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN	Angka	100
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	25.00
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan	Angka	98.00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
		dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan		

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Selatan bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
   Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:
   a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh Kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan;

b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;

c. Kegiatan Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari sabtu di minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala priotitas pembangunan di Kecamatan dari hasil murenbangkel dan prioritas Kecamatan.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 56.298.309.907,16 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

a. Rp 16. 965.452.135,86 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

b. Rp 39.332.857.771,30 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				42.725.973.630,00	42.725.973.630,00	56.298.309.907,16	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				42.725.973.630,00	42.725.973.630,00	56.298.309.907,16	
7.01	KECAMATAN				42.725.973.630,00	42.725.973.630,00	56.298.309.907,16	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	16.978.444.900,00	16.791.198.340,00	16.965.452.135,86	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 Persen	100 Persen				
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan*	2 dokumen 6 dokumen	2 dokumen 6 dokumen	69.617.500,00	69.617.500,00	52.540.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	53.488.900,00	53.488.900,00	48.779.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300,00	2.107.300,00	327.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900,00	3.488.900,00	508.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300,00	2.107.300,00	327.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900,00	3.488.900,00	508.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1.447.300,00	1.447.300,00	323.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	3.488.900,00	3.488.900,00	1.764.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan SKPD* *Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD*	100 persen 4 dokumen	100 persen 4 dokumen	14.599.919.400,00	14.412.672.840,00	14.793.354.093,16	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	14.220.480.000,00	14.033.233.440,00	14.005.021.773,16	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	375.396.000,00	375.396.000,00	787.660.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1.347.800,00	1.347.800,00	223.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan*	18 Laporan	18 Laporan	1.347.800,00	1.347.800,00	223.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*						
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800,00	1.347.800,00	223.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi*	100 persen	100 persen	1.024.792.200,00	1.024.792.200,00	855.830.477,70	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	207.100.000,00	207.100.000,00	135.985.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	45.800.000,00	45.800.000,00	30.055.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	34.225.000,00	34.225.000,00	17.274.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	131.163.200,00	131.163.200,00	131.163.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	99.424.000,00	99.424.000,00	104.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	473.780.000,00	473.780.000,00	403.152.497,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	100 persen	100 persen	73.300.000,00	73.300.000,00	24.790.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	73.300.000,00	73.300.000,00	24.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100 persen	100 persen	256.600.000,00	256.600.000,00	256.457.105,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	139.000.000,00	139.000.000,00	138.945.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	117.600.000,00	117.600.000,00	117.511.655,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	100 persen	100 persen	954.215.800,00	954.215.800,00	982.480.460,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	47 Unit	47 Unit	319.400.000,00	319.400.000,00	269.591.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	426.272.800,00	426.272.800,00	426.213.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	53.813.000,00	53.813.000,00	53.813.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	154.730.000,00	154.730.000,00	232.862.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan*	1 angka	1 angka	614.500.000,00	614.500.000,00	728.491.942,30	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	610.000.000,00	610.000.000,00	724.741.942,30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	521.800.000,00	709.046.560,00	525.959.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 persen	100 persen	1.376.300.000,00	1.376.300.000,00	756.923.221,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	12 Laporan	1.376.300.000,00	1.376.300.000,00	756.923.221,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	169.600.000,00	169.600.000,00	144.755.190,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	7 Unit	7 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	524.010.830,00	524.010.830,00	474.274.230,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	127.000.000,00	120.527.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	2 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	151.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	107.467.900,00	107.467.900,00	106.058.430,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani*	31 angka	31 angka	107.467.900,00	107.467.900,00	106.058.430,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	2 Laporan	107.467.900,00	107.467.900,00	106.058.430,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	30.700.000,00	30.700.000,00	104.450.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan*	3 kegiatan	3 kegiatan	30.700.000,00	30.700.000,00	104.450.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	100 Orang	100 Orang	30.700.000,00	30.700.000,00	104.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN BULUSTALAN							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	63.192.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	66.800.000,00	54.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	669.800.000,00	653.000.000,00	1.543.540.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN BARUSARI							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*						
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	83.559.323,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	64.495.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	900.800.000,00	871.400.000,00	2.088.766.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN RANDUSARI							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	11 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	62.150.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000,00	1.011.800.000,00	2.469.573.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN MUGASSARI							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)						
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	86.612.949,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	11 Unit	11 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	61.934.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000,00	1.105.400.000,00	2.743.791.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN PLEBURAN							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	83.521.883,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	6 Unit	6 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	62.600.000,00	52.030.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000,00	965.000.000,00	2.359.552.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KELURAHAN WONODRI							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	82.724.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	12 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	915.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	96.200.000,00	78.618.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.604.000.000,00	1.557.800.000,00	3.875.752.790,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN PETERONGAN							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	85.414.698,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	12 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	70.249.790,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000,00	1.011.800.000,00	2.455.290.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN LAMPER LOR							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	83.491.226,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	8 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	71.000.000,00	60.705.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000,00	809.000.000,00	1.954.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN LAMPER KIDUL							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	82.783.339,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	75.200.000,00	63.425.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000,00	824.600.000,00	1.981.271.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN LAMPER TENGAH							
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000,00	3.589.846.560,00	2.842.954.598,30	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	100 persen	1.411.800.000,00	1.599.046.560,00	1.357.539.435,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00	92.279.371,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830,00	22.206.760.830,00	36.279.394.743,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830,00	12.170.810.830,00	11.938.493.503,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	12 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	86.178.703,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000,00	10.035.950.000,00	24.340.901.240,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000,00	1.058.600.000,00	2.589.384.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang ;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab

seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

37. KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

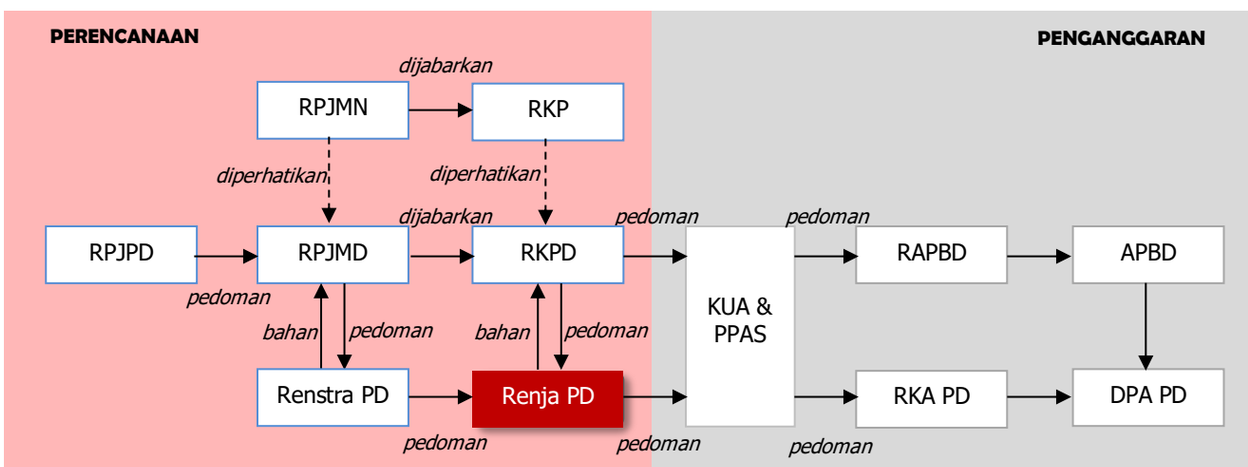

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Utara sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025.
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	50	50	150	150
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	50	50	150	150
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100	100	100	42	42	142	142
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	5	5	3	60	8	160
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3	3	2	67	5	500
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	0	0	1	100
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	0	0	1	100
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	0	0	1	100
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	1	1	100	2	0
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	3	300	4	400
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100	95	100	50	50	145	145
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	64	97	83	86	147	223
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	6	50	18	150
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	0	0	0	1	1
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	6	50	18	0
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	1	0	0	1	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	88.11	100	50	50	138.11	138
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	17	4	9	225	26	433
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	16	16	8	50	24	400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	3	4	2	50	5	14
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	5	2	3	150	8	100
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	48	15	28	186	76	117
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	14	14	11	79	25	36
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	6	1	3	300	9	90
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	80	100	40	40	120	120
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6	50	18	150
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	80	100	40	40	120	120

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	13	13	6	46	19	79
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	14	14	8	57	22	440
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15	6	0	0	15	750
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100	2	40
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95	96.78	94	97.08	103	193.86	204
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	65	1	65	0	0	1	2
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1	0	0	0	0
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	5	3	5	167	10	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	39.58	40	139.58	140
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	12	5	42	10	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	12	5	42	15	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	12	5	42	15	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	99	100	48	48	147	147
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321	103	321	5	2	108	34
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105	6	5	5	100	11	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kec Semarang Utara	6	15	7	1	14	16	267
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	7	15	14	1	0.7	16	228
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	11	23	10	1	1	24	218
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	9	13	12	1	0.8	14	156
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	7	16	12	0	0	16	229
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	6	11	6	1	16	12	200
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	6	27	10	1	1	28	467
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	105	12	21	1	0.4	13	12

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	9	13	28	1	0.3	14	156
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	6	12	12	1	0.8	13	217
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	10	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	50	50	30	60	80	1.6
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45	5	5	5	100	10	22
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	10	200
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitas			1	0	0	0	0
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	3	3	3	100	6	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	17.20	25	0.39	2	17.59	59
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan dan ketertiban umum yang ditangani	20	13	30	10	33	23	115
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50	18	150
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	100	98	0.89	1	100.89	101
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
		Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	10	6	10	40	400	46	460

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara							
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400	400	480	100	21	500	125

Sumber: Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”,

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami efisiensi anggaran sesuai Inpress Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu yang berisi Belanja Modal, ATK, belanja cetak, perjalanan dinas dan honorarium narasumber sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Efisiensi Anggaran Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
1		2	3	4		6 = 4 - 5	5
1		BELANJA MODAL			400.052..594	787.800.514	367.547.695
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.093.595	11.093.595	-	Almari Arsip Besi

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
			5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	159.307.200	-	159.307.200	KAMERA CCTV karena aduan masyarakat
			5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	291.543.720	72.072.000	219.471.720	Kursi Rapat Susun Bahan Steinless + busa 90 buah
			5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	42.639.318	42.639.318	-	Kursi Kerja Eselon IV 9 buah
			5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.816.981	1.816.981	-	MEGAPHONE
			5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.274.300	3.274.300	-	HP
			5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.971.981	24.971.981	-	Laptop Touchscreen
			5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	53.119.208	-	53.119.208	Sound System 2 buah
			5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	475.086.805	119.184.419	355.902.386	Komputer All in one core i5, 8 GB DDR3, 1 TB 7 unit
	Kelurahan Purwosari	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.000.000	125.000.000	-	Sarpras Kel Purwosari Karena sudah dibangun(Aspirasi Dewan 2024)
2		BELANJA OM		450.000.000	310.000.000		
	Kelurahan Plombokan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Bulu Lor	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Panggung kidul	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Panggung Lor	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
	Kelurahan Purwosari	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Kuningan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Bandarharjo	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Tanjungmas	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	35.000.000	15.000.000	OM
	Kelurahan Dadapsari	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	30.000.000	20.000.000	OM
3		BELANJA PERJALANAN DINAS		3.627.018.000	58.350.000	3.555.273.000	60.669.000
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.524.000	1.500.000	41.024.000	Umum dan Kepegawaian
		7.01.02.2.01.0002 peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.300.000	2.250.000	13.050.000	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB
		7.01.02.2.01.0002 peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	8.250.000	5.250.000	pembinaan dan evaluasi kelurahan
			5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	-	Piket Lebaran dan Nataru

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
			5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	-	Monev SKM Pelayanan
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000	4.125.000	4.125.000	Adipura
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	5.625.000	1.875.000	Dugder (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta)
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	-	bregada (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta)
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000	375.000	1.500.000	mtq Juni (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta)
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000	1.500.000	1.650.000	Gladi Upacara HUT RI(menghadirkan pelatih dan paskib dari luar, resiko konflik kalau tidak dianggarkan)
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.375.000	1.500.000	1.875.000	Honor Petugas Hut RI (menghadirkan pelatih dan paskib dari luar, resiko konflik kalau tidak dianggarkan)
	Kelurahan Panggung kidul	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	141.450.000	4.875.000	136.575.000	Kegiatan Bidang Kesehatan dan Kependudukan Tema "Menanamkan Pola Hidup Sehat pada Masyarakat" (hasil musren resiko konflik)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.750.000	7.500.000	5.250.000	Pelatihan pembuatan menu stunting bagi warga kurang mampu (hasil musren resiko konflik)
	Kelurahan Purwosari	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	216.375.000	-	216.375.000	dedicated (resiko konflik)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.500.000	6.750.000	9.750.000	dedicated (resiko konflik)

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
	Kelurahan Bandarharjo	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.625.000	-	11.625.000	dedicated (resiko konflik)
		7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	429.250.000	2.100.000	427.150.000	dedicated, ada hilang 1 RT
4		BELANJA ALAT TULIS KANTOR		-	10.250.000	-	67.665.528
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.01.2.01.0001 - Penyus unan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	222.800	-	222.800	tag stunting dan renstra (masih cetak, spj kepegawaian dll masih bentuk cetak
		7.01.01.2.0.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.009.590	1.715.360	18.232.230	Pelayanan setahun (masih cetak, spj kepegawaian dll masih bentuk cetak)
		7.01.02.2.01.0002 peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.952.000	4.976.000	4.976.000	Optimalisasi pemungutan PBB pembukaan loket sabtu dan minggu (masih cetak, spj kepegawaian dll masih bentuk cetak)
	Kelurahan Panggung kidul	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.159.200	1.190.400	5.895.300	pelayanan (masih cetak, spj kepegawaian dll masih bentuk cetak)
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.680	-	290.680	dedicated (resiko konflik)
		7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.044.400	-	2.044.400	dedicated lembaga (resiko konflikdengan masyarakat ?
	Kelurahan Bandarharjo	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.368.240	2.368.240	7.363.500	pelayanan (masih cetak, spj kepegawaian dll masih bentuk cetak)
5		BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN			-		
6		BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		61.926.834	3.614.134	52.748.700	4.749.540

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.01.2.01.0001 - Penyus unan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.664.800	-	1.664.800	Penyusunan Renstra
		7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	178.000	178.000	-	
		7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	208.000	208.000	-	
		7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	172.400	172.400	-	
		7.01.01.2.02.0007 - Koordi nas i dan Penyus unan Laporan Keuangan Bul anan/ Tri wul anan/ Semes teran	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.348.800	926.700	422.100	Triwulanan
		7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	112.400	112.400	-	
		7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.824.000		3.824.000	cetak map
		7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	670.400	-	670.400	Tag stunting
		7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	244.800	244.800	-	
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.684.900	1.045.800	639.100	MMT dugder, Bazar
		7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.350.530	-	2.350.530	dedicated lembaga
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	75.000	75.000	-	

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosi alisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.513.120	639.714	519.406	Bimtek Wasbang 1x
	Kelurahan Panggung kidul	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	133.420	-	91.420	Pelayanan
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	94.220	-	85.820	dedicated
		7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.360	11.320	2.040	lembaga
7		BELANJA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN SEREMONIAL		146.123.070	6.000.000	134.948.070	59.164.965
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.1.02.02.01.0028 (Honor Tenaga Sound Upacara HUT RI)	600.000	-	600.000	Hut RI (menghadirkan pelatih dan paskib dari luar, resiko konflik kalau tidak dianggarkan)
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	3.000.000	750.000	manmin dugder
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	3.000.000	200.000	atraksi budaya dugder
8		BELANJA JASA KONSULTAN		-		-	
9		HONORARIUM TIM DAN SEKRETARIAT PELAKSANAAN KEGIATAN		-		-	

No		Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)	Keterangan
10		HONORARIUM NARASUMBER		-	9.750.000	-	238.220.000
	Kecamatan Semarang Utara	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.200.000		19.200.000	Penyusunan Renstra
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	900.000	450.000	450.000	Fasilitasi kegiatan lomba tk kec dan tk kota (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta lomba tingkat kota)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000	2.500.000	2.000.000	Fasilitasi kegiatan lomba tk kec dan tk kota (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta lomba tingkat kota)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000	4.500.000	9.000.000	Lomba MTQ (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta lomba tingkat kota)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000	2.000.000	-	Bergada (kalau tidak ada kami tidak bisa mengirim peserta)
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000	300.000	-	Pebinaan MTQ
TOTAL HOLD					798.016.728		798.016.728

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.475.606.155	7.273.551.061	41,62
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.348.400	621.500	1,26
3	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.982.600	0	0
4	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	111.400	0	0
5	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	210.900	0	0
6	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	289.400	287.900	99,48
7	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	418.900	0	0
8	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	223.800	223.600	99,91
9	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.400	110.000	98,74
10	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.439.720.940	6.826.424.500	44,21
11	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.823.738.640	6.581.676.000	44,40
12	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.112.000	243.660.000	39,68
13	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
14	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.758.900	1.088.500	61,89
15	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	111.400	0	0
16	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.356.811	274.996.600	18,33
17	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	1.900.000	23,75
18	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.280.806.701	231.612.400	18,08
19	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.814.410	10.087.500	35,01
20	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.824.000	3.746.700	97,98
21	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.000.000	19.100.000	30,81
22	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.156.500	8.550.000	8,80

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
23	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.755.200	0	0
24	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.000.000	61.977.661	33,32
25	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000	61.977.661	33,32
26	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.180.004	109.530.800	36,49
27	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.884.000	43.988.800	32,86
28	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.363.600	38.080.000	39,93
29	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.108.990	22.079.000	34,99
30	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.823.414	5.383.000	68,81
31	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.565.026.480	1.780.161.548	49,93
32	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	571.024.000	429.300.000	75,18
33	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.500.000	0	0
34	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	569.524.000	429.300.000	75,38
35	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.994.002..480	1.350.861.548	45,12
36	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.375.561.120	1.087.759.510	45,79
37	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	64.000.000	29.861.129	46,66
38	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	69.000.000	29.559.575	42,84
39	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	64.000.000	26.692.715	41,71
40	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	71.000.000	28.130.990	39,62
41	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	76.000.000	30.527.031	40,17
42	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	59.809.600	24.620.218	41,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)			
43	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	70.631.760	29.264.845	41,43
44	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	78.000.000	34.179.565	43,82
45	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	66.000.000	30.265.970	45,86
46	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.332.562.230	7.446.294.084	26,28
47	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.946.498.550	901.973.390	5,66
48	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.345.010	58.147.000	99,66
49	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.125.000.000	33.468.720	2,97
50	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	1.152.000.000	34.511.500	3,00
51	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	1.349.000.000	39.734.000	2,95
52	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	1.000.000.000	29.034.000	2,90
53	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.421.000.000	0	0,00
54	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	915.000.000	26.309.220	2,88
55	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	1.269.000.000	36.746.550	2,90
56	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	2.628.000.000	76.423.500	2,91
57	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	2.804.000.000	83.122.000	2,96
58	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.122.000.000	27.844.350	2,48
59	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.403.540	51.265.500	19,10
60	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	75.200.000	43.146.000	57,38
61	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	96.200.000	45.611.500	47,41
62	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	68.450.000	32.302.000	47,19
63	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	92.000.000	38.680.750	42,04

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
64	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	108.800.000	62.745.400	57,67
65	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	76.100.000	30.603.400	40,21
66	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	108.800.000	32.369.000	29,75
67	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	117.200.000	58.146.500	49,61
68	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	92.000.000	61.762.500	67,13
69	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.386.063.680	6.544.320.694	52,84
70	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	34.464.700	27,14
71	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	882.500.000	460.110.000	52,14
72	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BULU LOR)	1.376.000.000	726.025.000	52,76
73	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PURWOSARI)	868.400.000	442.474.500	50,95
74	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.502.900.000	794.752.000	52,88
75	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	2.052.800.000	1.110.275.500	54,09
76	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	567.413.680	313.491.494	55,25
77	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.726.400.000	916.695.000	53,10
78	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	2.165.600.000	1.150.600.000	53,13
79	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.094.000.000	589.807.500	53,91
80	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	1.125.000	14,52
81	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.300.000	4.500.000	29,41
82	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	122.168.600	26.300.000	21,53
83	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	122.168.600	26.300.000	21,53
84	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122.168.600	26.300.000	21,53
85	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	155.860.286	39.504.000	25,35

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
86	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	155.860.286	39.504.000	25,35
87	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	155.860.286	39.504.000	25,35
	JUMLAH		49.651.223.751	16.565.810.693	33,36

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan 49.651.223.75 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 16.565.810.693. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 33.085.413.058.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Meningkatkan Kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%	93%	94%	95%	93%	97%	86,96 %	97.58 %	96,50 %	96.78 %	97,08 %	97%	93%
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	67.76 Angka	68 Angka	69 Angka	70 Angka	76 Angka	72 Angka	67,76 Angka	71.11 Angka	71.11 Angka	74,85 Angka	76,10 Angka	72 Angka	76 Angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48%	100%	100%
3. Meningkatkan wawasan kebangsaan,ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80%	60%	75%	80%	88,40 %	100%	80%	89%	89%	86,72 %	50%	95%	88,40%
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	5 Angka	10 Angka	15 Angka	20 Angka	25 Angka	30 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	30 Angka	25 Angka
5. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	86,54 %	90%	90%	100%	20,83 %	100%	98%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;
b. Sasaran terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah realisasi nilai AKIP sebesar 77 melampaui dari target sebesar 71;
c. Sasaran meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan sebesar 48% belum mencapai target 100% dikarenakan kegiatan belum terlaksana semua;
d. Sasaran meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan realisasinya sebesar 50% belum mencapai target 90%;
e. Sasaran meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan belum terealisasi dari target 25 Inovasi;
f. Sasaran meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan belum terealisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan dari target sebesar 98%

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan hokum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpresmaupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan;
2. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi) Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
3. Stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan paling serius di Kecamatan Semarang Utara. Dalam upaya penurunan angka stunting memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku wilayah. Pelayanan publik memegang peran penting dalam upaya untuk menurunkan angka stunting. Berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan, mapun koordinasi berbagai sektor menjadi upaya dalam menangani isu stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya:

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut;

2. Keterbatasan Anggaran
   Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan–kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing– masing Seksi.SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan.Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat–surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
   2) Perkembangan Kota Semarang beserta permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam;
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;

b. Peluang
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas;
   2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan;
   3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
   4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

1. Evaluasi program pelayanan akhir
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama

bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	17.532.543.619		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	17.473.739.041	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100			KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100		
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100			KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100		
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45			KECAMATAN SEMARANG UTARA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	52.281.800		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	49.348.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	50.357.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	47.982.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	289.400		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	111.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	418.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	210.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	289.400		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	289.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	418.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	418.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	223.800		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	223.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	283.800		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	111.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			Persentase administrasi Keuangan SKPD	100	15.440.760.040			Persentase administrasi Keuangan SKPD	100	15.560.525.050	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	14.823.738.640		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	14.203.609.150	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	614.112.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.355.045.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	2.685.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12	1.758.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					an/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	223.800		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	111.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	1.523.385.971		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	1.363.699.656	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	1.280.806.701		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	1.119.308.346	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	30.529.770			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	32.445.610	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.824.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	6.648.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	62.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	73.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	117.225.500		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	116.447.700	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	21.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	7.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	186.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	186.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	186.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	186.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	330.115.808		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	133.884.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	163.819.804		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	95.363.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Peralatan dan Mesin	14	95.363.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lainnya yang Dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	63.108.990		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	68.108.990	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7.823.414		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	16.809.345	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	3.602.561.120		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	2.764.917.050	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	65	586.500.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	65	625.403.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1.500.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	585.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	623.903.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	3.016.061.120		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	2.139.514.050	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	2.394.061.120		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	1.463.621.050	
		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	64.000.000		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	64.000.000	
		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	69.000.000		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	69.000.000	
		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12	64.000.000		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12	64.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	71.000.000		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	71.000.000	
		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000	
		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	61.000.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	59.809.600	
		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	73.000.000		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	70.631.760	
		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12	78.000.000		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12	135.451.640	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	66.000.000		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	66.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	29.896.719.350		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	50.109.539.060	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321	16.303.669.350			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321	15.860.765.380	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	58.345.010		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	58.345.010	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	1.125.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	1.125.000.000	
		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	1.187.000.000		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	1.152.000.000	
		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	1.384.000.000		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	1.349.000.000	
		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.035.000.000		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	875.000.000	
		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.456.000.000		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.421.000.000	
		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	950.000.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	915.000.000	
		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	1.304.000.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	1.269.000.000	
		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	2.663.000.000		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	2.628.000.000	
		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	2.839.000.000		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	2.794.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.152.000.000		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.122.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	301.324.340		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	304.446.480	
		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	75.200.000		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	75.200.000	
		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	96.200.000		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	96.200.000	
		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	75.200.000		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	68.450.000	
		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	92.000.000		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	92.000.000	
		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5	108.800.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5	108.800.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	83.600.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	89.323.890	
		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	108.800.000		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	108.800.000	
		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	117.200.000		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	117.200.000	
		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	92.000.000		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	92.000.000	
	Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	13.593.050.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	34.248.773.680	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	127.000.000	
		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	965.000.000		KELURAHAN PLOMBOKAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	2.389.150.000	
		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	1.511.000.000		KELURAHAN BULU LOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	3.812.700.000	
		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	949.400.000		KELURAHAN PURWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	2.286.160.000	
		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	1.651.400.000		KELURAHAN KUNINGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	4.206.270.000	
		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	2.259.800.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5.847.540.000	
		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	621.800.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	1.465.003.680	
		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	1.901.000.000		KELURAHAN BANDARHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	4.852.820.000	
		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	2.384.600.000		KELURAHAN TANJUNGMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	6.154.580.000	
		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5	1.199.000.000		KELURAHAN DADAPSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5	2.959.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang Diselenggarakan					yang Diselenggarakan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitas	1	7.750.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitas	1	7.750.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	15.300.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	140.300.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	125.243.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	122.168.600	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan dan ketertiban umum yang ditangani	30	125.243.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan dan ketertiban umum yang ditangani	30	122.168.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	125.243.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	122.168.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	156.500.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	100.203.446	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10	156.500.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10	100.203.446	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480	156.500.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480	100.203.446	

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar

dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan

dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
5. Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	96.00
SASARAN: Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	90.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90.00

Sumber : Kecamatan Semarang Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.532.543.619	17.532.543.619	17.473.739.041	APBD KOTA SEMARANG	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen				APBD KOTA SEMARANG	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen				APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	52.281.800	52.281.800	49.348.400	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.357.600	50.357.600	47.982.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	289.400	289.400	111.400	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	418.900	418.900	210.900	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	289.400	289.400	289.400	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	418.900	418.900	418.900	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	283.800	283.800	111.400	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15.440.760.040	15.440.760.040	15.560.525.050	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	97 Orang/bu lan	14.823.738.640	14.823.738.640	14.203.609.150	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	614.112.000	614.112.000	1.355.045.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	-	-	0	0	0	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	1.758.900	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	111.400	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.523.385.971	1.523.385.971	1.363.699.656	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	1.280.806.701	1.280.806.701	1.119.308.346	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	30.529.770	30.529.770	32.445.610	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.824.000	3.824.000	6.648.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	62.000.000	62.000.000	73.250.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	117.225.500	117.225.500	116.447.700	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	21.000.000	7.600.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	186.000.000	186.000.000	186.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.000.000	186.000.000	186.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	330.115.808	330.115.808	314.165.935	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	163.819.804	163.819.804	133.884.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	95.363.600	95.363.600	95.363.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	63.108.990	63.108.990	68.108.990	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.823.414	7.823.414	16.809.345	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	94 Persen	3.602.561.120	3.602.561.120	2.764.917.050	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	65 Angka	65 Angka	65 Angka	586.500.000	586.500.000	625.403.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	585.000.000	585.000.000	623.903.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.016.061.120	3.016.061.120	2.139.514.050	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.394.061.120	2.394.061.120	1.463.621.050	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	69.000.000	69.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	71.000.000	71.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	61.000.000	61.000.000	59.809.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	73.000.000	70.631.760	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	78.000.000	135.451.640	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.000.000	66.000.000	66.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	29.896.719.350	29.896.719.350	50.109.539.060	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	16.303.669.350	16.303.669.350	15.860.765.380	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	58.345.010	58.345.010	58.345.010	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kec Semarang Utara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.187.000.000	1.187.000.000	1.152.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.384.000.000	1.384.000.000	1.349.000.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.035.000.000	1.035.000.000	875.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.456.000.000	1.456.000.000	1.421.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	6 Unit	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	915.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.304.000.000	1.304.000.000	1.269.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	21 Unit	21 Unit	21 Unit	2.663.000.000	2.663.000.000	2.628.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	28 Unit	28 Unit	28 Unit	2.839.000.000	2.839.000.000	2.794.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.152.000.000	1.152.000.000	1.122.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	301.324.340	301.324.340	304.446.480	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	75.200.000	75.200.000	75.200.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	96.200.000	96.200.000	96.200.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	75.200.000	75.200.000	68.450.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	92.000.000	92.000.000	92.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	108.800.000	108.800.000	108.800.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	83.600.000	83.600.000	89.323.890	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	108.800.000	108.800.000	108.800.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	117.200.000	117.200.000	117.200.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	92.000.000	92.000.000	92.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	13.593.050.000	13.593.050.000	34.248.773.680	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	965.000.000	965.000.000	2.389.150.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BULU LOR)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	1.511.000.000	1.511.000.000	3.812.700.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PURWOSARI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	949.400.000	949.400.000	2.286.160.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KUNINGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	1.651.400.000	1.651.400.000	4.206.270.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	2.259.800.000	2.259.800.000	5.847.540.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	621.800.000	621.800.000	1.465.003.680	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	1.901.000.000	1.901.000.000	4.852.820.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	2.384.600.000	2.384.600.000	6.154.580.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN DADAPSARI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	5 Lembaga Kemasayrakatan	1.199.000.000	1.199.000.000	2.959.500.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasn	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	7.750.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.300.000	15.300.000	140.300.000	APBD KOTA SEMARANG	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	125.243.600	125.243.600	122.168.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan dan ketertiban umum yang ditangani	30 Angka	30 Angka	30 Angka	125.243.600	125.243.600	122.168.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.243.600	125.243.600	122.168.600	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	98 Persen	156.500.000	156.500.000	100.203.446	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10 Angka	10 Angka	10 Angka	156.500.000	156.500.000	100.203.446	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	480 Orang	480 Orang	156.500.000	156.500.000	100.203.446	APBD KOTA SEMARANG	
JUMLAH						51.313.567.689	51.313.567.689	70.570.567.197,04		

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

38. KECAMATAN SEMARANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD". Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

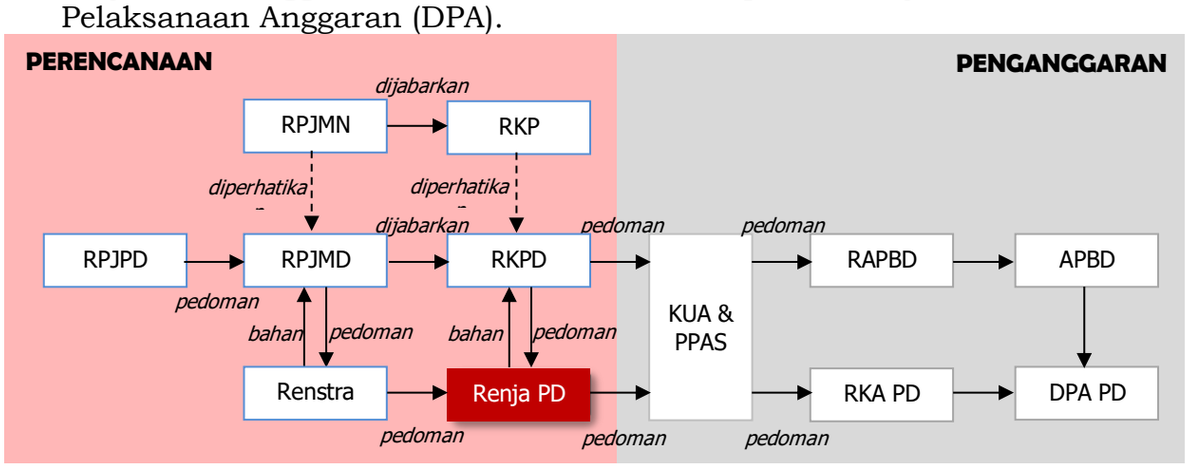

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34);
t. Keputusan Camat Semarang Barat Nomor 050/28/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 Persen	46.00 Persen	94.00 Persen	47.00 Persen	50%	47.00 Persen	50%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	8.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	50%	1.00 angka	13%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	50%	2.00 Kegiatan	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Ngemplak Simongan	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Manyaran	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan	100.00	50.00	100.00	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemeliharaan Kantor Keluraha Tambakharjo	Persen	Persen	Persen				
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Kalibanteng Kulon	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Krapyak	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Kalibanteng Kidul	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Bongsari	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamanmloyo	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangsari	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikdrono	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	51%	50.00 Persen	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 kegiatan	50.00 kegiatan	100.00 kegiatan	50.00 kegiatan	50%	50.00 kegiatan	50%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00 Angka	25.00 Angka	50.00 Angka	25.00 Angka	50%	25.00 Angka	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50.00 Kegiatan	25.00 Angka	50.00 Kegiatan	25.00 Angka	50%	25.00 Angka	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngemplak Simongan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	67%	8.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	17.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	17.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	59%	10.00 Kegiatan	59%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono	25.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	52%	13.00 Kegiatan	52%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	14.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	14.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	50%	7.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangsari	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	67%	8.00 Kegiatan	67%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	3.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	67%	2.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	50%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	50%	2.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangsari	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 dokumen	9.00 dokumen	17.00 dokumen	9.00 dokumen	53%	9.00 dokumen	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00 Dokumen	9.00 Dokumen	17.00 Dokumen	9.00 Dokumen	53%	9.00 Dokumen	53%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	50%	8.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 Kelurahan	0.00 Kelurahan	0.00 Kelurahan	0.00 Kelurahan	0%	0.00 Kelurahan	0%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00 Persen	10.00 Persen	25.00 Persen	10.00 Persen	50%	10.00 Persen	33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan	15.00 angka	8.00 angka	15.00 angka	8.00 angka	53%	8.00 angka	53%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ketertiban Umum yang ditangani							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00 Persen	47.00 Persen	98.00 Persen	47.00 Persen	49%	47.00 Persen	47%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	2.00 angka	5.00 angka	2.00 angka	40%	2.00 angka	40%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 dokumen	0.00 Dokumen	5.00 dokumen	1.00 dokumen	20%	1.00 dokumen	20%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1.00	1.00	1.00	1.00 Dokumen	100%	1.00	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Dokumen pelaporan	2.00 dokumen	0.00 Dokumen	2.00 dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	50.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50%	50.00 persen	50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	2.00 dokumen	4.00 dokumen	2.00 dokumen	50%	2.00 dokumen	50%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akir tahun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	0.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	5.00 persen	100.00 persen	5.00 persen	5%	5.00 persen	5%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	6.00 bulan	12.00 bulan	6.00 bulan	50%	6.00 bulan	50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00 Jenis	10.00 Jenis	22.00 Jenis	10.00 Jenis	50%	10.00 Jenis	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	2.00 Jenis	5.00 Jenis	2.00 Jenis	40%	2.00 Jenis	40%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	2.00 Jenis	5.00 Jenis	2.00 Jenis	40%	2.00 Jenis	40%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6.00 Jenis	2.00 Jenis	6.00 Jenis	2.00 Jenis	33%	2.00 Jenis	33%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	50.00 orang	100.00 orang	50.00 orang	50%	50.00 orang	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00 kegiatan	5.00 kegiatan	10.00 kegiatan	5.00 kegiatan	50%	5.00 kegiatan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	5.00 bulan	12.00 bulan	5.00 bulan	42%	5.00 bulan	42%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00 jenis	2.00 jenis	5.00 jenis	2.00 jenis	40%	2.00 jenis	40%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	58.00 unit	29.00 unit	58.00 unit	29.00 unit	50%	29.00 unit	50%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	2.00 gedung	1.00 gedung	2.00 gedung	1.00 gedung	50%	1.00 gedung	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00 jenis	2.00 jenis	5.00 jenis	2.00 jenis	40%	2.00 jenis	40%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00 jenis	1.00 jenis	3.00 jenis	1.00 jenis	33%	1.00 jenis	33%

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
07.01	URUSAN KEWILAYAHAN			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.995.476.298	10.262.355.997	41,06%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.218.200	0	0,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.106.600	0	0,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.744.300	0	0,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.563.800	0	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.121.900	0	0,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.821.400	0	0,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.658.200	0	0,00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.202.000	0	0,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.237.787.560	9.530.837.924	42,86%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.392.106.360	9.224.037.924	43,12%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	840.590.600	306.800.000	36,50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.273.400	0	0,00%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.544.800	0	0,00%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.272.400	0	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.734.665	52.670.210	7,76%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.513.672	1.362.510	4,47%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.022.902	12.098.500	36,64%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.186.149	9.295.700	18,90%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.070.370	13.507.800	89,63%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.888.010	15.155.700	12,86%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.647.025	1.250.000	2,29%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	378.406.537	0	0,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	946.284.911	324.097.800	34,25%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	513.880.261	324.097.800	63,07%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	432.404.650	0	0,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.642.722	86.651.788	30,34%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.804.000	84.651.788	34,30%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.838.722	2.000.000	5,15%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.808.240	268.098.275	35,01%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.746.950	160.412.275	30,57%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.164.250	96.644.000	78,47%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.401.640	0	0,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.495.400	11.042.000	25,98%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.348.953.786	2.078.082.878	62,05%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.514.899.290	1.184.980.830	74,33%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	30.006.500	0	0,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.484.892.790	1.184.980.830	47,69%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.544.570.373	508.397.048	32,92%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	316.495.150	27.121.140	8,57%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	74.614.628	29.927.436	40,11%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MANYARAN)	76.634.223	27.121.140	35,39%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KRAPYAK)	73.888.571	28.887.800	39,10%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	77.782.894	27.200.833	34,97%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	75.663.372	21.841.924	28,87%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	74.383.580	48.416.738	65,09%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GISIKDRONO)	77.541.941	31.660.903	40,83%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BONGSARI)	75.394.399	28.010.624	37,15%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	80.646.944	24.711.913	30,64%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	77.300.558	33.491.136	43,33%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN CABEAN)	75.470.612	25.897.216	34,31%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGAYU)	79.310.276	31.060.917	39,16%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KROBOKAN)	77.023.382	39.056.126	50,71%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGSARI)	77.179.067	26.412.154	34,22%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGMAS)	75.580.664	21.370.914	28,28%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	79.660.112	36.208.134	45,45%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	517.559.346	384.705.000	74,33%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	517.559.346	384.705.000	74,33%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.862.136.973	9.432.950.119	26,30%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.854.239.644	953.559.679	5,06%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	92.399.610	67.063.500	72,58%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	86.870.059	8,27%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	994.000.000	24.370.050	2,45%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	1.029.000.000	24.370.050	2,37%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	950.000.000	20.853.570	2,20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	950.000.000	23.197.890	2,44%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	950.000.000	20.853.570	2,20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	950.000.000	20.853.570	2,20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	1.191.000.000	24.370.050	2,05%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	950.000.000	23.197.890	2,44%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	950.000.000	20.853.570	2,20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	950.000.000	24.370.050	2,57%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	950.000.000	20.853.570	2,20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	999.000.000	23.197.890	2,32%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	1.170.000.000	24.370.050	2,08%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	950.000.000	24.370.050	2,57%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	1.160.000.000	24.370.050	2,10%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	1.171.000.000	24.370.050	2,08%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	373.364.480	24.794.000	6,64%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	76.202.430	24.794.000	32,54%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	74.345.978	24.728.000	33,26%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	71.173.838	38.858.250	54,60%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	49.250.000	11.098.000	22,53%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	57.450.000	17.105.000	29,77%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	55.817.048	29.102.000	52,14%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	92.185.728	36.787.000	39,91%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	72.627.200	30.315.000	41,74%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	69.430.508	31.217.450	44,96%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	62.600.000	40.471.500	64,65%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	45.101.184	11.300.000	25,05%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	65.443.160	32.728.000	50,01%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	95.750.000	31.800.000	33,21%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	37.700.000	9.830.000	26,07%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	56.198.480	13.077.000	23,27%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	93.200.000	22.799.000	24,46%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.897.329	8.479.390.440	49,86%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	146.564.650	15.225.000	10,39%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	1.114.847.340	491.440.000	44,08%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN MANYARAN)	1.662.976.100	890.776.500	53,57%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KRAPYAK)	904.287.700	459.852.600	50,85%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	535.886.760	251.002.000	46,84%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	862.801.724	430.785.000	49,93%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	683.621.960	291.729.000	42,67%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN GISIKDRONO)	1.766.458.899	949.868.000	53,77%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BONGSARI)	1.097.712.844	580.352.340	52,87%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	1.043.751.608	536.800.000	51,43%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	647.910.744	333.400.000	51,46%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN CABEAN)	493.945.448	237.675.000	48,12%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KARANGAYU)	804.157.752	411.465.500	51,17%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KROBOKAN)	1.565.186.892	686.025.000	43,83%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAWANGSARI)	916.724.000	464.385.000	50,66%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAWANGMAS)	946.084.558	478.475.000	50,57%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	1.775.152.650	939.150.000	52,91%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39.825.700	30.984.500	77,80%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.664.300	15.970.000	81,21%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.664.300	15.970.000	81,21%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.664.300	15.970.000	81,21%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.174.300	27.500.000	36,10%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.174.300	27.500.000	36,10%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	76.174.300	27.500.000	36,10%
JUMLAH		64.302.405.657	21.816.858.994	33,93%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 12 kegiatan dan 102 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebesar Rp 64.302.405.657 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 21.816.858.994 atau 33,93%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 42.485.546.663 atau 66,07%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	-	87,00	88,00	94,23	94,96	-	90,00
Sasaran :														
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,87	75,70	79,24	83,20	87,36	91,72	-	75,70	79,24	75,75	77,85	-	87,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17,00	20,00	38,00	40,00	45,00	50,00	-	17,00	20,00	38,00	24,00	-	40,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 94,96% dari target sebesar 92,00%;
   Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:
b. Sasaran Kecamatan Semarang Barat adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, telah

mencapai target dimana realisasi sebesar 75,75 dari target sebesar 77,85;

2) Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00;

3) Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 50% dari taget sebesar 100%;

4)Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

a. “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 45,00% dari target sebesar 24,00%;

b.“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 45,00% dari target sebesar 100,00%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantumdalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan
   berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Masih adanya balap liar di wilayah Kecamatan Semarang Barat, upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Melakukan patroli gabungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan bersama Polsek Semarang Barat, Koramil Semarang Barat dan Satpol PP;
2. Belum Optimalnya permasalahan banjir di titik tertentu di wilayah Kecamatan Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan membentuk paguyuban untuk mengelola permasalahan banjir dengan perawatan dan operasional pompa air;
3. Belum adanya kesesuaian jabatan pada perjanjian kinerja Non ASN dengan uraian tugas yang dikerjakan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dan Bagian Organisasi Setda Kota Semarang terkait perumusan uraian tugas sesuai dengan jabatan yang diampu;
4. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih adanya warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama di pinggir jalan dan sungai atau saluran untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan inovasi dalam kegiatan SEMAR ASIK (Semarang Barat Ahad Resik) program kegiatan Kecamatan Semarang Barat berupa stimulus kerja bakti bersama masyarakat yang di kolaborasikan dengan berbagai pihak;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam peraturan perundang-undangan tentang Pedagang Kaki Lima untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penertiban berkolaborasi bersama Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan bersama Polsek Semarang Barat, Koramil Semarang Barat dan Satpol PP;
6. Kurangnya koordinasi dan kesadaran serta pemahaman pegawai terhadap administrasi kepegawaian terkait pembaharuan data kepegawaian untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap pegawai di lingkungan Kecamatan Semarang Barat;
7. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis keuangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka

babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran;

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas;

2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan;

3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan;

4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai berikut:

1. Krisis Pangan tahun 2025
   Menurut *Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture In Asia* yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB Bogor, kita akan mengalami krisis pangan pada 2025 dan hal ini perlu menjadi perhatian serius, oleh karenanya Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu memberikan rasa tenang dalam Masyarakat bahwa krisis pangan pada tahun 2025 yang akan terjadi bisa teratasi dengan program-program yang berhubungan dengan diversifikasi pangan dan pemanfaatan lahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menjadi lumbung pangan Masyarakat;
2. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang di tahun 2025, hanya terdapat satu jenis program pemberdayaan Masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dalam implementasi di dalamsatu kegiatan sudah mencakup lingkup pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan ekonomi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT						65.500.474.380	KECAMATAN SEMARANG BARAT						94.139.358.637	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.995.476.298	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.812.683.637	
7.01.01.2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					81.218.200	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					67.823.200	
7.01.01.2.01.01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	56.106.600		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	42.711.600	percepatan penurunan stunting

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	4.744.300		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	4.744.300	
7.01.01.2.01.03		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.563.800		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.563.800	
7.01.01.2.01.04		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	4.121.900		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	4.121.900	
7.01.01.2.01.05		5	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.821.400		5	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.821.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.06		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	3.658.200		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	3.658.200	percepatan penuruan stunting
7.01.01.2.01.07		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	2.202.000		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2.202.000	
7.01.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.237.787.560	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.956.980.901	
7.01.		1	Penyediaan	Keca	Jumlah	10	21.3		1	Penyediaan	Keca	Jumlah	74	20.3	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01.2.02.01			Gaji dan Tunjangan ASN	matan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0%	92.106.360			Gaji dan Tunjangan ASN	matan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	78.870.251	
7.01.01.2.02.02		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	840.590.600		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.573.020.050	
7.01.01.2.02.05		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1.273.400		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.273.400	
7.01.01.2.02.07		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna	2 Dok	2.544.800		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna	1	2.544.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					n Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							n Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
7.01.01.2.02.08		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.272.400		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.272.400	
7.01.01.2.06	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					678.734.665	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					412.094.545	
7.01.01.2.06.01		1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	30.513.672		1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	30.513.672	
7.01.01.2.06.02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	33.022.902		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	16.208.902	
7.01.01.2.06.04		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik	5 Jenis	49.186.149		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik	12	51.111.373	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					Kantor yang Disediakan							Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.05		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	6 Jenis	15.070.370		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	6	21.462.803	
7.01.01.2.06.08		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Orang	117.888.010		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	117.888.010	
7.01.01.2.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kegiatan	54.647.025		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	79.527.025	percepatan penurunan stunting
7.01.01.2.06.11		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	378.406.537		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	95.382.760	
7.01.01.2.07	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					946.284.911	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.307.467.318	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.07.06		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	513.880.261		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	661.003.318	
7.01.01.2.07.11		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	432.404.650		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	646.464.000	
7.01.01.2.08	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.642.722	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.229.082	0
7.01.01.2.08.02		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	246.804.000		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	246.804.000	
7.01.01.2.08.03		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	38.838.722		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	56.425.082	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.808.240	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.088.590	0
7.01.01.2.09.02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	524.746.950		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	524.746.950	
7.01.01.2.09.09		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Gedung	123.164.250		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Gedung	122.444.600	
7.01.01.2.09.10		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Jenis	75.401.640		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Jenis	75.401.640	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.11		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Jenis	42.495.400		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Jenis	42.495.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.547.022.509	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.828.454.309	
7.01.02.2.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.484.892.790	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.514.312.300	
7.01.02.2.01.02		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	2.484.892.790		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	1.484.305.800	
7.01.02.2.01.0									1	Koordinasi /Sinergi Perencanaa	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi	2 Laporan	30.006.500	percepatan

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1										n dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			penurunan stunting
7.01.02.2.02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1.544.570.373	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						1.443.982.663	
7.01.02.2.02.03		1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	316.495.150		1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	215.207.440	
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	74.614.628		2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	74.614.628	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah					Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.03		3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	76.634.223		3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	76.634.223	
7.01.02.2.02.03		4	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	73.888.571		4	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	73.888.571	
7.01.02.2.02.03		5	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.782.894		5	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.782.894	
7.01.02.2.		6	Peningkatan	Kalibante	Jumlah Laporan	12 lap	75.663.3		6	Peningkatan	Kalibante	Jumlah Laporan	12 lapor	75.663.3	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
02.03			Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	ng Kulon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	oran	72			Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	ng Kulon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	an	72	
7.01.02.2.02.03		7	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	74.383.580		7	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	74.383.580	
7.01.02.2.02.03		8	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.541.941		8	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.541.941	
7.01.02.2.02.03		9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 laporan	75.394.399		9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 laporan	75.394.399	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah					Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.03		10	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	80.646.944		10	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	73.996.944	
7.01.02.2.02.03		11	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.300.558		11	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	84.300.558	
7.01.02.2.02.03		12	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	75.470.612		12	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	75.470.612	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03		13	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	79.310.276		13	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	79.310.276	
7.01.02.2.02.03		14	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.023.382		14	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.023.382	
7.01.02.2.02.03		15	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.179.067		15	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	77.179.067	
7.01.02.2.02.03		16	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	75.580.664		16	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	75.580.664	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah					Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.03		17	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembang arum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	79.660.112		17	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembang arum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	80.010.112	
7.01.02.2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					517.559.346	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					870.159.346	
7.01.02.2.04.03		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	517.559.346		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	870.159.346	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY						35.862.136.973	PROGRAM PEMBERDAY						65.399.297.091	0

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.854.239.644	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.894.971.262	
7.01.03.2.02.01		1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	92.399.610		1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	69.293.920	
7.01.03.2.02.02		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50	1.050.000.000		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11	1.050.000.000	
7.01.03.2.02.02		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	994.000.000		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	994.000.000	
7.01.		4	Pembangu	Man	Jumlah	20	1.02		4	Pembangu	Man	Jumlah	11	1.02	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
03.2.02.02			nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	yaran	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9.000.000			nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	yaran	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9.000.000	
7.01.03.2.02.02		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	950.000.000		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	950.000.000		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	950.000.000		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	950.000.000		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25	1.191.000.000		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	1.191.000.000	
7.01.03.2.02.02		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10	950.000.000		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	16	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					Terbangun							Terbangun			
7.01.03.2.02.02		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	950.000.000		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	950.000.000		12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	950.000.000		13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	999.000.000		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	999.000.000	
7.01.03.2.02.02		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	1.170.000.000		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.255.961.328	
7.01.03.2.02.02		16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	950.000.000		16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	
7.01.03.2.02.0		17	Pembangunan Sarana dan	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana	15	1.160.000.00		17	Pembangunan Sarana dan	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana	8	1.160.000.00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2			Prasarana Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun		0			Prasarana Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun		0	
7.01.03.2.02.02		18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kembang arum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.171.000.000		18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kembang arum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	1.171.000.000	
7.01.03.2.02.03		1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	373.364.480		1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	351.940.460	
7.01.03.2.02.03		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	76.202.430		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	76.202.430	
7.01.03.2.02.03		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4	74.345.978		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4	74.345.978	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	71.173.838		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	71.173.838	
7.01.03.2.02.03		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	49.250.000		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	49.250.000	
7.01.03.2.02.03		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	57.450.000		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	57.450.000	
7.01.03.2.02.0		7	Pemberdayaan Masyaraka	Kalibanteng	Jumlah Pokmas dan Ormas	4	55.817.048		7	Pemberdayaan Masyaraka	Kalibanteng	Jumlah Pokmas dan Ormas	4	55.817.048	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3			t di Kelurahan	Kidul	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					t di Kelurahan	Kidul	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	92.185.728		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	92.185.728	
7.01.03.2.02.03		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	72.627.200		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	72.627.200	
7.01.03.2.02.03		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	69.430.508		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	76.080.508	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.03		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	62.600.000		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	55.600.000	
7.01.03.2.02.03		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	45.101.184		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	45.101.184	
7.01.03.2.02.03		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	65.443.160		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	65.443.160	
7.01.03.2.02.03		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4	95.750.000		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4	95.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					Masyarakat di Kelurahan							Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	37.700.000		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	37.700.000	
7.01.03.2.02.03		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	56.198.480		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	56.198.480	
7.01.03.2.02.03		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	93.200.000		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	92.850.000	
7.01.03.2.03	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					16.968.071.6	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					46.330.871.6	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
							29							29	
7.01.03.2.03.01		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	146.564.650		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	146.564.650	penambahan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
7.01.03.2.03.01		2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.114.847.340		2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	3.082.497.340	
7.01.03.2.03.01		3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.662.976.100		3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	4.895.426.100	
7.01.03.2.03.01		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	904.287.700		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.406.537.700	
7.01.03.2.03.01		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselengga	9	535.886.760		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselengga	9	1.311.336.760	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
					rakan							rakan			
7.01.03.2.03.01		6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	862.801.724		6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.340.451.724	
7.01.03.2.03.01		7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	683.621.960		7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.827.471.960	
7.01.03.2.03.01		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.766.458.899		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	4.988.708.899	
7.01.03.2.03.01		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.097.712.844		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	3.035.762.844	
7.01.03.2.03.01		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.043.751.608		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.842.001.608	
7.01.03.2.03.01		11	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	647.910.744		11	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.681.560.744	
7.01.03.2.03.0		12	Penyelenggaraan Lembaga	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyara	9	493.945.448		12	Penyelenggaraan Lembaga	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyara	9	1.266.195.44	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1			Kemasyarakatan		katan yang Diselenggarakan					Kemasyarakatan		katan yang Diselenggarakan		8	
7.01.03.2.03.01		13	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	804.157.752		13	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.163.407.752	
7.01.03.2.03.01		14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.565.186.892		14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	4.373.036.892	
7.01.03.2.03.01		15	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	916.724.000		15	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.427.174.000	
7.01.03.2.03.01		16	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	946.084.558		16	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.515.734.558	
7.01.03.2.03.01		17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.775.152.650		17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	5.027.002.650	
7.01.03.2.03.03									18	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	1 Lembaga Kemasyarakata	8.628.500	percepatan penuruan

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
												Kapasitasnya	n		stunting
7.01.03.2.03.04		18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	39.825.700		19	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	164.825.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						19.664.300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20.949.300	
7.01.04.2.03	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					19.664.300	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					20.949.300	
7.01.04.2.03.01		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	10	19.664.300		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	5 Laporan	20.949.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Wilayah kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							0								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						76.174.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						77.974.300	
7.01.05.2.03	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					76.174.300	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					77.974.300	
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	5	76.174.300		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	50 Orang	77.974.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			JUMLAH				65.500.474.380			JUMLAH				94.139.358.637	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   1. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00
SASARAN 1 Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persentase	100
SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persentase	100
SASARAN 3 Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100
SASARAN 4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	40,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Barat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT		65.334.506.200	64.302.405.657	94.139.358.636.65	65.334.506.200	64.302.405.657	94.139.358.636.65		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.181.500.000	24.995.476	24.520.849.257	21.181.500.000	24.995.476	24.520.849.257		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		77.000.000	81.218.200	67.823.200	77.000.000	81.218.200	67.823.200		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.500.000	56.106.600	42.711.600	35.500.000	56.106.600	42.711.600	APBD	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.000.000	4.744.300	4.744.300	2.000.000	4.744.300	4.744.300	APBD	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	5.563.800	5.563.800	3.000.000	5.563.800	5.563.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.000.000	4.121.900	4.121.900	3.000.000	4.121.900	4.121.900	APBD	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	4.821.400	4.821.400	2.500.000	4.821.400	4.821.400	APBD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.658.200	3.658.200	4.000.000	3.658.200	3.658.200	APBD	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000	2.202.000	2.202.000	27.000.000	2.202.000	2.202.000	APBD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.861.500.000	22.237.787.560	22.347.612.643	18.861.500.000	22.237.787.560	22.347.612.643		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.000.000.000	21.392.106.360	20.378.870.251	18.000.000.000	21.392.106.360	20.378.870.251	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	857.000.000	840.590.600	1.573.020.050	857.000.000	840.590.600	1.573.020.050	APBD	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.273.400	1.273.400	1.500.000	1.273.400	1.273.400	APBD	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	2.544.800	2.544.800	1.500.000	2.544.800	2.544.800	APBD	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.272.400	1.272.400	1.500.000	1.272.400	1.272.400	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		563.000.000	678.734.665	390.631.742	563.000.000	678.734.665	390.631.742		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30.000.000	30.513.672	30.513.672	30.000.000	30.513.672	30.513.672	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000	33.022.902	16.208.902	50.000.000	33.022.902	16.208.902	APBD	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70.000.000	49.186.149	51.111.373	70.000.000	49.186.149	51.111.373	APBD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35.000.000	15.070.370	21.462.803.30	35.000.000	15.070.370	21.462.803.30	APBD	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	117.888.010	117.888.010	100.000.000	117.888.010	117.888.010	APBD	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.000.000	54.647.025	79.527.025	128.000.000	54.647.025	79.527.025	APBD	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	378.406.537	95.382.760	150.000.000	378.406.537	95.382.760	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500.000.000	946.284.911	646.464.000	500.000.000	946.284.911	646.464.000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250.000.000	513.880.261	661.003.318.35	250.000.000	513.880.261	661.003.318.35	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250.000.000	432.404.650	646.464.000	250.000.000	432.404.650	646.464.000	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		336.000.000	285.642.722	303.229.082	336.000.000	285.642.722	303.229.082		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300.000.000	246.804.000	246.804.000	300.000.000	246.804.000	246.804.000	APBD	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36.000.000	38.838.722	56.425.082	36.000.000	38.838.722	56.425.082	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		844.000.000	765.808.240	765.088.590	844.000.000	765.808.240	765.088.590		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	600.000.000	524.746.950	524.746.950	600.000.000	524.746.950	524.746.950	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	140.000.000	123.164.250	122.444.600	140.000.000	123.164.250	122.444.600	APBD	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80.000.000	75.401.640	75.401.640	80.000.000	75.401.640	75.401.640	APBD	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.000.000	42.495.400	42.495.400	24.000.000	42.495.400	42.495.400	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.000.878.000	3.348.953.786	3.828.454.309	5.000.878.000	3.348.953.786	3.828.454.309		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2.930.878.000	2.514.899.290	1.514.312.300	2.930.878.000	2.514.899.290	1.514.312.300		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.900.000.000	2.484.892.790	1.484.305.800	2.900.000.000	2.484.892.790	1.484.305.800	APBD	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.878.000	30.006.500	30.006.500	30.878.000	30.006.500	30.006.500	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1.710.000.000	316.495.150	1.443.982.663	1.710.000.000	316.495.150	1.443.982.663		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	350.000.000	316.495.150	215.207.440	350.000.000	316.495.150	215.207.440	APBD	Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	74.614.628	74.614.628	85.000.000	74.614.628	74.614.628	APBD	Ngemplak Simongan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	76.634.223	76.634.223	85.000.000	76.634.223	76.634.223	APBD	Manyaran
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	73.888.571	73.888.571	85.000.000	73.888.571	73.888.571	APBD	Krapyak
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	77.782.894	77.782.894	85.000.000	77.782.894	77.782.894	APBD	Tambakharjo
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	75.663.372	75.663.372	85.000.000	75.663.372	75.663.372	APBD	Kalibanteng Kulon
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	74.383.580	74.383.580	85.000.000	74.383.580	74.383.580	APBD	Kalibanteng Kidul

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	77.541.941	77.541.941	85.000.000	77.541.941	77.541.941	APBD	Gisikdrono
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	75.394.399	75.394.399	85.000.000	75.394.399	75.394.399	APBD	Bongsari
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	80.646.944	73.996.944	85.000.000	80.646.944	73.996.944	APBD	Bojongsalaman
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	77.300.558	84.300.558	85.000.000	77.300.558	84.300.558	APBD	Salamanmloyo
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	75.470.612	75.470.612	85.000.000	75.470.612	75.470.612	APBD	Cabean

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	79.310.276	79.310.276	85.000.000	79.310.276	79.310.276	APBD	Karangayu
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	77.023.382	77.023.382	85.000.000	77.023.382	77.023.382	APBD	Krobokan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	77.179.067	77.179.067	85.000.000	77.179.067	77.179.067	APBD	Tawangsari
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	75.580.664	75.580.664	85.000.000	75.580.664	75.580.664	APBD	Tawangmas
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	85.000.000	79.660.112	80.010.112	85.000.000	79.660.112	80.010.112	APBD	Kembangarum

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		360.000.000	517.559.346	870.159.346	360.000.000	517.559.346	870.159.346		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.000.000	517.559.346	870.159.346	360.000.000	517.559.346	870.159.346	APBD	Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		39.042.128.200	35.870.765.473	1.443.982.663	39.042.128.200	35.870.765.473	79.310.276		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		18.710.000.000	18.854.239.644	18.894.971.262	18.710.000.000	18.854.239.644	18.894.971.262		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	92.399.610	69.293.920	100.000.000	92.399.610	69.293.920	APBD	Kecamatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	APBD	Kecamatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	994.000000	994.000.000	1.000.000.000	994.000000	994.000.000	APBD	Ngemplak Simongan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	1.029.000000	1.029.000.000	1.000.000.000	1.029.000000	1.029.000.000	APBD	Manyaran
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Krapyak
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Tambakharjo
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Kalibanteng Kulon
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Kalibanteng Kidul
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	1.191.000.000	1.191.000.000	1.000.000.000	1.191.000.000	1.191.000.000	APBD	Gisikdrono
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Bongsari
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Bojongsalaman
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Salamanmloyo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Cabean
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	999.000.000	999.000.000	1.000.000.000	999.000.000	999.000.000	APBD	Karangayu
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	1.170.000.000	1.255.961.328	1.000.000.000	1.170.000.000	1.255.961.328	APBD	Krobokan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	Tawangsari
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.000.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	APBD	Tawangmas
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.000.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	1.000.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	APBD	Kembangarum
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450.000.000	373.364.480	351.940.460	450.000.000	373.364.480	351.940.460	APBD	Kecamatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	76.202.430	76.202.430	60.000.000	76.202.430	76.202.430	APBD	Ngemplak Simongan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	74.345.978	74.345.978	60.000.000	74.345.978	74.345.978	APBD	Manyaran
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	71.173.838	71.173.838	60.000.000	71.173.838	71.173.838	APBD	Krapyak
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	49.250.000	49.250.000	60.000.000	49.250.000	49.250.000	APBD	Tambakharjo
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	57.450.000	57.450.000	60.000.000	57.450.000	57.450.000	APBD	Kalibanteng Kulon
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	55.817.048	55.817.048	60.000.000	55.817.048	55.817.048	APBD	Kalibanteng Kidul
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	92.185.728	92.185.728	60.000.000	92.185.728	92.185.728	APBD	Gisikdrono

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	72.627.200	72.627.200	60.000.000	72.627.200	72.627.200	APBD	Bongsari
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	69.430.508	76.080.508	60.000.000	69.430.508	76.080.508	APBD	Bojongsalaman
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	62.600.000	55.600.000	60.000.000	62.600.000	55.600.000	APBD	Salamanmloyo
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	45.101.184	45.101.184	60.000.000	45.101.184	45.101.184	APBD	Cabean
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	65.443.160	65.443.160	60.000.000	65.443.160	65.443.160	APBD	Karangayu
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	95.750.000	95.750.000	60.000.000	95.750.000	95.750.000	APBD	Krobokan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	37.700.700	37.700.000	60.000.000	37.700.700	37.700.000	APBD	Tawangsari
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	56.198.480	56.198.480	60.000.000	56.198.480	56.198.480	APBD	Tawangmas
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	93.200.000	92.850.000	60.000.000	93.200.000	92.850.000	APBD	Kembangarum
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.250.000.000	16.968.071.629	45.047.788.129	20.250.000.000	16.968.071.629	45.047.788.129		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	200.000.000	146.564.650	146.564.650	200.000.000	146.564.650	146.564.650	APBD	Kecamatan
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.300.000.000	1.114.847.340	3.082.497.340	1.300.000.000	1.114.847.340	3.082.497.340	APBD	Ngemplak Simongan
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.000.000.000	1.662.976.100	4.895.426.100	2.000.000.000	1.662.976.100	4.895.426.100	APBD	Manyaran

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.200.000.000	904.287.700	950.000.000	1.200.000.000	904.287.700	950.000.000	APBD	Krapyak
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	700.000.000	535.886.760	1.311.336.760	700.000.000	535.886.760	1.311.336.760	APBD	Tambakharjo
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.000.000.000	862.801.724	2.340.451.724	1.000.000.000	862.801.724	2.340.451.724	APBD	Kalibanteng Kulon
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	800.000.000	683.621.960	1.827.471.960	800.000.000	683.621.960	1.827.471.960	APBD	Kalibanteng Kidul
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.100.000.000	1.766.458.899	4.988.708.899	2.100.000.000	1.766.458.899	4.988.708.899	APBD	Gisikdrono
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.300.000.000	1.097.712.844	3.035.762.844	1.300.000.000	1.097.712.844	3.035.762.844	APBD	Bongsari
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.200.000.000	1.043.751.608	2.842.001.608	1.200.000.0000	1.043.751.608	2.842.001.608	APBD	Bojongsalaman
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	800.000.000	647.910.744	1.681.560.744	800.000.000	647.910.744	1.681.560.744	APBD	Salamanmloyo
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	600.000.000	493.945.448	1.266.195.448	600.000.000	493.945.448	1.266.195.448	APBD	Cabean

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	950.000.000	804.157.752	2.163.407.752	950.000.000	804.157.752	2.163.407.752	APBD	Karangayu
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.800.000.000	1.565.186.892	4.373.036.892	1.800.000.000	1.565.186.892	4.373.036.892	APBD	Krobokan
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.100.000.000	916.724.000	2.427.174.000	1.100.000.000	916.724.000	2.427.174.000	APBD	Tawangsari
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.100.000.000	946.084.558	2.515.734.558	1.100.000.000	946.084.558	2.515.734.558	APBD	Tawangmas
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.100.000.000	1.775.152.650	5.027.002.650	2.100.000.000	1.775.152.650	5.027.002.650	APBD	Kembangarum
7.01.03.2.03.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8.978.000	8.628.500	8.628.500	8.978.000	8.628.500	8.628.500	APBD	Kecamatan
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	39.825.700	164.825.700	50.000.000	39.825.700	164.825.700	APBD	Kecamatan
7.01.06.2.03.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.150.200	0	0	23.150.200	0	0	APBD	Kecamatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.000.000	19.664.300	20.949.300	20.000.000	19.664.300	20.949.300		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		20.000.000	19.664.300	20.949.300	20.000.000	19.664.300	20.949.300		
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.664.300	20.949.300	20.000.000	19.664.300	20.949.300	APBD	Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		90.000.000	76.174.300	77.974.300	90.000.000	76.174.300	77.974.300		
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		90.000.000	76.174.300	77.974.300	90.000.000	76.174.300	77.974.300		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	90.000.000	76.174.300	77.974.300	90.000.000	76.174.300	77.974.300	APBD	Kecamatan
JUMLAH						65.334.506.200	64.302.405.657	94.139.358.636.65		

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Kecamatan Semarang Barat 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

39. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11). yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya. dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

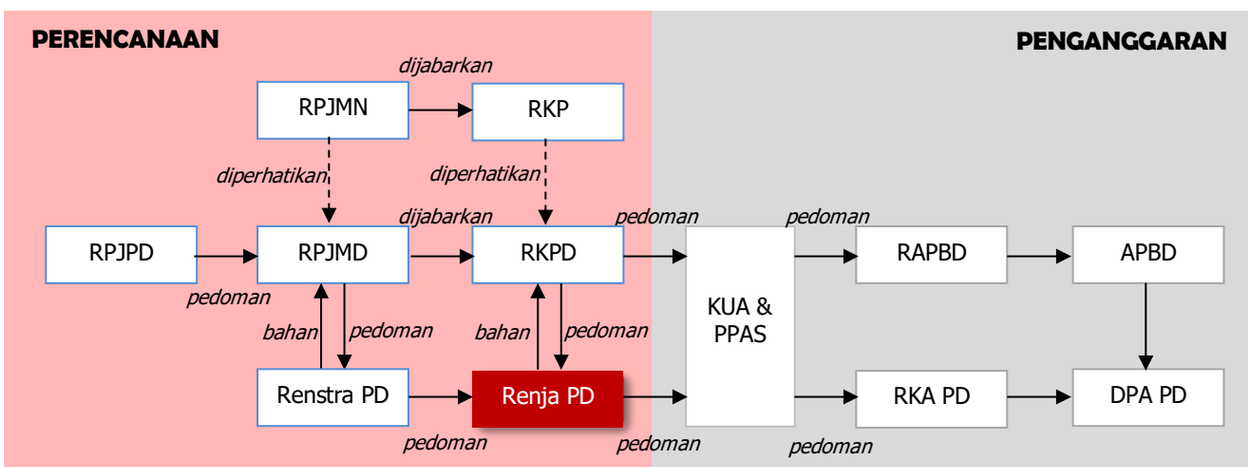

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3). yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program. kegiatan. lokasi. dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut. Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025. dengan

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan RKPD 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan kebijakan. program. dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya. termasuk pada Kecamataan Semarang Timur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025. sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025. dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian. perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. Djawa Tengah. Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga. Cilacap. Wonogiri. Jepara. dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kecamatan;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program. kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2025. dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir. diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang. landasan hukum. maksud dan tujuan. serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. review terhadap Perubahan RKPD. serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional. serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program. kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian. kaidah pelaksanaan. serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah. yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya. yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II. yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
	URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	32%	32%	32%	32%
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50%	3 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	1 Dokumen	33%
		Jumlah Dokumen RTP Kec Semarang Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33%	1 dokumen	33%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	100%	78 Orang/bulan	94%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5Paket	3 Paket	2 Paket	67%	2 Paket	67%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10Paket	10 Paket	5 Paket	50%	5 Paket	50%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	50%	5 Laporan	50%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	3 Dokumen	75%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	2 Unit	50%	2 Unit	50%
7.01.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	7 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	11 Unit	6 Unit	55%	6 Unit	55%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	67%	2 Unit	67%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92.00%	92.00%	93.00%	94.81%	102%	94.81%	102%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100%	1 Angka	100%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	100%	100%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kemijen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kecamatan	Kecamatan Kelurahan Rejomulyo							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangturi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	67%	2 Laporan	67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00%	98.00%	99.00%	50%	51%	50%	51%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	170 Kegiatan	52%	170 Kegiatan	52%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga	94 Lembaga	94 Lembaga	94 Lembaga	100%	94 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	6 Unit	1 Unit	17%	1 Unit	17%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	14 Unit	14 Unit	2 Unit	14%	2 Unit	14%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	11 Unit	15 Unit	15 Unit	1 Unit	7%	1 Unit	7%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2 Unit	25%	2 Unit	25%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	8 Unit	8 Unit	7 Unit	1 Unit	14%	1 Unit	14%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejomulyo	13 Unit	13 Unit	12 Unit	1 Unit	8%	1 Unit	8%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	9 Unit	9 Unit	8 Unit	3 Unit	38%	3 Unit	38%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	17 Unit	17 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatibaru	12 Unit	12 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	11 Unit	11 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.0002	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0002	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kemijen	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mlatiharjo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangtempel	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan Kebonagung							
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Rejomulyo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Bugangan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangturi	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mlatibaru	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Lembaga	8 Lembaga	4 Lembaga	2 Lembaga	50%	2 Lembaga	50%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	4 Lembaga	4 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kebonagung	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan kapasitas lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	10 Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	25 %	3 lembaga kemasyarakatan	25 %
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	20%	6.61%	33%	6.61%	33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35 angka	30 angka	15 angka	50%	15 angka	50%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%

	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome). Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persemtase jumlah organisasi kemasyarakatan. organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	92%	92%	95%	50%	53%	50%	53%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan. organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	67%	2 kegiatan	67%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi. Koordinasi dan pembinaan (bimtek. sosialisasi. konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50%	100 orang	50%

Sumber: Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan pencapaian Renstra sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut karena adanya komitmen Bersama antara pimpinan dan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan target yang sudah ditetapkan. Adanya monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci dalam keberhasilan pencapaian kinerja .

Pada Tahun 2025 terdapat sub kegiatan baru yang belum ada pada Rencana Strategis Kecamatan Semarang Timur Tahun 2025 yaitu sub kegiatan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait dan sub kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Sub kegiatan tersebut merupakan Amanah dengan tujuan dapat mendukung program nasional penurunan angka stunting di wilayah kecamtan masing-masing melalui program dan kegiatan yang sudah disusun untuk melakukan edukasi. pelatihan. monitoring dan evaluasi terhadap balita stunting yang ada.

Untuk Sub kegiatan yang belum mencapai 100% dan pelaksanaannya di triwulan III dan/atau triwulan IV. yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
f. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
j. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

k. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Kecamatan Semarang Timur akan terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta output yang diharapkan dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi berkala melalui briefing serta monitoring pada aplikasi monev yang disediakan BAPPEDA. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi dengan KPA. PPTK. dan bendahara terus dilakukan terkait progres dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai jadwal.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.705.821.177	8.910.568.215	41.05%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.086.059.201	7.584.683.698	44.39%
7.01.01.2.0001	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.631.600	539.000	1.36%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.223.600	110.000	0.33%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	969.900	0	0.00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.042.900	0	0.00%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.222.900	209.000	17.09%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.458.900	0	0.00%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	222.800	110.000	49.37%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.490.600	110.000	7.38%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.003.494.480	7.094.225.449	47.28%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.454.998.680	6.827.937.449	47.24%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	547.712.000	266.180.000	48.60%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561.000	108.000	19.25%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	111.400	0	0.00%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	111.400	0	0.00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.838.726	292.983.910	46.74%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.803.470	6.722.710	45.41%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.278.630	0	0.00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.705.821.177	8.910.568.215	41.05%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.999.320	7.041.200	18.05%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.913.820	4.270.000	43.07%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	0	0.00%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.777.000	26.450.000	21.90%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	400.066.486	248.500.000	62.11%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.758.857	39.849.285	10.02%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	397.758.857	39.849.285	10.02%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.892.118	81.799.954	18.47%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	243.461.941	61.251.529	25.16%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.430.177	20.548.425	10.30%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.443.420	75.286.100	13.08%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.491.000	61.880.850	29.26%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.981.070	8.751.750	9.84%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.971.350	4.653.500	1.94%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	0	0.00%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.537.791.126	1.007.294.017	39.69%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	194.934.560	76.510.600	39.25%
7.01.02.2.01.0002	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000	1.500.000	28.57%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	189.684.560	75.010.600	39.54%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.162.059.026	519.794.968	44.73%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.162.059.026	519.794.968	44.73%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.180.797.540	410.988.449	34.81%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.180.797.540	410.988.449	34.81%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.809.398.490	182.915.500	10.11%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.642.848.900	142.120.500	8.65%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.350.000	29.584.000	81.39%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.155.000.000	0	0.00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	451.498.900	112.536.500	24.93%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	166.549.590	40.795.000	24.49%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	122.494.520	19.225.000	15.69%
7.01.03.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.150.000	8.400.000	69.14%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31.905.070	13.170.000	41.28%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	175.472.360	87.125.000	49.65%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.705.821.177	8.910.568.215	41.05%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	175.472.360	87.125.000	49.65%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	175.472.360	87.125.000	49.65%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.100.000	48.550.000	50.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.100.000	48.550.000	50.00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	97.100.000	48.550.000	50.00%
	KELURAHAN KARANGTURI	2.259.672.850	732.842.251	32.43%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.722.850	40.194.591	48.59%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	26.065.360	2.74%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86.600.000	52.270.000	60.36%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.140.350.000	614.312.300	53.87%
	KELURAHAN KARANGTEMPEL	1.809.673.732	444.952.358	24.59%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.264.292	31.628.128	37.53%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	17.779.980	1.87%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.372.800	19.969.250	42.15%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	728.036.640	372.575.000	51.18%
	KELURAHAN KARANGTURI	1.643.870.700	386.731.447	23.53%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.458.150	42.134.792	50.49%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	35.821.955	3.77%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.500.000	29.633.500	45.94%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	545.912.550	279.141.200	51.13%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.705.821.177	8.910.568.215	41.05%
	KELURAHAN KEBONAGUNG	1.628.632.973	337.468.152	20.72%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.791.733	34.010.452	41.58%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	0	0.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63.050.000	27.538.000	43.68%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	533.791.240	275.919.700	51.69%
	KELURAHAN KEMIJEN	3.272.329.401	830.338.518	25.37%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.413.241	36.917.518	42.23%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.675.000.000	0	0.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.200.000	39.525.000	45.33%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.422.716.160	753.896.000	52.99%
	KELURAHAN MLATIBARU	2.234.297.410	652.172.979	29.19%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.744.230	36.997.979	42.65%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	0	0.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.450.000	30.800.000	43.11%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.126.103.180	584.375.000	51.89%
	KELURAHAN MLATIHARJO	1.861.585.514	492.249.678	26.44%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.590.514	34.244.678	41.46%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.705.821.177	8.910.568.215	41.05%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	0	0.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.450.000	48.300.000	67.60%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	757.545.000	409.705.000	54.08%
	KELURAHAN REJOMULYO	1.866.839.607	490.076.232	26.25%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.353.237	39.510.162	47.98%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	34.784.070	3.66%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63.500.000	18.950.000	29.84%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	770.986.370	396.832.000	51.47%
	KELURAHAN REJOSARI	3.784.070.060	1.271.251.479	33.59%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.545.070	42.577.696	43.21%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.433.000.000	31.858.783	2.22%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.100.000	32.900.000	32.87%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.152.424.990	1.163.915.000	54.07%
	KELURAHAN SARIREJO	2.026.399.580	597.238.889	29.47%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.299.580	35.757.794	42.42%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	34.951.595	3.68%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.500.000	36.950.000	48.94%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	916.600.000	489.579.500	53.41%
JUMLAH		45.847.709.946	13.033.278.595	28.43%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan. 5 program. dan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebesar Rp 45.847.709.946. Dari anggaran tersebut. sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.033.278.595 atau 28.43%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 32.814.431.351. Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan utamanya kegiatan fisik dan non fisik hasil musrenbang tahun 2025 yang rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2025.

Sedangkan untuk target pendapatan pada tahun 2025 yaitu 4.020.000 dan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu sebesar 2.750.000 atau 68 %. Upaya peningkatan retribusi akan terus dilakukan oleh kecamatan Semarang Timur melalui berbagai hal antara lain sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan dan aset-aset yang potensial.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang. yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas Dan Fungsi. Serta Sistem Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan. ketentraman dan	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	86.68 angka	87.50 angka	88.00 angka	88.35 angka	89.00 angka	90.00 angka		92 angka	93 angka	95.03 angka	95.15 angka	95.25 angka	95.25 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	0 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	63.89 angka	64.00 angka	65.00 angka	66.00 angka	67.00 angka	68.00 angka	0	70.96 angka	76.20 angka	76.30 angka	76.35 angka	76.35 angka	76.35 angka
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan. ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.68 %	83.36 %	85.04 %	86.72 %	88.40 %	90.08 %	0	0	85.04 %	86.72 %	45.00 %	90.08%	88.40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	0	0	92%	100%	50%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik. pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan. ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur”. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II. realisasi indikator ini adalah sebesar 95.15% dari target sebesar 89 % (capaian 106.91 %).

b. Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1. “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja “Nilai AKIP”. dimana realisasinya sebesar 76.30 angka dari target sebesar 76.30 angka.
   2. “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan”. dimana realisasinya sebesar 1 Angka dari target sebesar 1 Angka.
   3. “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. dimana realisasinya sebesar 50% Angka dari target sebesar 100%.
   4. “Meningkatnya wawasan kebangsaan. ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki dua indikator yaitu “Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. dimana realisasinya sebesar 45% Angka dari target sebesar 88.40% dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 98%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis. baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan. tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur. maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas. dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE). pelayanan yang ramah anak. ramah lansia dan ramah difabel
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
c. Pengefektifan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan Semarang Timur
e. Pencegahan dan penanggulangan banjir di wilayah kecamatan Semarang Timur
f. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan Semarang Timur

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi

Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP. kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas. kompetensi di Kecamatan. belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Timur untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi. serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menyebabkan Sumbatan pada saluran dan banjir atau rob disaat musim hujan.
3. Penanganan penurunan jumlah warga kemiskinan ekstrim dan penganganan jumlah anak stunting di Kecamatan Semarang Timur.
4. Optimalisasi peran serta masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam penanganan inflasi di Kecamatan Semarang Timur.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas. baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang khususnya di tahun 2025. yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Kemajuan teknologi. informasi dan komunikasi media sosial membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam upayanya memperoleh informasi secara otonom. Kebebasan mengakses segala bentuk informasi menuntur Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk dapat mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan media sosial.
   2) Sebagai kota metropolitan. tidak dapat dilepaskan perkembangan dan permasalahan berbagai aspek yang ada di masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang perlu mengembangkan strategi yang tepat dan menguatkan komitmen dalam mengarahkan perkembangan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dari masyarakat Kota Semarang.
   3) Berkembangnya pemahaman dan melek terhadap mekanisme perencanaan dan pembangunan membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan. Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang perlu menyiapkan adanya wadah dan ruang untuk mengakomodir demi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Perkembangan teknologi. informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Semarang Timur dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat. tepat dan berkualitas.
2) Pengoptimalan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal. mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment* agar kedepannya sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur dapat berperan optimal dalam kinerja pemberdayaan masyarakat. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. penerapan dan penegakkan Perda dan Perwal. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.
3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Semarang Timur.
4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang. karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Semarang Timur.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan. tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengembangan penerapan kapasitas sumber daya aparatur di Kelurahan dan Kecamatan Semarang Timur dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Semarang Timur. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal maupun non formal. mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment*
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Semarang Timur dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat. tepat dan berkualitas.
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perguruan Tinggi dan

stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Semarang Timur.

4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Semarang Timur.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025. dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD. yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan	100%	17.327.017.127	PROGRAM PENUNJANG	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan	100%	17.327.017.127	
	URUSAN		dan pelaporan Kinerja			URUSAN		dan pelaporan Kinerja			
	PEMERINTAHAN		SKPD			PEMERINTAHAN		SKPD			
	DAERAH					DAERAH					
	KABUPATEN/KOTA					KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kinerja	100%				Persentase Kinerja	100%		
			administrasi dan pelaporan					administrasi dan pelaporan			
			Keuangan SKPD					Keuangan SKPD			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan. dokumen pelaporan	6 dokumen	47.631.600	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan. dokumen pelaporan	6 dokumen	47.631.600	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	41.223.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	41.223.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen		
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	969.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	969.900	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.042.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.042.900	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.222.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.222.900	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	1.458.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.458.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perubahan DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	222.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	222.800	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.490.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.490.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Org/bulan	14.061.644.969	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Org/bulan	14.061.644.969	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	1.107.902.450	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	1.107.902.450	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	561.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	1 laporan	111.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S e mesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Seme steran SKPD	1 laporan	111.400	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	111.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	111.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100%	784.483.618	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100%	784.483.618	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.803.470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.803.470	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	29.278.630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	29.278.630	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	10 Paket	39.417.320	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatn Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	10 Paket	39.417.320	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Timur	dan Penggandaan yang Disediakan				Timur	dan Penggandaan yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	9.913.820	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	9.913.820	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	146.627.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	146.627.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	531.443.378	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	531.443.378	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	360.350.663	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	360.350.663	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	360.350.662	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	360.350.662	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	383.387.608	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	383.387.608	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	178.461.940	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	178.461.940	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204.925.667	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204.925.667	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	580.832.420	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	580.832.420	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	193.716.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	193.716.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	97.145.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	97.145.070	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	11 unit	254.971.350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	254.971.350	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dipelihara/Direhabilitasi								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	35.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	2.620.946.099	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	2.620.946.099	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	205.053.236	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	205.053.236	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	202.053.235.7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	202.053.235.7	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	1.748.855.923	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	1.748.855.923	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	889.673.026	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	889.673.026	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bugangan	12 Laporan	82.722.850		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bugangan	12 Laporan	82.722.850	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	84.264.292		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	84.264.292	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangturi	12 Laporan	83.458.150		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangturi	12 Laporan	83.458.150	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	81.791.733		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	81.791.733	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kemijen	12 Laporan	92.413.241		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kemijen	12 Laporan	92.413.241	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	82.590.514		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	82.590.514	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	86.744.230		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	86.744.230	
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	82.353.237		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	82.353.237	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kelurahan Rejomulyo					Wilayah Kelurahan Rejomulyo			
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejosari	12 Laporan	98.545.070		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejosari	12 Laporan	98.545.070	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	84.299.580		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	84.299.580	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	667.036.940	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	667.036.940	
7.01.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 laporan	667.036.940	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 laporan	667.036.940	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	41.228.964.411	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	41.228.964.411	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	13.479.098.691	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	13.479.098.691	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	36.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	36.350.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	6 Unit	1.355.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	6 Unit	1.355.000.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	8 Unit	950.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	8 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	7 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	7 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	15 Unit	950.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	15 Unit	950.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	10 Unit	1.686.800.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	10 Unit	1.686.800.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan M l a t i b a r u	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan M l a t i b a r u	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejomulyo	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejomulyo	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	1.433.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	31.858.783	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	10 Unit	34.951.595	
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/ Ormas	636.822.710	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/ Ormas	112.536.500	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugangan	4 Pokmas/ Ormas	91.875.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugangan	4 Pokmas/ Ormas	52.270.000	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	4 Pokmas/ Ormas	47.372.800		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	4 Pokmas/ Ormas	19.969.250	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi	4 Pokmas/ Ormas	69.625.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi	4 Pokmas/ Ormas	69.625.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	4 Pokmas/ Ormas	63.050.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	4 Pokmas/ Ormas	63.050.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemijen	4 Pokmas/ Ormas	71.920.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemijen	4 Pokmas/ Ormas	71.920.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas	71.450.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas	71.450.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	/Ormas				Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	/Ormas		
		Kelurahan Maltiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	4 Pokmas /Ormas	71.450.000		Kelurahan Maltiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	4 Pokmas /Ormas	71.450.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	4 Pokmas /Ormas	63.500.000		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	4 Pokmas /Ormas	63.500.000	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas /Ormas	105.383.181		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas /Ormas	105.383.181	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas /Ormas	75.500.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas /Ormas	75.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	27.749.865.720	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	27.749.865.720	
7.01.03.2.03 .0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakat	4 Lembaga Kemasyar	122.494.520	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyar	122.494.520	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			an yang Diselenggarakan Kecamatan Semarang Timur	akatan				yang Diselenggarakan Kecamatan Semarang Timur	akatan		
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.129.640.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.129.640.000	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.960.086.640		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.960.086.640	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.333.512.550		Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.333.512.550	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan kelurahan kebonagung	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.372.481.240		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan kelurahan kebonagung	9 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	1.372.481.240	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.978.266.160		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.978.266.160	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	3.102.193.180		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	3.102.193.180	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	Kemasyarakatan				Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	Kemasyarakatan		
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.027.485.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.027.485.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.049.036.370		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.049.036.370	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.163.164.990		Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.163.164.990	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.469.700.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.469.700.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 laporan	9.900.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 laporan	9.900.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	1 laporan	31.905.070	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	1 laporan	31.905.070	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penurunan pelanggaran	25%	184.222.360	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penurunan pelanggaran	25%	184.222.360	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ketentraman dan ketertiban umum					ketentraman dan ketertiban umum			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 angka	184.222.360	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 angka	184.222.360	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia. tentara nasional Indonesia. dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	184.222.360	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia. tentara nasional Indonesia. dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	184.222.360	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	97.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	97.100.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi	3 Kegiatan	97.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan	3 Kegiatan	97.100.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan					Organisasi Kepemudaan			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi. koordinasi dan pembinaan (Bimtek. sosialisasi. konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	97.100.000	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi. koordinasi dan pembinaan (Bimtek. sosialisasi. konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	97.100.000	
		JUMLAH			61.458.249.997.13					61.458.249.997.13	

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila. Demokrasi. dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. energi. air. ekonomi syariah. ekonomi digital. ekonomi hijau. dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. mendorong kewirausahaan. mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). sains. teknologi. pendidikan. kesehatan. prestasi olahraga. kesetaraan gender. serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z). dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomi. dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik. hukum. dan birokrasi. serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. narkoba. judi. dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam. dan budaya. serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5.30 – 5.60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4.50 – 5.00%
3. Rasio Gini nilai 0.379 – 0.382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0.56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7.00 – 8.00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar. sehat. bugar. berkarakter. dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9.28-8.08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4.80-5.60%;
3. Inflasi sebesar 2.5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.20-4.60%.

Selanjutnya pada tingkat kota. pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”. dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar. terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan. dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi. Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa. Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa. perbaikan ruang kelas yang rusak berat. penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. dengan fokus pada perluasan layanan UHC. rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar. terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi. dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak. penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan. serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan. dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa. penyelenggaran event-event seni dan budaya. penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. penguatan sistem pangan perkotaan. serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain. dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin. peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air. dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang. dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang. mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif. dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan. dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025. terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.80 – 6.50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84.80 – 85.80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3.98 – 3.74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5.61 – 5.31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan. maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025. yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik. pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan. ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

Dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. dengan indikator sasaran yaitu " Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan".
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif";
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.
   dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP".
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan. ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik. pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan. ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95.00
SASARAN Terwujudnya kualitas kinerja pelayananperangkat daerah	NILAI AKIP	angka	76.35
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publikdi kecamatan dan kelurahan	angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatandan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan. ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88.40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	persen	98.00

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. maka dirumuskan program. kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya. yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029. yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus. Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar PATEN. Persentase Lembaga Masyarakat Aktif. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi. sosial. budaya. pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan. dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program. kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Adapun rencana program. kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%				APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya saranadan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yangdihasilkan. dokumen pelaporan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	63.538.800	63.538.800	47.631.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, RTP	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	51.368.600	51.368.600	41.223.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.728.900	1.728.900	969.900	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	1.042.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	1.222.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.706.900	2.706.900	1.458.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.122.000	1.122.000	222.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.490.600	1.490.600	1.490.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.004.543.680	15.004.543.680	15.170.331.219	APBD Kota Semarang	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%				APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	14.454.998.680	14.454.998.680	14.061.644.969	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yangdisediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	547.862.000	547.862.000	1.107.902.450	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	561.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	111.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	111.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	791.694.892	791.694.892	784.483.618	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	14.803.470	14.803.470	14.803.470	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	29.278.630	29.278.630	29.278.630	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	72.364.240	72.364.240	39.417.320	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	40.905.065	40.905.065	9.913.820	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1750 Laporan	1750 Laporan	1750 Laporan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	221.277.000	221.277.000	146.627.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 . 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	400.066.487	400.066.487	531.443.378.3	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	397.808.756	397.808.756	360.350.662.6	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	397.808.756	397.808.756	360.350.662.6	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	442.892.118	442.892.118	383.387.608	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	442.892.118	243.461.941	178.461.940.53	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	199.430.177	199.430.177	204.925.667	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	623.925.367	623.925.367	580.832.420	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	36 Unit	36 Unit	36 Unit	259.972.947	259.972.947	193.716.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	2 Unit	2 Unit	2 Unit	88.981.070	88.981.070	97.145.070	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 . 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	11 Unit	11 Unit	11 Unit	239.971.350	239.971.350	254.971.350	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 . 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana pendukung Gedung Kantor								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	95%	95%	3.730.031.783	3.730.031.783	2.620.946.099	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik diKecamatan dan Kelurahan	1	1	1	215.077.567	215.077.567	205.053.236	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01 .0001	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	3.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	207.577.567	207.577.567	202.053.235.7	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.309.988.526	2.309.988.526	1.748.855.923	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.413.988.526	1.413.988.526	889.673.026	APBD Kota Semarang	KEC. Semarang Timur

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	82.722.850	APBD Kota Semarang	Kel. Bugngan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	84.264.292	APBD Kota Semarang	Kel. Karang tempel
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	83.458.150	APBD Kota Semarang	Kel. Kel. Karangturi
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	81.791.733	APBD Kota Semarang	Kel.Kebon agung

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	92.413.241	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	82.590.514	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	86.744.230	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	86.744.230	APBD Kota Semarang	Kel. rejomulyo
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	101.000.000	101.000.000	98.545.070	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	89.000.000	84.299.580	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.204.965.690	1.204.965.690	667.036.940	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.204.965.690	1.204.965.690	667.036.940	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	24.564.805.090	24.564.805.090	41.228.964.411	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	13.213.149.000	13.213.149.000	13.479.098.691	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yangberpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	120 Lembaga	120 Lembaga	120 Lembaga	65.000.000	65.000.000	36.350.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		pembangunan di kelurahan								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.155.000.000	1.155.000.000	1.355.000.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit	14 unit	14 unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	8 unit	8 unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit	14 unit	14 unit	1.675.000.000	1.675.000.000	1.686.800.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejomulyo
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	1.433.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	30 Pokmas	30 Pokmas	30 Pokmas	453.349.000	453.349.000	636.822.710	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas	17 Pokmas	17 Pokmas	92.000.000	92.000.000	91.875.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas	13 Pokmas	13 Pokmas	54.200.000	54.200.000	47.372.800	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas	19 Pokmas	19 Pokmas	71.000.000	71.000.000	69.625.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas	14 Pokmas	14 Pokmas	75.200.000	75.200.000	63.050.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	15 Pokmas	15 Pokmas	96.200.000	96.200.000	71.920.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	15 Pokmas	15 Pokmas	15 Pokmas	87.800.000	87.800.000	71.450.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	15 Pokmas	15 Pokmas	79.400.000	79.400.000	71.450.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	12 Pokmas	12 Pokmas	79.400.000	79.400.000	63.500.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejomulyo
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas	13 Pokmas	13 Pokmas	108.800.000	108.800.000	105.383.181	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 pokmas	20 pokmas	20 pokmas	87.800.000	87.800.000	75.500.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	11.351.656.090	11.351.656.090	27.749.865.720	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	127.000.000	127.000.000	122.494.520	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	1.261.400.000	1.261.400.000	3.129.640.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	809.000.000	809.000.000	1.960.086.640	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	606.200.000	606.200.000	1.333.512.550	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	590.600.000	590.600.000	1.372.481.240	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	1.573.400.000	1.573.400.000	3.978.266.160	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	1.245.800.000	1.245.800.000	3.102.193.180	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	840.200.000	840.200.000	2.027.485.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	855.800.000	855.800.000	2.049.036.370	APBD Kota Semarang	Kel. Rejomulyo
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	2.384.600.000	2.384.600.000	6.163.164.990	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	1.011.800.000	1.011.800.000	2.469.700.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.050.000	13.050.000	9.900.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.050.000	13.050.000	9.900.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25%	25%	25%	182.330.000	182.330.000	184.222.360	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 Angka	30 Angka	30 Angka	182.330.000	182.330.000	184.222.360	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Republik Indonesia, Tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	182.330.000	182.330.000	184.222.360	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	98%	98%	99.495.550	99.495.550	97.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	99.495.550	99.495.550	97.100.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01 .0002	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi. koordinasi dan pembinaan (Bimtek. sosialisasi. konsultasi) Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	99.495.550	99.495.550	97.100.000	APBD Kota Semarang	
		JUMLAH				45.901.066.036	45.901.066.036	61.458.249.997.13		

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran. penyesuaian program. kegiatan dan sub kegiatan. serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025. sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program. kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja. dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025. dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program. kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. serta pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi. sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program. kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

40. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

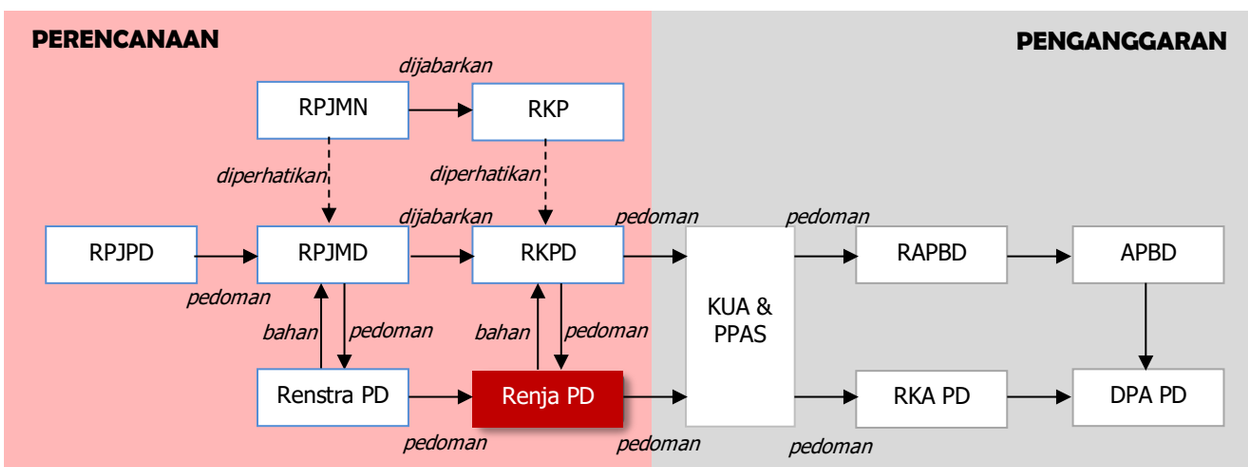

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, dengan

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	98.95%	94%	98.47%	104.75 %	98.47%	104.75%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	1 angka	1 angka	0	-	1 angka	50%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dok	4 dok	4 dok	2 dok	50%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec Semarang Tengah)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Miroto)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Brumbungan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jagalan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kranggan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gabahan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kembangsari)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekayu)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandansari)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangunharjo)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kauman)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Purwodinatan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangkidul)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pekunden)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pendrikan Kidul)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pendrikan Lor)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	93%	94%	50%	50%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	414 kegiatan	50,06%		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kec)	6 unit	6 unit	4 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Miroto)	8 unit	8 unit	10 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Brumbungan)	11 unit	11 unit	9 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Jagalan)	8 unit	8 unit	8 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kranggan)	10 unit	10 unit	8 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Gabahan)	10 unit	10 unit	11 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kembangsari)	7 unit	7 unit	8 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Sekayu)	5 unit	5 unit	6 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Pandansari)	11 unit	11 unit	9 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Bangunharjo)	7 unit	7 unit	9 unit	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kauman)	13 unit	13 unit	13 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Purwodinatan)	14 unit	14 unit	10 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Karangkidul)	11 unit	11 unit	9 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Pekunden)	9 unit	9 unit	9 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Pendrikan Kidul)	9 unit	9 unit	11 unit	-	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Pendrikan Lor)	5 unit	5 unit	6 unit	-	-		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kec)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Miroto)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Masyarakat di Kelurahan (Brumbungan)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jagalan)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kranggan)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gabahan)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kembangsari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekayu)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandansari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangunharjo)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kauman)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Purwodinatan)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangkidul)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pekunden)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pendrikan Kidul)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pendrikan Lor)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dok	15 dok	15 dok	8 dok	53,33%	8 dok	53,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	19%	14%	16%	16.66%	104,125 %	16.66%	87.68%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	30 angka	27 angka	15 angka	55,55%	15 angka	62.5%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60%	40%	50%	25%	50%	25%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 keg	2 keg	2 keg	1 keg	50%	1 keg	50%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	10 dokumen	50%	10 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	-	-		
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	4 dok	50%	4 dok	50%
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100%	100 Orang/bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1 dok	1 dok	-	-		
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	3 laporan	50%
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 paket	50%	6 paket	50%
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	84 Paket	26 paket	30,95%	26 paket	30,95%
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket	24 paket	50%	24 paket	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2 paket	40%	2 paket	40%
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100.00 Persen	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	100%

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor, Penyusunan Laporan Akhir Tahun, Penyusunan Pelaopran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan, dan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan semua kelurahan (15 kelurahan).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.789.843.827,00	11.226.392.359,00	47,19%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.280.400,00	2.956.000,00	3,73%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.570.200,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.650.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.650.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.766.900,00	106.000,00	6,00%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.856.900,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.825.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.961.400,00	2.850.000,00	96,24%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.203.029.480,00	10.569.373.745,00	47,60%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.416.935.280,00	10.261.723.745,00	47,91%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	779.510.000,00	304.500.000,00	39,06%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.261.400,00	3.150.000,00	96,58%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.511.400,00	-	0,00%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	811.400,00	-	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.145.828,00	49.495.000,00	23,55%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	5.055.000,00	67,40%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.984.414,00	10.584.000,00	52,96%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.421.414,00	1.716.000,00	23,12%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.325.000,00	15.710.000,00	19,56%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.915.000,00	16.430.000,00	17,31%
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	534.997.613,00	255.000.015,00	47,66%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	534.997.613,00	255.000.015,00	47,66%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.572.522,00	93.432.076,00	34,66%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	63.304.076,00	45,22%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.572.522,00	30.128.000,00	23,25%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.817.984,00	256.135.523,00	51,97%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.228.059,00	116.892.523,00	34,97%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	22.031.000,00	88,12%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.589.925,00	117.212.000,00	87,74%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.602.614.689,10	1.469.068.313,00	40,78%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.468.188,00	1.540.000,00	11,43%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.500.000,00	-	0,00%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.968.188,00	1.540.000,00	12,87%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.563.046.501,10	1.453.780.313,00	40,80%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.250.357.626,00	968.433.080,00	43,03%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Miroto	87.500.000,00	33.288.306,00	38,04%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Brumbungan	87.500.000,00	40.328.644,00	46,09%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jagalan	87.765.040,00	35.022.880,00	39,91%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kranggan	87.000.000,00	31.972.684,00	36,75%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gabahan	86.500.000,00	29.246.500,00	33,81%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembangsari	87.500.000,00	27.342.373,00	31,25%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekayu	87.427.265,10	30.099.132,00	34,43%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pandansari	87.000.000,00	31.993.843,00	36,77%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bangunharjo	88.000.000,00	36.988.888,00	42,03%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kauman	88.000.000,00	35.381.998,00	40,21%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Purwodinatan	88.000.000,00	23.297.852,00	26,47%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangkidul	88.000.000,00	33.226.152,00	37,76%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekunden	87.000.000,00	34.634.609,00	39,81%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Kidul	87.500.000,00	26.266.672,00	30,02%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Lor	87.996.570,00	36.256.700,00	41,20%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26.100.000,00	13.748.000,00	52,67%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	26.100.000,00	13.748.000,00	52,67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.387.578.420,00	5.417.462.250,00	20,53%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26.208.891.962,00	5.391.337.250,00	20,57%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.780.000,00	33.000.000,00	77,14%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.042.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Miroto	952.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brumbungan	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagalan	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabahan	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangsari	951.000.000,00	-	0,00%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekayu	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandansari	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangunharjo	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodinatan	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangkidul	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekunden	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Kidul	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Lor	951.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	756.391.597,00	449.250.000,00	59,39%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	818.160.472,00	427.824.500,00	52,29%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	706.189.500,00	380.561.400,00	53,89%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	843.532.070,00	455.143.500,00	53,96%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	619.568.300,00	309.750.000,00	49,99%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	864.164.340,00	433.055.000,00	50,11%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	689.409.680,00	305.500.000,00	44,31%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	472.962.703,00	195.691.500,00	41,38%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	522.762.600,00	275.005.000,00	52,61%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	532.942.800,00	247.615.000,00	46,46%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	463.007.000,00	207.075.000,00	44,72%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	734.317.200,00	334.974.400,00	45,62%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	604.435.200,00	281.280.000,00	46,54%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	679.802.060,00	295.050.000,00	43,40%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	702.792.240,00	329.161.950,00	46,84%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor	847.674.200,00	431.400.000,00	50,89%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	178.686.458,00	26.125.000,00	14,62%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	116.793.600,00	13.850.000,00	11,86%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	54.142.858,00	12.275.000,00	22,67%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.600.000,00	10.700.000,00	31,85%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.600.000,00	10.700.000,00	31,85%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.600.000,00	10.700.000,00	31,85%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.900.000,00	27.500.000,00	33,99%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.900.000,00	27.500.000,00	33,99%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.900.000,00	27.500.000,00	33,99%
JUMLAH		53.894.536.936,10	18.151.122.922,00	33,68 %

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program,13 kegiatan dan 80 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah sebesar Rp 53.894.536.936,10 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 18.151.122.922,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 35.743.414.014,10.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI				PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
Tujuan :	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88	88,35	89	87,5	88	99,95	98,47	98,47
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		angka	angka	angka	angka	angka	angka	angka	angka	angka
Sasaran :										
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68,5 angka	69 angka	69,3 angka	69,5 angka	75,61 angka	78,3 angka	79,1 angka	76,55 angka	76,55 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97 %	98 %	99 %	100 %	97 %	98 %	100%	50%	100 %
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36 %	85,04 %	86,72 %	88,40 %	83,36 %	85,04 %	86,72 %	50%	88,40 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	90%	92%	95%	50%	98%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, pada triwulan II ini telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,47 angka dari target sebesar 89 angka;

b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu nilai AKIP, tidak memenuhi target dimana realisasinya 76,55 dari target 79,2. Hal ini disebabkan adanya koreksi dari Bappeda terkait komponen

perencanaan kinerja;

c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)”, pada triwulan II ini telah sesuai dengan target dimana realisasinya 100% dari target 100%;

d. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 100%;

e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator “Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 88,40%;
   2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 98%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.

   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Semarang Tengah hanya SOP *One Stop Service* pada Kasi Pelayanan Publik dan SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Padahal pada Kasi yang lain seharusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi;

b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill, hard skill, social skill* dan *mental skill. Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM;

c. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal;
d. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
e. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan:
   a. Kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
   b. Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah;
   c. Masih tingginya penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti DBD dan TB;
   d. Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
   e. Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan
2. Peluang:
   a. Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;

b. Banyak fasilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat baik milik pemerintah maupun swasta sehingga Masyarakat mudah mengakses layanan Kesehatan;
c. Dukungan Camat dalam pengentasan stunting di wilayah Semarang Tengah melalui program koin untuk stunting, aplikasi data anak stunting, kegiatan -kegiatan di rumah inklusi yang meliputi pemberian makanan tambahan, pemeriksaan Kesehatan dan pemberian edukasi tentang penanganan stunting;
d. PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
e. Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penangan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

- Kesehatan Ibu dan Anak

Dari segi Kesehatan ibu dan anak, meskipun capaian Kecamatan Semarang Tengah cenderung membaik, namun masih perlu upaya penekanan kasus, khususnya untuk stunting. Jumlah masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi kota Semarang khususnya kecamatan Semarang Tengah terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak merupakan pekerjaan lintas sektoral, sampai saat ini selain terkendala oleh rendahnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

- Penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan

Kondisi Kecamatan Semarang Tengah yang padat penduduk dan di sebagian wilayah masih kumuh, memicu peningkatan kasus penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan misalnya DBD dan TB. Sedangkan untuk penyakit degeneratif semakin meningkatkan seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mulai berubah dan menurunnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

- Kesiapan penanganan Wabah

Kesiapan kecamatan Semarang Tengah dalam penanganan wabah masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya komplain terkait data penerima bantuan terdampak pandemi covid, rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan di masa pandemi dan kesediaan untuk di vaksin.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini dibutuhkan agar masyarakat di kecamatan Semarang Tengah dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Dengan hal ini maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

- Ancaman Penurunan Tingkat Kesejahteraan

Dampak pandemi covid-19 juga memunculkan ancaman baru yaitu penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan merumahkan pekerja sampai dengan PHK yang diambil oleh pabrik maupun perkantoran dalam kurun waktu maret – Juli 2020 di Kota Semarang. Kebijakan tersebut menyebabkan pendapatan berkurang namun pengeluaran rumah tangga tetap bahkan cenderung naik karena semua aktivitas dilakukan dari rumah. Oleh karena itu Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang, dituntut untuk sigap dalam menghadapi permasalahan dilapangan terkait penyaluran bantuan baik dalam bentuk uang atau sembako yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemenuhan *basic needs* masyarakat, sehingga penurunan tingkat kesejahteraan dapat diminimalisir. Validasi dan verifikasi data penerima bantuan masih terus dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

- Nilai budaya dan karakter masyarakat

Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Jumlah pelaksanaan kegiatan dibidang tersebut cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat dirasa penting, agar generasi muda tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter leluhur bangsa ditengah arus globalisasi.

3. Peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM

Keberadaan UMKM merupakan sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan umkm masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya

terkait pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah menjadi langkah awal yang berpengaruh terhadap produktivitas, kualitas produk dan manajemen pengelolaan.

4. Penguatan ketahanan pada level individu dan komunitas

Ketahanan pada level individu diartikan sebagai kemampuan individu untuk menahan dan beradaptasi dari segala guncangan maupun tekanan serta Kembali menuju keadaan yang lebih baik melalui penanggulangan dan strategi efektif. Kapasitas individu merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi tersebut dimana tata nilai yang dianut, tingkat pendidikan yang dicapai, ketrampilan yang dimiliki serta kualitas Kesehatan tiap individu haruslah dalam kondisi yang ideal. Rendahnya kondisi setiap komponen yang dimiliki tiap individu ditambah penyediaan pelayanan yang belum merata oleh Pemerintah akan menghambat tercapainya individu yang tangguh.

Ketahanan pada level komunitas lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya sebagai bentuk adaptasi dan mempertahankan dari segala guncangan maupun tekanan sambil membangun Kembali fisik dan ekonomi. Berbagai macam sumber daya yang dialokasikan meliputi sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan , pemanfaatan ruang dan pangan haruslah disertai kapasitas masyarakat yang mumpuni. Contohnya ketika pandemi berlangsung tidak sedikit usaha-usaha masyarakat yang terpaksa gulung tikar. Melalui pengembangan kapasitas, diharapkan masyarakat lebih tangguh dengan tingkat adaptasi yang lebih tinggi dan adaptif.

5. Penyelenggaraan Good Governance

Penyelenggaraan good governance merupakan solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi dan supremasi hukum. Terkait hal tersebut, ada beberapa bidang yang harus dibenahi antara lain pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dari sisi pengelolaan keuangan, upaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu dan akuntabel. Standar pelayanan minimal mesti dicapai sesuai target sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan public telah tercapai. Di sisi lain, terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adanya pandemi juga menambah tantangan bagi pemerintah kota untuk

lebih menjaga ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan aktivitas dan protokol lain yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					KECAMATAN SEMARANG TENGAH					
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec.SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 persen	24.401.657.809,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec.SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 persen	24.401.657.809,82	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	21 dokumen	65.885.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	21 dokumen	65.885.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.175.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.175.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.650.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 dokumen	4.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	4.650.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.766.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.766.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	1.856.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	1.856.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	9.825.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	9.825.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2.961.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2.961.400,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec	8 dokumen	22.329.492.631,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan	8 dokumen	22.329.492.631,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Smg Tengah)					Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan	20.908.126.981,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan	20.908.126.981,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.414.781.450,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.414.781.450,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.261.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.261.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	2.511.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	2.511.400,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	811.400,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	811.400,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100 dokumen	225.242.149,42	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100 dokumen	225.242.149,42	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	19.984.414,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	19.984.414,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	7.421.414,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	7.421.414,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	80.325.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	80.325.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	110.011.321,42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	110.011.321,42	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah	100 persen	1.018.647.123,40	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah	100 persen	1.018.647.123,40	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1.018.647.123,40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1.018.647.123,40	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa	100 persen	269.572.522,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100 persen	269.572.522,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kantor (kec Smg Tengah)								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	129.572.522,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	129.572.522,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100 persen	492.817.984,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100 persen	492.817.984,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit	334.228.059,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit	334.228.059,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	133.589.925,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	133.589.925,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 unit	2.756.602.289,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 unit	2.756.602.289,10	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	13.468.188,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	13.468.188,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1.500.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1.500.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	11.968.188,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	11.968.188,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	2.717.034.101,10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	2.717.034.101,10	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	1.382.930.626,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	1.382.930.626,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	93.081.300,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	93.081.300,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.765.040,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.765.040,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 laporan	86.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	86.500.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wilayah Kecamatan Gabahan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan Gabahan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.427.265,10	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.427.265,10	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	94.093.100,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	94.093.100,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	88.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	1 laporan	88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 laporan	88.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wilayah Kecamatan Kauman		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan Kauman		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	92.370.100,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	92.370.100,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	88.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	91.370.100,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	91.370.100,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.500.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.996.570,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	87.996.570,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	26.100.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	26.100.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	26.100.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	26.100.000,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 persen	41.467.495.214,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 persen	41.467.495.214,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	41.163.808.756,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	41.163.808.756,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 lembaga kemasyarakatan	42.780.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 lembaga kemasyarakatan	42.780.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	999.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	999.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	952.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	952.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	951.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	951.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	951.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	770.891.597,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	770.891.597,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.110.010.472,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.110.010.472,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.806.906.294,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.806.906.294,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.100.782.070,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.100.782.070,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 pokmas/ ormas	1.556.218.300,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 pokmas/ ormas	1.556.218.300,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.253.014.340,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.253.014.340,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.714.859.680,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.714.859.680,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.097.212.703,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.097.212.703,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.235.812.600,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.235.812.600,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.283.792.800,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.283.792.800,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.014.857.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.014.857.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.797.567.200,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.797.567.200,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.473.685.200,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.473.685.200,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.705.252.060,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.705.252.060,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.757.842.240,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	1.757.842.240,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.177.324.200,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	2.177.324.200,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	303.686.458,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	303.686.458,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	116.793.600,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	116.793.600,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	7.750.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	7.750.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	179.142.858,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	179.142.858,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 persen	33.600.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 persen	33.600.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27 angka	33.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27 angka	33.600.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	33.600.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	33.600.000,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 persen	80.900.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 persen	80.900.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	80.900.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	80.900.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	80.900.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	80.900.000,00	
			TOTAL		68.740.255.312,92			TOTAL		68.740.255.312,92	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yaitu:

SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator : Nilai AKIP
SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator : Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)
SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator : 1. Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja	Nilai AKIP	Angka	79,2

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
pelayanan perangkat daerah			
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	Persen	100
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	98
Tercapainya Target PAD Kota Semarang pada Kecamatan Semarang Tengah	PAD Kota Semarang pada Kecamatan Semarang Tengah	Rp	53.568.000

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Nilai AKIP, Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec.SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 persen	100 persen	100 persen	23.886.915.758,00	23.886.915.758,00	24.401.657.809,82	APBD	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	94.196.000,00	94.196.000,00	65.885.400,00	APBD	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	56.611.000,00	56.611.000,00	40.175.200,00	APBD	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	4.650.000,00	APBD	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	4.650.000,00	APBD	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.580.000,00	3.580.000,00	1.766.900,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	3.580.000,00	3.580.000,00	1.856.900,00	APBD	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16.385.000,00	16.385.000,00	9.825.000,00	APBD	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3.240.000,00	3.240.000,00	2.961.400,00	APBD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	22.205.975.280,00	22.205.975.280,00	22.329.492.631,00	APBD	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan	105 orang/bulan	105 orang/bulan	21.416.935.280,00	21.416.935.280,00	20.908.126.981,00	APBD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	779.510.000,00	779.510.000,00	1.414.781.450,00	APBD	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.660.000,00	3.660.000,00	3.261.400,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4.540.000,00	4.540.000,00	2.511.400,00	APBD	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.330.000,00	1.330.000,00	811.400,00	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100 persen	100 persen	100 dokumen	236.292.828,00	236.292.828,00	225.242.149,42	APBD	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	APBD	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	19.984.414,00	APBD	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	14.842.828,00	14.842.828,00	7.421.414,00	APBD	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	80.325.000,00	80.325.000,00	80.325.000,00	APBD	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	103.625.000,00	103.625.000,00	110.011.321,42	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Konsultasi SKPD								
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	534.997.613,00	534.997.613,00	1.018.647.123,40	APBD	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	25 unit	534.997.613,00	534.997.613,00	1.018.647.123,40	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100 persen	100 persen	100 persen	269.572.522,00	269.572.522,00	269.572.522,00	APBD	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	APBD	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	129.572.522,00	129.572.522,00	129.572.522,00	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100 persen	100 persen	100 persen	545.881.515,00	545.881.515,00	492.817.984,00	APBD	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit	52 unit	52 unit	387.291.590,00	387.291.590,00	334.228.059,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	133.589.925,00	133.589.925,00	133.589.925,00	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 persen	94 persen	94 unit	3.774.084.156,00	3.774.084.156,00	2.756.602.289,10	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 persen	21.500.000,00	21.500.000,00	13.468.188,00	APBD	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	APBD	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.968.188,00	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	3.722.584.156,00	3.722.584.156,00	2.717.034.101,10	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.372.584.156,00	2.372.584.156,00	1.382.930.626,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Miroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	93.081.300,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Brumbungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.500.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jagalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.765.040,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kranggan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.000.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gabahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	86.500.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.500.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.427.265,10	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pandansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	94.093.100,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	88.000.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kauman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	88.000.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Purwodinatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	92.370.100,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangkidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	88.000.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	91.370.100,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekunden	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.500.000,00	APBD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pendrikan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	87.996.570,00	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	APBD	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 persen	94 persen	94 persen	27.743.892.858,00	27.743.892.858,00	41.467.495.214,00	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	827 kegiatan	27.555.000.000,00	27.555.000.000,00	41.163.808.756,00	APBD	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	58.000.000,00	58.000.000,00	42.780.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	4 unit	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	999.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Miroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	952.000.000,00	952.000.000,00	952.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brumbungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	9 unit	9 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	8 unit	8 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	8 unit	8 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	11 unit	11 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	8 unit	8 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	6 unit	6 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	9 unit	9 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	9 unit	9 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	13 unit	13 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	9 unit	9 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekunden	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	9 unit	9 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	11 unit	11 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	6 unit	6 unit	951.000.000,00	951.000.000,00	951.000.000,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	900.000.000,00	900.000.000,00	770.891.597,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	907.000.000,00	907.000.000,00	2.110.010.472,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	789.400.000,00	789.400.000,00	1.806.906.294,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	931.000.000,00	931.000.000,00	2.100.782.070,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	711.400.000,00	711.400.000,00	1.556.218.300,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	982.000.000,00	982.000.000,00	2.253.014.340,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	766.600.000,00	766.600.000,00	1.714.859.680,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	524.200.000,00	524.200.000,00	1.097.212.703,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	579.400.000,00	579.400.000,00	1.235.812.600,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	606.400.000,00	606.400.000,00	1.283.792.800,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	512.800.000,00	512.800.000,00	1.014.857.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	806.200.000,00	806.200.000,00	1.797.567.200,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	673.000.000,00	673.000.000,00	1.473.685.200,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	762.400.000,00	762.400.000,00	1.705.252.060,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	786.400.000,00	786.400.000,00	1.757.842.240,00	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	950.800.000,00	950.800.000,00	2.177.324.200,00	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	188.892.858,00	188.892.858,00	303.686.458,00	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	127.000.000,00	127.000.000,00	116.793.600,00	APBD	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	54.142.858,00	54.142.858,00	179.142.858,00	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 persen	16 persen	16 persen	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27 angka	27 angka	27 angka	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	APBD	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 persen	50 persen	50 persen	82.400.000,00	82.400.000,00	80.900.000,00	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	82.400.000,00	82.400.000,00	80.900.000,00	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	45 orang	45 orang	82.400.000,00	82.400.000,00	80.900.000,00	APBD	
JUMLAH						55.520.892.772	55.520.892.772	68.740.255.312,92		

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

41. KECAMATAN GUNUNGPATI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Rencana Strategis), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Rencana Kerja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

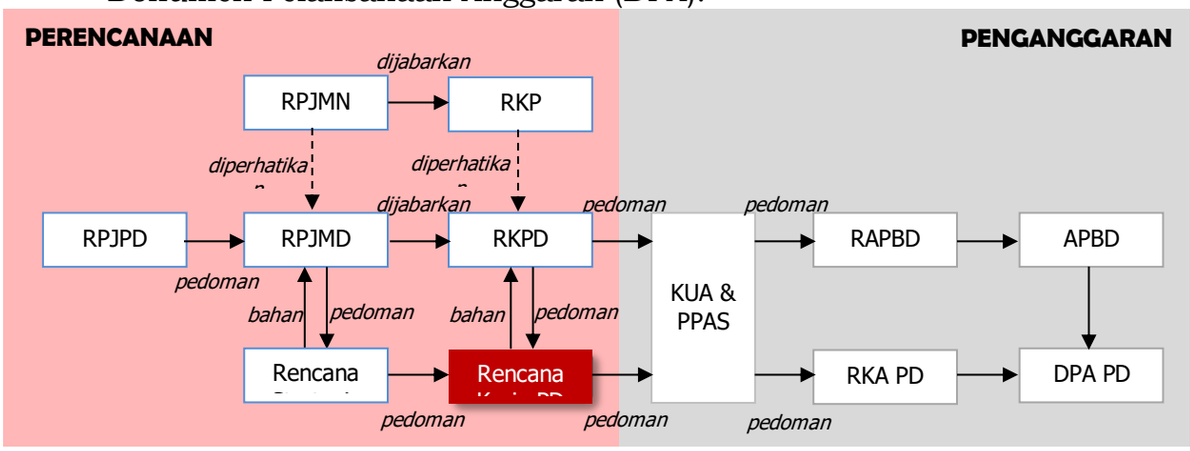

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja PD

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Semarang Tahun 2025 serta Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025 serta (3) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Rencana Kerja Perubahan disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Rencana Kerja Perubahan. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
l. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);

v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43)

y. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

z. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

ö. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
cc. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
dd. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2024 Nomor 35) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34)
ee. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47);
ff. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
gg. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
hh. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 000.7.2.4/57 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Kualitas Rencana Kerja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Rencana Kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Target Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
	URUSAN : KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GUNUNG PATI)							
		-	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GUNUNG PATI)							
		-	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GUNUNG PATI)							
			Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	500,00%	300,00%	100,00%	54,84%	54,84 %	354,84%	70,97 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	18 Dokumen	60,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Dokumen pelaporan	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	80,00 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	6 Dokumen	60,00 %
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	3 Dokumen	60,00 %
		- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- dokumen perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	3 Dokumen	60,00 %
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	80,00 %
		- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	dokumen perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	3 Dokumen	60,00 %
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	3 Dokumen	60,00 %
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	80,00 %
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	500,00%	300,00%	100,00%	54,84%	54,84 %	354,84%	70,97 %
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %	10 Dokumen	66,67 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	500%	300%	100%	100%	100,00 %	400%	80,00 %
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		105 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	100,00 %		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	500%	300%	100%	50%	50,00 %	350%	70,00 %
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		36 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00 %		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	4 Laporan	80,00 %
		- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	- laporan keuangan semesteran	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	3 Laporan	60,00 %
		- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- laporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	80,00 %
		- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00 %	42 Bulan	70,00 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Jenis	60 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100,00 %	80 Jenis	80,00 %
		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	150 Jenis	90 Jenis	26 Jenis	0 Jenis	0,00%	90 Jenis	60,00 %
		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24 Paket	7 Paket	0 Paket	0,00%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12500 Jenis	7500 Jenis	3333 Jenis	1667 Jenis	50,00 %	9167 Jenis	73,33 %
		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 Paket	4 Paket	2 Paket	50,00 %		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 Jenis	15 Jenis	13 Jenis	8 Jenis	60,00 %	23 Jenis	90,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6 Paket	5 Paket	3 Paket	60,00 %		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang berkunjung	16500 Orang	9900 Orang	3300 Orang	1650 Orang	50,00 %	11550 Orang	70,00 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	125 Kegiatan	75 Kegiatan	25 Kegiatan	13 Orang	50,00 %	88 Kegiatan	70,00 %
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	50 Jenis	30 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0,00%	30 Jenis	60,00 %
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		30 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500,00%	300,00%	100,00%	0,00%	0,00%	300,00%	60,00 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- tersedianya peralatan dan mesin lainnya	25 Jenis	15 Jenis	13 Jenis	0 Jenis	0,00%	15 Jenis	60,00 %
		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya kebutuhan jasa kantor	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00 %	42 Bulan	70,00 %
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	75 Jenis	45 Jenis	21 Jenis	12 Jenis	57,14 %	57 Jenis	76,00 %
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	57,14 %		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	275 Unit	165 Unit	53 Unit	53 Unit	100,00 %	218 Unit	79,27 %
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		114 Unit	53 Unit	53 Unit	100,00 %		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Gedung	9 Gedung	5 Gedung	0 Gedung	0,00%	9 Gedung	60,00 %
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	15 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0,00%	15 Jenis	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	15 Jenis	2 Jenis	0 Jenis	0,00%	15 Jenis	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00%		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	475,00%	283,86%	94,00%	94,74%	100,79 %	378,60%	79,71 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	15 Angka	3 Angka	2 Angka	1 Angka	50,00 %	4 Angka	26,67 %
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan		0 Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen		0 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00 %	7 Dokumen	70,00 %
		- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00 %		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00 %	7 Kegiatan	70,00 %
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluahan Mangunsari	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03		-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan							
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	500,00%	300,00%	100,00%	50,00%	50,00 %	350,00%	70,00 %
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00 %		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500,00%	300,00%	100,00%	67,00%	67,00 %	367,00%	73,40 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	-	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67 %	11 Kegiatan	73,33 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		9 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	66,67 %		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	500,00%	297,00%	100,00%	50,67%	50,67 %	347,67%	69,53 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1000 Kegiatan	450 Kegiatan	200 Kegiatan	112 Kegiatan	56,00 %	562 Kegiatan	56,20 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1000 Kegiatan	600 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100,00 %	800 Kegiatan	80,00 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		18 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100,00 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	70 Kegiatan	45 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00 %	60 Kegiatan	85,71 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		24 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	75 Kegiatan	33 Kegiatan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	33 Kegiatan	44,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30 Unit	11 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	40 Kegiatan	24 Kegiatan	11 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	24 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		27 Unit	12 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	75 Kegiatan	45 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00 %	55 Kegiatan	73,75 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		48 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	70 Kegiatan	42 Kegiatan	20 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	42 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30 Unit	14 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah	55 Kegiatan	33 Kegiatan	10 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	33 Kegiatan	60,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan							
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		51 Unit	15 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	60 Kegiatan	36 Kegiatan	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	36 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		42 Unit	11 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	60 Kegiatan	36 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00 %	47 Kegiatan	78,46 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		39 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	40 Kegiatan	24 Kegiatan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	24 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		24 Unit	12 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas	95 Kegiatan	57 Kegiatan	18 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	57 Kegiatan	60,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon							
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		42 Unit	13 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	70 Kegiatan	42 Kegiatan	11 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	42 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		36 Unit	9 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	45 Kegiatan	27 Kegiatan	8 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	27 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		39 Unit	12 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan gunungpati	90 Kegiatan	54 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100,00 %	71 Kegiatan	78,57 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		42 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	70 Kegiatan	42 Kegiatan	10 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	42 Kegiatan	60,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		48 Unit	11 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	90 Kegiatan	54 Kegiatan	17 Kegiatan	13 Kegiatan	76,92 %	67 Kegiatan	74,29 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		42 Unit	13 Unit	10 Unit	76,92 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	75 Kegiatan	45 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00 %	60 Kegiatan	80,00 %
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		45 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00 %		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	85 Kegiatan	51 Kegiatan	17 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	51 Kegiatan	60,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		42 Unit	14 Unit	0 Unit	0,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	295 Kegiatan	177 Kegiatan	54 Kegiatan	30 Kegiatan	54,55 %	207 Kegiatan	70,00 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		36 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	54,55 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	85 Kegiatan	51 Kegiatan	19 Kegiatan	10 Kegiatan	54,55 %	61 Kegiatan	72,00 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)		30 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	54,55 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	65 Kegiatan	39 Kegiatan	13 Kegiatan	5 Kegiatan	37,50 %	44 Kegiatan	67,50 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		24 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37,50 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	75 Kegiatan	45 Kegiatan	14 Kegiatan	8 Kegiatan	60,00 %	53 Kegiatan	70,91 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)		33 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	60,00 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	75 Kegiatan	45 Kegiatan	13 Kegiatan	6 Kegiatan	42,86 %	51 Kegiatan	67,50 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)		24 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	42,86 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	100 Kegiatan	60 Kegiatan	28 Kegiatan	18 Kegiatan	63,64 %	78 Kegiatan	77,50 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		24 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	63,64 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	95 Kegiatan	57 Kegiatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	37,50 %	63 Kegiatan	66,00 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)		30 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37,50 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	75 Kegiatan	45 Kegiatan	17 Kegiatan	8 Kegiatan	45,45 %	53 Kegiatan	70,00 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)		30 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	45,45 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	70 Kegiatan	42 Kegiatan	16 Kegiatan	7 Kegiatan	44,44 %	49 Kegiatan	70,00 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		24 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	44,44 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	65 Kegiatan	39 Kegiatan	31 Kegiatan	21 Kegiatan	68,42 %	60 Kegiatan	92,50 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)		24 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	68,42 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	70 Kegiatan	45 Kegiatan	20 Kegiatan	3 Kegiatan	16,67 %	48 Kegiatan	69,05 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)		27 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	16,67 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	55 Kegiatan	33 Kegiatan	11 Kegiatan	8 Kegiatan	71,43 %	41 Kegiatan	74,29 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		21 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	71,43 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	70 Kegiatan	42 Kegiatan	11 Kegiatan	3 Kegiatan	22,22 %	45 Kegiatan	63,64 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)		33 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	22,22 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	90 Kegiatan	54 Kegiatan	29 Kegiatan	16 Kegiatan	53,85 %	70 Kegiatan	77,50 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)		24 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	53,85 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	55 Kegiatan	33 Kegiatan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	15,38 %	35 Kegiatan	63,33 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		36 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	15,38 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	80 Kegiatan	48 Kegiatan	14 Kegiatan	4 Kegiatan	25,00 %	52 Kegiatan	64,44 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)		27 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	25,00 %		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	60 Kegiatan	36 Kegiatan	13 Kegiatan	8 Kegiatan	60,00 %	44 Kegiatan	73,33 %
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)		27 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	60,00 %		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00 %	15 Dokumen	50,00 %
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75,00 %	15 Dokumen	75,00 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		12 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sukorejo)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sadeng)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kandri)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sekaran)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		yang dilaporkan (Pongangan)							
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kalisegoro)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Jatirejo)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Ngijo)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Patemon)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Nongkosawit)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Cepoko)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Gunungpati)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Mangunsari)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Pakintelan)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Plalangan)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sumurrejo)	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	77,78 %	34 Dokumen	75,56 %
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)		27 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77,78 %		
7.01.03.2.03.02		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50,00 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	25 Kelurahan	3 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00 %	5 Kelurahan	20,00 %
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	25 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %	5 Kegiatan	20,00 %
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	150,00%	60,00%	25,00%	25,00%	100,00 %	85,00%	56,67 %
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25 Angka	12 Angka	4 Angka	2 Angka	50,00 %	14 Angka	56,00 %
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	65 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00 %	11 Kegiatan	16,92 %
		- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00 %		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	500,00%	285,00%	98,00%	0,00%	0,00%	285,00%	57,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/di Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9 = 5 + 7	10 = (9 / 4)
			pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	6 Kegiatan	40,00 %
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	3375 Orang	300 Orang	200 Orang	0 Orang	0,00%	300 Orang	8,89%
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional		300 Orang	200 Orang	0 Orang	0,00%		

Sumber: Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Sebagaimana tabel 2.1 di atas, Sampai pada triwulan II Tahun 2025, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melaksanakan 1 Urusan, 5 program, 13 Kegiatan dan 102 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampai pada triwulan II Tahun 2025 Sudah ada sub kegiatan yang telah tercapai realisasi 100 %, yaitu :
   1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   3) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
2. Sub kegiatan yang realisasinya masih 0 adalah :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2025
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo, Sadeng, Sekaran, Pongangan, Kalisegoro, Ngijo, Patemon, Nongkosawit, Cepoko, Mangunsari, dan Sumurejo) karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;
   m. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional karena dilaksanakan pada triwulan III 2025;

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan

Gunungpati Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
KECAMATAN GUNUNG PATI		Rp 34.271.720.572,00	Rp 12.942.536.286,00	37,76%
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 28.343.410.865,00	Rp 11.346.304.642,00	40,03%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 60.380.800,00	Rp 1.052.200,00	1,74%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 51.031.200,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.518.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.788.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.036.000,00	Rp 501.100,00	16,51%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 894.000,00	-	0,00%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 562.000,00	Rp 223.500,00	39,77%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.551.600,00	Rp 327.600,00	21,11%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 24.104.258.740,00	Rp 11.143.992.236,00	46,23%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 23.268.413.840,00	Rp 10.749.492.236,00	46,20%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 834.833.300,00	Rp 394.500.000,00	47,25%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 337.200,00	-	0,00%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 337.200,00	-	0,00%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 337.200,00	-	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.439.226.512,00	Rp 42.321.250,00	2,94%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 22.288.812,00	Rp 796.650,00	3,57%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 193.422.318,00	-	0,00%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 71.859.772,00	Rp 13.770.400,00	19,16%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 20.649.646,00	Rp 1.911.000,00	9,25%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 19.350.000,00	Rp 6.713.200,00	34,69%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 183.779.964,00	Rp 9.130.000,00	4,97%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 927.876.000,00	Rp 10.000.000,00	1,08%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.170.200.400,00	-	0,00%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.170.200.400,00	-	0,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 305.064.455,00	Rp 70.444.933,00	23,09%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 210.934.520,00	Rp 44.549.933,00	21,12%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 94.129.935,00	Rp 25.895.000,00	27,51%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.264.279.958,00	Rp 88.494.023,00	7,00%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 378.159.958,00	Rp 70.993.763,00	18,77%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 641.390.000,00	Rp 8.750.130,00	1,36%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 159.730.000,00	Rp 8.750.130,00	5,48%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 85.000.000,00	-	0,00%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.138.826.327,00	Rp 1.432.697.144,00	45,64%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 816.443.887,00	Rp 395.575.000,00	48,45%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 2.500.000,00	-	0,00%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 813.943.887,00	Rp 395.575.000,00	48,60%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 1.086.934.000,00	Rp 465.220.230,00	42,80%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 1.086.934.000,00	Rp 465.220.230,00	42,80%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 1.235.448.440,00	Rp 571.901.914,00	46,29%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 1.235.448.440,00	Rp 571.901.914,00	46,29%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.564.154.023,00	Rp 121.509.500,00	4,74%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.775.854.023,00	Rp 101.959.500,00	5,74%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 196.365.138,00	Rp 72.324.500,00	36,83%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.208.700.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 370.788.885,00	Rp 29.635.000,00	7,99%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 788.300.000,00	Rp 19.550.000,00	2,48%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 127.000.000,00	Rp 7.250.000,00	5,71%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 11.300.000,00	Rp 3.900.000,00	34,51%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 650.000.000,00	Rp 8.400.000,00	1,29%
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 111.129.357,00	Rp 9.575.000,00	8,62%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.129.357,00	Rp 9.575.000,00	8,62%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 111.129.357,00	Rp 9.575.000,00	8,62%
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 114.200.000,00	Rp 32.450.000,00	28,42%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 114.200.000,00	Rp 32.450.000,00	28,42%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp 114.200.000,00	Rp 32.450.000,00	28,42%
KELURAHAN SUKOREJO		Rp 3.082.000.000,00	Rp 850.648.603,00	27,60%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 98.000.000,00	Rp 27.144.054,00	27,70%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 98.000.000,00	Rp 27.144.054,00	27,70%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 98.000.000,00	Rp 27.144.054,00	27,70%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.984.000.000,00	Rp 823.504.549,00	27,60%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.332.600.000,00	Rp 34.379.549,00	2,58%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.228.000.000,00	-	0,00%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 104.600.000,00	Rp 34.379.549,00	32,87%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 1.651.400.000,00	Rp 789.125.000,00	47,79%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.651.400.000,00	Rp 789.125.000,00	47,79%
KELURAHAN SADENG		Rp 2.219.600.000,00	Rp 575.340.845,00	25,92%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 92.000.000,00	Rp 29.839.645,00	32,43%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 92.000.000,00	Rp 29.839.645,00	32,43%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 92.000.000,00	Rp 29.839.645,00	32,43%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.127.600.000,00	Rp 545.501.200,00	25,64%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.037.800.000,00	Rp 38.682.200,00	3,73%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 17.782.200,00	1,87%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 87.800.000,00	Rp 20.900.000,00	23,80%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 1.089.800.000,00	Rp 506.819.000,00	46,51%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.089.800.000,00	Rp 506.819.000,00	46,51%
KELURAHAN KANDRI		Rp 1.678.800.000,00	Rp 411.047.041,00	24,48%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 87.000.000,00	Rp 47.473.181,00	54,57%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 47.473.181,00	54,57%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 47.473.181,00	54,57%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.591.800.000,00	Rp 363.573.860,00	22,84%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.016.800.000,00	Rp 106.543.860,00	10,48%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 76.143.860,00	8,02%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 66.800.000,00	Rp 30.400.000,00	45,51%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 575.000.000,00	Rp 257.030.000,00	44,70%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 575.000.000,00	Rp 257.030.000,00	44,70%
KELURAHAN SEKARAN		Rp 1.881.800.000,00	Rp 466.759.824,00	24,80%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 89.000.000,00	Rp 34.813.524,00	39,12%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 89.000.000,00	Rp 34.813.524,00	39,12%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 89.000.000,00	Rp 34.813.524,00	39,12%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.792.800.000,00	Rp 431.946.300,00	24,09%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.046.200.000,00	Rp 105.571.300,00	10,09%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 76.321.300,00	8,03%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 96.200.000,00	Rp 29.250.000,00	30,41%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 746.600.000,00	Rp 326.375.000,00	43,71%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 746.600.000,00	Rp 326.375.000,00	43,71%
KELURAHAN PONGANGAN		Rp 1.934.200.000,00	Rp 361.319.827,00	18,68%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 88.000.000,00	Rp 27.855.317,00	31,65%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 27.855.317,00	31,65%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 27.855.317,00	31,65%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.846.200.000,00	Rp 333.464.510,00	18,06%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.224.400.000,00	Rp 47.824.510,00	3,91%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.145.000.000,00	Rp 26.574.510,00	2,32%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000,00	Rp 21.250.000,00	26,76%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 621.800.000,00	Rp 285.640.000,00	45,94%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 621.800.000,00	Rp 285.640.000,00	45,94%
KELURAHAN KALISEGORO		Rp 1.660.200.000,00	Rp 308.130.082,00	18,56%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 87.000.000,00	Rp 28.711.112,00	33,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 28.711.112,00	33,00%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 28.711.112,00	33,00%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.573.200.000,00	Rp 279.418.970,00	17,76%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.029.400.000,00	Rp 53.818.970,00	5,23%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 17.712.270,00	1,86%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000,00	Rp 36.106.700,00	45,47%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 543.800.000,00	Rp 225.600.000,00	41,49%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 543.800.000,00	Rp 225.600.000,00	41,49%
KELURAHAN JATIREJO		Rp 1.490.600.000,00	Rp 276.569.230,00	18,55%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 86.000.000,00	Rp 21.510.870,00	25,01%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 86.000.000,00	Rp 21.510.870,00	25,01%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 86.000.000,00	Rp 21.510.870,00	25,01%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.404.600.000,00	Rp 255.058.360,00	18,16%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.016.800.000,00	Rp 95.458.360,00	9,39%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 76.613.360,00	8,06%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 66.800.000,00	Rp 18.845.000,00	28,21%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 387.800.000,00	Rp 159.600.000,00	41,16%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 387.800.000,00	Rp 159.600.000,00	41,16%
KELURAHAN NGIJO		Rp 1.670.800.000,00	Rp 358.980.629,00	21,49%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 85.000.000,00	Rp 22.507.599,00	26,48%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 85.000.000,00	Rp 22.507.599,00	26,48%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 85.000.000,00	Rp 22.507.599,00	26,48%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.585.800.000,00	Rp 336.473.030,00	21,22%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.042.000.000,00	Rp 100.522.030,00	9,65%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 66.922.030,00	7,04%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 92.000.000,00	Rp 33.600.000,00	36,52%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 543.800.000,00	Rp 235.951.000,00	43,39%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 543.800.000,00	Rp 235.951.000,00	43,39%
KELURAHAN PATEMON		Rp 1.950.400.000,00	Rp 529.022.875,00	27,12%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 88.000.000,00	Rp 38.240.248,00	43,45%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 38.240.248,00	43,45%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 38.240.248,00	43,45%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.862.400.000,00	Rp 490.782.627,00	26,35%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.037.800.000,00	Rp 104.029.880,00	10,02%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 65.708.260,00	6,92%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 87.800.000,00	Rp 38.321.620,00	43,65%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 824.600.000,00	Rp 386.752.747,00	46,90%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 824.600.000,00	Rp 386.752.747,00	46,90%
KELURAHAN NONGKOSAWIT		Rp 1.714.200.000,00	Rp 333.522.660,00	19,46%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 87.000.000,00	Rp 30.276.050,00	34,80%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 30.276.050,00	34,80%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 30.276.050,00	34,80%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.627.200.000,00	Rp 303.246.610,00	18,64%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.021.000.000,00	Rp 44.571.610,00	4,37%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 26.696.610,00	2,81%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 71.000.000,00	Rp 17.875.000,00	25,18%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 606.200.000,00	Rp 258.675.000,00	42,67%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 606.200.000,00	Rp 258.675.000,00	42,67%
KELURAHAN CEPOKO		Rp 1.526.000.000,00	Rp 262.630.660,00	17,21%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 86.000.000,00	Rp 27.413.350,00	31,88%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 86.000.000,00	Rp 27.413.350,00	31,88%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 86.000.000,00	Rp 27.413.350,00	31,88%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.440.000.000,00	Rp 235.217.310,00	16,33%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.021.000.000,00	Rp 64.117.310,00	6,28%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 26.574.510,00	2,80%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 71.000.000,00	Rp 37.542.800,00	52,88%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 419.000.000,00	Rp 171.100.000,00	40,84%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 419.000.000,00	Rp 171.100.000,00	40,84%
KELURAHAN GUNUNGPATI		Rp 2.127.400.000,00	Rp 526.634.344,00	24,75%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 91.000.000,00	Rp 28.871.234,00	31,73%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 91.000.000,00	Rp 28.871.234,00	31,73%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 91.000.000,00	Rp 28.871.234,00	31,73%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.036.400.000,00	Rp 497.763.110,00	24,44%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.071.400.000,00	Rp 61.488.110,00	5,74%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 971.000.000,00	Rp 26.641.110,00	2,74%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 100.400.000,00	Rp 34.847.000,00	34,71%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 965.000.000,00	Rp 436.275.000,00	45,21%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 965.000.000,00	Rp 436.275.000,00	45,21%
KELURAHAN MANGUNSARI		Rp 1.786.000.000,00	Rp 439.372.316,00	24,60%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 88.000.000,00	Rp 39.163.421,00	44,50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 39.163.421,00	44,50%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 39.163.421,00	44,50%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.698.000.000,00	Rp 400.208.895,00	23,57%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.029.400.000,00	Rp 98.781.210,00	9,60%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 75.831.210,00	7,98%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000,00	Rp 22.950.000,00	28,90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 668.600.000,00	Rp 301.427.685,00	45,08%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 668.600.000,00	Rp 301.427.685,00	45,08%
KELURAHAN PAKINTELAN		Rp 1.723.600.000,00	Rp 891.499.412,00	51,72%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 88.000.000,00	Rp 27.896.429,00	31,70%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 27.896.429,00	31,70%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000,00	Rp 27.896.429,00	31,70%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.635.600.000,00	Rp 863.602.983,00	52,80%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.029.400.000,00	Rp 590.177.983,00	57,33%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 572.227.983,00	60,23%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000,00	Rp 17.950.000,00	22,61%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 606.200.000,00	Rp 273.425.000,00	45,10%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 606.200.000,00	Rp 273.425.000,00	45,10%
KELURAHAN PLALANGAN		Rp 1.624.800.000,00	Rp 359.831.180,00	22,15%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 87.000.000,00	Rp 38.528.520,00	44,29%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 38.528.520,00	44,29%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 87.000.000,00	Rp 38.528.520,00	44,29%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.537.800.000,00	Rp 321.302.660,00	20,89%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.025.200.000,00	Rp 95.752.660,00	9,34%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 75.652.660,00	7,96%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 75.200.000,00	Rp 20.100.000,00	26,73%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 512.600.000,00	Rp 225.550.000,00	44,00%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 512.600.000,00	Rp 225.550.000,00	44,00%
KELURAHAN SUMURREJO		Rp 1.834.800.000,00	Rp 449.303.773,00	24,49%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 90.000.000,00	Rp 41.324.813,00	45,92%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 90.000.000,00	Rp 41.324.813,00	45,92%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 90.000.000,00	Rp 41.324.813,00	45,92%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.744.800.000,00	Rp 407.978.960,00	23,38%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 1.029.400.000,00	Rp 77.653.960,00	7,54%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000,00	Rp 43.146.960,00	4,54%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000,00	Rp 34.507.000,00	43,46%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 715.400.000,00	Rp 330.325.000,00	46,17%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 715.400.000,00	Rp 330.325.000,00	46,17%
JUMLAH		Rp 64.176.920.572,00	Rp 20.343.149.587,00	31,70%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 102 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebesar Rp 64.176.920.572,00 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.343.149.587,00 atau 33%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 43.833.770.985,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR		TARGET RENCANA STRATEGIS						REALISASI					PROYEKSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Triwulan II)	2025
TUJUAN :															
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati		86,68	88,00	88,50	89,00	89,50	90,50	0,93	0,93	0,95	94,62	94,74	95,00
SASARAN :															
1	Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%
2	Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		95%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%
3	Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	1	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,68%	83,36%	85,04%	86,40%	88,40%	90,08%	81,68%	83,36%	85,04%	86,72%	44,20%	88,40%
		2	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	98,00%	100,00%	87,00%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai, dimana realisasinya sebesar 94,74 dari target sebesar 89,5 atau mencapai 105,85%;
b. Sasaran 1 ”Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” dengan indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” dimana sampai dengan semester I Tahun 2025 telah terealisasi 50 Persen dari target tahun 2025 sebesar 100 % atau mencapai 50 %;
c. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” dimana pada semester I Tahun 2025 target yang dicapai adalah 50 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100 % atau mencapai 50 %;
d. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator sebagai berikut :
    1) Indikator “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dimana target pada tahun 2025 adalah 88,40% dan pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar 44,20 % atau mencapai 50 %;
    2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” dimana target pada tahun 2024 adalah 98 % dan pada Semester I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 0 % atau mencapai 0 %, karena akan dilaksanakan pada TW III tahun 2025.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunungpati sampai dengan Semester I Tahun 2025 sudah berjalan cukup baik dan target yang ditetapkan sudah dicapai sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini dapat dilihat pada survey kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Rencana Kerja sudah cukup baik, akan tetapi kedepannya masih perlu diupayakan agar semua usulan dapat terakomodir. Dalam mengakomodir usulan musrenbang perlu lebih meningkatkan keterlibatan semua pihak, baik dari organisasi kemasyarakatan,

lembaga kemasyarakatan serta tokoh agama dan masyarakat terutama keterlibatan perempuan, lansia serta forum anak agar mewujudkan perencanaan penyelenggaraan pelayanan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan diantaranya:

1. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang perbukitan dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan;
2. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
    Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia yang berkembang sangat pesat menyebabkan semua orang mudah dan memiliki akses untuk mengetahui informasi apapun secara cepat dan *uptodate.* Konsekuensinya masyarakat menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap berbagai hal. Untuk itu, dalam kegiatan pelayanan kecamatan Gunungpati harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk semua kegiatan, program kerja, inovasi maupun aduan di masyarakat.
    2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
    Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
    Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut:

1) Pencapaian Visi dan Misi Walikota
Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Gunungpati perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2025 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati 2021-2026 serta Rencana Kerja Perubahan kecamatan Gunungpati Tahun 2025.
3) Pengakomodiran Usulan Musrenbang

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender

4) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan.
Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsive gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI							Rp77.092.648.583,24	KECAMATAN GUNUNGPATI						Rp77.092.648.583,24
	NON URUSAN							NON URUSAN						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Rp27.059.617.780,24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Rp27.059.617.780,24
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	Rp3.014.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	Rp3.014.800,00
			Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen				Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp539.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Rencana Kerja dan Rencana Strategis	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp539.200,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
										SKPD) yang disusun				
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen					KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp506.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp506.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp596.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp596.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp506.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp506.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	Rp298.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	1 Dokumen	Rp298.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
					Perubahan DPA-SKPD							n Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp224.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp224.800,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp344.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp344.800,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Rp23.961.208.711,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Rp23.961.208.711,00
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	Rp22.512.665.461,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	Rp22.512.665.461,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	Rp1.448.206.050,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras	12 Dokumen	Rp1.448.206.050,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			pelaksanaan Tugas		Pelaksanaan Tugas ASN					pelaksanaan Tugas		i Pelaksanaan Tugas ASN		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp112.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp112.400,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp112.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp112.400,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp112.400,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp112.400,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum		Waktu pelaksanaan	12 Bulan	Waktu pelaksanaan	12 Bulan	Rp1.040.692.527,24	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan	12 Bulan	Waktu pelaksanaan	12 Bulan	Rp1.040.692.527,24

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Perangkat Daerah		adminsitrasi umum		adminsitrasi umum					adminsitrasi umum		adminsitrasi umum		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp22.288.812,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp22.288.812,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp11.350.904,40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp11.350.904,40
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp65.831.129,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp65.831.129,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp5.164.243,64	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp5.164.243,64
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp19.350.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp19.350.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	Rp85.373.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	Rp85.373.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
					Konsultasi SKPD							Konsultasi SKPD		
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp831.334.438,20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp831.334.438,20
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Rp383.553.509,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Rp383.553.509,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp383.553.509,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp383.553.509,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Rp279.972.325,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Rp279.972.325,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp210.934.520,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp210.934.520,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	7 Laporan	Rp69.037.805,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	7 Laporan	Rp69.037.805,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
					Kantor yang Disediakan							Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100.00	Rp1.391.175.908,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Rp1.391.175.908,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	Rp315.775.908,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	Rp315.775.908,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Rp830.670.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Rp830.670.000,00
7.01.01.2.09.1000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp159.730.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp159.730.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	KECAMATAN	jumlah pemeliharaan sarana dan	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	Rp85.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	KECAMATAN	jumlah pemeliharaan sarana dan	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	Rp85.000.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	GUNUNGPATI	prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	GUNUNGPATI	prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Rp3.537.164.009,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Rp3.537.164.009,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Rp718.998.457,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Rp718.998.457,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp2.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp2.500.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraa	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	2 Dokumen	Rp716.498.457,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraa	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah	2 Dokumen	Rp716.498.457,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			n Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		di Tingkat Kecamatan					n Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		an di Tingkat Kecamatan		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp1.905.227.062,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp1.905.227.062,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp606.396.833,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp606.396.833,00
			Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan						Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp93.193.292,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp93.193.292,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	KELURAHAN SADENG	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	Rp81.832.290,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	KELURAHAN SADENG	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa	12 Laporan	Rp81.832.290,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Sadeng		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Sadeng		n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp77.466.230,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp77.466.230,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp83.677.664,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp83.677.664,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp79.924.333,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp79.924.333,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	Rp78.662.047,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	Rp78.662.047,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
					Wilayah Kecamatan							Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp80.223.237,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp80.223.237,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp78.442.106,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp78.442.106,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp81.914.967,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp81.914.967,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp77.678.055,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp77.678.055,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp78.742.570,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp78.742.570,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp83.471.578,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp83.471.578,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp79.998.242,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp79.998.242,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp81.579.531,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp81.579.531,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	Rp79.506.811,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan	100%	Jumlah Laporan Peningkata	12 Laporan	Rp79.506.811,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PLALANGAN	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PLALANGAN	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan		n Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp82.517.276,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp82.517.276,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Rp912.938.490,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelengg araan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Camat	100%	Rp912.938.490,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiata n	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	Rp912.938.490,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiata n	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Kewenanga n Lain yang Dilimpahka n	3 Laporan	Rp912.938.490,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	Rp46.219.710.476,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	Rp46.219.710.476,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan	200 Kegiata n	Jumlah Kegiatan	200 Kegiata n	Rp18.507.022.775,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan	200 Kegiata n	Jumlah Kegiatan Pemberday	200 Kegiatan	Rp18.507.022.775,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			Pemberdayaan Kelurahan		Pemberdayaan Kelurahan					Pemberdayaan Kelurahan		aan Kelurahan		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp108.707.497,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp108.707.497,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	Rp1.208.700.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	Rp1.208.700.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp1.228.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp1.228.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	Rp950.000.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Prasarana Kelurahan		Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan		Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Rp1.145.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Rp1.145.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	Rp950.000.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp971.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp971.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Rp950.000.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			Pembangunan di Kelurahan							Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Rp950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Rp950.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp303.722.194,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp303.722.194,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp96.719.654,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberday	11 Ormas/ Pokmas	Rp96.719.654,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			Pembangunan di Kelurahan Sukorejo							Pembangunan di Kelurahan Sukorejo		aan Masyarakat di Kelurahan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp79.874.172,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp79.874.172,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	Rp56.347.970,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	Rp56.347.970,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	Rp87.240.455,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	Rp87.240.455,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp73.316.527,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	11 Ormas/ Pokmas	Rp73.316.527,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
												di Kelurahan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp71.038.700,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp71.038.700,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp73.711.180,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	Rp73.711.180,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	Rp79.514.800,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	Rp79.514.800,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Ormas/ Pokmas	Rp80.621.620,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Ormas/ Pokmas	Rp80.621.620,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Ormas/ Pokmas	Rp61.920.166,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Ormas/ Pokmas	Rp61.920.166,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	Rp63.224.320,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	Rp63.224.320,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	Rp89.606.415,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	Rp89.606.415,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	Rp66.265.836,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	Rp66.265.836,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	13 Ormas/ Pokmas	Rp70.520.649,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas	13 Ormas/ Pokmas	Rp70.520.649,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
		PAKINTELAN	Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				PAKINTELAN	Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan		yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp66.874.757,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	Rp66.874.757,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	Rp75.095.863,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	Rp75.095.863,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Rp27.712.687.701,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Rp27.712.687.701,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp122.191.417,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp122.191.417,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakata	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasy	Rp4.171.906.634,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakata	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasy	Rp4.171.906.634,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
			n yang dilaporkan		Diselenggarakan	arakatan				n yang dilaporkan		Diselenggarakan	arakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.638.138.494,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.638.138.494,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.325.889.228,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.325.889.228,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.741.604.334,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.741.604.334,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.434.777.324,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.434.777.324,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.237.252.963,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.237.252.963,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp802.018.435,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp802.018.435,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.237.111.160,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.237.111.160,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga	KELURAHAN	Jumlah jenis laporan lembaga	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakat	9 Lembaga	Rp1.912.715.284,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN	Jumlah jenis laporan lembaga	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyara	9 Lembaga Kemasy	Rp1.912.715.284,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Kemasyarakatan	PATEMON	kemasyarakatan yang dilaporkan		an yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan			PATEMON	kemasyarakatan yang dilaporkan		katan yang Diselenggarakan	arakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.391.879.415,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.391.879.415,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp908.896.290,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp908.896.290,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.289.126.367,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.289.126.367,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.593.242.428,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.593.242.428,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.370.078.209,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.370.078.209,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.106.589.939,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.106.589.939,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.675.305.150,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.675.305.150,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas	KECAMATAN	Jumlah Lembaga	2 Lembag	Jumlah Lembaga	2 Lembag	Rp11.300.000,00			Jumlah Lembaga	2 Lembag	Jumlah Lembaga	2 Lembaga	Rp11.300.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Lembaga Kemasyarakatan	GUNUNGPATI	Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	a Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	a Kemasyarakatan				Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	a Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	Rp742.664.630,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	Rp742.664.630,00
			Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan						Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	Rp135.306.318,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	Rp135.306.318,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Rp135.306.318,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Rp135.306.318,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4 Laporan	Rp135.306.318,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	4 Laporan	Rp135.306.318,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Wilayah Kecamatan				Vertikal di Wilayah Kecamatan							dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	Rp140.850.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	Rp140.850.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Rp140.850.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Rp140.850.000,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi	200 Orang	Rp140.850.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi	200 Orang	Rp140.850.000,00

Rancangan Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir					Indikator Rencana Strategis		Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan	
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		dan Ketahanan Nasional		dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional			Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n danKetahan an Nasional		

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Gunungpati maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati".

Dalam pencapaian tujuan tersebut ditetapkan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu :

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
c. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Indikator Sasaran :
   1) Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   2) Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Gunungpati akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	Angka	89,5
SASARAN :			
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	98%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Perubahan Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Gunungpati bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri

dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 102 sub kegiatan, yang terdiri dari 36 sub kegiatan penunjang, dan 76 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 77.092.648.583,24 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang..

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI					64.176.920.572,00	64.176.920.572,00	77.092.648.583,24		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	28.839.718.740,00	28.343.410.865,00	27.059.617.780,24		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	60.428.000,00	60.380.800,00	3.014.800,00		
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	51.078.400,00	51.031.200,00	539.200,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.518.000,00	1.518.000,00	506.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.788.000,00	1.788.000,00	596.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.036.000,00	3.036.000,00	506.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000,00	894.000,00	298.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	562.000,00	562.000,00	224.800,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.551.600,00	1.551.600,00	344.800,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	24.584.925.900,00	24.104.258.740,00	23.961.208.711,00		
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	23.753.433.000,00	23.268.413.840,00	22.512.665.461,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	830.481.300,00	834.833.300,00	1.448.206.050,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200,00	337.200,00	112.400,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200,00	337.200,00	112.400,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200,00	337.200,00	112.400,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.068.964.736,00	1.439.226.512,00	1.040.692.527,24		
7.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.288.812,00	22.288.812,00	22.288.812,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	764.236.700,00	193.422.318,00	11.350.904,40	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	71.984.568,00	71.859.772,00	65.831.129,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	22.185.740,00	20.649.646,00	5.164.243,64	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.350.000,00	19.350.000,00	19.350.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	183.779.964,00	183.779.964,00	85.373.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	985.138.952,00	927.876.000,00	831.334.438,20	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	555.885.691,00	1.170.200.400,00	383.553.509,00		
7.01.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	555.885.691,00	1.170.200.400,00	383.553.509,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	305.064.455,00	305.064.455,00	279.972.325,00		
7.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.934.520,00	210.934.520,00	210.934.520,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	94.129.935,00	94.129.935,00	69.037.805,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	1.264.449.958,00	1.264.279.958,00	1.391.175.908,00		
7.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	53 Unit	378.159.958,00	378.159.958,00	315.775.908,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	641.390.000,00	641.390.000,00	830.670.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	159.900.000,00	159.730.000,00	159.730.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	4.059.518.452,00	4.555.826.327,00	3.537.164.009,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	816.443.887,00	816.443.887,00	718.998.457,00		
7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	813.943.887,00	813.943.887,00	716.498.457,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.260.642.705,00	2.503.934.000,00	1.905.227.062,00		
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	843.642.705,00	1.086.934.000,00	606.396.833,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00	93.193.292,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	81.832.290,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	77.466.230,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000,00	89.000.000,00	83.677.664,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	79.924.333,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	78.662.047,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.000.000,00	86.000.000,00	80.223.237,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	78.442.106,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	81.914.967,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	77.678.055,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.000.000,00	86.000.000,00	78.742.570,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000,00	91.000.000,00	83.471.578,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)								
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.242,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	81.579.531,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	79.506.811,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	82.517.276,00	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	982.431.860,00	1.235.448.440,00	912.938.490,00		
7.01.02.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	982.431.860,00	1.235.448.440,00	912.938.490,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99,00%	99,00%	99,00%	31.052.354.023,00	31.052.354.023,00	46.219.710.476,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	18.269.854.023,00	18.786.454.023,00	18.507.022.775,00		
7.01.03.2.02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	196.365.138,00	196.365.138,00	108.707.497,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.208.700.000,00	1.208.700.000,00	1.208.700.000,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.228.000.000,00	1.228.000.000,00	1.228.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	971.000.000,00	971.000.000,00	971.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	370.788.885,00	370.788.885,00	303.722.194,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	104.600.000,00	96.719.654,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	87.800.000,00	79.874.172,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	66.800.000,00	56.347.970,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	96.200.000,00	87.240.455,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	73.316.527,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	71.038.700,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	66.800.000,00	73.711.180,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	92.000.000,00	79.514.800,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	87.800.000,00	80.621.620,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	71.000.000,00	61.920.166,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	71.000.000,00	63.224.320,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.400.000,00	89.606.415,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	66.265.836,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	70.520.649,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	75.200.000,00	66.874.757,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	75.095.863,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12.782.500.000,00	12.265.900.000,00	27.712.687.701,00		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	127.000.000,00	122.191.417,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000,00	1.651.400.000,00	4.171.906.634,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000,00	1.089.800.000,00	2.638.138.494,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000,00	575.000.000,00	1.325.889.228,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000,00	746.600.000,00	1.741.604.334,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000,00	621.800.000,00	1.434.777.324,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000,00	543.800.000,00	1.237.252.963,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000,00	387.800.000,00	802.018.435,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000,00	543.800.000,00	1.237.111.160,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000,00	824.600.000,00	1.912.715.284,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000,00	606.200.000,00	1.391.879.415,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	419.000.000,00	908.896.290,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000,00	965.000.000,00	2.289.126.367,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000,00	668.600.000,00	1.593.242.428,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000,00	606.200.000,00	1.370.078.209,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000,00	512.600.000,00	1.106.589.939,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000,00	715.400.000,00	1.675.305.150,00	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03 .02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KETER ANGAN
			RENCANA KERJA 2025	APBD TA 2025	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025	RENCANA KERJA 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp.)	PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 (Rp)		
7.01.03.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	742.664.630,00	APBD Kota Semarang	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	111.129.357,00	111.129.357,00	135.306.318,00		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	4 Angka	4 Angka	111.129.357,00	111.129.357,00	135.306.318,00		
7.01.04.2.03 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	111.129.357,00	111.129.357,00	135.306.318,00	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	95%	95%	114.200.000,00	114.200.000,00	140.850.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	114.200.000,00	114.200.000,00	140.850.000,00		
7.01.05.2.01 .02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	114.200.000,00	114.200.000,00	140.850.000,00	APBD Kota Semarang	

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

42. KECAMATAN TUGU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

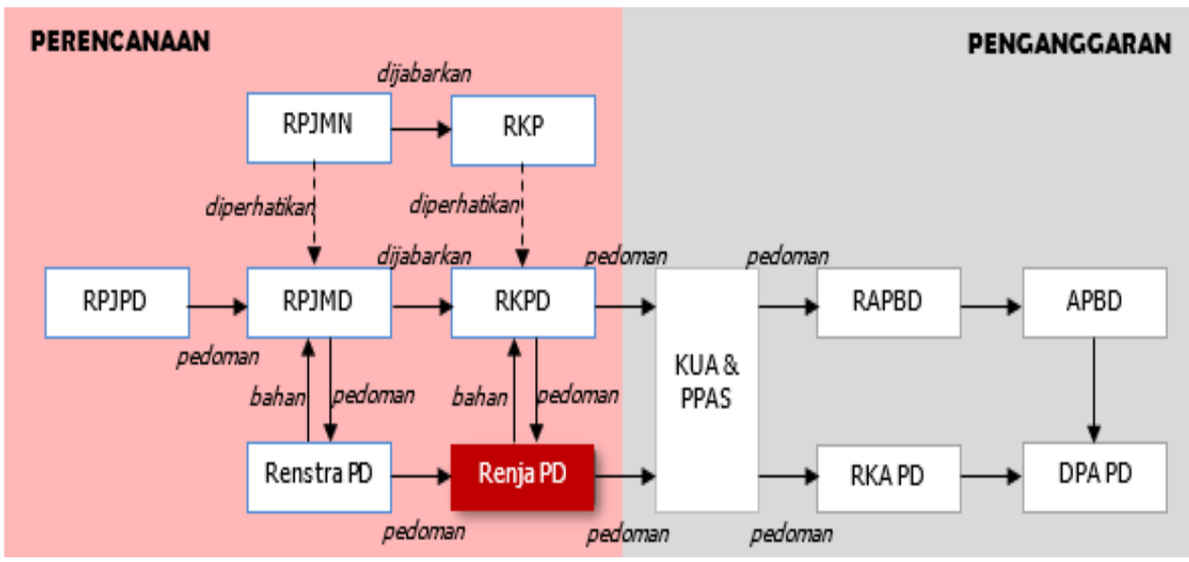

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tugu sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Tugu Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Tugu Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Urusan Penunjang Kewilayahan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	57%	4 Dokumen	57%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) , Renstra dan RTP yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	1 Dokumen	33%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	100%	50 Orang/ bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67%	2 Paket	67%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	1 Dokumen	33%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	6 Unit	40%	6 Unit	40%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	100%
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	94%	97%	103%	97%	103%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	0%	0 Angka	0%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	50%	3 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99,00%	99,00%	100,00%	41%	41%	41%	41%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	120 Kegiatan	41%	120 Kegiatan	41%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	13 Unit	13 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kecamatan dan Kelurahan Mangunharjo							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randugarut	11 Unit	11 Unit	11 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tugurejo	17 Unit	17 Unit	17 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jerakah	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	14 Dokumen	50%	14 Dokumen	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Randugarut	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan 2879embaga kemasyarakatan yang	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		diselenggarakan di Kelurahan Tugurejo							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Jerakah	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33%	1 Laporan	33%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	25%	10%	40%	10%	40%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	2 angka	2 angka	1 angka	50%	1 angka	50%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persemtase jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	96%	96%	98%	50%	50%	50%	50%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan,	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	50%	50 orang	50%

Sumber: Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Sub kegiatan yang belum mencapai 100% bersifat rutin, dan pelaksanaanya di triwulan III dan / atau triwulan IV. Sub kegiatan mengalami efisiensi anggaran yaitu :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Urusan Penunjang Kewilayahan			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.755.346.950	5.910.117.087	40,05
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.053.600	3.860.700	6,43

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.868.800	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.518.000	1.488.600	98,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1.788.000	292.800	16,38
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.036.000	246.600	8,12
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	894.000	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	397.200	322.500	81,19
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.551.600	1.510.200	97,33
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.682.926.200	4.705.943.822	40,28
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.318.048.600	4.544.853.822	40,16
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.866.000	160.767.500	44,18
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.200	-	-
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKP	337.200	322.500	95,64
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	337.200	-	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.034.540	528.382.400	47,39
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.446.950	5.370.000	51,40
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.080.118	254.400.000	79,23
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.442.790	52.575.800	45,54
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.141.000	8.006.100	37,87
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.680.000	34.090.500	38,44
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.725.000	25.270.000	18,62
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	422.518.682	148.670.000	35,19
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.047.938.869	408.085.237	38,94
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.047.938.869	408.085.237	38,94
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.102.266	91.324.414	27,67
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	48.993.714	20,94
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.102.266	42.330.700	44,05
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.291.475	172.520.514	33,22
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.624.868	88.740.893	36,88
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.494.131	74.546.621	74,93
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	5.278.000	5,03
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.172.476	3.955.000	5,33
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.211.961.488	874.273.654	39,52
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	144.940.860	7.150.000	4,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
27	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	5.800.000	5.800.000	100,00
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	139.140.860	1.350.000	0,97
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.946.150.628	838.843.254	43,10
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.295.150.628	561.177.520	43,33
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jerakah)	93.000.000	45.930.312	49,39
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tugurejo)	93.000.000	36.592.480	39,35
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar)	93.000.000	30.859.994	33,18
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Randugarut)	93.000.000	45.085.407	48,48
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Wetan)	93.000.000	38.241.173	41,12
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunharjo)	93.000.000	38.339.386	41,23
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Kulon)	93.000.000	42.616.982	45,82
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	120.870.000	28.280.400	23,40
37	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	120.870.000	28.280.400	23,40
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.977.014.803	3.109.053.840	17,29
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.694.128.203	1.140.125.100	8,33
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	59.924.000	54.101.000	90,28
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.110.000.000	38.439.300	3,46
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jerakah)	950.000.000	-	-
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tugurejo)	1.446.000.000	38.350.500	2,65
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar)	1.648.000.000	38.383.800	2,33
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Randugarut)	1.191.100.000	38.439.300	3,23
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Wetan)	1.724.000.000	-	-
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunharjo)	2.085.000.000	38.372.700	1,84
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Kulon)	1.921.000.000	38.383.800	2,00
47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	993.304.203	614.608.500	61,88

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jerakah)	62.600.000	14.175.000	22,64
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tugurejo)	83.600.000	36.988.000	44,24
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar)	71.000.000	30.461.200	42,90
51	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randugarut)	71.000.000	32.062.500	45,16
52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangkang Wetan)	96.200.000	44.377.000	46,13
53	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunharjo)	96.200.000	47.714.000	49,60
54	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangkang Kulon)	79.400.000	35.268.500	44,42
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.282.886.600	1.968.928.740	45,91
55	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	127.000.000	46.647.500	36,73
56	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jerakah)	450.200.000	207.597.000	46,11
57	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tugurejo)	746.600.000	345.371.000	46,26
58	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar)	543.800.000	246.364.840	45,30
59	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Randugarut)	341.000.000	158.871.000	46,59
60	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangkang Wetan)	855.800.000	413.410.900	48,31
61	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangunharjo)	653.000.000	307.882.500	47,15
62	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangkang Kulon)	528.200.000	239.375.000	45,32
63	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.800.000	2.500.000	41,38
64	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.286.600	1.009.000	2,71
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.540.000	31.070.000	41,13
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.540.000	31.070.000	41,13
65	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.540.000	31.070.000	41,13
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	87.700.000	42.950.000	48,97
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.700.000	42.950.000	48,97
66	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	87.700.000	42.950.000	48,97
JUMLAH		35.107.563.241	9.967.464.581	28,39

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebesar Rp 35.107.563.241 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.967.464.581. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.140.098.660.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan penunjang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan : Meningkatkan kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta enyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi informasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	93	94	95	95	96	87	93	94	95	97		97
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90	100	100	100	100	100	90	100	100	100	50		100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95	97	98	99	100	100	95	97	98	99	41		100
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81	83	85	86	88	90	81	83	85	86	50		88
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Kelurahan	87	90	92	95	98	100	87	90	92	95	50		98
Terwujudnya kualitas Kinerja pelayanan Perangkat daerah	Nilai AKIP	74,00	75,00	76,00	76,15	76,20	76,25	74,00	75,00	76,00	76,15	76,50		76,50

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Serta Enyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Dan Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi“ memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 95 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 97 angka;
b. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”, target sebesar 100% belum tercapai, dengan realisasi sebesar 50%;
c. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, target sebesar 100% belum tercapai, dengan realiasi sebesar 41%;
d. Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki dua indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 88% belum tercapai, dengan realiasi sebesar 50% dan “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 98% belum tercapai, dengan realisasi sebesar 50%;
e. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” target sebesar 76,20 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 76,50 angka.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tugu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
2. Kinerja pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan

Tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuian program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;

3. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Tugu, baik warga pendatang maupun warga asli Kecamatan Tugu. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan kewilayahan diantaranya:

1. Belum optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset Pemerintah di kecamatan dan kelurahan;
2. Kondisi geografis Tugu yang berada di wilayah pesisir utara Kota Semarang, masih menjadi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap rob akibat intrusi air laut yang semakin meluas;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan yang berbasis responsif gender.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Tugu tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam aspek kecepatan pelayanan;
    2) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tugu agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
    3) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;
    4) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang

semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran;

b. Peluang
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas yang mana akan berimplikasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat;
   2) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pengelolaan sumber daya aparatur Kecamatan Tugu yang baik juga merupakan aspek yang penting dalam merespon peluang tersebut;
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
   4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota
   Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Tugu perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2025 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Renstra Kecamatan Tugu

2021-2026 serta Renja Perubahan Kecamatan Tugu Tahun 2025;

3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang
   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upayaupaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Tugu Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kecamatan Tugu Urusan Kewilayahan				39.872.230.423	Kecamatan Tugu Urusan Kewilayahan				39.872.230.423	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100% 100% 100%	14.187.916.977	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100% 100% 100%	14.187.916.977	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	4 dokumen	62.790.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	4 dokumen	62.790.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokumen	57.878.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokumen	57.878.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.518.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.518.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	298.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	298.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	894.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	397.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	397.200	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.551.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.551.600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.156.670.718	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.156.670.718	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang/bulan	10.499.391.254	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang/bulan	10.499.391.254	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	656.267.864	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	656.267.864	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	337.200	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	337.200	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	879.410.654	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	879.410.654	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	5.963.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	5.963.350	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	312.173.123	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	312.173.123	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	90.777.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	90.777.800	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	11.066.361	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	11.066.361	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	168.590.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	168.590.400	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 laporan	63.375.670	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 laporan	63.375.670	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	227.463.950	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	227.463.950	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.390.307.412	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.390.307.412	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	15 unit	1.390.307.412	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	15 unit	1.390.307.412	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	186.011.366	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	186.011.366	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	109.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	109.000.000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 laporan	77.011.366	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 laporan	77.011.366	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	512.726.227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	512.726.227	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	18 unit	212.419.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	18 unit	212.419.620	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	77.134.131	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	77.134.131	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	100.000.000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 unit	123.172.476	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 unit	123.172.476	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tugu	Presentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	94%	2.073.193.554	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tugu	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	2.073.193.554	
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	391.585.430	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	391.585.430	
27	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal	2 Laporan	5.800.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal	2 Laporan	5.800.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	385.785.430	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	385.785.430	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.536.652.124	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.536.652.124	
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	925.563.458	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	925.563.458	
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	88.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	88.000.000	
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	88.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	88.000.000	
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	83.000.000	
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	88.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	88.000.000	
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	88.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	88.000.000	
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	87.977.046	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	87.977.046	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	88.111.620	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	88.111.620	
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	144.956.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	144.956.000	
37	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	144.956.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	144.956.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	23.455.529.892	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	23.455.529.892	
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.791.278.402	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.791.278.402	
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	65.612.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	65.612.300	
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	9 Unit	1.290.665.959	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	9 Unit	1.290.665.959	
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000	
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	14 Unit	1.648.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	14 Unit	1.648.000.000	
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000	
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	16 Unit	2.085.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	16 Unit	2.085.000.000	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	1.921.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	1.921.000.000	
47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	940.137.103	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	940.137.103	
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	4 Pokmas/ Ormas	57.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	4 Pokmas/ Ormas	57.600.000	
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	4 Pokmas/ Ormas	78.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	4 Pokmas/ Ormas	78.600.000	
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas/ Ormas	71.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas/ Ormas	71.000.000	
51	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas/ Ormas	65.871.320	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas/ Ormas	65.871.320	
52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas/ Ormas	91.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas/ Ormas	91.200.000	
53	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas /Ormas	91.185.730	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas /Ormas	91.185.730	
54	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas /Ormas	74.305.990	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas /Ormas	74.305.990	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	9.664.251.490	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	9.664.251.490	
55	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	129.940.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	129.940.000	
56	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	984.340.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	984.340.000	
57	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.795.520.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.795.520.000	
58	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.268.660.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.268.660.000	
59	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.550.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.550.000	
60	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.059.360.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.059.360.000	
61	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.532.572.500	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.532.572.500	
62	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.160.622.390	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.160.622.390	
63	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.900.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.900.000	
64	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	29.786.600	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	29.786.600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25%	69.690.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25%	69.690.000	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	69.690.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	69.690.000	
65	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	69.690.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	69.690.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tugu	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional	98%	85.900.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tugu	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	85.900.000	
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	85.900.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	85.900.000	
66	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	85.900.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	85.900.000	

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus

gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021

– 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP;
2. Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi informasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Kelurahan	Persen	98
Terwujudnya kualitas Kinerja pelayanan Perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	76,20

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan, dan Nilai AKIP".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Urusan Penunjang Kewilayahan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.972.935.350	14.755.346.950	14.187.916.977	APBD	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60.053.600	60.053.600	62.790.600	APBD	
7.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.868.800	50.868.800	57.878.800	APBD	
7.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.518.000	1.518.000	1.518.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.788.000	1.788.000	298.000	APBD	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3.036.000	3.036.000	253.000	APBD	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	894.000	894.000	894.000	APBD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	397.200	397.200	397.200	APBD	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.551.600	1.551.600	1.551.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.900.514.600	11.682.926.200	11.156.670.718	APBD	
7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	11.535.637.000	11.318.048.600	10.499.391.254	APBD	
7.01.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	363.866.000	363.866.000	656.267.864	APBD	
7.01.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	337.200	337.200	337.200	APBD	
7.01.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	APBD	
7.01.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.229.411.051	1.115.034.540	879.410.654	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.446.950	10.446.950	5.963.350	APBD	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	294.811.748	321.080.118	312.173.123	APBD	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	115.442.790	115.442.790	90.777.800	APBD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	21.141.000	21.141.000	11.066.361	APBD	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	88.680.000	88.680.000	168.590.400	APBD	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	135.725.000	135.725.000	63.375.670	APBD	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	563.163.563	422.518.682	227.463.950	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	933.562.358	1.047.938.869	1.390.307.412	APBD	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	933.562.358	1.047.938.869	1.390.307.412	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	330.102.266	330.102.266	186.011.366	APBD	
7.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	234.000.000	234.000.000	109.000.000	APBD	
7.01.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.102.266	96.102.266	77.011.366	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	519.291.475	519.291.475	512.726.227	APBD	
7.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	240.624.868	240.624.868	212.419.620	APBD	
7.01.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99.494.131	99.494.131	77.134.131	APBD	
7.01.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	105.000.000	105.000.000	100.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	74.172.476	74.172.476	123.172.476	APBD	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	94 Persen	1.994.373.088	2.211.961.488	2.073.193.554	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	144.940.860	144.940.860	391.585.430	APBD	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.800.000	5.800.000	5.800.000	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	139.140.860	139.140.860	385.785.430	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.728.562.228	1.946.150.628	1.536.652.124	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.077.562.228	1.295.150.628	925.563.458	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jerakah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tugurejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	83.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Masyarakat di Wilayah								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Randugarut)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	87.977.046	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.111.620	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	120.870.000	120.870.000	144.956.000	APBD	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.870.000	120.870.000	144.956.000	APBD	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.977.014.803	17.977.014.803	23.455.529.892	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	13.478.328.203	13.688.328.203	13.791.278.402	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	59.924.000	59.924.000	65.612.300	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	9 Unit	1.110.000.000	1.110.000.000	1.290.665.959	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jerakah)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tugurejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	14 Unit	1.648.000.000	1.648.000.000	1.648.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Randugarut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.191.100.000	1.191.100.000	1.191.100.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.724.000.000	1.724.000.000	1.724.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	16 Unit	2.085.000.000	2.085.000.000	2.085.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	13 Unit	1.921.000.000	1.921.000.000	1.921.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	993.304.203	993.304.203	940.137.103	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jerakah)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	57.600.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tugurejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	78.600.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	71.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randugarut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	65.871.320	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangkang Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	91.200.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	91.185.730	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	74.305.990	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kelurahan (Mangkang Kulon)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	4.498.686.600	4.288.686.600	9.664.251.490	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	127.000.000	127.000.000	129.940.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jerakah)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	462.800.000	450.200.000	984.340.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tugurejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	780.200.000	746.600.000	1.795.520.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	564.800.000	543.800.000	1.268.660.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Randugarut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	362.000.000	341.000.000	698.550.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangkang Wetan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	902.000.000	855.800.000	2.059.360.000	APBD	
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangunharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	699.200.000	653.000.000	1.532.572.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangkang Kulon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	528.200.000	1.160.622.390	APBD	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.800.000	5.800.000	4.900.000	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	37.286.600	37.286.600	29.786.600	APBD	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	75.540.000	75.540.000	69.690.000	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Nilai	2 Nilai	2 Nilai	75.540.000	75.540.000	69.690.000	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.540.000	75.540.000	69.690.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	87.700.000	87.700.000	85.900.000	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	87.700.000	87.700.000	85.900.000	APBD	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	87.700.000	87.700.000	85.900.000	APBD	
JUMLAH						35.107.563.241	35.107.563.241	39.872.230.423		

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan

Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

43. KECAMATAN MIJEN

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

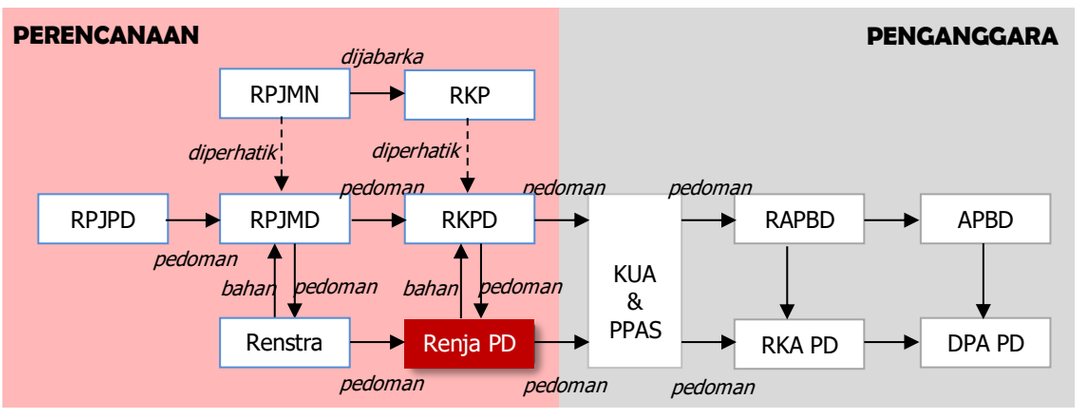

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dari sisi perencanaan pembangunan daerah. Dengan dilantiknya Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025, maka diperlukan adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan prioritas Kepala Daerah terpilih, serta program nasional berupa Asta Cita. Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025, termasuk pada Kecamatan Mijen Kota Semarang. Karena itu, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta regulasi terkait lainnya, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123)
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Mijen Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	18 Dokumen (58,06 %)	6 Dokumen (19,35 %)	1 Dokumen (3,23%)	16,66	19 Dokumen	61,29
X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	7 Dokumen (63,64 %)	6 Dokumen (54,55 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	7 Dokumen	63,64
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	4 Dokumen	80,00
X.XX.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	3 Dokumen	60,00
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	7 Dokumen (70,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	100,00	9 Dokumen	90,00
X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen (80,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	0 Laporan (0,00 %)	0,00	4 Laporan	80,00
X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen (80,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	6 Laporan	100,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (60,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (535 Orang/bulan)	100,00 % 319 Orang/bulan (60,00 %)	105 Orang/bulan (20,00 %)	105 Orang/bulan (20,00 %)	100,00	424 Orang/bulan	79,25
X.XX.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 36 Dokumen) (60,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	6 Dokumen (10,00 %)	50,00	42 Dokumen	70,00
X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	11 Dokumen (55,00%)	4 Dokumen (20,00%)	3 Dokumen (15,00%)	75,00	14 Dokumen	70,00
X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	4 Laporan	80,00
X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	6 Dokumen (60,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (10,00 %)	50,00	7 Laporan	70,00
X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Jenis (30 paket)	45 Jenis (18 Paket) (60,00 %)	5 Paket (20,00 %)	3 Paket (12,00 %)	60,00	21 Paket	70,00
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis (25 paket)	9 Jenis (15 Paket) (60,00 %)	4 Paket (20,00 %)	3 Paket (15,00 %)	75,00	18 Paket	72,00
X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Jenis (60 Paket)	180 Jenis (36 Paket) (60,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	42 Paket	70,00
X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Jenis (60 Paket)	33 Jenis (36 paket) (60,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	42 Paket	70,00
X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500 Orang (60 Laporan)	6.300 Orang (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kegiatan (60 Laporan)	150 Kegiatan (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Jenis (12 Dokumen)	20 Jenis (16 Dokumen) (100,00 %)	6 Dokumen (50,00 %)	2 Dokumen (16,67 %)	33,33	18 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	7 Jenis (70,00 %)	2 Unit (20,00 %)	1 Unit (10,00 %)	50,00	8 Unit	80,00
X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
X.XX.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jasa pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis (60 Laporan)	24 Jenis (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	98 Unit (59,39 %)	35 Unit (21,21 %)	35 Unit (21,21 %)	100,00	133 Unit	80,60

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	15 Gedung (100,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	15 Unit	100,00
X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	15 Jenis (100,00 %)	1 Unit (6,67 %)	0 Unit (00,00 %)	0,00	15 Unit	100,00
X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Jenis	6 Jenis (75,00 %)	3 Unit (37,50 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	6 Unit	75,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	93,00 %	94,00 %	92,76 %	98,68	92,76	97,64
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	2 Angka (40,00 %)	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	100,00	3 Angka	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen (100,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	10 Dokumen	100,00
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
7.01.02. 2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan (60 Laporan)	9 Kegiatan (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % (60,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	70,00 %	70,00
7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Kegiatan (60 Laporan)	9 Kegiatan (36 Laporan) (60,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	42 Laporan	70,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	100,00 %	100,00 %	76,25 %	76,25	76,25	76,25
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.510 Kegiatan	1.279 Kegiatan (50,96 %)	502 Kegiatan (20,00 %)	164 Kegiatan (6,53 %)	32,67	1.443 Kegiatan	57,49

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415 Angka (20 Lembaga)	249 Angka (12 Lembaga) (60,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	16 Lembaga	80,00
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	70 Kegiatan	53 Kegiatan (75,71 %)	6 Unit (8,57 %)	6 Unit (8,57 %)	100,00	59 Unit	84,29
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	49 Kegiatan	29 Kegiatan (59,18 %)	10 Unit (20,41 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	29 Unit	59,18
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	50 Kegiatan	28 Kegiatan (56,00 %)	9 Unit (18,00 %)	9 Unit (18,00 %)	100,00	37 Unit	74,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	45 Kegiatan	27 Kegiatan (60,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	36 unit	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	45 Kegiatan	27 Kegiatan (60,00 %)	6 Unit (13,33 %)	6 Unit (13,33 %)	100,00	33 unit	73,33
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	52 Kegiatan	32 Kegiatan (61,54 %)	11 Unit (21,15 %)	11 Unit (21,15 %)	100,00	43 Unit	82,70
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di KelurahanTambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	54 Kegiatan	44 Kegiatan (81,48 %)	12 Unit (22,22 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	44 Unit	81,48
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	54 Kegiatan	32 Kegiatan (59,30 %)	20 Unit (37,04 %)	16 Unit (29,63 %)	80,00	48 unit	88,89
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	51 Kegiatan	34 Kegiatan (66,67 %)	9 Unit (17,65 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	34 Unit	66,67

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	52 Kegiatan	32 Kegiatan (59,30 %)	12 Unit (23,08 %)	12 Unit (23,08 %)	100,00	32 Unit	84,62
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	58 Kegiatan	41 Kegiatan (70,69 %)	11 Unit (18,97 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	41 Unit	70,69
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	50 Kegiatan	32 Kegiatan (64,00 %)	12 Unit (24,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	32 Unit	64,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	52 Kegiatan	35 Kegiatan (67,31 %)	12 Unit (23,08 %)	0 Unit (0,00 %)	0,0 0	35 Unit	67,31
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	50 Kegiatan	32 Kegiatan (64,00 %)	9 Unit (18,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	32 Unit	64,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	52 Kegiatan	40 Kegiatan (76,92 %)	8 Unit (15,38 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	40 unit	76,92
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	130 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	78 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan MasyarakatdiKelurahan(KelurahanCangkiran)	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	60 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	120 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	72 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	69 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	60 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	66 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	140 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	84 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	160 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	96 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	66 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	66 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	155 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	93 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	90 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	54 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	75 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	75 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	69 Kegiatan (12 Pokmas / Ormas) (60,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	16 Pokmas / Ormas	80,00
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	45 Dokumen (50,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	100,00	63 Dokumen	70,00
7.01.03. 2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	50 Dokumen (20 Lembaga)	30 Dokumen (12 Lembaga) (60,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	16 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	45 Lembaga	27 Lembaga (60,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	36 Lembaga	80,00
7.01.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0	0,00
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan (10 Laporan)	18 Kegiatan (6 Laporan) (60,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	0 Laporan (0,00 %)	0,00	7 Laporan	70,00
			Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00%	55,56 %	25,00 %	16,67 %	66,68	16,67	55,57

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	160 Angka (4,44 %)	60 Angka (16,67%)	25 Angka (6,95 %)	41,67	185 Angka	51,39
7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (65 Laporan)	7 Kegiatan (41 Laporan) (63,08 %)	15 Laporan (23,08 %)	12 Laporan (18,46 %)	80,00	53 Laporan	81,54
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	100,00 %	98,00 %	50,00 %	51,02	100,00	100,00
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	5 Kegiatan (50,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (10,00 %)	50,00	6 Kegiatan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.05. 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan (500 Orang)	6 Kegiatan (300 Orang) (60,00 %)	100 Orang (20,00 %)	50 Orang (10,00 %)	50,00	350 Orang	70,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	URUSAN KEWILAYAHAN	60,429,367,324	20,568,904,891	34.04
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,178,261,093	11,942,212,800	45.62
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,653,000	379,700	0.96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,132,400	40,000	0.11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253,000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	596,000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	506,000	294,700	58.24
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	596,000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	224,800	0	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344,800	45,000	13.05
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,048,317,170	10,405,528,953	47.19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,226,839,920	10,026,818,953	47.24
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	821,140,050	378,710,000	46.12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112,400	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	112,400	0	0.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	112,400	0	0.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,811,076,267	1,001,198,000	55.28
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,365,250	5,456,000	48.01
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	529,813,280	441,380,000	83.31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,243,960	27,790,500	60.10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,550,924	6,917,500	72.43
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,656,000	225,000	0.73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,116,000	25,475,000	18.99
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,049,330,853	493,954,000	47.07
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	735,128,730	0	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	735,128,730	0	0.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323,356,661	97,437,781	30.13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193,623,900	56,225,781	29.04
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,732,761	41,212,000	31.77

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,220,729,265	437,668,366	35.85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207,936,000	69,035,210	33.20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119,165,265	85,047,156	71.37
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387,628,000	66,285,000	17.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506,000,000	217,301,000	42.94
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,560,671,730	1,427,086,991	40.08
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158,994,420	6,050,000	3.81
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,000,000	0	0.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	154,994,420	6,050,000	3.90
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,894,998,920	882,723,409	46.58
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	880,472,046	451,973,170	51.33
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	74,171,184	34,101,646	45.98
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	69,935,304	27,318,189	39.06
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	69,553,464	27,313,662	39.27
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	71,627,534	22,422,142	31.30
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	71,147,045	28,207,702	39.65
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	71,545,586	31,745,265	44.37
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	77,499,905	37,649,816	48.58
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	70,057,231	33,413,668	47.69
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	73,760,960	40,195,900	54.49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	67,499,840	29,232,768	43.31
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	71,968,467	31,167,132	43.31
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	72,990,540	32,953,924	45.15

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	80,455,980	26,940,764	33.49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	72,313,834	28,087,661	38.84
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,506,678,390	538,313,582	35.73
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,506,678,390	538,313,582	35.73
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,539,218,911	7,146,588,100	23.40
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20,629,753,423	2,076,267,900	10.06
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	38,644,550	30,066,500	77.80
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Mijen)	1,240,000,000	594,390,000	47.93
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	950,000,000	34,215,000	3.60
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	950,000,000	34,443,000	3.63
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	1,375,000,000	34,387,000	2.50
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Polaman)	1,153,000,000	433,422,000	37.59
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	1,368,000,000	34,482,000	2.52
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	1,654,000,000	34,752,000	2.10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	1,908,000,000	74,490,000	3.90
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mijen)	950,000,000	34,398,000	3.62
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	1,943,000,000	74,519,000	3.84
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	950,000,000	34,598,000	3.64
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	1,415,000,000	34,271,000	2.42
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	1,535,000,000	34,582,000	2.25
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	950,000,000	34,493,000	3.63
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	950,000,000	34,271,000	3.61
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	254,683,530	30,850,000	12.11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	76,529,900	20,950,000	27.37
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	64,400,000	27,355,500	42.48

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	77,391,450	33,350,000	43.09
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	54,211,580	23,175,000	42.75
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	64,842,940	27,675,000	42.68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	61,015,610	34,265,800	56.16
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	107,408,763	49,625,000	46.20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	82,278,500	38,408,500	46.68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	64,850,000	30,548,600	47.11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	69,198,800	32,498,000	46.96
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	100,750,000	43,341,500	43.02
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	56,392,420	20,582,500	36.50
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	104,900,000	52,380,000	49.93
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	61,255,380	25,483,000	41.60
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9,909,465,488	5,070,320,200	51.17
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	109,988,430	39,993,700	36.36
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)	774,950,910	398,400,000	51.41
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan)	522,123,900	250,290,000	47.94
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)	306,401,680	131,250,000	42.84
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)	264,654,100	111,825,000	42.25
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	463,184,630	229,832,000	49.62
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)	365,443,190	181,294,000	49.61
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)	1,027,166,908	550,127,000	53.56
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)	861,553,490	448,210,000	52.02
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)	396,177,850	189,632,500	47.87
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)	775,565,460	406,615,000	52.43
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)	856,779,950	444,875,000	51.92
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)	532,293,540	277,271,000	52.09
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	1,863,029,900	999,525,000	53.65
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)	778,414,690	411,180,000	52.82
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5,770,880	0	0.00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5,965,980	0	0.00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65,725,830	16,542,000	25.17
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65,725,830	16,542,000	25.17
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65,725,830	16,542,000	25.17
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85,489,760	36,475,000	42.67
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85,489,760	36,475,000	42.67
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,489,760	36,475,000	42.67

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 94 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebesar Rp 60.429.367.324,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.568.904.891,- (34,04%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 39.860.462.433,- (65,96%).

Selain dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 94 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang, juga terdapat pendapatan dari retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen, dengan target Tahun 2025 sebesar Rp.3.000.000,-. Dari target pendapatan tersebut, sampai dengan triwulan II Tahun 2025 realisasinya adalah sebesar Rp. 5.725.000,- (190,83%), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
I	PENDAPATAN	3.000.000	5.725.000	190.83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000	5.725.000	190.83
	Retibusi Daerah	3.000.000	5.725.000	190.83

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI				PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 Trw II	2026
Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	91,30	92,32	93,00	92,76	93,00
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100,00	100,00	100 ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,10	100,00
Sasaran 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	43,00	-	-	-	-	62,04	-	-	-	-
	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	83,86	97,48	99,64	39,29	90,08
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	90,00	100,00	100,00	50,00	100,00
Sasaran 4 : Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	72,06	74,80	75,55	76,50	77,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Dari target sebesar 92,50, realisasinya sebesar 92,76 (capaian 100,28%);
b. Sasaran Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :
    1) Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 50,00 % (capaian 50,00%);
    2) Sasaran 2 : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 93,10 % (capaian 93,10%).
    3) Sasaran 3 : “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 39,29 % dari target sebesar 88,40% (capaian 44,45 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 50,00 % dari target sebesar 98,00 % (capaian 51,02 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.
    4) Sasaran 4 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 75,00 realisasinya sebesar 76,50 (capaian 102,00%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Keberhasilan Daerah Kecamatan Mijen
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2025	2026
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	86,68 %	88,52 %	90,86 %	93,20 %	95,04 %	50,00 %	95,04 %
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	92,76 %	95,00 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	93,10 %	100,00 %
ASPEK DAYA SAING								
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	11,14 %	10,52 %	9,9 %	9,28 %	8,85 %	3,71 %	8,85 %

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut : Dari 5 program, 13 kegiatan, dan 94 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen di tahun 2025, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 1 program (20,00 %), 2 kegiatan (15,38 %) dan 4 sub kegiatan (4,25 %). Dari jumlah anggaran pada Kecamatan Mijen Kota Semarang di tahun 2025 sebesar Rp 75.495.090.953,- , jumlah anggaran yang responsif gender adalah sebesar Rp 38.115.716.088,- (50,48 %).

Masih terkait pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan

pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Lapor Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Mijen, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

a. Tantangan
   Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:
   1) Perkembangan Teknologi memberi tantangan bagi Kecamatan. Manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan kebijakan yang tepat;
   2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun;

3) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kuallitas pelayanan publik di Kecamatan Mijen;

4) Kesiapan masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik masih rendah;

5) Tantangan untuk mengembangkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan wilayahnya.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik, dengan memanfaatkan tekhnologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat;

2) Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah,

Adanya regulasi dan kebijakan nasional (seperti SPBE, Reformasi Birokrasi) yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;

3) Keterlibatan Masyarakat melalui forum musyawarah, pengaduan online dan survei kepuasan pelayanan;

4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal seperti LS, Perguruan Tinggi atau Swasta dalam peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya.

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

4) Masih kurangnya peran serta dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Mijen;

5) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Mijen.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2025 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

   Di tahun 2025, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Peningkatan Sarana Prasarana di Kecamatan Mijen

   Kemacetan di sepanjang jalan RM Hadi Soebeno menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian. Kepadatan lalu lintas dapat meningkatkan jumlah kecelakaan di jalan raya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Adapun rumusan tema pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang

1. berkeadilan;
Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya

air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Mijen Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Mijen Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				75.495.090.953	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				75.495.090.953	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	29.550.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	29.550.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	28.980.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	28.980.400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	27.029.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	27.029.400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	596.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	596.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	596.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	596.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Laporan	569.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Laporan	569.600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	224.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	224.800	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	344.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	344.800	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	22.047.453.096	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	22.047.453.096	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	22.047.115.896	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	22.047.115.896	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	20.705.294.146	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	20.705.294.146	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.341.821.750	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.341.821.750	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	337.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	337.200	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	112.400	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	112.400	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	3.826.349.176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	3.826.349.176	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.082.214.414	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.082.214.414	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.365.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.365.250	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	603.854.615	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	603.854.615	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.081.120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.081.120	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.965.671	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.965.671	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.500.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.086.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.086.000	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1.228.361.758	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1.228.361.758	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	164.118.571	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	164.118.571	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	164.118.571	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	164.118.571	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	323.356.661	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	323.356.661	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	214.260.260	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	214.260.260	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.096.401	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.096.401	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.256.659.530	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.256.659.530	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	207.936.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	207.936.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101.697.530	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101.697.530	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	513.026.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	513.026.000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	434.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	434.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	2.896.938.180	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	2.896.938.180	
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	216.294.420	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	216.294.420	
27	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Mijen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Mijen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	212.294.420	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	212.294.420	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.753.387.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.753.387.700	
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	732.860.826	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	732.860.826	
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Cangkiran)	Kel Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	74.171.184	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Cangkiran)	Kel Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	74.171.184	
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Bubakan)	Kel Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	69.935.304	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Bubakan)	Kel Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	69.935.304	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Karangmalang)	Kel Karagmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	69.553.464	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Karangmalang)	Kel Karagmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	69.553.464	
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Polaman)	Kel Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Polaman)	12 Laporan	71.627.534	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Polaman)	Kel Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Polaman)	12 Laporan	71.627.534	
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Purwosari)	Kel Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	71.147.045	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Purwosari)	Kel Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	71.147.045	
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Tambangan)	Kel Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	71.545.586	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Tambangan)	Kel Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	71.545.586	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonolopo)	Kel Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	77.499.905	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonolopo)	Kel Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	77.499.905	
37	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mijen)	Kel Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	70.057.231	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mijen)	Kel Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	70.057.231	
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatibarang)	Kel Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	73.760.960	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatibarang)	Kel Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	73.760.960	
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel.	Kel Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	12 Laporan	73.499.840	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel.	Kel Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	12 Laporan	73.499.840	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kedungpane)		Kedungpane)			Kedungpane)		Kedungpane)			
40	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngadirgo)	Kel Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	71.968.467	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngadirgo)	Kel Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	71.968.467	
41	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonoplumbon)	Kel Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	72.990.540	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonoplumbon)	Kel Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	72.990.540	
42	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatisari)	Kel Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	80.455.980	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatisari)	Kel Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	80.455.980	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
43	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pesantren)	Kel Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	72.313.834	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pesantren)	Kel Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	72.313.834	
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	927.256.060	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	927.256.060	
44	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	927.256.060	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	927.256.060	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	46.502.934.911	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	46.502.934.911	
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.714.769.423	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.714.769.423	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	31.244.550	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	31.244.550	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	1.190.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	1.190.000.000	
47		Kel Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	958.500.000		Kel Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	958.500.000	
48		Kel Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000		Kel Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000	
49		Kel Karagmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000		Kel Karagmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000	
50		Kel Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	1.153.000.000		Kel Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	1.153.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
51		Kel Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	11 Unit	1.368.000.000		Kel Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	11 Unit	1.368.000.000	
52		Kel Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	1.654.000.000		Kel Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	1.654.000.000	
53		Kel Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	20 Unit	1.908.000.000		Kel Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	20 Unit	1.908.000.000	
54		Kel Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	950.000.000		Kel Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	950.000.000	
55		Kel Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	1.943.000.000		Kel Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	1.943.000.000	
56		Kel Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	950.000.000		Kel Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	950.000.000	
57		Kel Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	1.421.716.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	1.421.716.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
58		Kel Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000		Kel Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000	
59		Kel Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	9 Unit	950.000.000		Kel Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	9 Unit	950.000.000	
60		Kel Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	950.000.000		Kel Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	950.000.000	
61	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	379.683.530	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	379.683.530	
62		Kel Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	78.729.900		Kel Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	78.729.900	
63		Kel Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/ Ormas	64.400.000		Kel Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/ Ormas	64.400.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
64		Kel Karagmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/ Ormas	77.391.450		Kel Karagmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/ Ormas	77.391.450	
65		Kel Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	54.211.580		Kel Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	54.211.580	
66		Kel Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	64.842.940		Kel Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	64.842.940	
67		Kel Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/ Ormas	61.015.610		Kel Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/ Ormas	61.015.610	
68		Kel Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo	4 Pokmas/ Ormas	107.408.763		Kel Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo	4 Pokmas/ Ormas	107.408.763	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
69		Kel Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	82.278.500		Kel Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	82.278.500	
70		Kel Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	64.850.000		Kel Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	64.850.000	
71		Kel Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	69.198.800		Kel Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	69.198.800	
72		Kel Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/ Ormas	100.750.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/ Ormas	100.750.000	
73		Kel Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	56.392.420		Kel Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	56.392.420	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
74		Kel Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	104.900.000		Kel Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	104.900.000	
75		Kel Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	61.255.380		Kel Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	61.255.380	
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	25.788.165.488	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	25.788.165.488	
76	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	109.988.430	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	109.988.430	
77		Kel Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.058.000.910		Kel Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.058.000.910	
78		Kel Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.310.773.900		Kel Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.310.773.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
79		Kel Karagmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	692.801.680		Kel Karagmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	692.801.680	
80		Kel Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	562.104.100		Kel Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	562.104.100	
81		Kel Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.133.434.630		Kel Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.133.434.630	
82		Kel Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	849.893.190		Kel Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	849.893.190	
83		Kel Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.774.416.908		Kel Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.774.416.908	
84		Kel Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.317.803.490		Kel Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.317.803.490	
85		Kel Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	939.827.850		Kel Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	939.827.850	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jatibarang)					Jatibarang)			
86		Kel Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.069.615.460		Kel Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.069.615.460	
87		Kel Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.270.229.950		Kel Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.270.229.950	
88		Kel Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.371.943.540		Kel Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.371.943.540	
89		Kel Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.322.729.900		Kel Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.322.729.900	
90		Kel Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.992.864.690		Kel Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.992.864.690	
91	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.770.880	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.770.880	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
92	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.965.980	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.965.980	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	106.375.830	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	106.375.830	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	106.375.830	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	106.375.830	
93	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	106.375.830	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	106.375.830	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	85.489.760	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	85.489.760	
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	85.489.760	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	85.489.760	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
94	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	85.489.760	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	85.489.760	

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Mijen memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pada Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaspalan Jalan di Jalan Jatikalangan	Kelurahan Cangkiran RT 3 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/1500 meter	Kondisi Jalan Rusak Berat sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
2	Perbaikan Jembatan	Kelurahan Cangkiran RT 04 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 / 1 Unit	Pondasi Jembatan Tergerus oleh air sehingga dikahawatirkan Roboh dan membahayakan pengguna jalan . Jembatan ini merupakan akses satu satu nya bagi warga sehingga akan mengganggu mobilitas warga (Dinas Pekerjaan Umum)
3	Pembangunan Talud	Kelurahan Cangkiran RT 05 RW 05	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 / 125 m^2	Kondisi Talud Jebol Sehingga Menyebabkan Banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
4	Perbaikan Bendungan	Bendungan wangaji Karangmalang RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	800.000.000 / 1 Unit	Perlunya Perbaikan Bendungan Wangaji (Dinas Pekerjaan Umum)
5	Guardrail-Pagar Pengaman Jalan	Dk. Krajan Karangmalang RT 2 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	215.000.000 /1 Unit	Perlunya Pengaman Jalan (Dinas Perhubungan)
6	Perbaikan Jembatan	DK. Sebumi Karangmalang RT 1 RW 1	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 / 1 Unit	Perlunya Perbaikan Jembatan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
7	Saluran irigasi setulung	Setulung Polaman	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /350 m^3	Saluran irigasi Rawan jebol (Dinas Pekerjaan Umum)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Taman Hidroponik	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /600 m^2	Perlunya taman hidroponik (Dinas Penataan Ruang)
9	Rumah untuk Pilah Sampah TPS3R	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /400 m^2	Perlu dibangun tempat untuk pilah sampah di luar gedung TPS3R (Dinas Lingkungan Hidup)
10	Pavingisasi Halaman TPS3R	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /600 m^2	Halaman masih berupa tanah dan perlu pavingisasi (Dinas Lingkungan Hidup)
11	Saluran Lapangan Voli	Kelurahan Polaman RT 03 RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /150 m^2	Perlunya dibangun saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12	Saluran Irigasi Wangan Aji	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /200 m^3	Perlunya dibangun saluran karena rawan jebol (Dinas Pekerjaan Umum)
12	Saluran irigasi Makam Seklopo	Kelurahan Polaman RT 01 RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /120 m^3	Saluran irigasi rawan longsor (Dinas Pekerjaan Umum)
13	Pembangunan Betonisasi Jalan	Jl. Jatiombo RT 07 RW 02 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	694.038.600 /600 m^2	Karena Jalan Rusak dan Berlubang, warga meminta untuk dilakukan Perbaikan berupa Pembangunan Betonisasi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
14	pembangunan talud dan saluran (kanan-kiri)	Jl. Kaligetas - Jatiombo (Dukuh Kaligetas) RT 02 RW 04 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.284.240.000/2800 m^2	Belum ada talud dan saluran Kanan-Kiri (Skala Prioritas Penanggulangan Banjir) (Dinas Pekerjaan Umum)
15	Pembangunan Kantor Pelayanan Publik	Kelurahan Wonolopo RT 7 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000 / 1 Unit	Perlunya Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Dinas Penataan Ruang)
16	Pembangunan Rehab Balai Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /75 m^2	Balai Kel Kedungpane perlu direhab (Dinas Penataan Ruang)
17	Pembangunan Rehab Pagar Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /150 m^2	Pagar Kantor Kel Kedungpane perlu direhab karena sebagian ada yang roboh (Dinas Penataan Ruang)
18	Pembangunan Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /60 m^2	Rumah Dinas Lurah Kedungpane perlu direhab karena banyak yang rusak (Dinas Penataan Ruang)
19	Pembangunan Rehab Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /100 m^2	Kantor Kel Kedungpane perlu direhab karena plafon bocor dan rangka keropos (Dinas Penataan Ruang)
20	Pembangunan Pembangunan Gedung Pos PAUD Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /60 m^2	Pos PAUD Kel Kedungpane belum mempunyai gedung sendiri (Dinas Penataan Ruang)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Pembangunan Saluran Sepanjang Jl. Untung Suropati	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/2.000 m^2	Saluran Sepanjang Jl. Untung Suropati rusak sehingga saat hujan air meluap ke jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
22	jembatan jalan	rt 01 rw 03 ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	800.000.000 / 1 Buah	Pembangunan jembatan (Dinas Pekerjaan Umum)
23	pembangunan jembatan jalan	Rw 4 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	900.000.000 / 1 Buah	Pembangunan jembatan (Dinas Pekerjaan Umum)
24	Pekerjaan talud saluran	Rw 4 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	419.931.000 /270 m	Pekerjaan Saluran Air (Dinas Pekerjaan Umum)
25	Saluran Air	Rw 3 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	208.029.000 /255 m	Talud Saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
26	Pengaspalan Jalan	Rw 3 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	720.000.000 /1.500 m	Pengaspalan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
27	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Rw 2 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 / I buah	Pembangunan tempat pembuangan sampah (Dinas Lingkungan Hidup)
28	Rumah Dinas Camat Mijen	Kelurahan Jatisari Keamatan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000/ 1 Unit	Membutuhkan Rumah Dinas Camat Mijen (Dinas Penataan Ruang)
29	Sport Center Kecamatan Mijen	Lapangan Kalimas Kelurahan Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.000/ 1 Unit	Membutuh Sport Center untuk Olahraga Masyarakat (Dinas Penataan Ruang)
30	Betonisasi Jalan	Jalan Robyong	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000/ 2.000 m	Jalan masih aspal dan rusak berlubang (Dinas Pekerjaan Umum)
31	Rehab Kantor Kelurahan	Jalan Raya Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/ 1 Unit	Diperlukan peremajaan untuk Kantor Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
32	Pengadaan Lampu Jalan	Wilayah Kelurahan Cangkiran	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 / 40 Unit	Kondisi Jalan dalam keadaan gelap sehingga rawan terjadi kejahatan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
33	Pengaspalan Jalan	JL MARYADI Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.400.000.000/6.000 m	(Dinas Perumahan dan Pemukiman)
34	Pengaspalan Jalan	Jl Gg Kelengkeng Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	390.000.000 / 900 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
35	PENERANGAN JALAN	JL MARYADI Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	320.000.000 / 32 m	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
36	PENERANGAN JALAN	Jl Gg Kelengkeng Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 / 19 buah	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	SALURAN AIR BIS U30	Jl Gg Gerung Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 / 250 m	Perlunya dibangun saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
38	Pengadaan Lampu Jalan	DK. Dawung Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	225.000.000 / 20 buah	Wilayah belum ada Penerangan Jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
39	Pengaspalan Jalan	DK. WIDOSARI RT 04 - DK. KEBONDALEM RT 04 RW 3 Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	720.000.000 / 1500 m	Jalan Kualitas Buruk Harus Adanya Perbaikan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
40	Saluran Got U	DK. Krajan Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	230.000.000 / 325 m	Perlunya Saluran Air (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
41	Saluran Got U	DK. Widosari Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	215.000.000 / 425 m	Perlunya Saluran Air (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
42	pembuatan talud dan saluran	Jl. Raya Purwosari RT 07 RW 02 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	530.270.000 / 650 m^2	karena belum ada talud dan saluran (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
43	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Kaligetas - Bandungsari (Dukuh Kaligetas) RT 01 RW 04 PURWOSARII	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 / 15 Per Titik	Karena Kurangnya Lampu Penerangan Jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
44	Pengaspalan Jalan	Jalan Danang Citrosudirjo Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 / 1.000 m	Kondisi jalan rusak sedang, di beberapa segmen jalan terdapat lubang, aspal terkelupas dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
45	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase tanpa tutup	Jalan Bandungsari mulai lampu merah hingga depan Perumahan Megah Residence Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /250 m	Sebagian saluran drainase rusak, kedalaman dan kemiringan kurang dan di beberapa segmen belum terdapat saluran drainase sehingga saat musim hujan air meluap ke jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
46	PELEBARAN JALAN UTAMA	JL. RAYA WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/6.000 m^2	Jalan Ini merupakan jalan utama di lingkungan kelurahan wonolopo, segingga sangat perlu untuk dilakukan pelebaran jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
47	Pembangunan Saluran Air	JL. RAYA WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/1.200 m^2	Perlunya dibangun saluran (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
48	PJU Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /50 Titik	Banyak Jalan tanpa penerangan di Wilayah (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49	Pekerjaan Saluran Air Jl. RM Hadisoebeno RW 02	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /300 m^3	Saluran Air Rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
50	Pavingisasi Jl. Gendol RW 03	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /170 m^3	Jalan masih tanah (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
51	Pekerjaan Saluran Air RW 05	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /300 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
52	Pekerjaan Saluran Air Jl. RM Hadi Soebeno RW 06	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /300 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
53	Pavingisasi Jl. Mutiara Raya RW 07	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	700.000.000 /480 m^3	Paving rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
54	Pekerjaan Saluran Air RW 03	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /375 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
55	Penerangan jalan umum	Kel Ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /20 buah	penerangan jalan umum (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
56	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.264.000.000/4.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
57	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	4.075.200.000/7.200 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
58	Pemb. Saluran + Talud	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.013.300.000/1.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
59	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.600.000.000/7.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
60	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.440.000.000/3.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
61	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.499.000.000/1.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
62	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	801.562.500 /5625.5 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
63	Pembangunan Saluran	Jl.RM Hadi Soebeno Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 m^3	belum adanya saluran disekitar PKL Perhutani (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
64	Pembangunan Jalan Aspal	Jl.Utama RW.02 s/d RW.04 Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.440.000.000/3.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65	Pembangunan Talud Saluran	Depan TPU Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	297.444.000 /210 m^3	talud sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
66	Pembangunan Jalan Paving	Bundaran Jatisari Indah	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	728.000.000 /800 m^2	Jalan ambles (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
67	Lampu Penerangan Jalan	Jalan Robyong Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 / 25 Buah	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Mijen, 2024

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Mijen pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2024 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Mijen Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Mijen maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

> “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mijen”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

SASARAN 1	:	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator	:	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
SASARAN 2	:	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator	:	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

SASARAN 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan

- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Tujuan:		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,50 Angka
Sasaran:		
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100%
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%
3. Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88,40%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	98%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 94 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 68 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 75.495.090.953,21,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
07.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen					62.087.257.480	62.087.257.480	75.495.090.953,21			
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	62.829.400	62.829.400	29.550.000			
X.XX.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	61.354.000	61.354.000	28.980.400			
X.XX.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	51.436.000	51.436.000	27.029.400	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.795.000	3.795.000	253.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.470.000	4.470.000	596.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	759.000	759.000	506.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	894.000	596.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.475.400	1.475.400	569.600			
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	785.800	785.800	224.800	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	689.600	689.600	344.800	Kec Mijen	APBD	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	22.049.366.720	22.049.366.720	22.047.453.096			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	22.048.017.920	22.048.017.920	22.047.115.896			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	21.226.839.920	21.226.839.920	20.705.294.146,21	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	821.178.000	821.178.000	1.341.821.750	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.348.800	1.348.800	337.200			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	112.400	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	674.400	674.400	112.400	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	112.400	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	4.163.330.790	4.163.330.790	3.826.349.176			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.836.826.934	1.836.826.934	2.082.214.414			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	11.365.250	11.365.250	11.365.250	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	529.813.280	529.813.280	603.854.615,00	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	46.243.960	46.243.960	44.081.120	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.041.591	21.041.591	19.965.670,90	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.656.000	30.656.000	25.500.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	148.376.000	148.376.000	149.086.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.049.330.853	1.049.330.853	1.228.361.758,10	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	735.128.730	735.128.730	164.118.571			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	735.128.730	735.128.730	164.118.571	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	323.356.661	323.356.661	323.356.661			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.623.900	193.623.900	214.260.260	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.732.761	129.732.761	109.096.401	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	1.268.018.465	1.268.018.465	1.256.659.530			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	35 Unit	35 Unit	35 Unit	255.225.200	255.225.200	207.936.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
	Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya									
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	119.165.265	119.165.265	101.697.530	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	387.628.000	387.628.000	513.026.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	506.000.000	506.000.000	434.000.000	Kec Mijen	APBD	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	94%	94%	3.910.281.370	3.910.281.370	2.896.938.180			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	180.831.636	180.831.636	216.294.420			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec Mijen	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	176.831.636	176.831.636	212.294.420	Kec Mijen	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.218.771.344	2.218.771.344	1.753.387.700			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.129.501.344	1.129.501.344	732.860.826	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Cangkiran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.920.000	79.920.000	74.171.184	Kel Cangkiran	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Bubakan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.140.000	76.140.000	69.935.304	Kel Bubakan	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Karangmalang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.610.000	74.610.000	69.553.464	Kel Karagmalang	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Polaman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Polaman)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.710.000	73.710.000	71.627.534	Kel Polaman	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Purwosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.960.000	75.960.000	71.147.045	Kel Purwosari	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Tambangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.330.000	75.330.000	71.545.586	Kel Tambangan	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonolopo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.880.000	83.880.000	77.499.905	Kel Wonolopo	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mijen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.120.000	78.120.000	70.057.231	Kel Mijen	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatibarang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.300.000	78.300.000	73.760.960	Kel Jatibarang	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kedungpane)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.590.000	76.590.000	73.499.840	Kel Kedungpane	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngadirgo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.950.000	76.950.000	71.968.467	Kel Ngadirgo	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.510.000	75.510.000	72.990.540	Kel Wonopl umbon	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
	(Kel. Wonoplumbon)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatisari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.480.000	87.480.000	80.455.980	Kel Jatisari	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pesantren)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.770.000	76.770.000	72.313.834	Kel Pesantren	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.510.678.390	1.510.678.390	927.256.060			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.510.678.390	1.510.678.390	927.256.060	Kec Mijen	APBD	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	31.722.449.200	31.722.449.200	46.502.934.911			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	502 Kegiatan	502 Kegiatan	20.768.449.200	20.768.449.200	20.714.769.423			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	31.244.550	Kec Mijen	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.240.000.000	1.240.000.000	1.190.000.000	Kec Mijen	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	958.500.000	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Bubakan	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	Kel Karagmalang	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	1.153.000.000	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Sarana dan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000	Kel	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)							Purwosari		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	1.654.000.000	Kel Tambangan	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	1.908.000.000	Kel Wonolopo	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	1.943.000.000	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Kedungpane	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	1.421.716.000	Kel Ngadirgo	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	1.535.000.000	Kel Wonoplumbon	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Jatisari	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	269.649.200	269.649.200	379.683.530	Kec Mijen	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	83.600.000	83.600.000	78.729.900	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	71.000.000	71.000.000	64.400.000	Kel Bubakan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	87.800.000	87.800.000	77.391.450	Kel Karagmalang	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	62.600.000	62.600.000	54.211.580	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	71.000.000	71.000.000	64.842.940	Kel Purwosari	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	66.800.000	66.800.000	61.015.610	Kel Tambangan	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	113.000.000	113.000.000	107.408.763	Kel Wonolopo	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	92.000.000	92.000.000	82.278.500	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	75.200.000	75.200.000	64.850.000	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	75.200.000	75.200.000	69.198.800	Kel Kedungpane	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	108.800.000	108.800.000	100.750.000	Kel Ngadirgo	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	66.800.000	66.800.000	56.392.420	Kel Wonoplumbon	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	113.000.000	113.000.000	104.900.000	Kel Jatisari	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	71.000.000	71.000.000	61.255.380	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	10.954.000.000	10.954.000.000	25.788.165.488			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	109.988.430	Kec Mijen	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	855.800.000	855.800.000	2.058.000.910	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	575.000.000	575.000.000	1.310.773.900	Kel Bubakan	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	341.000.000	341.000.000	692.801.680	Kel Karagmalang	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	294.200.000	294.200.000	562.104.100	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	512.600.000	512.600.000	1.133.434.630	Kel Purwosari	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	403.400.000	403.400.000	849.893.190	Kel Tambangan	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.136.600.000	1.136.600.000	2.774.416.908	Kel Wonolopo	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	949.400.000	949.400.000	2.317.803.490	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	434.600.000	434.600.000	939.827.850	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	855.800.000	855.800.000	2.069.615.460	Kel Kedungpane	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	949.400.000	949.400.000	2.270.229.950	Kel Ngadirgo	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	590.600.000	590.600.000	1.371.943.540	Kel Wonoplumbon	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.057.000.000	2.057.000.000	5.322.729.900	Kel Jatisari	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	855.800.000	855.800.000	1.992.864.690	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	7.800.000	5.770.880	Kec Mijen	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	5.965.980	Kec Mijen	APBD	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	25%	25%	87.000.000	87.000.000	106.375.830			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	60 Angka	60 Angka	87.000.000	87.000.000	106.375.830			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	87.000.000	87.000.000	106.375.830	Kec Mijen	APBD	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	98%	98%	92.000.000	92.000.000	85.489.760			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	92.000.000	92.000.000	85.489.760			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	92.000.000	92.000.000	85.489.760	Kec Mijen	APBD	

Adapun rencana pendapatan dari retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Pendapatan
Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Murni (Rp)	Target Perubahahan (Rp)
I	PENDAPATAN	3.000.000	6.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000	6.000.000
	Retibusi Daerah	3.000.000	6.000.000

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Mijen Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.
4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Lapor Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan Bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

44. KECAMATAN GENUK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

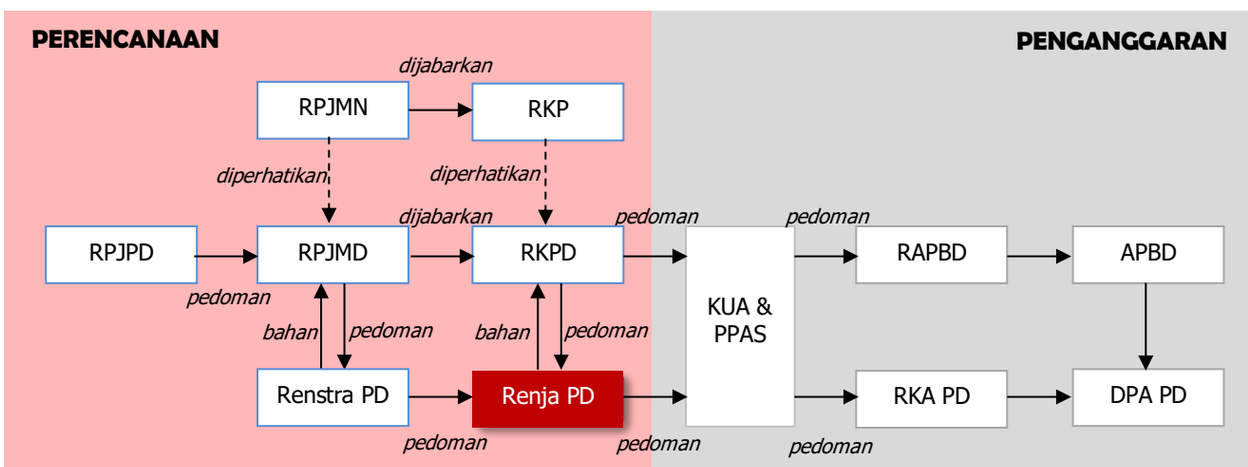

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian visi misi dan program kerja Walikota Semarang Periode 2025-2030; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Genuk Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecmatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Genuk Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2	2	2	1	50	1	50
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2	2	2	2	100	2	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	2	2	2	100	2	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6	6	6	3	50	3	50
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12	12	12	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	9	9	0	0	0	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12	12	12	6	50	6	50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12	12	12	6	50	6	50
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	5	5	2	40	2	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor							
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5	5	5	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	50	50	50	50
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	100	100	50	50	50	50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47	47	47	47	100	47	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	1	33	1	33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11	11	11	0	0	0	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	0	0	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	7	5	71	5	71
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1	1	1	1	100	1	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	13	13	13	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	15	15	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	13	13	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	15	15	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	9	9	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17	17	17	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	15	15	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8	8	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	13	13	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17	17	17	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	15	15	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	10	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	9	9	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	10	0	0	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	12	12	12	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	50
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan	4	4	4	4	100	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		yang dilaporkan di kelurahan							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6	6	8	0	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	4	2	0	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4	4	2	50	2	50

Sumber: Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah koordinasi dan penyusunan RKA SKPD, koordiansi penyusunan Perubahan RKA SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Atas penyesuaian visi misi Presiden dan Walikota Semarang, Kecamatan Genuk telah melaksanakan efisiensi sesuai dengan arahan pada beberapa sub kegiatan khsusnya pada rekening manmin dan perjalanan dinas. Pelaksanaan efisiensi yang dilakukan tidak mempengaruhi pencapaian kinerja.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	APBD PERGESERAN II 2025	Realisasi Anggaran	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1.02	Retribusi Daerah	3.580.000	30.900.000	863%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.580.000	30.900.000	863%
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.580.000	30.900.000	863%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.723.221.927	9.772.732.932	43%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.877.630	7.310.000	9%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.131.630	1.540.000	4%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.998.000	-	0%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.028.000	-	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.238.000	2.530.000	48%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.118.000	-	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.659.200	3.240.000	34%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.704.800	-	0%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.430.929.580	9.506.585.621	47%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.773.552.560	9.287.455.621	47%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	650.940.020	216.050.000	33%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.192.400	3.080.000	96%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.649.600	-	0%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	595.000	-	0%

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	APBD PERGESERAN II 2025	Realisasi Anggaran	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.163.743	43.911.250	8%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.309.970	3.204.000	4%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja modal)	133.377.955	-	0%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.107.918	9.155.500	48%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.893.538	3.731.750	31%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.750.000	17.170.000	28%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.344.382	10.650.000	8%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.379.980	-	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443.268.177	19.915.000	4%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	443.268.177	19.915.000	4%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.776.797	87.878.369	23%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.726.500	46.448.369	26%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.050.297	41.430.000	21%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.206.000	107.132.692	12%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.311.350	95.716.692	25%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.784.600	8.680.000	4%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.600.000	-	0%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.510.050	2.736.000	5%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.320.545.088	1.849.483.590	43%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.082.178.430	674.909.800	62%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.820.960	5.525.000	71%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.074.357.470	669.384.800	62%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.035.840.438	789.181.729	39%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	936.554.796	421.584.251	45%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	83.284.800	25.488.515	31%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	88.458.376	37.158.339	42%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	82.625.922	28.283.063	34%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	79.251.332	34.108.454	43%

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	APBD PERGESERAN II 2025	Realisasi Anggaran	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	85.246.502	23.555.858	28%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	95.740.740	36.181.629	38%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	88.511.330	21.986.578	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	81.836.598	20.497.619	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	84.587.240	33.494.502	40%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	90.320.900	31.943.937	35%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	73.464.836	28.525.918	39%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	82.956.990	20.836.566	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	83.000.076	25.536.500	31%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.202.526.220	385.392.061	32%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.202.526.220	385.392.061	32%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.332.337.532	8.035.980.227	25%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.764.442.863	1.124.182.802	6%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	141.240.220	115.791.900	82%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.125.000.000	67.304.210	6%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	1.151.000.000	17.621.250	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	1.255.000.000	67.519.536	5%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	2.019.000.000	26.515.000	1%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	1.092.000.000	8.793.000	1%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	1.392.000.000	17.644.000	1%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	1.339.000.000	76.406.000	6%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	1.197.000.000	17.528.000	1%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	1.078.000.000	17.447.000	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	1.058.000.000	66.938.750	6%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	1.171.000.000	34.670.500	3%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	950.000.000	17.642.416	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	950.000.000	66.656.290	7%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	1.133.000.000	19.098.000	2%

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	APBD PERGESERAN II 2025	Realisasi Anggaran	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	866.454.350	120.629.050	14%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	90.275.380	38.384.000	43%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	73.419.024	32.473.000	44%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	81.112.730	34.125.400	42%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	84.002.130	46.550.000	55%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	84.586.530	27.930.000	33%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	89.300.000	39.500.000	44%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	66.592.870	27.996.000	42%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	47.157.400	21.572.000	46%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	53.302.184	19.750.000	37%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	73.151.770	39.562.500	54%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	30.025.000	8.660.000	29%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	25.926.635	8.225.000	32%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	47.896.640	21.250.000	44%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.567.894.669	6.911.797.425	51%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	146.000.000	15.890.000	11%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	1.813.100.000	966.591.725	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	1.418.300.000	750.391.200	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	1.065.558.490	552.225.000	52%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	1.052.901.800	547.570.000	52%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	1.473.709.771	774.075.000	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	1.932.300.000	1.027.925.000	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	1.192.028.080	608.775.000	51%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	512.307.768	244.860.000	48%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	737.098.375	369.475.000	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	1.258.832.090	665.447.000	53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	219.800.000	86.317.500	39%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	260.323.920	104.455.000	40%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	436.525.190	197.800.000	45%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	36.586.285	-	0%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.522.900	-	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.962.510	13.275.000	12%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	106.962.510	13.275.000	12%

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	APBD PERGESERAN II 2025	Realisasi Anggaran	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	106.962.510	13.275.000	12%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.664.360	32.780.000	38%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.664.360	32.780.000	38%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	86.664.360	32.780.000	38%
JUMLAH		59.569.731.417	19.704.251.749	33%

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 90 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebesar Rp 59.569.731.417 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.704.251.749 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 39.865.479.668,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan Genuk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2025
Tujuan Renstra													
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	91.64	92.36	94.75	94.88	95.39	95.80
Sasaran Renstra													
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95.00	97.00	98.00	99.00	99.25	99.50		90.00	98.14	99.02	50	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	85.04	86,72	88.40	90.08	-	-	85.04	86.00	50	88.40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	92	95	98	100	-	-	100	100	25	100

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target sebesar 89,00 dan sudah dapat tercapai bahkan melebihi target, dengan realisasi sebesar 95,39 dikarenakan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat bukan merupakan pencapaian secara akumulatif sampai dengan akhir tahun anggaran.
b. Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan standart PATEN" telah tercapai 100% dikarenakan setiap pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat telah memenuhi standart pelayanan PATEN.
c. Sasaran 2 Meningkatnya patisipasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" dengan target akhir tahun sebesar 99.25 dan telah terealisasi 50 pada semester II 2025. Pencapaian lembaga kemasyarakatan aktif telah tercapai setengah dari target tahun 2025 sesuai dengan target kegiatan yang ditetapkan.
d. Sasaran 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum" telah tercapai sebesar 50 dari target sebesar 88,40. Sedangkan indicator kinerja "persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan" sampai dengan semester II 2025 telah terealiasi sebanyak 1 (satu) kegiatan atau sebesar 25% dari total 4 kegiatan selama tahun 2025.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Genuk, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Genuk terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat diantaranya:

a. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.
b. Masih terdapat permasalahan genangan pada halaman Kantor Kecamatan Genuk di awal tahun 2025 akibat curah hujan dengan intensitas sedang karena lokasi kantor Kecamatan Genuk lebih rendah dari jalan sehingga Masyarakat pengguna layanan harus menggunakan perahu karet.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan
    a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    b. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

2. Peluang
    a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi

tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan

dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
   b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
   c. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
   d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
   e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Genuk Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Genuk Kota Semarang

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Retribusi Daerah				20.000.000		20.000.000	
Retribusi Jasa Usaha				20.000.000		20.000.000	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				20.000.000		20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	23.030.679.730	100%	23.030.679.730	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	3	77.602.836	3	77.602.836	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	40.856.836	1	40.856.836	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	7.998.000	1	7.998.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	8.028.000	1	8.028.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	5.238.000	1	5.238.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.118.000	1	4.118.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	9.659.200	2	9.659.200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1.704.800	1	1.704.800	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	20.443.085.761	100%	20.443.085.761	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Genuk	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	19.143.392.141	100%	19.143.392.141	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Genuk	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	1.295.793.820	100%	1.295.793.820	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3.192.400	1	3.192.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	112.400	1	112.400	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	595.000	1	595.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	913.789.518	100%	913.789.518	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	9	48.508.190	9	48.508.190	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja modal)	Kecamatan Genuk	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	248.737.142	12	248.737.142	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	19.107.918	12	19.107.918	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Genuk	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	11.893.538	12	11.893.538	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Genuk	Jumlah tamu yang berkunjung	1900	60.750.000	1900	60.750.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15	88.019.382	15	88.019.382	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	436.773.348	5	436.773.348	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	288.137.194	100%	288.137.194	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Peralatan dan mesin lainnya	3	288.137.194	3	288.137.194	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	383.597.421	100%	383.597.421	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Genuk	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	184.547.124	12	184.547.124	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Genuk	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	199.050.297	12	199.050.297	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	924.467.000	100%	924.467.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Genuk	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	366.498.850	33	366.498.850	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	198.784.600	3	198.784.600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	252.823.000	3	252.823.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	106.360.550	3	106.360.550	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	3.412.120.597	95,00%	3.412.120.597	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1.202.178.430	1	1.202.178.430	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	7.820.960	1	7.820.960	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1.194.357.470	1	1.194.357.470	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.594.587.997	100%	1.594.587.997	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	573.024.976	100%	573.024.976	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Bangetayu Kulon	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	77.678.369	100%	77.678.369	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Bangetayu Wetan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	81.814.895	100%	81.814.895	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Banjardowo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	74.936.921	100%	74.936.921	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Gebangsari	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	81.265.165	100%	81.265.165	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Genuksari	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	75.353.021	100%	75.353.021	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Karangroto	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	97.754.573	100%	97.754.573	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Kudu	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	84.981.989	100%	84.981.989	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Muktiharjo Lor	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	71.943.117	100%	71.943.117	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Penggaron Lor	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	77.679.926	100%	77.679.926	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Sembungharjo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	80.427.419	100%	80.427.419	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Terboyo Kulon	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	66.557.522	100%	66.557.522	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Terboyo Wetan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	78.063.509	100%	78.063.509	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Trimulyo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	73.106.595	100%	73.106.595	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	615.354.170	100%	615.354.170	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	615.354.170	4	615.354.170	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	55.722.879.062	100%	55.722.879.062	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	18.813.834.393	12	18.813.834.393	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	141.240.220	100%	141.240.220	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Genuk	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Bangetayu Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.175.490.000	100%	1.175.490.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Bangetayu Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.255.000.000	100%	1.255.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Banjardowo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	2.019.000.000	100%	2.019.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Gebangsari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.092.000.000	100%	1.092.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Genuksari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.392.000.000	100%	1.392.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Karangroto	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.339.000.000	100%	1.339.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Kudu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.197.000.000	100%	1.197.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Muktiharjo Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.078.000.000	100%	1.078.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Penggaron Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.058.000.000	100%	1.058.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Sembungharjo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.171.000.000	100%	1.171.000.000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terboyo Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	950.000.000	100%	950.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terboyo Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	950.000.000	100%	950.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Trimulyo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.133.000.000	100%	1.133.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	912.461.550	100%	912.461.550	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Bangetayu Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	85.988.330	100%	85.988.330	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Bangetayu Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	70.169.024	100%	70.169.024	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Banjardowo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	78.908.250	100%	78.908.250	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Gebangsari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	84.002.130	100%	84.002.130	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Genuksari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	84.586.530	100%	84.586.530	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Karangroto	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	89.300.000	100%	89.300.000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Kudu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	60.228.730	100%	60.228.730	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Muktiharjo Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	47.157.400	100%	47.157.400	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Penggaron Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	53.302.184	100%	53.302.184	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Sembungharjo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	73.151.770	100%	73.151.770	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terboyo Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	30.025.000	100%	30.025.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terboyo Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	20.926.635	100%	20.926.635	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Trimulyo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	47.896.640	100%	47.896.640	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	36.909.044.669	12	36.909.044.669	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	146.000.000	12	146.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Bangetayu Kulon	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	5.147.350.000	12	5.147.350.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Bangetayu Wetan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	3.987.050.000	12	3.987.050.000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Banjardowo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2.929.908.490	12	2.929.908.490	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Gebangsari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2.874.001.800	12	2.874.001.800	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Genuksari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	4.118.209.771	12	4.118.209.771	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Karangroto	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	5.511.700.000	12	5.511.700.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Kudu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	3.286.578.080	12	3.286.578.080	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Muktiharjo Lor	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1.270.157.768	12	1.270.157.768	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Penggaron Lor	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1.947.598.375	12	1.947.598.375	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Sembungharjo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	3.480.132.090	12	3.480.132.090	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Terboyo Kulon	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	419.650.000	12	419.650.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Terboyo Wetan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	548.973.920	12	548.973.920	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Trimulyo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1.067.625.190	12	1.067.625.190	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	36.586.285	1	36.586.285	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Genuk	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2	137.522.900	2	137.522.900	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	80.087.499	30%	80.087.499	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30%	80.087.499	30%	80.087.499	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	80.087.499	2	80.087.499	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	86.664.360	100%	86.664.360	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	86.664.360	4	86.664.360	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Genuk	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	86.664.360	4	86.664.360	
JUMLAH				82.332.431.248		82.332.431.248	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Genuk".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kerja pelayanan perangkat daerah dengan indicator : nilai AKIP;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public dengan indicator : jumlah inovasi pelayanan public;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan di Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator : persentase lembaga kemasyarakatan aktif;
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indicator : Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan Renstra			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Genuk	Angka	94,99
Sasaran Renstra			
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100
Tercapainya Target Pendapatan Kecamatan Genuk untuk mendukung tercapainya target PAD Kota Semarang	Jumlah Pendapatan Pada Kecamatan Genuk	Rupiah	3.580.000
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Genuk	Angka	74,00

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Genuk Kota Semarang

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
4.1.02	Retribusi Daerah					3.580.000	3.580.000	20.000.000		
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					3.580.000	3.580.000	20.000.000		
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					3.580.000	3.580.000	20.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	22.971.906.445	22.971.906.445	23.030.679.730		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	3	3	3	122.832.370	122.832.370	77.602.836		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	1	1	62.695.030	62.695.030	40.856.836	APBD	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	1	10.587.400	10.587.400	7.998.000	APBD	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	10.746.900	10.746.900	8.028.000	APBD	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	1	15.696.400	15.696.400	5.238.000	APBD	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	9.638.900	9.638.900	4.118.000	APBD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	2	2	11.251.540	11.251.540	9.659.200	APBD	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1	1	2.216.200	2.216.200	1.704.800	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	20.432.405.180	20.432.405.180	20.443.085.761		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	19.773.552.560	19.773.552.560	19.143.392.141		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	651.569.220	651.569.220	1.295.793.820	APBD	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	3.416.200	3.416.200	3.192.400	APBD	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	1	2.761.000	2.761.000	112.400	APBD	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1.106.200	1.106.200	595.000	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	669.386.246	669.386.246	913.789.518		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	9	9	9	77.309.970	77.309.970	48.508.190	APBD	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja modal)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	133.377.955	133.377.955	248.737.142	APBD	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	50.972.220	50.972.220	19.107.918	APBD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	26.696.121	26.696.121	11.893.538	APBD	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1900	1900	1900	60.750.000	60.750.000	60.750.000	APBD	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15	15	15	224.900.000	224.900.000	88.019.382	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	5	5	95.379.980	95.379.980	436.773.348	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	443.268.177	443.268.177	288.137.194		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	3	3	3	443.268.177	443.268.177	288.137.194		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	380.776.797	380.776.797	383.597.421		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	181.726.500	181.726.500	184.547.124	APBD	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	12	12	199.050.297	199.050.297	199.050.297	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	923.237.675	923.237.675	924.467.000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	33	33	445.343.025	445.343.025	366.498.850	APBD	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	198.784.600	198.784.600	198.784.600	APBD	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	225.600.000	225.600.000	252.823.000	APBD	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung	3	3	3	53.510.050	53.510.050	106.360.550	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Kantor atau Bangunan Lainnya								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	95,00%	95,00%	4.511.829.376	4.511.829.376	3.412.120.597		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1	1	1.098.899.930	1.098.899.930	1.202.178.430		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	7.820.960	7.820.960	7.820.960	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1.091.078.970	1.091.078.970	1.194.357.470	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.206.403.226	2.206.403.226	1.594.587.997		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	997.403.226	997.403.226	573.024.976	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	99.000.000	99.000.000	77.678.369	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	97.000.000	97.000.000	81.814.895	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94.000.000	94.000.000	74.936.921	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94.000.000	94.000.000	81.265.165	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	97.000.000	97.000.000	75.353.021	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	102.000.000	102.000.000	97.754.573	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94.000.000	94.000.000	84.981.989	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	88.000.000	88.000.000	71.943.117	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	90.000.000	90.000.000	77.679.926	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	96.000.000	96.000.000	80.427.419	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	85.000.000	85.000.000	66.557.522	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	85.000.000	85.000.000	78.063.509	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	88.000.000	88.000.000	73.106.595	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.206.526.220	1.206.526.220	615.354.170		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	4	4	1.206.526.220	1.206.526.220	615.354.170		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	34.271.974.595	34.271.974.595	55.722.879.062		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	12	12	18.856.785.410	18.856.785.410	18.813.834.393		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	141.240.220	141.240.220	141.240.220		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	100%	100%	100%	1.151.000.000	1.151.000.000	1.175.490.000		

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.255.000.000	1.255.000.000	1.255.000.000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	2.019.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.092.000.000	1.092.000.000	1.092.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.392.000.000	1.392.000.000	1.392.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.339.000.000	1.339.000.000	1.339.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.197.000.000	1.197.000.000	1.197.000.000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.078.000.000	1.078.000.000	1.078.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.058.000.000	1.058.000.000	1.058.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	1.133.000.000	1.133.000.000	1.133.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	100%	100%	100%	1.155.545.190	1.155.545.190	912.461.550	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pembangunan di Kecamatan								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	85.988.330	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	70.169.024	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	78.908.250	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	84.002.130	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	84.586.530	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	89.300.000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	60.228.730	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	47.157.400	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	53.302.184	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	73.151.770	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	30.025.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	20.926.635	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	47.896.640	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	12	12	15.415.189.185	15.415.189.185	36.909.044.669		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	146.000.000	146.000.000	146.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	2.057.600.000	2.057.600.000	5.147.350.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.608.200.000	1.608.200.000	3.987.050.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.229.600.000	1.229.600.000	2.929.908.490	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.214.000.000	1.214.000.000	2.874.001.800	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.679.000.000	1.679.000.000	4.118.209.771	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	2.193.800.000	2.193.800.000	5.511.700.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.346.000.000	1.346.000.000	3.286.578.080	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	580.400.000	580.400.000	1.270.157.768	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	838.400.000	838.400.000	1.947.598.375	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	1.432.400.000	1.432.400.000	3.480.132.090	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	240.200.000	240.200.000	419.650.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	287.000.000	287.000.000	548.973.920	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	498.200.000	498.200.000	1.067.625.190	APBD	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	1	51.866.285	51.866.285	36.586.285	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2	2	2	12.522.900	12.522.900	137.522.900	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	30%	30%	109.462.510	109.462.510	80.087.499		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30%	30%	30%	109.462.510	109.462.510	80.087.499		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	2	2	109.462.510	109.462.510	80.087.499	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	103.164.360	103.164.360	86.664.360		

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	4	4	103.164.360	103.164.360	86.664.360		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4	4	103.164.360	103.164.360	86.664.360	APBD	
	JUMLAH					61.968.337.286	61.968.337.286	82.332.431.248		

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan

secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

45. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

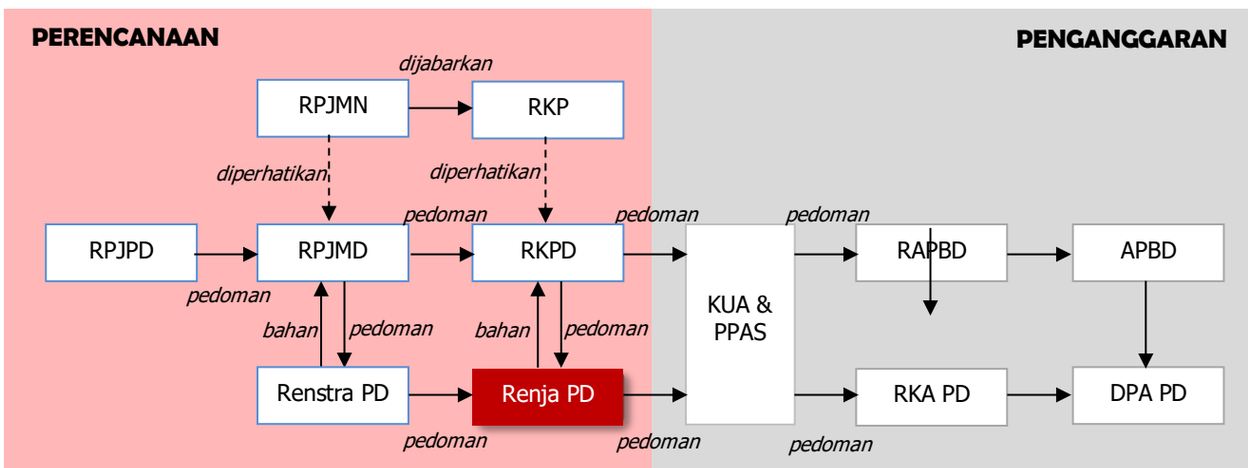

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun

2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Efisiensi sebagai tindaklanjut atas instruksi presiden RI No. 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres ini dikeluarkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan efisien, terutama di tengah tantangan ekonomi (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2025, termasuk pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025..

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2025 dengan

berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja KECAMATAN Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian target Renstra 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian target Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100	100 Persen	50%	50%	50%	90%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100	100 Persen	50%	50%	50%	90%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100	100 Persen	50%	50%	50%	90%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	59 Dokumen	47 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	0	50 Dokumen	1
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	19 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20%	20 Dokumen	83%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0	0	4 Dokumen	80%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0	0	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0	0	4 Dokumen	80%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0	0	4 Dokumen	80%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	0	0	4 Laporan	80%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	10 Dokumen%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	370 Org/bl	296 Org/bl	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	50 Persen	376	105 Persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	48 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50 Persen	54 Dokumen	90 Persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100 Persen	5 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	2 Paket	2 Paket	100 Persen	10Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	48 Paket	12 Paket	6 Paket	50 Persen	54 Paket	90 Persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	24 Paket	6 Paket	3 Paket	50 Persen	27 Paket	90 Persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen	8 Dokumen	80 Persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.01.2.07.06	Mesin LainnyaPengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	12 Unit	3 Unit	1 Unit	33%	13 Unit	87 Persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	48 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	60 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	80%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Persen	8 Unit	80%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	80%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	97 Persen	98 Persen	96 Persen	93 Persen	97 Persen	97 Persen	98 Persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	4 Angka	1 Angka	1 Angka	100 Persen	1 Angka	100 Persen
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	NA	NA	2 laporan	0 laporan	0 Persen	0 laporan	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	perangkat daerah dan instansi vertical terkait	pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50 Persen	4 Dokumen	90 Persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	54 Laporan	90 Persen
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	99 Persen	99 Persen	99 Persen	100 Persen	99 Persen	99 Persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			272 Kegiatan				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	20 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	28 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Persen	28 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	65 Unit	52 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Persen	52 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	40 Unit	10 Unit	0 Unit	0 Persen	40 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gajahmungkur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	40 Unit	10 Unit	0 Unit	0 Persen	40 Unit	80 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	36 Unit	9 Unit	0 Unit	0 Persen	36 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lempongsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55 Unit	44 Unit	11 Unit	3 Unit	28 Persen	47 Unit	86 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	40 Unit	10 Unit	0 Unit	0 Persen	40 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	48 Unit	12 Unit	0 Unit	0 Persen	48 Unit	80 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendungan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	36 Unit	9 Unit	5 Unit	60 Persen	41 Unit	91 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	50 Persen	18 Pokmas / Ormas	90 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	620 Pokmas / Ormas	496 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	56 Pokmas / Ormas	45 Persen	552 Pokmas / Ormas	89 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	610 Pokmas / Ormas	488 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	62 Pokmas / Ormas	51 Persen	550 Pokmas / Ormas	92 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	59 Pokmas / Ormas	44 Persen	535 Pokmas / Ormas	89 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	615 Pokmas / Ormas	492 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	50 Persen	535 Pokmas / Ormas	86 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lempongsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	59 Pokmas / Ormas	44 Persen	535 Pokmas / Ormas	89 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petompon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	625 Pokmas / Ormas	500 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	57 Pokmas / Ormas	45 Persen	557 Pokmas / Ormas	89 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9Sampangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	63 Pokmas / Ormas	45 Persen	539 Pokmas / Ormas	89 Persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	600 Pokmas / Ormas	480 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	70 Pokmas / Ormas	58 Persen	550 Pokmas / Ormas	92 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	45 Dokumen	36 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 Persen	45 Dokumen	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	20 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Duwur)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Ngisosr)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kel. Gajahmungkur)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karangrejo)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lempongsari)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Diselenggarakan (Petompon)							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendungan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendungan)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Sampangan)	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	40 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50 Persen	9 Laporan	90 Persen
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	20 Persen	25 Persen	19 Persen	76 Persen	23 Persen	23 Persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25 Angka	30 Angka	28.00 Angka	29.00 Angka	80 Persen	29.00 Angka	70 Persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	40 Laporan	32 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50 Persen	36 Laporan	90 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	50 Persen	90 Persen	90 Persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50 Persen	8 Kegiatan	90 Persen
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500 Orang	400 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Persen	450 Orang	90 Persen

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah sub kegiatan rutin yang memang terjadwal di awal tahun seperti sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Hampir semua Sub Kegitan mengalami refocusing anggaran sebagai tindaklanjut dari inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara , namun tidak sampai mempengaruhi jumlah ouput sub kegiatan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pergeseran anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
1	2	3	5	6=5/4
7.01	KECAMATAN	36,804,736,840	13,521,734,449	36.74
	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	36,804,736,840	13,521,734,449	36.74
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15,831,003,090	6,778,598,480	42.82
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,959,700	3,000,000	3.85
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,754,400	-	0.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4,835,400	-	0.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,190,900	-	0.00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,818,200	-	0.00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,956,000	-	0.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,060,000	-	0.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,344,800	3,000,000	89.69
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,431,164,600	6,539,811,541	45.32
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,953,656,000	6,354,641,541	45.54

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472,000,000	183,670,000	38.91
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,723,800	1,500,000	87.02
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,836,200	-	0.00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,948,600	-	0.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	525,447,521	51,092,500	9.72
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5,925,000	1,512,000	25.52
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109,134,400	-	0.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,500,000	18,819,000	31.11
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,935,000	4,444,000	29.76
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,000,000	1,152,500	10.48
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212,360,571	21,700,000	10.22
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	111,592,550	-	0.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43,918,526	42,660,000	97.13
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,918,526	42,660,000	97.13
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,050,353	86,894,654	31.03
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,300,000	64,757,654	31.24
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,750,353	22,137,000	30.43
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472,462,390	55,139,785	11.67
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190,000,000	41,420,100	21.80
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148,810,000	-	0.00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94,737,390	13,719,685	14.48

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38,915,000	-	0.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,524,842,750	1,104,485,985	31.33
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	114,250,000	81,100,000	70.98
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	2,250,000	-	0.00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112,000,000	81,100,000	72.41
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1,485,000,000	179,028,300	12.06
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	682,000,000	179,028,300	26.25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bendan Duwur	98,000,000	39,569,661	40.38
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bendan Ngisor	98,000,000	42,717,868	43.59
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gajahmungkur)	108,000,000	49,334,970	45.68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keluarahan Karangrejo)	99,000,000	44,620,223	45.07
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lempongsari)	100,000,000	47,951,990	47.95
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Petompon)	100,000,000	42,097,613	42.10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendungan)	98,000,000	55,055,826	56.18

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sampangan)	98,000,000	33,728,039	34.42
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,925,592,750	844,357,685	43.85
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,925,592,750	844,357,685	43.85
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,172,400,000	239,869,550	1.40
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9,752,450,000	215,584,550	2.21
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	83,000,000	27,534,000	33.17
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1,050,000,000	27,534,000	2.62
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	950,000,000	17,649,000	1.86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	950,000,000	17,660,000	1.86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gajahmungkur)	950,000,000	17,660,100	1.86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	963,000,000	17,732,250	1.84
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lempongsari)	950,000,000	275,967,200	29.05
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	950,000,000	17,554,650	1.85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	950,000,000	17,615,700	1.85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendungan)	950,000,000	451,861,200	47.56
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	606,450,000	156,665,900	25.83
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	50,000,000	22,319,500	44.64
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	50,000,000	36,792,500	73.59
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	50,000,000	27,462,000	54.92
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	50,000,000	12,600,000	25.20

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lempongsari)	50,000,000	26,580,000	53.16
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petompon)	50,000,000	25,150,000	50.30
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sampangan)	50,000,000	35,040,000	70.08
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	50,000,000	47,505,000	53.16
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7,419,950,000	24,285,000	0.33
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	127,000,000	24,285,000	19.12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	678,200,000	300,508,100	44.31
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	674,000,000	304,430,000	45.17
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	1,669,400,000	801,512,000	48.01
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	756,200,000	335,500,000	44.37
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	849,800,000	394,725,000	46.45
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	814,400,000	377,880,000	46.40
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendungan)	658,400,000	308,638,100	46.88
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	1,134,800,000	519,500,000	45.78
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7,750,000	-	0.00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50,000,000	6,800,000	13.60
7.01.04 AM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	194,516,000	104,100,000	53.52
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81,975,000	104,100,000	126.99
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81,975,000	104,100,000	126.99
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81,975,000	27,000,000	32.94
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81,975,000	27,000,000	32.94

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARARAN 2025 MURNI	REALISASI ANGGARAN S.D TW II	
			KEUANGAN	PROSENTASE
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81,975,000	27,000,000	32.94

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 62 sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang adalah sebesar Rp 36.804.736.840,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.521.723.449,- (36.74 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 23,283.002.391,- (63,26%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU 2021-2026						Realisasi				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
TUJUAN RENSTRA												
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00 angka	93.00 angka	94.00 angka	95.00 angka	96.00 angka	97.00 angka	95.29 Angka	96.8 Angka	97 Angka	93.33 Angka	96 Angka

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU 2021-2026						Realisasi				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi												
SASARAN RENSTRA												
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70.01 Nilai	71.00 Nilai	72.00 Nilai	73.00 Nilai	74.00 Nilai	75.00 Nilai	72.31 Nilai	74.90 Nilai	75.4 Nilai	76.15 Nilai	76.15 Nilai
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00	NA	NA	NA	NA
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90%	100%	100%	100%	100%	100 %	NA	100 %	100 %	50%	100%
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00 Persen	80.00 Persen	85.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	100 %	100 %	100 %	50%	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00 Persen	40.00 Persen	45.00 Persen	50.00 Persen	55.00 Persen	60.00 Persen	42.17	NA	NA	NA	NA
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	82%	83%	85%	87%	88%	90%	NA	100 %	100 %	56%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,	Persentase Pembinaan	0.00 Persen	60.00 Persen	65.00 Persen	70.00 Persen	80.00 Persen	90.00 Persen	62.96	NA	NA	NA	NA

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU 2021-2026						Realisasi				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan											
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100 %	NA	100 %	100 %	50%	100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Pada Tahun 2022 ada Review terkait tarhet Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gajahmungkur, sehingga terdapat penyesuaian yang NA (Not Availabel)

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Dari target sebesar 96, realisasinya sebesar 93.33 % (capaian 97,21)%;
b. Sasaran Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut :
    1) Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 100 % (capaian 100%);
    2) Sasaran 2 : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 99 %, realisasinya sebesar 50,00 % (capaian 50%).
    3) Sasaran 3 : “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 56 % dari target sebesar 88 % (capaian 63 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 50 % dari target

sebesar 98 % (capaian 51 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.

4) Sasaran 4 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 74,00 realisasinya sebesar 76.15 (capaian 102.9 %).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga
terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah:

1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Gajahmungkur belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gajahmungkur hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
   Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2025 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   Untuk tahun 2023, secara umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Masa Transisi dari RPJM Kota Semarang Tahun 2021-2026 ke RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
   Memasuki tahun 2025 sebagai tahun transisis dari politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih

terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				45,880,886,740					45,880,886,740
7.01.01 AM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	16.039,852.665	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	16.039,852.665
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	LEMBAGA				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	LEMBAGA	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12 Dokumen	49,518,082	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12 Dokumen	49,518,082
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40,271,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40,271,000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Gajah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1,415,484	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Gajah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1,415,484

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Dokumen RKA-SKPD	mungkur	Laporan Hasil Koordinasi			Dokumen RKA-SKPD	mungkur	Laporan Hasil Koordinasi		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,077,463	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,077,463
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,290,839	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,290,839
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,350,896	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,350,896
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d	1 Laporan	112,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d	1 Laporan	112,400

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	14,175,361,709	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	14,175,361,709
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	13,237,464,878	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	13,237,464,878
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	934,984,431	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	934,984,431
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,500,000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	412,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	412,400

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						Semesteran SKPD				
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	905,579,594	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	905,579,594
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,925,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,925,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	324,861,032	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	324,861,032
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,500,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14,935,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14,935,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189,974,111	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189,974,111
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	308,384,451	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	308,384,451
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	76,115,486	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	76,115,486
7.01.01.2.07.06	Mesin LainnyaPengadaan Peralatan dan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	76,115,486	Mesin LainnyaPengadaan Peralatan dan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	76,115,486
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	280,050,353	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	280,050,353

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207,300,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	72,750,353	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	72,750,353
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	553,227,441	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	553,227,441
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	163,871,028	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	163,871,028
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	265,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	265,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	53,963,896	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	53,963,896

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gajah mungkur	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gajah mungkur	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70,392,517	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70,392,517
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	2,524,839,698	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	2,524,839,698
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	95,250,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	95,250,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	2 lapaoran	2,000,000	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	2 lapaoran	2,000,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						instansi vertical terkait				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	93,250,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	93,250,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1,121,564,798	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1,121,564,798
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	395,125,017	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	395,125,017
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Bendan duwur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	89,804,024	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Bendan duwur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	12 Laporan	89,804,024

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
								(Kelurahan Bendan Duwur		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Bendan Ngisor	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	96,686,844	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Bendan Ngisor	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	96,686,844
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gajahmungkur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gajahmungkur)	12 Laporan	88,918,813	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gajahmungkur	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gajahmungkur)	12 Laporan	88,918,813
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangrejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keluarahan Karangrejo)	12 Laporan	95,916,295	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangrejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keluarahan Karangrejo)	12 Laporan	95,916,295
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kelurahan Lempongsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	96,344,900	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Lempongsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	96,344,900

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Wilayah Kecamatan		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lempongsari)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lempongsari)		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petompon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Petompon)	12 Laporan	90,089,325	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petompon	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Petompon)	12 Laporan	90,089,325
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendungan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendungan)	12 Laporan	80,215,450	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendungan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bendungan)	12 Laporan	80,215,450
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sampangan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sampangan)	12 Laporan	88,464,129	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sampangan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sampangan)	12 Laporan	88,464,129
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan	Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	1,308,024,900	Pelaksanaan Urusan	Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	1,308,024,900

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Gajah mungkur	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Gajah mungkur	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1,308,024,900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1,308,024,900
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	27,041,667,037	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	27,041,667,037
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9,692,477,933	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9,692,477,933
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakata n	39,697,500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakata n	39,697,500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,050,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,050,000,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajah mungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	963,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	963,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lempongsari)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lempongsari)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950,000,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	476,525,172	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	476,525,172
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124 Pokmas / Ormas	79,321,640	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124 Pokmas / Ormas	79,321,640
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	122 Pokmas / Ormas	50,622,690	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	122 Pokmas / Ormas	50,622,690
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	71,234,490	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	71,234,490
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas / Ormas	64,300,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas / Ormas	64,300,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	119 Pokmas / Ormas	68,200,000	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	119 Pokm	68,200,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kelurahan (Lempongsari)	Lempongsari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan (Lempongsari)	Lempongsari	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	as / Ormas	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas / Ormas	52,672,690	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas / Ormas	52,672,690
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	68,290,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	68,290,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	58,613,750	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	58,613,750
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	17,349,189,105	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	17,349,189,105
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	118,495,916	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	118,495,916
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Duwur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,489,868,552	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	Kelurahan Bendan duwur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Duwur)	8 Lembaga Kemas	1,489,868,552

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
									yarakatan	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Ngisosr)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,529,948,200	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Ngisosr)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,529,948,200
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kel. Gajahmungkur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	4,189,750,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kel. Gajahmungkur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	4,189,750,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karangrejo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,744,485,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karangrejo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,744,485,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lempongsari)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,942,777,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lempongsari)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,942,777,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Petompon)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,919,700,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	Kelurahan Petompon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Petompon)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,919,700,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendungan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,481,105,687	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendungan)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendungan)	8 Lembaga Kemas	1,481,105,687

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
									yarakatan	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Sampangan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,757,725,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Sampangan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,757,725,000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan	6,703,750	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan	6,703,750
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	168,630,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	168,630,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	193,652,340	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	193,652,340
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	28.00 Angka	80,875,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	28.00 Angka	80,875,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	8 Laporan	80,875,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	8 Laporan	80,875,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	80,875,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	80,875,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	80,875,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gajah mungkur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	80,875,000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Kecamatan Gajah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	100 Orang	80,875,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Kecamatan Gajah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	100 Orang	80,875,000

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	mungkur	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	mungkur	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Paving Jalan Atas RT 03 RW 07, Kel. Bendan Duwur	141,442,714	Bendan Duwur	Kecamatan
2	Peningkatan Balai RT 05 RW 02 & Poskamling RT 02 RW 02, Kel. Bendan Ngisor	141,442,714	Bendan Ngisor	Kecamatan
3	Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan, Belakang Rumah Bp. Anam Murdono RT 03 RW 06, Kel. Lempongsari	141,442,714	Lempongsari	Kecamatan
4	Pembangunan Pagar Pengaman BRC, Belakang Rumah Bp. Bambang Sampai Balai RT 04 dan Depan Rumah Ibu Murni Sampai Bp. Slamet RT 04 RW 03 Kel. Lempongsari	141,442,714	Lempongsari	Kecamatan
5	Pembangunan Saluran Air (Kiri Kanan), RT 01 RW 05 Kel. Petompon	141,442,714	Petompon	Kecamatan
6	Perbaikan Aspal Jalan, Jalan Kendeng Barat dan Lamongan Barat VI RT 02 dan RW 06 Kel. Sampangan	141,442,714	Sampangan	Kecamatan
7	Pembangunan Talud Jalan, Jl. Merbabu RT 02 RW 04 Kel. Bendungan	141,442,714	Bendungan	Kecamatan
8	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Wilayah Lempongsari RT 00 RW 00 LEMPONGSARI	50,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
9	PEMBUATAN TALUD TEBING LEMPONGSARI RT 05 RW 01 KEL. LEMPONGSARI	110,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
10	RENOVASI TAMAN RW 1 DAN PEMBUATAN PAGAR LEMPONGSARI RT 01 RW 01 KEL. LEMPONGSARI	63,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
11	PEMBUATAN SALURAN AIR LEMPONGSARI RT 01 RW 02 KEL. LEMPONGSARI	100,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
12	PEKERJAAN TALUD JALAN LEMPONGSARI RT.04 RW.03 KEL. LEMPONGSARI	100,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
13	PEKERJAAN AKSES JALAN BARU LEMPONGSARI RT 03 RW 04 KEL. LEMPONGSARI	75,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
14	PEMBANGUNAN TALUD JALAN LEMPONGSARI RT 04 RW 04 KEL. LEMPONGSARI	63,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
15	PEMBANGUNAN TALUD JALAN LEMPONGSARI RT.01 RW.05 KEL. LEMPONGSARI	100,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
16	PEMBUATAN TALUD JALAN LEMPONGSARI RT.06 RW.06 KEL. LEMPONGSARI	100,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
17	REHAB SALURAN MELINTANG JL LAWU LEMPONGSARI RT.03 RW.07 KEL. LEMPONGSARI	70,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
18	PENGASPALAN JALAN JL. BENDO LEMPONGSARI RT.04 RW.08 KEL. LEMPONGSARI	80,000,000	Kel. Lempongsari	Kel. Lempongsari
19	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 BENDAN DUWUR	50,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
20	Pekerjaan Pengaspalan Jl. Gunung Talang RT 02 RW 02 Kel. Bendan Duwur	80,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
21	Pekerjaan Pengaspalan Talang Barat II RT 01 RW 04 Kel. Bendan Duwur	50,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
22	PEMBANGUNAN POSYANDU RW 05 KEL. BENDAN DUWUR	80,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
23	Pekerjaan Saluran dan tutup Jl. Talangsari RT 03 RW 06 Kel. Bendan Duwur	100,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
24	Pembangunan Gudang Sampah RW 03 Kel. Bendan Duwur	50,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
25	PEKERJAAN SALURAN RT 03 RW 05 KEL. BENDAN DUWUR	60,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
26	Pekerjaan Pengaspalan Gang Langgar rt 01 rw 05 Kel. Bendan Duwur	62,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
27	Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pawiyatanluhur Slt VII RT 03 RW 01 Kel. Bendan Duwur	100,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
28	Pekerjaan Saluran Depan Makam RT 03 RW 02 Kel. Bendan Duwur	55,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
29	Pekerjaan Pengaspalan Jl. Inspeksi RW 04 Bendan Duwur	120,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
30	Pekerjaan Talud RT 03 RW 07 Kel. Bendan Duwur	59,520,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
31	Pekerjaan Talud RT 01 RW 07 Kel. Bendan Duwur	50,000,000	Bendan Duwur	Bendan Duwur
32	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Bendan Ngisor RT 0 RW 0 BENDAN NGISOR	50,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
33	Penguatan Talud Kali Tuk - Jl. Lamongan V RT.05 RW.01 Kel. Bendan Ngisor	50,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
34	Peningkatan Saluran Air - Jl. Bukit Unggul Raya, Taman Lamongan I,II,III RT.02 RW.01 Kel. Bendan Ngisor	55,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
35	Pengaspalan Jalan - Jl. Lamongan Selatan I,II dan Jl. Lamongan I RT.07 RW.01 Kel. Bendan Ngisor	78,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
36	Pengaspalan Jalan - Jl. Bukit Unggul I RT.04 RW.02 Kel. Bendan Ngisor	87,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
37	Normalisasi Saluran Air - Jl. Kendeng III RT.03 RW.03 Kel. Bendan Ngisor	70,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
38	Perbaikan Saluran/Selokan Air - Jl. Kendeng II-B RT.05 RW.03 Kel. Bendan Ngisor	68,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
39	Penggantian Pintu Gerbang, Penyempurnaan Paving & Pemasangan Lampu - Jl. Kendeng VIII (Akses Jl.Kendeng IV ke Kendeng V Atas) RT.03 RW.03 Kel. Bendan Ngisor	50,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
40	Peningkatan Penutup Saluran Lanjutan - Jl. Stonen Utara I RT.02 RW.04 Kel. Bendan Ngisor	70,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
41	Pengaspalan Jl Stonen Utara II Ke Timur - Jl. Stonen Utara II RT.03 RW.04 Kel. Bendan Ngisor	75,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
42	Pekerjaan Lanjutan Balai RW 05 - Jl. Tumpang I RT.02 RW.05 Kel. Bendan Ngisor	72,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
43	Pembuatan Talud Jalan - Jl. Tumpang V RT.03 RW.05 Kel. Bendan Ngisor	70,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
44	Balai Serbaguna - Jl. Tumpang I RT.04 RW.05 Kel. Bendan Ngisor	68,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
45	Saluran Air JL. TUMPANG IV Gang Buntu Kel. Bendan Ngisor	50,000,000	Bendan Ngisor	Bendan Ngisor
46	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 GAJAHMUNGKUR	50,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
47	Pembangunan Saluran Air Jl Dieng RT 001 RW 001 Kel. Gajahmungkur	85,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
48	Perbaikan Saluran Air Wilayah RT 008 RW 002 Kel. Gajahmungkur	125,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
49	Pembangunan Saluran Air/Gorong-Gorong Wilayah RT 006 & RT 008 Di RW 003 Kel. Gajahmungkur	130,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
50	Pembangunan Saluran Air RT 003 RW 004 Kel. Gajahmungkur	88,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
51	Pembangunan Saluran Air Jl Papandayan Menuju Wil Bensor RT 009 RW 008 Kel. Gajahmungkur	100,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
52	Pembangunan Saluran Air Jl Tengger Utara Depan Sdn Gajahmungkur 04 RT 009 RW 007 Kel. Gajahmungkur	80,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
53	PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT 03 RW 03 (SEBELAH BALAI RW 03) Kel. Gajahmungkur	88,500,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
54	Drainase/Saluran Udicth + 2 Bak Kontrol RT 007 RW 005 Kel. Gajahmungkur	100,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
55	Pembangunan Gapura Jl Tumpang IX RT 009 RW 009 Kel. Gajahmungkur	80,000,000	Kel. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur
56	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan RT 0 RW 0 KARANGREJO	50,000,000	Karangrejo	Karangrejo
57	PEMBUATAN SALURAN JL. KARANGREJO TIMUR RT 5 RW 1 KEL. KARANGREJO	70,000,000	Karangrejo	Karangrejo
58	PENGASPALAN JL. KARANGREJO TIMUR III (RT 02, 04, 05, 06 RW I) KEL. KARANGREJO	120,000,000	Karangrejo	Karangrejo
59	PENGASPALAN JL. KARANGREJO TENGAH X (BELAKANG SD KARANGREJO 2) RT 1 RW 2 KEL. KARANGREJO	100,000,000	Karangrejo	Karangrejo
60	BETONISASI DAN PAGAR LAPANGAN VOLY LANJUTAN JL. KARANGREJO V RT 1 RW 2 KEL. KARANGREJO	124,200,000	Karangrejo	Karangrejo
61	PEMBUATAN GORONG-GORONG SALURAN AIR JL. WELIRANG I RT 6 RW 3 KEL. KARANGREJO	80,000,000	Karangrejo	Karangrejo

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
62	PENGASPALAN JL. KARANGREJO II (DEPAN RUMAH BP. FALAQ) RT 1 RW 3 KEL. KARANGREJO	130,000,000	Karangrejo	Karangrejo
63	PENGASPALAN JALAN JL. SEMERU IV (RT 02 DAN 04 RW IV) RT 4 RW 4 KEL. KARANGREJO	88,160,000	Karangrejo	Karangrejo
64	PENGASPALAN JL. WELIRANG II RT 4 RW 5 KEL. KARANGREJO	80,000,000	Karangrejo	Karangrejo
65	PENGASPALAN JL. WELIRANG I RT 5 RW 5 KEL. KARANGREJO	70,000,000	Karangrejo	Karangrejo
66	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Petompon RT 1 RW 1 PETOMPON	50,000,000	Petompon	Petompon
67	Pembangunan Balai RT.05 RW.01 Jl. Tampomas Selatan Kel. Petompon	150,000,000	Petompon	Petompon
68	Pembangunan Talud Jl. Tampomas Selatan RT 01 RW 02 Kel. Petompon	150,000,000	Petompon	Petompon
69	Pembangunan Pagar Dinding Makam RW 3 Kel. Petompon	100,000,000	Petompon	Petompon
70	Perbaikan Saluran Air + Penutupan Saluran Jl. Tampomas Selatan I RT 05 RW 02 Kel. Petompon	50,000,000	Petompon	Petompon
71	Pengaspalan Jalan Wilayah RT 05 Atas RT 5 RW 3 Kel. Petompon	55,000,000	Petompon	Petompon
72	Perbaikan Saluran Air + Penutupan Grill Jl. Kaligarang Atas RT 2 RW 4 Kel. Petompon	40,000,000	Petompon	Petompon
73	Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas Utara RT 4 RW 4 Kel. Petompon	70,000,000	Petompon	Petompon
74	Perbaikan Saluran Air Jl. Gunung Sawo RT 9 RW 4 Kel. Petompon	90,000,000	Petompon	Petompon
75	Rehab POS PAUD RW 05 Kel. Petompon	40,000,000	Petompon	Petompon
76	Perbaikan gorong-gorong Taman Kelud Selatan RT 03 RW 05 Kel. Petompon	26,000,000	Petompon	Petompon
77	Pemasangan Pagar BRC (Lanjutan) Taman Kelud Selatan RT 04 RW 05 Kel. Petompon	91,645,000	Petompon	Petompon
78	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 SAMPANGAN	50,000,000	Sampangan	Sampangan
79	PAVINGISASI JALAN MENOREH UTARA XII GANG III RT 5 RW I Kel. Sampangan	95,000,000	Sampangan	Sampangan
80	PERBAIKAN SALURAN AIR JL MENOREH UTARA XII RT 2 RW I Kel. Sampangan	80,000,000	Sampangan	Sampangan
81	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. PEGANDAN RT 1 RW III Kel. Sampangan	80,000,000	Sampangan	Sampangan
82	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. FLAMBOYAN RT 4 RW III Kel. Sampangan	65,000,000	Sampangan	Sampangan
83	PERBAIKAN ASPAL JL. MENOREH TENGAH IX RT 2 RW IV Kel. Sampangan	95,000,000	Sampangan	Sampangan
84	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. LAMONGAN BARAT XIII RT 5 RW V Kel. Sampangan	65,000,000	Sampangan	Sampangan
85	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. KENDENG BARAT III RT 5 RW VI Kel. Sampangan	91,550,000	Sampangan	Sampangan
86	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. KENDENG BARAT IV RT 1 RW VII Kel. Sampangan	65,000,000	Sampangan	Sampangan
87	PAVINGISASI JL. MENOREH UTARA III RT 10 RW I Kel. Sampangan	65,000,000	Sampangan	Sampangan
88	PERBAIKAN SALURAN AIR JL. LAMONGAN III RT 6 RW II Kel. Sampangan	70,000,000	Sampangan	Sampangan
89	PERBAIKAN BALAI RT JL LAMONGAN III & JL. PEGANDAN I RT 2 RW II Kel. Sampangan	90,000,000	Sampangan	Sampangan
90	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 BENDUNGAN	50,000,000	Bendungan	Bendungan

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
91	Pembangunan Talud RT 2 RW 2 Kel. Bendungan	112,000,000	Bendungan	Bendungan
92	Pembangunan Talud RT 5 RW 2 Kel. Bendungan	78,500,000	Bendungan	Bendungan
93	Lanjutan Pembangunan Balai Sumbing RW 3 Kel. Bendungan	160,000,000	Bendungan	Bendungan
94	Pembangunan Posyandu RW 3 Kel. Bendungan	60,000,000	Bendungan	Bendungan
95	Pembangunan Saluran RT 3 s/d RT 7, RW 4 (kiri) Kel. Bendungan	132,000,000	Bendungan	Bendungan
96	Pembangunan Saluran RT 3 s/d RT 7, RW 4 (kanan) Kel. Bendungan	132,000,000	Bendungan	Bendungan
97	Pembangunan Gedung PKK 2 lantai Ngaglik Baru RT 5 RW 1 Kel. Bendungan	140,000,000	Bendungan	Bendungan
98	Pembangunan Gapura Ngaglik Lama Ngaglik Lama RT 2 RW 1 Kel. Bendungan	50,000,000	Bendungan	Bendungan

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur, 2025

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gajahmungkur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 98 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2025 yang tersebar di 8 Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382

4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

> “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Adapun sasaran – sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut beserta indikator kinerjanya yaitu :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Kecamatan Gajahmungkur"
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif"
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu Persentase "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		2025	2025
TUJUAN RENSTRA			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	96
SASARAN RENSTRA			
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	76
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Presentase	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Presentase	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	88
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase	98

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah

sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 sub kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 45.880.886.740,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
							36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740
							36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15.831.003.090	15.831.003.090	16.039,852.665
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	77.959.700	75.477.900	49.518.082
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	55.754.400	55.754.400	40.271.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.835.400	4.835.400	1.415.484
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.190.900	6.190.900	2.077.463
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.818.200	2.818.200	1.290.839
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.956.000	2.956.000	1,350,896

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.060.000	2.060.000	112.400
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.344.800	3.344.800	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.431.164.600	14.431.164.600	14.175.361.709
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	13.953.656.000	13.953.656.000	13.237.464.878
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	472.000.000	472.000.000	934.984.431
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.723.800	1.723.800	1.500.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.836.200	1.836.200	412.400
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.948.600	1.948.600	1.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	525.447.521	525.447.521	905.579.594
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	109.134.400	109.134.400	324.861.032
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.500.000	60.500.000	50.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.935.000	14.935.000	14.935.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	11.000.000	11.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	212.360.571	212.360.571	189.974.111
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	111.592.550	111.592.550	308.384.451
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	43.918.526	43.918.526	76.115.486

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perlengkapan Kantor						
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	43.918.526	43.918.526	76.115.486
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	280.050.353	280.050.353	280.050.353
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	207.300.000	207.300.000	207.300.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.750.353	72.750.353	72.750.353
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	472.462.390	472.462.390	553.227.441
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 Unit	12 Unit	12 Unit	190.000.000	190.000.000	163.871.028

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	148.810.000	148.810.000	265.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	94.737.390	94.737.390	53.963.896
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.915.000	38.915.000	70.392.517
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	96 Persen	96 Persen	3.524.842.750	3.680.881.550	2.524.839.698

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	114.250.000	114.250.000	95.250.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	2 laporan	2 laporan	2 lapaoran	2.250.000	2.250.000	2.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	112.000.000	112.000.000	93.250.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.485.000.000	1.485.000.000	1.121.564.798

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	682.000.000	682.000.000	395.125.017
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	89.804.024
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	96.686.844
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000	108.000.000	88.918.813
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.000.000	99.000.000	95.916.295

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	96.344.900
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	90.089.325
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000	102.000.000	80.215.450
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	88.464.129

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.925.592.750	1.925.592.750	1.308.024.900
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.925.592.750	1.925.592.750	1.308.024.900
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	17.172.400.000	17.172.400.000	27.041.667.037
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	9.752.450.000	9.954.050.000	9.692.477.933
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	83.000.000	83.000.000	39.697.500

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Gajahmungkur)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	963.000.000	963.000.000	963.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lempongsari)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Prasarana Kelurahan (Bendungan)	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	606.450.000	606.450.000	476.525.172
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	79.321.640
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	50.622.690
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	71.234.490
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	64.300.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lempongsari)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	68.200.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9Petompon)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	52.672.690
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9Sampangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	68.290.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	58.613.750
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	7.419.950.000	7.218.350.000	17.349.189.105
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	118.495.916

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Duwur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	678.200.000	653.000.000	1.489.868.552
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Ngisosr)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	674.000.000	653.000.000	1.529.948.200
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kel. Gajahmungkur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	1.669.400.000	1.635.800.000	4.189.750.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karangrejo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	756.200.000	731.000.000	1.744.485.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lempongsari)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	849.800.000	824.600.000	1.942.777.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Petompon)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakata n	814.400.000	793.400.000	1.919.700.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga	8 Lembaga Kemasyarakata n	658.400.000	637.400.000	1.481.105.687

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Kemasyarakatan (Bendungan)		Diselenggarakan (Bendungan)		Kemasyarakatan				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Sampangan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.105.400.000	2.757.725.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	6.703.750
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	168.630.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	194.516.000	194.516.000	193.652.340
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	28.00 Angka	28.00 Angka	28.00 Angka	81.975.000	81.975.000	80.875.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	81.975.000	81.975.000	80.875.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	81.975.000	81.975.000	80.875.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	81.975.000	81.975.000	80.875.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	81.975.000	81.975.000	80.875.000

Sumber ; RKPD PERUBAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis IT dengan aplikasi SIMADU dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat. Dengan adanya SIMADU maka aduan dari masyarakat akan langsung di notice oleh Kecamatan dan akan segera diteruskan ke OPD terkait sesuai kewenangan masing-masning OPD/
2. Penyelenggaraan Event Olahraga level Internasional yang dikenal sebagai Bendungan Down Hill yang diselenggarakan setiap Tahun disambut dengan antusias oleh warga local maupun Nasional, hingga Mancanegara. Hal ini juga bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan Pemberdayaan masyarakat local dan bahkan meningkatkan AD Kota Semarang.
3. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2025. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gajahmungkur Kota Semarang Nomor 050/74/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran dan target. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.;

3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA,

dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   a. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2025.
   b. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
   c. Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

46. KECAMATAN TEMBALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

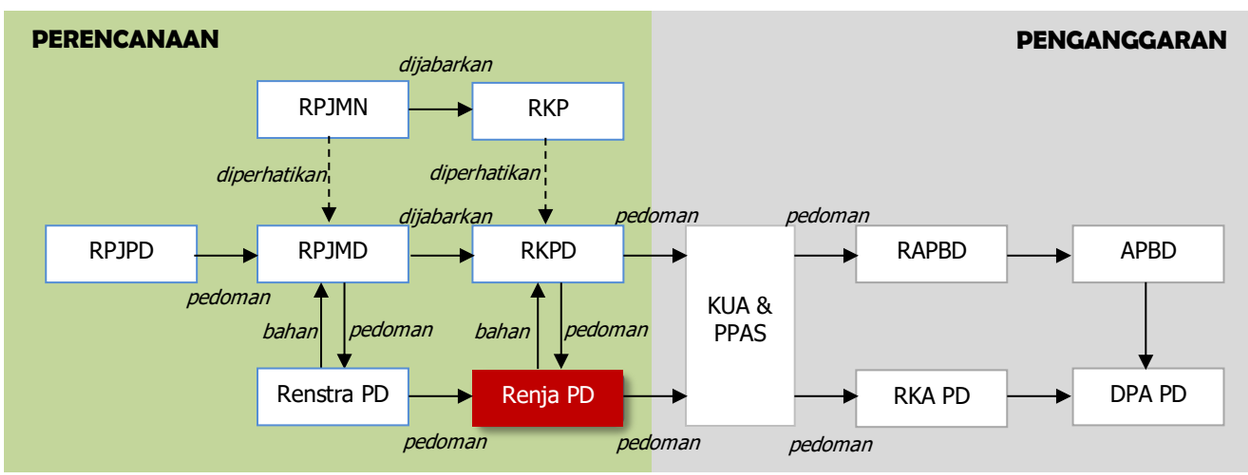

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, dengan

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat efisiensi anggaran; (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Publik Kecamatan Tembalang termasuk kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Inspirasi.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang (FP-PUG) Kota Semarang;
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
p. Peraturan Derah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang 2024 Nomor 7);
q. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
u. Keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Kualitas Renja Kecamatan Tembalang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Tembalang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN : KEWILAYAHAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%
		-	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	35%	50%	50%	50%
		-	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	40%	40%	40%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	12,50%	1 Dokumen	12,50%
		-	Dokumen pelaporan	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	66,66%	2 Dokumen	66,66%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Penyusunan Dokumen DPA SKPD							
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 dokumen					
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%					
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		85 orang/bulan	101 orang/ bulan	101 orang/ bulan	100%	101 orang/ bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100%	100%					
		-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	-	laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 dokumen					
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan pelaksanaan adminsitrasi umum	100 %	100%	100%	35%	35%	50%	35%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Jenis	10 Jenis					
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 paket	2 paket	1 paket	50%	1 paket	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	1 jenis					
		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	10 paket	5 paket	50%	5 paket	50%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	26 Jenis	26 jenis					
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		26 paket	3 paket	1 paket	33,33%	1 paket	33,33%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 jenis					
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	2 paket	1 paket	50%	1 paket	50%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	jumlah tamu yang berkunjung	3500 orang	3065 orang					
		-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	70 Kegiatan	69 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 Jenis	3 jenis					
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 dokumen	3 dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	1 jenis					
		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15 unit	2 unit	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	6 jenis					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	28 Unit	28 unit					
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 Unit	28 Unit	14 unit	50%	14 unit	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	2 gedung					
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Jenis	2 jenis					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	2 unit	1 unit	50%	1 unit	50%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Jenis	2 jenis					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	1 unit	0	0	0	0
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	96,62%	93%	91,50%	98,38%	91,50%	98,38%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	0	0	0	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	1 Laporan	0			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- jumlah dokumen monitoring evaluasi	4 Dokumen	4 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Dokumen	4 Dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	60%	60%	60%	60%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	99%	100%	67,00%	67%	67,00%	67%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430 Kegiatan	305 kegiatan	425 Kegiatan	286 Kegiatan	67,29%	286 Kegiatan	67,29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	430 angka	481 angka					
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21 Kegiatan	17 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 unit	7 unit	0 unit	0	0 unit	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	20 Kegiatan	12 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN BULUSAN)		9 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	19 Kegiatan	8 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN JANGLI)		9 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	20 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)		10 unit	11 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	18 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KRAMAS)		11 unit	8 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	21 Kegiatan	11 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN MANGUNHARJO		15 unit	11 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	27 Kegiatan	15 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN METESEH)		23 unit	21 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	18 Kegiatan	9 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN ROWOSARI)		21 unit	20 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	14 Kegiatan	6 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SAMBIROTO)		10 unit	13 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	20 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SENDANGGUWO)		15 unit	12 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	23 Kegiatan	13 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SENDANGMULYO)		20 unit	14 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	25 Kegiatan	12 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TANDANG)		15 unit	16 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	19 Kegiatan	9 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TEMBALANG)		9 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	21 Kegiatan	21 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	98 Kegiatan	88 kegaiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	100 Kegiatan	84 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan	108 Kegiatan	92 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			pembangunan di kelurahan Kedungmundu							
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	100 Kegiatan	86 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	102 Kegiatan	86 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100%	6 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	100 Kegiatan	81 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	105 Kegiatan	83 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100%	6 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	100 Kegiatan	85 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	101 Kegiatan	88 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	94 Kegiatan	80 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	105 Kegiatan	90 kegiatan					
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	106 Kegiatan	85 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	9 dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	55,55%	5 Dokumen	55,55%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	31 Dokumen	31 dokumen					
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan					
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	1 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 laporan	2 Laporan	0	0	0	0
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	22,97%	25%	9,10%	36,4%	8%	36,4%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	26 Angka	25 Angka	53 Angka	212%	53 Angka	212%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan	12 kegiatan					
		-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	100%	80%	50%	62,5%	50%	62,5%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	1 Kegiatan	33,33%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	4 kegiatan	3 kegiatan					
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional		150 Orang	180 Orang	60 Orang	33,33%	60 Orang	33,33%

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan;
11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2025

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG	65.439.149.742	22.729.270.606	34,73%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.581.549.057	1.795.302.460	39,19%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	606.303.500	359.690.000	59,33%
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.000.000	-	0,00%
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	603.303.500	359.690.000	59,62%
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.617.712.757	975.000.039	37,25%
3	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.172.501.440	538.763.670	45,95%
4	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN JANGLI)*	113.540.159	34.120.204	30,05%
5	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN TANDANG)*	110.054.475	47.064.900	42,77%
6	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	116.878.537	29.727.942	25,43%
7	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	110.050.157	42.199.638	38,35%
8	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN BULUSAN)*	117.870.543	23.338.011	19,80%
9	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	137.098.967	42.536.090	31,03%
10	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	113.852.116	31.762.809	27,90%
11	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN METESEH)*	118.007.607	37.934.669,00	32,15%
12	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	124.599.664	32.183.750	25,83%
13	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	148.214.175	42.953.346	28,98%
14	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	122.248.289	41.891.177	34,27%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
15	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN KRAMAS)*	112.796.628	30.523.833	27,06%
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.357.532.800	460.612.421	33,93%
16	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.357.532.800	460.612.421	33,93%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.855.597.573	12.151.743.692	31,27%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.187.066.827	1.121.074.052	6,16%
17	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	162.725.000	110.597.500	67,97%
18	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.000.000	37.981.980	2,98%
19	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN JANGLI)*	950.000.000	26.623.680	2,80%
20	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN TANDANG)*	950.000.000	26.379.150	2,78%
21	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN ROWOSARI)*	950.000.000	27.082.760	2,85%
22	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN TEMBALANG)*	950.000.000	26.789.850	2,82%
23	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN BULUSAN)*	950.000.000	-	0,00%
24	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	1.501.000.000	42.802.710	2,85%
25	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	2.261.000.000	65.676.480	2,90%
26	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN METESEH)*	950.000.000	26.581.995	2,80%
27	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN SAMBIROTO)*	1.309.000.000	37.031.820	2,83%
28	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN MANGUNHARJO)*	1.901.000.000	54.695.791	2,88%
29	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	1.635.000.000	46.695.536	2,86%
30	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan *(KELURAHAN KRAMAS)*	950.000.000	26.817.600	2,82%
31	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	362.735.718	67.752.500	18,68%
32	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN JANGLI)*	69.300.000	37.165.000	53,63%
33	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN TANDANG)*	59.650.000	19.450.000	32,61%
34	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	75.100.000	31.675.000	42,18%
35	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	65.000.000	16.574.500	25,50%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
36	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN BULUSAN)*	78.400.000	33.600.000	42,86%
37	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	175.645.900	79.949.800	45,52%
38	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	83.545.400	41.295.400	49,43%
39	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN METESEH)*	101.250.000	44.800.000	44,25%
40	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	74.450.000	33.610.000	45,14%
41	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	177.325.000	86.700.000	48,89%
42	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	101.014.809	40.000.000	39,60%
43	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN KRAMAS)*	68.925.000	32.745.000	47,51%
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.668.530.746	11.030.669.640	53,37%
44	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	124.494.130	19.738.000	15,85%
45	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN JANGLI)*	11.000.000	0	0,00%
46	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN TANDANG)*	835.242.425	431.764.000	51,69%
47	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	791.635.612	410.125.000	51,81%
48	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	1.263.882.210	664.245.000	52,56%
49	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN BULUSAN)*	575.000.000	287.495.840	50,00%
50	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	1.459.435.950	754.190.000	51,68%
51	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	3.355.693.973	1.821.373.000	54,28%
52	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN METESEH)*	1.027.444.503	551.680.000	53,69%
53	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	1.687.128.496	905.685.000	53,68%
54	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	1.916.288.309	1.031.427.500	53,82%
55	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	4.588.248.299	2.504.700.000	54,59%
56	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN KRAMAS)*	2.073.280.379	1.118.993.300	53,97%
57	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	709.756.460	366.063.000	51,58%
58	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	163.190.000	65,28%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.700.000	19.520.000	35,69%
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.700.000	19.520.000	35,69%
59	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.700.000	19.520.000	35,69%
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96.300.000	42.710.000	44,35%
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	96.300.000	42.710.000	44,35%
60	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	96.300.000	42.710.000	44,35%
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.851.003.112	8.719.994.454	39,91%
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.958.400	-	0,00%
61	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.399.000	-	0,00%
62	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.728.900	-	0,00%
63	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.998.900	-	0,00%
64	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.246.900	-	0,00%
65	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.998.900	-	0,00%
66	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	784.800	-	0,00%
67	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	801.000	-	0,00%
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.893.195.080	8.367.005.563	46,76%
68	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.245.482.480	8.118.775.563,00	47,08%
69	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	646.704.000	248.230.000	38,38%
70	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	336.200	-	0,00%
71	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	336.200	-	0,00%
72	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	336.200	-	0,00%
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.615.629	146.797.450	19,64%
73	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.182.108	9.543.000	16,12%
74	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.695.188	-	0,00%
75	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.008.837	10.669.450	53,32%
76	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.827.200	1.910.000	32,78%
77	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.750.000	48.575.000	41,61%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
78	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.532.000	49.100.000	19,68%
79	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	290.620.296	27.000.000	9,29%
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.357.943.982	28.000.000	2,06%
80	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.357.943.982	28.000.000	2,06%
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.966.021	100.548.836	20,73%
81	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.966.021	52.939.836	23,53%
82	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.000.000	47.609.000	18,31%
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.324.000	77.642.605	5,92%
83	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.324.000	62.023.480	38,21%
84	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000	-	0,00%
85	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	15.619.125	31,24%
86	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	0,00%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 86 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebesar Rp. 65.439.149.742,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 22.729.270.606,- atau 34,73%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 42.709.879.136,- atau 65,26%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI				PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025	2026
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88	88,35	89	90	94,97	96,45	96,62	91,50	93	93,5
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,50	72	72,50	73	73,50	71,66	74,10	74,75	76,15	73,70	74
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	0%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	99%	100%	100%	100%	98%	99%	67%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %		85,04%	86,72 %	44,20 %	88,40 %	90,08 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	100%	60%	100%	100%	50%	98%	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target sebesar 89 sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 91,50;

a) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 73 Nilai, dengan realisasi sebesar 76,15 Nilai.
b) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%.
c) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 67%.
d) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “Persentase peningktan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 88,40%, dengan realisasi sebesar 44,20%.
   2. Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 50%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tembalang pada tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2025 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Tembalang, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;

4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Tembalang. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting, menganggarkan forum stunting sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi serta melakukan pelatihan pembuatan menu sehat untuk ibu-ibu yang memiliki bayi stunting dan ibu-ibu yang sedang hamil.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
b) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
c) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan serta karena jumlah pegawai yang kurang membuat beban pekerjaan yang tumpang tindih;
d) Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hali ini disebabkan karena kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta koordinasi antar Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
e) Masih kurangnya usulan Pembangunan dari Masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana;
f) Kurang efektifnya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum karena sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif.

Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Revolusi industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntuan dan kebutuhan masyarakat.
    2) Kondisi sarana prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada Masyarakat.
    3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
1) Digitalisasi pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publiak harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai berikut:

1. Krisis Pangan tahun 2025
Menurut *Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture In Asia* yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB Bogor, kita akan mengalami krisis pangan pada 2025 dan hal ini perlu menjadi perhatian serius, oleh karenanya Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu memberikan rasa tenang dalam Masyarakat bahwa krisis pangan pada tahun 2025 yang akan terjadi bisa teratasi dengan program-program yang berhubungan dengan diversifikasi pangan dan pemanfaatan lahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menjadi lumbung pangan Masyarakat.
2. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan

untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, hanya terdapat satu jenis program pemberdayaan Masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dalam implementasi di dalamsatu kegiatan sudah mencakup lingkup pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan ekonomi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7	URUSAN KEWILAYAHAN												
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG					102.053.418.210	KECAMATAN TEMBALANG					102.145.218.209	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.636.354.827	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.683.254.827	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	602.303.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	649.203.500	
7.01.02.2.01.02	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	3.000.000	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	3.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	599.303.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	646.203.500	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.617.712.757	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.244.147.577	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.172.501.440	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	798.936.260	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	113.540.159		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	113.540.159	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.054.475		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.054.475	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	116.878.537		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	116.878.537	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.050.157		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.050.157	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	117.870.543		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	117.870.543	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	137.098.967		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	137.098.967	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	113.852.116		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	113.852.116	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	118.007.607		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	118.007.607	
		KELURAHAN SENDANG GUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	124.599.664		KELURAHAN SENDANG GUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	124.599.664	
		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	148.214.175		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	148.214.175	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	122.248.289		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	122.248.289	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	112.796.628		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	112.796.628	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.357.532.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	789.903.750	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.357.532.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	789.903.750	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	Persen	75.910.620.878	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	Persen	75.970.430.878	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425	Kegiatan	18.330.890.132	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425	Kegiatan	18.298.900.132	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	162.725.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	130.735.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.501.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.501.000.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	2.261.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	2.261.000.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.309.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.901.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.635.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.635.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	487.735.718	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	487.735.718	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	69.300.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	69.300.000	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	59.650.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	59.650.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	75.100.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	75.100.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	65.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	65.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	78.400.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	78.400.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	184.995.900		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	185.057.553	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	83.545.400		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	83.545.400	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	110.723.305		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	110.661.653	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	74.450.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	74.450.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	177.325.000		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	177.325.000	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	101.014.809		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	101.014.809	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	68.925.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	68.925.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9	Dokumen	57.579.730.746	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9	Dokumen	57.671.530.746	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	124.494.130	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	124.494.130	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.203.242.425		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.210.892.425	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.164.635.612		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.172.285.612	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.528.082.210		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.535.732.210	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.453.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.460.650.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	4.116.635.950		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	4.124.285.950	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	9.641.893.973		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	9.649.543.973	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.767.044.503		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.774.694.503	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	4.775.128.496		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	4.782.778.496	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.520.688.309		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.528.338.309	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	13.294.848.299		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	13.302.498.299	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.917.680.379		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.925.330.379	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.811.356.460		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.819.006.460	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	250.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	54.700.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	54.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	Angka	54.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	Angka	54.700.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	54.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	54.700.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	Persen	96.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	Persen	96.300.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	96.300.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	96.300.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	180	Orang	96.300.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	180	Orang	96.300.000	
	NON URUSAN						NON URUSAN						

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	21.410.248.274	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	22.340.532.505	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dokumen	54.958.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dokumen	54.958.400	
			Jumlah Dokumen pelaporan	2	Dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	2	Dokumen		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	44.399.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	44.399.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.728.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.728.900	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	3.246.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	784.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	784.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	801.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	801.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	17.702.745.613	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	18.286.747.809	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.055.033.013	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.055.033.013	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	646.704.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.230.706.195	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	762.615.629	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	865.054.685	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	59.182.108	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	59.182.108	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	5.695.188	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	5.695.188	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	20.008.837	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	20.008.837	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.827.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	7.803.435	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	116.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	102.750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	264.532.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	224.244.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	290.620.296	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	445.371.118	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	1.092.638.611	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	1.200.051.212	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	1.092.638.611	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	1.200.051.212	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	484.966.021	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	345.396.399	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	224.966.021	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	164.966.021	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	260.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	180.430.378	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	1.312.324.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	1.588.324.000	

Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	162.324.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	162.324.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	1.276.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perubahan Renja 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tembalang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tembalang Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang bererta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
1	Jembatan Menuju Makam	JL. SAMBIROTO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Perbaikan Pondasi Jembatan	JL. ELANG SARI RAYA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Perbaikan Talud Sungai	JL. NILAM	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	372 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pekerjaan Jalan Aspal RT 03 RW 04 Jl. Rogojembangan Raya	Jl. Rogojembangan Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	752 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pengukuran Lapangan Bola - Fasum Masyarakat	JL KEDUNGSARI TENGAH RT 1 RW 8	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2100 m^3	DINAS PENATAAN RUANG
6	Peninggian 3 jembatan dan talud sungai Sungai Gambir Kelurahan Tembalang	Jalan Bulusari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3 buah	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
7	Pengadaan Penyaring Sampah "River Trash Barriers" di bawah Jembatan Sungai Gambir	Sungai Gambir Jalan Banjarsari Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Rehab Rumah Dinas Kelurahan Tembalang Jl Jatimulyo RW 05	Jl. Jatimulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
9	Pembangunan Sport Center	Jalan Sendangguwo Selatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^2	DINAS PENATAAN RUANG
10	Pembangunan Saluran Air	Sepanjang Jalan Kedungmundu Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Normalisasi Saluran Air	Jalan Sendangguwo (Depan Masjid Al HUDA)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Borpel Betonisasi Jalan	Jalan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	50 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	Rambu lalu lintas	Perbatasan Jl Banjarsari Raya - Jl. Gondang Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
14	Pengadaan Rambu dan Marka Kejut depan Kantor Kelurahan Tembalang	Jl. Banjarsari Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
15	Pembangunan Talud Sungai RT 02 RW 01 Jl. Saputan Raya	Jl. Saputan Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Sumur Artetis	Juwono	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
17	Balai Pertemuan RW 03	Dk. Juwono	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
18	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bulusan	Jl. Gondang Raya 68	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m^2	DINAS PENATAAN RUANG
19	Betonisasi dan normalisasi saluran	Sepanjang jalan Bougenville raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2709 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
20	Pembangunan Bahu jalan Gondang Raya	Jl. Gondang Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	Pembangunan Jembatan	JANGLI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	21 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	Pengecoran Beton SKIP. Perbatasan RT 07 RW 01	SKIP	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	Pemasangan Traffict Light Perempatan Jl. Gondang Raya Bulusan	Jl. Gondang Raya, Jl. Imam Suparto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
24	Pembangunan Sport Center Masyarakat	Jl Mulawarman Raya No.21	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	7000 m^2	DINAS PENATAAN RUANG
25	Sport Center Lapangan Kramas	Wilayah RW IV	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	7000 m^3	DINAS PENATAAN RUANG
26	Pemasangan Traffic Light	Pertigaan UNIMUS	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2 Per Titik	DINAS PERHUBUNGAN
27	Pembangunan Posyandu	Kampung Semawis	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
28	Pembangunan Sport Center	Jalan Mukarom	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tembalang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 28 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2025 yang tersebar di 12 Kelurahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Inodensia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastuktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi Pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,80 – 5,60%;
2. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 %;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,28 – 8,08%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20 – 4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Peningkatan layanan Kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung Upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 5. Penguatan perlindungan social yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif Masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas Daerah 8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan

siswa/mahasiswa, penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta, pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan Kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, Pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastrukur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro;
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkataan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir;
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif Masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen Masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga-RT);
8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 - 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan 2 indikator yaitu Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
SASARAN :			
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Angka	74,80

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	98

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

3.3 Program dan Kegiatan

Program Kecamatan Tembalang merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Tembalang sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Semarang tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Adapaun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025 terdiri atas 5 program, 13 kegiatan, dan 86 sub kegiatan, sebagaimana rincian meliputi berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
3	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN JANGLI)*	
5	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN TANDANG)*	
6	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	
7	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	
8	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN BULUSAN)*	
9	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	
10	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	
11	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN METESEH)*	
12	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	
13	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	
14	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	
15	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*(KELURAHAN KRAMAS)*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
16	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
17	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
18	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
19	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN JANGLI)*	
20	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN TANDANG)*	
21	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	
22	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	
23	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN BULUSAN)*	
24	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	
25	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	
26	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN METESEH)*	
27	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	
28	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	
29	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	
30	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*(KELURAHAN KRAMAS)*	
31	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
32	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN JANGLI)*	
33	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN TANDANG)*	
34	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	
35	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	
36	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN BULUSAN)*	
37	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	
38	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	
39	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN METESEH)*	
40	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	
41	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	
42	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	
43	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*(KELURAHAN KRAMAS)*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
44	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
45	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN JANGLI)*	
46	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN TANDANG)*	
47	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN ROWOSARI)*	
48	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN TEMBALANG)*	
49	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN BULUSAN)*	
50	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SENDANGMULYO)*	
51	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SENDANGGUWO)*	
52	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN METESEH)*	
53	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN SAMBIROTO)*	
54	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG)*	
55	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN KEDUNGMUNDU)*	
56	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*(KELURAHAN KRAMAS)*	
57	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
58	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
59	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
60	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
61	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
62	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
63	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
64	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
65	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
66	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
67	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
68	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
69	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
70	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
71	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
72	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
73	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	
74	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
75	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
76	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
77	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
78	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
79	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
80	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
81	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
82	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
83	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
84	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
85	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
86	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG					68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 persen	93 Persen	4.768.688.740	5.033.305.260	3.683.254.827		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	745.848.900	745.848.900	649.203.500		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	742.848.900	742.848.900	646.203.500	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.628.232.040	2.892.848.560	2.617.712.757		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.101.232.040	1.365.848.560	1.172.501.440	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	144.000.000	144.000.000	137.098.967	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
		di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	125.000.000	125.000.000	117.870.543	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	132.000.000	132.000.000	122.248.289	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	130.000.000	130.000.000	124.599.664	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	118.000.000	118.000.000	110.054.475	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	123.000.000	123.000.000	116.878.537	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	117.000.000	117.000.000	112.796.628	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	157.000.000	157.000.000	148.214.175	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	119.000.000	119.000.000	113.540.159	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	116.000.000	116.000.000	110.050.157	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	119.000.000	119.000.000	113.852.116	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	127.000.000	127.000.000	118.007.607	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.394.607.800	1.394.607.800	1.357.532.800		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.394.607.800	1.394.607.800	789.903.750	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	41.365.120.400	41.365.120.400	75.970.430.878		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	425 kegiatan	425 kegiatan	425 kegiatan	17.875.920.400	18.539.520.400	18.330.890.132		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	168.500.000	168.500.000	130.735.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	275.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Meteseh)	21 Unit	21 Unit	21 Unit	1.501.000.000	1.501.000.000	501.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunharjo)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tandang)	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.635.000.000	1.635.000.000	1.635.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangguwo)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.309.000.000	1.309.000.000	1.309.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jangli)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungmundu)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tembalang)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangmulyo)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.901.000.000	1.901.000.000	1.901.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bulusan)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kramas)	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rowosari)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	2.261.000.000	2.261.000.000	2.261.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambiroto)	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	575.420.400	575.420.400	487.735.718	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	180.200.000	185.057.553	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	78.400.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	101.014.809	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	74.450.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	59.650.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	75.100.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
		Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	68.925.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	197.000.000	177.325.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	69.300.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	65.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	83.545.400	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	110.661.653	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	23.489.200.000	22.825.600.000	57.579.730.746		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	124.494.130	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	3.710.600.000	649.543.973	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	1.620.200.000	4.124.285.950	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	2.291.000.000	5.925.330.379	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	2.119.000.000	5.528.338.309	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	887.000.000	2.172.285.612	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	1.401.800.000	3.535.732.210	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	777.800.000	1.819.006.460	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000	5.067.800.000	13.302.498.299	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	918.200.000	2.210.892.425	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	647.400.000	1.460.650.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000	1.136.600.000	2.774.694.503	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	1.869.800.000	4.782.778.496	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	25%	25%	60.000.000	60.000.000	54.700.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan	25 angka	25 angka	25 angka	60.000.000	60.000.000	54.700.000		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	54.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80%	80%	80%	96.300.000	96.300.000	96.300.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	96.300.000	96.300.000	96.300.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	180 Orang	180 Orang	180 Orang	96.300.000	96.300.000	96.300.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	22.332.817.726	22.068.201.206	22.340.532.504		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan – Kec Tembalang	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	62.083.400	62.083.400	21.410.248.274		
		Dokumen Pelaporan – Kec Tembalang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	51.524.000	51.524.000	44.399.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.728.900	1.728.900	1.728.900	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.998.900	1.998.900	1.998.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	3.246.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.998.900	1.998.900	1.998.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	784.800	784.800	784.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	801.000	801.000	801.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD – Kec Tembalang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	18.157.811.600	17.893.195.080	17.702.745.613		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD – Kec Tembalang	100%	100%	100%					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 orang/bulan	101 orang/bulan	101 orang/bulan	17.510.099.000	17.245.482.480	17.055.033.013	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	646.704.000	646.704.000	1.230.706.195	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.186.500.490	863.176.964	762.615.629		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	59.182.108	59.182.108	59.182.108	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	1.329.018.714	5.695.188	5.695.188	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.008.837	29.008.837	20.008.837	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	12.920.535	12.920.535	7803434.90	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	151.750.000	151.750.000	102.750.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	314.000.000	314.000.000	224.244.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	290.620.296	290.620.296	445.371.118	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	34.620.456	1.357.943.892	1.092.638.611		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	34.620.456	1.357.943.982	711.200.051.212	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	540.000.000	540.000.000	484.966.021		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	280.000.000	280.000.000	164.966.021	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000	260.000.000	180.430.378	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.351.801.780	1.351.801.780	1.312.324.000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	201.801.780	201.801.780	162.324.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	276.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan

dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

47. KECAMATAN CANDISARI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

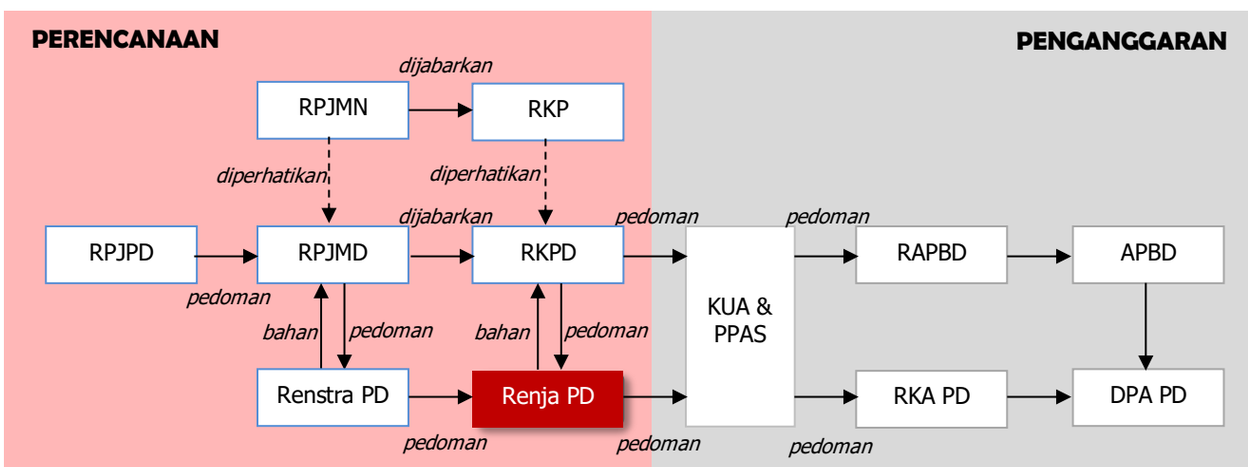

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penajaman program dan kegiatan agar lebih relevan dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat saat ini; (2) Sinkronisasi antara usulan dari perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan kota, termasuk target RPJMD dan agenda pembangunan nasional; (3) Perencanaan yang terus diperbarui sesuai dinamika masyarakat dan anggaran; (4) Efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Candisari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
u. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Candisari Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	50% 50% 50%	50% 50% 50%	50% 50% 50%	50% 50% 50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	50% 2 dokumen	50% 66,67%	50% 66,67%	50% 66,67%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	52 Orang/bulan	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 Paket	50 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	29 Unit	0 Unit	0%	0%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	21 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	0%	0%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	65 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	50%	50%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	95,81%	94%	93.43%	99,39%	93.43%	98,35%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1 Angka	1 Angka	1 Angka	0 Angka	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	-	-	2 Laporan	-	-	-	-
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Candisari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	60 kegiatan	75%	75%	75%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Candisari)	10 Unit	6 Unit	8 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatingaleh)	15 Unit	10 Unit	11 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jomblang)	16 Unit	21 Unit	19 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karanganyar Gunung)	12 Unit	10 Unit	8 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaliwiru)	13 Unit	8 Unit	9 Unit	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Candi)	13 Unit	12 Unit	13 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonotingal)	17 Unit	14 Unit	15 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tegalsari)	16 Unit	12 Unit	14 Unit	-	-	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jomblang)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliwiru)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Candi)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonotingal)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	50%	50%	50%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Candisari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jomblang)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaliwiru)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Candi)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonotingal)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tegalsari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	50%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	22,22%	25%	20%	80%	20%	57,14%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	21 angka	31 angka	8 angka	25,81%	25,81%	36,36%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	98%	100%	102,04%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	50 Orang	70 Orang	50 Orang	71,43%	71,43%	50%

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
j. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Sub kegiatan yang belum mencapai 100%, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
k. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
m. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
n. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
p. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
q. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
u. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
v. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
w. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

x. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
y. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
z. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
aa. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
bb. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Urusan Penunjang Kewilayahan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.360.001.786	5.910.074.082	44,24%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.380.790	4.114.600	6,60%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.583.200	750.000	1,40%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	775.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	725.000	100.000	13,79%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.156.000	1.544.800	71,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.389.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	932.790	525.000	56,28%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.819.800	1.194.800	65,66%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.480.131.240	5.676.127.103	49,44%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.087.577.240	5.487.412.103	49,49%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.292.000	187.940.000	48,15%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.074.800	225.000	20,93%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.074.800	550.000	51,17%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	112.400	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.167.735	86.900.345	9,63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.973.990	9.583.110	43,61%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	495.973.024	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.665.121	21.274.555	36,26%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.399.120	2.693.600	61,23%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	91.750.000	22.539.080	24,57%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.404.000	21.810.000	37,34%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	171.002.480	9.000.000	5,26%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.313.432	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.313.432	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.082.119	76.602.481	29,12%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.341.468	53.328.581	32,25%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.740.651	23.273.900	23,81%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.926.470	66.329.553	15,04%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.228.260	56.222.878	28,80%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.312.960	9.707.975	32,03%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.385.250	398.700	1,57%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.515.053.550	1.077.675.440	42,85%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.550.000	12.300.000	54,55%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	900.000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.650.000	12.300.000	56,81%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	668.063.020	277.079.441	41,48%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	204.659.936	72.122.100	35,24%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	62.402.000	28.907.973	46,33%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	66.495.830	28.067.582	42,21%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)	68.660.000	30.547.580	44,49%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	63.294.000	27.068.062	42,77%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	65.266.000	26.231.032	40,19%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	66.638.000	30.486.250	45,75%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	70.647.254	33.648.862	47,63%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.824.440.530	788.295.999	43,21%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.824.440.530	788.295.999	43,21%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.638.607.146	4.625.621.040	26,22%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.338.531.270	246.122.400	2,64%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.432.860	9.305.500	26,26%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.110.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	950.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	950.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	996.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	950.000.000	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	972.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	950.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	1.463.000.000	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	361.768.240	36.669.500	10,14%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	87.200.000	36.399.900	41,74%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	72.470.170	21.715.500	29,96%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	96.100.000	35.828.000	37,28%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	64.000.000	16.200.000	25,31%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	75.200.000	18.600.000	24,73%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	91.900.000	27.740.000	30,18%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	113.460.000	43.664.000	38,48%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.300.075.876	4.379.498.640	52,76%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	127.000.000	21.563.000	16,98%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	1.065.200.000	581.050.000	54,55%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	854.100.000	451.375.000	52,85%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	1.628.462.720	876.785.000	53,84%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	486.175.440	228.560.000	47,01%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	896.600.000	480.510.000	53,59%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	1.220.000.000	659.560.000	54,06%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	2.009.931.746	1.080.095.640	53,74%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.405.970	-	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.750.000	22.675.000	50,67%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.750.000	22.675.000	50,67%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.750.000	22.675.000	50,67%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.150.000	39.925.000	53,84%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.150.000	39.925.000	53,84%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	74.150.000	39.925.000	53,84%
JUMLAH		33.632.562.482	11.675.970.562	34,72%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.632.562.482 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 11.675.970.562. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.956.591.920.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari adalah melaksanakan fungsi sebagai peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari	88 Angka	89 Angka	90 Angka	91 Angka	92 Angka	93 Angka		93,25 Angka	96,75 Angka	95,81 Angka	93,43 Angka		94 Angka
Sasaran :														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %		100%
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	99%	100%	100%		97%	100%	100%	100%		100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,68 %	83,36 %	85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %		-	85,04%	86,72 %	53%		88,40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	87%	90%	92%	95%	98%	100%		60%	92%	100%	100%		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
	Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan													

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari".
   Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 93,43 Angka dari target sebesar 92,00 Angka (capaian 101,55 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Jumlah Pelayanan Tahun 2025 di Kecamatan Candisari

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Rekomendasi SKCK	34
2	Register Nikah	438
3	Register KTP dan KK	2.187
4	Rekomendasi dan Perijinan	20
5	Register Tidak Sengketa	2
6	Register Register Legalisasi Pelayanan Umum	359
Total		3.040

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN dibagi jumlah pelayanan yang diberikan x 100%

$PATEN = \frac{3.040}{3.040}$ x 100%

   2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Candisari

No	Nama Lembaga
1	LPMK (Kecamatan)
2	FKK (Kecamatan)
3	Karang Taruna (Kecamatan)
4	PKK (Kecamatan)
5	LPMK (Kelurahan Jomblang)
6	FKK (Kelurahan Jomblang)
7	Karang Taruna (Kelurahan Jomblang)
8	PKK (Kelurahan Jomblang)
9	LPMK (Kelurahan Jatingaleh)
10	FKK (Kelurahan Jatingaleh)
11	Karang Taruna (Kelurahan Jatingaleh)
12	PKK (Kelurahan Jatingaleh)
13	LPMK (Kelurahan Kaliwiru)
14	FKK (Kelurahan Kaliwiru)
15	Karang Taruna (Kelurahan Kaliwiru)
16	PKK (Kelurahan Kaliwiru)
17	LPMK (Kelurahan Wonotingal)
18	FKK (Kelurahan Wonotingal)
19	Karang Taruna (Kelurahan Wonotingal)
20	PKK (Kelurahan Wonotingal)
21	LPMK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
22	FKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
23	Karang Taruna (Kelurahan Karanganyar Gunung)
24	PKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
25	LPMK (Kelurahan Candi)
26	FKK (Kelurahan Candi)
27	Karang Taruna (Kelurahan Candi)
28	PKK (Kelurahan Candi)
29	LPMK (Kelurahan Tegalsari)
30	FKK (Kelurahan Tegalsari)
31	Karang Taruna (Kelurahan Tegalsari)
32	PKK (Kelurahan Tegalsari)

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan dibagi jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya x 100%

$Lembaga = \frac{32}{32}$ x 100%

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator sebagai berikut :
   a. “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 53% dari target sebesar 88,40% (capaian 59,95%), dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.
   b. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 98% (capaian 102.04%), dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional) dibagi jumlah Keseluruhan

Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan dikali 100%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan diantaranya:

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, khususnya terkait dengan adanya angka stunting dan pengendalian inflasi di wilayah Kecamatan.
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk keperluan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
c. Kurangnya kapasitas sumber daya perencana dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

   2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perecanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
      Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
   5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dismaping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perncanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut:

1) Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
3) Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga

terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Selain itu juga terkait dengan penanganan stunting, yaitu dalam upaya mewujudkan angka stunting nol.

4) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS), khususnya terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Candisari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		a. Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 % 100 % 100 %	14.136.074.852	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		a. Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 % 100 % 100 %	14.136.074.852	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	64.880.790	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	64.880.790	
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.133.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.133.200	
2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.025.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	925.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	925.000	
2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.406.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.406.000	
2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.589.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.589.000	
2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.482.790	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.482.790	
2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.319.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.319.800	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	12.219.249.624	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	12.219.249.624	
2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	11.111.521.304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	11.111.521.304	
2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.104.966.320	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.104.966.320	
2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.374.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.374.800	
2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.274.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.274.800	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.045.912.310	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.045.912.310	
2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	27.353.730	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	27.353.730	
2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	456.375.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	456.375.500	
2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	34.554.471	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	34.554.471	
2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	4.399.120	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	4.399.120	
2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.250.000	
2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.289.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.289.009	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	365.690.480	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	365.690.480	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	115.784.214	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	115.784.214	
2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.784.214	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.784.214	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	249.321.444	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	249.321.444	
2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.341.468	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.341.468	
2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.979.976	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.979.976	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	440.926.470	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	440.926.470	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Pemerintahan Daerah					
2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	195.228.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	195.228.260	
2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	
2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	30.312.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	30.312.960	
2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 %	2.385.179.680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 %	2.385.179.680	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			DAN PELAYANAN PUBLIK		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	99.974.630	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	99.974.630	
2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	900.000			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	900.000	
2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	99.074.630	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	99.074.630	
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	601.015.420	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	601.015.420	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	137.612.336	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	137.612.336	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Wilayah Kecamatan (Kecamatan)					Wilayah Kecamatan (Kecamatan)					
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.402.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.402.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.495.830	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.495.830	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68.660.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68.660.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.294.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.294.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	65.266.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	65.266.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.638.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.638.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.647.254	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.647.254	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.083.174.210	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.083.174.210	
2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.083.174.210	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.083.174.210	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	31.932.952.066	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	31.932.952.066	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					DESA DAN KELURAHAN					
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	9.275.726.190	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	9.275.726.190	
2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.323.680	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.323.680	
2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.110.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.110.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.018.728.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.018.728.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Kelurahan (Tegalsari)					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	972.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	972.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.463.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.463.000.000	
2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	302.344.340	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	302.344.340	
	Pemberdayaan Masyarakat di		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/ Ormas	87.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas /Ormas	87.200.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kelurahan (Jatingaleh)		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan (Jatingaleh)		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	72.470.170	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	72.470.170	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	96.100.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	96.100.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	64.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	64.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	75.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	75.200.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	91.900.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	91.900.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	113.460.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	113.460.000	
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	22.657.225.876	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	22.657.225.876	
2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.871.440.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.871.440.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.301.460.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.301.460.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.555.702.720	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasy	4.555.702.720	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
									arakatan		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.205.985.440	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.205.985.440	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.432.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.432.880.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.770.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.770.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.694.381.746	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.694.381.746	
2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	133.405.970	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	133.405.970	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	44.750.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	44.750.000	
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	44.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	44.750.000	
2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.750.000	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 %	73.150.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 %	73.150.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	73.150.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	73.150.000	
2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	73.150.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	73.150.000	

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan " Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP;
2. Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari	Angka	92
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	100
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	88,40
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	98

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Candisari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan; Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan; dan Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Penyajian Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran c. Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	13.493.961.738	13.493.961.738	14.136.074.852	APBD	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	2 Dokumen 100 %	2 Dokumen 100 %	72.062.990	72.062.990	64.880.790	APBD	
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.204.600	55.204.600	54.133.200	APBD	
2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.996.900	2.996.900	1.025.000	APBD	
2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.900	3.033.900	925.000	APBD	
2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.565.900	3.565.900	2.406.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.900	3.449.900	2.589.000	APBD	
2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.780.590	1.780.590	1.482.790	APBD	
2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.031.200	2.031.200	2.319.800	APBD	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	11.481.390.440	11.481.390.440	12.219.249.624	APBD	
2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	11.087.577.240	11.087.577.240	11.111.521.304	APBD	
2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	390.292.000	390.292.000	1.104.966.320	APBD	
2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.911.200	1.911.200	1.374.800	APBD	
2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1.386.200	1.386.200	1.274.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	112.400	APBD	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	998.173.786	998.173.786	1.045.912.310	APBD	
2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	21.973.990	21.973.990	27.353.730	APBD	
2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	495.973.024	495.973.024	456.375.500	APBD	
2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	80.904.430	80.904.430	34.554.471	APBD	
2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	15.636.213	15.636.213	4.399.120	APBD	
2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.750.000	91.750.000	68.250.000	APBD	
2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.433.649	116.433.649	89.289.009	APBD	
2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	175.502.480	175.502.480	365.690.480	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	211.313.432	211.313.432	115.784.214	APBD	
2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	211.313.432	211.313.432	115.784.214	APBD	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	263.082.119	263.082.119	249.321.444	APBD	
2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	165.341.468	165.341.468	165.341.468	APBD	
2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.740.651	97.740.651	83.979.976	APBD	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	467.938.971	467.938.971	440.926.470	APBD	
2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	222.240.761	222.240.761	195.228.260	APBD	
2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	APBD	
2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	30.312.960	30.312.960	30.312.960	APBD	
2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	25.385.250	25.385.250	25.385.250	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	94 %	94 %	2.726.933.846	2.726.933.846	1.784.164.260	APBD	
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	30.049.300	30.049.300	99.974.630	APBD	
2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	900.000	900.000	900.000	APBD	
2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	29.149.300	29.149.300	99.074.630	APBD	
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	100 %	100 %	817.409.216	817.409.216	601.015.420	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	328.844.216	328.844.216	137.612.336	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.102.000	69.102.000	62.402.000	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.716.000	67.716.000	66.495.830	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.260.000	73.260.000	68.660.000	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.944.000	64.944.000	63.294.000	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.716.000	67.716.000	65.266.000	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.488.000	70.488.000	66.638.000	APBD	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.339.000	75.339.000	70.647.254	APBD	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	1.879.475.330	1.879.475.330	1.083.174.210	APBD	
2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.475.330	1.879.475.330	1.083.174.210	APBD	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	100 %	18.488.482.760	18.488.482.760	31.932.952.066	APBD	
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	9.392.082.760	9.392.082.760	9.275.726.190	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760	38.082.760	9.323.680	APBD	
2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	996.000.000	996.000.000	1.018.728.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	972.000.000	972.000.000	972.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	APBD	
2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	390.000.000	390.000.000	302.344.340	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	92.000.000	92.000.000	87.200.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	75.200.000	75.200.000	72.470.170	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	100.400.000	100.400.000	96.100.000	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	66.800.000	66.800.000	64.000.000	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	75.200.000	75.200.000	75.200.000	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	96.200.000	96.200.000	91.900.000	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	117.200.000	117.200.000	113.460.000	APBD	
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	9.096.400.000	9.096.400.000	22.657.225.876	APBD	
2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Jatingaleh)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.167.800.000	1.167.800.000	2.871.440.000	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Wonotingal)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	933.800.000	933.800.000	2.301.460.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Tegalsari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.791.800.000	1.791.800.000	4.555.702.720	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kaliwiru)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	528.200.000	528.200.000	1.205.985.440	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	980.600.000	980.600.000	2.432.880.000	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.339.400.000	1.339.400.000	3.330.770.000	APBD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.213.000.000	2.213.000.000	5.694.381.746	APBD	
2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000	4.800.000	4.200.000	APBD	
2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	133.405.970	APBD	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25 %	25 %	25 %	53.300.000	53.300.000	44.750.000	APBD	
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	31 Angka	31 Angka	53.300.000	53.300.000	44.750.000	APBD	
2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.300.000	53.300.000	44.750.000	APBD	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	98%	98%	98%	74.150.000	74.150.000	73.150.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	74.150.000	74.150.000	73.150.000	APBD	
2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	70 Orang	70 Orang	74.150.000	74.150.000	73.150.000	APBD	
JUMLAH						34.836.828.344	34.836.828.344	47.971.091.178		

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

48. KECAMATAN BANYUMANIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

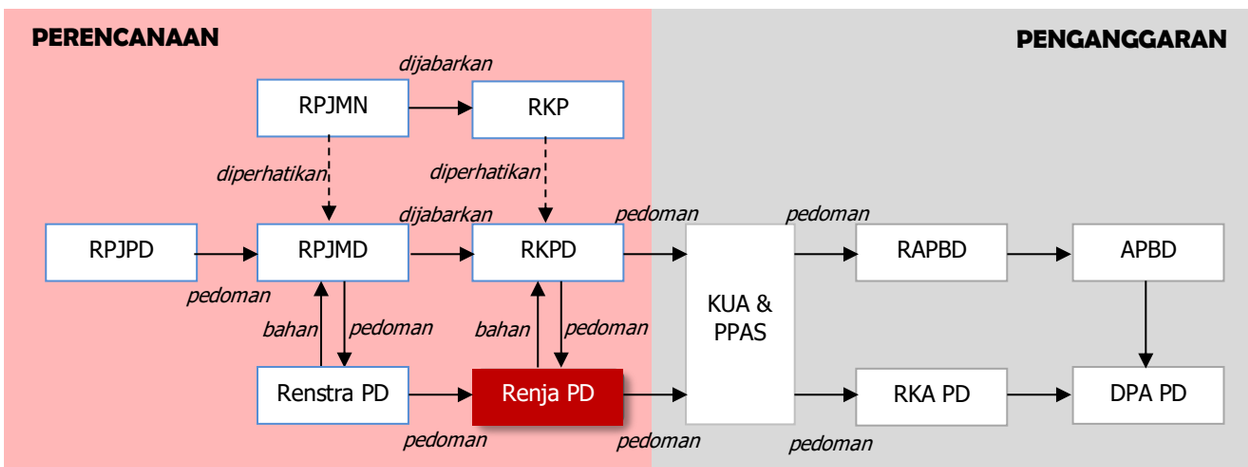

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, dengan

berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2025 yang naik karena kondisi ekonomi yang naik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
r. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
v. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
w. Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang Nomor 32 Tahun 2025 mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 Angka	97.22 Angka	94.00 Angka	97.09 Angka	103.29%	194.31	153,57%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 angka	3 angka	1.00 angka	2 angka	200.00%	5.00	150,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	100.00%	2.00	154,17%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	165,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50.00%	18.00	157,14%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudakpayung	100.00 persen	100 persen	1000.00 persen	50 persen	5.00%	150.00	166,67%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	150,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	208,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	150,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Kulon	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	198,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Wetan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	133,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	150,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	157,14%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10.00 kegiatan	100 persen	10.00 kegiatan	50 persen	500.00%	150.00	100,00%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50 persen	50.00	150.00	200,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	453.00 kegiatan	457 kegiatan	455.00 kegiatan	370 kegiatan	81.32%	827.00	200,00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	100.00%	18.00	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	12.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pudakpayung	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	16.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Padangsari	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	18.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gedawang	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	15.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jabungan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	15.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srondol Wetan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	17.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Banyumanik	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	17.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	15.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sumurboto							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srondol Kulon	11.00 kegiatan	11.00 kegiatan	11.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	11.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	12.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	19.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	14.00	150,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	11.00 kegiatan	55.00%	31.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	9.00 kegiatan	50.00%	27.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srondol Kulon	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	12.00 kegiatan	63.16%	31.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	25.00 kegiatan	25.00 kegiatan	25.00 kegiatan	7.00 kegiatan	28.00%	32.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	48.00 kegiatan	48.00 kegiatan	48.00 kegiatan	11.00 kegiatan	22.92%	59.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	23.00 kegiatan	23.00 kegiatan	23.00 kegiatan	12.00 kegiatan	52.17%	35.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srondol Wetan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	10.00 kegiatan	47.62%	31.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	28.00 kegiatan	28.00 kegiatan	28.00 kegiatan	15.00 kegiatan	53.57%	43.00	200,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	9.00 kegiatan	50.00%	27.00	150,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jabungan	24.00 kegiatan	24.00 kegiatan	24.00 kegiatan	13.00 kegiatan	54.17%	37.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	13.00 kegiatan	65.00%	33.00	150,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	12.00 kegiatan	57.14%	33.00	150,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100.00%	10.00	150,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100.00%	10.00	150,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	100.00%	5.00	150,00%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	100.00%	2.00	200,00%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 persen	21 persen	25.00 persen	9 persen	36.00%	30.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.00 angka	25.00 angka	27.00 angka	27.00 angka	100.00%	52.00	200,00%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	100.00%	9.00	153,57%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00 persen	100.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	100.00%	198.00	150,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	100.00%	4.00	154,17%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	2.00 kegiatan	1.00 kegiatan	50.00%	4.00	165,00%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	157,14%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 dokumen	7.00 dokumen	8.00 dokumen	4.00 dokumen	50.00%	11.00	200,00%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50.00%	2.00	200,00%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0.00%	1.00	166,67%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	200,00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	150,00%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0.00%	1.00	208,00%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00%	4.00	150,00%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	198,00%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	200,00%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	133,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	150,00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	157,14%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	200,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100.00%	6.00	100,00%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	200,00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	200,00%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%	2.00	100,00%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	200,00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00%	150.00	200,00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.00 jenis	7.00 jenis	7.00 jenis	7.00 jenis	100.00%	14.00	200,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4.00 jenis	4.00 jenis	3.00 jenis	4.00 jenis	133.33%	8.00	150,00%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50.00 jenis	50.00 jenis	50.00 jenis	50.00 jenis	100.00%	100.00	150,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	100.00%	8.00	150,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	2500.00 orang	2500.00 orang	2500.00 orang	100.00%	5000.00	150,00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100.00%	30.00	200,00%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 jenis	5.00 jenis	5.00 jenis	5.00 jenis	100.00%	10.00	200,00%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	200,00%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lianya	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	2 jenis	50.00%	6.00	200,00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50 persen	50.00%	150.00	150,00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	6.00 bulan	50.00%	18.00	150,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	3.00 jenis	50.00%	9.00	200,00%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	200,00%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00%	150.00	200,00%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30.00 unit	30.00 unit	30.00 unit	30.00 unit	100.00%	60.00	200,00%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	100.00%	4.00	200,00%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00%	6.00	200,00%

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”.

Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing/ efisiensi antara lain “Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”, “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”, “Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan”, dll. Beberapa sub kegiatan ini pedukung dari indikator sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berupa Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, walaupun demikian target Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN tetap dapat tercapai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI / PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%	KET
		Rp	Rp	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.755.283.243	9.274.807.462	44,69%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.506.800	1.207.000	2,03%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.870.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.336.800	1.207.000	90,29%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	-	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	-	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.012.553.626	8.890.071.300	49,35%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.376.647.440	8.583.851.300	49,40%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	632.592.000	306.220.000	48,41%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.314.186	-	0,00%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI / PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%	KET
		Rp	Rp	%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	-	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	804.307.061	84.963.725	10,56%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.900.000	8.069.000	54,15%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.995.982	13.783.000	30,63%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	28.681.225	47,80%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.909.899	8.253.500	39,47%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	350.000	3,50%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.960.160	25.827.000	14,27%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	472.541.020	-	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	549.122.306	56.800.000	10,34%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	549.122.306	56.800.000	10,34%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.915.450	145.360.928	32,75%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.000.000	71.230.928	33,76%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.715.450	39.430.000	44,95%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.000	34.700.000	23,90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.878.000	96.404.509	10,88%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.553.000	84.130.409	37,97%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272.002.500	-	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	12.274.100	40,91%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	362.322.500	-	0,00%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.376.379.779	1.305.517.016	38,67%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	120.922.710	90.400.000	74,76%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000	-	0,00%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	116.922.710	90.400.000	77,32%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.722.656.259	615.703.066	35,74%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI / PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%	KET
		Rp	Rp	%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	751.443.196	363.621.825	48,39%	Kecamatan Banymanik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.139.862	15.269.284	16,60%	Kelurahan Banyumanik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.602.332	13.015.309	13,85%	Kelurahan Gedawang
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.641.394	20.261.847	23,02%	Kelurahan Jabungan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.317.611	24.753.874	25,52%	Kelurahan Ngesrep
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.634.846	19.052.250	19,05%	Kelurahan Padangsari
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.488.348	33.788.324	35,57%	Kelurahan Pedalangan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.568.734	25.718.198	24,04%	Kelurahan Pudakpayung
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.622.967	27.006.162	28,73%	Kelurahan Srondol Kulon
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.357.735	19.912.675	18,96%	Kelurahan Srondol Wetan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.481.107	35.735.932	39,94%	Kelurahan Sumurboto
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.358.127	17.567.386	21,33%	Kelurahan Tinjomoyo
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.532.800.810	599.413.950	39,11%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.532.800.810	599.413.950	39,11%	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.444.983.775	6.719.060.696	22,82%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.313.281.056	720.853.846	5,04%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.619.400	32.505.000	76,27%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.100.000.000	-	0,00%	Kecamatan Banymanik
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	-	0,00%	Kelurahan Banyumanik
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	29.372.100	3,09%	Kelurahan Gedawang
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.353.000.000	-	0,00%	Kelurahan Jabungan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.026.000.000	28.411.876	2,77%	Kelurahan Ngesrep
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	-	0,00%	Kelurahan Padangsari

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI / PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%	KET
		Rp	Rp	%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	21.947.000	2,31%	Kelurahan Pedalangan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.267.000.000	29.436.074	2,32%	Kelurahan Pudakpayung
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	-	0,00%	Kelurahan Srondol Kulon
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.220.000.000	-	0,00%	Kelurahan Srondol Wetan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	22.394.096	2,36%	Kelurahan Sumurboto
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	973.000.000	385.000	0,04%	Kelurahan Tinjomoyo
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	468.164.434	233.080.000	49,79%	Kecamatan Banymanik
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.868.483	18.000.000	19,57%	Kelurahan Banyumanik
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94.070.794	25.510.000	25,41%	Kelurahan Gedawang
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.800.000	21.200.000	25,36%	Kelurahan Jabungan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.547.335	28.618.200	27,36%	Kelurahan Ngesrep
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.050.000	25.800.000	22,01%	Kelurahan Padangsari
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.125.730	38.054.500	45,52%	Kelurahan Pedalangan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.200.000	56.700.000	34,70%	Kelurahan Pudakpayung
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	89.300.000	17.254.000	17,94%	Kelurahan Srondol Kulon
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.131.620	37.624.000	25,66%	Kelurahan Srondol Wetan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.182.400	36.865.000	55,70%	Kelurahan Sumurboto
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79.220.860	17.697.000	22,34%	Kelurahan Tinjomoyo
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.131.702.719	5.998.206.850	39,64%	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	131.636.933	39.540.500	30,04%	Kecamatan Banymanik
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.020.250.000	373.595.500	33,33%	Kelurahan Banyumanik
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.228.940.000	439.144.750	32,41%	Kelurahan Gedawang
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	719.953.000	251.015.000	31,64%	Kelurahan Jabungan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.444.610.150	537.530.100	33,83%	Kelurahan Ngesrep
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.723.077.398	616.250.000	32,42%	Kelurahan Padangsari
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.211.292.250	652.537.500	48,72%	Kelurahan Pedalangan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.460.333.792	1.116.810.000	41,18%	Kelurahan Pudakpayung
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.228.201.362	428.625.000	31,63%	Kelurahan Srondol Kulon
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.209.095.966	793.915.000	32,44%	Kelurahan Srondol Wetan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	816.170.378	436.993.500	53,54%	Kelurahan Sumurboto

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI / PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%	KET
		Rp	Rp	%	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	864.180.670	295.450.000	34,19%	Kelurahan Tinjomoyo
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.287.400	-	0,00%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	65.673.420	16.800.000	25,58%	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.350.000	11.350.000	40,04%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.350.000	11.350.000	40,04%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.350.000	11.350.000	40,04%	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	177.225.000	122.025.000	68,85%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	177.225.000	122.025.000	68,85%	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	177.225.000	122.025.000	68,85%	
JUMLAH		53.782.221.797	17.432.760.174	32,41%	

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan (tidak termasuk Kelurahan karena sub kegiatan yang sama dengan Kecamatan) pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebesar Rp 53.782.221.797. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 17.432.760.174. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 36.349.461.623.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang menjadi kewenangan ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan :														
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	86.68	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	87	97	95	95.47	97.09	97	96
Sasaran :														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	96	97	98	99	100	100	97	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48	49	52	56	59	62	42	49	52	52	65	63	60
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	50	60	70	80	90	100	50	60	70	80	100	100	85

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 97.09% dari target sebesar 89.00%.
b. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar

PATEN", telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 %.

c. Sasaran "Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu:
   1) "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" telah dapat memenuhi target sebesar 100% dari target sebesar 100%.
d. Sasaran "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   1) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 65% dari target sebesar 59%.
   2) "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan" telah dapat melebihi target sebesar 100% dari target sebesar 90%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sudah cukup baik, dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Dengan harapanya dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dengan harapan kedepannya dapat terus ditingkatkan. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait kesetaraan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan penunjang kewilayahan diantaranya:

1. Permasalahan:
   - Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti pemanfaatan Artifisial Intelegent (AI) untuk mempercepat layanan publik.
   - Permasalahan Stunting yang sangat kompleks memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor/pihak dalam memberikan solusi yang holistik.

- Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan

2. Hambatan
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah dan kualitas pegawai yang tidak memadai menghambat efektivitas layanan publik. Beberapa pegawai kurang terlatih dan memerlukan pelatihan dan keterampilan.
   - Kurangnya Pemahaman tentang Perda/Perwal/Kebijakan, Pegawai dan masyarakat tidak sepenuhnya memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku, hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan terutama terkait bantuan operasional RT/ RW.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan - perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
   2) Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.
   3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
   4) Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.

b. Peluang
   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
   3) Dukungan stakeholder (tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga terkait).

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
   Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang
   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
   1) Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel).
   2) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
   3) Peningkatan kapasitas kelembagaan.
   4) Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. Pelayanan Publik Akhir Pekan
   Kecamatan Banyumanik besama Kecamatan lainnya di Kota Semarang telah menyelenggarakan layanan publik akhir pekan selama 5 kali pada tahun 2025. Antusiasme masyarakat sangat besar dengan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan ini. Secara ekonomi sangat membantu UMKM dalam

memasarkan produk-produknya, disamping masyarakat dapat menerima layanan publik yang baik.

6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FOKOMPIMCAM)
   Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/Forkopimcam. Dalam Forum ini diharapkan tercipta sinergi antara Kecamatan dan TNI/POLRI dalam menciptakan suasana kondusif masyarakat serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				80.251.863.526,03					80.251.863.526,03	
	KECAMATAN BANYUMANIK				80.251.863.526,03					80.251.863.526,03	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	21.189.714.369,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	21.189.714.369,00	
		Kecamatan Banyumanik	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
		Kecamatan Banyumanik	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45 OPD			Kecamatan Banyumanik	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45 OPD		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	2 Dokumen	59.506.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	2 Dokumen	59.506.800,00	
		Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	7 Dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	7 Dokumen		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.870.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.870.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.336.800,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.336.800,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.500.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.600.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3 Dokumen	17.679.865.807,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3 Dokumen	17.679.865.807,00	
		Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100%		
		Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100%		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	17.038.511.621,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	17.038.511.621,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	638.040.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	638.040.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.314.186,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.314.186,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100%	1.055.398.611,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100%	1.055.398.611,00	
		Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.900.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.900.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	44.995.982,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	44.995.982,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	60.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.909.899,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.909.899,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.423.780,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.423.780,00	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5 Dokumen	634.668.950,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5 Dokumen	634.668.950,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100%	372.702.578,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100%	372.702.578,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	372.702.578,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	372.702.578,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100%	1.133.810.073,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100%	1.133.810.073,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.003.533,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.003.533,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.715.450,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.715.450,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	831.091.090,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	831.091.090,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100%	888.430.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100%	888.430.500,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	241.105.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	241.105.500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	255.002.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	255.002.500,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	362.322.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	362.322.500,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	2.525.710.538,03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	2.525.710.538,03	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1 Angka	116.959.599,03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1 Angka	116.959.599,03	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	4.000.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	112.959.599,03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	112.959.599,03	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100%	1.476.316.859,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100%	1.476.316.859,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	509.278.796,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	509.278.796,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.139.862,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.139.862,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.602.332,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.602.332,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	82.641.394,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	82.641.394,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.317.611,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.317.611,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.634.846,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.634.846,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.038.348,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.038.348,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	103.568.734,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	103.568.734,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kec Banyumanik,	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	84.747.967,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kec Banyumanik,	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	84.747.967,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Srondol Kulon	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Srondol Kulon	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	96.157.735,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	96.157.735,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.831.107,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.831.107,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	82.358.127,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	82.358.127,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100%	932.434.080,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100%	932.434.080,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	932.434.080,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	932.434.080,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	56.301.938.619,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	56.301.938.619,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	455 Kegiatan	14.738.450.760,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	455 Kegiatan	14.738.450.760,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	34.873.950,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	34.873.950,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.350.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.350.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Gedawang					Kelurahan Gedawang				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.376.589.364,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.376.589.364,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.026.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.026.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.267.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.267.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.050.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.050.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.220.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.220.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	973.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	973.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	624.440.224,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	624.440.224,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	87.868.483,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	87.868.483,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	94.070.794,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	94.070.794,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	72.800.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	72.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	92.547.335,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	92.547.335,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	108.050.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	108.050.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	83.325.730,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	83.325.730,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	155.200.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	155.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	89.300.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	89.300.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	139.331.620,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	139.331.620,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	64.832.400,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	64.832.400,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	79.220.860,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	79.220.860,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5 Dokumen	41.563.487.859,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5 Dokumen	41.563.487.859,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.520.493,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.520.493,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.737.900.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.737.900.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.425.190.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.425.190.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.203.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.203.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.028.860.150,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.028.860.150,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.770.927.398,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.770.927.398,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.324.192.250,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.324.192.250,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.103.383.792,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.103.383.792,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.345.926.362,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.345.926.362,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.271.545.966,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.271.545.966,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.226.420.378,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.226.420.378,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.299.030.670,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.299.030.670,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.287.400,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.287.400,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	21.100.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	21.100.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	32.400.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	32.400.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	27 Angka	32.400.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	27 Angka	32.400.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	32.400.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	32.400.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	202.100.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	202.100.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2 Kegiatan	202.100.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2 Kegiatan	202.100.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	200 Orang	202.100.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	200 Orang	202.100.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".
2. Terwujudnya Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum".
2. "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.00
SASARAN :			

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	59
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	21.186.671.844,00	20.999.425.284,00	21.189.714.369,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					Kecamatan Banyumanik
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45 OPD	45 OPD	45 OPD					Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	66.345.600,00	66.345.600,00	59.506.800,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
		Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen					Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	52.336.800,00	52.336.800,00	50.870.000,00	APBD	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.936.800,00	1.936.800,00	1.200.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.800,00	2.530.800,00	1.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.336.800,00	1.336.800,00	1.336.800,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.800,00	2.530.800,00	1.500.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.336.800,00	4.336.800,00	2.600.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.336.800,00	1.336.800,00	1.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	18.204.506.800,00	18.017.260.240,00	17.679.865.807,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100%	100%	100%					Kecamatan Banyumanik
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100%	100%	100%					Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	17.563.894.000,00	17.376.647.440,00	17.038.511.621,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	632.592.000,00	632.592.000,00	638.040.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.336.800,00	1.336.800,00	1.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.347.200,00	5.347.200,00	1.314.186,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.336.800,00	1.336.800,00	1.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	976.542.791,00	976.542.791,00	1.055.398.611,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	44.995.982,00	44.995.982,00	44.995.982,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.909.899,00	20.909.899,00	20.909.899,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	353.195.890,00	353.195.890,00	274.423.780,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	472.541.020,00	472.541.020,00	634.668.950,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	549.122.306,00	549.122.306,00	372.702.578,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	549.122.306,00	549.122.306,00	372.702.578,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	443.915.450,00	443.915.450,00	1.133.810.073,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	211.000.000,00	211.000.000,00	215.003.533,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.715.450,00	87.715.450,00	87.715.450,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.200.000,00	145.200.000,00	831.091.090,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	946.238.897,00	946.238.897,00	888.430.500,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	265.918.897,00	265.918.897,00	241.105.500,00	APBD	Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	255.002.500,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	370.320.000,00	370.320.000,00	362.322.500,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	94%	94%	3.484.355.230,00	3.671.601.790,00	2.525.710.538,03	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1 Angka	1 Angka	1 Angka	143.025.000,00	143.025.000,00	116.959.599,03	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	4.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	136.425.000,00	136.425.000,00	112.959.599,03	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	1.808.477.300,00	1.995.723.860,00	1.476.316.859,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	749.477.300,00	936.723.860,00	509.278.796,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	87.139.862,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000,00	94.000.000,00	85.602.332,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	82.641.394,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.000.000,00	97.000.000,00	86.317.611,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	88.634.846,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	79.038.348,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	107.000.000,00	103.568.734,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000,00	94.000.000,00	84.747.967,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	96.157.735,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	90.831.107,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000,00	91.000.000,00	82.358.127,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100%	100%	100%	1.532.852.930,00	1.532.852.930,00	932.434.080,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.532.852.930,00	1.532.852.930,00	932.434.080,00	APBD	Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	31.147.675.888,00	31.147.675.888,00	56.301.938.619,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	455 Kegiatan	455 Kegiatan	455 Kegiatan	13.816.700.000,00	14.413.100.000,00	14.738.450.760,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	34.873.950,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.350.000.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.353.000.000,00	1.353.000.000,00	1.376.589.364,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.267.000.000,00	1.267.000.000,00	1.267.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	973.000.000,00	973.000.000,00	973.000.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	482.700.000,00	482.700.000,00	624.440.224,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	92.000.000,00	87.868.483,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.400.000,00	94.070.794,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	72.800.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	104.600.000,00	92.547.335,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	117.200.000,00	108.050.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	83.325.730,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	163.400.000,00	155.200.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	96.200.000,00	89.300.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	146.600.000,00	139.331.620,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	75.200.000,00	64.832.400,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	79.220.860,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17.330.975.888,00	16.734.575.888,00	41.563.487.859,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000,00	137.000.000,00	120.520.493,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000,00	1.121.000.000,00	2.737.900.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000,00	1.355.000.000,00	3.425.190.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	827.000.000,00	793.400.000,00	1.880.203.000,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000,00	1.589.000.000,00	4.028.860.150,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000,00	1.901.000.000,00	4.770.927.398,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000,00	1.339.400.000,00	3.324.192.250,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000,00	2.712.200.000,00	7.103.383.792,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000,00	1.355.000.000,00	3.345.926.362,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000,00	2.447.000.000,00	6.271.545.966,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000,00	902.600.000,00	2.226.420.378,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000,00	949.400.000,00	2.299.030.670,00	APBD	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.287.400,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	117.575.888,00	117.575.888,00	21.100.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	25%	25%	45.450.000,00	45.450.000,00	32.400.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	27 Angka	27 Angka	27 Angka	45.450.000,00	45.450.000,00	32.400.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.450.000,00	45.450.000,00	32.400.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	98%	98%	223.600.000,00	223.600.000,00	202.100.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	223.600.000,00	223.600.000,00	202.100.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	223.600.000,00	223.600.000,00	202.100.000,00	APBD	Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
JUMLAH						56.087.752.962,00	56.087.752.962,00	80.251.863.526,03		

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan

pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

49. KECAMATAN NGALIYAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

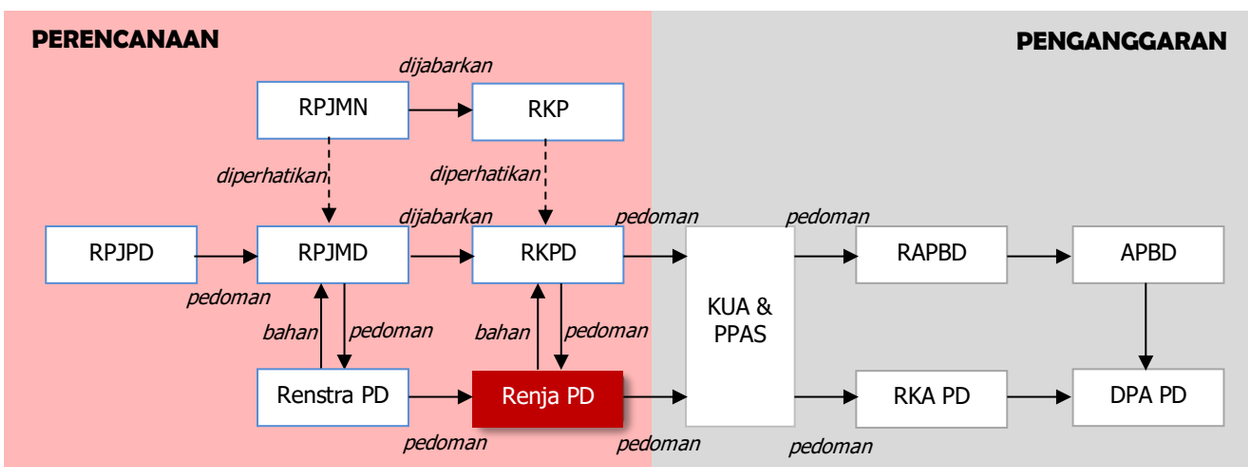

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Ngaliyan sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025, Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021–2026 guna menjamin keterpaduan antara perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Adanya perubahan kepemimpinan daerah dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang pada bulan Februari 2025, yang membawa arah kebijakan baru sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih periode 2025–2030; (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian capaian dengan target serta kebutuhan untuk optimalisasi belanja dan pengelolaan keuangan daerah; (3) Ketidaksesuaian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dibandingkan dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, sehingga mempengaruhi kemampuan pendanaan.; serta (4) Perubahan kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk dana transfer yang baru ditetapkan setelah APBD disahkan, yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan daerah.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).
t. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender
u. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh

mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100%	100%	50 %	50%	50%	50%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100%	100%	50 %	50%		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100%	100%	50%	50%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00 dokumen	5	6	2	33.33%		
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	2	2	1	50%		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen	1	3	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0%		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0%		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0%		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0%		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 laporan	1	1	1	100%		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 laporan	2	1	1	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	4	4	1	25%		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	50%	50%		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang / bulan	86	101	82	81.18%		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	12	12	6	50%		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 laporan	1	1	0	0%		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 laporan	2	1	1	100%		
7.01.01.2.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1	1	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	40.47%	40.47%		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 paket	5	5	3	60%		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 paket	3	2	0	0%		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket	1	10	4	40%		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 paket	6	3	1	33.33%		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 laporan	12	6	0	0%		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 laporan	12	12	6	50%		
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 dokumen	1	4	1	25%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	33.33%	33.33%		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 unit	5	3	1	33.33%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	50%	50%		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.00 unit	24	35	35	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 unit	3	4	4	100%		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 unit	3	1	1	100%		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 unit	4	4	4	100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93.70%	94%	93.57%	99.54%	93.57%	100.61%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 angka	1	1	0	0%		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.00 laporan	3	2	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	4	1	0	0%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 Persen	100%	100%	50%	50%		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12.00 laporan	12	12	6	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 Persen	100%	100%	50%	50%		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00 laporan	12	12	6	50%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00 persen	100%	100%	100%	100%	100%	101.01%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00 kegiatan	236	232	50	100		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	7	3	1	0%		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00 unit	8	7	0	0%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	13	12	1	8.33%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	13	15	1	6.67%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	12	14	1	7.14%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00 unit	14	14	0	0%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00 unit	15	14	1	7.14%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 unit	13	15	1	6.67%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21.00 unit	21	22	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	13	13	1	7.69%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	12	12	2	16.67%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00 unit	16	19	0	0%		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	3	100%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	3	100%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	3	100%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	2	66.67%		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3	3	1	33.33%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	8	8	8	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	4	4	1	25%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	9	100%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	5	55.56%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	3	33.33%		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	9	9	8	88.89%		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	3	2	66.67%		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.00 laporan	3	1	1	100%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00 persen	20	25%	57.65%	230.6%	57.65%	57.65%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00 angka	30	28	16	57.14%		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.00 laporan	3	12	6	50%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00 persen	100%	98%	0%	0%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	3	3	0	0%		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200	60	0	0%		

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Sampai pada triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD”, “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”, “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD”, “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan”, “Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya”, “Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya”, “Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya”, “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan”, “Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan”, dan “Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat”.

Beberapa sub kegiatan belum tercapai hingga Triwulan II Tahun 2025 karena pertimbangan efisiensi anggaran yaitu “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor” dan “Fasilitasi Kunjungan Tamu”. Kedua sub kegiatan ini ditunda pelaksanaannya untuk menjaga keseimbangan penggunaan anggaran belanja operasional, sambil menunggu prioritas kegiatan utama lainnya.

Sementara itu, sub kegiatan yang belum dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif antara lain “Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, “Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait”, “Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, serta “Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”. Pelaksanaan sub kegiatan tersebut dijadwalkan ulang pada semester kedua tahun berjalan menyesuaikan kesiapan teknis, waktu pelaksanaan bersama mitra, serta perkembangan dinamika lapangan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 yang mengalami penyesuaian seiring adanya realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	UNSUR KEWILAYAHAN	58.140.255.983	22.482.381.298	38,67%
2	KECAMATAN	58.140.255.983	22.482.381.298	38,67%
3	KECAMATAN NGALIYAN	28.318.171.570	12.264.930.579	43,31%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.165.287.681	10.048.489.619	47,48%
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.439.600	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.950.000	0	0,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	525.000	0	0,00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	525.000	0	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.750.000	0	0,00%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	689.600	0	0,00%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.301.047.318	8.511.968.550	49,20%
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.687.691.318	8.213.728.550	49,22%
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	613.356.000	298.240.000	48,62%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.325.417.850	26.229.900	1,98%
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.697.967	1.540.000	7,82%
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421.410.000	0	0,00%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.856.477	10.380.000	74,91%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.870.540	1.855.900	99,22%
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.720.000	0	0,00%
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.118.299	12.454.000	26,43%
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	801.744.567	0	0,00%
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.689.972	0	0,00%
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.689.972	0	0,00%
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.326.905	140.361.244	38,32%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.729.917	89.565.244	43,32%
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.596.988	50.796.000	31,83%
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.366.036	1.369.929.925	82,11%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.175.333	85.258.025	31,21%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	775.000.000	736.609.000	95,05%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.190.703	12.968.900	64,23%
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	535.094.000	89,18%
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.823.052.174	1.185.470.070	41,99%
33	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	314.457.190	110.475.000	35,13%
34	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.400.000	0	0,00%
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	311.057.190	110.475.000	35,52%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
36	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	258.555.726	143.085.000	55,34%
37	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	258.555.726	143.085.000	55,34%
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.039.258	931.910.070	41,42%
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.039.258	931.910.070	41,42%
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.081.348.885	881.835.890	21,61%
41	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.794.034.172	748.605.990	19,73%
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.022.240	30.900.200	64,35%
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.925.000.000	430.942.790	14,73%
44	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	821.011.932	286.763.000	34,93%
45	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	287.314.713	133.229.900	46,37%
46	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	30.400.900	23,94%
47	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	47.269.910	0	0,00%
48	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	113.044.803	102.829.000	90,96%
49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	167.382.830	114.910.000	68,65%
50	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	167.382.830	114.910.000	68,65%
51	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	167.382.830	114.910.000	68,65%
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.100.000	34.225.000	42,20%
53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.100.000	34.225.000	42,20%
54	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81.100.000	34.225.000	42,20%
55	KELURAHAN BRINGIN	4.033.057.210	1.630.851.290	40,44%
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	31.469.290	35,76%
57	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88.000.000	31.469.290	35,76%
58	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	31.469.290	35,76%
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.945.057.210	1.599.382.000	40,54%
60	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.178.130.000	239.757.000	20,35%
61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.037.800.000	187.787.000	18,09%
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.330.000	51.970.000	37,03%
63	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.766.927.210	1.359.625.000	49,14%
64	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.766.927.210	1.359.625.000	49,14%
65	KELURAHAN KALIPANCUR	3.571.270.161	1.360.559.945	38,10%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.151.235	32.139.945	37,74%
67	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	85.151.235	32.139.945	37,74%
68	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.151.235	32.139.945	37,74%
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.486.118.926	1.328.420.000	38,11%
70	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.216.450.000	211.070.000	17,35%
71	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.113.950.000	155.228.000	13,93%
72	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.500.000	55.842.000	54,48%
73	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.269.668.926	1.117.350.000	49,23%
74	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.269.668.926	1.117.350.000	49,23%
75	KELURAHAN BAMBANKEREP	1.811.537.511	579.800.317	32,01%
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.837.718	34.175.217	39,36%
77	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	86.837.718	34.175.217	39,36%
78	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.837.718	34.175.217	39,36%
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.724.699.793	545.625.100	31,64%
80	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	999.965.000	200.945.100	20,10%
81	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	927.500.000	167.904.000	18,10%
82	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.465.000	33.041.100	45,60%
83	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	724.734.793	344.680.000	47,56%
84	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	724.734.793	344.680.000	47,56%
85	KELURAHAN NGALIYAN	2.620.742.914	889.474.514	33,94%
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.649.926	30.499.464	34,40%
87	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88.649.926	30.499.464	34,40%
88	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.649.926	30.499.464	34,40%
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.532.092.988	858.975.050	33,92%
90	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	995.200.000	31.117.800	3,13%
91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	910.000.000	0	0,00%
92	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.200.000	31.117.800	36,52%
93	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.536.892.988	827.857.250	53,87%
94	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.536.892.988	827.857.250	53,87%
95	KELURAHAN WATES	2.062.357.987	538.012.360	26,09%
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.944.301	40.226.360	47,36%
97	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	84.944.301	40.226.360	47,36%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
98	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.944.301	40.226.360	47,36%
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.977.413.686	497.786.000	25,17%
100	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.066.422.210	62.636.000	5,87%
101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	999.300.000	29.833.500	2,99%
102	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.122.210	32.802.500	48,87%
103	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	910.991.476	435.150.000	47,77%
104	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	910.991.476	435.150.000	47,77%
105	KELURAHAN TAMBAKAJI	3.517.266.286	1.270.311.468	36,12%
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.648.900	38.368.018	45,87%
107	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.648.900	38.368.018	45,87%
108	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.648.900	38.368.018	45,87%
109	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.433.617.386	1.231.943.450	35,88%
110	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.386.279.186	109.294.450	7,88%
111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.208.350.000	11.682.000	0,97%
112	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	177.929.186	97.612.450	54,86%
113	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.047.338.200	1.122.649.000	54,83%
114	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.047.338.200	1.122.649.000	54,83%
115	KELURAHAN WONOSARI	4.491.216.347	1.277.369.442	28,44%
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.340.305	44.954.442	52,07%
117	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	86.340.305	44.954.442	52,07%
118	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.340.305	44.954.442	52,07%
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.404.876.042	1.232.415.000	27,98%
120	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.011.591.900	61.675.000	3,07%
121	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.864.247.000	0	0,00%
122	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.344.900	61.675.000	41,86%
123	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.393.284.142	1.170.740.000	48,92%
124	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.393.284.142	1.170.740.000	48,92%
125	KELURAHAN PODOREJO	2.202.822.811	770.180.812	34,96%
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.520.122	31.822.312	39,04%
127	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	81.520.122	31.822.312	39,04%
128	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.520.122	31.822.312	39,04%
129	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.121.302.689	738.358.500	34,81%
130	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	987.217.410	143.348.500	14,52%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
131	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	906.980.000	106.748.000	11,77%
132	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.237.410	36.600.500	45,62%
133	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.134.085.279	595.010.000	52,47%
134	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.134.085.279	595.010.000	52,47%
135	KELURAHAN PURWOYOSO	3.090.346.058	1.195.607.950	38,69%
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.525.119	31.442.700	37,20%
137	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	84.525.119	31.442.700	37,20%
138	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.525.119	31.442.700	37,20%
139	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.005.820.939	1.164.165.250	38,73%
140	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.205.786.497	274.564.000	22,77%
141	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.097.824.000	229.214.000	20,88%
142	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.962.497	45.350.000	42,01%
143	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.800.034.442	889.601.250	49,42%
144	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.800.034.442	889.601.250	49,42%
145	KELURAHAN GONDORIYO	2.421.467.128	705.282.621	29,13%
146	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.574.398	31.233.421	37,37%
147	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.574.398	31.233.421	37,37%
148	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.574.398	31.233.421	37,37%
149	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.337.892.730	674.049.200	28,83%
150	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.005.764.505	27.550.000	2,74%
151	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	917.181.000	0	0,00%
152	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.583.505	27.550.000	31,10%
153	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.332.128.225	646.499.200	48,53%
154	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.332.128.225	646.499.200	48,53%
JUMLAH		58.140.255.983	22.482.381.298	38,67%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 78 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebesar Rp 58.140.255.983 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 22.482.381.298. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 35.657.874.685.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota sesuai dengan tugas pembantuan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
TUJUAN RENSTRA														
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.68	-	-	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	-	91.92	94.15	93.70	93.57	-	95.00
SASARAN RENSTRA														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	17.00 Persen	-	-	-	-	-	16.00 Persen	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	99.00 Persen	-	-	-	-	-	99.00 Persen	-	-	-	-	-	-
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public di kecamatan dan kelurahan	100.00 Persen	-	-	-	-	-	100.00 Persen	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Nilai AKIP Kecamatan Ngaliyan	74.53	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	74.71	71.61	73.40	71.50	77.15	-	74.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN	0.00 Persen	0.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	-	-	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.68 Persen	83.36 Persen	85.04 Persen	86.72 Persen	88.40 Persen	90.08 Persen	-	84.00 Persen	86.00 Persen	95.00 Persen	100.00 Persen	-	90.00 Persen
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	89.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	98.00 Persen	100.00 Persen	-	90.00 Persen	92.00 Persen	100.00 Persen	0.00 Persen	-	98.00 Persen

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Renstra yaitu “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” hingga Triwulan II Tahun 2025 telah melampaui target yaitu 93.57 dari target 89.00 dengan presentase pencapaian sebesar 105.13%.
   Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui pemanfaatan Teknologi Informasi berjalan sangat baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.
   - Analisis Kinerja
     - Kinerja Optimal dan Kepuasan Masyarakat Prima
       Realisasi IKM hingga Triwulan II 2025 sebesar 93.57 telah secara signifikan melampaui target tahunan 2025 sebesar 89.00, menunjukkan keberhasilan yang sangat baik.
     - Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi
       Capaian IKM yang tinggi ini menjadi bukti nyata efektivitas strategi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan layanan. Penggunaan TI menjadi salah satu factor dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kepuasan pengguna layanan.
     - Optimalisasi Fungsi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
       Nilai IKM yang dicapai hingga Triwulan II ini mencerminkan optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan Ngaliyan sebagai garda terdepan pelayanan publik, serta dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan menjaga kondusivitas wilayah. Ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat dengan baik.
   - Tantangan dan Area untuk Perbaikan
     - Menjaga konsistensi kualitas
       Tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan tingkat kepuasan yang sudah tinggi ini secara konsisten, terutama jika terjadi perubahan dinamika kebutuhan masyarakat atau sumber daya.
     - Identifikasi area kritis
       Meskipun nilai IKM sudah tinggi, selalu ada ruang untuk perbaikan dengan mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan atau program yang masih bisa dioptimalkan meskipun secara agregat sudah memuaskan.
     - Pengelolaan ekspektasi masyarakat

Dengan tingkat kepuasan tinggi, ekspektasi masyarakat dapat meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola ekspektasi masyarakat agar tetap realistis namun tetap terlayani dengan prima.

- Rekomendasi
    - Melakukan survei kepuasan berkelanjutan dan mendalam : selain angka IKM, survei yang lebih detail dan berkala diperlukan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi spesifik yang paling berkontribusi pada kepuasan tinggi serta area kecil yang mungkin masih memerlukan perhatian. Hal ini dapat dilakukan melalui kotak saran digital atau *forum group discusion*.
    - Dokumentasi dan replikasi praktik terbaik : melakukan identifikasi praktik-praktik terbaik dengan membuat inovasi Teknologi Informasi atau prosedur layanan tertentu yang telah berkontribusi pada tingginya IKM. Dokumentasi pada praktik ini perlu dipertimbangkan untuk mereplikasinya di unit layanan lain atau membagikannya sebagai *best practice* ke instansi lain.
    - Pengembangan kapasitas SDM : kapasitas SDM dalam pelayanan perlu ditingkatkan walaupun kinerja sudah baik khususnya terkait keterampilan interpersonal dan pemanfaatan teknologi, agar kualitas layanan dapat terjaga dan terus beradaptasi dengan perkembangan.

b. Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan” dengan indikator “Nilai AKIP Kecamatan Ngaliyan” hingga Triwulan II Tahun 2025 berhasil memperoleh presentase pencapaian sebesar 100.85% dengan nilai 77.15, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 76.50. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dan implementasi yang efektif dalam sistem akuntabilitas kinerja di Kecamatan Ngaliyan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang baik.
    - Analisis Kinerja
        - Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
          Capaian ini secara spesifik mencerminkan penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal, termasuk perbaikan pada proses penyusunan perencanaan strategis yang lebih terukur, peningkatan akurasi data pengukuran kinerja, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan Kecamatan Ngaliyan.
        - Dasar Kuat untuk Peningkatan Berkelanjutan
          Realisasi yang melampaui target ini memberikan dasar yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas di masa mendatang.
    - Tantangan dan Area untuk Perbaikan
        - Mempertahankan Kualitas Data dan Laporan

Tantangan adalah memastikan konsistensi dan akurasi data serta laporan kinerja yang menjadi dasar penilaian AKIP, terutama dengan perubahan personel atau prosedur.

- Integrasi Sistem Perencanaan dan Pelaporan
  Adanya potensi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja secara lebih baik untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi.
- Peningkatan Budaya Kinerja
  Bagaimana budaya kinerja bisa ditanamkan dengan kuat di seluruh jajaran, di mana akuntabilitas tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian inheren dari setiap tugas.

- Rekomendasi
  - Evaluasi Internal Berkelanjutan : melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap proses penyusunan dan pelaporan AKIP untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan area perbaikan sebelum evaluasi eksternal dilakukan.
  - Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM: mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur terkait penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran indikator, dan pelaporan yang akuntabel.
  - *Benchmarking* dengan Instansi Terbaik: melakukan *benchmarking* dengan instansi pemerintah lain yang memiliki nilai AKIP sangat tinggi untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik mereka.

c. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” dengan indikator “Presentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN” hingga Triwulan II Tahun 2025 sudah tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kepatuhan Kecamatan Ngaliyan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang berkualitas dan sesuai prosedur.

- Analisis Kinerja
  - Pencapaian Target Penuh
    Realisasi 100% menunjukkan bahwa semua pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Ngaliyan hingga Triwulan II 2025 telah sepenuhnya sesuai dengan standar PATEN yang ditetapkan.
  - Kepatuhan Standar Tinggi
    Hal ini mengindikasikan kepatuhan yang sangat baik terhadap prosedur dan standar operasional pelayanan yang telah distandarisasi.
  - Kualitas Layanan yang Konsisten
    Pencapaian ini menjamin bahwa masyarakat menerima layanan dengan kualitas yang konsisten dan sesuai harapan di setiap titik layanan.
- Tantangan dan Area untuk Perbaikan
  - Adaptasi Standar Terhadap Kebutuhan Baru

Memastikan standar PATEN tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, regulasi baru, dan ekspektasi masyarakat yang terus berubah.

- Monitoring Kualitas Implementasi di Lapangan
  Meskipun standar telah dipenuhi, tantangan ada pada monitoring kualitas implementasi di lapangan dan pengalaman pengguna secara individual. Misalnya keramahan petugas dan kecepatan respons.
- Inovasi di Luar Standar Minimum
  Setelah mencapai standar minimum, tantangannya adalah bagaimana berinovasi dan meningkatkan layanan melebihi standar yang telah ada untuk menciptakan kepuasan bagi masyarakat.

- Rekomendasi
  - Reviu dan Perbarui Standar PATEN Berkala : melakukan peninjauan dan pembaruan standar PATEN secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam merespons dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
  - Survei Kepuasan Pengguna Detil: melakukan survei kepuasan pengguna yang lebih mendalam untuk aspek-aspek spesifik pelayanan, bukan hanya kepatuhan standar, untuk menangkap nuansa kepuasan dan area minor untuk perbaikan.
  - Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan: melanjutkan dan meningkatkan program pelatihan untuk aparatur yang berinteraksi langsung dengan publik, fokus pada keterampilan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah.

d. Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” dengan indikator “Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” telah mencapai target 100% hingga Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menggerakkan dan memberdayakan Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Ngaliyan, yang menjadi indikator kuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- Analisis Kinerja
  - Aktivasi Penuh Lembaga Kemasyarakatan
    Realisasi 100% menunjukkan bahwa semua lembaga kemasyarakatan yang terdaftar di Kecamatan Ngaliyan telah aktif hingga Triwulan II 2025. Ini merupakan indikator keberhasilan dalam menggerakkan potensi partisipasi masyarakat.
  - Basis Kuat untuk Pemberdayaan
    Tingginya persentase lembaga aktif menyediakan basis yang kuat bagi program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan inklusif.
  - Kolaborasi yang Baik

Hal ini mencerminkan kolaborasi yang baik antara pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai elemen masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

- Tantangan dan Area untuk Perbaikan
  - Peningkatan Kualitas Partisipasi
    Tantangan berikutnya bukan hanya pada kuantitas lembaga aktif, tetapi pada kualitas partisipasi dan dampak riil dari keberadaan lembaga-lembaga tersebut terhadap pembangunan.
  - Regenerasi dan Keberlanjutan Pengurus
    Adanya potensi tantangan dalam memastikan regenerasi kepengurusan lembaga kemasyarakatan dan keberlanjutan aktivitas mereka dalam jangka panjang.
  - Diversifikasi Bentuk Partisipasi
    Tantangan untuk mendiversifikasi bentuk partisipasi masyarakat di luar struktur lembaga formal, misalnya melalui platform digital atau inisiatif komunitas.
- Rekomendasi
  - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga : menyediakan pelatihan yang lebih spesifik untuk lembaga kemasyarakatan, fokus pada pengembangan kapasitas manajemen, penyusunan proposal, atau implementasi program-program pemberdayaan.
  - Fasilitasi Inisiatif Berbasis Komunitas : mendukung dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif pembangunan yang berasal langsung dari komunitas atau lembaga, serta memberikan platform bagi untuk berinovasi.
  - Membangun Jaringan Antar-Lembaga : mendorong pembentukan jaringan dan kolaborasi antar-lembaga kemasyarakatan untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan memperkuat sinergi dalam pembangunan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat sub kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terutama pada kegiatan yang bersifat koordinatif dan fasilitatif, seperti Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, serta Fasilitasi Kunjungan Tamu.;
2. Capaian kinerja pada beberapa indikator masih rendah, seperti Persentase Administrasi Keuangan SKPD dan Persentase

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD yang baru mencapai 50%.;

3. Masih terbatasnya realisasi pada beberapa output kegiatan yang terkait dengan inovasi pelayanan publik serta peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, antara lain Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang belum terealisasi hingga TW II.;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan diantaranya:

1. Masih terdapat ketergantungan terhadap perangkat daerah atau instansi vertikal lain dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinergi, sehingga jadwal kegiatan tidak sepenuhnya dapat ditentukan secara mandiri.;
2. Sebagian kegiatan belum dapat dilaksanakan akibat proses administrasi dan pengadaan yang belum selesai pada semester pertama serta adanya penyesuaian anggaran demi efisiensi belanja operasional.;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Menjaga stabilitas pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai jadwal di tengah dinamika penganggaran dan perubahan kebijakan.;
   2) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan pelaporan di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.;
   3) Mendorong tercapainya nilai akuntabilitas (AKIP) yang sesuai target Renstra melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan.;
   4) Menguatkan koordinasi dengan kelurahan dan OPD teknis dalam percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan, dan penurunan stunting.
b. Peluang
   1) Tersedianya dukungan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dan pelayanan publik.;
   2) Potensi sinergi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal dalam pelaksanaan program strategis.;
   3) Peran aktif masyarakat dan kelembagaan lokal (RT, RW, PKK, Karang Taruna) dalam mendukung program prioritas berbasis wilayah.;

4) Adanya dukungan kebijakan nasional dan kota untuk isu prioritas seperti penanganan kemiskinan, stunting, dan penguatan peran kelembagaan lokal.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan prioritas.
2. Penguatan peran kelembagaan lokal RT/RW melalui pembinaan dan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial yang lebih merata di tingkat wilayah.
4. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan masyarakat.
5. Percepatan penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan cakupan intervensi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN NGALIYAN				85.802.172.777	KECAMATAN NGALIYAN				85.802.172.776,59	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	21.691.003.724	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	21.691.003.724,39	
		Kecamatan Ngaliyan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen			Kecamatan Ngaliyan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen		
		Kecamatan Ngaliyan	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen			Kecamatan Ngaliyan	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	6.00 dokumen	28.605.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	6.00 dokumen	28.605.400,00	
		Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen			Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.474.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.474.100,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	525.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dokumen RKA-SKPD		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen RKA-SKPD		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	525.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	111.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	111.400,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	418.900,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.861.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.861.400,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	689.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	689.600,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	17.886.678.101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	17.886.678.101,00	
		Kecamatan Ngaliyan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen			Kecamatan Ngaliyan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ bulan	16.695.014.951	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ bulan	16.695.014.951,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.191.328.950	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.191.328.950,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	111.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	111.400,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	111.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	111.400,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	111.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	111.400,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.188.922.938	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.188.922.937,90	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.697.967	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.697.967,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	268.027.520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	268.027.520,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.455.487	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.455.487,20	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.092.937	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.092.936,80	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3.610.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3.610.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.198.299	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.198.298,60	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	766.840.728	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	766.840.728,30	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	422.198.234	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	422.198.234,20	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	422.198.234	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	422.198.234,20	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	396.233.015	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	396.233.015,29	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.596.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.596.400,29	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.636.615	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.636.615,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.768.366.036	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.768.366.036,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	273.175.333	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	273.175.333,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	875.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	875.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit	20.190.703	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit	20.190.703,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	600.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ngaliyan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.768.376.546	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ngaliyan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.768.376.546,40	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	164.025.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	164.025.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	160.625.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	160.625.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan	100.00 persen	1.107.138.020	Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan	100.00 persen	1.107.138.020,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan			Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	240.063.706	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	240.063.706,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.021.080	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.021.080,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.151.235	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.151.235,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.837.718	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.837.718,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	91.349.926	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	91.349.926,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.880.511	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.880.511,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.248.900	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.248.900,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.965.305	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.965.305,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.520.122	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.520.122,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.525.119	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.525.119,00	
	Peningkatan Efektifitas	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	83.574.398	Peningkatan Efektifitas	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	83.574.398,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.497.213.526	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.497.213.526,40	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.497.213.526	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.497.213.526,40	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	61.029.037.416	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	61.029.037.415,80	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	16.377.582.492	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	16.377.582.491,80	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.976.790	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.976.790,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	3.587.615.422	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	3.587.615.421,80	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.054.519.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.054.519.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.113.950.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.113.950.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	927.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	927.500.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	930.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	930.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	999.300.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	999.300.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.208.350.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.208.350.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.864.247.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.864.247.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	906.980.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	906.980.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.097.824.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.097.824.000,00	
	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	917.181.000	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	917.181.000,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Prasarana Kelurahan					Prasarana Kelurahan					
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	682.266.862	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	682.266.862,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	139.638.920	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	139.638.920,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	102.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	102.500.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	69.465.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	69.465.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	83.700.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	83.700.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	66.736.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	66.736.000,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	177.329.186	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	177.329.186,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	143.719.900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	143.719.900,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	80.237.410	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	80.237.410,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	104.962.497	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	104.962.497,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	88.583.505	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	88.583.505,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	44.651.454.924	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	44.651.454.924,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.725.700	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.725.700,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.212.647.210	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.212.647.210,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.905.318.926	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalipancur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.905.318.926,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.783.084.793	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bambankerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.783.084.793,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.229.542.988	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.229.542.988,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.208.491.476	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.208.491.476,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.797.688.200	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakaji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.797.688.200,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.189.534.142	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.189.534.142,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.045.735.279	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Podorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.045.735.279,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.571.134.442	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.571.134.442,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.303.028.225	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.303.028.225,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang Diselenggarakan								
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.272.630	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.272.630,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	260.250.913	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	260.250.913,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngaliyan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	219.105.090	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngaliyan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	219.105.090,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	219.105.090	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	219.105.090,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	219.105.090	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	219.105.090,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	98 Persen	94.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan	98 Persen	94.650.000,00	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	94.650.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	94.650.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	94.650.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	94.650.000,00	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
FISIK				
	USULAN FASILITASI OPD TEKNIS			
1	Pengaspalan Jalan Beringin Raya (Jl. Letkol Suparno)	Jl. Beringin Raya (Mulia Foto sampai Kantor Kel Beringin)	4500 m²	
2	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	Wonosari	960 m²	
3	Normalisasi Saluran	Jl. Untung Suropati	500 m²	
4	Pembangunan Balai Kelurahan Beringin	Balai Kantor Kelurahan Beringin	1 unit	
5	Normalisasi Saluran Air	Sepanjang Jl. Letkol Suparno / Jl. Raya Bringin	500 m²	
6	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	Wonosari	300 m²	
7	Pembuatan Talud Tebing	Karang Nongko	720 m²	
8	Pembuatan Talud Sungai	Wonosari	960 m²	
9	Perbaikan Talud Sungai	Sungai Pelas	1 unit	
10	Perkuatan Talud Bronjong	Wonosari	376 m²	
11	Pembuatan talud sungai DAS Beringin	Wonosari	300 m²	
12	Pembangunan Jembatan	Wates	30 meter	
13	Pengaspalan jalan	JL. Candi Prambanan Raya	1000 m²	
14	Pembangunan Saluran Air Jl. Untung Suropati RT 04 RW 05	Jl. Untung Suropati	4500 m³	
15	Pembangunan Saluran Air Jl. Kolonel R. Warsito RW III	Jl. Kolonel R. Warsito	3000 m³	
16	Pembangunan Kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati No. 29	1 unit	
17	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Jl. Bukit Gondoriyo	300 meter	
18	Bronjong / Talud Sungai	Kelurahan Gondoriyo	1000 m²	
19	Betonisasi Jalan	Jalan Bukit Beringin Barat Raya	1000 m²	
	USULAN FASILITASI OPD TEKNIS KHUSUS DISPERKIM			
1	Pembangunan Talud dan Pembangunan Jembatan Sungai Sirendeng	Jalan Sirendeng (Masuk Jalan Permata Garden Ngaliyan /PGN)	1 buah	
2	Pembangunan Pondasi Talud	Jl . Kapri Raya RT.05 RW,10	255 m³	
3	Talud Tebing Perbatasan RW 13 dan RW 16	Perbatasan RW 13 dan RW 16 Kel. Bringin	250 m³	
4	Normalisasi Saluran	Gondoriyo - Palir	180 m²	
5	Pembangunan Talud Makam Kedung aji Tebing	Kampung beringin baru RT.10 RW. 08	428 m³	
6	Pengaspalan Jalan	Jl. Nakula	1 unit	
7	Pembangunan Talud Tebing	Bukit Beringin Selatan Blok F	70 m²	
8	Pengaspalan Jalan	Jl. Wismasari	1 unit	
9	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kalikangkung s/d Jludang dan Jl. Bukit Gondoriyo	36 unit	
10	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Gareng	1 unit	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
11	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan blok G	108 m²	
12	Talud Tebing Makam Tikung	Jl. Jend urip sumoharjo (jalan pantura)	80 m²	
	USULAN FASILITASI KECAMATAN NGALIYAN			
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kecamatan	Lingkungan Kecamatan	1 unit	
2	Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari Barat	200 m²	
3	Pembangunann Pengaman Tebing Sungai Sihingas RW.006	Perumahan Wahyu Utomo	75 m³	
4	Pembuatan Jalan Baru	Jalan Pertanian	800 m²	
5	Pembuatan Saluran Air	Jl. Banjarsari Bringin	120 m²	
6	Perbaikan talud dan saluran sungai	JL. Karonsih Timur Raya IV	1 unit	
7	Pembangunan Talud Jalan RW 01	Pucung	180 m³	
	USULAN FASILITASI KELURAHAN BRINGIN			
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Balai Kantor Kelurahan Bringin	1 unit	
2	Pembuatan Lereng atau Tebing	Bringin (sebelah selatan balai RT 007 RW 001	80 m³	
3	Saluran Air / Drainase	Jl. Pengilon	100 meter	
4	Perbaikan Saluran Air Sekitar Lapangan Olahraga	Jl. Perum Pandana Merdeka	13.5 meter	
5	Saluran Air	Jl. Perum Pandana Merdeka	30 meter	
6	Saluran Air	Bringin RW 4 RT 1	40 meter	
7	Perbaikan Saluran Air / Gorong-gorong	Bringin RW 5	300 m²	
8	Perbaikan Saluran	Jl. Perum Koveri Mega Raya (RT 07, 08, 09, dan RT 10)	24 m²	
9	Saluran Air	Jl. Darma Raya Bringin	500 meter	
10	Penyambungan talud Sungai yang sudah ada	Jl. Mega Permai	70 m²	
11	Pembangunan Drainase / Sudetan untuk Pembagi Aliran	Bringin (Samping Balai RW 15)	10 meter	
12	Pavingisasi	Bringin RW 16 RT 1	1050 m²	
	USULAN FASILITASI KELURAHAN KALIPANCUR			
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 unit	
2	Pembuatan saluran	Jln Candi Pawon Selatan XIII	422 m²	
3	Pavingisasi bahu jalan	Mayangsari	200 m³	
4	Pembuatan talud saluran	Jl. Penataran Selatan I	105 m²	
5	Pembangunan talud saluran	Jl. Candi Penataran Timur	100 m²	
6	Perbaikan saluran	Jl. Candi Prambanan Barat	182 meter	
7	Pembangunan balai RW	Jl. Candi Mas Selatan III	99 m²	
8	Perbaikan saluran	Jl. Candi Kencana	74 m²	
9	Perbaikan talud jalan	Jl. Candi Mutiara Raya	140 m³	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
10	Pembangunan saluran	Jl. Candi Prambanan IV	80 m²	
11	Pembangunan saluran	Jl. Candi Penataran Utara IV	100 meter	
12	Pavingisasi jalan	Jl. Candi Penataran Utara V	60 m²	
13	Pembangunan talud fasum	Jl Candi Kalasan Timur III	100 meter	
14	Rehab Pondasi Gorong-gorong dan tutup grill	Perbatasan Jl. Candi Tembaga Selatan II & Jl. C. Tembaga Selatan Dalam	100 m²	
15	Pembuatan saluran	Jl. Candi Tembaga Selatan No 707 s/d 726	120 m²	
USULAN FASILITASI KELURAHAN BAMBANKEREP				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	1 unit	
2	Pavingisasi Jalan Dk. Pucung RT 01 RW 01	Dk. Pucung Kelurahan Bambankerep	150 m²	
3	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 04 RW 01	Dk. Pucung Kelurahan Bambankerep	30 m³	
4	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 05 RW 01	Dk. Pucung	30 m³	
5	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 01,03 RW 02	Dk. Pucung	30 m³	
6	Pembangunan Saluran Air dengan Penutup Grill Dk. Pucung RT 02 RW 02	Dk. Pucung	30 m³	
7	Pembangunan Gazebo/ Pendopo Dk. Kalipancur RT 0, RW 3	Dk. Kalipancur	1 unit	
8	Pavingisasi jalan menuju makam Dk. Kalipancur RT 04 RW 3	Dk. Kalipancur	60 m²	
9	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 07 RW 04	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
10	Pembangunan Talud Bantaran Sungai Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 04	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
11	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
12	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
13	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 02 RW 05	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
14	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 05	Jl. Candi Sukuh	30 m³	
USULAN FASILITASI KELURAHAN NGALIYAN				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan Jl. Prof. Hamka	1 unit	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
2	Normalisasi gorong-gorong sepanjang lebih kurang 500 m	Jl. Prof. Hamka dari konter HP pertigaan Pasar Ngaliyan sampai Jembatan Ruko Segitiga Emas	5000 m^3	
3	Perbaikan gorong-gorong dan crossing jalan	Jl. Taman Wayang	10 m^2	
4	Pavingisasi	Utara Masjid Baitul Huda	200 m^2	
5	Pavingisasi	Klampisan	1 unit	
6	Pembuatan taman belakang pos RT 08	Antara RT 08 dan 09	100 meter	
7	Perbaikan saluran air	Jl. Taman Karonsih (samping rumah Pak Ridwan)	1 unit	
8	Pengaspalan jalan	Jl. Karonsih Selatan Gang 4 & 5	300 m^2	
9	Peremajaan jaringan pipa induk air bersih (mengganti pipa dari sumur taman RW RW 07 ke bak tandon)	Sumur taman RW 07 ke bak tandon	170 meter	
10	Perbaikan saluran air	Jl. Wismasari XII	1 unit	
11	Pembuatan saluran air	Kp. Desel	150 m^2	
12	Pembuatan talut	Jl. Jambu Raya	200 m^2	
13	Pembuatan talut sungai Balai RW 11	Gang Durian	1 unit	
14	Perbaikan saluran/selokan	Jl. Karonsih Baru III	150 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WATES				
1	Pavingisasi Jalan	Wates RW 2 RT 12	72 m^2	
2	Pavingisasi Jalan	Wates RW 3 RT 5	72 m^2	
3	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	1 unit	
4	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 4	148 m^2	
5	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 6	148 m^2	
6	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 7	115 m^2	
7	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 4, 5	115 m^2	
8	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 8, 9	122 m^2	
9	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 10	100 m^2	
10	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 3 RT 2	100 m^2	
11	Pembangunan Saluran Air	Sawah Tengah	81 m^2	
12	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 3 RT 10	91 m^2	
13	Pembangunan Saluran Air	Sendang Pedon	100 m^2	
14	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 5 RT 1	83 m^2	
USULAN FASILITASI KELURAHAN TAMBAKAJI				

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	150 meter	
2	Pembuatan Talud Saluran air	JL. Sunan Giri RT 002 RW 003	80 meter	
3	Rehabilitasi Saluran Air	JL. Margoyoso 6	150 meter	
4	Pembuatan Saluran air	JL. Nusa Indah II RT 003 RW 005	40 meter	
5	Pavingisasi jalan RT 01 RW 05	JL. Tanjung Sari RT 001 RW 005	180 meter	
6	Perbaikan Saluran Air	JL.Wahyu Asri	300 meter	
7	Renovasi Balai RW	Beringin Wetan	1 unit	
8	Talud Saluran Air	Tambakaji	30 m^2	
9	Saluran Air	Bongsari	22 m^3	
10	Saluran Air	Sendang Sari	44 m^2	
11	Pembuatan Talud Saluran Air	Perbatasan RT 001 DAN RT 004	135 meter	
12	Perbaikan Saluran Air	Griya Indo Permai Bawah RT 04 RW 15	90 meter	
13	Pembuatan Saluran Air	Bukit Berngin Asri Blok A	46 m^2	
14	Pembuatan Gapura Makam	Beringin Baru RT 010 RW 08	25 meter	
15	Pembuatan Saluran air	JL. Wahyu Asri RT 006 RW 006	250 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WONOSARI				
1	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Plumbon	70 meter	
2	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kemantren	70 meter	
3	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Dondong	70 meter	
4	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kuda	70 meter	
5	Pembangunan Balai RW	Jl. Kuda	1 unit	
6	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari	70 meter	
7	Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari Selatan	60 m^2	
8	Pavingisasi Jalan	Jl. Karangnongko	90 m^2	
9	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	1 unit	
10	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Rowosari 01	50 meter	
11	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Rowosari 02	70 meter	
12	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Gunungjati Selatan	70 meter	
13	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Plumbon Kidul	50 meter	
14	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kemantren Gg 2	70 meter	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
15	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari Barat	50 meter	
16	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari Timur	70 meter	
17	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Asri Barat	70 meter	
18	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Asri Raya	70 meter	
19	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Griya Beringin Asri	70 meter	
20	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Bukit Beringin Lestari	70 meter	
21	Pembangunan Rumpin RW	Jl. Bukit Beringin Utara	1 unit	
22	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Elok Raya	100 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PODOREJO				
1	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 1	800 m²	
2	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Kantor Kelurahan Podorejo	1 unit	
3	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 6	400 m²	
4	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 3	100 m²	
5	Pembangunan Balai	Podorejo RW 9	1 buah	
6	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 10	70 meter	
7	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 12	45 m²	
8	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 2 RT 3	500 m²	
9	Betonisasi Jalan	Podorejo RW 4	50 meter	
10	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 5	60 meter	
11	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 11	150 m²	
12	Betonisasi Jalan	Podorejo RW 7	100 m²	
13	Perbaikan Saluran	Podorejo RW 8	60 m²	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PURWOYOSO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	1 unit	
2	Pengaspalan Jalan RT 06 RW 02	Jl. Sriwidodo Utara Raya	750 meter	
3	Perbaikan Talud Sungai RT 01 RW 02	Jl. Sriwidodo Utara	90 meter	
4	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 04	Jl. Taman Srikaton	400 meter	
5	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 06	Jl. Srikaton Utara Raya	675 meter	
6	Perbaikan Talud Sungai RT 04 RW 06	Jl. Srtikaton Timur	79.5 meter	
7	Pavingisasi RT 01-02 RW 08	Jl. Raya Klampisan RT 01-02 RW 08	330 meter	
8	Pengaspalan Jalan RT 07 RW 10	Blok J RT 07 RW 10	810 meter	
9	Grill Saluran Got U RT 01 RW 12	Depan SMPN 18 Semarang	15.6 meter	
10	Talud Sungai RT 07 RW 12	Purwoyoso Selatan	39 meter	
11	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 14	Jl. Borobudur Barat II dan IV	810 meter	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
12	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 unit	
USULAN FASILITASI KELURAHAN GONDORIYO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	1 unit	
2	Pembangunan Pagar Makam	Jludang RW 2 RT 2	200 m^2	
3	Pembangunan Talud Jalan	Kalikangkung RW 1 RT 3	33 m^3	
4	Pavingisasi depan Balai RW 01	Kalikangkung RW 1	135 m^2	
5	Pavingisasi Jalan	Jludang RW 2 RT 1	140 m^2	
6	Talud Tebing	Salamkerep RW 3 RT 2	90 m^3	
7	Pembangunan Talud Jalan	Salamkerep RW 3 RT 1	55 m^3	
8	Pembangunan Talud Jalan	Karangjoho RW 4 R T 3	90 m^3	
9	Normalisasi Saluran	Jl. Gondoriyo-Palir	150 meter	
10	Pavingisasi Jalan	Pesona Bukit Gondoriyo	750 m^2	
11	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan Blok F	100 m^2	
12	Pengecoran Lapangan	Bukit Beringin Asri RW 6	600 m^2	
13	Perbaikan Saluran Air	Jalan Bukit Beringin Asri RW 7 RT 2	105 m^2	
14	Pembangunan Balai RT 05 RW 08	Griya Lestari RW 8 RT 5	1 buah	
15	Perbaikan Saluran Air	Griya Lestari RW 9 RT 8	0 m^2	
16	Perbaikan Gorong Gorong	Bukit Beringin Timur	100 m^2	
17	Perbaikan Saluran Air	Graha Beringin Mas	100 m^2	
18	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan blok G	49 m^2	
19	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Bukit Gondoriyo	300 meter	
NON FISIK				
USULAN FASILITASI KECAMATAN NGALIYAN				
1	Penguatan Forum Disabilitas	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Pencegahan Bullying	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
3	Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
4	Penguatan Forum Posyandu	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
5	Penguatan Kapasitas Pengurus Forum Anak	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
6	Penguatan Kapasitas Pengurus JPPA	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
7	Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
8	Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Seksual dan Tes Kesehatan Reproduksi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
9	Pelatihan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman untuk Anak Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
10	Sosialisasi Pencegahan Rawan Stunting dan Ibu KEK	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
11	Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
12	Pelatihan Pengolahan Menu Bergizi Non-Beras	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
13	Pelatihan Sales Marketing UMKM berbasis teknologi informasi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
14	Dewan Masjid Indonesia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	6 Kegiatan	
15	Batqo LPQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
16	Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
17	MTQ Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
18	LPTQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
19	PORWAKOS	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
20	Lomba Kesenian dan Olahraga Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
21	Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
22	Karnaval Dugderan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
23	Rembuk Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
24	Musrenbang Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
25	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	8 Kegiatan	
26	Pos Paud	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
27	UMKM Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
28	Updating Data Penyandang Masalah Sosial	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	2 Kegiatan	
29	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
30	Lomba Senam Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
31	Semarang Night Carnival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
32	Semarang Flower Festival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	1 Kegiatan	
33	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang	2 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN BRINGIN				
1	Turnamen Olahraga Volly Putra	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
2	Sosialisasi Pola Asuh Moral dan Adab Anak Terkait Bullying dan Sex Educator	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
3	Pelatihan Menghadapi Bencana	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
4	Pelatihan Ketrampilan Pembuatan APE	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
5	Sosialisasi dan Pelatihan OSS	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Kredit Wibawa	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
7	Sosialisasi tentang Parenting untuk Ibu-Ibu	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
8	Pembentukan Karakter untuk Kader PKK	Balai Kelurahan Bringin	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN KALIPANCUR				
1	Pelatihan Calon Kader Remaja untuk persiapan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Remaja melalui Posyandu Remaja	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
2	Pelatihan Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
3	Musyawarah Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
4	Pembinaan Mental dari Psikolog bagi Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
5	Pelatihan Ketrampilan Personal Grooming (Merawat Diri) dan Etika untuk Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
6	masih ada masalah stunting dan masih banyak anak yang kecanduan HP	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
7	Pelatihan peningkatan pengembangan perempuan dan anak dalam bidang ketrampilan untuk menumbuhkan potensi diri	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pembuatan Kudapan Non Beras Non Gandum	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
9	Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
10	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Wanita dan Remaja	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	1 Kegiatan	
11	Senam Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291	0 buah	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
USULAN FASILITASI KELURAHAN BAMBANKEREP				
1	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Napza Pada Anak Dan Remaja	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
2	Pelatihan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor Dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Gemar Membaca & Penggunaan Gadget Dengan Baik	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah Limbah Rumah Tangga	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
5	Sosialisasi Gemar Makan Ikan Bagi Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
6	Musyawarah Perempuan Dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Peran Ibu Dalam Mendidik Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pembuatan Pupuk Poc/ Pupuk Organik	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
9	Sosialisasi Kesehatan Lingkungan	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
10	Kesadaran Bersosialisasi Di Lingkungan	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
11	Seminar Peran Wanita Dalam Keluarga Disabilitas	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
12	Pelatihan Urban Farming	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
13	Senam Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	0 buah	
14	Sosialisasi Dampak Buruk Pergaulan Bebas	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN NGALIYAN				
1	-	Lingkungan Kelurahan Jl. Prof. DR. Hamka	1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Tentang Kesehatan Alat Reproduksi agar Hidup Sehat	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Tentang Bahaya Pergaulan Bebas	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
4	Sosialisasi Pengelolaan Pilah Sampah	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
5	Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Ketahanan Pangan Pada Keluarga	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Rokok	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
7	Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
8	Pembinaan Forum Anak	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
9	Pelatihan Membuat Menu Puding Roti Pisang Kurma Untuk Stunting	Kelurahan Ngaliyan	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WATES				
1	Edukasi Gemar Menanam Pada Anak	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
2	Musrenbang Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
3	Pembinaan Lingkungan Ramah Anak	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
4	Workshop Make Up Class	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
5	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Skala Rumah Tangga	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
6	Pelatihan Public Speaking	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan KDRT	Balai Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
8	Lomba Volly Putri	Kelurahan Wates	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN TAMBAKAJI				
1	Pelatihan Konselor Sebaya Forum Anak	Lingkungan Kelurahan (Balai Kelurahan)	1 Kegiatan	
2	Penguatan Forum Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
4	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
5	Musrenbang Perempuan Dan Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
6	Penguatan Krppa (Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak) Dan Jppa (Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak)	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Keamanan Pangan	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
8	Lomba Simulasi Paar Dan Administrasi Pokja I	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
9	Lomba Administrasi Dasawisma	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WONOSARI				
1	-	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
2	Pelatihan Pilah Sampah	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
3	Sosialisasi Pemenuhan Gizi Seimbang dan Menu Stunting	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
4	Pelatihan Membuat Hantaran	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
5	Pelatihan Membuat Garnish dan Table Manner	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Membuat Video Content Creator dan IT	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Pencegahan KDRT	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
9	Pendampingan Konseling Pra Nikah	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PODOREJO				
1	Pembibitan Penanaman Dan Perawatan Tanaman	Podorejo	0 buah	
2	Lomba Adzan Tingkat Sekolah Dasar	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Penguatan Menikah dini Anak di Bawah Umur	Podorejo	0 buah	
4	Pelatihan Pembuatan Menu Stunting	Podorejo	0 buah	
5	Pelatihan Olahan Makanan dari Non Beras	Podorejo	0 buah	
6	Sosialisasi Pencegahan KDRT Perempuan dan Anak, serta Keberanian dalam pelaporan	Podorejo	0 buah	
7	Sosialisasi Pencegahan Bullying di Lingkungan Remaja	Podorejo	0 buah	
8	Penyuluhan Mengenai Kesehatan Mental dan Pola Hidup Sehat	Podorejo	0 buah	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PURWOYOSO				
1	-	Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	
2	Musrenbang Perempuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
3	Pembinaan UMKM	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
4	Pembinaan JPPA	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
5	Pembinaan Kampung KB	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
6	Pembinaan Rumah Dataku	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
7	Sosilaisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Permpuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
8	Sosialisasi Partisipasi Laki-laki Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104	1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN GONDORIYO				
1	Rembug Perempuan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	
2	Festival Seni dan Budaya untuk Anak Remaja dan Lomba Mewarnai untuk 5 Pos Paud	Balai Kelurahan Gondoriyo	2 Kegiatan	
3	Sosialisasi Kesadaran Tempat Ibadah ramah perempuan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 buah	
4	Pelatihan Sulam Pita	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	
5	Lomba KWT antar RW	Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	
6	Pelatihan Antropometri	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	
7	Pelatihan Membatik	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	
8	Pelatihan Memasak Pemanfaatan Produk Lokal	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih

Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamtaan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum di kecamatan dan kelurahan;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Presentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
2. Presentase lembaga kemasyarakatan aktif;
3. Presentase peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Presentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kecamatan dan kelurahan;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Presentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88.00
	Presentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kecamatan dan kelurahan	Persen	98.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2025

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan
				Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan
7.01.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec.

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan
7.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan
7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan
7.01.02.2.01.0001			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.0002			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan
7.01.02.2.02.0003			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan
7.01.03.2.03.0001			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
7.01.03.2.03.0002			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.03.2.03.0004			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan
7.01.04.2.01.0001			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan
7.01.05.2.01.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Indeks Pelayanan Publik”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.545.743.316,00	21.297.163.634,00	21.691.003.724,39	PAD	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	6.00 dokumen	6.00 dokumen	6.00 dokumen	66.368.200,00	66.368.200,00	28.605.400,00	PAD	
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	57.168.600,00	57.168.600,00	24.474.100,00	PAD	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.060.400,00	2.060.400,00	525.000,00	PAD	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.900,00	1.775.900,00	525.000,00	PAD	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.400,00	1.001.400,00	111.400,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.900,00	1.250.900,00	418.900,00	PAD	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.198.600,00	2.198.600,00	1.861.400,00	PAD	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	912.400,00	912.400,00	689.600,00	PAD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec.	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	17.552.096.800,00	17.303.517.118,00	17.886.678.101,00	PAD	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ bulan	101 Orang/ bulan	101 Orang/ bulan	16.936.271.000,00	16.687.691.318,00	16.695.014.951,00	PAD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	613.356.000,00	613.356.000,00	1.191.328.950,00	PAD	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673.400,00	673.400,00	111.400,00	PAD	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.460.200,00	1.460.200,00	111.400,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200,00	336.200,00	111.400,00	PAD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.411.770.764,00	1.411.770.764,00	1.188.922.937,90	PAD	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.697.967,00	19.697.967,00	19.697.967,00	PAD	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4 Paket	421.410.000,00	421.410.000,00	268.027.520,00	PAD	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	23.299.095,00	23.299.095,00	20.455.487,20	PAD	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	15.979.135,00	15.979.135,00	5.092.936,80	PAD	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	19.720.000,00	19.720.000,00	3.610.000,00	PAD	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.920.000,00	109.920.000,00	105.198.298,60	PAD	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	801.744.567,00	801.744.567,00	766.840.728,30	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	470.689.972,00	470.689.972,00	422.198.234,20	PAD	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	5 Unit	470.689.972,00	470.689.972,00	422.198.234,20	PAD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	366.326.905,00	366.326.905,00	396.233.015,29	PAD	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	206.729.917,00	206.729.917,00	214.596.400,29	PAD	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	159.596.988,00	159.596.988,00	181.636.615,00	PAD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.678.490.675,00	1.678.490.675,00	1.768.366.036,00	PAD	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	283.299.972,00	283.299.972,00	273.175.333,00	PAD	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	5 Unit	775.000.000,00	775.000.000,00	875.000.000,00	PAD	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.190.703,00	20.190.703,00	20.190.703,00	PAD	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	4 Unit	4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	94 Persen	2.786.382.820,00	3.964.962.502,00	2.768.376.546,40	PAD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	376.790.080,00	376.790.080,00	164.025.000,00	PAD	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.303.350,00	4.303.350,00	3.400.000,00	PAD	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	372.486.730,00	372.486.730,00	160.625.000,00	PAD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	378.269.090,00	1.308.269.090,00	1.107.138.020,00	PAD	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	378.269.090,00	378.269.090,00	240.063.706,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	89.021.080,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	85.151.235,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	89.837.718,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	91.349.926,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	84.880.511,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	84.248.900,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	89.965.305,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	81.520.122,00	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	87.525.119,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	83.574.398,00	PAD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	2.031.323.650,00	2.279.903.332,00	1.497.213.526,40	PAD	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.031.323.650,00	2.279.903.332,00	1.497.213.526,40	PAD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.184.022.050,00	33.818.554.050,00	61.029.037.415,80	PAD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	232.00 kegiatan	232.00 kegiatan	3.869.906.040,00	16.054.438.040,00	16.377.582.491,80	PAD	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040,00	49.906.040,00	30.976.790,00	PAD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	30 Unit	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	3.587.615.421,80	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.037.800.000,00	1.037.800.000,00	1.054.519.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.113.950.000,00	1.113.950.000,00	1.113.950.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	927.500.000,00	927.500.000,00	927.500.000,00	PAD dan DAU	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	910.000.000,00	910.000.000,00	930.000.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	999.300.000,00	999.300.000,00	999.300.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.208.350.000,00	1.208.350.000,00	1.208.350.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1.864.247.000,00	1.864.247.000,00	1.864.247.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	906.980.000,00	906.980.000,00	906.980.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.097.824.000,00	1.097.824.000,00	1.097.824.000,00	PAD dan DAU	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	19 Unit	917.181.000,00	917.181.000,00	917.181.000,00	PAD dan DAU	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	895.000.000,00	895.000.000,00	682.266.862,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	150.800.000,00	139.638.920,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	117.200.000,00	102.500.000,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	83.600.000,00	69.465.000,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.400.000,00	83.700.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	79.400.000,00	66.736.000,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	184.400.000,00	177.329.186,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	163.400.000,00	143.719.900,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.400.000,00	80.237.410,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	121.400.000,00	104.962.497,00	PAD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.400.000,00	88.583.505,00	PAD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	314.116.010,00	17.764.116.010,00	44.651.454.924,00	PAD	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	127.000.000,00	127.000.000,00	126.725.700,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.875.400.000,00	2.774.600.000,00	7.212.647.210,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.342.600.000,00	2.275.400.000,00	5.905.318.926,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	764.600.000,00	731.000.000,00	1.783.084.793,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	1.748.600.000,00	1.698.200.000,00	4.229.542.988,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	947.600.000,00	918.200.000,00	2.208.491.476,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.394.200.000,00	2.259.800.000,00	5.797.688.200,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.513.600.000,00	2.400.200.000,00	6.189.534.142,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	1.296.200.000,00	1.245.800.000,00	3.045.735.279,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	1.878.800.000,00	1.807.400.000,00	4.571.134.442,00	PAD	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	1.389.800.000,00	1.339.400.000,00	3.303.028.225,00	PAD	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	48.019.910,00	48.019.910,00	18.272.630,00	PAD	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	139.096.100,00	139.096.100,00	260.250.913,00	PAD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	176.082.830,00	176.082.830,00	219.105.090,00	PAD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	28.00 Angka	28.00 Angka	176.082.830,00	176.082.830,00	219.105.090,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	176.082.830,00	176.082.830,00	219.105.090,00	PAD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	98 Persen	81.100.000,00	81.100.000,00	94.650.000,00	PAD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	81.100.000,00	81.100.000,00	94.650.000,00	PAD	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	60 Orang	81.100.000,00	81.100.000,00	94.650.000,00	PAD	
JUMLAH						116.884.525.048,00	178.013.589.048,00	257.406.518.329,77		

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

50. KECAMATAN GAYAMSARI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

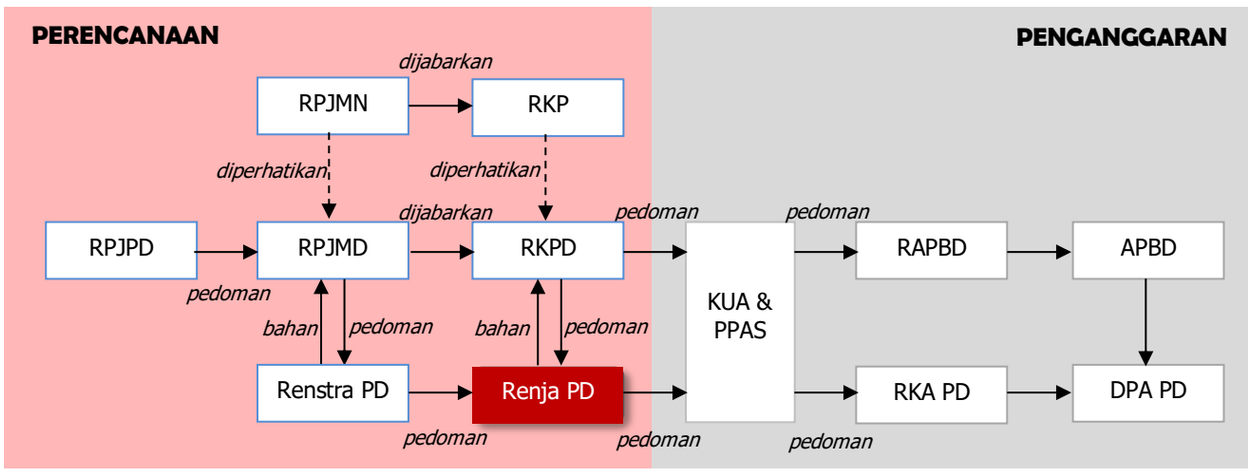

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gayamsari sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gayamsari

Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan RKPD 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 dokumen	60 %	3 dokumen	60 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	50 %
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	1 Dokumen	50 %
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	100 %
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokume	2 dokumen	66 %	2 dokumen	66 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	78 orang/bulan	78 orang/bulan	78 orang/bulan	100 %	78 orang/bulan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	50 %
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50 %	1 Laporan	50 %
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	10 paket	50 %	10 paket	50 %
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	8 paket	80 %	8 paket	80 %
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 paket	100 paket	100 paket	50 paket	50 %	50 paket	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	4 paket	66 %	4 paket	66 %
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan	100 laporan	100 laporan	0	0	0	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	5 laporan	50 %	5 laporan	50 %
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	60 %	6 dokumen	60 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	33 %	33 %	33 %	33%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	33 %	1 unit	33 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 laporan	66 %	2 laporan	66 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100 %	11 Unit	100 %
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	66 %	2 unit	66 %
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	66 %	2 unit	66 %
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	66 %	2 unit	66 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 %	99.91 %	94 %	99.69 %	106 %	99.69 %	106 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	4 angka	50 %	4 angka	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	Jumlah laporan koordinasi/sinergiperencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	0	0	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	50 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan gayamsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan pandean lamper)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan sambirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan siwalan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan sawah besar)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan kaligawe)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan tambakrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	40 angka	50 %	40 angka	50 %
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	100 %	5 lembaga kemasyarakatan	100 %
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	8 unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (kelurahan pandean lamper)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (kelurahan gayamsari)	14 Unit	14 Unit	9 Unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (keluarahan siwalan)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan sawah besar)	10 Unit	10 Unit	12 unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (kelurahan kaligawe)	14 Unit	14 Unit	10 unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (kelurahan sambirejo)	10 Unit	10 Unit	11 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan pandean lamper)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan gayamsari)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (keluarahan siwalan)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan sawah besar)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan kaligawe)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan sambirejo)	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 angka	384 angka	50 %	384 angka	50 %
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Tambakrejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Kaligawe)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Sawah Besar)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Siwalan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Sambirejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Kelurahan Gayamsari)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan kapasitas lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	7 Lembaga Kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	28,5 %	2 lembaga kemasyarakatan	28,5 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	4 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	1 angka	1 angka	1 angka	0	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 %	20 %	25 %	10 %	40 %	10 %	40 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 angka	20 angka	20 angka	10 angka	50 %	10 angka	50 %
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 %	95 %	98 %	0	0	0	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	6 kegiatan	6 kegiatan	0	6 kegiatan	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
UNSUR KEWILAYAHAN									
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	50 orang	0	80 orang	0	0	0

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel 2. 2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dapat dilihat realisasi kinerja Sampai pada triwulan II Tahun 2025 terdapat sub kegiatan yang telah tercapai (100%) antara lain :

a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
e) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
g) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
h) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
i) Penyelenggaraan lembaga kemsayarakatan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut karena adanya komitmen Bersama antara pimpinan dan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan target yang sudah ditetapkan. Adanya monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci dalam keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada Tahun 2025 terdapat sub kegiatan baru yang belum ada pada Rencana Strategis Kecamatan Gayamsari Tahun 2025 yaitu sub kegiatan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait dan sub kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Sub kegiatan tersebut merupakan Amanah dengan tujuan dapat mendukung program nasional penurunan angka stunting di wilayah kecamtan masing-masing melalui program dan kegiatan yang sudah disusun untuk melakukan edukasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap balita stunting yang ada.

Untuk sub kegiatan yang belum dilaksanaka sampai dengan triwulan II yaitu sub kegiatan Pembangunan saranan dan prasarana di kecamatan dan kelurahan dan kegiatan fasilitasi , koordinasi dan pembinaan (BIimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Belum terlaksananya kegiatan tersebut bukan dikarenakan efisiensi anggaran namun dikarenakan jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3. Untuk efisiensi anggaran yang dilaksanakan pada kecamatan gayamsari dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden no 1 tahun 2025 tidak ada sub kegiatan yang terhambat dalam pencapaian indicator kinerja hanya dikurangi dalam proporsi anggaran namun tidak menjadi halangan dalam pencapaian indicator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

a) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
b) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd
d) Penyusunan pelporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
e) Penyediaan bahan logistik
f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD
g) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
h) Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

i) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan
j) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan tambakrejo)
k) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan kaligawe)
l) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sawah besar)
m) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan siwalan)
n) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sambirejo)
o) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan pandean lamper)
p) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan gayamsari)
q) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
r) Peningkatan partisipasi masyrakat dalam forum musyawarah perancanaan pembangunan di kelurahan
s) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan
t) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan tambakrejo)
u) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan kaligawe)
v) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan sawah besar)
w) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan sambirejo)
x) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan siwalan)
y) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan pandean lamper)
z) Pemberdayaan masyrakat di kelurahan (kelurahan gayamsari)
aa) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan
bb) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan tambakrejo)
cc) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan kaligawe)
dd) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan sawah besar)
ee) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan siwalan)
ff) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan sambirejo)
gg) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan pandean lamper)
hh) Penyelnggaraan lembaga kemsyarakatan (kelurahan gayamsari)
ii) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
jj) Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
kk) Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Gayamsari
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

NO. REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.064.398.127	6.803.712.795	48,38
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.272.100	5.056.840	7,99
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.015.800	455.000	0,87
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.867.200	0	-
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.736.600	410.000	14,98
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.277.100	2.160.000	94,86
7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.994.200	410.000	20,56
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.235.400	479.040	38,78
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.145.800	1.142.800	99,74
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.836.470.400	6.400.960.017	49,87
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.460.863.000	6.231.540.017	50,01
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	374.372.000	169.310.000	45,23
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	449.600	0	-
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	448.600	110.000	24,52
7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	337.200	0	-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.782.575	245.563.734	44,67
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.345.090	6.636.610	53,76
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.824.574	104.283.574	51,93
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.479.685	6.462.000	36,97
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.294.910	3.363.150	78,31
7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	1.050.000	14,00
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80.770.000	28.375.000	35,13
7 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	226.568.316	95.393.400	42,10
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.179.996	33.200.000	71,89
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.179.996	33.200.000	71,89
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.148.966	72.002.262	33,94
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.748.500	54.317.262	36,03
7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.400.466	17.685.000	28,80
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.544.090	46.929.942	13,16
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.779.000	36.513.942	38,53

NO. REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7 01 01 2.09 0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.500.000	0	-
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.265.090	10.416.000	42,93
7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	0	-
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.446.971.424	1.187.588.955	48,53
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.975.000	105.300.000	94,89
7 01 02 2.01 0001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	0	-
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.275.000	105.300.000	97,25
7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.440.706.884	715.325.230	49,65
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	868.371.544	475.470.470	54,75
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan gayamsari)	81.112.390	35.840.229	44,19
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan pandean lamper)	80.689.000	35.281.789	43,73
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan sambirejo)	76.393.880	32.121.732	42,05
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan siwalan)	79.620.490	32.012.826	40,21
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan sawah besar)	87.491.110	28.813.776	32,93
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan kaligawe)	82.959.190	37.178.844	44,82
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan tambakrejo)	84.069.280	38.605.564	45,92
7 01 02 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	895.289.540	366.963.725	40,99
01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	895.289.540	366.963.725	40,99
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.683.819.445	4.900.630.400	26,23
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.841.121.168	617.651.200	6,28
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.310.810	25.725.000	65,44
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.289.408.648	36.293.800	2,81
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan tambakrejo)	1.291.000.000	34.703.000	2,69
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan kaligawe)	1.218.000.000	15.380.000	1,26

NO. REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan sawah besar)	950.000.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan siwalan)	964.000.000	8.909.000	0,92
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (keluarahan sambierjo)	1.169.000.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan pandean lamper)	950.000.000	8.757.900	0,92
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan gayamsari)	950.000.000	68.359.000	7,20
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	446.912.480	195.802.000	43,81
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	81.650.000	43.800.000	53,64
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KALIGAWE)	86.600.000	35.499.000	40,99
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	86.150.000	22.950.000	26,64
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SIWALAN)	56.200.630	27.367.500	48,70
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIREJO)	83.600.000	28.980.000	34,67
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	94.138.600	35.475.000	37,68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GAYAMSARI)	85.150.000	29.650.000	34,82
7 01 03 2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	8.842.698.277	4.282.979.200	48,44
7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kecamatan gayamsari)	119.735.180	42.907.500	35,84
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan(kelurahan tambakrejo)	1.081.741.370	530.934.400	49,08
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan kaligawe)	1.456.184.950	716.797.000	49,22
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan sawah besar)	1.104.305.000	544.565.000	49,31
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan siwalan)	753.212.120	374.101.800	49,67
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan sambirejo)	1.051.185.540	510.691.500	48,58
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan pandean lamper)	1.928.900.000	936.100.000	48,53
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan gayamsari)	1.305.483.440	619.215.000	47,43
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	6.657.000	58,18
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.508.526	1.010.000	3,31
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.549.850	100.880.000	71,27
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	141.549.850	100.880.000	71,27
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	141.549.850	100.880.000	71,27
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.000.000	33.000.000	45,83
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.000.000	33.000.000	45,83
7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72.000.000	33.000.000	45,83

NO. REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
JUMLAH		35.408.738.846	13.025.812.150	36,79

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dengan anggaran pada Pergesran II APBD Tahun 2025 yang disahkan pada tanggal 25 april 2025 adalah 35.408.738.846 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar 13.025.812.150 atau 36,79 %. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 22.382.926.696. Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan utamanya kegiatan fisik dan non fisik hasil musrenbang tahun 2025 yang rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2025.

Sedangkamn untuk target pendapatan pada tahun 2025 yaitu 34.625.000 dan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu sebesar 21.235.000 atau 61 %. Upaya peningkatan retribusi akan terus dilakukan oleh kecamatan gayamsari melalui berbagai hal antara lain sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan dan asset-aset yang potensial namun belum dilakukan penarikan retribusi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Gayamsari.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Tujuan														
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdaya	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Gayamsari	88	89	92	93	94	95	88	92,30	94,92	99.55	99.69	95	99.55

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
an masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemnfatan teknologi i formasi														
sasaran														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	90	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	95	97	98	99	100	100	-	71	98	100	50	100	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	-	40	85,04	86,72	40	90,08	88,40-
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	87	90	92	95	98	100		-	60	92	0	100	98

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan gayamsari tahun 2025 sampai dengan triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan gayamsari”.
   Pada Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 99.69 % dari target sebesar 94 % (capaian 106 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator “Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN X 100 %
      Jumlah pelayanan yang diberikan
   2) Meningkatnya pasrtisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 2, realisasi indikator ini adalah sebesar 50 % dari target sebesar 100 % (capaian 50 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan X 100 %
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya
   3) Meningkatnya Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki dua indikator yaitu:
      a. “Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 2, realisasi indikator tersebut adalah sebesar 40 % dari target sebesar 88,40 % (capaian 45 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

      Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.

      b. Dalam indikator sasaran ini akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2025 untuk itu capaian “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan” realisasi indikator tersebut sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 adalah sebesar 0 % dari target sebesar 98 % (capaian 0 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

      Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional X 100 %
      Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan

juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
c. Pengefektifan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan gayamsari
e. Pencegahan dan penanggulangan banir di wilayah kecamatan gayamsari
f. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan gayamsari

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   Hal ini antara lain disebabkan Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP , Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan , Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Belum optimalnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
   Hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.
3. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   Hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal,

Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.
Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPINCAM dan OPD teknis.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan gayamsari Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
   2) Wilayah Kecamatan Gayamsari merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
   3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi.

b. Peluang
   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai.
   3) Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang
   4) Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan

sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

5) Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan gayamsari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini telah mengakomodir kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2025-2030 yang tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 Triwulan I serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan;
- Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
- Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
- Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
- Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
- Prioritas 6. Peningkatan berkelanjutan; pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
- Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

Wilayah	LPE	IPM	KEMISKINAN	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Nasional	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Selanjutnya disajikan sandingan antara sasaran prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, serta sandingan prioritas daerah dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota di tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan, visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2030.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100 %	14.153.631.121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100 %	14.153.631.121	
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 %				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	64.005.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	64.005.900	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.015.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.015.800	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.978.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.978.600	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.736.600	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.736.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.899.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.899.500	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.994.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.994.200	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.235.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.235.400	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.145.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.145.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	12.859.751.420	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	12.859.751.420	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.024.974.235	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.024.974.235	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	833.541.785	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	833.541.785	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	449.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	449.600	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	448.600	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	570.496.028	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	570.496.028	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12.345.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12.345.090	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.402.964	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.402.964	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	17.479.685	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	17.479.685	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	4.294.910	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	4.294.910	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	70.830.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	70.830.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	250.143.378	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	250.143.378	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	302.201.496	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	302.201.496	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	302.201.496	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	302.201.496	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	200.406.386	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	200.406.386	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.299.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.299.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.107.386	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.107.386	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	337.240.090	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	337.240.090	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	110.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	110.475.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.500.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.265.090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.265.090	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam	94 Persen	2.568.378.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam	94 Persen	2.568.378.740	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Angka	123.865.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Angka	123.865.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	2.700.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	2.700.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	118.275.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	118.275.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.123.348.721	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.123.348.721	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	604.291.936	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	604.291.936	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.732.390		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.732.390	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.689.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.689.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.509.053		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.509.053	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65.606.762		Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65.606.762	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.491.110		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.491.110	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	82.959.190		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	82.959.190	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.069.280		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.069.280	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	563.143.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	563.143.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	563.143.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	563.143.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	31.973.958.306	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	31.973.958.306	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.950.106.945	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.950.106.945	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	26.038.090	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	26.038.090	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.453.358.648	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.453.358.648	
		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.291.000.000		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.291.000.000	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.218.000.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.218.000.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	964.000.000		Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	964.000.000	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.169.000.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.169.000.000	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	391.486.977	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	391.486.977	
		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	95.384.000		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	95.384.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	86.600.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	86.600.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	86.150.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	86.150.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	56.200.630		Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	56.200.630	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	83.600.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	83.600.000	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	94.138.600		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	94.138.600	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	85.150.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	85.150.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga	768 Angka	22.023.851.361	Pemberdayaan Lembaga	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	22.023.851.361	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		kemasyarakatan yang seharusnya			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	119.735.180	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	119.735.180	
		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.666.791.370		Kelurahn Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.666.791.370	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.694.954.950		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.694.954.950	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.696.085.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.696.085.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.854.532.120		Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.854.532.120	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.579.975.540		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.579.975.540	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.968.770.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.968.770.000	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.284.353.440		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.284.353.440	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	147.211.610	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	147.211.610	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	129.749.850	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	129.749.850	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16 Angka	129.749.850	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16 Angka	129.749.850	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	129.749.850	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	129.749.850	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	72.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	72.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	6 Kegiatan	72.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	6 Kegiatan	72.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penugasan Kepala Daerah		Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			Penugasan Kepala Daerah		Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	72.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	72.000.000	

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN".
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase lembaga kemasyarakatan aktif".
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan gayamsari	Angka	94

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	Persen	100
SASARAN 2 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Persen	100
SASARAN 3 : Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	88.40
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	Persen	98

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gayamsari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari" dan indikator sasaran:
   a. Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN
   b. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
   c. Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	14.153.631.121	14.153.631.121	14.333.367.519	14.153.631.121	14.153.631.121	14.333.367.519	PAD	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)								
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	64.005.900	64.005.900	64.005.900	64.005.900	64.005.900	64.005.900	PAD	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.015.800	52.015.800	52.015.800	52.015.800	52.015.800	52.015.800	PAD	
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.978.600	1.978.600	1.978.600	1.978.600	1.978.600	1.978.600	PAD	
7.01.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.736.600	2.736.600	2.736.600	2.736.600	2.736.600	2.736.600	PAD	
7.01.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.899.500	2.899.500	2.899.500	2.899.500	2.899.500	2.899.500	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.994.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200	PAD	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.235.400	1.235.400	1.235.400	1.235.400	1.235.400	1.235.400	PAD	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800	PAD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	12.836.693.200	12.836.693.200	12.859.751.420	12.836.693.200	12.836.693.200	12.859.751.420	PAD	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.460.863.000	12.460.863.000	12.024.974.235	12.460.863.000	12.460.863.000	12.024.974.235	PAD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	374.372.000	374.372.000	833.541.785	374.372.000	374.372.000	833.541.785	PAD	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561.000	561.000	449.600	561.000	561.000	449.600	PAD	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	448.600	337.200	448.600	448.600	337.200	PAD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	621.243.382	621.243.382	570.496.028	621.243.382	621.243.382	570.496.028	PAD	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.345.090	12.345.090	12.345.090	12.345.090	12.345.090	12.345.090	PAD	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200.824.574	200.824.574	210.402.964	200.824.574	200.824.574	210.402.964	PAD	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29.688.320	29.688.320	17.479.685	29.688.320	29.688.320	17.479.685	PAD	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14.118.101	14.118.101	4.294.910	14.118.101	14.118.101	4.294.910	PAD	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	PAD	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.198.981	130.198.981	70.830.000	130.198.981	130.198.981	70.830.000	PAD	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	226.568.316	226.568.316	250.143.378	226.568.316	226.568.316	250.143.378	PAD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	47.179.996	47.179.996	302.201.496	47.179.996	47.179.996	302.201.496	PAD	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47.179.996	47.179.996	302.201.496	47.179.996	47.179.996	302.201.496	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	212.148.966	212.148.966	200.406.386	212.148.966	212.148.966	200.406.386	PAD	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150.748.500	150.748.500	154.299.000	150.748.500	150.748.500	154.299.000	PAD	
7.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61.400.466	61.400.466	46.107.386	61.400.466	61.400.466	46.107.386	PAD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	373.359.677	373.359.677	337.240.090	373.359.677	373.359.677	337.240.090	PAD	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	111.594.587	111.594.587	110.475.000	111.594.587	111.594.587	110.475.000	PAD	
7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	142.500.000	142.500.000	117.500.000	142.500.000	142.500.000	117.500.000	PAD	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.265.090	24.265.090	24.265.090	24.265.090	24.265.090	24.265.090	PAD	
7.01.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95.000.000	95.000.000	85.000.000	95.000.000	95.000.000	85.000.000	PAD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	2.568.378.740	2.568.378.740	2.568.378.740	2.568.378.740	2.568.378.740	2.568.378.740	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	123.865.000	123.865.000	123.865.000	123.865.000	123.865.000	123.865.000	PAD	
7.01.02.2.01 .0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	PAD	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.165.000	121.165.000	118.275.000	121.165.000	121.165.000	118.275.000	PAD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.547.974.200	1.547.974.200	1.123.348.721	1.547.974.200	1.547.974.200	1.123.348.721	PAD	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	951.974.200	951.974.200	604.291.936	951.974.200	951.974.200	604.291.936	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	83.000.000	75.732.390	83.000.000	83.000.000	75.732.390	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	83.000.000	80.689.000	83.000.000	83.000.000	80.689.000	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	83.000.000	83.000.000	66.509.053	83.000.000	83.000.000	66.509.053	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	83.000.000	65.606.762	83.000.000	83.000.000	65.606.762	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	88.000.000	63.491.110	88.000.000	88.000.000	63.491.110	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	88.000.000	82.959.190	88.000.000	88.000.000	82.959.190	PAD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	88.000.000	84.069.280	88.000.000	88.000.000	84.069.280	PAD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	896.539.540	896.539.540	563.143.900	896.539.540	896.539.540	563.143.900	PAD	
7.01.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	896.539.540	896.539.540	563.143.900	896.539.540	896.539.540	563.143.900	PAD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	18.847.102.469	18.847.102.469	31.973.958.306	18.847.102.469	18.847.102.469	31.973.958.306	PAD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.948.060.318	9.948.060.318	9.950.106.945	9.948.060.318	9.948.060.318	9.950.106.945	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.310.810	40.310.810	26.038.090	40.310.810	40.310.810	26.038.090	PAD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.289.408.648	1.289.408.648	1.453.358.648	1.289.408.648	1.289.408.648	1.453.358.648	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	964.000.000	964.000.000	964.000.000	964.000.000	964.000.000	964.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.169.000.000	1.169.000.000	1.169.000.000	1.169.000.000	1.169.000.000	1.169.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PAD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PAD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	503.340.860	503.340.860	391.486.977	503.340.860	503.340.860	391.486.977	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang	87.800.000	87.800.000	95.384.000	87.800.000	87.800.000	95.384.000	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.000.000	92.000.000	86.600.000	92.000.000	92.000.000	86.600.000	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.000.000	92.000.000	86.150.000	92.000.000	92.000.000	86.150.000	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.800.000	66.800.000	56.200.630	66.800.000	66.800.000	56.200.630	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.800.000	87.800.000	83.600.000	87.800.000	87.800.000	83.600.000	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.400.000	100.400.000	94.138.600	100.400.000	100.400.000	94.138.600	PAD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.200.000	96.200.000	85.150.000	96.200.000	96.200.000	85.150.000	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9.172.042.151	9.172.042.151	22.023.851.361	9.172.042.151	9.172.042.151	22.023.851.361	PAD	
7.01.03.2.03 .0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	127.000.000	127.000.000	119.735.180	127.000.000	127.000.000	119.735.180	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.127.600.000	1.127.600.000	2.666.791.370	1.127.600.000	1.127.600.000	2.666.791.370	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.506.200.000	1.506.200.000	3.694.954.950	1.506.200.000	1.506.200.000	3.694.954.950	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.147.400.000	1.147.400.000	2.696.085.000	1.147.400.000	1.147.400.000	2.696.085.000	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	779.000.000	779.000.000	1.854.532.120	779.000.000	779.000.000	1.854.532.120	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.096.400.000	1.096.400.000	2.579.975.540	1.096.400.000	1.096.400.000	2.579.975.540	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.982.600.000	1.982.600.000	4.968.770.000	1.982.600.000	1.982.600.000	4.968.770.000	PAD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.354.400.000	1.354.400.000	3.284.353.440	1.354.400.000	1.354.400.000	3.284.353.440	PAD	
7.01.03.2.03 .0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11.442.151	11.442.151	11.442.151	11.442.151	11.442.151	11.442.151	PAD	
7.01.03.2.03 .0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	40.000.000	147.211.610	40.000.000	40.000.000	147.211.610	PAD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.602.000	153.602.000	129.749.850	153.602.000	153.602.000	129.749.850	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	153.602.000	153.602.000	129.749.850	153.602.000	153.602.000	129.749.850	PAD	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	153.602.000	153.602.000	129.749.850	153.602.000	153.602.000	129.749.850	PAD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	73.800.000	73.800.000	72.000.000	73.800.000	73.800.000	72.000.000	PAD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	73.800.000	73.800.000	72.000.000	73.800.000	73.800.000	72.000.000	PAD	
7.01.05.2.01 .0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	73.800.000	73.800.000	72.000.000	73.800.000	73.800.000	72.000.000	PAD	
JUMLAH										

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

51. KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

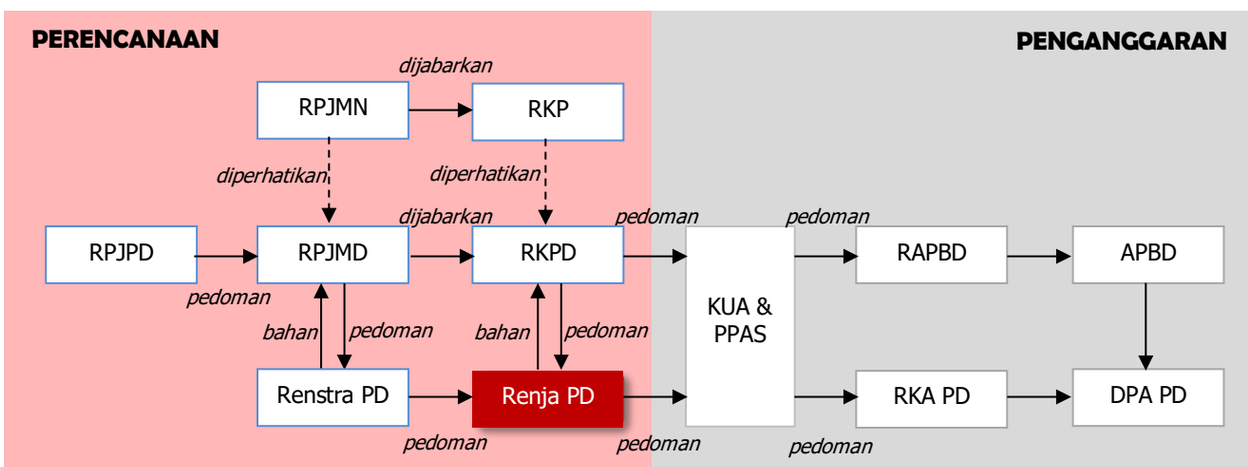

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2025; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

o. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 42).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN Kecamatan Pedurungan KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN Kecamatan Pedurungan KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	4 Dokumen	30 Persen	4 Dokumen	30 Persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33 Persen	1 Dokumen	33 Persen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 Persen	0 dokumen	0 Persen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 Persen	0 dokumen	0 Persen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 Persen	0 dokumen	0 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 Persen	0 dokumen	0 Persen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	2 Dokumen	50 Persen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Pemenuhan jasa administrasi perkantoran - Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	1 Dokumen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	1 Paket	1 Paket	100 Persen	1 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	8 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	75 Persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3355 Orang	7603 Orang	12 Laporan	8 laporan	66	8 laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Laporan	8 Laporan	66	8 Laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Jenis	4 dokumen	3 dokumen	75	3 dokumen	75 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100	25 persen	25 persen	25 persen	25 persen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6 Unit	2 Unit	33 Persen	2 Unit	40 Persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 Unit	30 Unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Gedung	2 Gedung	4 unit	4 unit	100	4 unit	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	2 Jenis	2 unit	2 unit	100 Persen	2 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	2Jenis	4 Unit	3 Unit	75 Persen	3 Unit	100 Persen
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dlm menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	97.46 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1 Angka	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 Persen	2 dokumen	50 Persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	6 Laporan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan penggaron kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongan Sari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 laporan	2 laporan	66 Persen	2 laporan	66 Persen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385 Kegiatan	362 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	135 Angka	121 Angka	147 kegiatan	6 kegiatan	4.08 Persen	6 kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13 kegiatan	6 kegiatan	46.15 Persen	6 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Penggaron kidul	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	50 Persen	4 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gemah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 kegiatan	5 kegiatan	50 Persen	5 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogomulyo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	50 Persen	5 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Muktiharjo kidul	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	7 kegiatan	50 Persen	7 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari kulon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 kegiatan	6 Kegiatan	50 Persen	6 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Plamongan Sari	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 kegiatan	6 Kegiatan	50 Persen	6 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Lor	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Tengah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Palebon	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kalicari	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 kegiatan	4 Kegiatan	50 Persen	4 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari wetan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	4 Kegiatan	50 Persen	4 Kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	25 Kegiatan	40 Kegiatan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50	4 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron kidul	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Pokmas/ Ormas	21 Pokmas/ Ormas	50	21 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	14 Kegiatan	8 Kegiatan	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	50	14 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	27 Kegiatan	13 Kegiatan	27 Pokmas/ Ormas	27 Pokmas/ Ormas	50	27 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Pokmas/ Ormas	20 Pokmas/ Ormas	50	20 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongansari	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	15 Kegiatan	11 Kegiatan	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas/ Ormas	50	15 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Tengah	18 Kegiatan	9 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	22 Kegiatan	12 Kegiatan	22 Pokmas/ Ormas	22 Pokmas/ Ormas	50	22 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	16 Kegiatan	4 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100 persen	100 persen	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50	4 Lembaga Kemasyarakatan	50 persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Jenis	8 Jenis	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50	6 Lembaga Kemasyarakatan	75 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 laporan	-	-	-	-
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Persen	30 Persen	100	75	75	75	75
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	22 Angka	20 Angka	10 Angka	75 persen	10 Angka	75 persen
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 persen	3 kegiatan	100 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Persen	100 Persen	100 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								

Sumber: Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu yang berisi Belanja Modal, ATK, belanja cetak, perjalanan dinas dan honorarium narasumber sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Efisiensi Anggaran kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Tahun 2025

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	BELANJA MODAL		96,099,582	96,099,582	0
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10,389,600	10,389,600	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	17,604,600	17,604,600	0
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	68,105,382	68,105,382	0
2	BELANJA PERJALANAN DINAS		410,969,800.00	373,469,800.00	37,500,000.00
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315,049,800	315,049,800	0
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,350,000	7,350,000	0
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,875,000	4,875,000	0
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000	4,050,000	
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,125,000	7,125,000	0
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,145,000	18,145,000	0
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,000,000	7,500,000	37,500,000
	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,375,000	9,375,000	

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		33,614,750	18,671,181	14,943,569
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129,750	129,750	0
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,390,460	1,144,000	1,246,460
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111,400	111,400	0
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111,400	111,400	0
	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210,900	210,900	0
	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210,900	210,900	0
	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111,400	111,400	0
	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111,400	111,400	0
	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111,400	111,400	0
	.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	445,600	445,600	0
	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,336,800	1,336,800	0
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28,333,340	14,636,231	13,697,109

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
4	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		74,560,646	56,158,021	18,402,625
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,262,360	1,717,160	545,200
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,155,200	8,482,600	2,672,600
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,219,000	2,443,221	775,779
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	75,290	57,000	18,290
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,920,000	1,157,280	762,720
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,181,600	896,834	284,766
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,144,000	868,296	275,704
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,079,250	5,373,151	1,706,099
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,422,700	1,838,829	583,871
	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	381,530	289,581	91,949
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	281,000	213,279	67,721
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan	1,078,400	818,506	259,894

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	325,000	246,675	78,325
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	337,000	255,783	81,217
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,338,800	1,775,149	563,651
	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,670,000	2,026,530	643,470
	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,120,000	2,368,080	751,920
	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,845,000	1,400,355	444,645
	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,120,000	2,368,080	751,920
	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	517,200	517,200	0
	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,357,500	3,307,342	1,050,158
	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	689,600	523,407	166,193
	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	224,800	224,800	0
	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,617,600	1,213,200	404,400
	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	224,800	224,800	0

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	29,795	22,614	7,181
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,535	-124,477	133,012
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,383,830	6,126,645	2,257,185
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,716,000	1,302,444	413,556
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,353,036	4,821,954	1,531,082
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,481,820	3,401,701	1,080,119
5	BELANJA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN SEREMONIAL		70,000,000	36,837,000	33,163,000
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	6,500,000	3,500,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47,500,000	22,500,000	25,000,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,500,000	7,837,000	4,663,000
6	HONORARIUM NARASUMBER		113,700,000	68,447,800	45,252,200
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000	943,350	556,650
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,800,000	1,132,020	667,980
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000	943,350	556,650

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan	1,000,000	628,900	371,100
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,400,000	6,540,560	3,859,440
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,800,000	6,792,120	4,007,880
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,000,000	1,257,800	742,200
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,800,000	1,132,020	667,980
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan	20,000,000	12,578,000	7,422,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan	8,000,000	5,031,200	2,968,800
	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,800,000	1,132,020	667,980
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,500,000	872,250	1,627,750
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,500,000	872,250	1,627,750
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,500,000	4,087,850	2,412,150
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,	4,700,000	2,955,830	1,744,170

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,500,000	4,087,850	2,412,150
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,500,000	4,087,850	2,412,150
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,200,000	3,899,180	2,300,820
	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,800,000	1,132,020	667,980
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,200,000	2,641,380	1,558,620
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,200,000	4,200,000	0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,500,000	1,500,000	6,000,000
7	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT		117,000,000	41,507,400	75,492,600
	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117,000,000	41,507,400	75,492,600
TOTAL HOLD			915,944,778	691,190,784	224,753,994
MUKTIHARJO KIDUL					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		13,296,608	6,649,830	6,646,778
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,101,880	5,636,390	6,465,490
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,013,440	1,013,440	0

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181,288	0	181,288
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		8,617,962	6,549,651	2,068,311
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,279,430	6,229,831	2,049,599
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	319,820	319,820	0
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18,712	0	18,712
3	HONORARIUM NARASUMBER		27,300,000	13,800,000	13,500,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,750,000	0	7,750,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,050,000	9,300,000	5,750,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,500,000	4,500,000	0
TOTAL HOLD			49,214,570	26,999,481	22,215,089
TLOGOSARIKULON					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		Rp 24,822,430	Rp 12,411,215	Rp 12,411,215
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 20,659,810	Rp 8,544,095	Rp 12,115,715
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3,080,320	Rp 2,784,820	Rp 295,500
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1,082,300	Rp 1,082,300	Rp -
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		Rp 10,089,360	Rp 7,657,824	Rp 2,431,536
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 9,532,290	Rp 7,125,954	Rp 2,406,336

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 517,700	Rp 492,500	Rp 25,200
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 39,370	Rp 39,370	Rp -
3	HONORARIUM NARASUMBER		Rp 24,900,000	Rp 15,150,000	Rp 9,750,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 12,500,000	Rp 9,000,000	Rp 3,500,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 12,400,000	Rp 6,150,000	Rp 6,250,000
TOTAL HOLD			Rp 59,811,790	Rp 35,219,039	Rp 24,592,751
TLOGOSARI WETAN					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		27,299,280	8,177,400	19,121,880
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,354,800	4,236,300	12,118,500
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	444,480	444,480	0
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,500,000	3,496,620	7,003,380
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		500,000	379,500	120,500
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	500,000	379,500	120,500
3	HONORARIUM NARASUMBER		21,250,000	12,750,000	8,500,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,500,000	9,000,000	5,500,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,750,000	3,750,000	3,000,000
TOTAL HOLD			49,049,280	21,306,900	27,742,380

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
TLOGOMULYO					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		32,136,920	16,101,410	16,035,510
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,616,610	2,812,650	14,803,960
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,315,500	11,083,950	1,231,550
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,204,810	2,204,810	0
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		9,671,290	7,263,790	2,407,500
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,291,600	6,974,100	2,317,500
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	184,500	94,500	90,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	195,190	195,190	0
3	HONORARIUM NARASUMBER		18,000,000	10,750,000	7,250,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,750,000	6,000,000	2,750,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,250,000	4,750,000	4,500,000
TOTAL HOLD			59,808,210	34,115,200	25,693,010
PALEBON					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		26,303,120	13,152,560	13,150,560
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,625,400	7,690,100	8,935,300
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,430,970	4,215,710	4,215,260

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,246,750	1,246,750	0
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		9,704,820	7,365,958	2,338,862
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,532,540	7,193,678	2,338,862
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	69,030	69,030	0
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	103,250	103,250	0
3	HONORARIUM NARASUMBER		24,750,000	14,750,000	10,000,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,250,000	9,250,000	7,000,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,500,000	5,500,000	3,000,000
TOTAL HOLD			60,757,940	35,268,518	25,489,422
KALICARI					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		11,260,680	5,634,580	5,626,100
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,543,380	4,917,280	5,626,100
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	717,300	717,300	0
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		7,410,665	5,624,695	1,785,970
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,591,600	4,805,630	1,785,970
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan	632,700	632,700	0

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Lembaga Kemasyarakatan	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	186,365	186,365	0
3	BELANJA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN SEREMONIAL		6,000,000	3,440,000	2,560,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000	3,440,000	2,560,000
4	HONORARIUM NARASUMBER		24,700,000	14,700,000	10,000,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,200,000	9,450,000	5,750,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,500,000	5,250,000	4,250,000
TOTAL HOLD			49,371,345	29,399,275	19,972,070
GEMAH					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		Rp18,696,770.00	Rp9,353,150.00	Rp9,348,385.00
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp16,204,370.00	Rp6,860,750.00	Rp9,348,385.00
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2,492,400.00	Rp2,492,400.00	Rp0.00
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		Rp13,245,870.00	Rp10,053,615.00	Rp3,192,255.00
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp12,613,270.00	Rp9,421,015.00	Rp3,192,255.00
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp632,600.00	Rp632,600.00	Rp0.00
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	HONORARIUM NARASUMBER		Rp23,000,000.00	Rp13,500,000.00	Rp9,500,000.00

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9,750,000.00	Rp6,000,000.00	Rp3,750,000.00
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp13,250,000.00	Rp7,500,000.00	Rp5,750,000.00
TOTAL HOLD			Rp54,942,640.00	Rp32,906,765.00	Rp22,040,640.00
PEDURUNGAN TENGAH					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		22,645,870	11,597,380	11,048,490
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,704,140	2,976,530	5,727,610
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,083,950	8,620,850	2,463,100
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,857,780	0	2,857,780
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		13,172,210	9,997,707	3,174,503
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,793,940	8,619,437	3,174,503
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16,050	16,050	0
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,362,220	1,362,220	0
3	HONORARIUM NARASUMBER		22,250,000	13,500,000	8,750,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,000,000	4,500,000	4,500,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,250,000	9,000,000	4,250,000
TOTAL HOLD			58,068,080	35,095,087	22,972,993
PEURUNGAN KIDUL					

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		28,674,260	14,337,545	14,336,715
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,483,860	9,362,630	10,121,230
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	759,430	759,430	0
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,430,970	4,215,485	4,215,485
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		12,196,880	9,257,432	2,939,448
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,922,280	7,982,832	2,939,448
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,205,570	1,205,570	0
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	69,030	69,030	0
3	HONORARIUM NARASUMBER		23,000,000	13,664,700	9,335,300
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,500,000	8,615,000	5,885,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,500,000	5,049,700	3,450,300
TOTAL HOLD			63,871,140	37,259,677	26,611,463
PEDURUNGAN LOR					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		13,478,310	6,760,590	6,717,720
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,360,980	2,228,940	6,132,040

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,117,330	4,531,650	585,680
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		6,718,160	5,099,210	1,618,950
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,760,490	4,261,540	1,498,950
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	382,670	262,670	120,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	575,000	575,000	0
3	HONORARIUM NARASUMBER		24,000,000	14,250,000	9,750,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,500,000	6,250,000	6,250,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,500,000	8,000,000	3,500,000
TOTAL HOLD			44,196,470	26,109,800	18,086,670
PLAMONGANSARI					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		19,247,450	9,626,480	9,620,970
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,137,380	8,310,430	8,826,950
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	109,320	0	109,320
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,000,750	1,316,050	684,700
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		8,879,520	6,741,200	2,138,320
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,275,080	4,701,200	1,573,880

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,390,680	1,290,000	100,680
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,213,760	750,000	463,760
3	HONORARIUM NARASUMBER		23,500,000	14,250,000	9,250,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,500,000	3,000,000	6,500,000
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,000,000	11,250,000	2,750,000
TOTAL HOLD			51,626,970	30,617,680	21,009,290
PENGGARON KIDUL					
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR		Rp13,877,580	Rp6,967,080	Rp6,910,500
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp10,363,920	Rp3,803,610	Rp6,560,310
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp831,100	Rp831,100	Rp0
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2,682,560	Rp2,332,370	Rp350,190
2	BELANJA PERCETAKAN DAN SOUVENIR		Rp2,262,270	Rp1,717,063	Rp545,207
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1,638,530	Rp1,245,283	Rp393,247
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp376,300	Rp376,300	Rp0
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp247,440	Rp95,480	Rp151,960
3	HONORARIUM NARASUMBER		Rp21,300,000	Rp12,750,000	Rp8,550,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Rp9,250,000	Rp4,950,000	Rp4,300,000

No	Kode / Nomenklatur Sub Kegiatan	Kode / Nomenklatur Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran Awal	Anggaran di Hold	Sisa (Yang Bisa di Realisasikan)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Masyarakat di Kelurahan	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp12,050,000	Rp7,800,000	Rp4,250,000
TOTAL HOLD			Rp37,439,850	Rp21,434,143	Rp16,005,707
	GRAND TOTAL HOLD		Rp1,554,103,063	Rp1,056,922,349	Rp497,185,479

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	KECAMATAN PEDURUNGAN		27,199,468,807.00	11,263,524,931.00	41.41%
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,216,901,848.00	9,798,576,851.00	44.10%
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,606,293.00	200,000.00	0.78%
3	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,358,207.00	-	0.00%
4	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,104,370.00	-	0.00%
5	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,962,820.00	-	0.00%
6	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,594,645.00	-	0.00%
7	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,251,920.00	-	0.00%
8	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,418,138.00	-	0.00%
9	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	916,193.00	200,000.00	21.83%
10	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,487,111,320.00	9,514,299,704.00	48.82%
11	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,753,146,920.00	9,233,899,704.00	49.24%
12	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	731,260,000.00	280,400,000.00	38.34%
13	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750,000.00	-	0.00%
14	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,604,400.00	-	0.00%
15	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	350,000.00	-	0.00%
16	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,307,867,825.00	86,401,000.00	6.61%
17	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,977,386.00	-	0.00%
18	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	534,349,419.00	-	0.00%
19	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,488,749.00	1,750,000.00	5.74%
20	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,201,823.00	2,387,000.00	56.81%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
21	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	162,317,800.00	74,689,000.00	46.01%
22	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,477,189.00	7,575,000.00	13.65%
23	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	496,055,459.00	-	0.00%
24	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102,664,699.00	-	0.00%
25	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,664,699.00	-	0.00%
26	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,045,711.00	121,122,305.00	27.59%
27	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270,000,000.00	89,667,305.00	33.21%
28	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169,045,711.00	31,455,000.00	18.61%
29	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854,606,000.00	76,553,842.00	8.96%
30	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186,606,000.00	56,628,842.00	30.35%
31	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	19,925,000.00	39.85%
32	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	338,000,000.00	-	0.00%
33	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280,000,000.00	-	0.00%
34	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,622,434,170.00	1,227,641,080.00	46.81%
35	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	610,635,220.00	510,056,650.00	83.53%
36	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44,635,220.00	3,056,650.00	6.85%
37	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	566,000,000.00	507,000,000.00	89.58%
38	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	635,985,660.00	312,731,580.00	49.17%
39	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	635,985,660.00	312,731,580.00	49.17%
40	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,375,813,290.00	404,852,850.00	29.43%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
41	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,375,813,290.00	404,852,850.00	29.43%
42	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,872,246,869.00	66,658,000.00	3.56%
43	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,707,190,078.00	53,533,000.00	3.14%
44	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31,906,379.00	13,863,000.00	43.45%
45	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,132,368,000.00	-	0.00%
46	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	542,915,699.00	39,670,000.00	7.31%
47	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	165,056,791.00	13,125,000.00	7.95%
48	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	123,661,171.00	13,125,000.00	10.61%
49	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18,578,399.00	-	0.00%
50	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22,817,221.00	-	0.00%
51	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	477,979,600.00	165,749,000.00	34.68%
52	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	477,979,600.00	165,749,000.00	34.68%
53	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	477,979,600.00	165,749,000.00	34.68%
54	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,906,320.00	4,900,000.00	49.46%
	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL		5,491,676,519.00	2,083,527,209.00	37.94%
55	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113,133,779.00	69,729,609.00	61.63%
56	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	113,133,779.00	69,729,609.00	61.63%
57	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	113,133,779.00	69,729,609.00	61.63%
58	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,378,542,740.00	2,013,797,600.00	37.44%
59	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,860,376,000.00	93,747,600.00	5.04%
60	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,705,376,000.00	-	0.00%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
61	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155,000,000.00	93,747,600.00	60.48%
62	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,518,166,740.00	1,920,050,000.00	54.58%
63	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3,518,166,740.00	1,920,050,000.00	54.58%
	KELURAHAN TLOGOSARI KULON		5,961,916,961.00	2,329,818,699.00	39.08%
64	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109,329,951.00	48,437,999.00	44.30%
65	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	109,329,951.00	48,437,999.00	44.30%
66	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109,329,951.00	48,437,999.00	44.30%
67	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,852,587,010.00	2,281,380,700.00	38.98%
68	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,836,361,810.00	71,525,500.00	3.89%
69	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,677,736,000.00	-	0.00%
70	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158,625,810.00	71,525,500.00	45.09%
71	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,016,225,200.00	2,209,855,200.00	55.02%
72	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4,016,225,200.00	2,209,855,200.00	55.02%
	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN		1,972,629,100.00	530,463,076.00	26.89%
73	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76,822,600.00	50,431,626.00	65.65%
74	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	76,822,600.00	50,431,626.00	65.65%
75	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76,822,600.00	50,431,626.00	65.65%
76	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,895,806,500.00	480,031,450.00	25.32%
77	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,012,556,500.00	50,606,450.00	5.00%
78	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	946,736,000.00	15,756,450.00	1.66%
79	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65,820,500.00	34,850,000.00	52.95%
80	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	883,250,000.00	429,425,000.00	48.62%
81	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	883,250,000.00	429,425,000.00	48.62%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	KELURAHAN TLOGOMULYO		2,904,592,800.00	1,055,251,618.00	36.33%
82	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95,213,250.00	50,586,618.00	53.13%
83	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	95,213,250.00	50,586,618.00	53.13%
84	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95,213,250.00	50,586,618.00	53.13%
85	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,809,379,550.00	1,004,665,000.00	35.76%
86	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,173,879,550.00	116,615,000.00	9.93%
87	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,081,008,000.00	68,293,450.00	6.32%
88	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,871,550.00	48,321,550.00	52.03%
89	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,635,500,000.00	888,050,000.00	54.30%
90	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,635,500,000.00	888,050,000.00	54.30%
	KELURAHAN KALICARI		2,189,252,725.00	734,556,880.00	33.55%
91	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,277,090.00	37,038,180.00	43.43%
92	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	85,277,090.00	37,038,180.00	43.43%
93	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,277,090.00	37,038,180.00	43.43%
94	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,103,975,635.00	697,518,700.00	33.15%
95	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,030,675,635.00	119,243,700.00	11.57%
96	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	947,552,000.00	70,393,700.00	7.43%
97	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83,123,635.00	48,850,000.00	58.77%
98	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,073,300,000.00	578,275,000.00	53.88%
99	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,073,300,000.00	578,275,000.00	53.88%
	KELURAHAN PLAMONGANSARI		2,994,878,320.00	1,013,689,741.00	33.85%
100	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91,988,370.00	31,135,041.00	33.85%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
101	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	91,988,370.00	31,135,041.00	33.85%
102	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91,988,370.00	31,135,041.00	33.85%
103	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,902,889,950.00	982,554,700.00	33.85%
104	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,140,006,000.00	135,254,700.00	11.86%
105	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,027,096,000.00	67,304,900.00	6.55%
106	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112,910,000.00	67,949,800.00	60.18%
107	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,762,883,950.00	847,300,000.00	48.06%
108	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,762,883,950.00	847,300,000.00	48.06%
	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH		2,970,396,913.00	1,218,846,620.00	41.03%
109	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93,404,033.00	52,475,610.00	56.18%
110	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	93,404,033.00	52,475,610.00	56.18%
111	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93,404,033.00	52,475,610.00	56.18%
112	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,876,992,880.00	1,166,371,010.00	40.54%
113	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,046,055,100.00	168,894,010.00	16.15%
114	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	946,192,000.00	108,194,010.00	11.43%
115	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99,863,100.00	60,700,000.00	60.78%
116	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,830,937,780.00	997,477,000.00	54.48%
117	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,830,937,780.00	997,477,000.00	54.48%
	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR		2,341,670,200.00	812,483,260.00	34.70%
118	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88,509,520.00	46,575,600.00	52.62%
119	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88,509,520.00	46,575,600.00	52.62%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
120	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,509,520.00	46,575,600.00	52.62%
121	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,253,160,680.00	765,907,660.00	33.99%
122	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,040,835,680.00	115,607,660.00	11.11%
123	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	947,280,000.00	64,964,160.00	6.86%
124	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93,555,680.00	50,643,500.00	54.13%
125	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,212,325,000.00	650,300,000.00	53.64%
126	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,212,325,000.00	650,300,000.00	53.64%
	KELURAHAN GEMAH		2,783,057,235.00	1,029,195,308.00	36.98%
127	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88,718,235.00	50,241,308.00	56.63%
128	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88,718,235.00	50,241,308.00	56.63%
129	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,718,235.00	50,241,308.00	56.63%
130	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,694,339,000.00	978,954,000.00	36.33%
131	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,173,864,000.00	161,154,000.00	13.73%
132	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,079,464,000.00	100,279,000.00	9.29%
133	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94,400,000.00	60,875,000.00	64.49%
134	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,520,475,000.00	817,800,000.00	53.79%
135	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,520,475,000.00	817,800,000.00	53.79%
	KELURAHAN PALEBON		2,632,311,482.00	961,403,494.00	36.52%
136	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,116,222.00	43,065,494.00	50.60%
137	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	85,116,222.00	43,065,494.00	50.60%
138	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,116,222.00	43,065,494.00	50.60%
139	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,547,195,260.00	918,338,000.00	36.05%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
140	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,167,695,260.00	188,763,000.00	16.17%
141	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,081,280,000.00	149,677,000.00	13.84%
142	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86,415,260.00	39,086,000.00	45.23%
143	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,379,500,000.00	729,575,000.00	52.89%
144	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,379,500,000.00	729,575,000.00	52.89%
	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL		2,466,575,818.00	789,502,916.00	32.01%
145	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82,654,538.00	46,946,916.00	56.80%
146	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	82,654,538.00	46,946,916.00	56.80%
147	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82,654,538.00	46,946,916.00	56.80%
148	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,383,921,280.00	742,556,000.00	31.15%
149	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,089,001,280.00	41,766,000.00	3.84%
150	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	993,736,000.00	2,325,000.00	0.23%
151	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95,265,280.00	39,441,000.00	41.40%
152	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,294,920,000.00	700,790,000.00	54.12%
153	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,294,920,000.00	700,790,000.00	54.12%
	KELURAHAN PENGGARON KIDUL		1,786,061,857.00	468,223,606.00	26.22%
154	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79,951,107.00	32,342,731.00	40.45%
155	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79,951,107.00	32,342,731.00	40.45%
156	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79,951,107.00	32,342,731.00	40.45%
157	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,706,110,750.00	435,880,875.00	25.55%
158	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,017,138,600.00	90,970,875.00	8.94%
159	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	948,096,000.00	60,070,875.00	6.34%
160	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69,042,600.00	30,900,000.00	44.75%

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
161	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	688,972,150.00	344,910,000.00	50.06%
162	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	688,972,150.00	344,910,000.00	50.06%
	JUMLAH		63,694,488,737.00	24,290,487,358.00	38.14%

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebesar Rp 63.694.488.737,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 24.290.487.358,00 atau sekitar 38.14%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 39,404,001,379.00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 Tw II	2026	2025
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	87 Angka	88 Angka	89 Angka	90 Angka	91 Angka		94,97 Angka	96,45 Angka	96,75 Angka	95,24 Angka	94,97 Angka	96,85 Angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	50 %	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		100%	100%	100%	100%	100%		81%	98%	99%	50 %	90%	100%
masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			40 %	45 %	50 %	55 %			85,04 %	86,72 %	37 %	50 %	100 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan			20 %	40 %	60 %	80 %		60%	100%	95%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", target sebesar 90,00 sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 95,24;
b. Sasaran "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   Indikator "Nilai AKIP" target sebesar 72,10 Nilai, dengan realisasi sebesar 77,1 Nilai.
c. Sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN" target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50%.
d. Sasaran "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50%.

a) Sasaran "Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator "Persentase peningktan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" target sebesar 50%, dengan realisasi sebesar 37%.
   2. Indikator "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan" target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 100%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan pada tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2025 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta

keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Pedurungan, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;
4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Peduurngan. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:
1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
2. Belum optimalnya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan Pedurungan pada level bawah;
3. Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
4. Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Pedurungan;
5. Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Kurangnya jumlah SDM yang nemiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatandan Kelurahan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan OPD Teknis dalam penentuan titik pekerjaan fisik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang khususnya di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
       Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Pedurungan tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
    2. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan di tambah SDM nya serta agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
   2. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
   3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
   4. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota

Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Indikator Mutakhir			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Indikator Mutakhir			Pagu Indikatif (Rp)	
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.00	URUSAN KEWILAYAHAN												
7.01.0.00.0.0.11.0000	Kecamatan Pedurungan					101,039,080,374.70	Kecamatan Pedurungan					101,039,080,374.70	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92.00	Persen	3,359,873,934.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92.00	Persen	3,359,873,934.20	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	937,265,179.20	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	937,265,179.20	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	891,329,959.20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	891,329,959.20	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	5.00	Laporan	45,935,220.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	5.00	Laporan	45,935,220.00	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	1,552,192,855.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	1,552,192,855.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	463,114,160.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	463,114,160.00	
		Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	113,133,779		Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	113,133,779.00	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									Wilayah Kecamatan					
		Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	106,329,951.00		Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	106,329,951.00		
		Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	76,822,600.00		Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	76,822,600.00		
		Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	95,213,250.00		Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	95,213,250.00		
		Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	85,277,090.00		Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	85,277,090.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									Wilayah Kecamatan					
		Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	91,998,370.00		Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	91,998,370.00		
		Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	96,854,033.00		Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	96,854,033.00		
		Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	87,009,520.00		Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	87,009,520.00		
		Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	88,718,235.00		Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	88,718,235.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									Wilayah Kecamatan					
		Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	85,116,222.00		Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	85,116,222.00		
		Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	82,654,538.00		Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	82,654,538.00		
		Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	79,951,107.00		Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	79,951,107.00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	870,415,900.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	870,415,900.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	870,415,900.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	870,415,900.00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99.00	Persen	74,661,178,743.90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99.00	Persen	74,661,178,743.90		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	#####	Kegiatan	16,506,451,132.90	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415.00	Kegiatan	16,506,451,132.90		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	27,906,379.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	27,906,379.00		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1,132,412,420.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1,132,412,420.90		
		Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1,705,376,000.00		Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1,705,376,000.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1,677,736,000.00		Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1,677,736,000.00		
		Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	946,736,000.00		Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	946,736,000.00		
		Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1,081,008,000.00		Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1,081,008,000.00		
		Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	947,552,000.00		Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	947,552,000.00		
		Plamongansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1,027,096,000.00		Plamongansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1,027,096,000.00		
		Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	946,192,000.00		Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	946,192,000.00		
		Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	947,280,000.00		Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	11	Unit	947,280,000.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									yang Terbangun					
		Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1,079,464,000.00		Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1,079,464,000.00		
		Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1,081,280,000.00		Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1,081,280,000.00		
		Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	993,736,000.00		Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	993,736,000.00		
		Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	948,096,000.00		Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	948,096,000.00		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	728,930,219.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	728,930,219.00		
		Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	168,965,699.00		Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	168,965,699.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	161,625,810.00		Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	161,625,810.00		
		Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	65,820,500.00		Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	65,820,500.00		
		Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	92,871,550.00		Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	92,871,550.00		
		Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	83,123,635.00		Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	83,123,635.00		
		Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	111,185,000.00		Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	111,185,000.00		
		Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	98,663,100.00		Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	18	Pokmas / Ormas	98,663,100.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									Masyarakat di Kelurahan					
		Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	108,271,680.00		Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	108,271,680.00		
		Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21	Pokmas / Ormas	94,400,000.00		Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21	Pokmas / Ormas	94,400,000.00		
		Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	86,415,260.00		Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	86,415,260.00		
		Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	95,265,280.00		Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	95,265,280.00		
		Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	69,042,600.00		Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	69,042,600.00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9.00	Dokumen	58,154,727,611.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakat	9.00	Dokumen	58,154,727,611.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
	Tingkat Kecamatan						Tingkat Kecamatan		an yang seharusnya					
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	123,661,171.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	123,661,171.00		
		Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	10,183,616,740.00		Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	10,183,616,740.00		
		Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	11,653,475,200.00		Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	11,653,475,200.00		
		Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2,210,300,000.00		Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2,210,300,000.00		
		Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4,634,150,000.00		Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4,634,150,000.00		
		Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2,930,750,000.00		Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2,930,750,000.00		
		Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasy	4,408,448,950.00		Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakat	6	Lembaga Kemasy	4,408,448,950.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
					arakatan				an yang Diselenggarakan		arakatan			
		Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	5,134,737,780.00		Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	5,134,737,780.00		
		Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,351,725,000.00		Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,351,725,000.00		
		Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4,260,925,000.00		Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4,260,925,000.00		
		Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,845,350,000.00		Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,845,350,000.00		
		Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,561,770,000.00		Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3,561,770,000.00		
		Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1,811,422,150.00		Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1,811,422,150.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	19,878,399.00						19,878,399.00	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	24,517,221.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	24,517,221.00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00	Persen	312,873,600.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00	Persen	312,873,600.00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	Angka	312,873,600.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	Angka	312,873,600.00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	312,873,600.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	312,873,600.00	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75.00	Persen	9,906,320.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75.00	Persen	9,906,320.00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	9,906,320.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	9,906,320.00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150.00	Orang	9,906,320.00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	150.00	Orang	9,906,320.00	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
									danKetahanan Nasional					
	NON URUSAN						NON URUSAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	22,695,247,776.60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	22,695,247,776.60		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	20,106,550.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	20,106,550.00		
			Jumlah Dokumen pelaporan	3.00	Dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	3.00	Dokumen			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	2,233,087.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	2,233,087.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2,664,370.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2,664,370.00		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4,474,900.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4,474,900.00		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3,464,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3,464,000.00		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3,764,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3,764,000.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	2,590,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	2,590,000.00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	916,193.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	916,193.00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	19,998,462,336.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	19,998,462,336.00		
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	Dokumen			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85.00	Orang/ bulan	18,494,592,436.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85.00	Orang/ bulan	18,494,592,436.00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12.00	Dokumen	1,500,605,500.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12.00	Dokumen	1,500,605,500.00		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
			Pelaksanaan Tugas ASN						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	750,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	750,000.00		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00	Laporan	1,604,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	1,604,400.00		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	910,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	910,000.00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	1,257,147,190.60	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	1,257,147,190.60		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.00	Paket	24,977,386.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.00	Paket	24,977,386.00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	438,249,837.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	438,249,837.00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.00	Paket	30,488,749.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.00	Paket	30,488,749.00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	4,201,823.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	4,201,823.00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	178,467,800.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	178,467,800.00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	67,931,739.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	67,931,739.00		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	512,829,856.60	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	3.00	Dokumen	512,829,856.60		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
	Elektronik pada SKPD						Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	148,798,900.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	148,798,900.00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00	Unit	148,798,900.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00	Unit	148,798,900.00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	416,126,800.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	416,126,800.00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	270,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	270,000,000.00	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	146,126,800.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	146,126,800.00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	Persen	854,606,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	Persen	854,606,000.00	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
	Pemerintahan Daerah						Urusan Pemerintahan Daerah						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	186,606,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	186,606,000.00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	50,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	50,000,000.00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.00	Unit	338,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	338,000,000.00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.00	Unit	280,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	280,000,000.00	

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1%;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;

Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;

Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;

Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;

Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;

Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaran event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Meningkatnya wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan 2 indikator yaitu Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94.00
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	72.05

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88.40
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	98.00

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN					67,088,998,222.00	66,588,998,222.00	101,039,080,374.70		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	94 Persen	4,269,079,180	3,956,109,260	3,359,873,934		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1,116,000,000	616,000,000	937,265,179		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107 Dokumen	107 Dokumen	107 Dokumen	1,066,000,000	566,000,000	891,329,959.20		
1.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	45,935,220.00		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,748,945,580	1,935,975,660	1,552,192,855		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	518,945,580	705,975,660	463,114,160.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
	Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	125,000,000	125,000,000	113,133,779.00		
	Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	125,000,000	125,000,000	106,329,951.00		
	Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	85,000,000	85,000,000	76,822,600.00		
	Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	105,000,000	105,000,000	95,213,250.00		
	Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	95,000,000	95,000,000	85,277,090.00		
	Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	105,000,000	105,000,000	91,998,370.00		
	Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	95,000,000	95,000,000	96,854,033.00		
	Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	105,000,000	105,000,000	87,009,520.00		
	Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	105,000,000	105,000,000	88,718,235.00		
	Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	100,000,000	85,116,222.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	100,000,000	82,654,538.00		
	Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	85,000,000	85,000,000	79,951,107.00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,404,133,600	1,404,133,600	870,415,900		
7.01.02.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,404,133,600	1,404,133,600	870,415,900.00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99%	99%	99%	39,435,010,000	39,435,010,000	74,661,178,744		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	285 kegiatan	285 kegiatan	285 kegiatan	15,771,810,000	15,771,810,000	16,506,451,133		
7.01.03.2.02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	50,000,000	27,906,379.00		
7.01.03.2.02 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1,132,368,000	1,132,368,000	1,132,412,420.90		
	Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1,705,376,000	1,705,376,000	1,705,376,000.00		
	Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1,677,736,000	1,677,736,000	1,677,736,000.00		
	Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	946,736,000	946,736,000	946,736,000.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1,081,008,000	1,081,008,000	1,081,008,000.00		
	Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	947,552,000	947,552,000	947,552,000.00		
	Plamongansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1,027,096,000	1,027,096,000	1,027,096,000.00		
	Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	946,192,000	946,192,000	946,192,000.00		
	Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	947,280,000	947,280,000	947,280,000.00		
	Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1,079,464,000	1,079,464,000	1,079,464,000.00		
	Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1,081,280,000	1,081,280,000	1,081,280,000.00		
	Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	993,736,000	993,736,000	993,736,000.00		
	Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	948,096,000	948,096,000	948,096,000.00		
7.01.03.2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	607,890,000	607,890,000	728,930,219.00		
	Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	168,965,699.00		
	Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	161,625,810.00		
	Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	65,820,500.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	92,871,550.00		
	Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	83,123,635.00		
	Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	50,000,000	111,185,000.00		
	Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	98,663,100.00		
	Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	108,271,680.00		
	Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	94,400,000.00		
	Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	86,415,260.00		
	Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	95,265,280.00		
	Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	69,042,600.00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	23,663,200,000	23,663,200,000	58,154,727,611		
7.01.03.2.03 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	127,000,000	127,000,000	123,661,171.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	4,002,800,000	4,002,800,000	10,183,616,740.00		
	Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	4,561,400,000	4,561,400,000	11,653,475,200.00		
	Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	912,200,000	912,200,000	2,210,300,000.00		
	Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14 Lembaga Kemasyara katan	14 Lembaga Kemasyara katan	14 Lembaga Kemasyara katan	1,866,200,000	1,866,200,000	4,634,150,000.00		
	Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16 Lembaga Kemasyara katan	16 Lembaga Kemasyara katan	16 Lembaga Kemasyara katan	1,229,600,000	1,229,600,000	2,930,750,000.00		
	Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	1,843,400,000	1,843,400,000	4,408,448,950.00		
	Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	18 Lembaga Kemasyara katan	2,088,800,000	2,088,800,000	5,134,737,780.00		
	Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15 Lembaga Kemasyara katan	15 Lembaga Kemasyara katan	15 Lembaga Kemasyara katan	1,394,000,000	1,394,000,000	3,351,725,000.00		
	Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	21 Lembaga Kemasyara katan	21 Lembaga Kemasyara katan	21 Lembaga Kemasyara katan	1,733,000,000	1,733,000,000	4,260,925,000.00		
	Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	22 Lembaga Kemasyara katan	22 Lembaga Kemasyara katan	22 Lembaga Kemasyara katan	1,572,800,000	1,572,800,000	3,845,350,000.00		
	Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16 Lembaga Kemasyara katan	16 Lembaga Kemasyara katan	16 Lembaga Kemasyara katan	1,487,600,000	1,487,600,000	3,561,770,000.00		
	Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyara katan	787,400,000	787,400,000	1,811,422,150.00		
7.01.03.2.03 .0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	20,000,000	20,000,000	19,878,399.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.03.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	37,000,000	37,000,000	24,517,221.00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	479,604,600	479,604,600	312,873,600		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan	25 angka	25 angka	25 angka	479,604,600	479,604,600	312,873,600		
7.01.04.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	479,604,600	479,604,600	312,873,600.00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75%	75%	75%	21,000,000	21,000,000	9,906,320		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	21,000,000	21,000,000	9,906,320		
7.01.05.2.01 .02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	70 Orang	70 Orang	70 Orang	21,000,000	21,000,000	9,906,320.00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	22,884,304,442	22,697,274,362.00	22,695,247,776.60		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan – Kec Pedurungan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	93,591,900	93,591,900	20,106,550		
		Dokumen Pelaporan – Kec Pedurungan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
7.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	54,647,000	54,647,000	2,233,087.00		
7.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,755,900	4,755,900	2,664,370.00		
7.01.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,830,900	4,830,900	4,474,900.00		
7.01.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,780,900	3,780,900	3,464,000.00		
7.01.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,080,900	4,080,900	3,764,000.00		
7.01.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19,570,300	19,570,300	2,590,000.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,926,000	1,926,000	916,193.00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD – Kec Pedurungan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	19,678,513,800	19,491,483,720	19,998,462,336		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD – Kec Pedurungan	100%	100%	100%					
7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 orang/bulan	113 orang/bulan	114 orang/bulan	18,940,177,000	18,753,146,920	18,494,592,436.00		
7.01.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	731,260,000	731,260,000	1,500,605,500.00		
7.01.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,461,200	1,461,200	750,000.00		
7.01.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,754,400	4,754,400	1,604,400.00		
7.01.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	861,200	861,200	910,000.00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,675,749,614	1,675,749,614	1,257,147,190.60		
7.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	24,977,386.00		
7.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	534,349,419	534,349,419	438,249,837.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45,000,000	45,000,000	30,488,749.00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16,452,866	16,452,866	4,201,823.00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	162,317,800	162,317,800	178,467,800.00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	396,574,070	396,574,070	67,931,739.00		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	496,055,459	496,055,459	512,829,856.60		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	102,664,699	102,664,699	148,798,900		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	102,664,699	102,664,699	148,798,900.00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	439,045,711	439,045,711	416,126,800		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270,000,000	270,000,000	270,000,000.00		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	169,045,711	169,045,711	146,126,800.00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	894,738,718	894,738,718	854,606,000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	226,738,718	226,738,718	186,606,000.00		

Kode Rek	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Operasional atau Lapangan									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000.00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	338,000,000	338,000,000	338,000,000.00		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	280,000,000	280,000,000	280,000,000.00		

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan

dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

52. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Pasal 1 Ayat (11) undang-undang dimaksud menyebutkan "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pula keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu tertuang dalam Pasal 273 ayat (2) yang berbunyi "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum nantinya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai penyusunan renja kerja perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 – dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan di tiap perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar sebagaimana berikut:

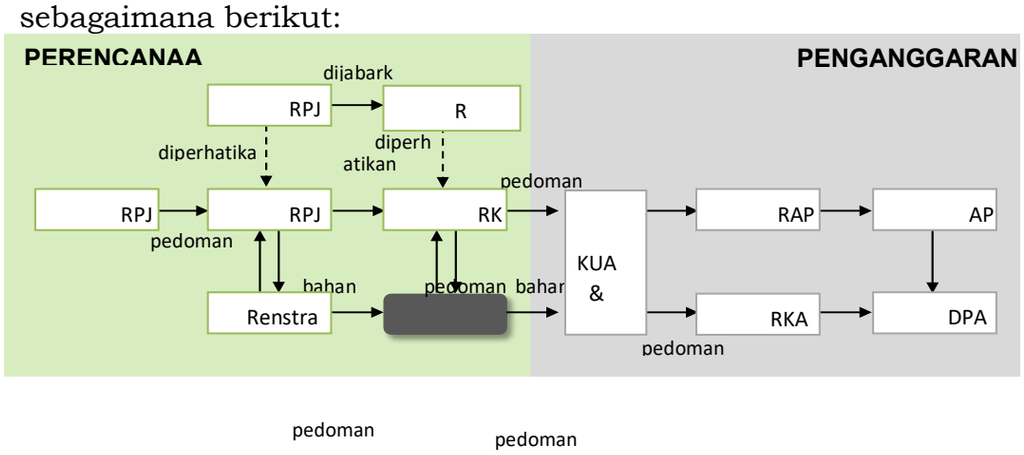

Gambar 1 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja OPD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja perangkat daerah memedomani pada Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD Tahun Anggaran 2024. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kebupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
23. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
25. Surat Edaran Wali Kota Semarang Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di paruh kedua tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada paruh kedua tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada paruh kedua Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sbb:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG SEMESTER I TAHUN 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada semester pertama di tahun 2025 dan capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD; serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan dala Renja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam penyusunan Perubahan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja semester pertama tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja semester sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan maupun permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian semester pertama tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan akhir tahun 2025.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
8.01	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (20%)	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	53,33% (10.67%)	53,33%	50.57%	70.57%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	50,21% (10.04%)	50,21%	60.04%	60.04%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	80%	80%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 Dokumen	25 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	37.50%	27 Dokumen	67.5%
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	-	0%	7 Dokumen	63.63%
		Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	-	0%	7 Dokumen	63,63%
		Jumlah Dokumen RTP	-	-	1 Dokumen	-	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
		Jumlah dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
		Jumlah dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 DOkumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SKPD							
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	2 Dokumen	-	0%	0%	0%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	53,33% (10,67%)	53.33%	70.67%	70.67%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	11 Dokumen	55%
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	40 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	90%		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100% (60%)	100% (60%)	100% (20%)	90% (18%)	90%	78%	78%
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	42 Dokumen	70%
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%	70%
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 DOkumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	60%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	80%	80%
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	275 Orang	159 Orang	55 Orang	55 Orang	100%	214 Orang	77.82%
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	159 Orang	60 Orang	35 Orang	58%	214 Orang	77.82%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%	70%
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	80%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	50 jenis	30 Jenis	10 Jenis	1 Jenis	10%	31 Jenis	62%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Bangunan Kantor yang disediakan							
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 PAket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	80%
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	30 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	40 Jenis	80%
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	80%
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	60 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	80 Paket	80%
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	13 Paket	10 Paket	-	0%	13 Paket	86.86%
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	15 Jenis	5 Jenis	-	0%	15 Jenis	60%
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	140 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	-	0%	10 Dokumen	7.14%
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 buku	10 Buku	10 Buku	-	0%	10 Buku	7.14%
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 LAporan	204 Laporan	100 Laporan	41 Laporan	41%	245 LAporan	98%
		Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	4000 Orang	1000 Orang	560 Orang	56%	4560 Orang	91.2%
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	289 Laporan	50 Laporan	22 Laporan	44%	311 Laporan	62.2%
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	289 Kegiatan	100 Kegiatan	22 Kegiatan	22%	311 Kegiatan	62.2%
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	25 Dokumen	13 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20%	14 Dokumen	56%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Elektronik pada SKPD							
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	13 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	20%	14 Jenis	56%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor OPD	100%	100% (60%)	100 % (20%)	-	-	60%	60%
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	8 Unit	4 Unit	-	0%	8 Unit	80%
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	5 Jenis	4 Jenis	-	0%	5 Jenis	50%
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	2 Unit	-	0%	5 Unit	50%
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	-	0%	6 Jenis	60%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor OPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%	70%
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	42 Laporan	70%
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%	70%
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	42 Laporan	70%
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	100% (60%)	100% (20%)	50% (10%)	50%	70%	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	80%
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	80%
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	110 Unit	67 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	89 Unit	80.91%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	67 unit	22 Unit	22 Unit	100%	89 Unit	80.91%
8.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	30 Unit	1 Unit	-	0%	30 Unit	60%
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	30 Unit	1 Unit	-	0%	30 Unit	60%
8.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	150 Unit	50 Unit	20 Unit	40%	170 Unit	68%
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	150 Unit	50 Uinit	20 Unit	40%	170 Unit	68%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	3.2 indeks	2.3 Indeks	3.78 Indeks	164.35%	3.78 Indeks	155.83%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	1 Kejadian	4 Kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	200%	0 Kejadian	200%
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	35 Dokumen	80 Dokumen	28 Dokumen	17 Dokumen	60.71%	97 Dokumen	277.14%
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang	-	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	4090 Orang	975 Orang	975 Orang	100%	5065 Orang	1111.21%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	25 Orang	-	-	-	25 Orang	5.95%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	1075 Orang	-	-		1075 Orang	226.31%
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	614 Orang	975 Orang	150 Orang	15.38%	764 Orang	288.30
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang	-	200 Orang				0%
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	700 Orang	300 Orang	150 Orang	50%	850 Orang	484.85%
		Jumlah Hibah yang disalurkan	-	-	1 Forum	1 Forum	100%	2 Forum	100%
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih	-	-	1 Kegiatan	-	0%	-	-
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	46 Dokumen	33 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	34 Dokumen	73.91%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali	-	-	-			
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	-		100 Orang	90 Orang	90%	90 Orang	90%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	85 kali	40 Kali	20 Kali	50%	104 Kali	43.75%
		Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	-	240 Orang	100 Orang	-	0%	240 Orang	100%
		Jumlah Kegiatan FGD Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	14 Kegiatan	-	-		14 Kegiatan	100%
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	-	1 Forum	-	-		1 Forum	100%
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih	-	1 Kegiatan	-	-		1 Kegiatan	100%
		Jumlah peserta Rembug Mahasiswa Semarang Semakin Hebat	-		100 Orang	-	0%	-	-
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2300 Orang	5936 Orang	1500 Orang	800 Orang	53%	6736	292.87%
		Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	16 lokasi	-	-	-	16 Lokasi	72.72%
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang	1000 Orang	500 Orang		0%	1000 Orang	43.48%
		Jumlah Pesera Event Upacara Kesaktian Pancasila	-	700 Orang	500 Orang		0%	700 Orang	100%
		Jumlah Pesera Event Upacara Hari Lahir Pancasila	-	700 Orang	500 Orang	800 Orang	160%	700 Orang	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Transparansi Seleksi Paskibraka	-	360 Orang	-			700 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi Parade	-	116 Orang	-			360 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi Kesemaptaan	-	70 Orang	-			116 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Peserta Seleksi Kepribadiaan	-	70 Orang	-			70 Orang	100%
		Jumlah Peserta Karantina Pasibraka	-	36 Orang	-			70 Orang	100%
		Jumlah Peserta Training Center Provinsi Jawa Tengah	-	10 Orang	-			36 Orang	100%
		Jumlah Peserta Study Komparasi Paskibraka	-	59 Orang	-			59 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi PBB	-	60 Orang	-			60 Orang	100%
		Jumlah Peserta Diklat Paskibraka	-	55 Orang	-			55 Orang	100%
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	930 Orang	630 Orang	240 Orang	120 Orang	50%	750 Orang	80.64%
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	2 Forum	-			2 Forum	6.67%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	630 orang	240 Orang	120 Orang	50%	750 Orang	80.64%
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	70 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	-	0%	10 Laporan	41.28%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	3 kali	1 Kali	-	0%	3 Kali	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	3 kali	1 Kali	-	0%	3 Kali	60%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	-	0%	3 Kali	60%
		Jumlah Kajian Optimalisasi Aktualisasi Pancasila	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100%
		Jumlah Kajian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100%
		Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE	-	-	80 Orang	-	-		
		Jumlah Peserta Rakor PPWK	-	-	100 Orang	-	-		
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	-	-	2 Dokumen	7 Dokumen	350%	7 Dokumen	100%
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	-	27 Orang	27 Orang	100%	27 Orang	100%
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	1 Dokumen	-	0%		
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	1 Dokumen	-	0%		
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	50 Orang	-	0%		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	98,20 angka indeks	68 angka indeks	90.23 Indeks	132.69%	90.23 Indeks	128.9%
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	22808 laporan dan usulan	7000 Laporan dan Usulan	4497 Laporan dan USulan	64.24%	27305 Laporan dan Usulan	84.01%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%	-	7000 Laporan dan Usulan	-	0.00%	71.25	101.78%
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	154 Dokumen	122 DOkumen	44 Dokumen	19 Dokumen	43.18%	141 Dokumen	91.56%
		Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali	-	-	-			
		Jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	5 Konten	-	-		5 Konten	33.33%
		Jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	10 Konten	17 Konten	10 Konten	59%	20 Konten	45.45%
		Jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	11.987 orang	3820 Orang	1350 Orang	35.34%	13247 Orang	540.69%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada			100%	100%	100.00%	100%	100%
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	5 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%	40 Dokumen	800%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
		Jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang	0 Orang	-				
		Prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada		100%	-			100%	100%
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	432 Orang	188 Orang	35 Orang	19%	467 Orang	100%
		Prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	100%	-	-			
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%	-	-	-			
		jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik		50 Orang	50 Orang	-	0%	50 Orang	100%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik		32 Orang	55 Orang	35 Orang	70%	67 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatangan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		350 Orang	-	-		350 Orang	100%
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	5390 Orang	4451 Orang	100 Orang	-	0%	4451 Orang	58.58%
		jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	67 Orang	-	-	-	67 Orang	31.19%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	-	-	30 Paket	-	0%	-	-
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	49 Orang	-	-		49 Orang	28%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/ Pemilukada	30 event	65 Event	1 Event	-	0.00%	65 Eventr	216.67%
		Jumlah Peserta Studi Komparasi Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol	-		42 Orang	-	0.00%		
		Jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	-	3525 Orang		-		3525 Orang	100%
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	867 Laporan	255 Laporan	82 Laporan	45 Laporan	54.88%	300 Laporan	34.60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	5 kali	2 Kali	1 Kali	-	0%	3 Kali	60%
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	36 Dokumen	85.71%
		Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	217 dokumen	49 Dokumen	33 Dokumen	67.35%	250 Dokumen	43.10%
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	240 dokumen	18 dokumen	30 Dokumen	-	0.00%	5 Dokumen	2.08%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	60 indeks	65.05 Indeks	59 Indeks	65.05 Indeks	110.25%	65.05 Indeks	1008.42%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36%	54.22%	36%	54,22%	150.61%	54.22%	150.61%
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	127 Dokumen	157 Dokumen	29 Dokumen	14 Dokumen	48.28%	171 Dokumen	134.65%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 organisasi	8 Organisasi	-	-		8 Organisasi	36.37%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 organisasi	35 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	100.00%	45 Organisasi	83.33%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 organisasi	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		jumlah peserta ormas award	42 organisasi	30 Organisasi	-	-	-	30 Organisasi	71.43%
		jumlah peserta asistensi hibah	-	-	80 Orang	-	0%		
		jumlah monitoring hibah ormas	-	84 Laporan	60 Laporan	5 Laporan	8%	89 Laporan	100%
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	10 Dokumen	21 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen	180%	30 Dokumen	300%
		jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	280 orang	2400 orang	1000 Orang	900 Orang	90.00%	3100 Orang	1107.17%
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	430 Orang	895 Orang	500 Orang	-	0.00%	895 Orang	208.14%
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	895orang	500 Orang	-	0.00%	895 Orang	208.14%
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	660 Dokumen	257 Dokumen	85 Laporan	36 Laporan	42.35%	293 Dokumen	44.39%
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 Dokumen	254 Dokumen	84 Dokumen	36 Dokumen	42.86%	290 Dokumen	44.27%
		Jumlah pengukuran indeks kinerja Ormas dan jumlah peserta seminar Indeks kinerja	70 Ormas	229 Ormas	10 Ormas	-	0%	229 Ormas	327.14%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ormas							
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72 Indeks	83.86 Indeks	71,5 Indeks	83.86 Indeks	117.29%	83.86 indeks	116.47
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah konflik sosial yang berlatar belakang suku. agama. ras dan antar golongan	1 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	-	0%	0 Kejadian	200%
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	30 Dokumen	45 Dokumen	13 Dokumen		0%	45 Dokumen	150%
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	230 orang	-	-		230 Orang	100%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	1.410 orang	-	-		1410 Orang	148.42%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	615 orang	240 Orang	-	0%	615 Orang	96.09%
		Jumlah Laporan Timdu P4GN			11 Dokumen	-	0%		
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	6 konten	2 Konten	-	0.00%	6 Konten	27.27%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	15 konten	-		-			
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	800 Orang	220 Orang	80 Orang	20 Orang	25.00%	300 Orang	37.50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	40 dokumen	11 dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20.00%	12 dokumen	30%
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4250 Orang	9575 Orang	2000 Orang	1350 Orang	67.50%	10925 Orang	257.06%
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	32 kali	2 Kali	-	0.00%	122 Kali	329.73%
		Jumlah Peserta Diskusi Panel Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya			1950 Orang	1350 Orang	69.23%	1350 Orang	100%
		jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	16 Organisasi	13 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	18 Organisasi	112.5%
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia			160 Orang	-	0%		
		jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	550 orang	50 orang	80 Orang	-	0.00%	50 Orang	9.09%
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	3 LLporan	3 Laporan	-	0.00%	3 Laporan	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	3 kali	1 Kali	-	0%	3 Kali	60%
		Jumlah Laporan Kegiatan FGD Harmony Award		1 Kali	1 Kali	-	0%	1 Kali	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan FGD Harmony AwardIndeks Kota Toleran		1 Kali	1 Kali	-	0%	1 Kali	100%
		Jumlah Kajian Peningkatan Toleransi dan KUB		1 Kali	1 Kali	-	0%	1 Klai	100%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Kemampuan Analisa Inteligen Strategis Terhadap Gangguan Ipoleksosbudhankam	85%	78%	84%	95.45%	113.63%	95.45%	112.29%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi/ mogok bersifat kekerasan	21 Kejadian	2 Kejadian	22 Kejadian	0 Kejadian	0%	0 Kejadian	100%
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4060 Orang	2437 Orang	800 Orang	320 Orang	40%	2757	67.90%
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	42 kali	12 Kali	6 Kali	50%	48 Klai	38.09%
		Jumlah Fasilitasi Tim FKDM	-	-	7 Kali	-			
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang	-	-	-			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang	-	110 Orang	-	0.00%		
		Jumlah Laporan FKDM	-	12 Laporan	12 Dokumen	6 Kali	50.00%	18 Dokumen	100%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%	-	-	-			
		Jumlah Peserta FGD Pemantapan Isu Strategis	-	-	275 Orang	55 Orang	20%	55 Orang	100%
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2880 Orang	7675 Orang	2130 Orang	1577 Orang	74.04%	9252	321.25%
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok	-	-	-	-		
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	-	-	100%	100%	100.00%	100%	100%
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 Kali	5 Kali	3 Konten	3 Konten	100%	8 Konten	53.33%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	28 Kali	12 Kali	6 Kali	50%	34 Kali	23.611%
		Jumlah peserta FGD Kerawanan Sosial	-	-	180 Orang	-	0%		
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan	405 orang	4953 orang	1950 Orang	1350 Orang	69%	6303 Orang	1556.29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG							
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatas antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasma Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1903 Laporan		365 Laporan	183 Laporan	50%		
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	1096 Dokumen	365 Laporan	181 Laporan	49.59%	1098 Dokumen	60,16%
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	69 kali	11 Kali	2 Kali	18.18%	71 Kali	91.03%
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	6 Dokumen	50.00%		
		Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	43 kali	12 Kali	6 Kali	50.00%	49 Kali	62,82%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*, 2025*

B. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.072.012.600,00	Rp 8.376.714.222,00	Rp 3.350.324.123,00	36.93%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 116.745.000,00	Rp 6.373.400,00	Rp 1.135.700,00	0.97%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 50.941.000,00	Rp 586.600,00	Rp 0,00	0.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.672.000,00	Rp 1.602.600,00	Rp 0,00	0.00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 4.371.000,00	Rp 1.040.100,00	Rp 0,00	0.00%
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 2.782.000,00	Rp 1.068.600,00	Rp 936.000,00	33.64%
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.331.000,00	Rp 1.040.100,00	Rp 0,00	0.00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 674.000,00	Rp 113.000,00	Rp 103.700,00	15.39%
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 974.000,00	Rp 172.400,00	Rp 96.000,00	9.86%
10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 0,00	0.00%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.708.357.600,00	Rp 6.684.320.200,00	Rp 2.703.380.731,00	40.30%
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.407.044.600,00	Rp 6.407.044.600,00	Rp 2.608.540.731,00	40.71%
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 297.950.000,00	Rp 276.264.000,00	Rp 94.840.000,00	31.83%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 561.000,00	Rp 224.800,00	Rp 0,00	0.00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 2.353.400,00	Rp 674.400,00	Rp 0,00	0.00%
16	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 448.600,00	Rp 112.400,00	Rp 0,00	0.00%
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 32.659.800,00	Rp 2.900.000,00	Rp 900.000,00	2.76%
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 32.659.800,00	Rp 2.900.000,00	Rp 900.000,00	2.76%
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.103.253.200,00	Rp 663.601.180,00	Rp 209.803.456,00	19.02%
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.945.000,00	Rp 4.945.000,00	Rp 150.000,00	3.03%
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 62.009.000,00	Rp 24.572.090,00	Rp 1.678.000,00	2.71%
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 66.082.000,00	Rp 49.012.840,00	Rp 9.098.500,00	13.77%
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 15.781.000,00	Rp 9.507.250,00	Rp 142.000,00	0.90%
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.248.000,00	Rp 1.248.000,00	Rp 0,00	0.00%
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 100.000.000,00	Rp 47.110.000,00	Rp 30.265.255,00	30.27%
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 500.257.200,00	Rp 174.275.000,00	Rp 69.719.701,00	13.94%
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 352.931.000,00	Rp 352.931.000,00	Rp 98.750.000,00	27.98%
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 106.573.000,00	Rp 106.573.000,00	Rp 0,00	0.00%
29	Pengadaan Mebel	Rp 50.987.000,00	Rp 50.987.000,00	Rp 0,00	0.00%
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 55.586.000,00	Rp 55.586.000,00	Rp 0,00	0.00%
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 565.300.000,00	Rp 565.300.000,00	Rp 302.584.580,00	53.53%
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 275.920.000,00	Rp 275.920.000,00	Rp 230.284.610,00	83.46%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
33	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 289.380.000,00	Rp 289.380.000,00	Rp 72.299.970,00	25.00%
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 439.124.000,00	Rp 347.646.442,00	Rp 132.519.656,00	30.18%
35	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 39.604.000,00	Rp 35.955.397,00	Rp 14.275.000,00	36.04%
36	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 356.672.000,00	Rp 273.569.845,00	Rp 113.794.656,00	31.91%
37	Pemeliharaan Mebel	Rp 6.982.000,00	Rp 2.255.200,00	Rp 0,00	0.00%
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 35.866.000,00	Rp 35.866.000,00	Rp 4.450.000,00	12.41%
39	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 5.239.712.760,00	Rp 3.738.731.250,00	Rp 919.693.236,00	17.55%
40	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 5.239.712.760,00	Rp 3.738.731.250,00	Rp 919.693.236,00	17.55%
41	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.372.086.760,00	Rp 1.127.726.620,00	Rp 583.594.800,00	42.53%
42	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 415.913.000,00	Rp 172.559.280,00	Rp 66.813.150,00	16.06%
43	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 155.732.000,00	Rp 38.024.560,00	Rp 21.403.000,00	13.74%
44	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Rp 114.565.000,00	Rp 79.165.000,00	Rp 34.360.000,00	29.99%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
45	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 234.908.000,00	Rp 165.056.480,00	Rp 0,00	0.00%
46	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp 917.155.000,00	Rp 602.598.790,00	Rp 38.240.000,00	4.17%
47	Pembentukan Paskibraka	Rp 1.930.556.000,00	Rp 1.454.803.520,00	Rp 175.282.286,00	9.08%
48	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp 36.813.000,00	Rp 36.813.000,00	Rp 0,00	0.00%
49	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp 39.438.000,00	Rp 39.438.000,00	Rp 0,00	0.00%
50	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp 22.546.000,00	Rp 22.546.000,00	Rp 0,00	0.00%
51	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 6.684.208.880,00	Rp 5.520.035.780,00	Rp 5.036.760.880,00	75.36%
52	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 6.684.208.880,00	Rp 5.520.035.780,00	Rp 5.036.760.880,00	75.36%
53	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 1.307.194.000,00	Rp 743.324.090,00	Rp 409.172.000,00	31.30%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
54	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 4.582.460.000,00	Rp 4.582.460.000,00	Rp 4.582.460.000,00	100.00%
55	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 92.285.000,00	Rp 35.444.110,00	Rp 17.375.000,00	18.83%
56	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 186.013.880,00	Rp 158.807.580,00	Rp 27.753.880,00	14.92%
57	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 2.727.982.940,00	Rp 1.831.218.400,00	Rp 1.541.838.180,00	56.52%
58	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 2.727.982.940,00	Rp 1.831.218.400,00	Rp 1.541.838.180,00	56.52%
59	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 1.567.368.840,00	Rp 1.537.368.840,00	Rp 1.429.236.840,00	91.19%
60	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 215.000.000,00	Rp 66.000.000,00	Rp 34.729.500,00	16.15%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
61	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 718.870.260,00	Rp 37.260.000,00	Rp 3.185.000,00	0.44%
62	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 226.743.840,00	Rp 190.589.560,00	Rp 74.686.840,00	32.94%
63	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 2.967.424.240,00	Rp 2.248.371.240,00	Rp 2.248.371.240,00	75.77%
64	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 2.967.424.240,00	Rp 2.248.371.240,00	Rp 2.248.371.240,00	75.77%
65	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 229.000.000,00	Rp 67.463.340,00	Rp 0,00	0.00%
66	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 65.787.400,00	Rp 33.590.760,00	Rp 20.637.400,00	31.37%
67	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 2.523.491.840,00	Rp 2.227.733.840,00	Rp 2.227.733.840,00	88.28%
68	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Rp 149.145.000,00	Rp 48.845.740,00	Rp 0,00	0.00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Kedua Setelah Efisiensi	Realisasi	%
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
69	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.921.606.811,00	Rp 2.705.798.383,00	Rp 1.263.494.118,00	32.22%
70	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.921.606.811,00	Rp 2.705.798.383,00	Rp 1.263.494.118,00	32.22%
71	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 1.073.453.291,00	Rp 407.057.423,0	Rp 190.776.076,00	17.77%
72	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 903.203.520,00	Rp 770.816.360,00	Rp 472.135.520,00	52.27%
73	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 275.050.000,00	Rp 140.150.000,00	Rp 65.457.522,00	23.80%
74	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.669.900.000,00	Rp 1.387.774.600,00	Rp 535.125.000,00	32.04%
T O T A L		Rp 30.612.948.231,00	Rp 24.775.062.485,00	Rp 14.360.481.777,00	46,91%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan dan 57 sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebesar Rp 30.612.948.231,00 (tiga puluh milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 14.360.481.777,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) - atau sekitar 46,91% (empat puluh enam koma sembilan satu persen). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 16.252.466.454,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) - atau sekitar 53,09% (lima puluh tiga koma nol sembilan persen). Serapan anggaran di bawah lima puluh persen selama semester pertama tahun 2025 tersebut lebih dikarenakan upaya tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 - dimana pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dikenakan efisiensi sebesar Rp 5.837.885.746,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) - atau sekitar 19,07% (sembilan belas koma nol tujuh persen) sehingga total pagu yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang setelah perlakuan efisiensi adalah Rp 24.775.062.485,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Dari total pagu efisinsi tersebut maka serapan anggaran pada triwulan kedua yang sebesar Rp 14.360.481.777,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) - adalah sekitar 57,96% (lima puluh tujuh koma sembilan enam persen).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sub unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	95.18	89,72	89,73	89,74	
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	83.63	84,34	84,35	84,36	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tujuan *"meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila"* dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*".
b. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah *Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan* dengan indikator sasaran "*Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*" (selanjutnya disebut IP2WK).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
   i. perlunya upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Kota Semarang;
   ii. perlunya upaya mendorong dan memfasilitasi keterlibatan semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu maupun pilkada;
   iii. perlunya upaya untuk mendorong kemandirian ormas dalam hal pendanaan kegiatan;
   iv. perlunya upaya yang masif dan integratif untuk mencegah dan mengantisipasi kejadian kenakalan remaja yang mengarah pada aksi kriminalitas.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi OPD

   Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik sepanjang tahun 2025 meliputi:

   a) Kurangnya sosialisasi terkait komponen-komponen pengungkit Indeks Demokrasi ke stakeholder terkait, misalnya terkait penganggaran di bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan;
   b) Pertisipasi penyandang disabilitas dalam pemilhan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tergolong rendah, yaitu 40,19%;
   c) Kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang belum berkelanjutan sehingga kurang berdampak ke masyarakat luas;
   d) Meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada aksi kriminalitas.
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

   Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera".

   Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan

dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, *nilai investasi yang semakin besar*, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

a) Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik-praktik demokrasi secara cerdas dan santun;
b) Peningkatan partisipasi masyarakat daolam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan - salah satunya pada momentum pemilu dan pilkada;
c) Peningkatan kemandirian organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga peran ormas sebagai mitra kerja pemerintah dapat lebih berjalan maksimal dan dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh anggota masyarakat;
d) Perilaku kenakalan remaja yang sudah mengarah pada tindak kriminal;

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

a) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan intansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
b) Jalinan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
c) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat dan menyebarkan pesan edukasi yang positif;
d) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.

5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2024 :

a) *Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi ke stakeholder terkait tentang komposit-komposit Indeks Demokrasi yang dapat diintervensi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas secara eksklusif serta memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat;
3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang berfokus pada keberlanjutan program dan kegiatan;
4. Untuk meminimalisir kenakalan remaja yang kini justru mengarah ke aksi kriminalitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melakukan inovasi pendidikan wawasan kebangsaaan yang lebih menarik generasi muda, yaitu dengan mengkombinasikan pendidikan secara indoor dan outdoor, misalnya dengan event Fun Game Kebangsaan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Semarang guna membentuk kader-kader bela negara di wilayah masing-masing yang diwadahi dengan kegiatan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dengan kegiatan dimaksud, diharapkan para kader dapat menyebarluaskan nilai-nilai bela negara di wilayahnya masing-masing dan memperkuat peran keluarga sebagai pondasi awal pembentukan karakter generasi muda.

b) *Catatan Strategis*

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2025 dapat disampaikan sbb:

1. Perlu upaya-upaya inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, terutama untuk:
   - Meningkatkan kesediaan, kesadaran, dan kemampuan warga masyarakat untuk melakukan praktik-praktik demokrasi secara santun dan cerdas;
   - Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi praktis seperti pemilu dan pilkada;
   - Meningkatkan kemandirian ormas;
   - Menanggulangi aksi kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal;
2. Perubahan pola pelayanan selama new normal membutuhkan berbagai penyesuaian dengan lebih meningkatkan penggunaaan teknologi informasi;

3. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah;
4. Perlunya peningkatan pelibatan stakeholder terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah – baik dengan penyelenggaran Pemilu maupun dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dengan kemunculan sikap intoleransi.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Table 2. 4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Semarang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	*UNSUR PEMERINTAHAN UMUM*				30.612.948.231					27.521.387.863	
8 01 01	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*				30.612.948.231					27.521.387.863	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	9.072.012.6000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	7.550.572.223	
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%		
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	*8 dok*	*116.745.000*	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	*8 dok*	*6.373.400*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	50.941.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	586.600	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	3 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	3 dok		
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	2 dok			Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	2 dok		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.672.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1.602.600	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.371.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.040.100	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok		
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	2.782.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1.068.600	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Dokumen DPA SKPD								
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok		
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.331.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.040.100	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok		
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	674.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	113.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	974.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	172.400	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok		
2.01.0 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	2 dok	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	2 dok	750.000	
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	6.708.357.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	0	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/ bulan	6.407.044.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ bulan	5.912.261.7330	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	297.950.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	276.264.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pelaksanaan Tugas					Administrasi Pelaksanaan Tugas			
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	224.800	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok			Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok		
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.353.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	674.400	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok		
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	112.400	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	32.659.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	2.900.000	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	32.659.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	2.900.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	60 orang			Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	60 orang		
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.103.253.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	438.702.8480	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.945.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.945.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis		
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	62.009.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.572.090	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peralatan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			rumah tangga yang disediakan								
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.082.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.844.540	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis			Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.781.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.507.250	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis		
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	1.248.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dok	56.100	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku			Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	0 buku		
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50.914.068	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang			Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang		
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	50 laporan	500.257.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	199.275.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Konsultasi SKPD								
		Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan		
2.0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dok	352.931.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	100.588.800	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis			Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis		
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	106.573.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	112.200	
2.0705	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.987.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	56.1000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	2 Jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	0 Jenis		
2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan	2 Unit	55.586.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0 Unit	56.100	Indikator

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Mesin Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan			Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 jenis		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	565.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	565.300.000	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.920.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.920.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen		
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.380.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.380.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen		
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	439.124.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	347.646.4420	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.604.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.397	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	356.672.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	273.569.845	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit		
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	6.982.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.255.200	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Unit		
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.886.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.886.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 indeks	5.239.712.760	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 indeks	4.121.600.840	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	5.239.712.760	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	4.121.600.840	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dok	1.372.086.760		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dok	1.317.221.620	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Mewarnai	200 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Mewarnai	200 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	975 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	975 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	200 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	200 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	975 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	975 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	150 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	150 orang		Fun Game
		Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 Forum			Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 Forum		
		Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan	1 Kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan	1 kegiatan		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dokumen	415.913.000	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	10 dokumen	318.535.030	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan	40 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan	40 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial					Kebangsaan Melalui Media Sosial			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kemah Kesadaran Bela Negara	100 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kemah Kesadaran Bela Negara	100 Orang		
			Jumlah Peserta FGD Pendidikan Kesadaran Bela Negara					Jumlah Peserta FGD Pendidikan Kesadaran Bela Negara	540 Orang		
			Jumlah Peserta Rembug Mahasiswa	100 Orang				Jumlah PEserta Rembug Mahasiswa	100 Orang		
			Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	100 Orang				Jumlah Peserta Rakor PKBN	0 Orang		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang			Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang	38.024.560	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang		
		Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	500 Orang			Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	500 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	500 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	500 Orang		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 orang	114.565.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 orang	126.565.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta Revitalisasi Kampung Pancasila	-			Kota Semarang	Jumlah peserta Revitalisasi Kampung Pancasila	80 Orang		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	240 orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	240 orang		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	5 Laporan	234.908.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	4 Laporan	165.056.480	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	1 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE	80 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE	80 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Rakor PPWK	100 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Rakor PPWK	100 Orang		
8.01.02.2.01.05	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	2 Dokumen	917.155.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	2 Dokumen	602.597.630	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 orang	1.930.556.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 orang	1.454.803.520	
8.01.02.2.01.09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	36.813.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	36.813.000	
8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	39.438.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	39.438.000	
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 orang	22.546.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 orang	22.546.000	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	68 angka indeks	6.684.208.880	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	68 angka indeks	7.348.550.177	
			Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen				Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan	7.000 laporan dan usulan	6.684.208.880	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	7.000 laporan dan usulan	7.348.550.1770	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		penyelenggaraan pemerintahan			
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	1.307.194.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	882.948.840	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah Hibah Pilkada	1 Organisasi			Kota Semarang	jumlah Hibah Pilkada	1 Organisasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	3820 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	3150 orang		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	4.582.460.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 dokumen	6.109.946.667	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			APBD Kota Semarang								
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	188 orang	92.285.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95 orang	35.444.110	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	30 orang			Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	30 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Pesertak Bimtek Bantuan	55 Orang			Kota Semarang	Jumlah Pesertak Bimtek Bantuan	55 Orang		
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	100 orang	516.256.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	135 orang	179.402.980	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	2 event			Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	2 event		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	30 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	30 Paket		
		Kota Semarang	jumlah peserta studi komparasi peningkatan bantuan keuangan parpol	45 orang			Kota Semarang	jumlah peserta studi komparasi peningkatan bantuan keuangan parpol	45 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta FGD Peningkatan IDI Kota Semarang	89 Orang			Kota Semarang	Jumlah peserta FGD Peningkatan IDI Kota Semarang	89 Orang		
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	82 Laporan	186.013.880	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	76 Laporan	140.807.580	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok			Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	6 dok		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	54 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	54 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	30 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	30 dok		
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	59 Indeks		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	59 Indeks	2.602.112.010	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	36%	2.695.909.260	Perumusan Kebijakan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	36%	2.602.112.010	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 dok	1.551.332.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 dok	1.537.368.840	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Bimtek dan Asistensi	80 Orang			Kota Semarang	Jumlah Bimtek dan Asistensi	80 Orang		
		Kota Semarang	jumlah laporan monitoring dan evaluasi	60 Lapora			Kota Semarang	jumlah laporan monitoring dan evaluasi	60 Lapora		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ		
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran	5 dok	215.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	5 dok	211.500.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			
		Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	10 organisasi			Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi Kegiatan Ormas	10 Organsasi		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	718.870.260	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	158.203.610	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	500 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	150 Orang		Ormas Award dan Festival Budaya
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	85 laporan	210.707.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	85 laporan	695.039.560	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Tim Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas	0 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Tim Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas	7 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Ormas	0 Buku			Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Ormas	1 Buku		
		Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok			Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok		
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	2.936.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	2.927.062.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
						SOSIAL, DAN BUDAYA					
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.936.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.927.062.800	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	13 Dokumen	229.000.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	147.786.100	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	2 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	2 Konten		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	1 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	1 Konten		
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Timdu	11 Kali			Kota Semarang	Jumlah Laporan Timdu	6 Kali		
		Kota Semarang	jumlah peserta workshop P4GN	0 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	520 orang		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 orang	65.787.400	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 orang	197.990.760	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Penguatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	0 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Penguatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	0 Orang		
		Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	5 Dok			Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	3 Dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 orang	2.507.455.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2360 orang	2.523.440.200	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	80 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta Diskusi Panel Ekososbud	1950 Orang			Kota Semarang	Jumlah peserta Diskusi Panel Ekososbud	1950 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta Forum Komunikasi Penurunan Stunting Lintas Agama	80 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta Forum Komunikasi Penurunan Stunting Lintas Agama	80 orang		
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	5 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	5 organ		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	Jumlah peserta FGD Cinta Produk Indonesia	80 Orang			Kota Semarang	Jumlah peserta FGD Cinta Produk Indonesia	490 Orang		
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	149.145.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	48.845.740	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	0 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	55 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	65 Orang		
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan	84 prosentase	3.826.035.211	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84 Persen	2.971.489.813	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		ipolkesosbudhankam			KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	22 Kej	3.826.035.211	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	22 Kej	2.971.489.813	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	1.073.453.291	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	577.276.543	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	0 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kota Semarang	Jumlah peserta Cipta Kondisi Wilayah	100 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	100 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	12 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM			
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	2130 orang	903.203.520	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2850 orang	930.491.110	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Konflik di Daerah			Konflik di Daerah					
		Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	12 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	1950 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	1950 orang		
		Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen			Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kerawanan/ FGD	180 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kerawanan/ FGD	900 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten		
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	365 laporan	275.050.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	365 laporan	140.150.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	4 Kali		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.669.900.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.323.569.160	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan	12 Kali			Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Daerah Kota Semarang								

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 3. 1
Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"	Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Namun saat ini RKP Nasional Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 belum tersusun, sehingga menggunakan tema RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
    a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
    b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
    c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
    d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
    e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
    a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
    b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
    c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
    d) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
    e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
    f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
    a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
    b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
    a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocat General;
    b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
    c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
    d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3.	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
    e. Penanganan kawasan kumuh
    f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
    g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
    b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
    c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
    d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
    e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
    b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
    c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
    d. Peningkatan sarana perlindungan sosial
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik

lainnya

c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.80 – 6.5 %
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85.80
c. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3.74 %
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5.61 – 5.31 %

3.2. Tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025, yaitu "*meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila*" dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran "Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan" (selanjutnya disebut IP2WK);

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	89,73
SASARAN :		indeks	84,35

Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2025 yaitu :

✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 6 (Enam) program dengan 12 (Dua Belas) kegiatan, 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan rutin dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1. Pengadaan Mebel
5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.3. Pemeliharaan Mebel
7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan aparatur
1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
1.6. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
1.7. Pembentukan paskibraka
1.8. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
1.9. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
1.10. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
      1.3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
      1.4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      1.1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      1.3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      1.4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      1.3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      1.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
      1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
      1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
      1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
      1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam MUSPIDA Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan) generasi muda (pelajar maupun mahasiswa) serta aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun secara khusus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" dengan indikator tujuan adalah "Indeks Demokrasi".
3. Keserasian dan keterpaduan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan/ pembangunan dengan rencana awal kebutuhan anggaran sebesar Rp 27.521.387.862,85 (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua koma delapan lima rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				27.521.387.863				20.877.375.000
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				27.521.387.863				20.877.375.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	7.550.572.223	APBD Kota Semarang		100%	7.473.540.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
8.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	8 dok	6.373.400	APBD Kota Semarang		11 dok	60.400.000
8.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	5 dok	586.600	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		3.000.000
		Jumlah Dokumen perencanaan	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		2 dok	
		Jumlah dokumen RTP	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.602.600	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.040.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.068.600	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Semarang	1 dok	1.040.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok	113.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	1.900.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dok	172.400	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	1.900.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01.01.02.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	2 dokumen	750.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	50.000.000
8 01 01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	6.189.537.333	APBD Kota Semarang		100%	6.161.648.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		4 dok	
8 01 01.02.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	35 orang/bulan	5.912.261.733	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	35 orang/bulan	5.574.110.000
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
8 01 01.02.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	276.264.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Dokumen	558.000.000
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
8 01 01.02.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	224.800	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Laporan	10.000.000
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	674.400	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Laporan	12.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dok	112.400	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	7.538.000
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
8 01 01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	100%	2.900.000	APBD Kota Semarang		100%	40.000.000
8 01 01.02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	60 orang	2.900.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	55 orang	40.000.000
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Semarang	60 orang		APBD Kota Semarang		55 orang	
8 01 01.002.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	438.702.8480	APBD Kota Semarang		100%	556.377.000
8 01 01.02.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	4.945.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	5.000.000
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	
8 01 01.02.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	24.572.090	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	10.000.000
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	
8 01 01.02.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	48.844.540	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	60.000.000
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	20 Jenis		APBD Kota Semarang		20 Jenis	
8 01 01.02.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	9.507.250	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Paket	30.000.000
		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	
8 01 01.02.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	0 Dok	56.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Dok	1.377.000
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	0 buku		APBD Kota Semarang		10 buku	
8 01 01.02.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	50 Laporan	50.914.068	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 Laporan	50.000.000
		Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang		APBD Kota Semarang		1000 orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8 01 01.02.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	50 laporan	199.275.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 laporan	200.000.000
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	100 kegiatan		APBD Kota Semarang		100 kegiatan	
8 01 01.02.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 dok	100.588.800	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	5 dok	200.000.000
		Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	
8 01 01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	112.200	APBD Kota Semarang		100%	79.906.000
8 01 01.02.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	0 Unit	56.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 Unit	50.000.000
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	Kota Semarang	0 Jenis		APBD Kota Semarang		2 Jenis	
8 01 01.02.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	0 Unit	56.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 Unit	29.906.000
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	0 jenis		APBD Kota Semarang		2 jenis	
8 01 01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	565.300.000	APBD Kota Semarang		100%	183.170.000
8 01 01.02.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	275.920.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Laporan	48.170.000
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
8 01 01.02.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	289.380.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Laporan	135.000.000
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
8 01 01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	347.646.442	APBD Kota Semarang		100%	392.039.000
8 01 01.02.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	35.955.397	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Unit	55.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit		APBD Kota Semarang		1 Unit	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8 01 01.02.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	22 Unit	273.569.845	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	22 Unit	265.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	22 Unit		APBD Kota Semarang		22 Unit	
8 01 01.02.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	10 Unit	2.255.200	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Unit	12.039.000
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	10 Unit		APBD Kota Semarang		10 Unit	
8 01 01.02.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	50 Unit	35.866.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 Unit	60.000.000
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Semarang	50 unit		APBD Kota Semarang		50 unit	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	2.30 indeks	4.121.600.840	APBD Kota Semarang		2.40 Indeks	4.923.059.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	Kota Semarang	2 Kejadian	4.121.600.840	APBD Kota Semarang		1 Kejadian	4.923.059.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	28 Dok	1.317.221.620	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.020.000.000
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	975 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		75 orang	
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		45 orang	
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	Kota Semarang	975 orang		APBD Kota Semarang		45 orang	
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	300 orang		APBD Kota Semarang		30 orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Hibah yang disalurkan	Kota Semarang	1 Forum		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih	Kota Semarang	1 Kegiatan		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Lomba Mewarnai	Kota Semarang	200 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	10 Dok	318.535.030	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	28 Dok	420.000.000
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Luar Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Peserta event pembauran kebangsaan	Luar Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	Kota Semarang	40 Kali		APBD Kota Semarang		75 kali	
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		11 Kali	
		Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		Jumlah peserta Rembug Mahasiswa Semarang Semakin Hebat	Kota Semarang	100 Orang					
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	1500 Orang	38.024.560	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1527 Orang	469.059.000
		jumlah Kampung Tematik Pancasila	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		6 Lokasi	
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	Kota Semarang	500 0rang		APBD Kota Semarang		500 orang	
		Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	Kota Semarang	500 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	Kota Semarang	500 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kota Semarang	240 orang	126.565.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	180 orang	534.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	6 forum	
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	240 orang		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	210 Orang	
		Jumlah peserta revitalisasi Kampung Pancasila	Kota Semarang	80 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	4 Laporan	165.056.480	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	4 Laporan	210.000.000
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	1 Kali	
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	12 dok	
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	1 Kali	
		Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE	Kota Semarang	80 Orang		APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Peserta Rakor PPWK	Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang	-		
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purna paskibraka	Kota Semarang	2 dokumen	602.597.630	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 dokumen	100.000.000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Semarang	27 orang	1.454.803.520	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	27 orang	2.000.000.000
8.01.02.2.01.09	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	1 dokumen	36.813.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dokumen	70.000.000
8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	1 dokumen	39.438.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dokumen	70.000.000
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	50 orang	22.546.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 orang	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	Kota Semarang	68 angka indeks	7.348.550.177	APBD Kota Semarang		70angka indeks	1.390.000.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Semarang	7000 laporan dan usulan	7.348.550.177	APBD Kota Semarang		7500 laporan dan usulan -	1.390.000.000
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	41 Dokumen	882.948.840	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		400.000.000
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		3 konten	
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	Kota Semarang	10 Konten		APBD Kota Semarang		10 Konten	
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	Kota Semarang	3150 orang		APBD Kota Semarang		400 orang	
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		20 paket	
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		2 kali	
		Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat	Kota Semarang	1 Organisasi		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	10 Dokumen	6.109.946.667	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		90.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		40 Orang	
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100 %	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	95 orang	35.444.110	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		500.000.000
		Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	Kota Semarang	30 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik	Kota Semarang	55 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	135 orang	179.402.980	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		30.000.000
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/ Pemilukada	Kota Semarang	2 Event		APBD Kota Semarang			
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang	0 Paket		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Studi Komparasi Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol	Kota Semarang	0 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah peserta FGD Peningkatan IDI Kota Semarang	Kota Semarang	89 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Semarang	76 Laporan		APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		310.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/ Pemilukada	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	Kota Semarang	12 dok		APBD Kota Semarang		10 Dok	
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	Kota Semarang	54 dok		APBD Kota Semarang		120 dokumen	
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Semarang	30 dokumen		APBD Kota Semarang			
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	Kota Semarang	59 Indeks	2.602.112.0100	APBD Kota Semarang		60 Indeks	1.951.612.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	Kota Semarang	36%	2.602.112.010	APBD Kota Semarang		36%	1.951.612.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	29 dok	1.537.368.840	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.360.000.000
		jumlah peserta asistensi hibah	Kota Semarang	80 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	Kota Semarang					8 organisasi	
		Jumlah Ormas yang diberdayakan melalui swakelola	Kota Semarang					2 organisasi	
		jumlah peserta ormas award	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		15 organisasi	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah peserta ormas expo	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Monitoring Hibah	Kota Semarang	60 Laporan					
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	Kota Semarang	10 Organisasi		APBD Kota Semarang		10 Organisasi	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	5 dok	211.500.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		10.000.000
		Jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	Kota Semarang	10 organisasii		APBD Kota Semarang		10 organisasi	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	150 orang	158.203.610	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		100.000.000
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	Kota Semarang	150 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	85 Laporan	695.039.560	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		481.612.000
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	Kota Semarang	120 Dok		APBD Kota Semarang		175 Dok	
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	Kota Semarang	10 ormas		APBD Kota Semarang		10 ormas	
		Jumlah Buku Profil Ormas	Kota Semarang	1 Buku		APBD Kota Semarang			
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	Kota Semarang	71,5 indeks	2.927.062.800	APBD Kota Semarang		72 indeks	1.503.079.000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	Kota Semarang	1 Kej	2.927.062.800	APBD Kota Semarang		1 Kej	1.503.079.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	11 Dokumen	147.786.100	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		255.000.000
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	Kota Semarang	2 Konten		APBD Kota Semarang		5 konten	
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		2 konten	
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	Kota Semarang	520 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Laporan Timdu P4GN	Kota Semarang	11 Dokumen		APBD Kota Semarang			
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		50 orang	
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 orang	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	800 orang	197.990.760	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		103.079.000
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	Kota Semarang	5 Dok		APBD Kota Semarang		6 Dok	
		Jumlah Peserta Penguatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	800 Orang					
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	2360 orang	2.523.440.200	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.115.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peserta Diskusi Panel Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	1950 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	Kota Semarang	80 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	Kota Semarang	1 kali		APBD Kota Semarang		1 kali	
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	490 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	Kota Semarang	5 organisasi		APBD Kota Semarang		2 organisasi	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	3 Laporan	48.845.740	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		30.000.000
		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang			
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Kota Semarang	84 %	2.971.489.813	APBD Kota Semarang		85%	3.693.585.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	Kota Semarang	22 Kejadian	2.971.489.813	APBD Kota Semarang		21 kejadian	3.693.585.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	800 orang	577.279.5431	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.175.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	Yogyakarta	0 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah Peserta FGD Pemantapan Isu Strategis	Kota Semarang	545 orang					
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100%	
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	
		Jumlah Laporan FKDM	Kota Semarang	12 Dokumen		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKDM	Kota Semarang	7 Kali		APBD Kota Semarang			
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	2850 orang	930.491.110	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.445.000.000
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		2 Kelompok	
		Jumlah peserta FGD Kerawanan Sosial	Kota Semarang	180 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan	Kota Semarang	1950 orang		APBD Kota Semarang		750 orang	
		Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG							
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	Kota Semarang	3 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Kota Semarang	365 laporan	140.150.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		500.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	Kota Semarang	365 Dokumen		APBD Kota Semarang		365 Dokumen	
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	Kota Semarang	11 Kali		APBD Kota Semarang		12 Kali	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen	1.669.900.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		573.585.000
		jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		18 Kali	

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu semester ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun point-point yang perlu ditekankan dalam perencanaan program dan kegiatan mendatang, antara lain:

1. Dibutuhkan upaya-upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke stakeholder terkait tentang komposit-komposit Indeks Demokrasi yang dapat diintervensi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Dibutuhkan gerakan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas secara eksklusif serta memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat;
3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang berfokus pada keberlanjutan program dan kegiatan;
4. Dibutuhkan upaya yang lebih inovatif guna meminimalisir kenakalan remaja yang kini justru mengarah ke aksi kriminalitas.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang;
4. Peranan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan Perubahan APBD;
6. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025;
7. Dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
8. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001